

**PERATURAN DAERAH  
KOTA CIMAHI NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Cihanjuang, Cimahi 40513

Website : [www.cimahikota.go.id](http://www.cimahikota.go.id)

Telp. (022)6654274, 6641931



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN ANGGARAN 2022**



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 273);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 286);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI  
dan  
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar :
  - a. rekapitulasi piutang daerah;
  - b. rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - c. rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - d. penyertaan modal (investasi) daerah;

- e. rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- f. rekapitulasi aset tetap;
- g. rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- h. rekapitulasi aset lainnya;
- i. dana cadangan daerah;
- j. kewajiban jangka pendek;
- k. kewajiban jangka panjang;
- l. sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- m. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang belum diaudit oleh akuntan publik.

### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Pendapatan	Rp1.520.135.560.503,11	
Belanja	Rp1.481.512.704.849,00	
Surplus/defisit		Rp38.622.855.654,11
Pembiayaan		
Penerimaan	Rp270.898.017.186,53	
Pengeluaran	Rp855.508.220,00	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		Rp308.665.364.620,64

### Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp67.700.176.498,89) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.587.835.737.002,00
  - 2. Realisasi Rp1.520.135.560.503,11
  - Selisih lebih/ (kurang) (Rp67.700.176.498,89)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp375.065.444.494,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.856.578.149.343,00



2. Realisasi	Rp1.481.512.704.849,00
Selisih lebih/ (kurang)	(Rp375.065.444.494,00)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp307.365.267.995,11 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	(Rp268.742.412.341,00)
2. Realisasi	Rp38.622.855.654,11
Selisih lebih/ (kurang)	Rp307.365.267.995,11
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp274.203.491,47) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp271.172.220.678,00
2. Realisasi	Rp270.898.017.186,53
Selisih lebih/ (kurang)	(Rp274.203.491,47)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp1.574.300.117,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp2.429.808.337,00
2. Realisasi	Rp855.508.220,00
Selisih lebih/ (kurang)	(Rp1.574.300.117,00)
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp1.300.096.625,53 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp268.742.412.341,00
2. Realisasi	Rp270.042.508.966,53
Selisih lebih/ (kurang)	Rp1.300.096.625,53

#### Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 271.172.220.677,53
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun Berjalan	Rp 270.898.017.186,53
c. Sisa Lebih/Kurang Tahun Berjalan	Rp 308.665.364.620,64
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp308.665.364.620,64

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp2.937.388.102.759,22
b. Jumlah kewajiban	Rp21.363.885.165,17
c. Jumlah ekuitas	Rp2.916.024.217.594,05

#### Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.545.373.383.520,29
b. Beban	Rp1.330.843.106.922,38
c. Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp214.530.276.597,91
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp5.130.797.753,00)
e. Pos Luar Biasa	(Rp209.399.478.844,91)
f. Surplus/Defisit-Laporan Operasional	Rp199.662.829.176,91

#### Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp 270.908.452.653,53
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 284.630.437.112,11
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	(Rp246.007.581.458,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp855.508.220,00)
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp 37.841.128,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp 308.713.641.215,64

#### Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal 31 Desember 2020	Rp2.711.528.785.611,89
b. Surplus/Defisit-Laporan Operasional	Rp199.662.829.176,91
c. Rencana Kerja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00
d. Total Koreksi	Rp 4.832.602.805,25
e. Ekuitas Akhir 31 Desember 2021	Rp2.916.024.217.594,05

#### Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang di klasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
  2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan Laporan (Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.


#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT  
(4/136/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD Tahun 2021 disusunlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 903/Kep.455-BPKAD/2022  
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI  
KOTA CIMAHI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);





21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelematan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelematan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Wali Kota Cimahi Nomor 903/2827/BPKAD tanggal 19 Juli 2022 hal Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
**KESATU** : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Anggaran Pendapatan dan

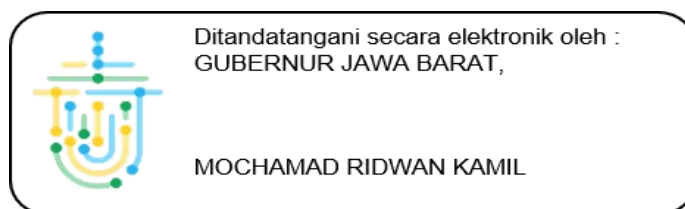


Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

- KEDUA** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Wali Kota Cimahi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam hal Wali Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak dapat diberikan nomor register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 8 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,



5E11B37203

## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 903/Kep.455-BPKAD/2022

TANGGAL : 8 Agustus 2022

TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHI TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi dengan pagu anggaran dalam APBD, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan peraturan daerah Kota Cimahi dengan APBD, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi dengan APBD.



Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan pagu anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021; dan
3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

## B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi legalitas atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cimahi menunjukkan ketidakpatuhan penyampaian sesuai dengan pasal 196 ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### a. Pendapatan Daerah

Realisasi total Pendapatan Daerah sebesar Rp1.520.135.560.503,11 atau 95,74% dari anggaran sebesar Rp1.587.835.737.002,00. Realisasi Pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp62.139.100.603,20 atau 4,26% di bandingkan realisasi Tahun



5E11B37203

Anggaran 2020. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud memiliki rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp405.104.991.553,11 atau 116,87% dari anggaran sebesar Rp346.622.143.134,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp29.417.748.874,20 atau 7,83% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020. Adapun rincian Anggaran dan realisasi PAD tersebut, terdiri atas:

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp179.891.802.692,00 atau 117,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp152.786.878.291,00. Dengan demikian, capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak menunjukkan konsistensi antara realisasi anggaran dengan perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 meningkat dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.954.564.793,00 atau 13,18%. Hal lebih dikarenakan pengaruh kebijakan pemerintah pusat yang mulai melonggarkan kegiatan masyarakat sehingga kegiatan ekonomi pun mulai menggeliat kembali.

Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- (1) Menetapkan target pajak daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah di Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Menetapkan prognosis laporan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah semester pertama serta prognosis enam (6) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai secara



tepat untuk setiap rincian objek pendapatan Pajak Daerah;

- (3) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/pemungutan pajak daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi; dan
- (4) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2017	116.923.551.744,00	165.391.683.082,00	141,45
2018	132.108.046.123,69	134.770.330.583,00	102,02
2019	161.488.910.896,42	163.136.977.065,00	101,02
2020	136.545.238.041,00	158.937.237.899,00	116,40
2021	152.786.878.291,00	179.891.802.692,00	117,74

#### b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp 11.548.482.640,00 atau 101,26% di atas target yang dianggarkan sebesar Rp11.404.826.000,00. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak menunjukkan konsistensi antara realisasi anggaran dengan perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp3.695.167.882,00 atau 24,24% dibandingkan realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.243.650.522,00. Penurunan ini lebih dikarenakan adanya penurunan pada Retribusi Perizinan Tertentu diantaranya Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pada realisasi Pendapatan Retribusi Daerah ini, terdapat beberapa SKPD yang realisasinya jauh di atas target yang dianggarkan dalam APBD antara lain:

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi sebesar Rp2.154.402.900,00 atau 113,38% dari anggaran sebesar Rp1.900.000.000,00;



- (2) Dinas Perhubungan dengan realisasi sebesar Rp1.529.391.040,00 atau 118,69% dari anggaran sebesar Rp1.288.475.000,00;
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan realisasi sebesar Rp1.552.574.234,00 atau 110,89% dari anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00; dan
- (4) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan realisasi sebesar Rp1.710.256.225,00 atau 108,78% dari anggaran sebesar Rp1.572.095.500,00.

Selain realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang jauh melampaui target, terdapat pula beberapa SKPD yang realisasinya jauh di bawah target yang dianggarkan dalam APBD antara lain:

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar Rp3.217.740.950,00 atau 84,92% dari anggaran sebesar Rp3.788.880.000,00; dan
- (2) Dinas Tenaga Kerja dengan realisasi sebesar Rp583.770.000,00 atau 77,83% dari anggaran sebesar Rp750.000.000,00.

Capaian realisasi yang relatif jauh diatas dan dibawah target yang dianggarkan dalam APBD dapat disebabkan oleh perencanaan target anggaran pendapatan retribusi daerah pada beberapa rincian objek pendapatan retribusi daerah terlalu rendah atau pun terlalu tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi capaian realisasi yang jauh dari target yang dianggarkan dalam APBD.

Memperhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah antara lain:

- (1) Menetapan target pendapatan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah di Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang akurat; dan
- (2) Menetapkan prognosis laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama serta prognosis enam (6) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah.





Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2017	9.354.664.440,00	10.239.610.285,00	109,46
2018	13.042.067.600,00	12.220.530.827,00	93,70
2019	14.585.901.970,86	15.832.320.921,00	108,55
2020	14.825.308.328,71	15.243.650.522,00	102,82
2021	11.404.826.000,00	11.548.482.640,00	101,26

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 telah mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp9.956.960.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.956.960.000,00. Dengan demikian persentase capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 menunjukkan konsistensi antara realisasi anggaran dengan perencanaan anggaran.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp178.880.000,00 atau 1,83% dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 sebesar Rp9.778.080.000,00.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp203.707.746.221,11 atau 118,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp172.473.478.843,00. Dengan demikian persentase capaian realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 tidak menunjukkan konsistensi antara realisasi anggaran dengan perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp11.979.471.963,20 atau 6,25% dari realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun 2020 sebesar Rp191.728.274.257,91. Peningkatan dikarenakan atas Jasa Giro dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dibandingkan pada Tahun Anggaran 2020.

Kurang optimalnya capaian realisasi rincian objek pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah ini disebabkan oleh penetapan perencanaan target pendapatan rincian objek pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yang terlalu rendah, sehingga capaian realisasinya jauh melampaui target.



Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:

- (1) Menetapkan target Lain-lain Pendapatan yang Sah yang didasarkan pada data potensi Lain-lain PAD Yang Sah di Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Menetapkan prognosis laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah semester pertama serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021), sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2017	175.440.496.864,44	199.024.697.934,88	113,44
2018	172.301.380.460,24	178.634.468.717,39	103,68
2019	168.838.660.768,00	172.688.433.186,96	102,28
2020	171.081.995.294,21	191.728.274.257,91	112,07
2021	172.473.478.843,00	203.707.746.221,11	118,11

## 2) Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 tidak melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp1.053.096.467.719,00 atau 88,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.183.560.874.214,00. Realisasi pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp23.198.990.064,00 atau 2,25% dari realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2020 yaitu Rp1.029.897.477.655,00.

## 3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2021 jauh melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp61.934.101.231,00 atau 107,43%



dari yang dianggarkan sebesar Rp57.652.719.654,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2021 ini meningkat sebesar Rp9.522.361.665,00 atau 18,17% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp52.411.739.566,00.

Memperhatikan Data Realisasi Pendapatan tersebut, pada tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus lebih cermat dalam memproyeksikan Target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, dan mengupayakan pencapaian Realisasi Pendapatan dimaksud sesuai target yang ditetapkan dalam APBD, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Selanjutnya dalam upaya pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah di tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Cimahi agar lebih meningkatkan upaya optimalisasi PAD, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan identifikasi potensi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara optimal, memperbaiki sistem administrasi pendapatan, melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif terhadap BUMD, melakukan kerja sama pemanfaatan aset yang tidak dipergunakan (*idle*), serta upaya-upaya lainnya.

Terhadap pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak agar berkoordinasi lebih intensif dengan instansi yang terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan dimaksud.

#### b. Belanja Daerah

Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.481.512.704.849,00 atau 79,80% dari anggaran sebesar Rp1.856.578.149.343,00 dengan rincian sebagai berikut:

##### 1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.221.658.713.620,00 atau 86,83% dari anggaran sebesar Rp1.406.945.786.943,00. Adapun rincian realisasi Belanja Operasi dimaksud, antara lain:

##### a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp643.977.236.028,00 atau 88,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp723.673.114.458,00.

Capaian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2021 ini meningkat sebesar Rp7.094.006.290,00 atau 1,11% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp636.883.229.738,00.



Berdasarkan data di atas, Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam melakukan proyeksi Belanja Pegawai, dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan jumlah ASN yang akan pensiun.

Gambaran capaian realisasi Belanja Pegawai selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2017	734.031.596.519,97	596.846.376.494,00	81,31
2018	708.772.590.559,00	659.050.105.740,00	92,98
2019	718.941.789.915,59	668.364.206.848,00	92,96
2020	670.594.435.910,00	636.883.229.738,00	94,97
2021	723.673.114.458,00	643.977.236.028,00	88,99

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 jauh di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp555.391.457.278,00 atau 84,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp657.581.777.697,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020, capaian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2021 ini secara nominal meningkat sebesar Rp99.053.551.897,98 atau 21,71% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp456.337.905.380,02. Namun di sisi lain, secara persentase capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 ini menunjukkan penurunan dari persentase capaian realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,30 poin.

Namun demikian, pada beberapa kegiatan SKPD, masih terdapat kegiatan yang realisasi Belanja Barang dan Jasa jauh di bawah target yang ditetapkan, antara lain:

- (1) Dinas Pendidikan, antara lain kegiatan:
  - (a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp129.278.200,00 atau 41,64% dari anggaran sebesar Rp310.411.300,00;
  - (b) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp483.667.597,00 atau 59,49% dari anggaran sebesar Rp812.934.200,00;
- (2) Dinas Kesehatan, antara lain kegiatan:
  - (a) Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp39.435.073.332,00 atau 65,91% dari anggaran sebesar Rp59.830.754.367,00;



- (b) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, kelas D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp281.252.660,00 atau 69,66% dari anggaran sebesar Rp403.719.200,00;
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi sebesar Rp54.147.821,00 atau 49,49% dari anggaran sebesar Rp109.400.000,00;
- (4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain kegiatan:
  - (a) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp655.240.711,00 atau 57,77% dari anggaran sebesar Rp1.134.201.000,00;
  - (b) Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp265.840.250,00 atau 44,41% dari anggaran sebesar Rp598.508.500,00;
  - (c) Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.101.564.665,00 atau 52,84% dari anggaran sebesar Rp2.084.584.025,00;
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp209.690.312,00 atau 58,25% dari anggaran sebesar Rp359.955.000,00;
- (6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, antara lain kegiatan:
  - (a) Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.068.808.000,00 atau 50,75% dari anggaran sebesar Rp2.106.194.300,00;
  - (b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp605.220.365,00 atau 20,09% dari anggaran sebesar Rp3.011.922.000,00;
- (7) Dinas Lingkungan Hidup, antara lain kegiatan:
  - (a) Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp107.236.800,00;
  - (b) Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebesar Rp34.655.000,00 atau 31,06% dari anggaran sebesar Rp111.567.500,00;



- (c) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota sebesar Rp93.658.700,00 atau 52,55% dari anggaran sebesar Rp178.222.200,00;
- (8) Dinas Perhubungan, antara lain kegiatan:
- (a) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp96.882.000,00 atau 53,02% dari anggaran sebesar Rp182.721.000,00;
- (b) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp18.938.500,00 atau 39,31% dari anggaran sebesar Rp48.175.400,00;
- (9) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan, yaitu kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp127.901.124,00 atau 43,85% dari anggaran sebesar Rp291.625.000,00;
- (10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain kegiatan:
- (a) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp376.189.539,00 atau 21,17% dari anggaran sebesar Rp1.776.675.700,00;
- (b) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp111.125.099,00 atau 21,95% dari anggaran sebesar Rp506.100.600,00;
- (11) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, antara lain kegiatan:
- (a) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp598.422.300,00 atau 58,37% dari anggaran sebesar Rp1.025.276.375,00;
- (b) Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp537.128.669,00 atau 39,32% dari anggaran sebesar Rp1.365.836.000,00;
- (12) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian, antara lain kegiatan:
- (a) Penerbitan Tanda Daftar Gudang sebesar Rp6.725.000,00 atau 45,98% dari anggaran sebesar Rp14.625.000,00;
- (b) Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil sebesar Rp994.950.000,00 atau 68,47% dari anggaran sebesar Rp1.452.909.800,00;



- (13) Sekretariat Daerah, antara lain kegiatan:
- (a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp402.503.750,00;
  - (b) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sebesar Rp997.337.884,00 atau 56,39% dari anggaran sebesar Rp1.768.401.200,00;
  - (c) Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan sebesar Rp1.387.036.868,00 atau 50,55% dari anggaran sebesar Rp2.743.788.100,00;
  - (d) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian sebesar Rp674.094.978,00 atau 54,36% dari anggaran sebesar Rp1.239.940.000,00;
- (14) Sekretariat DPRD, antara lain kegiatan:
- (a) Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD sebesar Rp4.662.578.683,00 atau 60,08% dari anggaran sebesar Rp7.760.440.500,00;
  - (b) Fasilitasi Tugas DPRD sebesar Rp368.917.328,00 atau 67,75% dari anggaran sebesar Rp544.500.000,00;
- (15) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp72.410.858,00 atau 63,92% dari anggaran sebesar Rp113.280.000,00;
- (16) Kecamatan Cimahi Tengah, yaitu kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat sebesar Rp155.576.000,00 atau 42,56% dari anggaran sebesar Rp365.529.900,00;
- (17) Kantor Kesatuan Bangsa, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp39.391.314,00 atau 67,72% dari anggaran sebesar Rp58.167.500,00.

Memperhatikan data realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut, yang relatif jauh dari rencana belanja yang ditetapkan dalam APBD, Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang dapat melakukan beberapa hal, antara lain :

- (1) Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan baik yang menyesuaikan dengan rencana anggaran kas Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya agar konsisten dengan jadwal yang ditetapkan;
- (2) Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian output kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian



terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan

- (3) Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana Anggaran Kas yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga terhadap objek belanja barang dan jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2017	504.299.063.610,00	454.312.088.607,00	90,09
2018	584.037.435.237,50	531.594.947.618,00	91,02
2019	585.006.159.955,61	552.425.239.111,15	94,43
2020	520.004.318.232,48	456.337.905.380,02	87,76
2021	657.581.777.697,00	555.391.457.278,00	84,46

c) Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2021 masih jauh berada dibawah anggaran yang ditetapkan dengan capaian sebesar Rp308.874.114,00 atau 51,48% dari anggaran sebesar Rp600.000.000,00. Capaian Belanja Bunga Tahun Anggaran 2021 menurun, baik secara nominal maupun persentase, apabila dibandingkan dengan capaian Belanja Bunga Tahun Anggaran 2020. Melihat masih banyaknya sisa anggaran yang tidak terserap, Pemerintah Daerah Kota Cimahi diharapkan dapat lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bunga karena dengan utang yang sudah diketahui, baik secara nominal pokok maupun persentase bunga tahunan, seharusnya perhitungan proyeksi Belanja Bunga dapat lebih tepat. Dengan perhitungan yang lebih baik, maka kelebihan anggaran dapat diminimalisir dan anggaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.





Gambaran capaian realisasi Belanja Bunga selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2017	6.212.161.375,00	1.519.531.175,00	24,46
2018	750.000.000,00	518.723.151,00	69,16
2019	575.862.334,00	687.088.955,00	119,31
2020	1.000.000.000,00	781.441.813,09	78,14
2021	600.000.000,00	308.874.114,00	51,48

d) Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021 sudah terbilang cukup baik dengan dengan capaian sebesar Rp410.574.000,00 atau 80,96% dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp507.144.000,00. Capaian Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021 meningkat apabila dibandingkan dengan capaian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 karena selama 5 (lima) tahun terakhir, tidak terdapat realisasi Belanja Subsidi sebelum Tahun Anggaran 2021. Melihat munculnya Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cimahi diharapkan dapat melakukan evaluasi terkait efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Belanja Subsidi ini sehingga di tahun-tahun mendatang dapat lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Subsidi dan lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendanai pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 sudah mendekati target yang ditetapkan dengan capaian sebesar Rp18.999.042.200,00 atau 90,67% dari anggaran sebesar Rp20.953.726.450,00. Capaian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 terlihat meningkat, baik secara nominal maupun persentase, apabila dibandingkan dengan capaian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020. Namun demikian, dalam rangka semakin meningkatkan efektif dan efisien perencanaan anggaran Belanja Hibah pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Hibah serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Hibah sehingga obyek Belanja Hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal dan memiliki kelebihan anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambaran capaian realisasi Belanja Hibah selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2017	14.431.924.700,00	13.947.887.750,00	96,65
2018	17.290.350.000,00	16.159.150.000,00	93,46
2019	16.362.800.000,00	15.355.225.000,00	93,84
2020	15.688.221.480,00	13.856.011.450,00	88,32
2021	20.953.726.450,00	18.999.042.200,00	90,67

f) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 masih jauh berada dibawah target yang ditetapkan dengan capaian sebesar Rp2.571.530.000,00 atau 70,84% dari anggaran sebesar Rp3.630.024.338,00. Capaian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 menurun, baik secara nominal maupun persentase, apabila dibandingkan dengan capaian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang efektif dan efisien pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus tetap lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bantuan Sosial serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Bantuan Sosial sehingga terhadap obyek Belanja Bantuan Sosial yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2017	0,00	0,00	-
2018	626.250.000,00	344.250.000,00	54,97
2019	4.285.400.000,00	3.227.128.000,00	75,31
2020	3.394.820.000,00	2.864.475.000,00	84,38
2021	3.630.024.338,00	2.571.530.000,00	70,84

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 belum mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp247.060.564.786,00 atau 58,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp425.752.276.510,00. Persentase capaian realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 meningkat dibandingkan persentase capaian realisasi Belanja Modal Tahun



Anggaran 2020. Namun meski begitu, Realisasi Belanja Modal masih sangat rendah dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus lebih mengoptimalkan anggaran sehingga rencana belanja modal dapat tercapai yang pada akhirnya dapat turut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan SKPD yang masih terdapat realisasi rincian objek Belanja Modal jauh dari anggaran yang ditetapkan, antara lain:

- a) Dinas Pendidikan, antara lain kegiatan:
  - (1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp2.199.496.444,00 atau 60,63% dari anggaran sebesar Rp3.627.955.200,00;
  - (2) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp38.112.400,00;
- b) RSUD Cibabat yaitu Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.318.276.130,00 atau 49,48% dari anggaran sebesar Rp4.685.402.000,00;
- c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain kegiatan:
  - (1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.489.180.282,00 atau 57,75% dari anggaran sebesar Rp4.310.099.740,00;
  - (2) Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp575.613.475,00;
- d) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, yaitu kegiatan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp18.642.000,00;
- e) Dinas Lingkungan Hidup, antara lain kegiatan:
  - (1) Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp1.019.274.221,00 atau 53,24% dari anggaran sebesar Rp1.914.576.100,00;
  - (2) Pengelolaan Sampah sebesar Rp3.294.322.738,00 atau 63,21% dari anggaran sebesar Rp5.211.726.150,00;



- f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp3.276.758.532,00 atau 64,25% dari anggaran sebesar Rp5.099.999.000,00;
- g) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, antara lain kegiatan:
- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp2.591.298.225,00 atau 53,12% dari anggaran sebesar Rp4.878.455.730,00;
  - (2) Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp739.203.800,00 atau 0,62% dari anggaran sebesar Rp119.559.791.864,00;
- h) Sekretariat DPRD, yaitu kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp231.689.693,00 atau 60,87% dari anggaran sebesar Rp380.629.052,00.

Pada SKPD, masih terdapat pula Belanja Modal yang melampaui anggaran yang ditetapkan dan perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu Dinas Pendidikan, dengan rincian antara lain:

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp4.664.753.332,00 atau 100,54% dari anggaran sebesar Rp4.639.241.303,00; dan
- b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp1.917.612.055,00 atau 100,48% dari anggaran sebesar Rp1.908.274.908,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2017	352.474.886.621,00	270.324.719.343,00	76,69
2018	363.487.982.456,96	276.020.230.064,00	75,94
2019	348.278.444.036,17	260.337.997.570,00	74,75
2020	170.648.933.418,00	97.244.613.801,00	56,99
2021	425.752.276.510,00	247.060.564.786,00	58,03

### 3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp12.793.426.443,00 atau 53,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.880.085.890,00. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp61.558.731.877,00 atau 82,79% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp74.352.158.320,00. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan seiring dengan kebijakan pemerintah pusat di Tahun 2021 terkait dengan penurunan



pandemi wabah covid-19 sehingga realisasi anggaran BTT dapat dikurangi.

Capaian realisasi tersebut kurang optimal, namun demikian Pemerintah Kota Cimahi harus tetap menyediakan Belanja Tidak Terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga, sehingga terhadap objek Belanja Tidak Terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### c. Pembiayaan

#### 1) Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2021, meliputi:

- a) Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp270.898.017.186,53 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp271.172.220.678,00 yang diperoleh dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
- b) Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21% dari anggaran sebesar Rp2.429.808.337,00 yang seluruhnya merupakan Realisasi Pembayaran Pokok Utang.

Memperhatikan data tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang harus lebih realistis dalam memprediksi Penerimaan Pembiayaan sehingga tidak berimplikasi terhadap menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, melihat penyerapan Pembayaran Pokok Utang yang masih sangat rendah dibandingkan anggaran yang ada, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat lebih memaksimalkan anggaran yang telah tersedia sehingga dapat segera menyelesaikan kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

#### 2) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp308.665.364.620,64 atau 16,63% dari total anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.856.578.149.343,00.



Rasio SILPA terhadap anggaran belanja daerah Kota Cimahi TA. 2017 sampai dengan TA.2021 sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah (%)
2017	1.637.050.871.413,09	339.315.908.039,53	20,73
2018	1.691.773.488.737,46	166.342.122.863,92	9,83
2019	1.675.364.781.120,20	121.693.751.477,73	7,26
2020	1.576.350.590.820,19	271.172.220.677,53	17,20
2021	1.856.578.149.343,00	308.665.364.620,64	16,63

Memperhatikan data tersebut, rasio SILPA Tahun Anggaran 2021 menurun dibanding dari Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat meminimalisir besaran SILPA pada tahun berjalan.

Sehubungan dengan itu, disarankan agar Pemerintah Daerah Kota Cimahi memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban atau utang dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 2. NERACA

### a. Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2021 sebesar Rp445.823.435.406,89, antara lain yaitu:

#### 1) Kas

Saldo Kas pada Neraca 31 Desember 2021 sebesar Rp309.256.158.331,64 terdiri atas :

##### a) Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp261.726.825.185,51 meningkat sebesar Rp8.743.770.800,59 atau 3,46% dibandingkan dengan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp252.983.054.384,92.



Berdasarkan data tersebut, pada tahun-tahun mendatang agar lebih diperhatikan perencanaan pemanfaatan kas dimaksud dalam rangka peningkatan PAD dengan memperhatikan manajemen kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp148.923.030,52 mengalami peningkatan sebesar Rp148.923.030,52 dari Tahun 2020 yang tidak memiliki saldo di Bendahara Pengeluaran.

Terhadap Sisa Kas yang belum disetor pada akhir tahun oleh Bendahara termaksud, pada tahun yang akan datang diharapkan segera disetorkan ke RKUD paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp659.044,00 mengalami peningkatan sebesar Rp659.044,00 dari Tahun 2020 yang tidak memiliki saldo di Bendahara Penerimaan.

Terhadap Sisa Kas yang belum disetor pada akhir tahun oleh Bendahara termaksud, pada tahun yang akan datang diharapkan segera disetorkan ke RKUD paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember

d) Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 pada Bendahara BLUD sebesar Rp45.025.538.922,61. Saldo Kas BLUD pada Tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar Rp29.631.385.499,00 atau 192,48% dari Tahun 2020 sebesar Rp15.394.153.423,61.

Terhadap Sisa Kas BLUD tersebut, agar digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

e) Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas BOS per 31 Desember 2021 pada Bendahara BOS sebesar Rp1.763.418.438,00 yang merupakan Sisa Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Saldo Kas BOS pada Tahun 2021 ini mengalami penurunan sebesar Rp727.477.216,00 atau 29,21% dari Tahun 2020 sebesar Rp2.490.895.654,00.

Terhadap Sisa Kas Dana BOS agar digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dengan



berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp590.793.711,00, nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp30.649.034,00 atau 5,47% jika dibandingkan dengan Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp560.144.677,00.

Kas Lainnya ini terdiri dari kas pada Rekening UPTD Rusunawa Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berasal dari jaminan dan/atau bunga uang keluar atas pencairan penghuni yang telah keluar serta keterlambatan pembayaran pajak (PFK) Dana BOS Tahun 2021 dari 8 Sekolah Dasar Negeri.

2) Piutang

Nilai Piutang Bersih per 31 Desember 2021 sebesar Rp104.547.619.200,32 terdiri dari:

a) Piutang sebesar Rp106.846.464.471,21 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak sebesar Rp82.147.425.882,83;
- (2) Piutang Retribusi sebesar Rp760.699.766,62;
- (3) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp9.794.305.571,00;
- (4) Piutang Lainnya sebesar Rp9.567.340.661,47;
- (5) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp4.576.692.589,29.

b) Penyisihan Piutang Lainnya

Nilai Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.298.845.270,88).

Berkenaan dengan Saldo Piutang tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi agar melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih, dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, serta tetap terus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

3) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.019.657.874,93.

Terhadap Saldo Persediaan tersebut, agar dilakukan sistem pengendalian dan pengelolaan yang baik dan memadai mengenai jenis, jumlah maupun nilainya untuk mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kerusakan persediaan sekaligus menghindari terjadinya pemborosan terhadap penggunaan dana APBD.





Disamping itu, untuk tahun mendatang dalam menetapkan jumlah anggaran persediaan supaya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran sebelumnya, sedangkan untuk menghitung kebutuhan nyata disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan, serta kebutuhan barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

#### 4) Investasi

Nilai Investasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.544.583.899,50 yang terdiri dari:

- (a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp50.591.536,00 merupakan nilai Dana Bergulir Kota Cimahi sebesar Rp50.591.536,00.

Terhadap Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir, Pemerintah Daerah Kota Cimahi supaya melakukan pengelolaan secara cermat dan efektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diatur secara jelas substansi dan mekanismenya.

- (b) Investasi Permanen sebesar Rp68.493.992.363,50 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Penyertaan Modal pada Bank BJB sebesar Rp26.000.000.000,00;
- (2) Penyertaan Modal pada PD Jati Mandiri sebesar Rp42.493.992.363,50.

Terhadap investasi permanen Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis rasio dalam rangka pengambilan kebijakan atas Penyertaan Modal Daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, Pendapatan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang harus tetap meningkatkan pengawasan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud.



b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.401.012.973.312,90 terdiri dari:

- 1) Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Tanah sebesar Rp1.056.705.806.799,00;
  - b) Peralatan dan Mesin sebesar Rp694.191.726.346,98;
  - c) Gedung dan Bangunan sebesar Rp772.624.864.228,52;
  - d) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp826.964.855.561,52;
  - e) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp70.405.620.977,47; dan
  - f) Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp 211.996.377.038,36;
- 2) Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.231.876.277.638,95).

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi agar tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik dan memadai dengan pengamanan dari segi administrasi, fisik dan hukum untuk mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kehilangan aset, disamping untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan.

c. Dana Cadangan

Nilai Dana Cadangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

d. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.007.110.139,93 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp3.348.345.000,00;
- 2) Aset Tak Berwujud sebesar Rp9.932.562.034,90;
- 3) Akumulasi Amortisasi Aset tak berwujud sebesar (Rp8.229.263.872,40); dan
- 4) Aset Lain-lain sebesar Rp16.955.466.977,42.

Sebagaimana halnya Aset Tetap, terhadap Aset Lainnya agar dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

e. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2021 berupa Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp18.797.360.506,47 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp48.276.595,00;
- 2) Utang Bunga sebesar Rp129.039.156,47;
- 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp855.508.220,00;



- 4) Utang Belanja sebesar Rp4.141.620.812,00; dan
- 5) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp13.622.915.723,00.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga memiliki Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember sebesar Rp2.566.524.658,70 yang seluruhnya adalah Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Cimahi harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas.

f. Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.916.024.217.594,05. Hal ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.916.024.217.594,05.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.545.373.383.520,29. Pendapatan-LO Tahun anggaran 2021 terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD-LO)

PAD-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp433.164.813.348,49, mengalami kenaikan sebesar Rp64.549.594.607,58 atau 17,51% dibandingkan dengan realisasi PAD-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp368.615.218.740,91. PAD-LO Tahun Anggaran 2021 tersebut terdiri dari:

- a) Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp203.700.704.578,00;
- b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.171.916.379,00;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.956.960.000,00; dan
- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp207.335.232.391,49.

2) Pendapatan Transfer

a) Pendapatan Transfer-LO – Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer-LO - Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp743.905.839.987,00 mengalami penurunan sebesar Rp44.424.205.503,00 atau 5,64% dibandingkan dengan Pendaptan Transfer-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp788.330.045.490,00.



Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2021 tersebut terdiri atas:

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp51.986.941.479,00;
  - (2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp29.733.151.567,00;
  - (3) Dana Alokasi Umum-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp530.425.978.000,00;
  - (4) Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp131.759.768.941,00;
- b) Pendapatan Transfer-LO - Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp52.247.274.000,00;
- c) Pendapatan Transfer-LO (Pemerintah Daerah Lainnya) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp126.781.787.043,00; dan
- d) Bantuan Keuangan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp105.707.342.961,00.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO  
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp83.566.326.180,80 mengalami peningkatan sebesar Rp24.055.154.259,82 atau 28,86% dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.361.372.716,98.

b. Beban

Beban Tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.330.843.106.922,38, Beban Tahun anggaran 2021 terdiri dari :

- 1) Beban Operasi  
Beban Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.330.843.106.922,38 mengalami penurunan sebesar Rp26.166.539.763,60 atau 1,93% dibandingkan dengan realisasi Beban Operasi Tahun Angagran 2021 sebesar Rp1.357.009.646.685,98.
- 2) Total Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional  
Total Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp5.130.797.753,00).
- 3) Beban Luar Biasa  
Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.736.649.668,00.

c. Surplus/Defisit-LO sebesar Rp199.662.829.176,91 telah sesuai dengan Surplus/Desifit pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021.



## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Nomor 30A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 Tanggal 24 Mei 2022, menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah menyajikan secara wajar hal-hal yang berkenaan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, masih terdapat temuan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kota Cimahi, yaitu temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu meliputi:

### A. PENDAPATAN

Pengelolaan dan penatausahaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum tertib.

### B. BELANJA

1. Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja PNS sebesar Rp44.791.370,00;
2. Kelebihan pembayaran Realisasi Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp321.300.000,00;
3. Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah terlambat disampaikan oleh tiga pihak Penerima Hibah;
4. Kelebihan pembayaran atas dua Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan pada dua SKPD sebesar Rp2.193.524.554,93 dan ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan sebesar Rp67.500.000,00;
5. Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Underpass Sriwijaya Kelurahan Baros sebesar Rp77.282.884,89; dan
6. Pekerjaan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi ke Rusunawa Melong belum dapat dimanfaatkan dan terdapat pembayaran melampaui Prestasi Pekerjaan sebesar Rp62.310.171,90.



### C. ASET

1. Pelaksanaan Transaksi Tunai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada beberapa Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sesuai dengan ketentuan;
2. Penatausahaan Piutang Pajak Daerah belum memadai;
3. Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan belum tertib; dan
4. Pemanfaatan Aset Tetap melalui Perjanjian Pinjam Pakai belum sepenuhnya tertib.

Terhadap temuan BPK tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kota Cimahi agar segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### III. LAIN-LAIN

A. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya.

### B. EVALUASI ASPEK HUKUM ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

#### 1. KONSIDERAN

Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021”.

#### 2. DASAR HUKUM

a. Angka 1 dihapus

b. Angka 7 dihapus

c. Angka 8 disempurnakan menjadi:

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Angka 9 disempurnakan menjadi:

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

e. Angka 27 disempurnakan menjadi:

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777)”.

f. Angka 28 penulisan kata “Petunjuk” di ubah menjadi “Pedoman”.

### 3. BATANG TUBUH

a. Pasal 3 penulisan kata “SILPA” diubah menjadi “SiLPA”

b. Pasal 5

1) Huruf b penulisan “SAL” diubah menjadi “Saldo Anggaran Lebih”.

c. Pasal 7 penulisan singkatan “LO” diubah menjadi “Laporan Operasional”.

d. Pasal 9

1) Huruf b penulisan singkatan “LO” diubah menjadi “Laporan Operasional”.

2) Huruf c penulisan singkatan “RK PPKD” diubah menjadi “Rencana Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah”

e. Ditambahkan Pengundangan Peraturan Daerah dan yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi.

## C. EVALUASI ASPEK HUKUM ATAS RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

### 1. KONSIDERAN

Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi:

“bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, perlu menempatkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021”.



## 2. DASAR HUKUM

a. Angka 1 dihapus

b. Angka 7 dihapus

c. Angka 8 disempurnakan menjadi:

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Angka 9 disempurnakan menjadi:

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

e. Angka 27 disempurnakan menjadi:

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777)”.

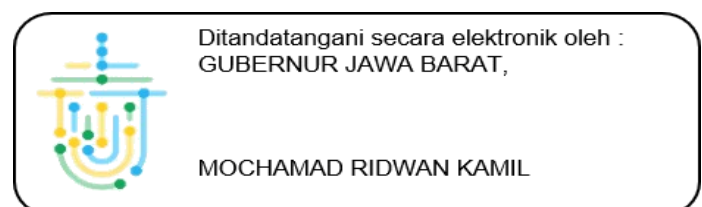
f. Angka 28 penulisan kata “Petunjuk” di ubah menjadi “Pedoman”.

## 3. BATANG TUBUH

a. Pasal 1 huruf d penulisan kata “SILPA” di ubah menjadi “SiLPA”

b. Ditambahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota dan yang di tandatangi oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi.

GUBERNUR JAWA BARAT,



5E11B37203





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA CIMAHI  
NOMOR : 01 /kep .Pim. DPRD / VIII /2021

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021  
SESUAI DENGAN EVALUASI GUBERNUR

PIMPINAN DPRD KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 yang disetujui bersama DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, telah dievaluasi Gubernur Jawa Barat dengan Keputusan Nomor : 903/Kep.455-BPKAD/2022 pada tanggal 8 Agustus 2022;
  - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2021 Sesuai Dengan Evaluasi Gubernur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 273);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 286).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/Kep.455-BPKAD/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021 SESUAI DENGAN EVALUASI GUBERNUR

KESATU : Penyempurnaan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah dilakukan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Kota Cimahi sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.455-BPKAD/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.455-BPKAD/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

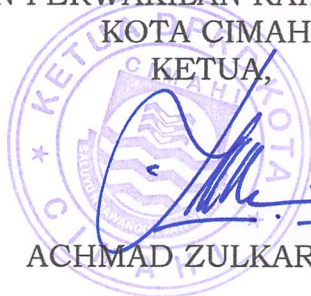
KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah disempurnakan sesuai evaluasi Gubernur Jawa Barat agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 23 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA CIMAH  
KETUA,



*(Handwritten signature)*  
ACHMAD ZULKARNAIN





NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>APBD, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan peraturan daerah Kota Cimahi dengan APBD, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi dengan APBD.</p> <p>Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pagu anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan pagu anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.</li> <li>2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021; dan</li> <li>3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.</li> </ol>

<b>NO</b>	<b>CATATAN EVALUASI</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
B.	<p><b>LEGALITAS</b></p> <p>Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.</p> <p>Hasil evaluasi legalitas atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cimahi menunjukkan ketidakpatuhan penyampaian sesuai dengan pasal 196 ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	<p>Untuk tahun-tahun mendatang kami akan meningkatkan kecepatan proses penyusunan risalah pembahasan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dalam penyampaian Raperda PP APBD untuk dievaluasi Gubernur.</p>
C.	<p><b>KEBIJAKAN</b></p> <p>Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:</p> <p><b>1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b></p> <p><b>a. Pendapatan Daerah</b></p> <p>Realisasi total Pendapatan Daerah sebesar Rp1.520.135.560.503,11 atau 95,74% dari anggaran sebesar Rp1.587.835.737.002,00. Realisasi Pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar</p>	

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>Rp62.139.100.603,20 atau 4,26% di bandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud memiliki rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggran 2021 sebesar Rp405.104.991.553,11 atau 116,87% dari anggaran sebesar Rp346.622.143.134,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp29.417.748.874,20 atau 7,83% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020. Adapun rincian Anggaran dan realisasi PAD tersebut, terdiri atas:</p> <p>a) Pajak Daerah</p> <p>Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp179.891.802.692,00 atau 117,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp152.786.878.291,00. Dengan demikian, capaian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak menunjukkan konsistensi antara realisasi anggaran dengan perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.</p> <p>Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 meningkat dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.954.564.793,00 atau 13,18%. Hal lebih dikarenakan pengaruh kebijakan</p>	<p>Memperhatikan hasil evaluasi, pada tahun-tahun mendatang Kota Cimahi akan melakukan langkah- langkah:</p> <p>(1) Menetapan target pajak daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah di Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>(2) Menetapkan prognosis laporan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah semester pertama serta</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>pemerintah pusat yang mulai melonggarkan kegiatan masyarakat sehingga kegiatan ekonomi pun mulai menggeliat kembali.</p> <p>Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah- langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Menetapan target pajak daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah di Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>(2) Menetapkan prognosis laporan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah semester pertama serta prognosis enam (6) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai secara tepat untuk setiap rincian objek pendapatan Pajak Daerah;</li> <li>(3) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib</li> </ol>	<p>prognosis enam (6) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai secara tepat untuk setiap rincian objek pendapatan Pajak Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(3) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi; dan</li> <li>(4) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.</li> </ol>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT																								
	<p>pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi; dan</p> <p>(4) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.</p> <p>Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021), sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="606 667 1542 987"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>116.923.551.744,00</td> <td>165.391.683.082,00</td> <td>141,45</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>132.108.046.123,69</td> <td>134.770.330.583,00</td> <td>102,02</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>161.488.910.896,42</td> <td>163.136.977.065,00</td> <td>101,02</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>136.545.238.041,00</td> <td>158.937.237.899,00</td> <td>116,40</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>152.786.878.291,00</td> <td>179.891.802.692,00</td> <td>117,74</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Retribusi Daerah</p> <p>Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp 11.548.482.640,00 atau 101,26% di atas target yang dianggarkan sebesar Rp11.404.826.000,00. Dengan demikian, realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak menunjukkan konsistensi antara realisasi anggaran dengan perencanaan</p>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	2017	116.923.551.744,00	165.391.683.082,00	141,45	2018	132.108.046.123,69	134.770.330.583,00	102,02	2019	161.488.910.896,42	163.136.977.065,00	101,02	2020	136.545.238.041,00	158.937.237.899,00	116,40	2021	152.786.878.291,00	179.891.802.692,00	117,74	<p>Menindaklanjuti hasil evaluasi, Pemerintah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang akan melakukan langkah- langkah antara lain:</p> <p>(1) Menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah</p>
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)																							
2017	116.923.551.744,00	165.391.683.082,00	141,45																							
2018	132.108.046.123,69	134.770.330.583,00	102,02																							
2019	161.488.910.896,42	163.136.977.065,00	101,02																							
2020	136.545.238.041,00	158.937.237.899,00	116,40																							
2021	152.786.878.291,00	179.891.802.692,00	117,74																							

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.</p> <p>Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 menurun sebesar Rp3.695.167.882,00 atau 24,24% dibandingkan realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.243.650.522,00. Penurunan ini lebih dikarenakan adanya penurunan pada Retribusi Perizinan Tertentu diantaranya Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).</p> <p>Pada realisasi Pendapatan Retribusi Daerah ini, terdapat beberapa SKPD yang realisasinya jauh di atas target yang dianggarkan dalam APBD antara lain:</p> <p>(1) Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi sebesar Rp2.154.402.900,00 atau 113,38% dari anggaran sebesar Rp1.900.000.000,00;</p> <p>(2) Dinas Perhubungan dengan realisasi sebesar Rp1.529.391.040,00 atau 118,69% dari Anggaran sebesar Rp1.288.475.000,00;</p> <p>(3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan realisasi sebesar Rp1.552.574.234,00 atau 110,89% dari Anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00; dan</p> <p>(4) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan realisasi sebesar</p>	<p>di Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang akurat; dan</p> <p>(2) Menetapkan prognosis laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama serta prognosis enam (6) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah.</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>Rp1.710.256.225,00 atau 108,78% dari anggaran sebesar Rp1.572.095.500,00.</p> <p>Selain realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang jauh melampaui target, terdapat pula beberapa SKPD yang realisasinya jauh di bawah target yang dianggarkan dalam APBD antara lain:</p> <p>(1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar Rp3.217.740.950,00 atau 84,92% dari anggaran sebesar Rp3.788.880.000,00; dan</p> <p>(2) Dinas Tenaga Kerja dengan realisasi sebesar Rp583.770.000,00 atau 77,83% dari anggaran sebesar Rp750.000.000,00.</p> <p>Capaian realisasi yang relatif jauh diatas dan dibawah target yang dianggarkan dalam APBD dapat disebabkan oleh perencanaan target anggaran pendapatan retribusi daerah pada beberapa rincian objek pendapatan retribusi daerah terlalu rendah atau pun terlalu tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi capaian realisasi yang jauh dari target yang dianggarkan dalam APBD.</p> <p>Memperhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah antara lain:</p>	



NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT																								
	<p>(1) Menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah yang didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah di Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang akurat; dan</p> <p>(2) Menetapkan prognosis laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama serta prognosis enam (6) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah.</p> <p>Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021), sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="505 873 1537 1192"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>9.354.664.440,00</td> <td>10.239.610.285,00</td> <td>109,46</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>13.042.067.600,00</td> <td>12.220.530.827,00</td> <td>93,70</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>14.585.901.970,86</td> <td>15.832.320.921,00</td> <td>108,55</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>14.825.308.328,71</td> <td>15.243.650.522,00</td> <td>102,82</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>11.404.826.000,00</td> <td>11.548.482.640,00</td> <td>101,26</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</p> <p>Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 telah mencapai target yang ditetapkan</p>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	2017	9.354.664.440,00	10.239.610.285,00	109,46	2018	13.042.067.600,00	12.220.530.827,00	93,70	2019	14.585.901.970,86	15.832.320.921,00	108,55	2020	14.825.308.328,71	15.243.650.522,00	102,82	2021	11.404.826.000,00	11.548.482.640,00	101,26	<p>Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai target.</p>
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)																							
2017	9.354.664.440,00	10.239.610.285,00	109,46																							
2018	13.042.067.600,00	12.220.530.827,00	93,70																							
2019	14.585.901.970,86	15.832.320.921,00	108,55																							
2020	14.825.308.328,71	15.243.650.522,00	102,82																							
2021	11.404.826.000,00	11.548.482.640,00	101,26																							

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp9.956.960.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.956.960.000,00. Dengan demikian persentase capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 menunjukkan konsistensi antara realisasi anggaran dengan perencanaan anggaran.</p> <p>Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp178.880.000,00 atau 1,83% dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 sebesar Rp9.778.080.000,00.</p> <p>d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah</p> <p>Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp203.707.746.221,11 atau 118,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp172.473.478.843,00. Dengan demikian persentase capaian realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 tidak menunjukkan konsistensi antara realisasi anggaran dengan perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.</p> <p>Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp11.979.471.963,20 atau 6,25% dari realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun 2020 sebesar Rp191.728.274.257,91. Peningkatan dikarenakan atas Jasa Giro dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dibandingkan pada Tahun Anggaran 2020.</p>	<p>Menindaklanjuti hasil evaluasi, Pemerintah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang akan melakukan langkah-langkah:</p> <p>(1) Menetapkan target Lain-lain Pendapatan yang Sah yang didasarkan pada data potensi Lain-lain PAD Yang Sah di Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, mengingat penerimaan daerah</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>Kurang optimalnya capaian realisasi rincian objek pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah ini disebabkan oleh penetapan perencanaan target pendapatan rincian objek pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yang terlalu rendah, sehingga capaian realisasinya jauh melampaui target.</p> <p>Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Menetapkan target Lain-lain Pendapatan yang Sah yang didasarkan pada data potensi Lain-lain PAD Yang Sah di Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>(2) Menetapkan prognosis laporan realisasi Anggaran pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah semester pertama serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, sehingga Anggaran pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara</li> </ol>	<p>merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(2) Menetapkan prognosis laporan realisasi Anggaran pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah semester pertama serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik dan akurat, dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, sehingga Anggaran pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah.</li> </ol>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT																								
	<p>rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah.</p> <p>Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah selama</p> <table border="1" data-bbox="537 423 1547 737"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>175.440.496.864,44</td> <td>199.024.697.934,88</td> <td>113,44</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>172.301.380.460,24</td> <td>178.634.468.717,39</td> <td>103,68</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>168.838.660.768,00</td> <td>172.688.433.186,96</td> <td>102,28</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>171.081.995.294,21</td> <td>191.728.274.257,91</td> <td>112,07</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>172.473.478.843,00</td> <td>203.707.746.221,11</td> <td>118,11</td> </tr> </tbody> </table> <p>lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021), sebagaimana tabel berikut:</p> <p>2) Pendapatan Transfer</p> <p>Realisasi pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 tidak melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu sebesar Rp1.053.096.467.719,00 atau 88,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.183.560.874.214,00. Realisasi pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp23.198.990.064,00 atau 2,25% dari realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2020 yaitu Rp1.029.897.477.655,00.</p> <p>3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah</p> <p>Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2021 jauh melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang</p>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	2017	175.440.496.864,44	199.024.697.934,88	113,44	2018	172.301.380.460,24	178.634.468.717,39	103,68	2019	168.838.660.768,00	172.688.433.186,96	102,28	2020	171.081.995.294,21	191.728.274.257,91	112,07	2021	172.473.478.843,00	203.707.746.221,11	118,11	
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)																							
2017	175.440.496.864,44	199.024.697.934,88	113,44																							
2018	172.301.380.460,24	178.634.468.717,39	103,68																							
2019	168.838.660.768,00	172.688.433.186,96	102,28																							
2020	171.081.995.294,21	191.728.274.257,91	112,07																							
2021	172.473.478.843,00	203.707.746.221,11	118,11																							

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>APBD yaitu sebesar Rp61.934.101.231,00 atau 107,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.652.719.654,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2021 ini meningkat sebesar Rp9.522.361.665,00 atau 18,17% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp52.411.739.566,00.</p> <p>Memperhatikan Data Realisasi Pendapatan tersebut, pada tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus lebih cermat dalam memproyeksikan Target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, dan mengupayakan pencapaian Realisasi Pendapatan dimaksud sesuai target yang ditetapkan dalam APBD, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.</p> <p>Selanjutnya dalam upaya pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah di tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Cimahi agar lebih meningkatkan upaya optimalisasi PAD, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan identifikasi potensi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara optimal, memperbaiki sistem administrasi pendapatan, melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif terhadap BUMD, melakukan kerja sama pemanfaatan aset yang tidak dipergunakan (idle), serta upaya-upaya lainnya.</p>	<p>Menindaklanjuti hasil evaluasi, pada tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih cermat dalam memproyeksikan Target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, dan mengupayakan pencapaian Realisasi Pendapatan dimaksud sesuai target yang ditetapkan dalam APBD, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.</p> <p>Selanjutnya dalam upaya pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah di tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih meningkatkan upaya optimalisasi PAD, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan identifikasi potensi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara optimal, memperbaiki sistem administrasi pendapatan, melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif terhadap BUMD,</p>



NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT																								
	<p>Gambaran capaian realisasi Belanja Pegawai selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="555 516 1540 834"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>734.031.596.519,97</td> <td>596.846.376.494,00</td> <td>81,31</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>708.772.590.559,00</td> <td>659.050.105.740,00</td> <td>92,98</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>718.941.789.915,59</td> <td>668.364.206.848,00</td> <td>92,96</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>670.594.435.910,00</td> <td>636.883.229.738,00</td> <td>94,97</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>723.673.114.458,00</td> <td>643.977.236.028,00</td> <td>88,99</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 jauh di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp555.391.457.278,00 atau 84,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp657.581.777.697,00.</p> <p>Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020, capaian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2021 ini secara nominal meningkat sebesar Rp99.053.551.897,98 atau 21,71% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp456.337.905.380,02. Namun di sisi lain, secara persentase capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun</p>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	2017	734.031.596.519,97	596.846.376.494,00	81,31	2018	708.772.590.559,00	659.050.105.740,00	92,98	2019	718.941.789.915,59	668.364.206.848,00	92,96	2020	670.594.435.910,00	636.883.229.738,00	94,97	2021	723.673.114.458,00	643.977.236.028,00	88,99	<p>Menindaklanjuti hasil evaluasi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang akan melakukan beberapa hal, antara lain:</p> <p>(1) Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan baik yang menyesuaikan dengan rencana Anggaran kas Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya agar konsisten dengan jadwal yang ditetapkan;</p> <p>(2) Peningkatan kualitas perencanaan Anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian output kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan</p> <p>(3) Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, agar</p>
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)																							
2017	734.031.596.519,97	596.846.376.494,00	81,31																							
2018	708.772.590.559,00	659.050.105.740,00	92,98																							
2019	718.941.789.915,59	668.364.206.848,00	92,96																							
2020	670.594.435.910,00	636.883.229.738,00	94,97																							
2021	723.673.114.458,00	643.977.236.028,00	88,99																							

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>Anggaran 2021 ini menunjukkan penurunan dari persentase capaian realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,30 poin.</p> <p>Namun demikian, pada beberapa kegiatan SKPD, masih terdapat kegiatan yang realisasi Belanja Barang dan Jasa jauh di bawah target yang ditetapkan, antara lain:</p> <p>(1) Dinas Pendidikan, antara lain kegiatan:</p> <p>(a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp129.278.200,00 atau 41,64% dari anggaran sebesar Rp310.411.300,00;</p> <p>(b) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp483.667.597,00 atau 59,49% dari Anggaran sebesar Rp812.934.200,00;</p>	<p>konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana Anggaran Kas yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga terhadap objek belanja barang dan jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>(a) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebesar Rp. 75.000.000,00 untuk pelaporan aset pada tahun 2021 baru dianggarkan pada APBD Perubahan 2021. Akan tetapi karena keterbatasan waktu dalam tahapan proses seleksi untuk memperoleh kualitas aplikasi yang diinginkan sesuai dengan anggaran yang disediakan maka sampai dengan akhir tahun tidak dapat terealisasi.</p> <p>(b) Dikarenakan pengadaan aplikasi tersebut di atas tidak terealisasi, maka kegiatan sosialisasi aplikasi yang sudah dianggarkan meliputi alat tulis kantor, bahan cetak, belanja makan</p>



NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>(2) Dinas Kesehatan, antara lain kegiatan:</p> <p>(a) Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp39.435.073.332,00 atau 65,91% dari anggaran sebesar Rp59.830.754.367,00;</p> <p>(b) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, kelas D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotasebesar Rp281.252.660,00 atau 69,66% dari anggaran sebesar Rp403.719.200,00;</p>	<p>dan minuman, honorarium narasumber dan belanja jasa penyelenggaraan acara menjadi tidak dapat direalisasikan.</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan Pelayanan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk pembayaran peserta penerima bantuan (PBI) telah dibayarkan sampai Bulan Desember 2021 sisa anggaran tahun 2021 tidak dapat dibayarkan untuk pembayaran PBI tahun 2022 (lintas tahun);</li> <li>- Sub Kegiatan Operasional Kesehatan Lain adalah kegiatan vaksinasi penyerapan disesuaikan dengan kebutuhan tanpa mengurangi kinerja;</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah untuk kegiatan penanganan covid 19 penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan tanpa mengurangi kinerja pelayanan;</li> <li>- Penyerapan BOK Non Fisik untuk BOK Puskesmas dan BOK Kota dan Akreditasi penyerapan kecil karena kegiatan luar gedung banyak yang</li> </ul>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>(3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi sebesar Rp54.147.821,00 atau 49,49% dari anggaran sebesar Rp109.400.000,00;</p> <p>(4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain kegiatan:</p> <p>(a) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp655.240.711,00 atau 57,77% dari anggaran sebesar Rp1.134.201.000,00;</p>	<p>tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19.</p> <p>- Sub. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Penyerapan anggaran kecil karena kegiatan Akreditasi Puskesmas tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Nilai belanja jasa tenaga pelayanan umum, untuk kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampilnya tidak dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan regulasi yang semula LPJK berada di provinsi dibubarkan dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>(a) Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik untuk Belanja listrik BLUD Air Minum yang semula dikelola/ dibayarkan oleh Dinas namun</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>(b) Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp265.840.250,00 atau 44,41% dari anggaran sebesar Rp598.508.500,00;</p> <p>(c) Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam DaerahKabupaten/Kota sebesar Rp1.101.564.665,00 atau 52,84% dari anggaran sebesar Rp2.084.584.025,00;</p>	<p>dikelola/ dibayarkan oleh BLUD sendiri.</p> <p>(b) Tidak semua rumah yang terkena bencana/roboh mendapatkan rekomendasi dari BPBD, sehingga tidak bisa diperbaiki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) melalui program Rehabilitasi Rumah Korban Bencana. Selain itu, karena adanya Keterbatasan/sulitnya dokumen kepemilikan tanah atas nama penerima bantuan ,sehingga tidak semua rumah yang terkena bencana/roboh mendapatkan bantuan walaupun mendapatkan rekomendasi dari BPBD.</p> <p>(c) Belanja Material Bahan Baku Bangunan (Swakelola)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan Leuwigajah &amp; Melong, Cigugur Tengah - Baros : kesulitan persyaratan penyedia yang memenuhi (memiliki perizinan lengkap dan masih berlaku, pengalaman kerja)</li> <li>- Kecamatan Cimahi Tengah : ada hambatan teknis di lokasi kegiatan (sudah ada pembangunan pipa air limbah domestik, elevasi saluran di gang terlalu dalam, dll).</li> </ul>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>(5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp209.690.312,00 atau 58,25% dari anggaran sebesar Rp359.955.000,00;</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 47%, karena efisiensi anggaran, target dan fisik sudah disesuaikan target bayaran bulanan sudah tercover.</li> <li>- Capaian kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 38%, karena efisiensi anggaran, target dan fisik sudah disesuaikan/ Kurang penyerapan dikarenakan di tahun 2021 masih ada pandemi tidak boleh berkerumun dan perjalanan dalam kota kurang penyerapan dengan aturan 8 jam.</li> <li>- Capaian kegiatan Penyediaan Bahan Logistik sebesar 51%, karena efisiensi anggaran, target dan fisik sudah disesuaikan/ Kurang penyerapan dikarenakan di tahun 2021 masih ada pandemi tidak boleh berkerumun rapat.</li> <li>- Capaian kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 80%, karena efisiensi</li> </ul>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>(6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, antara lain kegiatan:</p> <p>(a) Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.068.808.000,00 atau 50,75% dari Anggaran sebesar Rp2.106.194.300,00;</p> <p>(b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp605.220.365,00 atau 20,09% dari Anggaran sebesar Rp3.011.922.000,00;</p> <p>(7) Dinas Lingkungan Hidup, antara lain kegiatan:</p> <p>(a) Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp107.236.800,00;</p> <p>(b) Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebesar Rp34.655.000,00 atau 31,06% dari anggaran sebesar Rp111.567.500,00;</p> <p>(c) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p>	<p>anggaran, target dan fisik sudah disesuaikan.</p> <p>Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan</p> <p>a. Karena juknis pelaksanaan kegiatan yg terkait stunting baru turun di sekitar oktober, sehingga pelaksanaan kegiatan terbatas waktu dan jumlah peserta berkurang</p> <p>b. Rastrada untuk 1500 kk miskin tidak dapat dilaksanakan krn ijin dari kemendagri terkait perwal rastrada (beras kesejahteraan daerah) sampai 31 des 2021 tidak keluar sehingga tidak bisa dilaksanakan</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>(a) Tidak ada penyerapan, karena tidak ada pelaku usaha yang dihentikan sumber pencemarnya / kegiatan usahanya, masih dapat diupayakan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha.</p> <p>(b) Belanja Jasa Konsultasi Kajian sebesar Rp 65 juta, tidak</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>Kabupaten/Kota sebesar Rp93.658.700,00 atau 52,55% dari Anggaran sebesar Rp178.222.200,00;</p> <p>(8) Dinas Perhubungan, antara lain kegiatan:</p> <p>(a) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp96.882.000,00 atau 53,02% dari anggaran sebesar Rp182.721.000,00;</p> <p>(b) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp18.938.500,00 atau 39,31% dari anggaran sebesar Rp48.175.400,00;</p>	<p>dilaksanakan karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan dilaksanakannya survey lapangan.</p> <p>(c) Anggaran belanja jasa pemeriksaan sampel, tenaga ahli, dan narasumber senilai 80 juta akan digunakan hanya jika ada permohonan pemeriksaan sampel dan tenaga ahli terkait pengaduan pencemaran lingkungan, dan tidak ada permohonan tersebut hingga berakhir masa tahun anggaran.</p> <p>Dinas Perhubungan</p> <p>a. Pengadaan barang milik daerah itu dianggarkan untuk sewa gudang arsip dan sewa gudang pju sebenarnya sewa gudang pju berakhir di thn 2022 tp dianggarkan di tahun 2021, karena pihak yg menyewakan akan berakhir di tahun 2021, jd nnti ada pengembalian. Tp trnyta tidak jadi dan tetap brakhir di 2022 sekarang dan pindah lokasi jd anggaran yang 2021 tidak diserap.</p> <p>b. Karena pembahasan andalalin berdasarkan permohonan jadi kalo mmg tidak ada permohonan buat</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>(9) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan, yaitu kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp127.901.124,00 atau 43,85% dari anggaran sebesar Rp291.625.000,00;</p> <p>(10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain kegiatan:</p> <p>a) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp376.189.539,00 atau 21,17% dari anggaran sebesar Rp1.776.675.700,00;</p> <p>b) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp111.125.099,00 atau 21,95% dari anggaran sebesar Rp506.100.600,00.</p>	<p>rekomendasi Andalalin tidak bisa diserap, Pelaksanaan andalalin tahun 2021 terlaksana 4 dari 6 yg dianggarkan.</p> <p>Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>Waktu pelaksanaan kegiatan tidak akan mencukupi dan Pihak penyedia tidak lulus kualifikasi dan tidak memenuhi syarat berdasarkan rekomendasi dari PBJ.</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>a) Realisasi <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> sebesar Rp. 376.189.539 (atau 21,17%) dari anggaran sebesar Rp. 1.776.675.700, Pagu Rp. 884.000.000 untuk listrik dan Rp. 270.000.000 untuk internet selama 6 bulan sebagian besar tidak terserap karena MPP masih dalam tahap pembangunan. Adapun listrik MPP</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>(11) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, antara lain kegiatan:</p> <p>(a) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp598.422.300,00 atau 58,37% dari anggaran sebesar Rp1.025.276.375,00;</p> <p>(b) Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp537.128.669,00 atau 39,32% dari anggaran sebesar Rp1.365.836.000,00;</p>	<p>baru mulai dibayarkan untuk tagihan januari 2022.</p> <p>b) Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 111.125.099 ( atau 21,95% ) dari anggaran sebesar Rp. 506.100.600 dikarenakan tidak terserapnya jasa tenaga keamanan sebesar Rp. 200.000.000, sewa kendaraan angkut (truk) sebesar Rp. 52.000.000, dan dekorasi taman gedung sebesar Rp. 100.060.600.</p> <p>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>a) Tidak bisa terserap 100% dikarenakan ada belanja operasional yang berasal dari dana Bantuan Gubernur untuk eko wisata Cimenteng tidak boleh dicairkan;</p> <p>b) Tidak bisa diserap 100% diakrenakan terjadinya gagal lelang sehingga</p>



NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>(12) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian, antara lain kegiatan:</p> <p>(a) Penerbitan Tanda Daftar Gudang sebesar Rp6.725.000,00 atau 45,98% dari anggaran sebesar Rp14.625.000,00;</p> <p>(b) Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil sebesar Rp994.950.000,00 atau 68,47% dari Anggaran sebesar Rp1.452.909.800,00;</p> <p>(13) Sekretariat Daerah, antara lain kegiatan:</p> <p>(a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Anggaran sebesar Rp402.503.750,00;</p> <p>(b) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sebesar Rp997.337.884,00 atau 56,39% dari anggaran sebesar Rp1.768.401.200,00;</p>	<p>belanja operasional setelah lelang tidak diserap.</p> <p>Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian</p> <p>a. Sosialisasi Pergudangan tidak dilaksanakan karena kondisi PPKM;</p> <p>b.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan OPOP Jabar Juara tidak dilaksanakan oleh Provinsi, sehingga anggaran tidak terserap;</li> <li>• Fasilitasi label kemasan bekerja sama (kolaborasi) dengan UPI sehingga tidak menggunakan APBD;</li> <li>• Uji nutrisi tidak dilaksanakan, karena standar harga jauh dibawah harga pasar.</li> </ul> <p>Sekretariat Daerah</p> <p>(a) Nomenklatur Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan kegiatan tersebut bukan Urusan, Irisan dan Tupoksi pada Bagian Hukum Setda, sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>(c) Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan sebesar Rp1.387.036.868,00 atau 50,55% dari anggaran sebesar Rp2.743.788.100,00;</p> <p>(d) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian sebesar Rp674.094.978,00 atau 54,36% dari anggaran sebesar Rp1.239.940.000,00;</p>	<p>Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 35 Tahun 2016;</p> <p>(b) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah tidak dapat direalisasikan karena tidak ada pejabat KDH yang definitif selama kurun waktu Tahun 2021;</p> <p>(c) Realisasi Perjalanan Dinas KDH/WKDH belum maksimal, dikarenakan menyesuaikan dengan Kegiatan/Undangan yang dihadiri KDH/WKDH di Luar Daerah</p> <p>(d)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD : Terdapat beberapa kegiatan yang disesuaikan atau antisipasi untuk penanganan permasalahan BUMD serta Efisiensi Kegiatan.</li> <li>- Sub Pengendalian dan Distribusi Perekonomian : Dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai</li> </ul>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>(14) Sekretariat DPRD, antara lain kegiatan:</p> <p>(a) Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD sebesar Rp4.662.578.683,00 atau 60,08% dari anggaran sebesar Rp7.760.440.500,00;</p> <p>(b) Fasilitasi Tugas DPRD sebesar Rp368.917.328,00 atau 67,75% dari Anggaran sebesar Rp544.500.000,00;</p> <p>(15) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp72.410.858,00 atau 63,92% dari anggaran sebesar Rp113.280.000,00;</p>	<p>dengan jadwal perencanaan serta Efisiensi Kegiatan.</p> <p>Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil : Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah tidak dapat direalisasikan karena tidak ada pejabat KDH yang definitif selama kurun waktu Tahun 2021</p> <p>Sekretariat DPRD</p> <p>Efisiensi dari perjalanan dinas untuk kode rekening penginapan hanya terserap 30%.</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Pemeliharaan BMD disediakan utk pemenuhan kebutuhan BBM, servis, dan suku cadang 3 unit kendaraan operasional serta honorarium 1 org pengemudi. Realisasi anggaran sesuai dengan pemakaian atau at cost sehingga</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>(16) Kecamatan Cimahi Tengah, yaitu kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat sebesar Rp155.576.000,00 atau 42,56% dari anggaran sebesar Rp365.529.900,00;</p> <p>(17) Kantor Kesatuan Bangsa, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp39.391.314,00 atau 67,72% dari anggaran sebesar Rp58.167.500,00.</p> <p>Memperhatikan data realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut, yang relatif jauh dari rencana belanja yang ditetapkan dalam APBD, Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang dapat melakukan beberapa hal, antara lain:</p> <p>(1) Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan baik yang menyesuaikan dengan rencana Anggaran kas Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya agar konsisten dengan jadwal yang ditetapkan;</p> <p>(2) Peningkatan kualitas perencanaan Anggaran dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien untuk pencapaian output kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien; dan</p>	<p>merupakan efisiensi dari rencana yang dianggarkan.</p> <p>Kecamatan Cimahi Tengah</p> <p>Ada efisiensi anggaran dikarenakan covid.</p> <p>Kantor Kesatuan Bangsa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telepon dibayar adcost sesuai tagihan, rencana anggaran di SIPD tinggi;</li> <li>• PC tidak jadi beli karena ada kenaikan harga di anggaran.</li> </ul>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT																								
	<p>(3) Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan anggaran dengan rencana Anggaran Kas yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, sehingga terhadap objek belanja barang dan jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="580 878 1564 1190"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>504.299.063.610,00</td> <td>454.312.088.607,00</td> <td>90,09</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>584.037.435.237,50</td> <td>531.594.947.618,00</td> <td>91,02</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>585.006.159.955,61</td> <td>552.425.239.111,15</td> <td>94,43</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>520.004.318.232,48</td> <td>456.337.905.380,02</td> <td>87,76</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>657.581.777.697,00</td> <td>555.391.457.278,00</td> <td>84,46</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Belanja Bunga</p> <p>Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2021 masih jauh berada dibawah anggaran yang ditetapkan dengan capaian sebesar Rp308.874.114,00 atau 51,48% dari anggaran sebesar</p>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	2017	504.299.063.610,00	454.312.088.607,00	90,09	2018	584.037.435.237,50	531.594.947.618,00	91,02	2019	585.006.159.955,61	552.425.239.111,15	94,43	2020	520.004.318.232,48	456.337.905.380,02	87,76	2021	657.581.777.697,00	555.391.457.278,00	84,46	<p>Menindaklanjuti hasil evaluasi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih cermat dalam menyusun</p>
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)																							
2017	504.299.063.610,00	454.312.088.607,00	90,09																							
2018	584.037.435.237,50	531.594.947.618,00	91,02																							
2019	585.006.159.955,61	552.425.239.111,15	94,43																							
2020	520.004.318.232,48	456.337.905.380,02	87,76																							
2021	657.581.777.697,00	555.391.457.278,00	84,46																							

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT																								
	<p>Rp600.000.000,00. Capaian Belanja Bunga Tahun Anggaran 2021 menurun, baik secara nominal maupun persentase, apabila dibandingkan dengan capaian Belanja Bunga Tahun Anggaran 2020. Melihat masih banyaknya sisa anggaran yang tidak terserap, Pemerintah Daerah Kota Cimahi diharapkan dapat lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bunga karena dengan utang yang sudah diketahui, baik secara nominal pokok maupun persentase bunga tahunan, seharusnya perhitungan proyeksi Belanja Bunga dapat lebih tepat. Dengan perhitungan yang lebih baik, maka kelebihan anggaran dapat diminimalisir dan anggaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Gambaran capaian realisasi Belanja Bunga selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="538 1019 1512 1339"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>6.212.161.375,00</td> <td>1.519.531.175,00</td> <td>24,46</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>750.000.000,00</td> <td>518.723.151,00</td> <td>69,16</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>575.862.334,00</td> <td>687.088.955,00</td> <td>119,31</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.000.000.000,00</td> <td>781.441.813,09</td> <td>78,14</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>600.000.000,00</td> <td>308.874.114,00</td> <td>51,48</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	2017	6.212.161.375,00	1.519.531.175,00	24,46	2018	750.000.000,00	518.723.151,00	69,16	2019	575.862.334,00	687.088.955,00	119,31	2020	1.000.000.000,00	781.441.813,09	78,14	2021	600.000.000,00	308.874.114,00	51,48	<p>perencanaan Belanja Bunga karena dengan utang yang sudah diketahui, baik secara nominal pokok maupun persentase bunga tahunan, seharusnya perhitungan proyeksi Belanja Bunga dapat lebih tepat. Dengan perhitungan yang lebih baik, maka kelebihan anggaran dapat diminimalisir dan anggaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)																							
2017	6.212.161.375,00	1.519.531.175,00	24,46																							
2018	750.000.000,00	518.723.151,00	69,16																							
2019	575.862.334,00	687.088.955,00	119,31																							
2020	1.000.000.000,00	781.441.813,09	78,14																							
2021	600.000.000,00	308.874.114,00	51,48																							

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>d) Belanja Subsidi</p> <p>Realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021 sudah terbilang cukup baik dengan dengan capaian sebesar Rp410.574.000,00 atau 80,96% dari target Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp507.144.000,00. Capaian Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021 meningkat apabila dibandingkan dengan capaian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 karena selama 5 (lima) tahun terakhir, tidak terdapat realisasi Belanja Subsidi sebelum Tahun Anggaran 2021. Melihat munculnya Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kota Cimahi diharapkan dapat melakukan evaluasi terkait efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Belanja Subsidi ini sehingga di tahun-tahun mendatang dapat lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Subsidi dan lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendanai pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>e) Belanja Hibah</p> <p>Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 sudah mendekati target yang ditetapkan dengan capaian sebesar Rp18.999.042.200,00 atau 90,67% dari anggaran sebesar Rp20.953.726.450,00. Capaian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 terlihat meningkat, baik secara nominal maupun persentase, apabila dibandingkan dengan capaian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020. Namun demikian, dalam rangka semakin meningkatkan efektif dan efisien perencanaan anggaran Belanja Hibah pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kota</p>	<p>Menindaklanjuti hasil evaluasi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melakukan evaluasi terkait efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Belanja Subsidi ini sehingga di tahun-tahun mendatang dapat lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Subsidi dan lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendanai pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Menindaklanjuti hasil evaluasi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Hibah serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Hibah sehingga obyek Belanja Hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal dan memiliki</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT																								
	<p>Cimahi harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Hibah serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Hibah sehingga obyek Belanja Hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal dan memiliki kelebihan anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Gambaran capaian realisasi Belanja Hibah selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="558 732 1507 1049"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>14.431.924.700,00</td> <td>13.947.887.750,00</td> <td>96,65</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>17.290.350.000,00</td> <td>16.159.150.000,00</td> <td>93,46</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>16.362.800.000,00</td> <td>15.355.225.000,00</td> <td>93,84</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>15.688.221.480,00</td> <td>13.856.011.450,00</td> <td>88,32</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.953.726.450,00</td> <td>18.999.042.200,00</td> <td>90,67</td> </tr> </tbody> </table> <p>f) Belanja Bantuan Sosial</p> <p>Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 masih jauh berada dibawah target yang ditetapkan dengan capaian sebesar Rp2.571.530.000,00 atau 70,84% dari anggaran sebesar Rp3.630.024.338,00. Capaian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 menurun, baik secara nominal maupun persentase, apabila dibandingkan dengan capaian Belanja</p>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	2017	14.431.924.700,00	13.947.887.750,00	96,65	2018	17.290.350.000,00	16.159.150.000,00	93,46	2019	16.362.800.000,00	15.355.225.000,00	93,84	2020	15.688.221.480,00	13.856.011.450,00	88,32	2021	20.953.726.450,00	18.999.042.200,00	90,67	<p>kelebihan anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Menindaklanjuti hasil evaluasi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bantuan Sosial serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Bantuan Sosial</p>
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)																							
2017	14.431.924.700,00	13.947.887.750,00	96,65																							
2018	17.290.350.000,00	16.159.150.000,00	93,46																							
2019	16.362.800.000,00	15.355.225.000,00	93,84																							
2020	15.688.221.480,00	13.856.011.450,00	88,32																							
2021	20.953.726.450,00	18.999.042.200,00	90,67																							



NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT																								
	<p>Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang efektif dan efisien pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus tetap lebih cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Bantuan Sosial serta pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Bantuan Sosial sehingga terhadap obyek Belanja Bantuan Sosial yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Gambaran capaian realisasi Belanja Bantuan Sosial selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="538 906 1507 1221"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>626.250.000,00</td> <td>344.250.000,00</td> <td>54,97</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>4.285.400.000,00</td> <td>3.227.128.000,00</td> <td>75,31</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>3.394.820.000,00</td> <td>2.864.475.000,00</td> <td>84,38</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3.630.024.338,00</td> <td>2.571.530.000,00</td> <td>70,84</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Belanja Modal</p> <p>Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 belum mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yaitu</p>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	2017	0,00	0,00	-	2018	626.250.000,00	344.250.000,00	54,97	2019	4.285.400.000,00	3.227.128.000,00	75,31	2020	3.394.820.000,00	2.864.475.000,00	84,38	2021	3.630.024.338,00	2.571.530.000,00	70,84	<p>sehingga terhadap obyek Belanja Bantuan Sosial yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Menindaklanjuti hasil evaluasi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan</p>
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)																							
2017	0,00	0,00	-																							
2018	626.250.000,00	344.250.000,00	54,97																							
2019	4.285.400.000,00	3.227.128.000,00	75,31																							
2020	3.394.820.000,00	2.864.475.000,00	84,38																							
2021	3.630.024.338,00	2.571.530.000,00	70,84																							

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>sebesar Rp247.060.564.786,00 atau 58,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp425.752.276.510,00. Persentase capaian realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 meningkat dibandingkan persentase capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020. Namun meski begitu, Realisasi Belanja Modal masih sangat rendah dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus lebih mengoptimalkan anggaran sehingga rencana belanja modal dapat tercapai yang pada akhirnya dapat turut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa kegiatan SKPD yang masih terdapat realisasi rincian objek Belanja Modal jauh dari anggaran yang ditetapkan, antara lain:</p> <p>a) Dinas Pendidikan, antara lain kegiatan:</p> <p>(1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp2.199.496.444,00 atau 60,63% dari anggaran sebesar Rp3.627.955.200,00;</p> <p>(2) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp38.112.400,00;</p>	<p>lebih mengoptimalkan anggaran sehingga rencana belanja modal dapat tercapai yang pada akhirnya dapat turut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>(a)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium anggaran sebesar Rp. 483.033.700,00 tidak direalisasikan karena untuk perencanaan pembangunan direncanakan di lantai 3, sedangkan dalam juknis untuk pembangunan laboratorium maksimal dibangun di lantai 2, karena tidak sesuai dengan aturan maka kegiatan tidak dilaksanakan.</li> <li>- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah anggaran sebesar Rp. 74.791.600,00 tidak direalisasikan</li> </ul>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
		<p>karena penganggaran tidak sesuai dengan Rencana Kerja dari pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah anggaran sebesar Rp. 220.000.000,00 realisasi Rp. 40.042.100,00, penyerapan hanya untuk jasa konsultasi perencanaan , karena waktu untuk pelaksanaan pembangunan tidak mencukupi maka untuk kegiatan dianggarkan Kembali pada tahun 2022.</li> <li>- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa anggaran sebesar Rp. 577.841.700,00 tidak direalisasikan karena data CPCL sudah ada dari pusat</li> </ul> <p>(b) Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan jumlah siswa yang tervalidasi pada DAPODIK Semester 2 yang berimplikasi pada penurunan dana BOP Kesetaraan yang diterima oleh SKB Kota Cimahi, sehingga ada beberapa pembelanjaan yang tidak bisa terealisasi dikarenakan dana tidak mencukupi.</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>b) RSUD Cibabat yaitu Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.318.276.130,00 atau 49,48% dari anggaran sebesar Rp4.685.402.000,00;</p> <p>c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain kegiatan:</p> <p>(1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.489.180.282,00 atau 57,75% dari anggaran sebesar Rp4.310.099.740,00;</p> <p>(2) Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp575.613.475,00;</p>	<p>RSUD Cibabat</p> <p>Belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kondisi Pendapatan yang sebagian besar masuk di akhir tahun sehingga anggaran tidak dapat dipergunakan lebih maksimal pada tahun berjalan.</p> <p>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>(a)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan pengerukan tidak jadi dilaksanakan dikarenakan kesulitan mencari tempat pembuangan sedimen dan pihak ketiga yang memenuhi syarat</li> <li>- Pengadaan tanah tidak terserap semua karena untuk penyelesaian 4 bidang tanah sisa harus diselesaikan sesuai aturan baru, yaitu PP Nomor 19 Tahun 2021 dan PermenATR/BPN Nomor19 Tahun 2021, yang berlaku efektif sejak Juni 2021</li> <li>- Dua Pekerjaan Paket Rehabilitasi Saluran Sungai (Cimahi dan Cibeureum) putus kontrak dan</li> </ul>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>d) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, yaitu kegiatan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari Anggaran sebesar Rp18.642.000,00;</p>	<p>hanya dibayarkan untuk 85 % dan 52 %</p> <p>(b)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Long Storage di RW 11 Kelurahan Leuwigajah (Aneka Bakti) tidak jadi dilaksanakan karena adanya permohonan pemindahan lokasi dari warga, sebelumnya lokus adalah di RW 10 KelurahanCibeber dan ditolak warga juga</li> <li>- PL Drainase (ABT) di RW 08-09 Kel. Setiamanah : ada hambatan teknis di lokasi kegiatan (sudah ada pengerjaan jalan lingkungan/ PPM, tidak memungkinkan membongkar jalan yang baru 1 bulan dibangun)</li> </ul> <p>Dinas Sosial</p> <p>Sisa realisasi DAK fisik bidang KB akumulasi dari tahun 2008 - 2018, dianggarkan untuk pembelian komputer, tidak diserap krn sampai akhir tahun tidak ada juknis atau aturan yg</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>e) Dinas Lingkungan Hidup, antara lain kegiatan:</p> <p>(1) Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebesar Rp1.019.274.221,00 atau 53,24% dari anggaran sebesar Rp1.914.576.100,00;</p> <p>(2) Pengelolaan Sampah sebesar Rp3.294.322.738,00 atau 63,21% dari anggaran sebesar Rp5.211.726.150,00 meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>mengatur penggunaan sisa akumulasi DAK fisik dari pusat.</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>(a) Terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan pagu anggaran Rp 648.480.750, dengan realisasi 581.152.921 (89,61%);</li> <li>2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dengan pagu anggaran Rp 53.545.800 dan realisasi 50.365.200 (94%);</li> <li>3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp 2.914.324.300, dengan realisasi 1.941.166.780 (66,60%). Ada efisiensi sebesar Rp 876.988.900, dari belanja modal alat laboratorium kualitas air dan belanja modal alat laboratorium kualitas udara.</li> </ol>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>f) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp3.276.758.532,00 atau 64,25% dari anggaran sebesar Rp5.099.999.000,00;</p>	<p>(b) Tender ulang pengadaan kendaraan operasional (angkle box mobil box, pick up) senilai 1,65 Milyar di bulan desember dinyatakan gagal karena tidak ada yang memasukkan penawaran</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Realisasi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp. 3.276.758.532 ( atau 64,25% ) dari anggaran sebesar Rp. 5.099.999.000 dikarenakan sebesar Rp. 1.278.105.200 yang tidak terserap antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp. 346.392.000 pengadaan server, disebabkan tidak tersedia di e-katalog dan barang indent +/- 16 minggu.</li> <li>- Rp. 352.921.500 pengadaan genset, alat pemadam kebakaran dan selang pemdam yang telah tersedia di DPUPR.</li> <li>- Rp. 195.000.000 pengadaan smart TV yang tidak terserap dikarenakan harga e-katalog lebih tinggi dari harga</li> </ul>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>g) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, antara lain kegiatan:</p> <p>(1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp2.591.298.225,00 atau 53,12% dari anggaran sebesar Rp4.878.455.730,00;</p> <p>(2) Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp739.203.800,00 atau 0,62% dari Anggaran sebesar Rp119.559.791.864,00;</p>	<p>pasar sehingga PPK keberatan dalam menentukan HPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp. 179.428.600 pengadaan penghancur kertas yang tidak terserap dikarenakan barang pesanan tertinggal di pelabuhan di Jerman dan tiba kembali lintas tahun 2022.</li> <li>- Rp. 204.363.100 pengadaan mesin fax, mesin absensi, LED TV 32", telepon dan printer yang tidak tersedia di e-katalog dan sebagian lagi barang yang diminta telah discontinued.</li> </ul> <p>Adapun selisih lainnya dikarenakan efisiensi belanja barang modal baik secara e-katalog, pengadaan langsung maupun melalui merchand/toko.</p> <p>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>(a) Di dalam kontrak pembangunan eko wisata Cimenteng sebesar Rp 3.128.313.000 (60% dari DED dikarenakan anggarannya kurang dan sisa waktu yang tidak memungkinkan untuk dibangun sesuai DED yang telah di review). Dicairkan baru 65% dari kontrak Rp. 2.216.618.025 sesuai dengan progres per tanggal 30 Desember;</p>



NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>h) Sekretariat DPRD, yaitu kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp231.689.693,00 atau 60,87% dari anggaran sebesar Rp380.629.052,00.</p> <p>Pada SKPD, masih terdapat pula Belanja Modal yang melampaui anggaran yang ditetapkan dan perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu Dinas Pendidikan, dengan rincian antara lain:</p> <p>a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp4.664.753.332,00 atau 100,54% dari anggaran sebesar Rp4.639.241.303,00; dan</p> <p>b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp1.917.612.055,00 atau 100,48% dari anggaran sebesar Rp1.908.274.908,00.</p> <p>Gambaran capaian realisasi Belanja Modal selama lima tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d. Tahun Anggaran 2021) sebagaimana tabel berikut:</p>	<p>(b) Tidak bisa diserap 100% diakrenakan gagal lelang untuk Revitalisasi Stadion Sangkuriang.</p> <p>Sekretariat DPRD</p> <p>(1) pengadaan Laptop tidak diserap karena ada laporan dari Aset bahwa ada inventaris Laptop yg belum terlapor kan harus diselesaikan terlebih dahulu inventarisasi-nya.</p> <p>(2) Pengadaan Barrier Gate tidak dapat diserap karena waktu pelaksanaan pengadaannya tidak keburu.</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT																								
	<table border="1" data-bbox="547 321 1488 646"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>352.474.886.621,00</td> <td>270.324.719.343,00</td> <td>76,69</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>363.487.982.456,96</td> <td>276.020.230.064,00</td> <td>75,94</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>348.278.444.036,17</td> <td>260.337.997.570,00</td> <td>74,75</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>170.648.933.418,00</td> <td>97.244.613.801,00</td> <td>56,99</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>425.752.276.510,00</td> <td>247.060.564.786,00</td> <td>58,03</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="421 703 827 740">3) Belanja Tidak Terduga</p> <p data-bbox="465 764 1549 1146">Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp12.793.426.443,00 atau 53,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.880.085.890,00. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp61.558.731.877,00 atau 82,79% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp74.352.158.320,00. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan seiring dengan kebijakan pemerintah pusat di Tahun 2021 terkait dengan penurunan pandemi wabah covid-19 sehingga realisasi anggaran BTT dapat dikurangi.</p> <p data-bbox="465 1170 1549 1424">Capaian realisasi tersebut kurang optimal, namun demikian Pemerintah Kota Cimahi harus tetap menyediakan Belanja Tidak Terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak terduga,</p>	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	2017	352.474.886.621,00	270.324.719.343,00	76,69	2018	363.487.982.456,96	276.020.230.064,00	75,94	2019	348.278.444.036,17	260.337.997.570,00	74,75	2020	170.648.933.418,00	97.244.613.801,00	56,99	2021	425.752.276.510,00	247.060.564.786,00	58,03	<p data-bbox="1579 745 2227 1390">Menindaklanjuti hasil evaluasi, Pemerintah Kota Cimahi akan tetap menyediakan Belanja Tidak Terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak terduga, sehingga terhadap objek Belanja Tidak Terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas</p>
Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)																							
2017	352.474.886.621,00	270.324.719.343,00	76,69																							
2018	363.487.982.456,96	276.020.230.064,00	75,94																							
2019	348.278.444.036,17	260.337.997.570,00	74,75																							
2020	170.648.933.418,00	97.244.613.801,00	56,99																							
2021	425.752.276.510,00	247.060.564.786,00	58,03																							

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>sehingga terhadap objek Belanja Tidak Terduga yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>c. Pembiayaan</p> <p>1) Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2021, meliputi:</p> <p>a) Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp270.898.017.186,53 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp271.172.220.678,00 yang diperoleh dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).</p> <p>b) Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21% dari anggaran sebesar Rp2.429.808.337,00 yang seluruhnya merupakan Realisasi Pembayaran Pokok Utang.</p> <p>Memperhatikan data tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang harus lebih realistis dalam memprediksi Penerimaan Pembiayaan sehingga tidak berimplikasi terhadap menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Selanjutnya, melihat penyerapan Pembayaran Pokok Utang yang masih sangat rendah dibandingkan anggaran yang ada, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat lebih memaksimalkan anggaran yang telah tersedia sehingga dapat segera menyelesaikan kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih memaksimalkan anggaran yang telah tersedia sehingga dapat segera menyelesaikan kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT																								
	<p>2) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</p> <p>Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp308.665.364.620,64 atau 16,63% dari total anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.856.578.149.343,00.</p> <p>Rasio SILPA terhadap anggaran belanja daerah Kota Cimahi TA.2017 sampai dengan TA.2021 sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="428 597 1520 1166"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran Belanja Daerah (Rp)</th> <th>SILPA (Rp)</th> <th>Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>1.637.050.871.413,09</td> <td>339.315.908.039,53</td> <td>20,73</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.691.773.488.737,46</td> <td>166.342.122.863,92</td> <td>9,83</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.675.364.781.120,20</td> <td>121.693.751.477,73</td> <td>7,26</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.576.350.590.820,19</td> <td>271.172.220.677,53</td> <td>17,20</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.856.578.149.343,00</td> <td>308.665.364.620,64</td> <td>16,63</td> </tr> </tbody> </table> <p>Memperhatikan data tersebut, rasio SILPA Tahun Anggaran 2021 menurun dibanding dari Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja dan</p>	Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah (%)	2017	1.637.050.871.413,09	339.315.908.039,53	20,73	2018	1.691.773.488.737,46	166.342.122.863,92	9,83	2019	1.675.364.781.120,20	121.693.751.477,73	7,26	2020	1.576.350.590.820,19	271.172.220.677,53	17,20	2021	1.856.578.149.343,00	308.665.364.620,64	16,63	<p>Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat meminimalisir besaran SILPA pada tahun berjalan.</p> <p>Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban atau utang dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun</p>
Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	SILPA (Rp)	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah (%)																							
2017	1.637.050.871.413,09	339.315.908.039,53	20,73																							
2018	1.691.773.488.737,46	166.342.122.863,92	9,83																							
2019	1.675.364.781.120,20	121.693.751.477,73	7,26																							
2020	1.576.350.590.820,19	271.172.220.677,53	17,20																							
2021	1.856.578.149.343,00	308.665.364.620,64	16,63																							

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat meminimalisir besaran SILPA pada tahun berjalan.</p> <p>Sehubungan dengan itu, disarankan agar Pemerintah Daerah Kota Cimahi memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban atau utang dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>2. NERACA</p> <p>a. Aset Lancar</p> <p>Aset Lancar Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2021 sebesar Rp445.823.435.406,89, antara lain yaitu:</p> <p>1) Kas</p> <p>Saldo Kas pada Neraca 31 Desember 2021 sebesar Rp309.256.158.331,64 terdiri atas:</p>	<p>2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>a) Kas di Kas Daerah</p> <p>Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp261.726.825.185,51 meningkat sebesar Rp8.743.770.800,59 atau 3,46% dibandingkan dengan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp252.983.054.384,92.</p> <p>Berdasarkan data tersebut, pada tahun-tahun mendatang agar lebih diperhatikan perencanaan pemanfaatan kas dimaksud dalam rangka peningkatan PAD dengan memperhatikan manajemen kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b) Kas di Bendahara Pengeluaran</p> <p>Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp148.923.030,52 mengalami peningkatan sebesar Rp148.923.030,52 dari Tahun 2020 yang tidak memiliki saldo di Bendahara Pengeluaran.</p> <p>Terhadap Sisa Kas yang belum disetor pada akhir tahun oleh Bendahara termaksud, pada tahun yang akan datang diharapkan segera disetorkan ke RKUD paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember.</p> <p>c) Kas di Bendahara Penerimaan</p> <p>Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp659.044,00 mengalami peningkatan sebesar Rp659.044,00 dari Tahun 2020 yang tidak memiliki saldo di Bendahara Penerimaan.</p>	<p>Menindaklanjuti hasil evaluasi, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih memperhatikan perencanaan pemanfaatan kas dimaksud dalam rangka peningkatan PAD dengan memperhatikan manajemen kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Terhadap Sisa Kas yang belum disetor pada akhir tahun oleh Bendahara termaksud, pada tahun yang akan datang akan disetorkan ke RKUD paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember.</p> <p>Terhadap Sisa Kas yang belum disetor pada akhir tahun oleh Bendahara termaksud, pada tahun yang akan datang akan disetorkan ke RKUD paling</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>Terhadap Sisa Kas yang belum disetor pada akhir tahun oleh Bendahara termaksud, pada tahun yang akan datang diharapkan segera disetorkan ke RKUD paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember</p> <p>d) Kas di BLUD</p> <p>Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 pada Bendahara BLUD sebesar Rp45.025.538.922,61. Saldo Kas BLUD pada Tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar Rp29.631.385.499,00 atau 192,48% dari Tahun 2020 sebesar Rp15.394.153.423,61.</p> <p>Terhadap Sisa Kas BLUD tersebut, agar digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>e) Kas di Bendahara BOS</p> <p>Saldo Kas BOS per 31 Desember 2021 pada Bendahara BOS sebesar Rp1.763.418.438,00 yang merupakan Sisa Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Saldo Kas BOS pada Tahun 2021 ini mengalami penurunan sebesar Rp727.477.216,00 atau 29,21% dari Tahun 2020 sebesar Rp2.490.895.654,00.</p> <p>Terhadap Sisa Kas Dana BOS agar digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan</p>	<p>lambat hari kerja terakhir bulan Desember.</p> <p>Terhadap Sisa Kas BLUD tersebut, akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>Terhadap Sisa Kas Dana BOS akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>kuantitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>f) Kas Lainnya</p> <p>Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp590.793.711,00, nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp30.649.034,00 atau 5,47% jika dibandingkan dengan Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp560.144.677,00.</p> <p>Kas Lainnya ini terdiri dari kas pada Rekening UPTD Rusunawa Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berasal dari jaminan dan/atau bunga uang keluar atas pencairan penghuni yang telah keluar serta keterlambatan pembayaran pajak (PFK) Dana BOS Tahun 2021 dari 8 Sekolah Dasar Negeri.</p> <p>2) Piutang</p> <p>Nilai Piutang Bersih per 31 Desember 2021 sebesar Rp104.547.619.200,32 terdiri dari:</p> <p>a) Piutang sebesar Rp106.846.464.471,21 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>(1) Piutang Pajak sebesar Rp82.147.425.882,83;</p> <p>(2) Piutang Retribusi sebesar Rp760.699.766,62;</p> <p>(3) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp9.794.305.571,00;</p>	<p>Untuk denda keterlambatan pembayaran pajak (PFK) Dana BOS Tahun 2021 dari 8 Sekolah Dasar Negeri telah disetor ke kas negara.</p> <p>Berkenaan dengan Saldo Piutang tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih, dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, serta tetap terus</p>



NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>(4) Piutang Lainnya sebesar Rp9.567.340.661,47;  (5) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp4.576.692.589,29.</p> <p>b) Penyisihan Piutang Lainnya</p> <p>Nilai Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.298.845.270,88).</p> <p>Berkenaan dengan Saldo Piutang tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cimahi agar melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih, dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, serta tetap terus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.</p> <p>3) Persediaan</p> <p>Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.019.657.874,93.</p> <p>Terhadap Saldo Persediaan tersebut, agar dilakukan sistem pengendalian dan pengelolaan yang baik dan memadai mengenai jenis, jumlah maupun nilainya untuk mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kerusakan persediaan sekaligus menghindari terjadinya pemborosan terhadap penggunaan dana APBD.</p> <p>Disamping itu, untuk tahun mendatang dalam menetapkan jumlah anggaran persediaan supaya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran sebelumnya, sedangkan untuk menghitung kebutuhan nyata</p>	<p>mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.</p> <p>Terhadap Saldo Persediaan, akan dilakukan sistem pengendalian dan pengelolaan yang baik dan memadai mengenai jenis, jumlah maupun nilainya untuk mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kerusakan persediaan sekaligus menghindari terjadinya pemborosan terhadap penggunaan dana APBD.</p> <p>Disamping itu, untuk tahun mendatang dalam menetapkan jumlah anggaran persediaan akan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang dikurangi dengan</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan, serta kebutuhan barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>4) Inventasi</p> <p>Nilai Investasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.544.583.899,50 yang terdiri dari:</p> <p>a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp50.591.536,00 merupakan nilai Dana Bergulir Kota Cimahi sebesar Rp50.591.536,00.</p> <p>Terhadap Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir, Pemerintah Daerah Kota Cimahi supaya melakukan pengelolaan secara cermat dan efektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diatur secara jelas substansi dan mekanismenya.</p> <p>b) Investasi Permanen sebesar Rp68.493.992.363,50 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>(1) Penyertaan Modal pada Bank BJB sebesar Rp26.000.000.000,00;</p> <p>(2) Penyertaan Modal pada PD Jati Mandiri sebesar Rp42.493.992.363,50.</p>	<p>sisanya barang persediaan tahun anggaran sebelumnya, sedangkan untuk menghitung kebutuhan nyata disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan, serta kebutuhan barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Terhadap Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir, Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melakukan pengelolaan secara cermat dan efektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diatur secara jelas substansi dan mekanismenya.</p> <p>Terhadap investasi permanen Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis rasio dalam rangka pengambilan kebijakan atas Penyertaan Modal Daerah</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>Terhadap investasi permanen Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis rasio dalam rangka pengambilan kebijakan atas Penyertaan Modal Daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, Pendapatan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>Selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang harus tetap meningkatkan pengawasan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud.</p> <p>b. Aset Tetap</p> <p>Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.401.012.973.312,90 terdiri dari:</p> <p>1) Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) Tanah sebesar Rp1.056.705.806.799,00;</p> <p>b) Peralatan dan Mesin sebesar Rp694.191.726.346,98;</p>	<p>dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, Pendapatan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>Selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang akan meningkatkan pengawasan antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud.</p> <p>Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik dan memadai dengan pengamanan dari segi administrasi, fisik dan hukum untuk mengurangi kemungkinan resiko</p>



NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>3) Akumulasi Amortisasi Aset tak berwujud sebesar (Rp8.229.263.872,40); dan</p> <p>4) Aset Lain-lain sebesar Rp16.955.466.977,42.</p> <p>Sebagaimana halnya Aset Tetap, terhadap Aset Lainnya agar dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.</p> <p>e. Kewajiban</p> <p>Kewajiban Pemerintah Daerah Kota Cimahi per 31 Desember 2021 berupa Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp18.797.360.506,47 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp48.276.595,00;</li> <li>2) Utang Bunga sebesar Rp129.039.156,47;</li> <li>3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp855.508.220,00;</li> <li>4) Utang Belanja sebesar Rp4.141.620.812,00; dan</li> <li>5) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp13.622.915.723,00.</li> </ol> <p>Pemerintah Daerah Kota Cimahi juga memiliki Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember sebesar Rp2.566.524.658,70 yang seluruhnya adalah Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat.</p> <p>Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Cimahi harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas.</p>	<p>meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Kota Cimahi akan segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas.</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>f. Ekuitas</p> <p>Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.916.024.217.594,05. Hal ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.916.024.217.594,05.</p> <p>3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)</p> <p>a. Pendapatan-LO</p> <p>Pendapatan-LO Tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.545.373.383.520,29. Pendapatan-LO Tahun anggaran 2021 terdiri dari:</p> <p>1) Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD-LO)</p> <p>PAD-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp433.164.813.348,49, mengalami kenaikan sebesar Rp64.549.594.607,58 atau 17,51% dibandingkan dengan realisasi PAD-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp368.615.218.740,91. PAD-LO Tahun Anggaran 2021 tersebut terdiri dari:</p> <p>a) Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp203.700.704.578,00;</p> <p>b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.171.916.379,00;</p>	

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.956.960.000,00; dan</p> <p>d) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp207.335.232.391,49.</p> <p>2) Pendapatan Transfer</p> <p>a) Pendapatan Transfer-LO-Pemerintah Pusat</p> <p>Pendapatan Transfer-LO – Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp743.905.839.987,00 mengalami penurunan sebesar Rp44.424.205.503,00 atau 5,64% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp788.330.045.490,00.</p> <p>Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2021 tersebut terdiri atas:</p> <p>(1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp51.986.941.479,00;</p> <p>(2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp29.733.151.567,00;</p> <p>(3) Dana Alokasi Umum-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp530.425.978.000,00;</p> <p>(4) Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp131.759.768.941,00;</p>	

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>b) Pendapatan Transfer-LO - Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp52.247.274.000,00;</p> <p>c) Pendapatan Transfer-LO (Pemerintah Daerah Lainnya) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp126.781.787.043,00; dan</p> <p>d) Bantuan Keuangan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp105.707.342.961,00.</p> <p>3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO</p> <p>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp83.566.326.180,80 mengalami peningkatan sebesar Rp24.055.154.259,82 atau 28,86% dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.361.372.716,98.</p> <p>b. Beban</p> <p>Beban Tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.330.843.106.922,38, Beban Tahun anggaran 2021 terdiri dari:</p> <p>1) Beban Operasi</p> <p>Beban Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.330.843.106.922,38 mengalami penurunan sebesar Rp26.166.539.763,60 atau 1,93% dibandingkan dengan realisasi Beban Operasi Tahun Anggran 2021 sebesar Rp1.357.009.646.685,98.</p>	



NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>2) Total Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional</p> <p>Total Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp5.130.797.753,00).</p> <p>3) Beban Luar Biasa</p> <p>Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.736.649.668,00.</p> <p>c. Surplus/Defisit-LO sebesar Rp199.662.829.176,91 telah sesuai dengan Surplus/Desifit pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021.</p>	
II.	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK</p>	
	<p>Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.</p> <p>Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Nomor 30A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 Tanggal 24 Mei 2022, menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut</p>	<p>Telah ditindaklanjuti melalui Rencana Aksi (Action Plan) tindak lanjut rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tanggal 24 Mei 2022.</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah menyajikan secara wajar hal-hal yang berkenaan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>Terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, masih terdapat temuan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kota Cimahi, yaitu temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu meliputi:</p>	
A.	<p><b>PENDAPATAN</b></p> <p>Pengelolaan dan penatausahaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum tertib.</p>	<p>Telah ditindaklanjuti melalui Rencana Aksi (Action Plan) tindak lanjut rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tanggal 24 Mei 2022.</p>
B.	<p><b>BELANJA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja PNS sebesar Rp44.791.370,00;</li> <li>2. Kelebihan pembayaran Realisasi Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp321.300.000,00;</li> </ol>	<p>Telah ditindaklanjuti melalui Rencana Aksi (Action Plan) tindak lanjut rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tanggal 24 Mei 2022.</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>3. Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah terlambat disampaikan oleh tiga pihak Penerima Hibah;</p> <p>4. Kelebihan pembayaran atas dua Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan pada dua SKPD sebesar Rp2.193.524.554,93 dan ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan sebesar Rp67.500.000,00;</p> <p>5. Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Underpass Sriwijaya Kelurahan Baros sebesar Rp77.282.884,89; dan</p> <p>6. Pekerjaan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi ke Rusunawa Melong belum dapat dimanfaatkan dan terdapat pembayaran melampaui Prestasi Pekerjaan sebesar Rp62.310.171,90.</p>	
C.	<p><b>ASET</b></p> <p>1. Pelaksanaan Transaksi Tunai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada beberapa Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>2. Penatausahaan Piutang Pajak Daerah belum memadai;</p> <p>3. Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan belum tertib; dan</p> <p>4. Pemanfaatan Aset Tetap melalui Perjanjian Pinjam Pakai belum sepenuhnya tertib.</p> <p>Terhadap temuan BPK tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kota Cimahi agar segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Telah ditindaklanjuti melalui Rencana Aksi (Action Plan) tindak lanjut rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tanggal 24 Mei 2022.</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
III.	LAIN-LAIN	
A.	<p>Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya.</p>	<p>Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya.</p>
B.	<p><b>EVALUASI ASPEK HUKUM ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b></p> <p><b>1. KONSIDERAN</b></p> <p>Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi:</p> <p>“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021”.</p> <p><b>2. DASAR HUKUM</b></p> <p>a. Angka 1 dihapus</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti</p> <p>Sudah ditindaklanjuti.</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>b. Angka 7 dihapus</p> <p>c. Angka 8 disempurnakan menjadi:  “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>d. Angka 9 disempurnakan menjadi:  “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>e. Angka 27 disempurnakan menjadi:  “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti.</p> <p>Sudah ditindaklanjuti.</p> <p>Sudah ditindaklanjuti.</p>



NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
C.	<p data-bbox="335 274 1473 305"><b>EVALUASI ASPEK HUKUM ATAS RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA</b></p> <p data-bbox="335 334 601 365"><b>1. KONSIDERAN</b></p> <p data-bbox="379 394 1153 425">Konsideran Menimbang disempurnakan menjadi:</p> <p data-bbox="379 453 1530 699">“bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, perlu menempatkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021”.</p> <p data-bbox="335 784 635 815"><b>2. DASAR HUKUM</b></p> <p data-bbox="389 844 704 875">a. Angka 1 dihapus</p> <p data-bbox="389 904 704 935">b. Angka 7 dihapus</p> <p data-bbox="389 964 968 995">c. Angka 8 disempurnakan menjadi:</p> <p data-bbox="438 1024 1512 1312">“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p data-bbox="389 1352 968 1383">d. Angka 9 disempurnakan menjadi:</p>	<p data-bbox="1579 334 1929 365">Sudah ditindaklanjuti.</p> <p data-bbox="1579 805 1929 836">Sudah ditindaklanjuti.</p> <p data-bbox="1579 865 1929 896">Sudah ditindaklanjuti.</p> <p data-bbox="1579 925 1929 956">Sudah ditindaklanjuti.</p> <p data-bbox="1579 1336 1929 1367">Sudah ditindaklanjuti.</p>

NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>e. Angka 27 disempurnakan menjadi:</p> <p>“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777)”.</p> <p>f. Angka 28 penulisan kata “Petunjuk” di ubah menjadi “Pedoman”.</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti.</p> <p>Sudah ditindaklanjuti.</p>



NO	CATATAN EVALUASI	TINDAK LANJUT
	<p>3. BATANG TUBUH</p> <p>a. Pasal 1 huruf d penulisan kata “SILPA” di ubah menjadi “SiLPA”</p> <p>b. Ditambahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota dan yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi.</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti.</p> <p>Sudah ditindaklanjuti.</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA CIMAHI

KETUA,



ACHMAD ZULKARNAIN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 3 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
	Pendapatan Pajak Daerah	152.786.878.291,00	179.891.802.692,00	117,74	158.937.237.899,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	11.404.826.000,00	11.548.482.640,00	101,26	15.243.650.522,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	9.956.960.000,00	100,00	9.778.080.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	172.473.478.843,00	203.707.746.221,11	118,11	191.728.274.257,91
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>346.622.143.134,00</b>	<b>405.104.991.553,11</b>	<b>116,87</b>	<b>375.687.242.678,91</b>
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
	Dana Bagi Hasil Pajak	60.721.010.363,00	61.309.116.578,00	100,97	50.460.873.698,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	31.578.902.903,00	47.781.705.502,00	151,31	38.645.976.130,00
	Dana Alokasi Umum	530.425.978.000,00	530.425.978.000,00	100,00	539.717.972.000,00
	Dana Alokasi Khusus	143.744.872.000,00	131.759.768.941,00	91,66	160.457.085.903,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>766.470.763.266,00</b>	<b>771.276.569.021,00</b>	<b>100,63</b>	<b>789.281.907.731,00</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	97.730.028.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya</b>	<b>52.247.274.000,00</b>	<b>52.247.274.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97.730.028.000,00</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	128.032.319.484,00	123.865.281.737,00	96,75	118.963.390.897,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	236.810.517.464,00	105.707.342.961,00	44,64	23.922.151.027,00
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>364.842.836.948,00</b>	<b>229.572.624.698,00</b>	<b>62,92</b>	<b>142.885.541.924,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>1.183.560.874.214,00</b>	<b>1.053.096.467.719,00</b>	<b>88,98</b>	<b>1.029.897.477.655,00</b>
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
	Pendapatan Hibah	-	6.700.327.000,00	-	140.839.566,00
	Dana Darurat				
	Dana BOS	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68	52.270.900.000,00
	Pendapatan Lainnya		71.950.231,00		
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>57.652.719.654,00</b>	<b>61.934.101.231,00</b>	<b>107,43</b>	<b>52.411.739.566,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.587.835.737.002,00</b>	<b>1.520.135.560.503,11</b>	<b>95,74</b>	<b>1.457.996.459.899,91</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>				
	<b>BELANJA OPERASI</b>				
	Belanja Pegawai	723.673.114.458,00	643.977.236.028,00	88,99	636.883.229.738,00
	Belanja Barang	657.581.777.697,00	555.391.457.278,00	84,46	456.337.905.380,02
	Belanja Bunga	600.000.000,00	308.874.114,00	51,48	781.441.813,09
	Belanja Subsidi	507.144.000,00	410.574.000,00	80,96	-
	Belanja Hibah	20.953.726.450,00	18.999.042.200,00	90,67	13.856.011.450,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.630.024.338,00	2.571.530.000,00	70,84	2.864.475.000,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.406.945.786.943,00</b>	<b>1.221.658.713.620,00</b>	<b>86,83</b>	<b>1.110.723.063.381,11</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>				
	Belanja Tanah	8.724.964.740,00	1.924.413.918,00	22,06	24.237.283.327,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	52.272.761.644,00	40.367.666.054,00	77,23	36.574.433.534,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	228.846.712.178,00	92.323.402.639,00	40,34	19.768.621.392,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	132.999.455.842,00	109.597.606.795,00	82,40	13.598.490.000,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.908.382.106,00	2.847.475.380,00	97,91	3.065.785.548,00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>425.752.276.510,00</b>	<b>247.060.564.786,00</b>	<b>58,03</b>	<b>97.244.613.801,00</b>
	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
	Belanja Tak Terduga	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	53,57	74.352.158.320,00
	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>23.880.085.890,00</b>	<b>12.793.426.443,00</b>	<b>53,57</b>	<b>74.352.158.320,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.856.578.149.343,00</b>	<b>1.481.512.704.849,00</b>	<b>79,80</b>	<b>1.282.319.835.502,11</b>

**KOTA CIMAHI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020**

(Dalam Rupiah)

III	<b>TRANSFER</b>				
	<b>TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN</b>				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	<b>Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan</b>	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>1.856.578.149.343,00</b>	<b>1.481.512.704.849,00</b>	<b>79,80</b>	<b>1.282.319.835.502,11</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(268.742.412.341,00)</b>	<b>38.622.855.654,11</b>		<b>175.676.624.397,80</b>
IV	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
	Penggunaan SiLPA	271.172.220.678,00	270.898.017.186,53	99,90	121.693.751.477,73
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	8.548.192.400,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>271.172.220.678,00</b>	<b>270.898.017.186,53</b>	<b>99,90</b>	<b>130.241.943.877,73</b>
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	34.746.347.598,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>2.429.808.337,00</b>	<b>855.508.220,00</b>	<b>35,21</b>	<b>34.746.347.598,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>268.742.412.341,00</b>	<b>270.042.508.966,53</b>	<b>100,48</b>	<b>95.495.596.279,73</b>	
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>-</b>	<b>308.665.364.620,64</b>		<b>271.172.220.677,53</b>	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALI KOTA CIMAHI,

  
 NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
 pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 3 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN  
ORGANISASI**

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,587,835,737,002.00</b>	<b>1,520,135,560,503.11</b>	<b>67,700,176,498.89</b>	<b>104.45</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>170,557,551,580.00</b>	<b>191,434,820,739.00</b>	<b>(20,877,269,159.00)</b>	<b>89.09</b>
	1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	1.01.0.00.0.00.01.	Dinas Pendidikan				
	<b>1.02.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>162,738,905,080.00</b>	<b>183,643,114,159.00</b>	<b>(20,904,209,079.00)</b>	<b>88.62</b>
	<b>1.02.0.00.0.00.01.</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>17,738,905,080.00</b>	<b>18,034,132,900.00</b>	<b>(295,227,820.00)</b>	<b>98.36</b>
	1.02.0.00.0.00.01.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17,738,905,080.00	18,034,132,900.00	(295,227,820.00)	98.36
	1.02.0.00.0.00.01.	Lain-lain PAD yang Sah	17,738,905,080.00	18,034,132,900.00	(295,227,820.00)	98.36
	1.02.0.00.0.00.02.	RSUD CIBABAT	145,000,000,000.00	165,608,981,259.00	(20,608,981,259.00)	87.56
	1.02.0.00.0.00.02.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145,000,000,000.00	165,608,981,259.00	(20,608,981,259.00)	87.56
	1.02.0.00.0.00.02.	Lain-lain PAD yang Sah	145,000,000,000.00	165,608,981,259.00	(20,608,981,259.00)	87.56
	1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1.03.0.00.0.00.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	<b>1.04.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>7,754,071,000.00</b>	<b>7,686,799,080.00</b>	<b>67,271,920.00</b>	<b>100.88</b>
	<b>1.04.1.03.0.00.01.</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>7,754,071,000.00</b>	<b>7,686,799,080.00</b>	<b>67,271,920.00</b>	<b>100.88</b>
	1.04.1.03.0.00.01.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7,754,071,000.00	7,686,799,080.00	67,271,920.00	100.88
	1.04.1.03.0.00.01.	Retribusi Daerah	3,788,880,000.00	3,217,740,950.00	571,139,050.00	117.75
	1.04.1.03.0.00.01.	Lain-lain PAD yang Sah	3,965,191,000.00	4,469,058,130.00	(503,867,130.00)	88.73
	<b>1.05.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>64,575,500.00</b>	<b>104,907,500.00</b>	<b>(40,332,000.00)</b>	<b>61.55</b>
	<b>1.05.0.00.0.00.03.</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>	<b>64,575,500.00</b>	<b>104,907,500.00</b>	<b>(40,332,000.00)</b>	<b>61.55</b>
	1.05.0.00.0.00.03.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	64,575,500.00	104,907,500.00	(40,332,000.00)	61.55
	1.05.0.00.0.00.03.	Retribusi Daerah	64,575,500.00	104,907,500.00	(40,332,000.00)	61.55

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	1.05.0.00.0.00.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	1.06.2.14.2.08.06.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan				
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>5,979,275,000.00</b>	<b>6,515,577,965.00</b>	<b>(536,302,965.00)</b>	<b>91.77</b>
	<b>2.07.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>750,000,000.00</b>	<b>583,770,000.00</b>	<b>166,230,000.00</b>	<b>128.48</b>
	<b>2.07.3.32.0.00.01.</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>750,000,000.00</b>	<b>583,770,000.00</b>	<b>166,230,000.00</b>	<b>128.48</b>
	2.07.3.32.0.00.01.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750,000,000.00	583,770,000.00	166,230,000.00	128.48
	2.07.3.32.0.00.01.	Retribusi Daerah	750,000,000.00	583,770,000.00	166,230,000.00	128.48
	2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	<b>2.09.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>240,800,000.00</b>	<b>263,827,000.00</b>	<b>(23,027,000.00)</b>	<b>91.27</b>
	<b>2.09.3.27.3.25.02.</b>	<b>Dinas Pangan dan Pertanian</b>	<b>240,800,000.00</b>	<b>263,827,000.00</b>	<b>(23,027,000.00)</b>	<b>91.27</b>
	2.09.3.27.3.25.02.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	240,800,000.00	263,827,000.00	(23,027,000.00)	91.27
	2.09.3.27.3.25.02.	Retribusi Daerah	240,800,000.00	263,827,000.00	(23,027,000.00)	91.27
	2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
	<b>2.11.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN</b>	<b>1,900,000,000.00</b>	<b>2,154,402,900.00</b>	<b>(254,402,900.00)</b>	<b>88.19</b>
	<b>2.11.0.00.0.00.02.</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>1,900,000,000.00</b>	<b>2,154,402,900.00</b>	<b>(254,402,900.00)</b>	<b>88.19</b>
	2.11.0.00.0.00.02.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,900,000,000.00	2,154,402,900.00	(254,402,900.00)	88.19
	2.11.0.00.0.00.02.	Retribusi Daerah	1,900,000,000.00	2,154,402,900.00	(254,402,900.00)	88.19
	2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2.12.0.00.0.00.02.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	<b>2.15.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>1,288,475,000.00</b>	<b>1,529,391,040.00</b>	<b>(240,916,040.00)</b>	<b>84.25</b>
	<b>2.15.0.00.0.00.01.</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>1,288,475,000.00</b>	<b>1,529,391,040.00</b>	<b>(240,916,040.00)</b>	<b>84.25</b>
	2.15.0.00.0.00.01.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,288,475,000.00	1,529,391,040.00	(240,916,040.00)	84.25

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	2.15.0.00.0.00.01.	Retribusi Daerah	1,288,475,000.00	1,529,391,040.00	(240,916,040.00)	84.25
	<b>2.16.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>431,612,791.00</b>	<b>(31,612,791.00)</b>	<b>92.68</b>
	2.16.2.24.2.23.05.	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	400,000,000.00	431,612,791.00	(31,612,791.00)	92.68
	2.16.2.24.2.23.05.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400,000,000.00	431,612,791.00	(31,612,791.00)	92.68
	2.16.2.24.2.23.05.	Retribusi Daerah	400,000,000.00	431,612,791.00	(31,612,791.00)	92.68
	2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
	<b>2.18.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>1,400,000,000.00</b>	<b>1,552,574,234.00</b>	<b>(152,574,234.00)</b>	<b>90.17</b>
	<b>2.18.0.00.0.00.23.</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>1,400,000,000.00</b>	<b>1,552,574,234.00</b>	<b>(152,574,234.00)</b>	<b>90.17</b>
	2.18.0.00.0.00.23.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,400,000,000.00	1,552,574,234.00	(152,574,234.00)	90.17
	2.18.0.00.0.00.23.	Retribusi Daerah	1,400,000,000.00	1,552,574,234.00	(152,574,234.00)	90.17
	2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
	2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
	2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
	2.22.3.26.2.19.04.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga				
	2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
	2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>1,572,095,500.00</b>	<b>1,717,326,502.00</b>	<b>(145,231,002.00)</b>	<b>91.54</b>
	3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
	3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
	<b>3.30.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>1,572,095,500.00</b>	<b>1,717,326,502.00</b>	<b>(145,231,002.00)</b>	<b>91.54</b>



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	<b>3.30.2.17.3.31.07.</b>	<b>Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian</b>	<b>1,572,095,500.00</b>	<b>1,717,326,502.00</b>	<b>(145,231,002.00)</b>	<b>91.54</b>
	3.30.2.17.3.31.07.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,572,095,500.00	1,717,326,502.00	(145,231,002.00)	91.54
	3.30.2.17.3.31.07.	Retribusi Daerah	1,572,095,500.00	1,710,256,225.00	(138,160,725.00)	91.92
	3.30.2.17.3.31.07.	Lain-lain PAD yang Sah	-	7,070,277.00	(7,070,277.00)	-
	3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
	4.01.	SEKRETARIAT DAERAH				
	4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah				
	4.02.	SEKRETARIAT DPRD				
	4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRD				
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>1,409,726,814,922.00</b>	<b>1,320,467,835,297.11</b>	<b>89,258,979,624.89</b>	<b>106.76</b>
	5.01.	PERENCANAAN				
	5.01.5.05.0.00.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	<b>5.02.</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>1,409,726,814,922.00</b>	<b>1,320,467,835,297.11</b>	<b>89,258,979,624.89</b>	<b>106.76</b>
	<b>5.02.0.00.0.00.02.</b>	<b>Badan Pengelola Pendapatan Daerah</b>	<b>677,903,245,268.00</b>	<b>603,120,255,312.11</b>	<b>74,782,989,955.89</b>	<b>112.40</b>
	5.02.0.00.0.00.02.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	168,513,221,054.00	205,437,257,303.11	(36,924,036,249.11)	82.03
	5.02.0.00.0.00.02.	Pajak Daerah	152,786,878,291.00	179,891,802,692.00	(27,104,924,401.00)	84.93
	5.02.0.00.0.00.02.	Hasil Pengelolaan Kekayaan	9,956,960,000.00	9,956,960,000.00	-	100.00
	5.02.0.00.0.00.02.	Lain-lain PAD yang Sah	5,769,382,763.00	15,588,494,611.11	(9,819,111,848.11)	37.01
	5.02.0.00.0.00.02.	PENDAPATAN TRANSFER	509,390,024,214.00	390,910,720,778.00	118,479,303,436.00	130.31
	5.02.0.00.0.00.02.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	144,547,187,266.00	161,338,096,080.00	(16,790,908,814.00)	89.59
	5.02.0.00.0.00.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	364,842,836,948.00	229,572,624,698.00	135,270,212,250.00	158.92
	5.02.0.00.0.00.02.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	6,772,277,231.00	(6,772,277,231.00)	-
	5.02.0.00.0.00.02.	Pendapatan Hibah	-	6,700,327,000.00	(6,700,327,000.00)	-
	5.02.0.00.0.00.02.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	71,950,231.00	(71,950,231.00)	-
	<b>5.02.0.00.0.00.05.</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>731,823,569,654.00</b>	<b>717,347,579,985.00</b>	<b>14,475,989,669.00</b>	<b>102.02</b>
	5.02.0.00.0.00.05.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	9,044.00	(9,044.00)	-

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	5.02.0.00.0.00.05.	Lain-lain PAD yang Sah	-	9,044.00	(9,044.00)	-
	5.02.0.00.0.00.05.	PENDAPATAN TRANSFER	674,170,850,000.00	662,185,746,941.00	11,985,103,059.00	101.81
	5.02.0.00.0.00.05.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	674,170,850,000.00	662,185,746,941.00	11,985,103,059.00	101.81
	5.02.0.00.0.00.05.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57,652,719,654.00	55,161,824,000.00	2,490,895,654.00	104.52
	5.02.0.00.0.00.05.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	57,652,719,654.00	55,161,824,000.00	2,490,895,654.00	104.52
	5.03.	KEPEGAWAIAN				
	5.03.0.00.0.00.02.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				
	5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	5.07.	PENGELOAAAN PERBATASAN				
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
	6.01.	INSPEKTORAT DAERAH				
	6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				
	7.01.	KECAMATAN				
	7.01.0.00.0.00.01.	Kecamatan Cimahi Utara				
	7.01.0.00.0.00.02.	Kecamatan Cimahi Tengah				
	7.01.0.00.0.00.03.	Kecamatan Cimahi Selatan				
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.0.00.0.00.01.	Kantor Kesatuan Bangsa				
		<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,587,835,737,002.00</b>	<b>1,520,135,560,503.11</b>	<b>67,700,176,498.89</b>	<b>104.45</b>
<b>2</b>		<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,856,578,149,343.01</b>	<b>1,481,512,704,849.00</b>	<b>375,065,444,494</b>	<b>79.80</b>
<b>2</b>	<b>1.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>1,122,423,251,956.01</b>	<b>954,298,120,380.00</b>	<b>168,125,131,576</b>	<b>85.02</b>
<b>2</b>	<b>1.01.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>378,636,509,026.00</b>	<b>327,331,426,766.00</b>	<b>51,305,082,260</b>	<b>86.45</b>

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	<b>1.01.0.00.0.00.01.</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>378,636,509,026.00</b>	<b>327,331,426,766.00</b>	<b>51,305,082,260</b>	<b>86.45</b>
	1.01.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	354,193,112,119.00	306,948,264,340.00	47,244,847,779	86.66
	1.01.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	268,729,197,976.00	228,552,914,893.00	40,176,283,083	85.04
	1.01.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	74,003,194,143.00	69,621,159,447.00	4,382,034,696	94.07
	1.01.0.00.0.00.01.	Belanja Hibah	9,082,400,000.00	7,404,200,000.00	1,678,200,000	81.52
	1.01.0.00.0.00.01.	Belanja Bantuan Sosial	2,378,320,000.00	1,369,990,000.00	1,008,330,000	57.60
	1.01.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	24,443,396,907.00	20,383,162,426.00	4,060,234,481	83.38
	1.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,551,913,353.00	5,823,668,982.00	728,244,371	88.88
	1.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15,302,589,596.00	11,966,304,739.00	3,336,284,857	78.19
	1.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,588,893,958.00	2,593,188,705.00	- 4,294,747	100.16
	<b>1.02.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>405,009,168,206.00</b>	<b>338,240,511,849.00</b>	<b>66,768,656,357</b>	<b>83.51</b>
	<b>1.02.0.00.0.00.01.</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>168,032,528,819.00</b>	<b>129,698,268,222.00</b>	<b>38,334,260,597</b>	<b>77.19</b>
	1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	147,826,215,435.00	114,440,026,567.00	33,386,188,868	77.41
	1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	64,735,210,890.00	56,650,499,398.00	8,084,711,492	87.51
	1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	82,591,004,545.00	57,289,527,169.00	25,301,477,376	69.36
	1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Hibah	500,000,000.00	500,000,000.00	-	100.00
	1.02.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	20,206,313,384.00	15,258,241,655.00	4,948,071,729	75.51
	1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,230,212,709.00	3,304,884,809.00	925,327,900	78.12
	1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15,716,100,675.00	11,953,356,846.00	3,762,743,829	76.05
	1.02.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	260,000,000.00	-	260,000,000	-
	<b>1.02.0.00.0.00.02.</b>	<b>RSUD CIBABAT</b>	<b>236,976,639,387.00</b>	<b>208,542,243,627.00</b>	<b>28,434,395,760</b>	<b>88.00</b>
	1.02.0.00.0.00.02.	BELANJA OPERASI	221,690,857,339.00	196,904,035,124.00	24,786,822,215	88.81
	1.02.0.00.0.00.02.	Belanja Pegawai	95,203,830,268.00	88,637,587,609.00	6,566,242,659	93.10
	1.02.0.00.0.00.02.	Belanja Barang dan Jasa	126,487,027,071.00	108,266,447,515.00	18,220,579,556	85.59
	1.02.0.00.0.00.02.	BELANJA MODAL	15,285,782,048.00	11,638,208,503.00	3,647,573,545	76.13
	1.02.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,889,369,888.00	10,346,041,343.00	3,543,328,545	74.48
	1.02.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,396,412,160.00	1,292,167,160.00	104,245,000	92.53
	<b>1.03.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>226,240,032,268.00</b>	<b>192,149,670,904.00</b>	<b>34,090,361,364</b>	<b>84.93</b>

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	<b>1.03.0.00.0.00.01.</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>226,240,032,268.00</b>	<b>192,149,670,904.00</b>	<b>34,090,361,364</b>	<b>84.93</b>
	1.03.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	50,635,422,626.00	46,473,142,710.00	4,162,279,916	91.77
	1.03.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	7,920,044,000.00	7,241,021,693.00	679,022,307	91.42
	1.03.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	41,960,378,626.00	38,483,234,017.00	3,477,144,609	91.71
	1.03.0.00.0.00.01.	Belanja Hibah	755,000,000.00	748,887,000.00	6,113,000	99.19
	1.03.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	175,604,609,642.00	145,676,528,194.00	29,928,081,448	82.95
	1.03.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	502,731,680.00	481,961,150.00	20,770,530	95.86
	1.03.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55,627,272,000.00	46,563,565,838.00	9,063,706,162	83.70
	1.03.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	119,474,605,962.00	98,631,001,206.00	20,843,604,756	82.55
	<b>1.04.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>62,279,380,915.00</b>	<b>52,677,799,870.00</b>	<b>9,601,581,045</b>	<b>84.58</b>
	<b>1.04.1.03.0.00.01.</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>62,279,380,915.00</b>	<b>52,677,799,870.00</b>	<b>9,601,581,045</b>	<b>84.58</b>
	1.04.1.03.0.00.01.	BELANJA OPERASI	48,168,377,695.00	42,435,851,467.00	5,732,526,228	88.09
	1.04.1.03.0.00.01.	Belanja Pegawai	10,272,256,850.00	10,018,490,921.00	253,765,929	97.52
	1.04.1.03.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	36,688,215,307.00	31,257,360,546.00	5,430,854,761	85.19
	1.04.1.03.0.00.01.	Belanja Bantuan Sosial	1,207,905,538.00	1,160,000,000.00	47,905,538	96.03
	1.04.1.03.0.00.01.	BELANJA MODAL	14,111,003,220.00	10,241,948,403.00	3,869,054,817	72.58
	1.04.1.03.0.00.01.	Belanja Modal Tanah	3,036,504,740.00	1,545,337,518.00	1,491,167,222	50.89
	1.04.1.03.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	603,910,600.00	561,562,798.00	42,347,802	92.98
	1.04.1.03.0.00.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	714,456,800.00	645,046,098.00	69,410,702	90.28
	1.04.1.03.0.00.01.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9,756,131,080.00	7,490,001,989.00	2,266,129,091	76.77
	<b>1.05.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>29,805,230,405.01</b>	<b>27,850,741,794.00</b>	<b>1,954,488,611</b>	<b>93.44</b>
	<b>1.05.0.00.0.00.03.</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>	<b>22,336,672,545.01</b>	<b>20,973,725,004.00</b>	<b>1,362,947,541</b>	<b>93.90</b>
	1.05.0.00.0.00.03.	BELANJA OPERASI	21,695,684,345.01	20,353,074,211.00	1,342,610,134	93.81
	1.05.0.00.0.00.03.	Belanja Pegawai	15,111,737,845.01	14,486,562,106.00	625,175,739	95.86
	1.05.0.00.0.00.03.	Belanja Barang dan Jasa	6,383,946,500.00	5,666,512,105.00	717,434,395	88.76

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	1.05.0.00.0.00.03.	Belanja Hibah	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100.00
	1.05.0.00.0.00.03.	BELANJA MODAL	640,988,200.00	620,650,793.00	20,337,407	96.82
	1.05.0.00.0.00.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	460,988,200.00	442,193,000.00	18,795,200	95.92
	1.05.0.00.0.00.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180,000,000.00	178,457,793.00	1,542,207	99.14
	<b>1.05.0.00.0.00.04.</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>7,468,557,860.00</b>	<b>6,877,016,790.00</b>	<b>591,541,070</b>	<b>92.08</b>
	1.05.0.00.0.00.04.	BELANJA OPERASI	6,870,175,160.00	6,290,499,340.00	579,675,820	91.56
	1.05.0.00.0.00.04.	Belanja Pegawai	2,943,542,060.00	2,573,133,397.00	370,408,663	87.41
	1.05.0.00.0.00.04.	Belanja Barang dan Jasa	3,882,834,300.00	3,675,825,943.00	207,008,357	94.66
	1.05.0.00.0.00.04.	Belanja Bantuan Sosial	43,798,800.00	41,540,000.00	2,258,800	94.84
	1.05.0.00.0.00.04.	BELANJA MODAL	598,382,700.00	586,517,450.00	11,865,250	98.01
	1.05.0.00.0.00.04.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	528,382,700.00	516,691,450.00	11,691,250	97.78
	1.05.0.00.0.00.04.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70,000,000.00	69,826,000.00	174,000	99.75
	<b>1.06.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>20,452,931,136.00</b>	<b>16,047,969,197.00</b>	<b>4,404,961,939</b>	<b>78.46</b>
	<b>1.06.2.14.2.08.06.</b>	<b>Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>20,452,931,136.00</b>	<b>16,047,969,197.00</b>	<b>4,404,961,939</b>	<b>78.46</b>
	1.06.2.14.2.08.06.	BELANJA OPERASI	20,070,251,436.00	15,705,905,047.00	4,364,346,389	78.25
	1.06.2.14.2.08.06.	Belanja Pegawai	7,207,920,536.00	7,073,918,557.00	134,001,979	98.14
	1.06.2.14.2.08.06.	Belanja Barang dan Jasa	12,562,330,900.00	8,331,986,490.00	4,230,344,410	66.32
	1.06.2.14.2.08.06.	Belanja Hibah	300,000,000.00	300,000,000.00	-	100.00
	1.06.2.14.2.08.06.	BELANJA MODAL	382,679,700.00	342,064,150.00	40,615,550	89.38
	1.06.2.14.2.08.06.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	382,679,700.00	342,064,150.00	40,615,550	89.38
	<b>2.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>324,731,860,617.00</b>	<b>177,748,384,921.00</b>	<b>146,983,475,696</b>	<b>54.74</b>
	<b>2.07.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>9,437,761,051.00</b>	<b>8,993,432,354.00</b>	<b>444,328,697</b>	<b>95.29</b>
	<b>2.07.3.32.0.00.01.</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>9,437,761,051.00</b>	<b>8,993,432,354.00</b>	<b>444,328,697</b>	<b>95.29</b>
	2.07.3.32.0.00.01.	BELANJA OPERASI	9,226,637,953.00	8,786,006,156.00	440,631,797	95.22
	2.07.3.32.0.00.01.	Belanja Pegawai	4,490,628,753.00	4,462,877,073.00	27,751,680	99.38
	2.07.3.32.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	4,736,009,200.00	4,323,129,083.00	412,880,117	91.28

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	2.07.3.32.0.00.01.	BELANJA MODAL	211,123,098.00	207,426,198.00	3,696,900	98.24
	2.07.3.32.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169,121,900.00	165,425,000.00	3,696,900	97.81
	2.07.3.32.0.00.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42,001,198.00	42,001,198.00		100.00
	<b>2.08.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
	<b>2.09.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>12,346,326,273.00</b>	<b>11,309,111,871.00</b>	<b>1,037,214,402</b>	<b>91.60</b>
	<b>2.09.3.27.3.25.02.</b>	<b>Dinas Pangan dan Pertanian</b>	<b>12,346,326,273.00</b>	<b>11,309,111,871.00</b>	<b>1,037,214,402</b>	<b>91.60</b>
	2.09.3.27.3.25.02.	BELANJA OPERASI	11,968,401,023.00	10,931,904,441.00	1,036,496,582	91.33
	2.09.3.27.3.25.02.	Belanja Pegawai	8,464,993,581.00	7,607,760,017.00	857,233,564	89.87
	2.09.3.27.3.25.02.	Belanja Barang dan Jasa	3,503,407,442.00	3,324,144,424.00	179,263,018	94.88
	2.09.3.27.3.25.02.	BELANJA MODAL	377,925,250.00	377,207,430.00	717,820	99.81
	2.09.3.27.3.25.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215,955,250.00	215,650,000.00	305,250	99.85
	2.09.3.27.3.25.02.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161,970,000.00	161,557,430.00	412,570	99.74
	<b>2.10.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	-	-	-	-
	<b>2.11.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN</b>	<b>55,649,528,450.00</b>	<b>48,527,800,626.00</b>	<b>7,121,727,824</b>	<b>87.20</b>
	<b>2.11.0.00.0.00.02.</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>55,649,528,450.00</b>	<b>48,527,800,626.00</b>	<b>7,121,727,824</b>	<b>87.20</b>
	2.11.0.00.0.00.02.	BELANJA OPERASI	47,094,827,500.00	42,850,355,838.00	4,244,471,662	90.98
	2.11.0.00.0.00.02.	Belanja Pegawai	11,420,010,370.00	11,208,960,620.00	211,049,750	98.15
	2.11.0.00.0.00.02.	Belanja Barang dan Jasa	35,654,817,130.00	31,641,395,218.00	4,013,421,912	88.74
	2.11.0.00.0.00.02.	Belanja Hibah	20,000,000.00	-	20,000,000	-
	2.11.0.00.0.00.02.	BELANJA MODAL	8,554,700,950.00	5,677,444,788.00	2,877,256,162	66.36
	2.11.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,929,700,950.00	5,055,771,650.00	2,873,929,300	63.75
	2.11.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	625,000,000.00	621,673,138.00	3,326,862	99.46
	<b>2.12.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>10,814,216,560.00</b>	<b>10,024,562,879.00</b>	<b>789,653,681</b>	<b>92.70</b>
	<b>2.12.0.00.0.00.02.</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>10,814,216,560.00</b>	<b>10,024,562,879.00</b>	<b>789,653,681</b>	<b>92.70</b>
	2.12.0.00.0.00.02.	BELANJA OPERASI	10,337,290,800.00	9,564,804,479.00	772,486,321	92.52
	2.12.0.00.0.00.02.	Belanja Pegawai	6,600,134,000.00	6,094,500,138.00	505,633,862	92.33
	2.12.0.00.0.00.02.	Belanja Barang dan Jasa	3,737,156,800.00	3,470,304,341.00	266,852,459	92.85

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	2.12.0.00.0.00.02.	BELANJA MODAL	476,925,760.00	459,758,400.00	17,167,360	96.40
	2.12.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	443,546,000.00	428,998,400.00	14,547,600	96.72
	2.12.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33,379,760.00	30,760,000.00	2,619,760	92.15
	<b>2.14.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
	<b>2.15.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>35,596,592,332.00</b>	<b>32,354,536,026.00</b>	<b>3,242,056,306</b>	<b>90.89</b>
	<b>2.15.0.00.0.00.01.</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>35,596,592,332.00</b>	<b>32,354,536,026.00</b>	<b>3,242,056,306</b>	<b>90.89</b>
	2.15.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	31,084,734,032.00	28,391,210,326.00	2,693,523,706	91.33
	2.15.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	9,430,673,412.00	9,346,093,418.00	84,579,994	99.10
	2.15.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	21,654,060,620.00	19,045,116,908.00	2,608,943,712	87.95
	2.15.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	4,511,858,300.00	3,963,325,700.00	548,532,600	87.84
	2.15.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	824,535,700.00	318,968,100.00	505,567,600	38.68
	2.15.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178,603,800.00	167,754,000.00	10,849,800	93.92
	2.15.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,508,718,800.00	3,476,603,600.00	32,115,200	99.08
	<b>2.16.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>18,980,171,637.00</b>	<b>17,242,558,261.00</b>	<b>1,737,613,376</b>	<b>90.85</b>
	<b>2.16.2.24.2.23.05.</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan</b>	<b>18,980,171,637.00</b>	<b>17,242,558,261.00</b>	<b>1,737,613,376</b>	<b>90.85</b>
	2.16.2.24.2.23.05.	BELANJA OPERASI	13,690,183,217.00	12,706,074,602.00	984,108,615	92.81
	2.16.2.24.2.23.05.	Belanja Pegawai	7,735,966,617.00	7,590,421,984.00	145,544,633	98.11
	2.16.2.24.2.23.05.	Belanja Barang dan Jasa	5,954,216,600.00	5,115,652,618.00	838,563,982	85.91
	2.16.2.24.2.23.05.	BELANJA MODAL	5,289,988,420.00	4,536,483,659.00	753,504,761	85.75
	2.16.2.24.2.23.05.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,865,639,820.00	3,601,446,943.00	264,192,877	93.16
	2.16.2.24.2.23.05.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,330,000,000.00	843,482,041.00	486,517,959	63.41
	2.16.2.24.2.23.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	94,348,600.00	91,554,675.00	2,793,925	97.03
	<b>2.17.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				
	<b>2.18.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>37,579,264,634.00</b>	<b>28,275,037,195.00</b>	<b>9,304,227,439</b>	<b>75.24</b>

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	<b>2.18.0.00.0.00.23.</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>37,579,264,634.00</b>	<b>28,275,037,195.00</b>	<b>9,304,227,439</b>	<b>75.24</b>
	2.18.0.00.0.00.23.	BELANJA OPERASI	15,179,265,634.00	11,437,795,926.00	3,741,469,708	75.35
	2.18.0.00.0.00.23.	Belanja Pegawai	6,966,491,000.00	6,076,232,910.00	890,258,090	87.22
	2.18.0.00.0.00.23.	Belanja Barang dan Jasa	8,212,774,634.00	5,361,563,016.00	2,851,211,618	65.28
	2.18.0.00.0.00.23.	BELANJA MODAL	22,399,999,000.00	16,837,241,269.00	5,562,757,731	75.16
	2.18.0.00.0.00.23.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,987,935,000.00	3,216,612,532.00	1,771,322,468	64.48
	2.18.0.00.0.00.23.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17,300,000,000.00	13,560,482,737.00	3,739,517,263	78.38
	2.18.0.00.0.00.23.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	112,064,000.00	60,146,000.00	51,918,000	53.67
	<b>2.19.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				
	<b>2.20.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				
	<b>2.21.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				
	<b>2.22.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>144,327,999,680.00</b>	<b>21,021,345,709.00</b>	<b>123,306,653,971</b>	<b>14.56</b>
	<b>2.22.3.26.2.19.04.</b>	<b>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>144,327,999,680.00</b>	<b>21,021,345,709.00</b>	<b>123,306,653,971</b>	<b>14.56</b>
	2.22.3.26.2.19.04.	BELANJA OPERASI	19,804,440,626.00	17,605,943,684.00	2,198,496,942	88.89
	2.22.3.26.2.19.04.	Belanja Pegawai	4,404,845,072.00	4,151,918,547.00	252,926,525	94.25
	2.22.3.26.2.19.04.	Belanja Barang dan Jasa	7,099,595,554.00	5,404,396,387.00	1,695,199,167	76.12
	2.22.3.26.2.19.04.	Belanja Hibah	8,300,000,000.00	8,049,628,750.00	250,371,250	96.98
	2.22.3.26.2.19.04.	BELANJA MODAL	124,523,559,054.00	3,415,402,025.00	121,108,157,029	2.74
	2.22.3.26.2.19.04.	Belanja Modal Tanah	5,688,460,000.00	379,076,400.00	5,309,383,600	6.66
	2.22.3.26.2.19.04.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	298,643,460.00	282,670,000.00	15,973,460	94.65
	2.22.3.26.2.19.04.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118,536,455,594.00	2,753,655,625.00	115,782,799,969	2.32
	2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
	2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	-	-	-
	<b>3.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>26,814,989,452.00</b>	<b>24,591,022,552.00</b>	<b>2,223,966,900</b>	<b>91.71</b>
	<b>3.25.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	-	-	-	-



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	<b>3.26.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	-	-	-	-
	<b>3.27.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	-	-	-	-
	<b>3.30.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>26,814,989,452.00</b>	<b>24,591,022,552.00</b>	<b>2,223,966,900</b>	<b>91.71</b>
	<b>3.30.2.17.3.31.07.</b>	<b>Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian</b>	<b>26,814,989,452.00</b>	<b>24,591,022,552.00</b>	<b>2,223,966,900</b>	<b>91.71</b>
	3.30.2.17.3.31.07.	BELANJA OPERASI	25,308,137,777.00	23,237,717,913.00	2,070,419,864	91.81
	3.30.2.17.3.31.07.	Belanja Pegawai	8,739,783,000.00	8,388,826,728.00	350,956,272	95.98
	3.30.2.17.3.31.07.	Belanja Barang dan Jasa	16,061,210,777.00	14,438,317,185.00	1,622,893,592	89.89
	3.30.2.17.3.31.07.	Belanja Subsidi	507,144,000.00	410,574,000.00	96,570,000	80.95
	3.30.2.17.3.31.07.	BELANJA MODAL	1,506,851,675.00	1,353,304,639.00	153,547,036	89.81
	3.30.2.17.3.31.07.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,119,958,082.00	976,220,150.00	143,737,932	87.16
	3.30.2.17.3.31.07.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	379,205,805.00	377,084,489.00	2,121,316	99.44
	3.30.2.17.3.31.07.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7,687,788.00	-	7,687,788	-
	3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-	-	-	-
	<b>4.</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>142,637,436,127.00</b>	<b>119,266,451,484.00</b>	<b>23,370,984,643</b>	<b>83.62</b>
	<b>4.01.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>62,065,289,876.00</b>	<b>52,250,467,470.00</b>	<b>9,814,822,406</b>	<b>84.19</b>
	4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah	62,065,289,876.00	52,250,467,470.00	9,814,822,406	84.19
	4.01.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	59,815,924,176.00	50,472,113,305.00	9,343,810,871	84.37
	4.01.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	29,630,733,300.00	28,013,446,114.00	1,617,287,186	94.54
	4.01.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	30,185,190,876.00	22,458,667,191.00	7,726,523,685	74.40
	4.01.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	2,249,365,700.00	1,778,354,165.00	471,011,535	79.06
	4.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,958,800,700.00	1,489,021,670.00	469,779,030	76.01
	4.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	290,565,000.00	289,332,495.00	1,232,505	99.57
	<b>4.02.</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>80,572,146,251.00</b>	<b>67,015,984,014.00</b>	<b>13,556,162,237</b>	<b>83.18</b>
	4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRD	80,572,146,251.00	67,015,984,014.00	13,556,162,237	83.18
	4.02.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	78,789,873,819.00	65,773,310,721.00	13,016,563,098	83.47
	4.02.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	44,473,133,347.00	40,198,975,031.00	4,274,158,316	90.38
	4.02.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	34,316,740,472.00	25,574,335,690.00	8,742,404,782	74.52
	4.02.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	1,782,272,432.00	1,242,673,293.00	539,599,139	69.72

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	4.02.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,496,755,632.00	1,101,947,600.00	394,808,032	73.62
	4.02.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285,516,800.00	140,725,693.00	144,791,107	49.28
	<b>5.</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>102,193,151,086.00</b>	<b>78,536,364,718.00</b>	<b>23,656,786,368</b>	<b>76.85</b>
	<b>5.01.</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>13,635,862,633.00</b>	<b>12,463,500,589.00</b>	<b>1,172,362,044</b>	<b>91.40</b>
	<b>5.01.5.05.0.00.01.</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>13,635,862,633.00</b>	<b>12,463,500,589.00</b>	<b>1,172,362,044</b>	<b>91.40</b>
	5.01.5.05.0.00.01.	BELANJA OPERASI	13,410,027,833.00	12,242,303,349.00	1,167,724,484	91.29
	5.01.5.05.0.00.01.	Belanja Pegawai	10,238,285,733.00	9,444,636,182.00	793,649,551	92.24
	5.01.5.05.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	3,171,742,100.00	2,797,667,167.00	374,074,933	88.20
	5.01.5.05.0.00.01.	BELANJA MODAL	225,834,800.00	221,197,240.00	4,637,560	97.94
	5.01.5.05.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225,834,800.00	221,197,240.00	4,637,560	97.94
	<b>5.02.</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>88,557,288,453.00</b>	<b>66,072,864,129.00</b>	<b>22,484,424,324</b>	<b>74.61</b>
	<b>5.02.0.00.0.00.02.</b>	<b>Badan Pengelola Pendapatan Daerah</b>	<b>13,809,725,276.00</b>	<b>12,733,524,456.00</b>	<b>1,076,200,820</b>	<b>92.21</b>
	5.02.0.00.0.00.02.	BELANJA OPERASI	13,717,947,676.00	12,642,504,956.00	1,075,442,720	92.16
	5.02.0.00.0.00.02.	Belanja Pegawai	9,757,606,376.00	8,927,229,801.00	830,376,575	91.48
	5.02.0.00.0.00.02.	Belanja Barang dan Jasa	3,960,341,300.00	3,715,275,155.00	245,066,145	93.81
	5.02.0.00.0.00.02.	BELANJA MODAL	91,777,600.00	91,019,500.00	758,100	99.17
	5.02.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91,777,600.00	91,019,500.00	758,100	99.17
	<b>5.02.0.00.0.00.05.</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>57,145,834,859.00</b>	<b>39,154,473,064.00</b>	<b>17,991,361,795</b>	<b>68.52</b>
	5.02.0.00.0.00.05.	BELANJA OPERASI	32,970,676,169.00	26,092,128,371.00	6,878,547,798	79.13
	5.02.0.00.0.00.05.	Belanja Pegawai	29,232,248,369.00	22,894,407,047.00	6,337,841,322	78.31
	5.02.0.00.0.00.05.	Belanja Barang dan Jasa	3,138,427,800.00	2,888,847,210.00	249,580,590	92.04
	5.02.0.00.0.00.05.	Belanja Bunga	600,000,000.00	308,874,114.00	291,125,886	51.47
	5.02.0.00.0.00.05.	BELANJA MODAL	295,072,800.00	268,918,250.00	26,154,550	91.13
	5.02.0.00.0.00.05.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293,064,800.00	266,918,250.00	26,146,550	91.07
	5.02.0.00.0.00.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,008,000.00	2,000,000.00	8,000	99.60
	5.02.0.00.0.00.05.	BELANJA TIDAK TERDUGA	23,880,085,890.00	12,793,426,443.00	11,086,659,447	53.57
	5.02.0.00.0.00.05.	Belanja Tidak Terduga	23,880,085,890.00	12,793,426,443.00	11,086,659,447	53.57
	<b>5.03.</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>17,601,728,318.00</b>	<b>14,184,866,609.00</b>	<b>3,416,861,709</b>	<b>80.59</b>

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	<b>5.03.0.00.0.00.02.</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>	<b>17,601,728,318.00</b>	<b>14,184,866,609.00</b>	<b>3,416,861,709</b>	<b>80.59</b>
	5.03.0.00.0.00.02.	BELANJA OPERASI	17,429,737,418.00	14,038,892,609.00	3,390,844,809	80.54
	5.03.0.00.0.00.02.	Belanja Pegawai	13,880,130,118.00	11,039,594,900.00	2,840,535,218	79.53
	5.03.0.00.0.00.02.	Belanja Barang dan Jasa	3,549,607,300.00	2,999,297,709.00	550,309,591	84.49
	5.03.0.00.0.00.02.	BELANJA MODAL	171,990,900.00	145,974,000.00	26,016,900	84.87
	5.03.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171,990,900.00	145,974,000.00	26,016,900	84.87
	5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	5.07.	PENGELoAAN PERBATASAN				
	<b>6.</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>9,272,016,907.00</b>	<b>8,507,722,551.00</b>	<b>764,294,356</b>	<b>91.76</b>
	6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	9,272,016,907.00	8,507,722,551.00	764,294,356	91.76
	6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat	9,272,016,907.00	8,507,722,551.00	764,294,356	91.76
	6.01.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	9,026,424,107.00	8,274,631,474.00	751,792,633	91.67
	6.01.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	7,450,001,907.00	6,869,038,159.00	580,963,748	92.20
	6.01.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	1,576,422,200.00	1,405,593,315.00	170,828,885	89.16
	6.01.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	245,592,800.00	233,091,077.00	12,501,723	94.90
	6.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,517,800.00	40,785,000.00	6,732,800	85.83
	6.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198,075,000.00	192,306,077.00	5,768,923	97.08
	<b>7.</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>120,060,393,784.00</b>	<b>111,428,846,490.00</b>	<b>8,631,547,294</b>	<b>92.81</b>
	<b>7.01.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>120,060,393,784.00</b>	<b>111,428,846,490.00</b>	<b>8,631,547,294</b>	<b>92.81</b>
	<b>7.01.0.00.0.00.01.</b>	<b>Kecamatan Cimahi Utara</b>	<b>33,686,045,900.00</b>	<b>31,196,144,974.00</b>	<b>2,489,900,926</b>	<b>92.61</b>
	7.01.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	33,538,190,900.00	31,053,382,774.00	2,484,808,126	92.59
	7.01.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	10,550,938,000.00	9,781,000,666.00	769,937,334	92.70
	7.01.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	22,987,252,900.00	21,272,382,108.00	1,714,870,792	92.53
	7.01.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	147,855,000.00	142,762,200.00	5,092,800	96.55
	7.01.0.00.0.00.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147,855,000.00	142,762,200.00	5,092,800	96.55
	<b>7.01.0.00.0.00.02.</b>	<b>Kecamatan Cimahi Tengah</b>	<b>45,749,110,969.00</b>	<b>42,134,370,069.00</b>	<b>3,614,740,900</b>	<b>92.10</b>
	7.01.0.00.0.00.02.	BELANJA OPERASI	44,942,447,219.00	41,347,169,488.00	3,595,277,731	92.00

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	7.01.0.00.0.00.02.	Belanja Pegawai	12,816,723,019.00	12,513,798,847.00	302,924,172	97.63
	7.01.0.00.0.00.02.	Belanja Barang dan Jasa	32,125,724,200.00	28,833,370,641.00	3,292,353,559	89.75
	7.01.0.00.0.00.02.	BELANJA MODAL	806,663,750.00	787,200,581.00	19,463,169	97.58
	7.01.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	426,659,000.00	413,680,700.00	12,978,300	96.95
	7.01.0.00.0.00.02.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380,004,750.00	373,519,881.00	6,484,869	98.29
	<b>7.01.0.00.0.00.03.</b>	<b>Kecamatan Cimahi Selatan</b>	<b>40,625,236,915.00</b>	<b>38,098,331,447.00</b>	<b>2,526,905,468</b>	<b>93.78</b>
	7.01.0.00.0.00.03.	BELANJA OPERASI	40,056,107,515.00	37,542,037,912.00	2,514,069,603	93.72
	7.01.0.00.0.00.03.	Belanja Pegawai	12,450,933,315.00	11,924,488,688.00	526,444,627	95.77
	7.01.0.00.0.00.03.	Belanja Barang dan Jasa	27,605,174,200.00	25,617,549,224.00	1,987,624,976	92.79
	7.01.0.00.0.00.03.	BELANJA MODAL	569,129,400.00	556,293,535.00	12,835,865	97.74
	7.01.0.00.0.00.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	366,646,400.00	355,364,174.00	11,282,226	96.92
	7.01.0.00.0.00.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202,483,000.00	200,929,361.00	1,553,639	99.23
<b>8.</b>		<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>8,445,049,414.00</b>	<b>7,135,791,753.00</b>	<b>1,309,257,661</b>	<b>84.50</b>
<b>8.01.</b>		<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>8,445,049,414.00</b>	<b>7,135,791,753.00</b>	<b>1,309,257,661</b>	<b>84.50</b>
<b>8.01.0.00.0.00.01.</b>		<b>Kantor Kesatuan Bangsa</b>	<b>8,445,049,414.00</b>	<b>7,135,791,753.00</b>	<b>1,309,257,661</b>	<b>84.50</b>
	8.01.0.00.0.00.01.	BELANJA OPERASI	8,404,415,394.00	7,117,626,490.00	1,286,788,904	84.68
	8.01.0.00.0.00.01.	Belanja Pegawai	2,815,114,744.00	2,208,900,584.00	606,214,160	78.46
	8.01.0.00.0.00.01.	Belanja Barang dan Jasa	3,792,974,200.00	3,112,399,456.00	680,574,744	82.05
	8.01.0.00.0.00.01.	Belanja Hibah	1,796,326,450.00	1,796,326,450.00	-	100.00
	8.01.0.00.0.00.01.	BELANJA MODAL	40,634,020.00	18,165,263.00	22,468,757	44.70
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,634,020.00	18,165,263.00	22,468,757	44.70
		<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>1,856,578,149,343.01</b>	<b>1,520,135,560,503.11</b>	22,468,757	44.71
		<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(268.742.412.341,00)</b>	<b>38.619.644.144,11</b>	22,468,757	
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>268,742,412,341.00</b>	<b>270,042,508,966.53</b>	<b>(268,742,412,341.00)</b>	<b>99.52</b>
	<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>271,172,220,678.00</b>	<b>270,898,017,186.53</b>	<b>(271,172,220,678.00)</b>	<b>100.10</b>
	6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	271,172,220,678.00	270,898,017,186.53	(271,172,220,678.00)	<b>100.10</b>
		<b>JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN</b>	271,172,220,678.00	270,898,017,186.53	(271,172,220,678.00)	<b>100.10</b>

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN 2021**

Kode	kdunit	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
			Anggaran	Realisasi	Rp.	%
	<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	2,429,808,337.00	855,508,220.00	(2,429,808,337.00)	<b>284.02</b>
	6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	2,429,808,337.00	855,508,220.00	(2,429,808,337.00)	<b>284.02</b>
		<b>JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAAN</b>	<b>2,429,808,337.00</b>	<b>855,508,220.00</b>	(2,429,808,337.00)	<b>284.02</b>
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		<b>308.665.364.620,64</b>		

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN 1.2 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 3 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI  
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS  
PENDAPATAN, BELANJA,  
DAN PEMBIAYAAN**

LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

## KOTA CIMAHI

## RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah	152.786.878.291,00	179.891.802.692,00	117,74	158.937.237.899,00
Pendapatan Retribusi Daerah	11.404.826.000,00	11.548.482.640,00	101,26	15.243.650.522,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	9.956.960.000,00	100,00	9.778.080.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	172.473.478.843,00	203.707.746.221,11	118,11	191.728.274.257,91
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>346.622.143.134,00</b>	<b>405.104.991.553,11</b>	<b>116,87</b>	<b>375.687.242.678,91</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil Pajak	60.721.010.363,00	61.309.116.578,00	100,97	50.460.873.698,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	31.578.902.903,00	47.781.705.502,00	151,31	38.645.976.130,00
Dana Alokasi Umum	530.425.978.000,00	530.425.978.000,00	100,00	539.717.972.000,00
Dana Alokasi Khusus	143.744.872.000,00	131.759.768.941,00	91,66	160.457.085.903,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>766.470.763.266,00</b>	<b>771.276.569.021,00</b>	<b>100,63</b>	<b>789.281.907.731,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>				
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	97.730.028.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya</b>	<b>52.247.274.000,00</b>	<b>52.247.274.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97.730.028.000,00</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	128.032.319.484,00	123.865.281.737,00	96,75	118.963.390.897,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Provinsi	236.810.517.464,00	105.707.342.961,00	44,64	23.922.151.027,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>364.842.836.948,00</b>	<b>229.572.624.698,00</b>	<b>62,92</b>	<b>142.885.541.924,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>1.183.560.874.214,00</b>	<b>1.053.096.467.719,00</b>	<b>88,98</b>	<b>1.029.897.477.655,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah	-	6.700.327.000,00	-	140.839.566,00
Dana Darurat				
Dana BOS	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68	52.270.900.000,00
Pendapatan Lainnya		71.950.231,00		
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>57.652.719.654,00</b>	<b>61.934.101.231,00</b>	<b>107,43</b>	<b>52.411.739.566,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.587.835.737.002,00</b>	<b>1.520.135.560.503,11</b>	<b>95,74</b>	<b>1.457.996.459.899,91</b>
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	723.673.114.458,00	643.977.236.028,00	88,99	636.883.229.738,00
Belanja Barang	657.581.777.697,00	555.391.457.278,00	84,46	456.337.905.380,02
Belanja Bunga	600.000.000,00	308.874.114,00	51,48	781.441.813,09
Belanja Subsidi	507.144.000,00	410.574.000,00	80,96	-
Belanja Hibah	20.953.726.450,00	18.999.042.200,00	90,67	13.856.011.450,00
Belanja Bantuan Sosial	3.630.024.338,00	2.571.530.000,00	70,84	2.864.475.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.406.945.786.943,00</b>	<b>1.221.658.713.620,00</b>	<b>86,83</b>	<b>1.110.723.063.381,11</b>
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Tanah	8.724.964.740,00	1.924.413.918,00	22,06	24.237.283.327,00
Belanja Peralatan dan Mesin	52.272.761.644,00	40.367.666.054,00	77,23	36.574.433.534,00
Belanja Gedung dan Bangunan	228.846.712.178,00	92.323.402.639,00	40,34	19.768.621.392,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	132.999.455.842,00	109.597.606.795,00	82,40	13.598.490.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.908.382.106,00	2.847.475.380,00	97,91	3.065.785.548,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>425.752.276.510,00</b>	<b>247.060.564.786,00</b>	<b>58,03</b>	<b>97.244.613.801,00</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
Belanja Tak Terduga	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	53,57	74.352.158.320,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>23.880.085.890,00</b>	<b>12.793.426.443,00</b>	<b>53,57</b>	<b>74.352.158.320,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.856.578.149.343,00</b>	<b>1.481.512.704.849,00</b>	<b>79,80</b>	<b>1.282.319.835.502,11</b>
<b>TRANSFER</b>				
<b>TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN</b>				
Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>1.856.578.149.343,00</b>	<b>1.481.512.704.849,00</b>	<b>79,80</b>	<b>1.282.319.835.502,11</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(268.742.412.341,00)</b>	<b>38.622.855.654,11</b>		<b>175.676.624.397,80</b>

<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
Penggunaan SiLPA	271.172.220.678,00	270.898.017.186,53	99,90	121.693.751.477,73
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	8.548.192.400,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>271.172.220.678,00</b>	<b>270.898.017.186,53</b>	<b>99,90</b>	<b>130.241.943.877,73</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	34.746.347.598,00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>2.429.808.337,00</b>	<b>855.508.220,00</b>	<b>35,21</b>	<b>34.746.347.598,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>268.742.412.341,00</b>	<b>270.042.508.966,53</b>	<b>100,48</b>	<b>95.495.596.279,73</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>-</b>	<b>308.665.364.620,64</b>		<b>271.172.220.677,53</b>

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)



LAMPIRAN 1.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH  
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB  
KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,  
DAN PEMBIAYAAN**

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.0.00.0.00.01. - Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>378.636.509.026,00</b>	<b>327.331.426.766,00</b>	<b>51.305.082.260,00</b>	<b>86,45</b>	
<b>1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>354.193.112.119,00</b>	<b>306.948.264.340,00</b>	<b>47.244.847.779,00</b>	<b>86,66</b>	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	268.729.197.976,00	228.552.914.893,00	40.176.283.083,00	85,04	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.003.194.143,00	69.621.159.447,00	4.382.034.696,00	94,07	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.05.	Belanja Hibah	9.082.400.000,00	7.404.200.000,00	1.678.200.000,00	81,52	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	2.378.320.000,00	1.369.990.000,00	1.008.330.000,00	57,60	
<b>1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>24.443.396.907,00</b>	<b>20.383.162.426,00</b>	<b>4.060.234.481,00</b>	<b>83,38</b>	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.551.913.353,00	5.823.668.982,00	728.244.371,00	88,88	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.302.589.596,00	11.966.304.739,00	3.336.284.857,00	78,19	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.588.893.958,00	2.593.188.705,00	(4.294.747,00)	100,16	
<b>1.01.1.01.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>271.787.310.776,00</b>	<b>230.782.045.974,00</b>	<b>41.005.264.802,00</b>	<b>84,91</b>	
<b>1.01.1.01.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>228.793.300,00</b>	<b>199.166.024,00</b>	<b>29.627.276,00</b>	<b>87,05</b>	
1.01.1.01.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	21.741.300,00	17.341.900,00	4.399.400,00	79,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.741.300,00	17.341.900,00	4.399.400,00	79,76	
1.01.1.01.0.0.01.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.981.000,00	4.481.000,00	1.500.000,00	74,92	
1.01.1.01.0.0.01.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.981.000,00	4.481.000,00	1.500.000,00	74,92	
1.01.1.01.0.0.01.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	5.981.000,00	4.481.000,00	1.500.000,00	74,92	
1.01.1.01.0.0.01.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.981.000,00	4.481.000,00	1.500.000,00	74,92	
1.01.1.01.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	195.090.000,00	172.862.124,00	22.227.876,00	88,60	
1.01.1.01.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	195.090.000,00	172.862.124,00	22.227.876,00	88,60	
<b>1.01.1.01.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>268.806.117.876,00</b>	<b>228.626.297.617,00</b>	<b>40.179.820.259,00</b>	<b>85,05</b>	
1.01.1.01.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	268.729.197.976,00	228.552.914.893,00	40.176.283.083,00	85,04	
1.01.1.01.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	268.729.197.976,00	228.552.914.893,00	40.176.283.083,00	85,04	
1.01.1.01.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	16.767.500,00	16.767.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.767.500,00	16.767.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	60.152.400,00	56.615.224,00	3.537.176,00	94,11	
1.01.1.01.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.152.400,00	56.615.224,00	3.537.176,00	94,11	
<b>1.01.1.01.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>310.411.300,00</b>	<b>129.278.200,00</b>	<b>181.133.100,00</b>	<b>41,64</b>	
1.01.1.01.0.0.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	310.411.300,00	129.278.200,00	181.133.100,00	41,64	
1.01.1.01.0.0.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	310.411.300,00	129.278.200,00	181.133.100,00	41,64	
<b>1.01.1.01.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.144.248.200,00</b>	<b>958.049.412,00</b>	<b>186.198.788,00</b>	<b>83,72</b>	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.999.500,00	5.999.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.999.500,00	5.999.500,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	189.798.700,00	185.398.200,00	4.400.500,00	97,68	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	189.798.700,00	185.398.200,00	4.400.500,00	97,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.0.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.995.700,00	5.995.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.995.700,00	5.995.700,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	164.234.500,00	126.669.000,00	37.565.500,00	77,12	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	164.234.500,00	126.669.000,00	37.565.500,00	77,12	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	41.999.800,00	26.847.800,00	15.152.000,00	63,92	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.999.800,00	26.847.800,00	15.152.000,00	63,92	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	730.220.000,00	607.139.212,00	123.080.788,00	83,14	
1.01.1.01.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	730.220.000,00	607.139.212,00	123.080.788,00	83,14	
<b>1.01.1.01.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>77.675.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>22.675.000,00</b>	<b>70,80</b>	
1.01.1.01.0.0.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	77.675.000,00	55.000.000,00	22.675.000,00	70,80	
1.01.1.01.0.0.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.675.000,00	55.000.000,00	22.675.000,00	70,80	
<b>1.01.1.01.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>812.934.200,00</b>	<b>483.667.597,00</b>	<b>329.266.603,00</b>	<b>59,49</b>	
1.01.1.01.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	751.046.000,00	424.907.373,00	326.138.627,00	56,57	
1.01.1.01.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	751.046.000,00	424.907.373,00	326.138.627,00	56,57	
1.01.1.01.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	61.888.200,00	58.760.224,00	3.127.976,00	94,94	
1.01.1.01.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.888.200,00	58.760.224,00	3.127.976,00	94,94	
<b>1.01.1.01.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>407.130.900,00</b>	<b>330.587.124,00</b>	<b>76.543.776,00</b>	<b>81,19</b>	
1.01.1.01.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	132.770.000,00	124.833.124,00	7.936.876,00	94,02	
1.01.1.01.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	132.770.000,00	124.833.124,00	7.936.876,00	94,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.0.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	204.751.200,00	185.901.000,00	18.850.200,00	90,79	
1.01.1.01.0.0.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.940.000,00	61.347.000,00	2.593.000,00	95,94	
1.01.1.01.0.0.01.2.09.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.811.200,00	124.554.000,00	16.257.200,00	88,45	
1.01.1.01.0.0.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	37.815.000,00	19.853.000,00	17.962.000,00	52,50	
1.01.1.01.0.0.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.815.000,00	19.853.000,00	17.962.000,00	52,50	
1.01.1.01.0.0.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	31.794.700,00	-	31.794.700,00	-	
1.01.1.01.0.0.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.794.700,00	-	31.794.700,00	-	
<b>1.01.1.01.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>107.439.084.250,00</b>	<b>96.549.380.792,00</b>	<b>10.889.703.458,00</b>	<b>89,86</b>	
<b>1.01.1.01.0.0.02.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR</b>	<b>62.637.313.895,00</b>	<b>58.348.196.199,00</b>	<b>4.289.117.696,00</b>	<b>93,15</b>	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.06.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	8.224.784.896,00	6.722.064.620,00	1.502.720.276,00	81,72	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	527.718.000,00	178.565.020,00	349.152.980,00	33,83	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.06.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.697.066.896,00	6.543.499.600,00	1.153.567.296,00	85,01	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.08.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS	6.181.581.000,00	4.595.431.075,00	1.586.149.925,00	74,34	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	769.581.000,00	527.687.855,00	241.893.145,00	68,56	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.08.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.412.000.000,00	4.067.743.220,00	1.344.256.780,00	75,16	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.09.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	130.000.000,00	126.123.079,00	3.876.921,00	97,01	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.000.000,00	126.123.079,00	3.876.921,00	97,01	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.11.	REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	496.000.000,00	490.221.996,00	5.778.004,00	98,83	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.11.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	496.000.000,00	490.221.996,00	5.778.004,00	98,83	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.12.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	90.170.000,00	9.338.708,00	80.831.292,00	10,35	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.170.000,00	9.338.708,00	831.292,00	91,82	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.12.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.0.02.2.01.17.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA	540.516.500,00	282.274.400,00	258.242.100,00	52,22	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.17.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	540.516.500,00	282.274.400,00	258.242.100,00	52,22	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.21.	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	244.977.000,00	240.177.000,00	4.800.000,00	98,04	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.21.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.337.000,00	13.937.000,00	3.400.000,00	80,38	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.21.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	227.640.000,00	226.240.000,00	1.400.000,00	99,38	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.23.	PENYELENGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	114.109.900,00	89.809.900,00	24.300.000,00	78,70	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.23.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	114.109.900,00	89.809.900,00	24.300.000,00	78,70	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.24.	PENYIAPAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR	10.090.000,00	10.090.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.24.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.090.000,00	10.090.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.25.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	161.035.500,00	160.315.500,00	720.000,00	99,55	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.25.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	161.035.500,00	160.315.500,00	720.000,00	99,55	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.26.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	5.097.480.000,00	5.093.641.124,00	3.838.876,00	99,92	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.26.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.097.480.000,00	5.093.641.124,00	3.838.876,00	99,92	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.27.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	411.122.400,00	195.431.200,00	215.691.200,00	47,53	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.27.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	411.122.400,00	195.431.200,00	215.691.200,00	47,53	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.28.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	285.701.900,00	256.404.524,00	29.297.376,00	89,74	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.28.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	264.869.500,00	256.404.524,00	8.464.976,00	96,80	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.28.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.832.400,00	-	20.832.400,00	-	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.29.	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	40.649.744.799,00	40.076.873.073,00	572.871.726,00	98,59	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.29.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.102.228.588,00	33.494.507.686,00	607.720.902,00	98,21	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.29.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.639.241.303,00	4.664.753.332,00	(25.512.029,00)	100,54	
1.01.1.01.0.0.02.2.01.29.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.908.274.908,00	1.917.612.055,00	(9.337.147,00)	100,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.01.1.01.0.0.02.2.02.</b>	<b>PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</b>	<b>22.328.759.755,00</b>	<b>19.432.252.759,00</b>	<b>2.896.506.996,00</b>	<b>87,02</b>	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.03.	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	523.970.600,00	385.863.022,00	138.107.578,00	73,64	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	76.585.550,00	21.414.450,00	78,14	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425.970.600,00	309.277.472,00	116.693.128,00	72,60	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.04.	PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	234.123.100,00	218.444.622,00	15.678.478,00	93,30	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	27.223.350,00	12.776.650,00	68,05	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.04.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.123.100,00	191.221.272,00	2.901.828,00	98,50	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.06.	PEMBANGUNAN LABORATORIUM	483.033.700,00	-	483.033.700,00	-	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.06.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	483.033.700,00	-	483.033.700,00	-	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.14.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	220.000.000,00	40.042.100,00	179.957.900,00	18,20	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.766.700,00	40.042.100,00	37.724.600,00	51,49	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.14.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.233.300,00	-	142.233.300,00	-	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.25.	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	74.791.600,00	-	74.791.600,00	-	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.25.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.791.600,00	-	74.791.600,00	-	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.28.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA	193.462.500,00	141.457.000,00	52.005.500,00	73,11	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.28.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	193.462.500,00	141.457.000,00	52.005.500,00	73,11	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.32.	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	1.170.000.000,00	1.161.477.000,00	8.523.000,00	99,27	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.32.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	17.727.000,00	1.593.000,00	91,75	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.32.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.150.680.000,00	1.143.750.000,00	6.930.000,00	99,39	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.35.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	577.841.700,00	-	577.841.700,00	-	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.35.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.400,00	-	32.400,00	-	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.35.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	577.809.300,00	-	577.809.300,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.0.02.2.02.36.	PENYELENGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	140.342.200,00	117.907.200,00	22.435.000,00	84,01	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.36.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.342.200,00	117.907.200,00	22.435.000,00	84,01	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.37.	PENYIAPAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	10.088.100,00	10.088.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.37.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.088.100,00	10.088.100,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.38.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	175.014.000,00	156.406.924,00	18.607.076,00	89,36	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.38.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.014.000,00	156.406.924,00	18.607.076,00	89,36	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.39.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	1.299.525.000,00	1.250.215.124,00	49.309.876,00	96,20	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.39.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.299.525.000,00	1.250.215.124,00	49.309.876,00	96,20	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.40.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	143.841.400,00	67.941.400,00	75.900.000,00	47,23	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.40.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	143.841.400,00	67.941.400,00	75.900.000,00	47,23	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.41.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	79.751.000,00	69.982.124,00	9.768.876,00	87,75	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.41.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.751.000,00	69.982.124,00	9.768.876,00	87,75	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.42.	PENGLOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	17.002.974.855,00	15.812.428.143,00	1.190.546.712,00	92,99	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.42.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.272.981.255,00	14.113.430.443,00	1.159.550.812,00	92,40	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.42.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.049.374.550,00	1.023.421.050,00	25.953.500,00	97,52	
1.01.1.01.0.0.02.2.02.42.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	680.619.050,00	675.576.650,00	5.042.400,00	99,25	
<b>1.01.1.01.0.0.02.2.03.</b>	<b>PENGLOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)</b>	<b>11.342.428.600,00</b>	<b>9.602.043.280,00</b>	<b>1.740.385.320,00</b>	<b>84,65</b>	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.02.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	2.792.300,00	2.792.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.792.300,00	2.792.300,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.03.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU	297.680.300,00	291.039.550,00	6.640.750,00	97,76	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.518.300,00	52.821.450,00	2.696.850,00	95,14	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	242.162.000,00	238.218.100,00	3.943.900,00	98,37	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.0.02.2.03.11.	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD	198.000.000,00	196.762.500,00	1.237.500,00	99,37	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	196.762.500,00	1.237.500,00	99,37	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.13.	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	54.136.300,00	42.213.300,00	11.923.000,00	77,97	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.136.300,00	42.213.300,00	11.923.000,00	77,97	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.15.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD	3.979.738.100,00	3.864.813.300,00	114.924.800,00	97,11	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.15.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.979.738.100,00	3.864.813.300,00	114.924.800,00	97,11	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.16.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	373.881.600,00	186.940.800,00	186.940.800,00	50,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	373.881.600,00	186.940.800,00	186.940.800,00	50,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.17.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.17.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.18.	PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	6.382.200.000,00	4.963.481.530,00	1.418.718.470,00	77,77	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.18.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	97.059.400,00	92.840.930,00	4.218.470,00	95,65	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.18.5.1.05.	Belanja Hibah	6.274.200.000,00	4.859.700.000,00	1.414.500.000,00	77,45	
1.01.1.01.0.0.02.2.03.18.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.940.600,00	10.940.600,00	-	100,00	
<b>1.01.1.01.0.0.02.2.04.</b>	<b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN</b>	<b>11.130.582.000,00</b>	<b>9.166.888.554,00</b>	<b>1.963.693.446,00</b>	<b>82,35</b>	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.09.	PENGADAAN PERLENGKAPAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	138.758.400,00	123.561.000,00	15.197.400,00	89,04	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.758.400,00	123.561.000,00	15.197.400,00	89,04	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.10.	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN	1.658.560.000,00	611.364.138,00	1.047.195.862,00	36,86	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	658.560.000,00	611.364.138,00	47.195.862,00	92,83	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.10.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.12.	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR NONFORMAL/KESETARAAN	5.519.677.000,00	5.107.969.872,00	411.707.128,00	92,54	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.519.677.000,00	5.107.969.872,00	411.707.128,00	92,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.0.02.2.04.14.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	250.926.600,00	125.463.300,00	125.463.300,00	50,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.926.600,00	125.463.300,00	125.463.300,00	50,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.15.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	306.960.000,00	302.090.000,00	4.870.000,00	98,41	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.15.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	306.960.000,00	302.090.000,00	4.870.000,00	98,41	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.16.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.17.	PENGLOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	3.201.700.000,00	2.842.440.244,00	359.259.756,00	88,77	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.17.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	355.387.600,00	297.940.244,00	57.447.356,00	83,83	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.17.5.1.05.	Belanja Hibah	2.808.200.000,00	2.544.500.000,00	263.700.000,00	90,60	
1.01.1.01.0.0.02.2.04.17.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.112.400,00	-	38.112.400,00	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>378.636.509.026,00</b>	<b>327.331.426.766,00</b>	<b>51.305.082.260,00</b>	<b>86,45</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(378.636.509.026,00)</b>	<b>(327.331.426.766,00)</b>	<b>(51.305.082.260,00)</b>	<b>86,45</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(378.636.509.026,00)</b>	<b>(327.331.426.766,00)</b>	<b>-</b>	<b>86,45</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01. - Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>17.738.905.080,00</b>	<b>18.034.132.900,00</b>	<b>295.227.820,00</b>	<b>101,66</b>	
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>17.738.905.080,00</b>	<b>18.034.132.900,00</b>	<b>295.227.820,00</b>	<b>101,66</b>	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	17.738.905.080,00	18.034.132.900,00	295.227.820,00	101,66	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>17.738.905.080,00</b>	<b>18.034.132.900,00</b>	<b>295.227.820,00</b>	<b>101,66</b>	
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>168.032.528.819,00</b>	<b>129.698.268.222,00</b>	<b>38.334.260.597,00</b>	<b>77,18</b>	
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>147.826.215.435,00</b>	<b>114.440.026.567,00</b>	<b>33.386.188.868,00</b>	<b>77,41</b>	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	64.735.210.890,00	56.650.499.398,00	8.084.711.492,00	87,51	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	82.591.004.545,00	57.289.527.169,00	25.301.477.376,00	69,36	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.5.1.05.	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00	
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.206.313.384,00</b>	<b>15.258.241.655,00</b>	<b>4.948.071.729,00</b>	<b>75,51</b>	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.230.212.709,00	3.304.884.809,00	925.327.900,00	78,12	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.716.100.675,00	11.953.356.846,00	3.762.743.829,00	76,05	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.00.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	260.000.000,00	-	260.000.000,00	-	
<b>1.02.1.02.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>74.756.593.392,00</b>	<b>63.577.523.437,00</b>	<b>11.179.069.955,00</b>	<b>85,04</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.02.1.02.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>51.501.800,00</b>	<b>44.402.400,00</b>	<b>7.099.400,00</b>	<b>86,21</b>	
1.02.1.02.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	27.001.900,00	22.101.000,00	4.900.900,00	81,84	
1.02.1.02.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.001.900,00	22.101.000,00	4.900.900,00	81,84	
1.02.1.02.0.0.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	24.499.900,00	22.301.400,00	2.198.500,00	91,02	
1.02.1.02.0.0.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.499.900,00	22.301.400,00	2.198.500,00	91,02	
<b>1.02.1.02.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>49.906.203.240,00</b>	<b>42.817.148.998,00</b>	<b>7.089.054.242,00</b>	<b>85,79</b>	
1.02.1.02.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	49.809.503.240,00	42.750.348.998,00	7.059.154.242,00	85,82	
1.02.1.02.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	49.809.503.240,00	42.750.348.998,00	7.059.154.242,00	85,82	
1.02.1.02.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	96.700.000,00	66.800.000,00	29.900.000,00	69,07	
1.02.1.02.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.700.000,00	66.800.000,00	29.900.000,00	69,07	
<b>1.02.1.02.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>212.315.000,00</b>	<b>153.242.000,00</b>	<b>59.073.000,00</b>	<b>72,17</b>	
1.02.1.02.0.0.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	24.905.000,00	24.650.000,00	255.000,00	98,97	
1.02.1.02.0.0.01.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.905.000,00	24.650.000,00	255.000,00	98,97	
1.02.1.02.0.0.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	187.410.000,00	128.592.000,00	58.818.000,00	68,61	
1.02.1.02.0.0.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	187.410.000,00	128.592.000,00	58.818.000,00	68,61	
<b>1.02.1.02.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>663.143.900,00</b>	<b>522.144.855,00</b>	<b>140.999.045,00</b>	<b>78,73</b>	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.002.600,00	9.295.330,00	707.270,00	92,92	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.002.600,00	9.295.330,00	707.270,00	92,92	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	115.888.900,00	91.480.500,00	24.408.400,00	78,93	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.895.800,00	86.630.500,00	24.265.300,00	78,11	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.993.100,00	4.850.000,00	143.100,00	97,13	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	69.824.500,00	55.245.500,00	14.579.000,00	79,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.0.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.572.800,00	13.730.500,00	9.842.300,00	58,24	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.251.700,00	41.515.000,00	4.736.700,00	89,75	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	133.131.200,00	101.317.250,00	31.813.950,00	76,10	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	133.131.200,00	101.317.250,00	31.813.950,00	76,10	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	159.304.700,00	132.938.500,00	26.366.200,00	83,44	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	159.304.700,00	132.938.500,00	26.366.200,00	83,44	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	174.992.000,00	131.867.775,00	43.124.225,00	75,35	
1.02.1.02.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	174.992.000,00	131.867.775,00	43.124.225,00	75,35	
<b>1.02.1.02.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>204.038.481,00</b>	<b>182.921.400,00</b>	<b>21.117.081,00</b>	<b>89,65</b>	
1.02.1.02.0.0.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	204.038.481,00	182.921.400,00	21.117.081,00	89,65	
1.02.1.02.0.0.01.2.07.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.0.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.538.481,00	175.421.400,00	21.117.081,00	89,25	
<b>1.02.1.02.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>925.618.800,00</b>	<b>811.349.801,00</b>	<b>114.268.999,00</b>	<b>87,65</b>	
1.02.1.02.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	89.884.200,00	71.599.776,00	18.284.424,00	79,65	
1.02.1.02.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.884.200,00	71.599.776,00	18.284.424,00	79,65	
1.02.1.02.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	835.734.600,00	739.750.025,00	95.984.575,00	88,51	
1.02.1.02.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	835.734.600,00	739.750.025,00	95.984.575,00	88,51	
<b>1.02.1.02.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.969.125.000,00</b>	<b>1.612.857.284,00</b>	<b>356.267.716,00</b>	<b>81,90</b>	
1.02.1.02.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	945.550.000,00	658.218.059,00	287.331.941,00	69,61	
1.02.1.02.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	945.550.000,00	658.218.059,00	287.331.941,00	69,61	
1.02.1.02.0.0.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.023.575.000,00	954.639.225,00	68.935.775,00	93,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.0.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.023.575.000,00	954.639.225,00	68.935.775,00	93,26	
<b>1.02.1.02.0.0.01.2.10.</b>	<b>PENINGKATAN PELAYANAN BLUD</b>	<b>20.824.647.171,00</b>	<b>17.433.456.699,00</b>	<b>3.391.190.472,00</b>	<b>83,71</b>	
1.02.1.02.0.0.01.2.10.01.	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	20.824.647.171,00	17.433.456.699,00	3.391.190.472,00	83,71	
1.02.1.02.0.0.01.2.10.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.296.779.012,00	10.271.221.762,00	1.025.557.250,00	90,92	
1.02.1.02.0.0.01.2.10.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.545.044.501,00	5.459.962.023,00	2.085.082.478,00	72,36	
1.02.1.02.0.0.01.2.10.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.880.961.658,00	1.659.812.914,00	221.148.744,00	88,24	
1.02.1.02.0.0.01.2.10.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.862.000,00	42.460.000,00	59.402.000,00	41,68	
<b>1.02.1.02.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>84.768.081.821,00</b>	<b>58.531.812.905,00</b>	<b>26.236.268.916,00</b>	<b>69,04</b>	
<b>1.02.1.02.0.0.02.2.01.</b>	<b>PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.772.038.784,00</b>	<b>18.119.581.913,00</b>	<b>5.652.456.871,00</b>	<b>76,22</b>	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.02.	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	15.524.089.000,00	13.184.472.245,00	2.339.616.755,00	84,92	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.746.183.000,00	1.325.671.245,00	420.511.755,00	75,91	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.577.906.000,00	11.858.801.000,00	1.719.105.000,00	87,33	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.02.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.09.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	2.180.824.885,00	61.745.846,00	2.119.079.039,00	2,83	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.492.210,00	9.650.000,00	74.842.210,00	11,42	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.036.332.675,00	52.095.846,00	1.984.236.829,00	2,55	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.09.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.13.	PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	832.000.000,00	712.821.800,00	119.178.200,00	85,67	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.13.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	832.000.000,00	712.821.800,00	119.178.200,00	85,67	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.14.	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	1.126.176.000,00	609.599.995,00	516.576.005,00	54,13	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.396.000,00	21.451.000,00	3.945.000,00	84,46	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.14.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.100.780.000,00	588.148.995,00	512.631.005,00	53,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.0.02.2.01.16.	PENGADAAN OBAT, VAKSIN	4.108.948.899,00	3.550.942.027,00	558.006.872,00	86,41	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.108.948.899,00	3.550.942.027,00	558.006.872,00	86,41	
<b>1.02.1.02.0.0.02.2.02.</b>	<b>PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>60.378.323.367,00</b>	<b>39.947.773.332,00</b>	<b>20.430.550.035,00</b>	<b>66,16</b>	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.01.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	537.882.700,00	312.036.300,00	225.846.400,00	58,01	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	537.882.700,00	312.036.300,00	225.846.400,00	58,01	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.02.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	1.771.143.700,00	964.099.704,00	807.043.996,00	54,43	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.771.143.700,00	964.099.704,00	807.043.996,00	54,43	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.03.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	111.321.200,00	11.989.800,00	99.331.400,00	10,77	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.321.200,00	11.989.800,00	99.331.400,00	10,77	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.04.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	601.773.600,00	191.202.000,00	410.571.600,00	31,77	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	601.773.600,00	191.202.000,00	410.571.600,00	31,77	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.05.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	368.204.000,00	162.814.000,00	205.390.000,00	44,21	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	355.204.000,00	150.114.000,00	205.090.000,00	42,26	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	12.700.000,00	300.000,00	97,69	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.06.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	238.991.400,00	190.084.580,00	48.906.820,00	79,53	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	238.991.400,00	190.084.580,00	48.906.820,00	79,53	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.07.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	206.432.500,00	100.872.500,00	105.560.000,00	48,86	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	206.432.500,00	100.872.500,00	105.560.000,00	48,86	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.08.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	203.149.200,00	150.217.200,00	52.932.000,00	73,94	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	203.149.200,00	150.217.200,00	52.932.000,00	73,94	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.09.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	172.995.000,00	118.485.540,00	54.509.460,00	68,49	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	172.995.000,00	118.485.540,00	54.509.460,00	68,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.0.02.2.02.10.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	231.062.900,00	168.487.000,00	62.575.900,00	72,91	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	231.062.900,00	168.487.000,00	62.575.900,00	72,91	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.11.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	284.794.300,00	233.352.025,00	51.442.275,00	81,93	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	284.794.300,00	233.352.025,00	51.442.275,00	81,93	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.12.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	284.605.000,00	229.110.000,00	55.495.000,00	80,50	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	284.605.000,00	229.110.000,00	55.495.000,00	80,50	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.13.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	5.796.944.100,00	1.952.076.450,00	3.844.867.650,00	33,67	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.262.375.100,00	1.452.076.450,00	3.810.298.650,00	27,59	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.13.5.1.05.	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.13.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.569.000,00	-	34.569.000,00	-	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.15.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	1.583.568.400,00	881.930.442,00	701.637.958,00	55,69	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.15.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.583.568.400,00	881.930.442,00	701.637.958,00	55,69	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.16.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	126.101.000,00	56.543.000,00	69.558.000,00	44,83	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.101.000,00	56.543.000,00	69.558.000,00	44,83	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.17.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	712.215.500,00	578.439.540,00	133.775.960,00	81,21	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.17.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	712.215.500,00	578.439.540,00	133.775.960,00	81,21	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.18.	PENGLOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	744.055.100,00	408.171.150,00	335.883.950,00	54,85	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.18.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	744.055.100,00	408.171.150,00	335.883.950,00	54,85	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.20.	PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	119.888.000,00	64.042.000,00	55.846.000,00	53,41	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.20.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.888.000,00	64.042.000,00	55.846.000,00	53,41	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.23.	PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN KHUSUS	59.500.000,00	58.777.500,00	722.500,00	98,78	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.23.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	58.777.500,00	722.500,00	98,78	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.0.02.2.02.25.	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	787.012.200,00	430.092.972,00	356.919.228,00	54,64	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.25.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	787.012.200,00	430.092.972,00	356.919.228,00	54,64	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.26.	PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	35.438.279.567,00	27.075.091.885,00	8.363.187.682,00	76,40	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.26.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.438.279.567,00	27.075.091.885,00	8.363.187.682,00	76,40	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.29.	PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	45.190.000,00	42.850.000,00	2.340.000,00	94,82	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.29.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.190.000,00	42.850.000,00	2.340.000,00	94,82	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.33.	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	477.000.000,00	452.424.173,00	24.575.827,00	94,84	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.33.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	477.000.000,00	452.424.173,00	24.575.827,00	94,84	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.34.	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	8.946.550.000,00	5.089.833.571,00	3.856.716.429,00	56,89	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.34.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.946.550.000,00	5.089.833.571,00	3.856.716.429,00	56,89	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.35.	PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	370.839.000,00	-	370.839.000,00	-	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.35.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	370.839.000,00	-	370.839.000,00	-	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.36.	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	158.825.000,00	24.750.000,00	134.075.000,00	15,58	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.36.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	158.825.000,00	24.750.000,00	134.075.000,00	15,58	
<b>1.02.1.02.0.0.02.2.03.</b>	<b>PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI</b>	<b>214.000.470,00</b>	<b>183.205.000,00</b>	<b>30.795.470,00</b>	<b>85,60</b>	
1.02.1.02.0.0.02.2.03.01.	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN	19.579.000,00	15.700.300,00	3.878.700,00	80,18	
1.02.1.02.0.0.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.579.000,00	15.700.300,00	3.878.700,00	80,18	
1.02.1.02.0.0.02.2.03.02.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	72.452.700,00	57.180.000,00	15.272.700,00	78,92	
1.02.1.02.0.0.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.452.700,00	57.180.000,00	15.272.700,00	78,92	
1.02.1.02.0.0.02.2.03.03.	PENGADAAN ALAT/PERANGKAT SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN JARINGAN INTERNET	121.968.770,00	110.324.700,00	11.644.070,00	90,45	
1.02.1.02.0.0.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	710.000,00	140.000,00	83,52	
1.02.1.02.0.0.02.2.03.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.118.770,00	109.614.700,00	11.504.070,00	90,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.02.1.02.0.0.02.2.04.</b>	<b>PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>403.719.200,00</b>	<b>281.252.660,00</b>	<b>122.466.540,00</b>	<b>69,66</b>	
1.02.1.02.0.0.02.2.04.03.	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	403.719.200,00	281.252.660,00	122.466.540,00	69,66	
1.02.1.02.0.0.02.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	403.719.200,00	281.252.660,00	122.466.540,00	69,66	
<b>1.02.1.02.0.0.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>8.310.980.606,00</b>	<b>7.414.624.280,00</b>	<b>896.356.326,00</b>	<b>89,21</b>	
<b>1.02.1.02.0.0.03.2.02.</b>	<b>PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.310.980.606,00</b>	<b>7.414.624.280,00</b>	<b>896.356.326,00</b>	<b>89,21</b>	
1.02.1.02.0.0.03.2.02.02.	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	2.922.000.000,00	2.119.509.674,00	802.490.326,00	72,53	
1.02.1.02.0.0.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.922.000.000,00	2.119.509.674,00	802.490.326,00	72,53	
1.02.1.02.0.0.03.2.02.03.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.388.980.606,00	5.295.114.606,00	93.866.000,00	98,25	
1.02.1.02.0.0.03.2.02.03.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.628.928.638,00	3.628.928.638,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.0.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.760.051.968,00	1.666.185.968,00	93.866.000,00	94,66	
<b>1.02.1.02.0.0.04.</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>48.139.000,00</b>	<b>45.646.000,00</b>	<b>2.493.000,00</b>	<b>94,82</b>	
<b>1.02.1.02.0.0.04.2.01.</b>	<b>PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.0.0.04.2.01.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.0.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100,00	
<b>1.02.1.02.0.0.04.2.03.</b>	<b>PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA</b>	<b>37.914.000,00</b>	<b>35.421.000,00</b>	<b>2.493.000,00</b>	<b>93,42</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.0.04.2.03.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	37.914.000,00	35.421.000,00	2.493.000,00	93,42	
1.02.1.02.0.0.04.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.914.000,00	35.421.000,00	2.493.000,00	93,42	
<b>1.02.1.02.0.0.04.2.04.</b>	<b>PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)</b>	<b>7.925.000,00</b>	<b>7.925.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
1.02.1.02.0.0.04.2.04.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	7.925.000,00	7.925.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.0.04.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.925.000,00	7.925.000,00	-	100,00	
<b>1.02.1.02.0.0.05.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>148.734.000,00</b>	<b>128.661.600,00</b>	<b>20.072.400,00</b>	<b>86,50</b>	
<b>1.02.1.02.0.0.05.2.01.</b>	<b>ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.775.000,00</b>	<b>15.286.000,00</b>	<b>8.489.000,00</b>	<b>64,29</b>	
1.02.1.02.0.0.05.2.01.01.	PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23.775.000,00	15.286.000,00	8.489.000,00	64,29	
1.02.1.02.0.0.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.775.000,00	15.286.000,00	8.489.000,00	64,29	
<b>1.02.1.02.0.0.05.2.02.</b>	<b>PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>95.015.000,00</b>	<b>84.256.600,00</b>	<b>10.758.400,00</b>	<b>88,67</b>	
1.02.1.02.0.0.05.2.02.01.	PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	95.015.000,00	84.256.600,00	10.758.400,00	88,67	
1.02.1.02.0.0.05.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.015.000,00	84.256.600,00	10.758.400,00	88,67	
<b>1.02.1.02.0.0.05.2.03.</b>	<b>PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>29.944.000,00</b>	<b>29.119.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>97,24</b>	
1.02.1.02.0.0.05.2.03.01.	BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	29.944.000,00	29.119.000,00	825.000,00	97,24	
1.02.1.02.0.0.05.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.944.000,00	29.119.000,00	825.000,00	97,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>168.032.528.819,00</b>	<b>129.698.268.222,00</b>	<b>38.334.260.597,00</b>	<b>77,18</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(150.293.623.739,00)</b>	<b>(111.664.135.322,00)</b>	<b>(38.039.032.777,00)</b>	<b>74,29</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(150.293.623.739,00)</b>	<b>(111.664.135.322,00)</b>	<b>-</b>	<b>74,29</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.02. - RSUD CIBABAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>145.000.000.000,00</b>	<b>165.608.981.259,00</b>	<b>20.608.981.259,00</b>	<b>114,21</b>	
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>145.000.000.000,00</b>	<b>165.608.981.259,00</b>	<b>20.608.981.259,00</b>	<b>114,21</b>	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	20.608.981.259,00	114,21	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>145.000.000.000,00</b>	<b>165.608.981.259,00</b>	<b>20.608.981.259,00</b>	<b>114,21</b>	
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>236.976.639.387,00</b>	<b>208.542.243.627,00</b>	<b>28.434.395.760,00</b>	<b>88,00</b>	
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>221.690.857.339,00</b>	<b>196.904.035.124,00</b>	<b>24.786.822.215,00</b>	<b>88,81</b>	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	95.203.830.268,00	88.637.587.609,00	6.566.242.659,00	93,10	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.487.027.071,00	108.266.447.515,00	18.220.579.556,00	85,59	
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>15.285.782.048,00</b>	<b>11.638.208.503,00</b>	<b>3.647.573.545,00</b>	<b>76,13</b>	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.889.369.888,00	10.346.041.343,00	3.543.328.545,00	74,48	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.396.412.160,00	1.292.167.160,00	104.245.000,00	92,53	
<b>1.02.1.02.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>44.513.530.268,00</b>	<b>43.657.224.115,00</b>	<b>856.306.153,00</b>	<b>98,07</b>	
<b>1.02.1.02.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>44.513.530.268,00</b>	<b>43.657.224.115,00</b>	<b>856.306.153,00</b>	<b>98,07</b>	
1.02.1.02.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	44.513.530.268,00	43.657.224.115,00	856.306.153,00	98,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	44.513.530.268,00	43.657.224.115,00	856.306.153,00	98,07	
<b>1.02.1.02.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>192.463.109.119,00</b>	<b>164.885.019.512,00</b>	<b>27.578.089.607,00</b>	<b>85,67</b>	
<b>1.02.1.02.0.0.02.2.01.</b>	<b>PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.788.747.488,00</b>	<b>10.313.851.493,00</b>	<b>1.474.895.995,00</b>	<b>87,48</b>	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.01.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	2.384.779.600,00	2.190.331.280,00	194.448.320,00	91,84	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.188.367.440,00	993.919.120,00	194.448.320,00	83,63	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.196.412.160,00	1.196.412.160,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.14.	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	9.403.967.888,00	8.123.520.213,00	1.280.447.675,00	86,38	
1.02.1.02.0.0.02.2.01.14.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.403.967.888,00	8.123.520.213,00	1.280.447.675,00	86,38	
<b>1.02.1.02.0.0.02.2.02.</b>	<b>PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>180.674.361.631,00</b>	<b>154.571.168.019,00</b>	<b>26.103.193.612,00</b>	<b>85,55</b>	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.13.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	23.049.970.000,00	17.327.414.603,00	5.722.555.397,00	75,17	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.13.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.317.500.000,00	8.123.750.204,00	3.193.749.796,00	71,78	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.732.470.000,00	9.203.664.399,00	2.528.805.601,00	78,44	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.32.	OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	157.624.391.631,00	137.243.753.416,00	20.380.638.215,00	87,07	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.32.5.1.01.	Belanja Pegawai	39.372.800.000,00	36.856.613.290,00	2.516.186.710,00	93,60	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.32.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	113.566.189.631,00	98.068.863.996,00	15.497.325.635,00	86,35	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.32.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.485.402.000,00	2.222.521.130,00	2.262.880.870,00	49,55	
1.02.1.02.0.0.02.2.02.32.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	95.755.000,00	104.245.000,00	47,87	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>236.976.639.387,00</b>	<b>208.542.243.627,00</b>	<b>28.434.395.760,00</b>	<b>88,00</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(91.976.639.387,00)</b>	<b>(42.933.262.368,00)</b>	<b>(7.825.414.501,00)</b>	<b>46,67</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(91.976.639.387,00)</b>	<b>(42.933.262.368,00)</b>	<b>-</b>	<b>46,67</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.01. - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.03.1.03.0.00.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>226.240.032.268,00</b>	<b>192.149.670.904,00</b>	<b>34.090.361.364,00</b>	<b>84,93</b>	
<b>1.03.1.03.0.00.0.00.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>50.635.422.626,00</b>	<b>46.473.142.710,00</b>	<b>4.162.279.916,00</b>	<b>91,77</b>	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.920.044.000,00	7.241.021.693,00	679.022.307,00	91,42	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.960.378.626,00	38.483.234.017,00	3.477.144.609,00	91,71	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00.00.5.1.05.	Belanja Hibah	755.000.000,00	748.887.000,00	6.113.000,00	99,19	
<b>1.03.1.03.0.00.0.00.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>175.604.609.642,00</b>	<b>145.676.528.194,00</b>	<b>29.928.081.448,00</b>	<b>82,95</b>	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	502.731.680,00	481.961.150,00	20.770.530,00	95,86	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.627.272.000,00	46.563.565.838,00	9.063.706.162,00	83,70	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00.00.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	119.474.605.962,00	98.631.001.206,00	20.843.604.756,00	82,55	
<b>1.03.1.03.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.734.124.880,00</b>	<b>8.852.466.342,00</b>	<b>881.658.538,00</b>	<b>90,94</b>	
<b>1.03.1.03.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>78.229.800,00</b>	<b>69.497.631,00</b>	<b>8.732.169,00</b>	<b>88,83</b>	
1.03.1.03.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	73.729.800,00	66.122.631,00	7.607.169,00	89,68	
1.03.1.03.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.729.800,00	66.122.631,00	7.607.169,00	89,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.500.000,00	3.375.000,00	1.125.000,00	75,00	
1.03.1.03.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.375.000,00	1.125.000,00	75,00	
<b>1.03.1.03.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7.968.763.700,00</b>	<b>7.284.545.324,00</b>	<b>684.218.376,00</b>	<b>91,41</b>	
1.03.1.03.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.920.044.000,00	7.241.021.693,00	679.022.307,00	91,42	
1.03.1.03.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.920.044.000,00	7.241.021.693,00	679.022.307,00	91,42	
1.03.1.03.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	999.900,00	760.000,00	239.900,00	76,00	
1.03.1.03.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	999.900,00	760.000,00	239.900,00	76,00	
1.03.1.03.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	47.719.800,00	42.763.631,00	4.956.169,00	89,61	
1.03.1.03.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.719.800,00	42.763.631,00	4.956.169,00	89,61	
<b>1.03.1.03.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>152.057.000,00</b>	<b>140.934.500,00</b>	<b>11.122.500,00</b>	<b>92,68</b>	
1.03.1.03.0.0.01.2.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	152.057.000,00	140.934.500,00	11.122.500,00	92,68	
1.03.1.03.0.0.01.2.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	152.057.000,00	140.934.500,00	11.122.500,00	92,68	
<b>1.03.1.03.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>651.768.780,00</b>	<b>575.536.041,00</b>	<b>76.232.739,00</b>	<b>88,30</b>	
1.03.1.03.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	320.555.280,00	284.205.586,00	36.349.694,00	88,66	
1.03.1.03.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.823.600,00	99.258.186,00	18.565.414,00	84,24	
1.03.1.03.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.731.680,00	184.947.400,00	17.784.280,00	91,22	
1.03.1.03.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	175.816.300,00	159.453.968,00	16.362.332,00	90,69	
1.03.1.03.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.816.300,00	159.453.968,00	16.362.332,00	90,69	
1.03.1.03.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.351.200,00	23.353.400,00	4.997.800,00	82,37	
1.03.1.03.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.351.200,00	23.353.400,00	4.997.800,00	82,37	
1.03.1.03.0.0.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.0.0.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	103.046.000,00	84.523.087,00	18.522.913,00	82,02	
1.03.1.03.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.046.000,00	84.523.087,00	18.522.913,00	82,02	
<b>1.03.1.03.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>233.590.600,00</b>	<b>188.198.016,00</b>	<b>45.392.584,00</b>	<b>80,56</b>	
1.03.1.03.0.0.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	85.440.000,00	77.862.261,00	7.577.739,00	91,13	
1.03.1.03.0.0.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	85.440.000,00	77.862.261,00	7.577.739,00	91,13	
1.03.1.03.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	36.000.000,00	5.794.194,00	30.205.806,00	16,09	
1.03.1.03.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	5.794.194,00	30.205.806,00	16,09	
1.03.1.03.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	112.150.600,00	104.541.561,00	7.609.039,00	93,21	
1.03.1.03.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.150.600,00	104.541.561,00	7.609.039,00	93,21	
<b>1.03.1.03.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>649.715.000,00</b>	<b>593.754.830,00</b>	<b>55.960.170,00</b>	<b>91,38</b>	
1.03.1.03.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	560.090.000,00	505.254.830,00	54.835.170,00	90,20	
1.03.1.03.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	560.090.000,00	505.254.830,00	54.835.170,00	90,20	
1.03.1.03.0.0.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	89.625.000,00	88.500.000,00	1.125.000,00	98,74	
1.03.1.03.0.0.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.625.000,00	88.500.000,00	1.125.000,00	98,74	
<b>1.03.1.03.0.0.08.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>60.869.346.120,00</b>	<b>50.812.335.738,00</b>	<b>10.057.010.382,00</b>	<b>83,47</b>	
<b>1.03.1.03.0.0.08.2.01.</b>	<b>PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>60.869.346.120,00</b>	<b>50.812.335.738,00</b>	<b>10.057.010.382,00</b>	<b>83,47</b>	
1.03.1.03.0.0.08.2.01.01.	PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	656.930.000,00	404.467.800,00	252.462.200,00	61,56	
1.03.1.03.0.0.08.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	656.930.000,00	404.467.800,00	252.462.200,00	61,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.0.08.2.01.02.	PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.003.789.420,00	50.315.231.138,00	9.688.558.282,00	83,85	
1.03.1.03.0.0.08.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.621.517.420,00	3.002.778.300,00	618.739.120,00	82,91	
1.03.1.03.0.0.08.2.01.02.5.1.05.	Belanja Hibah	755.000.000,00	748.887.000,00	6.113.000,00	99,19	
1.03.1.03.0.0.08.2.01.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.627.272.000,00	46.563.565.838,00	9.063.706.162,00	83,70	
1.03.1.03.0.0.08.2.01.05.	MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAERAH KABUPATEN/KOTA	208.626.700,00	92.636.800,00	115.989.900,00	44,40	
1.03.1.03.0.0.08.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	208.626.700,00	92.636.800,00	115.989.900,00	44,40	
<b>1.03.1.03.0.0.10.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>154.340.703.848,00</b>	<b>131.379.481.113,00</b>	<b>22.961.222.735,00</b>	<b>85,12</b>	
<b>1.03.1.03.0.0.10.2.01.</b>	<b>PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>154.340.703.848,00</b>	<b>131.379.481.113,00</b>	<b>22.961.222.735,00</b>	<b>85,12</b>	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.03.	PENGLOLAAN LEGER JALAN	309.998.600,00	303.559.350,00	6.439.250,00	97,92	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	309.998.600,00	303.559.350,00	6.439.250,00	97,92	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.04.	SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	164.959.800,00	155.963.600,00	8.996.200,00	94,54	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	164.959.800,00	155.963.600,00	8.996.200,00	94,54	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.06.	PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR	512.000.000,00	397.745.700,00	114.254.300,00	77,68	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	55.826.700,00	6.173.300,00	90,04	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.06.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	450.000.000,00	341.919.000,00	108.081.000,00	75,98	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.10.	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	41.154.575.695,00	39.882.132.309,00	1.272.443.386,00	96,90	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.361.962.695,00	26.941.246.900,00	420.715.795,00	98,46	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.10.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.792.613.000,00	12.940.885.409,00	851.727.591,00	93,82	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.11.	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	3.823.432.553,00	3.098.181.844,00	725.250.709,00	81,03	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.523.432.553,00	2.801.168.094,00	722.264.459,00	79,50	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.11.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	297.013.750,00	2.986.250,00	99,00	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.14.	PEMBANGUNAN UNDERPASS	107.342.399.500,00	86.681.682.797,00	20.660.716.703,00	80,75	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.406.538,00	1.333.486.000,00	776.920.538,00	63,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.0.10.2.01.14.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.231.992.962,00	85.348.196.797,00	19.883.796.165,00	81,10	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.16.	PENGGANTIAN JEMBATAN	96.600.200,00	81.246.750,00	15.353.450,00	84,10	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.600.200,00	81.246.750,00	15.353.450,00	84,10	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.20.	PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN	936.737.500,00	778.968.763,00	157.768.737,00	83,15	
1.03.1.03.0.0.10.2.01.20.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	936.737.500,00	778.968.763,00	157.768.737,00	83,15	
<b>1.03.1.03.0.0.11.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>109.400.000,00</b>	<b>54.147.821,00</b>	<b>55.252.179,00</b>	<b>49,49</b>	
<b>1.03.1.03.0.0.11.2.01.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI</b>	<b>109.400.000,00</b>	<b>54.147.821,00</b>	<b>55.252.179,00</b>	<b>49,49</b>	
1.03.1.03.0.0.11.2.01.02.	PENYIAPAN INSTRUKTUR/ASESOR/PENYELENGGARA PELATIHAN	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
1.03.1.03.0.0.11.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
1.03.1.03.0.0.11.2.01.04.	PELAKSANAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	87.400.000,00	54.147.821,00	33.252.179,00	61,95	
1.03.1.03.0.0.11.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.400.000,00	54.147.821,00	33.252.179,00	61,95	
<b>1.03.1.03.0.0.12.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.186.457.420,00</b>	<b>1.051.239.890,00</b>	<b>135.217.530,00</b>	<b>88,60</b>	
<b>1.03.1.03.0.0.12.2.01.</b>	<b>PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA</b>	<b>423.999.820,00</b>	<b>367.412.000,00</b>	<b>56.587.820,00</b>	<b>86,65</b>	
1.03.1.03.0.0.12.2.01.01.	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RTRW KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	49.818.000,00	182.000,00	99,63	
1.03.1.03.0.0.12.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.818.000,00	182.000,00	99,63	
1.03.1.03.0.0.12.2.01.02.	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RRTR KABUPATEN/KOTA	187.000.000,00	149.340.000,00	37.660.000,00	79,86	
1.03.1.03.0.0.12.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	187.000.000,00	149.340.000,00	37.660.000,00	79,86	
1.03.1.03.0.0.12.2.01.03.	PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	138.097.420,00	131.254.000,00	6.843.420,00	95,04	
1.03.1.03.0.0.12.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.097.420,00	131.254.000,00	6.843.420,00	95,04	
1.03.1.03.0.0.12.2.01.04.	SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG	48.902.400,00	37.000.000,00	11.902.400,00	75,66	
1.03.1.03.0.0.12.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.902.400,00	37.000.000,00	11.902.400,00	75,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.03.1.03.0.0.12.2.02.</b>	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.534.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>99,53</b>	
1.03.1.03.0.0.12.2.02.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	49.764.500,00	235.500,00	99,52	
1.03.1.03.0.0.12.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.764.500,00	235.500,00	99,52	
1.03.1.03.0.0.12.2.02.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	49.769.500,00	230.500,00	99,53	
1.03.1.03.0.0.12.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.769.500,00	230.500,00	99,53	
<b>1.03.1.03.0.0.12.2.03.</b>	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>97.681.100,00</b>	<b>318.900,00</b>	<b>99,67</b>	
1.03.1.03.0.0.12.2.03.02.	SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG	98.000.000,00	97.681.100,00	318.900,00	99,67	
1.03.1.03.0.0.12.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	97.681.100,00	318.900,00	99,67	
<b>1.03.1.03.0.0.12.2.04.</b>	<b>KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>564.457.600,00</b>	<b>486.612.790,00</b>	<b>77.844.810,00</b>	<b>86,20</b>	
1.03.1.03.0.0.12.2.04.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF BIDANG PENATAAN RUANG	312.300.000,00	262.809.500,00	49.490.500,00	84,15	
1.03.1.03.0.0.12.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	312.300.000,00	262.809.500,00	49.490.500,00	84,15	
1.03.1.03.0.0.12.2.04.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG PENATAAN RUANG	57.100.000,00	52.154.900,00	4.945.100,00	91,33	
1.03.1.03.0.0.12.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.100.000,00	52.154.900,00	4.945.100,00	91,33	
1.03.1.03.0.0.12.2.04.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	195.057.600,00	171.648.390,00	23.409.210,00	87,99	
1.03.1.03.0.0.12.2.04.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	195.057.600,00	171.648.390,00	23.409.210,00	87,99	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>226.240.032.268,00</b>	<b>192.149.670.904,00</b>	<b>34.090.361.364,00</b>	<b>84,93</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(226.240.032.268,00)</b>	<b>(192.149.670.904,00)</b>	<b>(34.090.361.364,00)</b>	<b>84,93</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(226.240.032.268,00)</b>	<b>(192.149.670.904,00)</b>	<b>-</b>	<b>84,93</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**ORGANISASI : 1.04.1.03.0.00.01. - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7.754.071.000,00</b>	<b>7.686.799.080,00</b>	<b>(67.271.920,00)</b>	<b>99,13</b>	
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>7.754.071.000,00</b>	<b>7.686.799.080,00</b>	<b>(67.271.920,00)</b>	<b>99,13</b>	
1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	3.788.880.000,00	3.217.740.950,00	(571.139.050,00)	84,92	
1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	3.965.191.000,00	4.469.058.130,00	503.867.130,00	112,70	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>7.754.071.000,00</b>	<b>7.686.799.080,00</b>	<b>(67.271.920,00)</b>	<b>99,13</b>	
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>62.279.380.915,00</b>	<b>52.677.799.870,00</b>	<b>9.601.581.045,00</b>	<b>84,58</b>	
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>48.168.377.695,00</b>	<b>42.435.851.467,00</b>	<b>5.732.526.228,00</b>	<b>88,09</b>	
1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.272.256.850,00	10.018.490.921,00	253.765.929,00	97,52	
1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.688.215.307,00	31.257.360.546,00	5.430.854.761,00	85,19	
1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.207.905.538,00	1.160.000.000,00	47.905.538,00	96,03	
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>14.111.003.220,00</b>	<b>10.241.948.403,00</b>	<b>3.869.054.817,00</b>	<b>72,58</b>	
1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.5.2.01.	Belanja Modal Tanah	3.036.504.740,00	1.545.337.518,00	1.491.167.222,00	50,89	
1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	603.910.600,00	561.562.798,00	42.347.802,00	92,98	
1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	714.456.800,00	645.046.098,00	69.410.702,00	90,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.1.03.0.00.01.00.00.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.756.131.080,00	7.490.001.989,00	2.266.129.091,00	76,77	
<b>1.04.1.04.1.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.728.479.200,00</b>	<b>11.505.115.388,00</b>	<b>1.223.363.812,00</b>	<b>90,38</b>	
<b>1.04.1.04.1.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>139.133.000,00</b>	<b>123.962.800,00</b>	<b>15.170.200,00</b>	<b>89,09</b>	
1.04.1.04.1.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	54.240.000,00	46.534.900,00	7.705.100,00	85,79	
1.04.1.04.1.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.240.000,00	46.534.900,00	7.705.100,00	85,79	
1.04.1.04.1.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	84.893.000,00	77.427.900,00	7.465.100,00	91,20	
1.04.1.04.1.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.893.000,00	77.427.900,00	7.465.100,00	91,20	
<b>1.04.1.04.1.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>9.102.886.400,00</b>	<b>8.875.998.965,00</b>	<b>226.887.435,00</b>	<b>97,50</b>	
1.04.1.04.1.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.095.822.200,00	8.868.945.165,00	226.877.035,00	97,50	
1.04.1.04.1.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.095.822.200,00	8.868.945.165,00	226.877.035,00	97,50	
1.04.1.04.1.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.064.200,00	7.053.800,00	10.400,00	99,85	
1.04.1.04.1.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.064.200,00	7.053.800,00	10.400,00	99,85	
<b>1.04.1.04.1.0.01.2.03.</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>126.550.000,00</b>	<b>76.200.150,00</b>	<b>50.349.850,00</b>	<b>60,21</b>	
1.04.1.04.1.0.01.2.03.01.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	126.550.000,00	76.200.150,00	50.349.850,00	60,21	
1.04.1.04.1.0.01.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.550.000,00	76.200.150,00	50.349.850,00	60,21	
<b>1.04.1.04.1.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>141.116.300,00</b>	<b>135.750.000,00</b>	<b>5.366.300,00</b>	<b>96,19</b>	
1.04.1.04.1.0.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	141.116.300,00	135.750.000,00	5.366.300,00	96,19	
1.04.1.04.1.0.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	141.116.300,00	135.750.000,00	5.366.300,00	96,19	
<b>1.04.1.04.1.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>776.907.500,00</b>	<b>668.637.062,00</b>	<b>108.270.438,00</b>	<b>86,06</b>	
1.04.1.04.1.0.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.548.000,00	1.548.000,00	-	100,00	
1.04.1.04.1.0.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.548.000,00	1.548.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.1.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	430.598.400,00	385.987.530,00	44.610.870,00	89,63	
1.04.1.04.1.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.314.700,00	90.657.000,00	29.657.700,00	75,34	
1.04.1.04.1.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	310.283.700,00	295.330.530,00	14.953.170,00	95,18	
1.04.1.04.1.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	45.731.500,00	41.086.000,00	4.645.500,00	89,84	
1.04.1.04.1.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.731.500,00	41.086.000,00	4.645.500,00	89,84	
1.04.1.04.1.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	59.724.600,00	44.042.700,00	15.681.900,00	73,74	
1.04.1.04.1.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.724.600,00	44.042.700,00	15.681.900,00	73,74	
1.04.1.04.1.0.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	12.780.000,00	11.220.000,00	53,25	
1.04.1.04.1.0.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	12.780.000,00	11.220.000,00	53,25	
1.04.1.04.1.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	215.305.000,00	183.192.832,00	32.112.168,00	85,08	
1.04.1.04.1.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	215.305.000,00	183.192.832,00	32.112.168,00	85,08	
<b>1.04.1.04.1.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>400.325.000,00</b>	<b>274.200.000,00</b>	<b>126.125.000,00</b>	<b>68,49</b>	
1.04.1.04.1.0.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	400.325.000,00	274.200.000,00	126.125.000,00	68,49	
1.04.1.04.1.0.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	400.325.000,00	274.200.000,00	126.125.000,00	68,49	
<b>1.04.1.04.1.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.134.201.000,00</b>	<b>655.240.711,00</b>	<b>478.960.289,00</b>	<b>57,77</b>	
1.04.1.04.1.0.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	117.660.000,00	109.060.000,00	8.600.000,00	92,69	
1.04.1.04.1.0.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.660.000,00	109.060.000,00	8.600.000,00	92,69	
1.04.1.04.1.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	973.800.000,00	505.974.711,00	467.825.289,00	51,95	
1.04.1.04.1.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	973.800.000,00	505.974.711,00	467.825.289,00	51,95	
1.04.1.04.1.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	42.741.000,00	40.206.000,00	2.535.000,00	94,06	
1.04.1.04.1.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.741.000,00	40.206.000,00	2.535.000,00	94,06	
<b>1.04.1.04.1.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>907.360.000,00</b>	<b>695.125.700,00</b>	<b>212.234.300,00</b>	<b>76,60</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.1.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	907.360.000,00	695.125.700,00	212.234.300,00	76,60	
1.04.1.04.1.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	907.360.000,00	695.125.700,00	212.234.300,00	76,60	
<b>1.04.1.04.1.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>3.715.086.171,00</b>	<b>3.277.084.876,00</b>	<b>438.001.295,00</b>	<b>88,21</b>	
<b>1.04.1.04.1.0.02.2.03.</b>	<b>PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA</b>	<b>598.508.500,00</b>	<b>265.840.250,00</b>	<b>332.668.250,00</b>	<b>44,41</b>	
1.04.1.04.1.0.02.2.03.01.	REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	547.802.500,00	250.623.950,00	297.178.550,00	45,75	
1.04.1.04.1.0.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	547.802.500,00	250.623.950,00	297.178.550,00	45,75	
1.04.1.04.1.0.02.2.03.02.	PENYUSUNAN SITE PLAN DAN/ATAU DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) BAGI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	50.706.000,00	15.216.300,00	35.489.700,00	30,00	
1.04.1.04.1.0.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.706.000,00	15.216.300,00	35.489.700,00	30,00	
<b>1.04.1.04.1.0.02.2.05.</b>	<b>PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS</b>	<b>3.116.577.671,00</b>	<b>3.011.244.626,00</b>	<b>105.333.045,00</b>	<b>96,62</b>	
1.04.1.04.1.0.02.2.05.01.	FASILITASI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN PEMILIK/PENGHUNI RUMAH SUSUN	3.116.577.671,00	3.011.244.626,00	105.333.045,00	96,62	
1.04.1.04.1.0.02.2.05.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.703.337.671,00	2.613.641.210,00	89.696.461,00	96,68	
1.04.1.04.1.0.02.2.05.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.790.000,00	35.974.000,00	7.816.000,00	82,15	
1.04.1.04.1.0.02.2.05.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	369.450.000,00	361.629.416,00	7.820.584,00	97,88	
<b>1.04.1.04.1.0.03.</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>5.136.928.100,00</b>	<b>4.703.956.755,00</b>	<b>432.971.345,00</b>	<b>91,57</b>	
<b>1.04.1.04.1.0.03.2.02.</b>	<b>PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA</b>	<b>252.271.500,00</b>	<b>218.071.650,00</b>	<b>34.199.850,00</b>	<b>86,44</b>	
1.04.1.04.1.0.03.2.02.01.	SURVEI DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH	88.886.500,00	69.185.300,00	19.701.200,00	77,83	
1.04.1.04.1.0.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.886.500,00	69.185.300,00	19.701.200,00	77,83	
1.04.1.04.1.0.03.2.02.02.	PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	163.385.000,00	148.886.350,00	14.498.650,00	91,12	
1.04.1.04.1.0.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	163.385.000,00	148.886.350,00	14.498.650,00	91,12	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.04.1.04.1.0.03.2.03.</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA</b>	<b>4.884.656.600,00</b>	<b>4.485.885.105,00</b>	<b>398.771.495,00</b>	<b>91,83</b>	
1.04.1.04.1.0.03.2.03.01.	PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEREMAJAAN/PEMUGARAN PERMUKIMAN KUMUH	459.650.500,00	397.805.010,00	61.845.490,00	86,54	
1.04.1.04.1.0.03.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	459.650.500,00	397.805.010,00	61.845.490,00	86,54	
1.04.1.04.1.0.03.2.03.02.	PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	3.754.037.500,00	3.616.283.025,00	137.754.475,00	96,33	
1.04.1.04.1.0.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.578.184.600,00	2.440.483.025,00	137.701.575,00	94,65	
1.04.1.04.1.0.03.2.03.02.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	-	100,00	
1.04.1.04.1.0.03.2.03.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.852.900,00	15.800.000,00	52.900,00	99,66	
1.04.1.04.1.0.03.2.03.03.	KERJA SAMA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BESERTA PSU	670.968.600,00	471.797.070,00	199.171.530,00	70,31	
1.04.1.04.1.0.03.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	670.968.600,00	471.797.070,00	199.171.530,00	70,31	
<b>1.04.1.04.1.0.04.</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>1.023.345.000,00</b>	<b>975.077.800,00</b>	<b>48.267.200,00</b>	<b>95,28</b>	
<b>1.04.1.04.1.0.04.2.01.</b>	<b>PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.023.345.000,00</b>	<b>975.077.800,00</b>	<b>48.267.200,00</b>	<b>95,28</b>	
1.04.1.04.1.0.04.2.01.01.	PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	1.023.345.000,00	975.077.800,00	48.267.200,00	95,28	
1.04.1.04.1.0.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.023.345.000,00	975.077.800,00	48.267.200,00	95,28	
<b>1.04.1.04.1.0.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>8.089.276.990,00</b>	<b>7.893.607.134,00</b>	<b>195.669.856,00</b>	<b>97,58</b>	
<b>1.04.1.04.1.0.05.2.01.</b>	<b>URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN</b>	<b>8.089.276.990,00</b>	<b>7.893.607.134,00</b>	<b>195.669.856,00</b>	<b>97,58</b>	
1.04.1.04.1.0.05.2.01.01.	PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN	326.900.550,00	271.106.620,00	55.793.930,00	82,93	
1.04.1.04.1.0.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	326.900.550,00	271.106.620,00	55.793.930,00	82,93	
<b>1.04.1.04.1.0.05.2.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN</b>	<b>3.183.040.090,00</b>	<b>3.092.240.700,00</b>	<b>90.799.390,00</b>	<b>97,14</b>	
1.04.1.04.1.0.05.2.01.02.	PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	3.183.040.090,00	3.092.240.700,00	90.799.390,00	97,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.1.0.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.898.033.290,00	2.808.824.018,00	89.209.272,00	96,92	
1.04.1.04.1.0.05.2.01.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.006.800,00	283.416.682,00	1.590.118,00	99,44	
1.04.1.04.1.0.05.2.01.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	4.579.336.350,00	4.530.259.814,00	49.076.536,00	98,92	
1.04.1.04.1.0.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.579.336.350,00	4.530.259.814,00	49.076.536,00	98,92	
<b>1.03.1.04.1.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>9.478.183.843,00</b>	<b>7.003.927.060,00</b>	<b>2.474.256.783,00</b>	<b>73,89</b>	
<b>1.03.1.04.1.0.02.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.434.207.840,00</b>	<b>6.076.561.799,00</b>	<b>2.357.646.041,00</b>	<b>72,04</b>	
1.03.1.04.1.0.02.2.01.24.	REHABILITASI TANGGUL SUNGAI	617.603.000,00	591.279.490,00	26.323.510,00	95,73	
1.03.1.04.1.0.02.2.01.24.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	617.603.000,00	591.279.490,00	26.323.510,00	95,73	
1.03.1.04.1.0.02.2.01.29.	REHABILITASI POLDER/KOLAM RETENSI	96.900.000,00	87.690.950,00	9.209.050,00	90,49	
1.03.1.04.1.0.02.2.01.29.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.900.000,00	87.690.950,00	9.209.050,00	90,49	
1.03.1.04.1.0.02.2.01.46.	NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	7.474.704.840,00	5.187.886.872,00	2.286.817.968,00	69,40	
1.03.1.04.1.0.02.2.01.46.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.164.605.100,00	2.698.706.590,00	465.898.510,00	85,27	
1.03.1.04.1.0.02.2.01.46.5.2.01.	Belanja Modal Tanah	3.036.504.740,00	1.545.337.518,00	1.491.167.222,00	50,89	
1.03.1.04.1.0.02.2.01.46.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.273.595.000,00	943.842.764,00	329.752.236,00	74,10	
1.03.1.04.1.0.02.2.01.56.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN POLDER/KOLAM RETENSI	245.000.000,00	209.704.487,00	35.295.513,00	85,59	
1.03.1.04.1.0.02.2.01.56.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	245.000.000,00	209.704.487,00	35.295.513,00	85,59	
<b>1.03.1.04.1.0.02.2.02.</b>	<b>PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.043.976.003,00</b>	<b>927.365.261,00</b>	<b>116.610.742,00</b>	<b>88,83</b>	
1.03.1.04.1.0.02.2.02.14.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	843.976.003,00	736.999.861,00	106.976.142,00	87,32	
1.03.1.04.1.0.02.2.02.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	172.825.000,00	120.606.945,00	52.218.055,00	69,78	
1.03.1.04.1.0.02.2.02.14.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	671.151.003,00	616.392.916,00	54.758.087,00	91,84	
1.03.1.04.1.0.02.2.02.15.	REHABILITASI BENDUNG IRIGASI	50.000.000,00	48.370.300,00	1.629.700,00	96,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.04.1.0.02.2.02.15.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	48.370.300,00	1.629.700,00	96,74	
1.03.1.04.1.0.02.2.02.21.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	150.000.000,00	141.995.100,00	8.004.900,00	94,66	
1.03.1.04.1.0.02.2.02.21.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	141.995.100,00	8.004.900,00	94,66	
<b>1.03.1.04.1.0.03.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>10.052.368.319,00</b>	<b>9.068.717.661,00</b>	<b>983.650.658,00</b>	<b>90,21</b>	
<b>1.03.1.04.1.0.03.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.052.368.319,00</b>	<b>9.068.717.661,00</b>	<b>983.650.658,00</b>	<b>90,21</b>	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM	1.370.476.971,00	1.278.243.930,00	92.233.041,00	93,27	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.370.476.971,00	1.278.243.930,00	92.233.041,00	93,27	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.02.	SUPERVISI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/ PERLUASAN/PERBAIKAN SPAM	270.000.000,00	268.047.450,00	1.952.550,00	99,27	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	268.047.450,00	1.952.550,00	99,27	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.05.	PENINGKATAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN	760.000.000,00	749.209.707,00	10.790.293,00	98,58	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.05.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	760.000.000,00	749.209.707,00	10.790.293,00	98,58	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.07.	PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN	3.546.800.348,00	2.846.788.429,00	700.011.919,00	80,26	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	297.535.000,00	288.745.000,00	8.790.000,00	97,04	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.07.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.249.265.348,00	2.558.043.429,00	691.221.919,00	78,72	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.14.	PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SPAM	139.900.000,00	139.252.000,00	648.000,00	99,53	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	139.900.000,00	139.252.000,00	648.000,00	99,53	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.15.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DI KAWASAN PERKOTAAN	3.965.191.000,00	3.787.176.145,00	178.014.855,00	95,51	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.15.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.176.434.650,00	1.149.545.756,00	26.888.894,00	97,71	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.15.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.547.256.350,00	2.472.914.121,00	74.342.229,00	97,08	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.15.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.500.000,00	164.716.268,00	16.783.732,00	90,75	
1.03.1.04.1.0.03.2.01.15.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
<b>1.03.1.04.1.0.05.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>8.870.515.792,00</b>	<b>6.650.197.867,00</b>	<b>2.220.317.925,00</b>	<b>74,96</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.03.1.04.1.0.05.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.870.515.792,00</b>	<b>6.650.197.867,00</b>	<b>2.220.317.925,00</b>	<b>74,96</b>	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.592.235.300,00	732.102.150,00	860.133.150,00	45,97	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.592.235.300,00	732.102.150,00	860.133.150,00	45,97	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.05.	REHABILITASI/PENINGKATAN/PERLUASAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN	764.604.754,00	474.305.736,00	290.299.018,00	62,03	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	538.120.500,00	252.926.863,00	285.193.637,00	47,00	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.484.000,00	49.742.000,00	2.742.000,00	94,77	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.05.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	174.000.254,00	171.636.873,00	2.363.381,00	98,64	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.08.	SOSIALISASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERKAIT PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.10.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	1.789.855.400,00	1.586.707.881,00	203.147.519,00	88,65	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.789.855.400,00	1.586.707.881,00	203.147.519,00	88,65	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.11.	SUPERVISI PEMBANGUNAN/REHABILITASI /PENINGKATAN/PERLUASAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN	157.880.000,00	102.113.000,00	55.767.000,00	64,67	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.880.000,00	102.113.000,00	55.767.000,00	64,67	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.12.	PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN	4.530.940.338,00	3.719.969.100,00	810.971.238,00	82,10	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.480.528.800,00	1.317.463.100,00	163.065.700,00	88,98	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.12.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	47.905.538,00	-	47.905.538,00	-	
1.03.1.04.1.0.05.2.01.12.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.002.506.000,00	2.402.506.000,00	600.000.000,00	80,01	
<b>1.03.1.04.1.0.06.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>2.660.197.500,00</b>	<b>1.101.564.665,00</b>	<b>1.558.632.835,00</b>	<b>41,40</b>	
<b>1.03.1.04.1.0.06.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.660.197.500,00</b>	<b>1.101.564.665,00</b>	<b>1.558.632.835,00</b>	<b>41,40</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.04.1.0.06.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	227.274.250,00	212.669.270,00	14.604.980,00	93,57	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	227.274.250,00	212.669.270,00	14.604.980,00	93,57	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.03.	SUPERVISI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/ REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	99.863.000,00	36.039.205,00	63.823.795,00	36,08	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.863.000,00	36.039.205,00	63.823.795,00	36,08	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.05.	PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	609.521.750,00	-	609.521.750,00	-	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.908.275,00	-	33.908.275,00	-	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.05.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	575.613.475,00	-	575.613.475,00	-	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.06.	PENINGKATAN SALURAN DRAINASE PERKOTAAN	111.438.500,00	104.725.550,00	6.712.950,00	93,97	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.438.500,00	104.725.550,00	6.712.950,00	93,97	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.07.	REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN	1.317.246.000,00	484.987.840,00	832.258.160,00	36,81	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.317.246.000,00	484.987.840,00	832.258.160,00	36,81	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.08.	PENYEDIAAN SARANA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	100.503.000,00	73.982.300,00	26.520.700,00	73,61	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.503.000,00	73.982.300,00	26.520.700,00	73,61	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.09.	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE	194.351.000,00	189.160.500,00	5.190.500,00	97,32	
1.03.1.04.1.0.06.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	194.351.000,00	189.160.500,00	5.190.500,00	97,32	
<b>1.03.1.04.1.0.07.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>525.000.000,00</b>	<b>498.550.664,00</b>	<b>26.449.336,00</b>	<b>94,96</b>	
<b>1.03.1.04.1.0.07.2.01.</b>	<b>PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>525.000.000,00</b>	<b>498.550.664,00</b>	<b>26.449.336,00</b>	<b>94,96</b>	
1.03.1.04.1.0.07.2.01.02.	PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	525.000.000,00	498.550.664,00	26.449.336,00	94,96	
1.03.1.04.1.0.07.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	498.550.664,00	26.449.336,00	94,96	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>62.279.380.915,00</b>	<b>52.677.799.870,00</b>	<b>9.601.581.045,00</b>	<b>84,58</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(54.525.309.915,00)</b>	<b>(44.991.000.790,00)</b>	<b>(9.668.852.965,00)</b>	<b>82,51</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(54.525.309.915,00)</b>	<b>(44.991.000.790,00)</b>	<b>-</b>	<b>82,51</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.03. - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.03.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>64.575.500,00</b>	<b>104.907.500,00</b>	<b>40.332.000,00</b>	<b>162,45</b>	
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.03.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>64.575.500,00</b>	<b>104.907.500,00</b>	<b>40.332.000,00</b>	<b>162,45</b>	
1.05.1.05.0.00.0.00.03.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	64.575.500,00	104.907.500,00	40.332.000,00	162,45	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>64.575.500,00</b>	<b>104.907.500,00</b>	<b>40.332.000,00</b>	<b>162,45</b>	
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.03.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>22.336.672.545,00</b>	<b>20.973.725.004,00</b>	<b>1.362.947.541,00</b>	<b>93,89</b>	
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.03.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.695.684.345,00</b>	<b>20.353.074.211,00</b>	<b>1.342.610.134,00</b>	<b>93,81</b>	
1.05.1.05.0.00.0.00.03.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	15.111.737.845,00	14.486.562.106,00	625.175.739,00	95,86	
1.05.1.05.0.00.0.00.03.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.383.946.500,00	5.666.512.105,00	717.434.395,00	88,76	
1.05.1.05.0.00.0.00.03.00.00.5.1.05.	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.03.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>640.988.200,00</b>	<b>620.650.793,00</b>	<b>20.337.407,00</b>	<b>96,82</b>	
1.05.1.05.0.00.0.00.03.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	460.988.200,00	442.193.000,00	18.795.200,00	95,92	
1.05.1.05.0.00.0.00.03.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	178.457.793,00	1.542.207,00	99,14	
<b>1.05.1.05.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17.926.086.045,00</b>	<b>16.714.721.404,00</b>	<b>1.211.364.641,00</b>	<b>93,24</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>425.604.600,00</b>	<b>355.636.300,00</b>	<b>69.968.300,00</b>	<b>83,56</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	12.000.000,00	11.402.000,00	598.000,00	95,01	
1.05.1.05.0.0.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.402.000,00	598.000,00	95,01	
1.05.1.05.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	407.604.600,00	338.234.300,00	69.370.300,00	82,98	
1.05.1.05.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	407.604.600,00	338.234.300,00	69.370.300,00	82,98	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>15.155.402.845,00</b>	<b>14.528.554.006,00</b>	<b>626.848.839,00</b>	<b>95,86</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	15.111.737.845,00	14.486.562.106,00	625.175.739,00	95,86	
1.05.1.05.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	15.111.737.845,00	14.486.562.106,00	625.175.739,00	95,86	
1.05.1.05.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.050.000,00	4.922.400,00	127.600,00	97,47	
1.05.1.05.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	4.922.400,00	127.600,00	97,47	
1.05.1.05.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	38.615.000,00	37.069.500,00	1.545.500,00	95,99	
1.05.1.05.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.615.000,00	37.069.500,00	1.545.500,00	95,99	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>164.522.000,00</b>	<b>163.463.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>99,35</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	113.022.000,00	111.963.000,00	1.059.000,00	99,06	
1.05.1.05.0.0.01.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	113.022.000,00	111.963.000,00	1.059.000,00	99,06	
1.05.1.05.0.0.01.2.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	51.500.000,00	51.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.01.2.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	51.500.000,00	-	100,00	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>422.321.200,00</b>	<b>268.540.312,00</b>	<b>153.780.888,00</b>	<b>63,58</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.000.000,00	8.559.800,00	440.200,00	95,10	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.559.800,00	440.200,00	95,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	152.058.500,00	121.455.680,00	30.602.820,00	79,87	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.692.300,00	62.605.680,00	27.086.620,00	69,80	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.366.200,00	58.850.000,00	3.516.200,00	94,36	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.999.900,00	4.936.100,00	63.800,00	98,72	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900,00	4.936.100,00	63.800,00	98,72	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	44.420.900,00	27.915.500,00	16.505.400,00	62,84	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.420.900,00	27.915.500,00	16.505.400,00	62,84	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.793.900,00	40.312.800,00	4.481.100,00	89,99	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.793.900,00	40.312.800,00	4.481.100,00	89,99	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	165.548.000,00	63.860.432,00	101.687.568,00	38,57	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	165.548.000,00	63.860.432,00	101.687.568,00	38,57	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>159.795.400,00</b>	<b>147.945.400,00</b>	<b>11.850.000,00</b>	<b>92,58</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	4.445.400,00	4.445.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.01.2.07.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.445.400,00	4.445.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.01.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	155.350.000,00	143.500.000,00	11.850.000,00	92,37	
1.05.1.05.0.0.01.2.07.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	155.350.000,00	143.500.000,00	11.850.000,00	92,37	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>328.665.000,00</b>	<b>238.785.479,00</b>	<b>89.879.521,00</b>	<b>72,65</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	38.615.000,00	38.595.000,00	20.000,00	99,94	
1.05.1.05.0.0.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.615.000,00	38.595.000,00	20.000,00	99,94	
1.05.1.05.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.000.000,00	23.807.675,00	27.192.325,00	46,68	
1.05.1.05.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	23.807.675,00	27.192.325,00	46,68	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	239.050.000,00	176.382.804,00	62.667.196,00	73,78	
1.05.1.05.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	239.050.000,00	176.382.804,00	62.667.196,00	73,78	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.269.775.000,00</b>	<b>1.011.796.907,00</b>	<b>257.978.093,00</b>	<b>79,68</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.056.975.000,00	803.718.114,00	253.256.886,00	76,03	
1.05.1.05.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.056.975.000,00	803.718.114,00	253.256.886,00	76,03	
1.05.1.05.0.0.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	212.800.000,00	208.078.793,00	4.721.207,00	97,78	
1.05.1.05.0.0.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	29.621.000,00	3.179.000,00	90,30	
1.05.1.05.0.0.01.2.09.10.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	178.457.793,00	1.542.207,00	99,14	
<b>1.05.1.05.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.446.528.900,00</b>	<b>2.323.600.000,00</b>	<b>122.928.900,00</b>	<b>94,97</b>	
<b>1.05.1.05.0.0.02.2.01.</b>	<b>PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.686.926.800,00</b>	<b>1.580.102.700,00</b>	<b>106.824.100,00</b>	<b>93,66</b>	
1.05.1.05.0.0.02.2.01.02.	PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	1.112.695.000,00	1.108.927.000,00	3.768.000,00	99,66	
1.05.1.05.0.0.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.112.695.000,00	1.108.927.000,00	3.768.000,00	99,66	
1.05.1.05.0.0.02.2.01.04.	PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61.888.000,00	61.888.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.888.000,00	61.888.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.02.2.01.07.	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	354.920.000,00	354.920.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.02.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	154.920.000,00	154.920.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.02.2.01.07.5.1.05.	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.02.2.01.08.	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57.423.800,00	54.367.700,00	3.056.100,00	94,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.0.02.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.423.800,00	54.367.700,00	3.056.100,00	94,67	
1.05.1.05.0.0.02.2.01.10.	PENYEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERKADA	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
1.05.1.05.0.0.02.2.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
<b>1.05.1.05.0.0.02.2.02.</b>	<b>PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA</b>	<b>748.832.100,00</b>	<b>735.477.300,00</b>	<b>13.354.800,00</b>	<b>98,21</b>	
1.05.1.05.0.0.02.2.02.01.	SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	134.774.100,00	125.367.300,00	9.406.800,00	93,02	
1.05.1.05.0.0.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	134.774.100,00	125.367.300,00	9.406.800,00	93,02	
1.05.1.05.0.0.02.2.02.02.	PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	28.998.000,00	27.550.000,00	1.448.000,00	95,00	
1.05.1.05.0.0.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.998.000,00	27.550.000,00	1.448.000,00	95,00	
1.05.1.05.0.0.02.2.02.03.	PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	585.060.000,00	582.560.000,00	2.500.000,00	99,57	
1.05.1.05.0.0.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	585.060.000,00	582.560.000,00	2.500.000,00	99,57	
<b>1.05.1.05.0.0.02.2.03.</b>	<b>PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.770.000,00</b>	<b>8.020.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>74,46</b>	
1.05.1.05.0.0.02.2.03.01.	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS	10.770.000,00	8.020.000,00	2.750.000,00	74,46	
1.05.1.05.0.0.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.770.000,00	8.020.000,00	2.750.000,00	74,46	
<b>1.05.1.05.0.0.04.</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>1.964.057.600,00</b>	<b>1.935.403.600,00</b>	<b>28.654.000,00</b>	<b>98,54</b>	
<b>1.05.1.05.0.0.04.2.01.</b>	<b>PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.586.250.600,00</b>	<b>1.558.213.600,00</b>	<b>28.037.000,00</b>	<b>98,23</b>	
1.05.1.05.0.0.04.2.01.01.	PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	980.580.000,00	969.675.000,00	10.905.000,00	98,88	
1.05.1.05.0.0.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	980.580.000,00	969.675.000,00	10.905.000,00	98,88	
1.05.1.05.0.0.04.2.01.02.	PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	596.148.600,00	579.538.600,00	16.610.000,00	97,21	
1.05.1.05.0.0.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	220.805.600,00	218.885.600,00	1.920.000,00	99,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.0.04.2.01.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.343.000,00	360.653.000,00	14.690.000,00	96,08	
1.05.1.05.0.0.04.2.01.03.	PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	9.522.000,00	9.000.000,00	522.000,00	94,51	
1.05.1.05.0.0.04.2.01.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.522.000,00	9.000.000,00	522.000,00	94,51	
<b>1.05.1.05.0.0.04.2.02.</b>	<b>INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN</b>	<b>331.605.000,00</b>	<b>331.055.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>99,83</b>	
1.05.1.05.0.0.04.2.02.01.	PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN	310.005.000,00	309.455.000,00	550.000,00	99,82	
1.05.1.05.0.0.04.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	310.005.000,00	309.455.000,00	550.000,00	99,82	
1.05.1.05.0.0.04.2.02.02.	PENILAIAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.04.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	-	100,00	
<b>1.05.1.05.0.0.04.2.04.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN</b>	<b>46.202.000,00</b>	<b>46.135.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>99,85</b>	
1.05.1.05.0.0.04.2.04.01.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT	46.202.000,00	46.135.000,00	67.000,00	99,85	
1.05.1.05.0.0.04.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.445.000,00	32.445.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.04.2.04.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.757.000,00	13.690.000,00	67.000,00	99,51	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>22.336.672.545,01</b>	<b>20.973.725.004,00</b>	<b>1.362.947.541,01</b>	<b>93,89</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(22.272.097.045,01)</b>	<b>(20.868.817.504,00)</b>	<b>(1.322.615.541,01)</b>	<b>93,69</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(22.272.097.045,01)</b>	<b>(20.868.817.504,00)</b>	<b>-</b>	<b>93,69</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.468.557.860,00</b>	<b>6.877.016.790,00</b>	<b>591.541.070,00</b>	<b>92,07</b>	
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.870.175.160,00</b>	<b>6.290.499.340,00</b>	<b>579.675.820,00</b>	<b>91,56</b>	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.943.542.060,00	2.573.133.397,00	370.408.663,00	87,41	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.882.834.300,00	3.675.825.943,00	207.008.357,00	94,66	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.00.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	43.798.800,00	41.540.000,00	2.258.800,00	94,84	
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>598.382.700,00</b>	<b>586.517.450,00</b>	<b>11.865.250,00</b>	<b>98,01</b>	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	528.382.700,00	516.691.450,00	11.691.250,00	97,78	
1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.00.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.000.000,00	69.826.000,00	174.000,00	99,75	
<b>1.05.1.05.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.708.763.660,00</b>	<b>4.242.308.990,00</b>	<b>466.454.670,00</b>	<b>90,09</b>	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>41.856.800,00</b>	<b>41.766.800,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>99,78</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	17.666.400,00	17.666.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.666.400,00	17.666.400,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.190.400,00	24.100.400,00	90.000,00	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.190.400,00	24.100.400,00	90.000,00	99,62	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>3.020.811.860,00</b>	<b>2.645.678.197,00</b>	<b>375.133.663,00</b>	<b>87,58</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.943.542.060,00	2.573.133.397,00	370.408.663,00	87,41	
1.05.1.05.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.943.542.060,00	2.573.133.397,00	370.408.663,00	87,41	
1.05.1.05.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	77.269.800,00	72.544.800,00	4.725.000,00	93,88	
1.05.1.05.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.269.800,00	72.544.800,00	4.725.000,00	93,88	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.03.</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>44.300.000,00</b>	<b>36.923.200,00</b>	<b>7.376.800,00</b>	<b>83,34</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	44.300.000,00	36.923.200,00	7.376.800,00	83,34	
1.05.1.05.0.0.01.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.300.000,00	36.923.200,00	7.376.800,00	83,34	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>255.634.600,00</b>	<b>242.689.400,00</b>	<b>12.945.200,00</b>	<b>94,93</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	84.193.200,00	82.796.000,00	1.397.200,00	98,34	
1.05.1.05.0.0.01.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.193.200,00	82.796.000,00	1.397.200,00	98,34	
1.05.1.05.0.0.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	171.441.400,00	159.893.400,00	11.548.000,00	93,26	
1.05.1.05.0.0.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	171.441.400,00	159.893.400,00	11.548.000,00	93,26	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>397.763.700,00</b>	<b>383.346.050,00</b>	<b>14.417.650,00</b>	<b>96,37</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	119.137.500,00	118.363.850,00	773.650,00	99,35	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.757.600,00	87.742.100,00	15.500,00	99,98	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.379.900,00	30.621.750,00	758.150,00	97,58	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	57.833.200,00	57.297.700,00	535.500,00	99,07	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.833.200,00	57.297.700,00	535.500,00	99,07	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	46.069.000,00	45.909.000,00	160.000,00	99,65	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.069.000,00	45.909.000,00	160.000,00	99,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	174.724.000,00	161.775.500,00	12.948.500,00	92,58	
1.05.1.05.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	174.724.000,00	161.775.500,00	12.948.500,00	92,58	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>431.177.000,00</b>	<b>418.074.000,00</b>	<b>13.103.000,00</b>	<b>96,96</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	431.177.000,00	418.074.000,00	13.103.000,00	96,96	
1.05.1.05.0.0.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	272.016.000,00	266.808.000,00	5.208.000,00	98,08	
1.05.1.05.0.0.01.2.07.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.161.000,00	81.440.000,00	7.721.000,00	91,34	
1.05.1.05.0.0.01.2.07.10.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.000.000,00	69.826.000,00	174.000,00	99,75	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>159.692.400,00</b>	<b>138.120.666,00</b>	<b>21.571.734,00</b>	<b>86,49</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.000.000,00	30.398.266,00	17.601.734,00	63,32	
1.05.1.05.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	30.398.266,00	17.601.734,00	63,32	
1.05.1.05.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	111.692.400,00	107.722.400,00	3.970.000,00	96,44	
1.05.1.05.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.692.400,00	107.722.400,00	3.970.000,00	96,44	
<b>1.05.1.05.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>357.527.300,00</b>	<b>335.710.677,00</b>	<b>21.816.623,00</b>	<b>93,89</b>	
1.05.1.05.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	215.370.000,00	194.413.377,00	20.956.623,00	90,26	
1.05.1.05.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	215.370.000,00	194.413.377,00	20.956.623,00	90,26	
1.05.1.05.0.0.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	142.157.300,00	141.297.300,00	860.000,00	99,39	
1.05.1.05.0.0.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.157.300,00	102.297.300,00	860.000,00	99,16	
1.05.1.05.0.0.01.2.09.09.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000,00	39.000.000,00	-	100,00	
<b>1.05.1.05.0.0.03.</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>2.759.794.200,00</b>	<b>2.634.707.800,00</b>	<b>125.086.400,00</b>	<b>95,46</b>	
<b>1.05.1.05.0.0.03.2.01.</b>	<b>PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA</b>	<b>776.119.000,00</b>	<b>693.072.000,00</b>	<b>83.047.000,00</b>	<b>89,29</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.0.03.2.01.02.	SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS BENCANA)	776.119.000,00	693.072.000,00	83.047.000,00	89,29	
1.05.1.05.0.0.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	711.328.000,00	632.032.000,00	79.296.000,00	88,85	
1.05.1.05.0.0.03.2.01.02.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	43.798.800,00	41.540.000,00	2.258.800,00	94,84	
1.05.1.05.0.0.03.2.01.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.992.200,00	19.500.000,00	1.492.200,00	92,89	
<b>1.05.1.05.0.0.03.2.02.</b>	<b>PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>1.006.756.300,00</b>	<b>982.293.800,00</b>	<b>24.462.500,00</b>	<b>97,57</b>	
1.05.1.05.0.0.03.2.02.04.	PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	421.441.000,00	420.050.200,00	1.390.800,00	99,66	
1.05.1.05.0.0.03.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.723.900,00	89.670.500,00	53.400,00	99,94	
1.05.1.05.0.0.03.2.02.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.717.100,00	330.379.700,00	1.337.400,00	99,59	
1.05.1.05.0.0.03.2.02.05.	PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA	192.176.800,00	187.938.800,00	4.238.000,00	97,79	
1.05.1.05.0.0.03.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.176.800,00	187.938.800,00	4.238.000,00	97,79	
1.05.1.05.0.0.03.2.02.06.	PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	233.576.000,00	217.781.000,00	15.795.000,00	93,23	
1.05.1.05.0.0.03.2.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	233.576.000,00	217.781.000,00	15.795.000,00	93,23	
1.05.1.05.0.0.03.2.02.07.	PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	118.532.500,00	117.603.800,00	928.700,00	99,21	
1.05.1.05.0.0.03.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	102.400.000,00	101.853.800,00	546.200,00	99,46	
1.05.1.05.0.0.03.2.02.07.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.132.500,00	15.750.000,00	382.500,00	97,62	
1.05.1.05.0.0.03.2.02.08.	PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA	41.030.000,00	38.920.000,00	2.110.000,00	94,85	
1.05.1.05.0.0.03.2.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.030.000,00	38.920.000,00	2.110.000,00	94,85	
<b>1.05.1.05.0.0.03.2.03.</b>	<b>PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA</b>	<b>976.918.900,00</b>	<b>959.342.000,00</b>	<b>17.576.900,00</b>	<b>98,20</b>	
1.05.1.05.0.0.03.2.03.04.	PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	976.918.900,00	959.342.000,00	17.576.900,00	98,20	
1.05.1.05.0.0.03.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	976.918.900,00	959.342.000,00	17.576.900,00	98,20	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.468.557.860,00</b>	<b>6.877.016.790,00</b>	<b>591.541.070,00</b>	<b>92,07</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(7.468.557.860,00)</b>	<b>(6.877.016.790,00)</b>	<b>(591.541.070,00)</b>	<b>92,07</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(7.468.557.860,00)</b>	<b>(6.877.016.790,00)</b>	<b>-</b>	<b>92,07</b>	



LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

**ORGANISASI : 1.06.2.14.2.08.06. - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.06.1.06.2.14.2.08.06.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>20.452.931.136,00</b>	<b>16.047.969.197,00</b>	<b>4.404.961.939,00</b>	<b>78,46</b>	
<b>1.06.1.06.2.14.2.08.06.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20.070.251.436,00</b>	<b>15.705.905.047,00</b>	<b>4.364.346.389,00</b>	<b>78,25</b>	
1.06.1.06.2.14.2.08.06.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.207.920.536,00	7.073.918.557,00	134.001.979,00	98,14	
1.06.1.06.2.14.2.08.06.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.562.330.900,00	8.331.986.490,00	4.230.344.410,00	66,32	
1.06.1.06.2.14.2.08.06.00.00.5.1.05.	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
<b>1.06.1.06.2.14.2.08.06.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>382.679.700,00</b>	<b>342.064.150,00</b>	<b>40.615.550,00</b>	<b>89,38</b>	
1.06.1.06.2.14.2.08.06.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	382.679.700,00	342.064.150,00	40.615.550,00	89,38	
<b>1.06.1.06.2.1.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.530.421.636,00</b>	<b>8.181.345.593,00</b>	<b>349.076.043,00</b>	<b>95,90</b>	
<b>1.06.1.06.2.1.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>111.975.000,00</b>	<b>103.632.324,00</b>	<b>8.342.676,00</b>	<b>92,54</b>	
1.06.1.06.2.1.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	9.247.000,00	753.000,00	92,47	
1.06.1.06.2.1.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.247.000,00	753.000,00	92,47	
1.06.1.06.2.1.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	101.975.000,00	94.385.324,00	7.589.676,00	92,55	
1.06.1.06.2.1.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	101.975.000,00	94.385.324,00	7.589.676,00	92,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.06.1.06.2.1.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7.198.480.536,00</b>	<b>7.058.069.681,00</b>	<b>140.410.855,00</b>	<b>98,04</b>	
1.06.1.06.2.1.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.144.080.536,00	7.010.078.557,00	134.001.979,00	98,12	
1.06.1.06.2.1.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.144.080.536,00	7.010.078.557,00	134.001.979,00	98,12	
1.06.1.06.2.1.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	54.400.000,00	47.991.124,00	6.408.876,00	88,21	
1.06.1.06.2.1.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.400.000,00	47.991.124,00	6.408.876,00	88,21	
<b>1.06.1.06.2.1.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>40.950.100,00</b>	<b>36.407.800,00</b>	<b>4.542.300,00</b>	<b>88,90</b>	
1.06.1.06.2.1.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40.950.100,00	36.407.800,00	4.542.300,00	88,90	
1.06.1.06.2.1.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.950.100,00	36.407.800,00	4.542.300,00	88,90	
<b>1.06.1.06.2.1.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>525.461.700,00</b>	<b>472.528.814,00</b>	<b>52.932.886,00</b>	<b>89,92</b>	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.707.400,00	3.791.500,00	1.915.900,00	66,43	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.707.400,00	3.791.500,00	1.915.900,00	66,43	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	241.093.200,00	199.310.850,00	41.782.350,00	82,66	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.560.000,00	40.972.700,00	22.587.300,00	64,46	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.533.200,00	158.338.150,00	19.195.050,00	89,18	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	53.695.200,00	49.902.400,00	3.792.800,00	92,93	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.695.200,00	49.902.400,00	3.792.800,00	92,93	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.533.900,00	25.945.000,00	1.588.900,00	94,22	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.533.900,00	25.945.000,00	1.588.900,00	94,22	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	192.932.000,00	189.079.064,00	3.852.936,00	98,00	
1.06.1.06.2.1.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.932.000,00	189.079.064,00	3.852.936,00	98,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.06.1.06.2.1.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>169.675.000,00</b>	<b>140.500.000,00</b>	<b>29.175.000,00</b>	<b>82,80</b>	
1.06.1.06.2.1.01.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	169.675.000,00	140.500.000,00	29.175.000,00	82,80	
1.06.1.06.2.1.01.2.07.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	169.675.000,00	140.500.000,00	29.175.000,00	82,80	
<b>1.06.1.06.2.1.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>197.903.500,00</b>	<b>175.179.650,00</b>	<b>22.723.850,00</b>	<b>88,51</b>	
1.06.1.06.2.1.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.065.000,00	11.497.008,00	6.567.992,00	63,64	
1.06.1.06.2.1.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.065.000,00	11.497.008,00	6.567.992,00	63,64	
1.06.1.06.2.1.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.840.000,00	38.340.000,00	500.000,00	98,71	
1.06.1.06.2.1.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.840.000,00	38.340.000,00	500.000,00	98,71	
1.06.1.06.2.1.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	140.998.500,00	125.342.642,00	15.655.858,00	88,89	
1.06.1.06.2.1.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.998.500,00	125.342.642,00	15.655.858,00	88,89	
<b>1.06.1.06.2.1.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>285.975.800,00</b>	<b>195.027.324,00</b>	<b>90.948.476,00</b>	<b>68,19</b>	
1.06.1.06.2.1.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	285.975.800,00	195.027.324,00	90.948.476,00	68,19	
1.06.1.06.2.1.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	285.975.800,00	195.027.324,00	90.948.476,00	68,19	
<b>1.06.1.06.2.1.02.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>1.569.930.800,00</b>	<b>1.492.192.411,00</b>	<b>77.738.389,00</b>	<b>95,04</b>	
<b>1.06.1.06.2.1.02.2.03.</b>	<b>PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.569.930.800,00</b>	<b>1.492.192.411,00</b>	<b>77.738.389,00</b>	<b>95,04</b>	
1.06.1.06.2.1.02.2.03.01.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	830.030.400,00	815.666.086,00	14.364.314,00	98,26	
1.06.1.06.2.1.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	792.938.400,00	779.366.086,00	13.572.314,00	98,28	
1.06.1.06.2.1.02.2.03.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.092.000,00	36.300.000,00	792.000,00	97,86	
1.06.1.06.2.1.02.2.03.02.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	151.560.000,00	140.141.124,00	11.418.876,00	92,46	
1.06.1.06.2.1.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	151.560.000,00	140.141.124,00	11.418.876,00	92,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.2.1.02.2.03.04.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	435.190.400,00	395.009.400,00	40.181.000,00	90,76	
1.06.1.06.2.1.02.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	135.190.400,00	95.009.400,00	40.181.000,00	70,27	
1.06.1.06.2.1.02.2.03.04.5.1.05.	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.2.1.02.2.03.05.	PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	153.150.000,00	141.375.801,00	11.774.199,00	92,31	
1.06.1.06.2.1.02.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	153.150.000,00	141.375.801,00	11.774.199,00	92,31	
<b>1.06.1.06.2.1.04.</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.321.026.900,00</b>	<b>1.210.856.314,00</b>	<b>110.170.586,00</b>	<b>91,66</b>	
<b>1.06.1.06.2.1.04.2.01.</b>	<b>REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL</b>	<b>1.321.026.900,00</b>	<b>1.210.856.314,00</b>	<b>110.170.586,00</b>	<b>91,66</b>	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.01.	PENYEDIAAN PERMAKAMAN	46.150.000,00	40.300.000,00	5.850.000,00	87,32	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.150.000,00	40.300.000,00	5.850.000,00	87,32	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.02.	PENYEDIAAN SANDANG	102.000.000,00	98.498.750,00	3.501.250,00	96,56	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	98.498.750,00	3.501.250,00	96,56	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.03.	PENYEDIAAN ALAT BANTU	208.545.000,00	189.675.000,00	18.870.000,00	90,95	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	208.545.000,00	189.675.000,00	18.870.000,00	90,95	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.04.	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	7.750.000,00	6.400.000,00	1.350.000,00	82,58	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	6.400.000,00	1.350.000,00	82,58	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.05.	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	445.217.000,00	417.412.864,00	27.804.136,00	93,75	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	445.217.000,00	417.412.864,00	27.804.136,00	93,75	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.06.	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	175.000.000,00	170.625.000,00	4.375.000,00	97,50	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	170.625.000,00	4.375.000,00	97,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.2.1.04.2.01.07.	FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK	9.625.000,00	2.975.000,00	6.650.000,00	30,90	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	2.975.000,00	6.650.000,00	30,90	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.09.	PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	67.347.900,00	66.252.700,00	1.095.200,00	98,37	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.402.900,00	14.450.700,00	952.200,00	93,81	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.09.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.945.000,00	51.802.000,00	143.000,00	99,72	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.10.	PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	220.192.000,00	179.517.000,00	40.675.000,00	81,52	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	220.192.000,00	179.517.000,00	40.675.000,00	81,52	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.11.	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.12.	PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.2.1.04.2.01.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	-	100,00	
<b>1.06.1.06.2.1.05.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>3.011.922.000,00</b>	<b>605.220.365,00</b>	<b>2.406.701.635,00</b>	<b>20,09</b>	
<b>1.06.1.06.2.1.05.2.02.</b>	<b>PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.011.922.000,00</b>	<b>605.220.365,00</b>	<b>2.406.701.635,00</b>	<b>20,09</b>	
1.06.1.06.2.1.05.2.02.01.	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	278.320.000,00	189.997.365,00	88.322.635,00	68,26	
1.06.1.06.2.1.05.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	278.320.000,00	189.997.365,00	88.322.635,00	68,26	
1.06.1.06.2.1.05.2.02.02.	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	433.782.200,00	415.223.000,00	18.559.200,00	95,72	
1.06.1.06.2.1.05.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	433.782.200,00	415.223.000,00	18.559.200,00	95,72	
1.06.1.06.2.1.05.2.02.03.	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	2.299.819.800,00	-	2.299.819.800,00	-	
1.06.1.06.2.1.05.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.299.819.800,00	-	2.299.819.800,00	-	
<b>1.06.1.06.2.1.06.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>770.126.300,00</b>	<b>557.433.644,00</b>	<b>212.692.656,00</b>	<b>72,38</b>	
<b>1.06.1.06.2.1.06.2.01.</b>	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA</b>	<b>301.686.300,00</b>	<b>104.976.900,00</b>	<b>196.709.400,00</b>	<b>34,79</b>	
1.06.1.06.2.1.06.2.01.01.	PENYEDIAAN MAKANAN	140.000.000,00	-	140.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.2.1.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	-	140.000.000,00	-	
1.06.1.06.2.1.06.2.01.02.	PENYEDIAAN SANDANG	57.000.000,00	56.600.000,00	400.000,00	99,29	
1.06.1.06.2.1.06.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	56.600.000,00	400.000,00	99,29	
1.06.1.06.2.1.06.2.01.03.	PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGS	49.946.300,00	48.376.900,00	1.569.400,00	96,85	
1.06.1.06.2.1.06.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.946.300,00	4.899.400,00	46.900,00	99,05	
1.06.1.06.2.1.06.2.01.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	43.477.500,00	1.522.500,00	96,61	
1.06.1.06.2.1.06.2.01.05.	PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	54.740.000,00	-	54.740.000,00	-	
1.06.1.06.2.1.06.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.740.000,00	-	54.740.000,00	-	
<b>1.06.1.06.2.1.06.2.02.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA</b>	<b>468.440.000,00</b>	<b>452.456.744,00</b>	<b>15.983.256,00</b>	<b>96,58</b>	
1.06.1.06.2.1.06.2.02.02.	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	468.440.000,00	452.456.744,00	15.983.256,00	96,58	
1.06.1.06.2.1.06.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	468.440.000,00	452.456.744,00	15.983.256,00	96,58	
<b>2.08.1.06.2.1.02.</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>662.841.200,00</b>	<b>594.339.300,00</b>	<b>68.501.900,00</b>	<b>89,66</b>	
<b>2.08.1.06.2.1.02.2.01.</b>	<b>PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>114.683.700,00</b>	<b>87.206.600,00</b>	<b>27.477.100,00</b>	<b>76,04</b>	
2.08.1.06.2.1.02.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	114.683.700,00	87.206.600,00	27.477.100,00	76,04	
2.08.1.06.2.1.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	114.683.700,00	87.206.600,00	27.477.100,00	76,04	
<b>2.08.1.06.2.1.02.2.02.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>444.258.200,00</b>	<b>423.564.600,00</b>	<b>20.693.600,00</b>	<b>95,34</b>	
2.08.1.06.2.1.02.2.02.01.	SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	444.258.200,00	423.564.600,00	20.693.600,00	95,34	
2.08.1.06.2.1.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	444.258.200,00	423.564.600,00	20.693.600,00	95,34	
<b>2.08.1.06.2.1.02.2.03.</b>	<b>PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>103.899.300,00</b>	<b>83.568.100,00</b>	<b>20.331.200,00</b>	<b>80,43</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.08.1.06.2.1.02.2.03.03.	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	103.899.300,00	83.568.100,00	20.331.200,00	80,43	
2.08.1.06.2.1.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.899.300,00	83.568.100,00	20.331.200,00	80,43	
<b>2.08.1.06.2.1.03.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>134.864.900,00</b>	<b>123.492.670,00</b>	<b>11.372.230,00</b>	<b>91,56</b>	
<b>2.08.1.06.2.1.03.2.02.</b>	<b>PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>134.864.900,00</b>	<b>123.492.670,00</b>	<b>11.372.230,00</b>	<b>91,56</b>	
2.08.1.06.2.1.03.2.02.01.	PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	134.864.900,00	123.492.670,00	11.372.230,00	91,56	
2.08.1.06.2.1.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.793.900,00	101.742.670,00	11.051.230,00	90,20	
2.08.1.06.2.1.03.2.02.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.071.000,00	21.750.000,00	321.000,00	98,54	
<b>2.08.1.06.2.1.04.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>202.075.900,00</b>	<b>136.310.000,00</b>	<b>65.765.900,00</b>	<b>67,45</b>	
<b>2.08.1.06.2.1.04.2.01.</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>152.800.700,00</b>	<b>126.640.000,00</b>	<b>26.160.700,00</b>	<b>82,87</b>	
2.08.1.06.2.1.04.2.01.03.	PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	152.800.700,00	126.640.000,00	26.160.700,00	82,87	
2.08.1.06.2.1.04.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	152.800.700,00	126.640.000,00	26.160.700,00	82,87	
<b>2.08.1.06.2.1.04.2.02.</b>	<b>PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>49.275.200,00</b>	<b>9.670.000,00</b>	<b>39.605.200,00</b>	<b>19,62</b>	
2.08.1.06.2.1.04.2.02.03.	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.275.200,00	9.670.000,00	39.605.200,00	19,62	
2.08.1.06.2.1.04.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.275.200,00	9.670.000,00	39.605.200,00	19,62	
<b>2.08.1.06.2.1.05.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>58.475.000,00</b>	<b>56.292.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>96,26</b>	
<b>2.08.1.06.2.1.05.2.01.</b>	<b>PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>58.475.000,00</b>	<b>56.292.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>96,26</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.08.1.06.2.1.05.2.01.01.	PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	58.475.000,00	56.292.000,00	2.183.000,00	96,26	
2.08.1.06.2.1.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.475.000,00	56.292.000,00	2.183.000,00	96,26	
<b>2.08.1.06.2.1.06.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>222.756.100,00</b>	<b>189.324.700,00</b>	<b>33.431.400,00</b>	<b>84,99</b>	
<b>2.08.1.06.2.1.06.2.01.</b>	<b>PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>222.756.100,00</b>	<b>189.324.700,00</b>	<b>33.431.400,00</b>	<b>84,99</b>	
2.08.1.06.2.1.06.2.01.01.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	100.719.500,00	91.440.300,00	9.279.200,00	90,78	
2.08.1.06.2.1.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.719.500,00	91.440.300,00	9.279.200,00	90,78	
2.08.1.06.2.1.06.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	122.036.600,00	97.884.400,00	24.152.200,00	80,20	
2.08.1.06.2.1.06.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.640.100,00	67.487.900,00	24.152.200,00	73,64	
2.08.1.06.2.1.06.2.01.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.396.500,00	30.396.500,00	-	100,00	
<b>2.14.1.06.2.1.02.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>220.805.400,00</b>	<b>216.732.800,00</b>	<b>4.072.600,00</b>	<b>98,15</b>	
<b>2.14.1.06.2.1.02.2.01.</b>	<b>PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK</b>	<b>72.403.900,00</b>	<b>71.831.300,00</b>	<b>572.600,00</b>	<b>99,20</b>	
2.14.1.06.2.1.02.2.01.09.	ADVOKASI, SOSIALISASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL DI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI DAN SLTP/MTS, JALUR NONFORMAL DAN INFORMAL	72.403.900,00	71.831.300,00	572.600,00	99,20	
2.14.1.06.2.1.02.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.403.900,00	71.831.300,00	572.600,00	99,20	
<b>2.14.1.06.2.1.02.2.02.</b>	<b>PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>148.401.500,00</b>	<b>144.901.500,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>97,64</b>	
2.14.1.06.2.1.02.2.02.11.	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA	148.401.500,00	144.901.500,00	3.500.000,00	97,64	
2.14.1.06.2.1.02.2.02.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	148.401.500,00	144.901.500,00	3.500.000,00	97,64	
<b>2.14.1.06.2.1.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>3.333.259.700,00</b>	<b>2.275.830.400,00</b>	<b>1.057.429.300,00</b>	<b>68,27</b>	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.14.1.06.2.1.03.2.01.</b>	<b>PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL</b>	<b>327.751.400,00</b>	<b>326.350.400,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>99,57</b>	
2.14.1.06.2.1.03.2.01.02.	KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAM KKBPK SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	72.991.400,00	72.600.200,00	391.200,00	99,46	
2.14.1.06.2.1.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.991.400,00	72.600.200,00	391.200,00	99,46	
2.14.1.06.2.1.03.2.01.04.	PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	254.760.000,00	253.750.200,00	1.009.800,00	99,60	
2.14.1.06.2.1.03.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	254.760.000,00	253.750.200,00	1.009.800,00	99,60	
<b>2.14.1.06.2.1.03.2.02.</b>	<b>PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)</b>	<b>816.832.000,00</b>	<b>816.832.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
2.14.1.06.2.1.03.2.02.04.	PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	816.832.000,00	816.832.000,00	-	100,00	
2.14.1.06.2.1.03.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	816.832.000,00	816.832.000,00	-	100,00	
<b>2.14.1.06.2.1.03.2.03.</b>	<b>PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.188.676.300,00</b>	<b>1.132.648.000,00</b>	<b>1.056.028.300,00</b>	<b>51,75</b>	
2.14.1.06.2.1.03.2.03.06.	PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB	2.088.660.800,00	1.039.723.000,00	1.048.937.800,00	49,77	
2.14.1.06.2.1.03.2.03.06.5.1.01.	Belanja Pegawai	63.840.000,00	63.840.000,00	-	100,00	
2.14.1.06.2.1.03.2.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.006.178.800,00	975.883.000,00	1.030.295.800,00	48,64	
2.14.1.06.2.1.03.2.03.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.642.000,00	-	18.642.000,00	-	
2.14.1.06.2.1.03.2.03.11.	DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK	100.015.500,00	92.925.000,00	7.090.500,00	92,91	
2.14.1.06.2.1.03.2.03.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.015.500,00	92.925.000,00	7.090.500,00	92,91	
<b>2.14.1.06.2.1.04.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>414.425.300,00</b>	<b>408.599.000,00</b>	<b>5.826.300,00</b>	<b>98,59</b>	
<b>2.14.1.06.2.1.04.2.01.</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	<b>157.928.900,00</b>	<b>156.937.000,00</b>	<b>991.900,00</b>	<b>99,37</b>	
2.14.1.06.2.1.04.2.01.07.	PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	112.812.200,00	112.812.200,00	-	100,00	
2.14.1.06.2.1.04.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.812.200,00	112.812.200,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.14.1.06.2.1.04.2.01.08.	PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA).	45.116.700,00	44.124.800,00	991.900,00	97,80	
2.14.1.06.2.1.04.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.116.700,00	44.124.800,00	991.900,00	97,80	
<b>2.14.1.06.2.1.04.2.02.</b>	<b>PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	<b>256.496.400,00</b>	<b>251.662.000,00</b>	<b>4.834.400,00</b>	<b>98,11</b>	
2.14.1.06.2.1.04.2.02.04.	PROMOSI DAN SOSIALISASI PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BAGI MITRA KERJA	256.496.400,00	251.662.000,00	4.834.400,00	98,11	
2.14.1.06.2.1.04.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	256.496.400,00	251.662.000,00	4.834.400,00	98,11	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>20.452.931.136,00</b>	<b>16.047.969.197,00</b>	<b>4.404.961.939,00</b>	<b>78,46</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(20.452.931.136,00)</b>	<b>(16.047.969.197,00)</b>	<b>(4.404.961.939,00)</b>	<b>78,46</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(20.452.931.136,00)</b>	<b>(16.047.969.197,00)</b>	<b>-</b>	<b>78,46</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**

**ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.01. - Dinas Tenaga Kerja**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>583.770.000,00</b>	<b>(166.230.000,00)</b>	<b>77,83</b>	
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>583.770.000,00</b>	<b>(166.230.000,00)</b>	<b>77,83</b>	
2.07.2.07.3.32.0.00.01.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	750.000.000,00	583.770.000,00	(166.230.000,00)	77,83	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>583.770.000,00</b>	<b>(166.230.000,00)</b>	<b>77,83</b>	
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.437.761.051,00</b>	<b>8.993.432.354,00</b>	<b>444.328.697,00</b>	<b>95,29</b>	
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.226.637.953,00</b>	<b>8.786.006.156,00</b>	<b>440.631.797,00</b>	<b>95,22</b>	
2.07.2.07.3.32.0.00.01.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.490.628.753,00	4.462.877.073,00	27.751.680,00	99,38	
2.07.2.07.3.32.0.00.01.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.736.009.200,00	4.323.129.083,00	412.880.117,00	91,28	
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>211.123.098,00</b>	<b>207.426.198,00</b>	<b>3.696.900,00</b>	<b>98,24</b>	
2.07.2.07.3.32.0.00.01.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.121.900,00	165.425.000,00	3.696.900,00	97,81	
2.07.2.07.3.32.0.00.01.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.001.198,00	42.001.198,00	-	100,00	
<b>2.07.2.07.3.3.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.891.605.251,00</b>	<b>5.697.133.119,00</b>	<b>194.472.132,00</b>	<b>96,69</b>	
<b>2.07.2.07.3.3.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>131.848.100,00</b>	<b>94.612.874,00</b>	<b>37.235.226,00</b>	<b>71,75</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.3.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	30.714.700,00	14.759.000,00	15.955.700,00	48,05	
2.07.2.07.3.3.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.714.700,00	14.759.000,00	15.955.700,00	48,05	
2.07.2.07.3.3.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	6.043.700,00	5.465.250,00	578.450,00	90,42	
2.07.2.07.3.3.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.043.700,00	5.465.250,00	578.450,00	90,42	
2.07.2.07.3.3.01.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	6.462.000,00	5.879.500,00	582.500,00	90,98	
2.07.2.07.3.3.01.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.462.000,00	5.879.500,00	582.500,00	90,98	
2.07.2.07.3.3.01.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.394.900,00	2.890.500,00	504.400,00	85,14	
2.07.2.07.3.3.01.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.394.900,00	2.890.500,00	504.400,00	85,14	
2.07.2.07.3.3.01.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	3.404.000,00	2.895.500,00	508.500,00	85,06	
2.07.2.07.3.3.01.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.404.000,00	2.895.500,00	508.500,00	85,06	
2.07.2.07.3.3.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	81.828.800,00	62.723.124,00	19.105.676,00	76,65	
2.07.2.07.3.3.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.828.800,00	62.723.124,00	19.105.676,00	76,65	
<b>2.07.2.07.3.3.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>4.545.016.253,00</b>	<b>4.513.097.947,00</b>	<b>31.918.306,00</b>	<b>99,29</b>	
2.07.2.07.3.3.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.490.628.583,00	4.462.877.073,00	27.751.510,00	99,38	
2.07.2.07.3.3.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.490.628.583,00	4.462.877.073,00	27.751.510,00	99,38	
2.07.2.07.3.3.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.768.400,00	4.357.250,00	411.150,00	91,37	
2.07.2.07.3.3.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.768.400,00	4.357.250,00	411.150,00	91,37	
2.07.2.07.3.3.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	49.619.270,00	45.863.624,00	3.755.646,00	92,43	
2.07.2.07.3.3.01.2.02.07.5.1.01.	Belanja Pegawai	170,00	-	170,00	-	
2.07.2.07.3.3.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.619.100,00	45.863.624,00	3.755.476,00	92,43	
<b>2.07.2.07.3.3.01.2.03.</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>8.111.650,00</b>	<b>238.350,00</b>	<b>97,14</b>	
2.07.2.07.3.3.01.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	8.350.000,00	8.111.650,00	238.350,00	97,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.3.01.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	8.111.650,00	238.350,00	97,14	
<b>2.07.2.07.3.3.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>36.539.900,00</b>	<b>32.517.500,00</b>	<b>4.022.400,00</b>	<b>88,99</b>	
2.07.2.07.3.3.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	36.539.900,00	32.517.500,00	4.022.400,00	88,99	
2.07.2.07.3.3.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.539.900,00	32.517.500,00	4.022.400,00	88,99	
<b>2.07.2.07.3.3.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>302.802.800,00</b>	<b>285.282.500,00</b>	<b>17.520.300,00</b>	<b>94,21</b>	
2.07.2.07.3.3.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.772.500,00	7.461.000,00	1.311.500,00	85,04	
2.07.2.07.3.3.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.772.500,00	7.461.000,00	1.311.500,00	85,04	
2.07.2.07.3.3.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	71.800.500,00	66.903.500,00	4.897.000,00	93,17	
2.07.2.07.3.3.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.800.500,00	66.903.500,00	4.897.000,00	93,17	
2.07.2.07.3.3.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.448.800,00	14.649.000,00	799.800,00	94,82	
2.07.2.07.3.3.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.448.800,00	14.649.000,00	799.800,00	94,82	
2.07.2.07.3.3.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	15.477.000,00	8.523.000,00	64,48	
2.07.2.07.3.3.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	15.477.000,00	8.523.000,00	64,48	
2.07.2.07.3.3.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	12.350.000,00	12.225.000,00	125.000,00	98,98	
2.07.2.07.3.3.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	12.225.000,00	125.000,00	98,98	
2.07.2.07.3.3.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	170.431.000,00	168.567.000,00	1.864.000,00	98,90	
2.07.2.07.3.3.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	170.431.000,00	168.567.000,00	1.864.000,00	98,90	
<b>2.07.2.07.3.3.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>320.095.000,00</b>	<b>276.806.124,00</b>	<b>43.288.876,00</b>	<b>86,47</b>	
2.07.2.07.3.3.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	20.000.000,00	18.500.000,00	1.500.000,00	92,50	
2.07.2.07.3.3.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	18.500.000,00	1.500.000,00	92,50	
2.07.2.07.3.3.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	300.095.000,00	258.306.124,00	41.788.876,00	86,07	
2.07.2.07.3.3.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.095.000,00	258.306.124,00	41.788.876,00	86,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.07.2.07.3.3.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>300.252.000,00</b>	<b>267.528.354,00</b>	<b>32.723.646,00</b>	<b>89,10</b>	
2.07.2.07.3.3.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.400.000,00	3.757.830,00	4.642.170,00	44,73	
2.07.2.07.3.3.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	3.757.830,00	4.642.170,00	44,73	
2.07.2.07.3.3.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	242.913.300,00	217.869.500,00	25.043.800,00	89,69	
2.07.2.07.3.3.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.791.400,00	70.944.500,00	22.846.900,00	75,64	
2.07.2.07.3.3.01.2.08.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.121.900,00	146.925.000,00	2.196.900,00	98,52	
2.07.2.07.3.3.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	48.938.700,00	45.901.024,00	3.037.676,00	93,79	
2.07.2.07.3.3.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.938.700,00	45.901.024,00	3.037.676,00	93,79	
<b>2.07.2.07.3.3.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>246.701.198,00</b>	<b>219.176.170,00</b>	<b>27.525.028,00</b>	<b>88,84</b>	
2.07.2.07.3.3.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	121.700.000,00	98.697.724,00	23.002.276,00	81,09	
2.07.2.07.3.3.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.700.000,00	98.697.724,00	23.002.276,00	81,09	
2.07.2.07.3.3.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	125.001.198,00	120.478.446,00	4.522.752,00	96,38	
2.07.2.07.3.3.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.000.000,00	78.477.248,00	4.522.752,00	94,55	
2.07.2.07.3.3.01.2.09.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.001.198,00	42.001.198,00	-	100,00	
<b>2.07.2.07.3.3.03.</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.259.910.400,00</b>	<b>1.211.798.148,00</b>	<b>48.112.252,00</b>	<b>96,18</b>	
<b>2.07.2.07.3.3.03.2.01.</b>	<b>PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI</b>	<b>933.224.800,00</b>	<b>894.909.548,00</b>	<b>38.315.252,00</b>	<b>95,89</b>	
2.07.2.07.3.3.03.2.01.01.	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	933.224.800,00	894.909.548,00	38.315.252,00	95,89	
2.07.2.07.3.3.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	933.224.800,00	894.909.548,00	38.315.252,00	95,89	
<b>2.07.2.07.3.3.03.2.02.</b>	<b>PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA</b>	<b>23.231.800,00</b>	<b>15.004.900,00</b>	<b>8.226.900,00</b>	<b>64,58</b>	
2.07.2.07.3.3.03.2.02.01.	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	23.231.800,00	15.004.900,00	8.226.900,00	64,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.3.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.231.800,00	15.004.900,00	8.226.900,00	64,58	
<b>2.07.2.07.3.3.03.2.05.</b>	<b>PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>303.453.800,00</b>	<b>301.883.700,00</b>	<b>1.570.100,00</b>	<b>99,48</b>	
2.07.2.07.3.3.03.2.05.01.	PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	303.453.800,00	301.883.700,00	1.570.100,00	99,48	
2.07.2.07.3.3.03.2.05.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	303.453.800,00	301.883.700,00	1.570.100,00	99,48	
<b>2.07.2.07.3.3.04.</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>782.298.400,00</b>	<b>713.146.765,00</b>	<b>69.151.635,00</b>	<b>91,16</b>	
<b>2.07.2.07.3.3.04.2.01.</b>	<b>PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>204.849.200,00</b>	<b>177.180.391,00</b>	<b>27.668.809,00</b>	<b>86,49</b>	
2.07.2.07.3.3.04.2.01.02.	PELAYANAN ANTAR KERJA	204.849.200,00	177.180.391,00	27.668.809,00	86,49	
2.07.2.07.3.3.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.849.200,00	177.180.391,00	27.668.809,00	86,49	
<b>2.07.2.07.3.3.04.2.03.</b>	<b>PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA</b>	<b>549.706.500,00</b>	<b>510.049.274,00</b>	<b>39.657.226,00</b>	<b>92,78</b>	
2.07.2.07.3.3.04.2.03.01.	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	109.350.000,00	108.075.000,00	1.275.000,00	98,83	
2.07.2.07.3.3.04.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	109.350.000,00	108.075.000,00	1.275.000,00	98,83	
2.07.2.07.3.3.04.2.03.02.	PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	440.356.500,00	401.974.274,00	38.382.226,00	91,28	
2.07.2.07.3.3.04.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	440.356.500,00	401.974.274,00	38.382.226,00	91,28	
<b>2.07.2.07.3.3.04.2.05.</b>	<b>PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>27.742.700,00</b>	<b>25.917.100,00</b>	<b>1.825.600,00</b>	<b>93,41</b>	
2.07.2.07.3.3.04.2.05.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.742.700,00	25.917.100,00	1.825.600,00	93,41	
2.07.2.07.3.3.04.2.05.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.742.700,00	25.917.100,00	1.825.600,00	93,41	
<b>2.07.2.07.3.3.05.</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>1.503.947.000,00</b>	<b>1.371.354.322,00</b>	<b>132.592.678,00</b>	<b>91,18</b>	
<b>2.07.2.07.3.3.05.2.01.</b>	<b>PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>558.513.200,00</b>	<b>515.324.374,00</b>	<b>43.188.826,00</b>	<b>92,26</b>	
2.07.2.07.3.3.05.2.01.01.	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN	98.193.800,00	86.425.750,00	11.768.050,00	88,01	
2.07.2.07.3.3.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.193.800,00	86.425.750,00	11.768.050,00	88,01	
2.07.2.07.3.3.05.2.01.02.	PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJASAMA BAGI PERUSAHAAN	98.193.800,00	85.463.750,00	12.730.050,00	87,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.3.3.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.193.800,00	85.463.750,00	12.730.050,00	87,03	
2.07.2.07.3.3.05.2.01.03.	PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	362.125.600,00	343.434.874,00	18.690.726,00	94,83	
2.07.2.07.3.3.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	362.125.600,00	343.434.874,00	18.690.726,00	94,83	
<b>2.07.2.07.3.3.05.2.02.</b>	<b>PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>945.433.800,00</b>	<b>856.029.948,00</b>	<b>89.403.852,00</b>	<b>90,54</b>	
2.07.2.07.3.3.05.2.02.01.	PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	476.175.300,00	428.565.200,00	47.610.100,00	90,00	
2.07.2.07.3.3.05.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	476.175.300,00	428.565.200,00	47.610.100,00	90,00	
2.07.2.07.3.3.05.2.02.02.	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.033.500,00	91.479.124,00	30.554.376,00	74,96	
2.07.2.07.3.3.05.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.033.500,00	91.479.124,00	30.554.376,00	74,96	
2.07.2.07.3.3.05.2.02.03.	PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI	177.208.500,00	168.335.250,00	8.873.250,00	94,99	
2.07.2.07.3.3.05.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	177.208.500,00	168.335.250,00	8.873.250,00	94,99	
2.07.2.07.3.3.05.2.02.04.	PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.016.500,00	167.650.374,00	2.366.126,00	98,60	
2.07.2.07.3.3.05.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	170.016.500,00	167.650.374,00	2.366.126,00	98,60	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>9.437.761.051,00</b>	<b>8.993.432.354,00</b>	<b>444.328.697,00</b>	<b>95,29</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(8.687.761.051,00)</b>	<b>(8.409.662.354,00)</b>	<b>(610.558.697,00)</b>	<b>96,79</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(8.687.761.051,00)</b>	<b>(8.409.662.354,00)</b>	<b>-</b>	<b>96,79</b>	



LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

ORGANISASI : 2.09.3.27.3.25.02. - Dinas Pangan dan Pertanian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>240.800.000,00</b>	<b>263.827.000,00</b>	<b>23.027.000,00</b>	<b>109,56</b>	
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>240.800.000,00</b>	<b>263.827.000,00</b>	<b>23.027.000,00</b>	<b>109,56</b>	
2.09.2.09.3.27.3.25.02.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	240.800.000,00	263.827.000,00	23.027.000,00	109,56	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>240.800.000,00</b>	<b>263.827.000,00</b>	<b>23.027.000,00</b>	<b>109,56</b>	
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.346.326.273,00</b>	<b>11.309.111.871,00</b>	<b>1.037.214.402,00</b>	<b>91,59</b>	
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.968.401.023,00</b>	<b>10.931.904.441,00</b>	<b>1.036.496.582,00</b>	<b>91,33</b>	
2.09.2.09.3.27.3.25.02.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.464.993.581,00	7.607.760.017,00	857.233.564,00	89,87	
2.09.2.09.3.27.3.25.02.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.503.407.442,00	3.324.144.424,00	179.263.018,00	94,88	
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>377.925.250,00</b>	<b>377.207.430,00</b>	<b>717.820,00</b>	<b>99,81</b>	
2.09.2.09.3.27.3.25.02.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.955.250,00	215.650.000,00	305.250,00	99,85	
2.09.2.09.3.27.3.25.02.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.970.000,00	161.557.430,00	412.570,00	99,74	
<b>2.09.2.09.3.2.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.282.440.421,00</b>	<b>8.385.578.483,00</b>	<b>896.861.938,00</b>	<b>90,33</b>	
<b>2.09.2.09.3.2.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>49.658.200,00</b>	<b>48.157.100,00</b>	<b>1.501.100,00</b>	<b>96,97</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.2.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	18.965.000,00	18.965.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.965.000,00	18.965.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.769.000,00	269.000,00	1.500.000,00	15,20	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.769.000,00	269.000,00	1.500.000,00	15,20	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.769.000,00	1.769.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.769.000,00	1.769.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.088.000,00	2.088.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.088.000,00	2.088.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	3.454.600,00	3.454.600,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.454.600,00	3.454.600,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	19.093.600,00	19.092.500,00	1.100,00	99,99	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.093.600,00	19.092.500,00	1.100,00	99,99	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.519.000,00	2.519.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.519.000,00	2.519.000,00	-	100,00	
<b>2.09.2.09.3.2.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>8.467.707.581,00</b>	<b>7.610.474.017,00</b>	<b>857.233.564,00</b>	<b>89,87</b>	
2.09.2.09.3.2.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.464.993.581,00	7.607.760.017,00	857.233.564,00	89,87	
2.09.2.09.3.2.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.464.993.581,00	7.607.760.017,00	857.233.564,00	89,87	
2.09.2.09.3.2.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	2.714.000,00	2.714.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.714.000,00	2.714.000,00	-	100,00	
<b>2.09.2.09.3.2.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>17.050.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>91,66</b>	
2.09.2.09.3.2.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.600.000,00	17.050.000,00	1.550.000,00	91,66	
2.09.2.09.3.2.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	17.050.000,00	1.550.000,00	91,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.09.2.09.3.2.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>111.491.700,00</b>	<b>110.893.000,00</b>	<b>598.700,00</b>	<b>99,46</b>	
2.09.2.09.3.2.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.886.900,00	4.882.100,00	4.800,00	99,90	
2.09.2.09.3.2.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.886.900,00	4.882.100,00	4.800,00	99,90	
2.09.2.09.3.2.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.689.000,00	11.689.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.689.000,00	11.689.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	44.768.800,00	44.765.700,00	3.100,00	99,99	
2.09.2.09.3.2.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.768.800,00	44.765.700,00	3.100,00	99,99	
2.09.2.09.3.2.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.000.000,00	11.992.200,00	7.800,00	99,93	
2.09.2.09.3.2.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.992.200,00	7.800,00	99,93	
2.09.2.09.3.2.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	38.147.000,00	37.564.000,00	583.000,00	98,47	
2.09.2.09.3.2.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.147.000,00	37.564.000,00	583.000,00	98,47	
<b>2.09.2.09.3.2.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
2.09.2.09.3.2.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.01.2.07.11.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
<b>2.09.2.09.3.2.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>293.612.940,00</b>	<b>268.157.990,00</b>	<b>25.454.950,00</b>	<b>91,33</b>	
2.09.2.09.3.2.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	84.460.000,00	78.562.250,00	5.897.750,00	93,01	
2.09.2.09.3.2.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.460.000,00	78.562.250,00	5.897.750,00	93,01	
2.09.2.09.3.2.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	91.199.540,00	80.788.968,00	10.410.572,00	88,58	
2.09.2.09.3.2.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.199.540,00	80.788.968,00	10.410.572,00	88,58	
2.09.2.09.3.2.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	117.953.400,00	108.806.772,00	9.146.628,00	92,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.2.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.953.400,00	108.806.772,00	9.146.628,00	92,24	
<b>2.09.2.09.3.2.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>276.370.000,00</b>	<b>265.846.376,00</b>	<b>10.523.624,00</b>	<b>96,19</b>	
2.09.2.09.3.2.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	134.780.000,00	126.774.074,00	8.005.926,00	94,06	
2.09.2.09.3.2.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	134.780.000,00	126.774.074,00	8.005.926,00	94,06	
2.09.2.09.3.2.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	126.090.000,00	124.532.302,00	1.557.698,00	98,76	
2.09.2.09.3.2.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	114.120.000,00	112.600.872,00	1.519.128,00	98,66	
2.09.2.09.3.2.01.2.09.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.970.000,00	11.931.430,00	38.570,00	99,67	
2.09.2.09.3.2.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.500.000,00	14.540.000,00	960.000,00	93,80	
2.09.2.09.3.2.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	14.540.000,00	960.000,00	93,80	
<b>2.09.2.09.3.2.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>1.038.389.250,00</b>	<b>987.682.910,00</b>	<b>50.706.340,00</b>	<b>95,11</b>	
<b>2.09.2.09.3.2.03.2.01.</b>	<b>PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN</b>	<b>70.622.800,00</b>	<b>66.701.000,00</b>	<b>3.921.800,00</b>	<b>94,44</b>	
2.09.2.09.3.2.03.2.01.01.	PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN	45.174.000,00	43.367.000,00	1.807.000,00	95,99	
2.09.2.09.3.2.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.174.000,00	43.367.000,00	1.807.000,00	95,99	
2.09.2.09.3.2.03.2.01.04.	PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN	22.173.800,00	21.759.000,00	414.800,00	98,12	
2.09.2.09.3.2.03.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.173.800,00	21.759.000,00	414.800,00	98,12	
2.09.2.09.3.2.03.2.01.05.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN	3.275.000,00	1.575.000,00	1.700.000,00	48,09	
2.09.2.09.3.2.03.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	1.575.000,00	1.700.000,00	48,09	
<b>2.09.2.09.3.2.03.2.02.</b>	<b>PENGLOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>249.999.900,00</b>	<b>215.451.910,00</b>	<b>34.547.990,00</b>	<b>86,18</b>	
2.09.2.09.3.2.03.2.02.03.	PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	249.999.900,00	215.451.910,00	34.547.990,00	86,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.2.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	249.999.900,00	215.451.910,00	34.547.990,00	86,18	
<b>2.09.2.09.3.2.03.2.04.</b>	<b>PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI</b>	<b>717.766.550,00</b>	<b>705.530.000,00</b>	<b>12.236.550,00</b>	<b>98,29</b>	
2.09.2.09.3.2.03.2.04.01.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.03.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2.09.2.09.3.2.03.2.04.02.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	712.766.550,00	700.530.000,00	12.236.550,00	98,28	
2.09.2.09.3.2.03.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	564.735.300,00	552.800.000,00	11.935.300,00	97,88	
2.09.2.09.3.2.03.2.04.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.031.250,00	147.730.000,00	301.250,00	99,79	
<b>2.09.2.09.3.2.04.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>39.832.400,00</b>	<b>35.666.900,00</b>	<b>4.165.500,00</b>	<b>89,54</b>	
<b>2.09.2.09.3.2.04.2.02.</b>	<b>PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>39.832.400,00</b>	<b>35.666.900,00</b>	<b>4.165.500,00</b>	<b>89,54</b>	
2.09.2.09.3.2.04.2.02.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	8.165.500,00	6.653.000,00	1.512.500,00	81,47	
2.09.2.09.3.2.04.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.165.500,00	6.653.000,00	1.512.500,00	81,47	
2.09.2.09.3.2.04.2.02.02.	PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.666.900,00	29.013.900,00	2.653.000,00	91,62	
2.09.2.09.3.2.04.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.666.900,00	29.013.900,00	2.653.000,00	91,62	
<b>2.09.2.09.3.2.05.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>25.160.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>88,23</b>	
<b>2.09.2.09.3.2.05.2.01.</b>	<b>PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>25.160.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>88,23</b>	
2.09.2.09.3.2.05.2.01.05.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.160.000,00	22.200.000,00	2.960.000,00	88,23	
2.09.2.09.3.2.05.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.160.000,00	22.200.000,00	2.960.000,00	88,23	
<b>3.25.2.09.3.2.04.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>686.046.100,00</b>	<b>645.867.247,00</b>	<b>40.178.853,00</b>	<b>94,14</b>	
<b>3.25.2.09.3.2.04.2.02.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL</b>	<b>69.427.700,00</b>	<b>68.406.500,00</b>	<b>1.021.200,00</b>	<b>98,52</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.25.2.09.3.2.04.2.02.04.	PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	69.427.700,00	68.406.500,00	1.021.200,00	98,52	
3.25.2.09.3.2.04.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.983.700,00	53.966.500,00	1.017.200,00	98,14	
3.25.2.09.3.2.04.2.02.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.444.000,00	14.440.000,00	4.000,00	99,97	
<b>3.25.2.09.3.2.04.2.04.</b>	<b>PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN</b>	<b>616.618.400,00</b>	<b>577.460.747,00</b>	<b>39.157.653,00</b>	<b>93,64</b>	
3.25.2.09.3.2.04.2.04.03.	PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	616.618.400,00	577.460.747,00	39.157.653,00	93,64	
3.25.2.09.3.2.04.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	583.138.400,00	543.980.747,00	39.157.653,00	93,28	
3.25.2.09.3.2.04.2.04.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.480.000,00	33.480.000,00	-	100,00	
<b>3.25.2.09.3.2.06.</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>100.560.000,00</b>	<b>94.056.200,00</b>	<b>6.503.800,00</b>	<b>93,53</b>	
<b>3.25.2.09.3.2.06.2.02.</b>	<b>PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL</b>	<b>64.724.400,00</b>	<b>62.619.000,00</b>	<b>2.105.400,00</b>	<b>96,74</b>	
3.25.2.09.3.2.06.2.02.01.	PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	64.724.400,00	62.619.000,00	2.105.400,00	96,74	
3.25.2.09.3.2.06.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.724.400,00	62.619.000,00	2.105.400,00	96,74	
<b>3.25.2.09.3.2.06.2.03.</b>	<b>PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>35.835.600,00</b>	<b>31.437.200,00</b>	<b>4.398.400,00</b>	<b>87,72</b>	
3.25.2.09.3.2.06.2.03.01.	PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.835.600,00	31.437.200,00	4.398.400,00	87,72	
3.25.2.09.3.2.06.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.835.600,00	31.437.200,00	4.398.400,00	87,72	
<b>3.27.2.09.3.2.03.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>54.940.100,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>99,89</b>	
<b>3.27.2.09.3.2.03.2.01.</b>	<b>PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>54.940.100,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>99,89</b>	
3.27.2.09.3.2.03.2.01.01.	PENGLOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B	55.000.000,00	54.940.100,00	59.900,00	99,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.3.2.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.940.100,00	59.900,00	99,89	
<b>3.27.2.09.3.2.04.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>807.856.600,00</b>	<b>777.611.659,00</b>	<b>30.244.941,00</b>	<b>96,25</b>	
<b>3.27.2.09.3.2.04.2.01.</b>	<b>PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>103.854.400,00</b>	<b>97.782.814,00</b>	<b>6.071.586,00</b>	<b>94,15</b>	
3.27.2.09.3.2.04.2.01.01.	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS	103.854.400,00	97.782.814,00	6.071.586,00	94,15	
3.27.2.09.3.2.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.854.400,00	97.782.814,00	6.071.586,00	94,15	
<b>3.27.2.09.3.2.04.2.02.</b>	<b>PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>59.863.200,00</b>	<b>57.815.000,00</b>	<b>2.048.200,00</b>	<b>96,57</b>	
3.27.2.09.3.2.04.2.02.03.	PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DI PERBATASAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.863.200,00	57.815.000,00	2.048.200,00	96,57	
3.27.2.09.3.2.04.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.863.200,00	57.815.000,00	2.048.200,00	96,57	
<b>3.27.2.09.3.2.04.2.03.</b>	<b>PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>644.139.000,00</b>	<b>622.013.845,00</b>	<b>22.125.155,00</b>	<b>96,56</b>	
3.27.2.09.3.2.04.2.03.02.	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	644.139.000,00	622.013.845,00	22.125.155,00	96,56	
3.27.2.09.3.2.04.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	494.139.000,00	472.387.845,00	21.751.155,00	95,59	
3.27.2.09.3.2.04.2.03.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.626.000,00	374.000,00	99,75	
<b>3.27.2.09.3.2.07.</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>311.041.502,00</b>	<b>305.508.372,00</b>	<b>5.533.130,00</b>	<b>98,22</b>	
<b>3.27.2.09.3.2.07.2.01.</b>	<b>PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>311.041.502,00</b>	<b>305.508.372,00</b>	<b>5.533.130,00</b>	<b>98,22</b>	
3.27.2.09.3.2.07.2.01.02.	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	58.268.800,00	55.268.600,00	3.000.200,00	94,85	
3.27.2.09.3.2.07.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.268.800,00	55.268.600,00	3.000.200,00	94,85	
3.27.2.09.3.2.07.2.01.03.	PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	252.772.702,00	250.239.772,00	2.532.930,00	98,99	
3.27.2.09.3.2.07.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	252.772.702,00	250.239.772,00	2.532.930,00	98,99	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>12.346.326.273,00</b>	<b>11.309.111.871,00</b>	<b>1.037.214.402,00</b>	<b>91,59</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(12.105.526.273,00)</b>	<b>(11.045.284.871,00)</b>	<b>(1.014.187.402,00)</b>	<b>91,24</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(12.105.526.273,00)</b>	<b>(11.045.284.871,00)</b>	<b>-</b>	<b>91,24</b>	



LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 2.11.0.00.0.00.02. - Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.900.000.000,00</b>	<b>2.154.402.900,00</b>	<b>254.402.900,00</b>	<b>113,38</b>	
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.900.000.000,00</b>	<b>2.154.402.900,00</b>	<b>254.402.900,00</b>	<b>113,38</b>	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.900.000.000,00	2.154.402.900,00	254.402.900,00	113,38	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.900.000.000,00</b>	<b>2.154.402.900,00</b>	<b>254.402.900,00</b>	<b>113,38</b>	
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>55.649.528.450,00</b>	<b>48.527.800.626,00</b>	<b>7.121.727.824,00</b>	<b>87,20</b>	
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>47.094.827.500,00</b>	<b>42.850.355.838,00</b>	<b>4.244.471.662,00</b>	<b>90,98</b>	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.420.010.370,00	11.208.960.620,00	211.049.750,00	98,15	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.654.817.130,00	31.641.395.218,00	4.013.421.912,00	88,74	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.00.00.5.1.05.	Belanja Hibah	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8.554.700.950,00</b>	<b>5.677.444.788,00</b>	<b>2.877.256.162,00</b>	<b>66,36</b>	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.929.700.950,00	5.055.771.650,00	2.873.929.300,00	63,75	
2.11.2.11.0.00.0.00.02.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	625.000.000,00	621.673.138,00	3.326.862,00	99,46	
<b>2.11.2.11.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21.112.432.450,00</b>	<b>19.849.249.543,00</b>	<b>1.263.182.907,00</b>	<b>94,01</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.11.2.11.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>60.224.000,00</b>	<b>42.309.500,00</b>	<b>17.914.500,00</b>	<b>70,25</b>	
2.11.2.11.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	34.628.000,00	24.579.500,00	10.048.500,00	70,98	
2.11.2.11.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.628.000,00	24.579.500,00	10.048.500,00	70,98	
2.11.2.11.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.596.000,00	17.730.000,00	7.866.000,00	69,26	
2.11.2.11.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.596.000,00	17.730.000,00	7.866.000,00	69,26	
<b>2.11.2.11.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>11.429.867.170,00</b>	<b>11.218.771.620,00</b>	<b>211.095.550,00</b>	<b>98,15</b>	
2.11.2.11.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.420.010.370,00	11.208.960.620,00	211.049.750,00	98,15	
2.11.2.11.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.420.010.370,00	11.208.960.620,00	211.049.750,00	98,15	
2.11.2.11.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.503.600,00	6.499.000,00	4.600,00	99,92	
2.11.2.11.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.503.600,00	6.499.000,00	4.600,00	99,92	
2.11.2.11.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	3.353.200,00	3.312.000,00	41.200,00	98,77	
2.11.2.11.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.353.200,00	3.312.000,00	41.200,00	98,77	
<b>2.11.2.11.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>484.217.500,00</b>	<b>478.569.000,00</b>	<b>5.648.500,00</b>	<b>98,83</b>	
2.11.2.11.0.0.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	484.217.500,00	478.569.000,00	5.648.500,00	98,83	
2.11.2.11.0.0.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	484.217.500,00	478.569.000,00	5.648.500,00	98,83	
<b>2.11.2.11.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>831.154.500,00</b>	<b>750.515.175,00</b>	<b>80.639.325,00</b>	<b>90,29</b>	
2.11.2.11.0.0.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.017.600,00	2.000.000,00	17.600,00	99,12	
2.11.2.11.0.0.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.017.600,00	2.000.000,00	17.600,00	99,12	
2.11.2.11.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	443.257.000,00	395.296.275,00	47.960.725,00	89,17	
2.11.2.11.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.912.700,00	22.993.000,00	9.919.700,00	69,86	
2.11.2.11.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410.344.300,00	372.303.275,00	38.041.025,00	90,72	
2.11.2.11.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	39.675.200,00	36.058.200,00	3.617.000,00	90,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.675.200,00	36.058.200,00	3.617.000,00	90,88	
2.11.2.11.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	106.598.700,00	98.033.700,00	8.565.000,00	91,96	
2.11.2.11.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	106.598.700,00	98.033.700,00	8.565.000,00	91,96	
2.11.2.11.0.0.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
2.11.2.11.0.0.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.950.000,00	50.000,00	99,00	
2.11.2.11.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	234.606.000,00	214.177.000,00	20.429.000,00	91,29	
2.11.2.11.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	234.606.000,00	214.177.000,00	20.429.000,00	91,29	
<b>2.11.2.11.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>77.675.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>22.675.000,00</b>	<b>70,80</b>	
2.11.2.11.0.0.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	77.675.000,00	55.000.000,00	22.675.000,00	70,80	
2.11.2.11.0.0.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.675.000,00	55.000.000,00	22.675.000,00	70,80	
<b>2.11.2.11.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.046.989.180,00</b>	<b>890.927.124,00</b>	<b>156.062.056,00</b>	<b>85,09</b>	
2.11.2.11.0.0.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	874.768.300,00	735.766.458,00	139.001.842,00	84,10	
2.11.2.11.0.0.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	874.768.300,00	735.766.458,00	139.001.842,00	84,10	
2.11.2.11.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	125.037.880,00	108.375.216,00	16.662.664,00	86,67	
2.11.2.11.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.037.880,00	108.375.216,00	16.662.664,00	86,67	
2.11.2.11.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	47.183.000,00	46.785.450,00	397.550,00	99,15	
2.11.2.11.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.183.000,00	46.785.450,00	397.550,00	99,15	
<b>2.11.2.11.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>7.182.305.100,00</b>	<b>6.413.157.124,00</b>	<b>769.147.976,00</b>	<b>89,29</b>	
2.11.2.11.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	7.182.305.100,00	6.413.157.124,00	769.147.976,00	89,29	
2.11.2.11.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.182.305.100,00	6.413.157.124,00	769.147.976,00	89,29	
<b>2.11.2.11.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>137.675.100,00</b>	<b>132.693.100,00</b>	<b>4.982.000,00</b>	<b>96,38</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.11.2.11.0.0.02.2.01.</b>	<b>RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA</b>	<b>137.675.100,00</b>	<b>132.693.100,00</b>	<b>4.982.000,00</b>	<b>96,38</b>	
2.11.2.11.0.0.02.2.01.02.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	137.675.100,00	132.693.100,00	4.982.000,00	96,38	
2.11.2.11.0.0.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	137.675.100,00	132.693.100,00	4.982.000,00	96,38	
<b>2.11.2.11.0.0.03.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>3.723.587.650,00</b>	<b>2.572.684.901,00</b>	<b>1.150.902.749,00</b>	<b>69,09</b>	
<b>2.11.2.11.0.0.03.2.01.</b>	<b>PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.616.350.850,00</b>	<b>2.572.684.901,00</b>	<b>1.043.665.949,00</b>	<b>71,14</b>	
2.11.2.11.0.0.03.2.01.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	648.480.750,00	581.152.921,00	67.327.829,00	89,61	
2.11.2.11.0.0.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	571.924.650,00	522.509.800,00	49.414.850,00	91,35	
2.11.2.11.0.0.03.2.01.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.556.100,00	58.643.121,00	17.912.979,00	76,60	
2.11.2.11.0.0.03.2.01.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	53.545.800,00	50.365.200,00	3.180.600,00	94,06	
2.11.2.11.0.0.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.545.800,00	50.365.200,00	3.180.600,00	94,06	
2.11.2.11.0.0.03.2.01.03.	PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	2.914.324.300,00	1.941.166.780,00	973.157.520,00	66,60	
2.11.2.11.0.0.03.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.076.304.300,00	980.535.680,00	95.768.620,00	91,10	
2.11.2.11.0.0.03.2.01.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.838.020.000,00	960.631.100,00	877.388.900,00	52,26	
<b>2.11.2.11.0.0.03.2.02.</b>	<b>PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA</b>	<b>107.236.800,00</b>	<b>-</b>	<b>107.236.800,00</b>	<b>-</b>	
2.11.2.11.0.0.03.2.02.03.	PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	107.236.800,00	-	107.236.800,00	-	
2.11.2.11.0.0.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	107.236.800,00	-	107.236.800,00	-	
<b>2.11.2.11.0.0.04.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>2.623.976.000,00</b>	<b>2.208.516.054,00</b>	<b>415.459.946,00</b>	<b>84,16</b>	
<b>2.11.2.11.0.0.04.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.623.976.000,00</b>	<b>2.208.516.054,00</b>	<b>415.459.946,00</b>	<b>84,16</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.0.04.2.01.01.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	98.957.000,00	95.451.000,00	3.506.000,00	96,45	
2.11.2.11.0.0.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.957.000,00	95.451.000,00	3.506.000,00	96,45	
2.11.2.11.0.0.04.2.01.02.	PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN	225.146.000,00	18.250.000,00	206.896.000,00	8,10	
2.11.2.11.0.0.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	225.146.000,00	18.250.000,00	206.896.000,00	8,10	
2.11.2.11.0.0.04.2.01.04.	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	1.399.773.000,00	1.216.503.054,00	183.269.946,00	86,90	
2.11.2.11.0.0.04.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.297.864.000,00	1.119.245.500,00	178.618.500,00	86,23	
2.11.2.11.0.0.04.2.01.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.909.000,00	72.509.554,00	4.399.446,00	94,27	
2.11.2.11.0.0.04.2.01.04.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.748.000,00	252.000,00	98,99	
2.11.2.11.0.0.04.2.01.07.	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI	900.100.000,00	878.312.000,00	21.788.000,00	97,57	
2.11.2.11.0.0.04.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
2.11.2.11.0.0.04.2.01.07.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	895.000.000,00	873.212.000,00	21.788.000,00	97,56	
<b>2.11.2.11.0.0.05.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH</b>	<b>111.567.500,00</b>	<b>34.655.000,00</b>	<b>76.912.500,00</b>	<b>31,06</b>	
<b>2.11.2.11.0.0.05.2.01.</b>	<b>PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3</b>	<b>111.567.500,00</b>	<b>34.655.000,00</b>	<b>76.912.500,00</b>	<b>31,06</b>	
2.11.2.11.0.0.05.2.01.01.	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	111.567.500,00	34.655.000,00	76.912.500,00	31,06	
2.11.2.11.0.0.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.567.500,00	34.655.000,00	76.912.500,00	31,06	
<b>2.11.2.11.0.0.06.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LING</b>	<b>876.727.400,00</b>	<b>816.227.486,00</b>	<b>60.499.914,00</b>	<b>93,09</b>	
<b>2.11.2.11.0.0.06.2.01.</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>876.727.400,00</b>	<b>816.227.486,00</b>	<b>60.499.914,00</b>	<b>93,09</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.0.06.2.01.01.	FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	268.973.800,00	257.371.450,00	11.602.350,00	95,68	
2.11.2.11.0.0.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	268.973.800,00	257.371.450,00	11.602.350,00	95,68	
2.11.2.11.0.0.06.2.01.03.	PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	607.753.600,00	558.856.036,00	48.897.564,00	91,95	
2.11.2.11.0.0.06.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	607.753.600,00	558.856.036,00	48.897.564,00	91,95	
<b>2.11.2.11.0.0.09.</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>129.743.000,00</b>	<b>109.764.900,00</b>	<b>19.978.100,00</b>	<b>84,60</b>	
<b>2.11.2.11.0.0.09.2.01.</b>	<b>PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>129.743.000,00</b>	<b>109.764.900,00</b>	<b>19.978.100,00</b>	<b>84,60</b>	
2.11.2.11.0.0.09.2.01.01.	PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/ FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	129.743.000,00	109.764.900,00	19.978.100,00	84,60	
2.11.2.11.0.0.09.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	108.597.600,00	88.689.900,00	19.907.700,00	81,66	
2.11.2.11.0.0.09.2.01.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.145.400,00	21.075.000,00	70.400,00	99,66	
<b>2.11.2.11.0.0.10.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>178.222.200,00</b>	<b>93.658.700,00</b>	<b>84.563.500,00</b>	<b>52,55</b>	
<b>2.11.2.11.0.0.10.2.01.</b>	<b>PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA</b>	<b>178.222.200,00</b>	<b>93.658.700,00</b>	<b>84.563.500,00</b>	<b>52,55</b>	
2.11.2.11.0.0.10.2.01.01.	PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KABUPATEN/KOTA	68.787.500,00	33.845.300,00	34.942.200,00	49,20	
2.11.2.11.0.0.10.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	68.787.500,00	33.845.300,00	34.942.200,00	49,20	
2.11.2.11.0.0.10.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN/ATAU PENYIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN ATAU MELALUI PENGADILAN	109.434.700,00	59.813.400,00	49.621.300,00	54,65	
2.11.2.11.0.0.10.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	109.434.700,00	59.813.400,00	49.621.300,00	54,65	
<b>2.11.2.11.0.0.11.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>26.755.597.150,00</b>	<b>22.710.350.942,00</b>	<b>4.045.246.208,00</b>	<b>84,88</b>	
<b>2.11.2.11.0.0.11.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN SAMPAH</b>	<b>26.755.597.150,00</b>	<b>22.710.350.942,00</b>	<b>4.045.246.208,00</b>	<b>84,88</b>	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.01.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA	55.000.000,00	27.600.000,00	27.400.000,00	50,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.0.11.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	27.600.000,00	27.400.000,00	50,18	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.02.	PENGURANGAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMBATASAN, PENDAUARAN ULANG DAN PEMANFAATAN KEMBALI	3.035.181.300,00	2.743.760.300,00	291.421.000,00	90,39	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.035.181.300,00	2.743.760.300,00	291.421.000,00	90,39	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.03.	PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	10.565.470.000,00	9.792.824.836,00	772.645.164,00	92,68	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.486.563.100,00	9.715.648.236,00	770.914.864,00	92,64	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.906.900,00	77.176.600,00	1.730.300,00	97,80	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.04.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	866.994.000,00	733.338.300,00	133.655.700,00	84,58	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	819.094.000,00	706.563.300,00	112.530.700,00	86,26	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.04.5.1.05.	Belanja Hibah	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.900.000,00	26.775.000,00	1.125.000,00	95,96	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.05.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.851.241.350,00	4.849.495.046,00	2.001.746.304,00	70,78	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.746.322.100,00	1.659.123.908,00	87.198.192,00	95,00	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.504.919.250,00	2.593.446.000,00	1.911.473.250,00	57,56	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.05.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	600.000.000,00	596.925.138,00	3.074.862,00	99,48	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.06.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.381.710.500,00	4.563.332.460,00	818.378.040,00	84,79	
2.11.2.11.0.0.11.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.381.710.500,00	4.563.332.460,00	818.378.040,00	84,79	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>55.649.528.450,00</b>	<b>48.527.800.626,00</b>	<b>7.121.727.824,00</b>	<b>87,20</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(53.749.528.450,00)</b>	<b>(46.373.397.726,00)</b>	<b>(6.867.324.924,00)</b>	<b>86,27</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(53.749.528.450,00)</b>	<b>(46.373.397.726,00)</b>	<b>-</b>	<b>86,27</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**ORGANISASI : 2.12.0.00.0.00.02. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.12.2.12.0.00.0.00.02.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.814.216.560,00</b>	<b>10.024.562.879,00</b>	<b>789.653.681,00</b>	<b>92,69</b>	
<b>2.12.2.12.0.00.0.00.02.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.337.290.800,00</b>	<b>9.564.804.479,00</b>	<b>772.486.321,00</b>	<b>92,52</b>	
2.12.2.12.0.00.0.00.02.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.600.134.000,00	6.094.500.138,00	505.633.862,00	92,33	
2.12.2.12.0.00.0.00.02.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.737.156.800,00	3.470.304.341,00	266.852.459,00	92,85	
<b>2.12.2.12.0.00.0.00.02.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>476.925.760,00</b>	<b>459.758.400,00</b>	<b>17.167.360,00</b>	<b>96,40</b>	
2.12.2.12.0.00.0.00.02.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	443.546.000,00	428.998.400,00	14.547.600,00	96,72	
2.12.2.12.0.00.0.00.02.00.00.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.379.760,00	30.760.000,00	2.619.760,00	92,15	
<b>2.12.2.12.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.338.325.860,00</b>	<b>8.625.868.347,00</b>	<b>712.457.513,00</b>	<b>92,37</b>	
<b>2.12.2.12.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>38.944.600,00</b>	<b>37.422.800,00</b>	<b>1.521.800,00</b>	<b>96,09</b>	
2.12.2.12.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20.823.400,00	20.698.800,00	124.600,00	99,40	
2.12.2.12.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.823.400,00	20.698.800,00	124.600,00	99,40	
2.12.2.12.0.0.01.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	8.412.000,00	7.100.000,00	1.312.000,00	84,40	
2.12.2.12.0.0.01.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.412.000,00	7.100.000,00	1.312.000,00	84,40	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.709.200,00	9.624.000,00	85.200,00	99,12	
2.12.2.12.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.709.200,00	9.624.000,00	85.200,00	99,12	
<b>2.12.2.12.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>6.603.633.000,00</b>	<b>6.097.939.438,00</b>	<b>505.693.562,00</b>	<b>92,34</b>	
2.12.2.12.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.600.134.000,00	6.094.500.138,00	505.633.862,00	92,33	
2.12.2.12.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.600.134.000,00	6.094.500.138,00	505.633.862,00	92,33	
2.12.2.12.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	1.499.000,00	1.439.300,00	59.700,00	96,01	
2.12.2.12.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.499.000,00	1.439.300,00	59.700,00	96,01	
<b>2.12.2.12.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>323.594.000,00</b>	<b>295.188.000,00</b>	<b>28.406.000,00</b>	<b>91,22</b>	
2.12.2.12.0.0.01.2.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	75.596.000,00	75.216.000,00	380.000,00	99,49	
2.12.2.12.0.0.01.2.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.596.000,00	75.216.000,00	380.000,00	99,49	
2.12.2.12.0.0.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	247.998.000,00	219.972.000,00	28.026.000,00	88,69	
2.12.2.12.0.0.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	247.998.000,00	219.972.000,00	28.026.000,00	88,69	
<b>2.12.2.12.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.863.435.860,00</b>	<b>1.724.023.435,00</b>	<b>139.412.425,00</b>	<b>92,51</b>	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.357.658.960,00	1.231.290.585,00	126.368.375,00	90,69	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.030.310.700,00	920.477.185,00	109.833.515,00	89,33	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.968.500,00	280.053.400,00	13.915.100,00	95,26	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.02.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.379.760,00	30.760.000,00	2.619.760,00	92,15	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.820.100,00	8.820.000,00	100,00	99,99	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.820.100,00	8.820.000,00	100,00	99,99	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	47.226.000,00	46.907.500,00	318.500,00	99,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.226.000,00	46.907.500,00	318.500,00	99,32	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	198.665.800,00	196.222.300,00	2.443.500,00	98,77	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	198.665.800,00	196.222.300,00	2.443.500,00	98,77	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.000.000,00	4.850.000,00	150.000,00	97,00	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.850.000,00	150.000,00	97,00	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	185.765.000,00	179.893.050,00	5.871.950,00	96,83	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	185.765.000,00	179.893.050,00	5.871.950,00	96,83	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	60.300.000,00	56.040.000,00	4.260.000,00	92,93	
2.12.2.12.0.0.01.2.06.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.300.000,00	56.040.000,00	4.260.000,00	92,93	
<b>2.12.2.12.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>77.675.000,00</b>	<b>75.500.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>97,19</b>	
2.12.2.12.0.0.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	77.675.000,00	75.500.000,00	2.175.000,00	97,19	
2.12.2.12.0.0.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.675.000,00	75.500.000,00	2.175.000,00	97,19	
<b>2.12.2.12.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>247.793.400,00</b>	<b>239.335.665,00</b>	<b>8.457.735,00</b>	<b>96,58</b>	
2.12.2.12.0.0.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	90.000.000,00	89.994.500,00	5.500,00	99,99	
2.12.2.12.0.0.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.994.500,00	5.500,00	99,99	
2.12.2.12.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.900.000,00	16.147.017,00	2.752.983,00	85,43	
2.12.2.12.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	16.147.017,00	2.752.983,00	85,43	
2.12.2.12.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	138.893.400,00	133.194.148,00	5.699.252,00	95,89	
2.12.2.12.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.893.400,00	133.194.148,00	5.699.252,00	95,89	
<b>2.12.2.12.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>183.250.000,00</b>	<b>156.459.009,00</b>	<b>26.790.991,00</b>	<b>85,38</b>	
2.12.2.12.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	183.250.000,00	156.459.009,00	26.790.991,00	85,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	183.250.000,00	156.459.009,00	26.790.991,00	85,38	
<b>2.12.2.12.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>359.368.000,00</b>	<b>339.224.068,00</b>	<b>20.143.932,00</b>	<b>94,39</b>	
<b>2.12.2.12.0.0.02.2.01.</b>	<b>PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>359.368.000,00</b>	<b>339.224.068,00</b>	<b>20.143.932,00</b>	<b>94,39</b>	
2.12.2.12.0.0.02.2.01.01.	PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	35.100.000,00	34.075.200,00	1.024.800,00	97,08	
2.12.2.12.0.0.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	34.075.200,00	1.024.800,00	97,08	
2.12.2.12.0.0.02.2.01.04.	PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	315.160.000,00	296.958.868,00	18.201.132,00	94,22	
2.12.2.12.0.0.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	315.160.000,00	296.958.868,00	18.201.132,00	94,22	
2.12.2.12.0.0.02.2.01.08.	PENGUMPULAN, ANALISIS, DAN DISEMINASI DATA TERKAIT PENDAFTARAN DAN PERKEMBANGAN PENDUDUK	9.108.000,00	8.190.000,00	918.000,00	89,92	
2.12.2.12.0.0.02.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.108.000,00	8.190.000,00	918.000,00	89,92	
<b>2.12.2.12.0.0.03.</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>372.000.000,00</b>	<b>350.240.868,00</b>	<b>21.759.132,00</b>	<b>94,15</b>	
<b>2.12.2.12.0.0.03.2.01.</b>	<b>PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>372.000.000,00</b>	<b>350.240.868,00</b>	<b>21.759.132,00</b>	<b>94,15</b>	
2.12.2.12.0.0.03.2.01.02.	PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	372.000.000,00	350.240.868,00	21.759.132,00	94,15	
2.12.2.12.0.0.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	372.000.000,00	350.240.868,00	21.759.132,00	94,15	
<b>2.12.2.12.0.0.04.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>727.722.800,00</b>	<b>699.237.696,00</b>	<b>28.485.104,00</b>	<b>96,08</b>	
<b>2.12.2.12.0.0.04.2.01.</b>	<b>PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN</b>	<b>31.941.000,00</b>	<b>20.229.000,00</b>	<b>11.712.000,00</b>	<b>63,33</b>	
2.12.2.12.0.0.04.2.01.01.	PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	22.050.000,00	10.338.000,00	11.712.000,00	46,88	
2.12.2.12.0.0.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	10.338.000,00	11.712.000,00	46,88	
2.12.2.12.0.0.04.2.01.02.	KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	9.891.000,00	9.891.000,00	-	100,00	
2.12.2.12.0.0.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.891.000,00	9.891.000,00	-	100,00	
<b>2.12.2.12.0.0.04.2.03.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>695.781.800,00</b>	<b>679.008.696,00</b>	<b>16.773.104,00</b>	<b>97,58</b>	
2.12.2.12.0.0.04.2.03.03.	FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	290.605.000,00	283.972.372,00	6.632.628,00	97,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.0.0.04.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	206.855.000,00	200.277.372,00	6.577.628,00	96,82	
2.12.2.12.0.0.04.2.03.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.750.000,00	83.695.000,00	55.000,00	99,93	
2.12.2.12.0.0.04.2.03.05.	SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	106.988.600,00	99.135.400,00	7.853.200,00	92,65	
2.12.2.12.0.0.04.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.302.500,00	84.705.400,00	7.597.100,00	91,76	
2.12.2.12.0.0.04.2.03.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.686.100,00	14.430.000,00	256.100,00	98,25	
2.12.2.12.0.0.04.2.03.07.	KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT	298.188.200,00	295.900.924,00	2.287.276,00	99,23	
2.12.2.12.0.0.04.2.03.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	247.046.800,00	245.080.924,00	1.965.876,00	99,20	
2.12.2.12.0.0.04.2.03.07.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.141.400,00	50.820.000,00	321.400,00	99,37	
<b>2.12.2.12.0.0.05.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>16.799.900,00</b>	<b>9.991.900,00</b>	<b>6.808.000,00</b>	<b>59,47</b>	
<b>2.12.2.12.0.0.05.2.01.</b>	<b>PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>16.799.900,00</b>	<b>9.991.900,00</b>	<b>6.808.000,00</b>	<b>59,47</b>	
2.12.2.12.0.0.05.2.01.02.	PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	16.799.900,00	9.991.900,00	6.808.000,00	59,47	
2.12.2.12.0.0.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.799.900,00	9.991.900,00	6.808.000,00	59,47	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>10.814.216.560,00</b>	<b>10.024.562.879,00</b>	<b>789.653.681,00</b>	<b>92,69</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(10.814.216.560,00)</b>	<b>(10.024.562.879,00)</b>	<b>(789.653.681,00)</b>	<b>92,69</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(10.814.216.560,00)</b>	<b>(10.024.562.879,00)</b>	<b>-</b>	<b>92,69</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

**ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01. - Dinas Perhubungan**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.288.475.000,00</b>	<b>1.529.391.040,00</b>	<b>240.916.040,00</b>	<b>118,69</b>	
<b>2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.288.475.000,00</b>	<b>1.529.391.040,00</b>	<b>240.916.040,00</b>	<b>118,69</b>	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.288.475.000,00	1.529.391.040,00	240.916.040,00	118,69	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.288.475.000,00</b>	<b>1.529.391.040,00</b>	<b>240.916.040,00</b>	<b>118,69</b>	
<b>2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>35.596.592.332,00</b>	<b>32.354.536.026,00</b>	<b>3.242.056.306,00</b>	<b>90,89</b>	
<b>2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>31.084.734.032,00</b>	<b>28.391.210.326,00</b>	<b>2.693.523.706,00</b>	<b>91,33</b>	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.430.673.412,00	9.346.093.418,00	84.579.994,00	99,10	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.654.060.620,00	19.045.116.908,00	2.608.943.712,00	87,95	
<b>2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.511.858.300,00</b>	<b>3.963.325.700,00</b>	<b>548.532.600,00</b>	<b>87,84</b>	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	824.535.700,00	318.968.100,00	505.567.600,00	38,68	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.603.800,00	167.754.000,00	10.849.800,00	93,92	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.00.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.508.718.800,00	3.476.603.600,00	32.115.200,00	99,08	
<b>2.15.2.15.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21.549.980.062,00</b>	<b>19.933.085.730,00</b>	<b>1.616.894.332,00</b>	<b>92,49</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.15.2.15.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>162.415.800,00</b>	<b>144.548.250,00</b>	<b>17.867.550,00</b>	<b>88,99</b>	
2.15.2.15.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	101.961.700,00	88.971.500,00	12.990.200,00	87,25	
2.15.2.15.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	101.961.700,00	88.971.500,00	12.990.200,00	87,25	
2.15.2.15.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.454.100,00	55.576.750,00	4.877.350,00	91,93	
2.15.2.15.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.454.100,00	55.576.750,00	4.877.350,00	91,93	
<b>2.15.2.15.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>9.461.018.412,00</b>	<b>9.372.010.918,00</b>	<b>89.007.494,00</b>	<b>99,05</b>	
2.15.2.15.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.430.673.412,00	9.346.093.418,00	84.579.994,00	99,10	
2.15.2.15.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.430.673.412,00	9.346.093.418,00	84.579.994,00	99,10	
2.15.2.15.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	16.602.000,00	14.755.500,00	1.846.500,00	88,87	
2.15.2.15.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.602.000,00	14.755.500,00	1.846.500,00	88,87	
2.15.2.15.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	13.743.000,00	11.162.000,00	2.581.000,00	81,21	
2.15.2.15.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.743.000,00	11.162.000,00	2.581.000,00	81,21	
<b>2.15.2.15.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>543.995.400,00</b>	<b>419.246.700,00</b>	<b>124.748.700,00</b>	<b>77,06</b>	
2.15.2.15.0.0.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	477.239.400,00	363.952.700,00	113.286.700,00	76,26	
2.15.2.15.0.0.01.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	477.239.400,00	363.952.700,00	113.286.700,00	76,26	
2.15.2.15.0.0.01.2.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	66.756.000,00	55.294.000,00	11.462.000,00	82,83	
2.15.2.15.0.0.01.2.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.756.000,00	55.294.000,00	11.462.000,00	82,83	
<b>2.15.2.15.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>780.805.200,00</b>	<b>640.845.416,00</b>	<b>139.959.784,00</b>	<b>82,07</b>	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.635.300,00	10.024.100,00	611.200,00	94,25	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.635.300,00	10.024.100,00	611.200,00	94,25	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	93.737.400,00	91.595.900,00	2.141.500,00	97,71	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.737.400,00	91.595.900,00	2.141.500,00	97,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	85.150.200,00	81.611.500,00	3.538.700,00	95,84	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	85.150.200,00	81.611.500,00	3.538.700,00	95,84	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	291.593.300,00	199.030.050,00	92.563.250,00	68,25	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	291.593.300,00	199.030.050,00	92.563.250,00	68,25	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.000.000,00	13.210.000,00	10.790.000,00	55,04	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	13.210.000,00	10.790.000,00	55,04	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	6.000.000,00	4.250.000,00	1.750.000,00	70,83	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.250.000,00	1.750.000,00	70,83	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	269.689.000,00	241.123.866,00	28.565.134,00	89,40	
2.15.2.15.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	269.689.000,00	241.123.866,00	28.565.134,00	89,40	
<b>2.15.2.15.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>318.616.500,00</b>	<b>216.985.800,00</b>	<b>101.630.700,00</b>	<b>68,10</b>	
2.15.2.15.0.0.01.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	167.150.000,00	81.702.000,00	85.448.000,00	48,87	
2.15.2.15.0.0.01.2.07.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	167.150.000,00	81.702.000,00	85.448.000,00	48,87	
2.15.2.15.0.0.01.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	151.466.500,00	135.283.800,00	16.182.700,00	89,31	
2.15.2.15.0.0.01.2.07.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.571.000,00	15.180.000,00	391.000,00	97,48	
2.15.2.15.0.0.01.2.07.11.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.895.500,00	120.103.800,00	15.791.700,00	88,37	
<b>2.15.2.15.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>9.261.986.710,00</b>	<b>8.314.268.229,00</b>	<b>947.718.481,00</b>	<b>89,76</b>	
2.15.2.15.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.044.466.560,00	8.106.246.663,00	938.219.897,00	89,62	
2.15.2.15.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.044.466.560,00	8.106.246.663,00	938.219.897,00	89,62	
2.15.2.15.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	217.520.150,00	208.021.566,00	9.498.584,00	95,63	
2.15.2.15.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	217.520.150,00	208.021.566,00	9.498.584,00	95,63	
<b>2.15.2.15.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.021.142.040,00</b>	<b>825.180.417,00</b>	<b>195.961.623,00</b>	<b>80,80</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	926.834.500,00	738.177.417,00	188.657.083,00	79,64	
2.15.2.15.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	893.794.500,00	705.327.417,00	188.467.083,00	78,91	
2.15.2.15.0.0.01.2.09.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.040.000,00	32.850.000,00	190.000,00	99,42	
2.15.2.15.0.0.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	54.837.540,00	53.631.000,00	1.206.540,00	97,79	
2.15.2.15.0.0.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.399.540,00	10.890.000,00	509.540,00	95,53	
2.15.2.15.0.0.01.2.09.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.438.000,00	42.741.000,00	697.000,00	98,39	
2.15.2.15.0.0.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	39.470.000,00	33.372.000,00	6.098.000,00	84,55	
2.15.2.15.0.0.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.470.000,00	33.372.000,00	6.098.000,00	84,55	
<b>2.15.2.15.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>14.046.612.270,00</b>	<b>12.421.450.296,00</b>	<b>1.625.161.974,00</b>	<b>88,43</b>	
<b>2.15.2.15.0.0.02.2.02.</b>	<b>PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.428.493.370,00</b>	<b>8.282.065.840,00</b>	<b>1.146.427.530,00</b>	<b>87,84</b>	
2.15.2.15.0.0.02.2.02.01.	PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	4.268.298.020,00	4.109.503.798,00	158.794.222,00	96,27	
2.15.2.15.0.0.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	759.579.220,00	632.900.198,00	126.679.022,00	83,32	
2.15.2.15.0.0.02.2.02.01.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.508.718.800,00	3.476.603.600,00	32.115.200,00	99,08	
2.15.2.15.0.0.02.2.02.02.	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	1.088.059.000,00	566.030.216,00	522.028.784,00	52,02	
2.15.2.15.0.0.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	535.143.800,00	500.430.216,00	34.713.584,00	93,51	
2.15.2.15.0.0.02.2.02.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	552.915.200,00	65.600.000,00	487.315.200,00	11,86	
2.15.2.15.0.0.02.2.02.03.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN	3.451.028.750,00	3.035.851.726,00	415.177.024,00	87,96	
2.15.2.15.0.0.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.434.264.750,00	3.019.087.726,00	415.177.024,00	87,91	
2.15.2.15.0.0.02.2.02.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.764.000,00	16.764.000,00	-	100,00	
2.15.2.15.0.0.02.2.02.04.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	621.107.600,00	570.680.100,00	50.427.500,00	91,88	
2.15.2.15.0.0.02.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	442.319.600,00	402.112.100,00	40.207.500,00	90,90	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.0.02.2.02.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.238.000,00	74.723.000,00	515.000,00	99,31	
2.15.2.15.0.0.02.2.02.04.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.550.000,00	93.845.000,00	9.705.000,00	90,62	
<b>2.15.2.15.0.0.02.2.03.</b>	<b>PENGLOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C</b>	<b>1.140.878.300,00</b>	<b>1.068.714.904,00</b>	<b>72.163.396,00</b>	<b>93,67</b>	
2.15.2.15.0.0.02.2.03.03.	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL	1.022.960.000,00	956.033.204,00	66.926.796,00	93,45	
2.15.2.15.0.0.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	986.844.200,00	921.289.904,00	65.554.296,00	93,35	
2.15.2.15.0.0.02.2.03.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	3.575.300,00	924.700,00	79,45	
2.15.2.15.0.0.02.2.03.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.615.800,00	31.168.000,00	447.800,00	98,58	
2.15.2.15.0.0.02.2.03.04.	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL (FASILITAS UTAMA DAN PENDUKUNG)	117.918.300,00	112.681.700,00	5.236.600,00	95,55	
2.15.2.15.0.0.02.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.735.300,00	107.329.700,00	4.405.600,00	96,05	
2.15.2.15.0.0.02.2.03.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.183.000,00	5.352.000,00	831.000,00	86,55	
<b>2.15.2.15.0.0.02.2.04.</b>	<b>PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR</b>	<b>312.050.000,00</b>	<b>231.671.748,00</b>	<b>80.378.252,00</b>	<b>74,24</b>	
2.15.2.15.0.0.02.2.04.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	312.050.000,00	231.671.748,00	80.378.252,00	74,24	
2.15.2.15.0.0.02.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	312.050.000,00	231.671.748,00	80.378.252,00	74,24	
<b>2.15.2.15.0.0.02.2.05.</b>	<b>PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>1.354.541.000,00</b>	<b>1.260.791.188,00</b>	<b>93.749.812,00</b>	<b>93,07</b>	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.02.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.03.	REGISTRASI KENDARAAN WAJIB UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	49.750.000,00	48.950.000,00	800.000,00	98,39	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.750.000,00	48.950.000,00	800.000,00	98,39	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.04.	PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	162.000.000,00	159.358.500,00	2.641.500,00	98,36	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	159.358.500,00	2.641.500,00	98,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.0.02.2.05.05.	SOSIALISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	33.516.000,00	15.066.000,00	18.450.000,00	44,95	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.516.000,00	15.066.000,00	18.450.000,00	44,95	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.06.	IDENTIFIKASI DAN ANALISIS POTENSI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI	5.000.000,00	4.026.500,00	973.500,00	80,53	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.026.500,00	973.500,00	80,53	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.07.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	1.059.875.000,00	1.004.204.688,00	55.670.312,00	94,74	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.059.875.000,00	1.004.204.688,00	55.670.312,00	94,74	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.10.	MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	32.400.000,00	29.185.500,00	3.214.500,00	90,07	
2.15.2.15.0.0.02.2.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	29.185.500,00	3.214.500,00	90,07	
<b>2.15.2.15.0.0.02.2.06.</b>	<b>PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>842.892.700,00</b>	<b>714.460.048,00</b>	<b>128.432.652,00</b>	<b>84,76</b>	
2.15.2.15.0.0.02.2.06.01.	PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	359.173.500,00	325.916.548,00	33.256.952,00	90,74	
2.15.2.15.0.0.02.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	359.173.500,00	325.916.548,00	33.256.952,00	90,74	
2.15.2.15.0.0.02.2.06.03.	UJI COBA DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	460.040.000,00	372.556.000,00	87.484.000,00	80,98	
2.15.2.15.0.0.02.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	460.040.000,00	372.556.000,00	87.484.000,00	80,98	
2.15.2.15.0.0.02.2.06.05.	FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN/KOTA	23.679.200,00	15.987.500,00	7.691.700,00	67,51	
2.15.2.15.0.0.02.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.679.200,00	15.987.500,00	7.691.700,00	67,51	
<b>2.15.2.15.0.0.02.2.07.</b>	<b>PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>48.175.400,00</b>	<b>18.938.500,00</b>	<b>29.236.900,00</b>	<b>39,31</b>	
2.15.2.15.0.0.02.2.07.01.	PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA ANDALALIN	48.175.400,00	18.938.500,00	29.236.900,00	39,31	
2.15.2.15.0.0.02.2.07.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.175.400,00	18.938.500,00	29.236.900,00	39,31	
<b>2.15.2.15.0.0.02.2.08.</b>	<b>AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN</b>	<b>303.580.400,00</b>	<b>267.983.418,00</b>	<b>35.596.982,00</b>	<b>88,27</b>	
2.15.2.15.0.0.02.2.08.02.	PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	23.815.600,00	10.921.000,00	12.894.600,00	45,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.0.02.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.815.600,00	10.921.000,00	12.894.600,00	45,85	
2.15.2.15.0.0.02.2.08.03.	PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN TERMINAL	23.167.100,00	21.792.700,00	1.374.400,00	94,06	
2.15.2.15.0.0.02.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.167.100,00	21.792.700,00	1.374.400,00	94,06	
2.15.2.15.0.0.02.2.08.04.	PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA	233.373.700,00	212.169.568,00	21.204.132,00	90,91	
2.15.2.15.0.0.02.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	233.373.700,00	212.169.568,00	21.204.132,00	90,91	
2.15.2.15.0.0.02.2.08.05.	PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM	23.224.000,00	23.100.150,00	123.850,00	99,46	
2.15.2.15.0.0.02.2.08.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.224.000,00	23.100.150,00	123.850,00	99,46	
<b>2.15.2.15.0.0.02.2.09.</b>	<b>PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>115.893.300,00</b>	<b>97.071.550,00</b>	<b>18.821.750,00</b>	<b>83,75</b>	
2.15.2.15.0.0.02.2.09.01.	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.133.100,00	4.659.200,00	7.473.900,00	38,40	
2.15.2.15.0.0.02.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.133.100,00	4.659.200,00	7.473.900,00	38,40	
2.15.2.15.0.0.02.2.09.02.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	103.760.200,00	92.412.350,00	11.347.850,00	89,06	
2.15.2.15.0.0.02.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.760.200,00	92.412.350,00	11.347.850,00	89,06	
<b>2.15.2.15.0.0.02.2.11.</b>	<b>PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>500.107.800,00</b>	<b>479.753.100,00</b>	<b>20.354.700,00</b>	<b>95,92</b>	
2.15.2.15.0.0.02.2.11.03.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.107.800,00	479.753.100,00	20.354.700,00	95,92	
2.15.2.15.0.0.02.2.11.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	500.107.800,00	479.753.100,00	20.354.700,00	95,92	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>35.596.592.332,00</b>	<b>32.354.536.026,00</b>	<b>3.242.056.306,00</b>	<b>90,89</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(34.308.117.332,00)</b>	<b>(30.825.144.986,00)</b>	<b>(3.001.140.266,00)</b>	<b>89,84</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(34.308.117.332,00)</b>	<b>(30.825.144.986,00)</b>	<b>-</b>	<b>89,84</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 2.16.2.24.2.23.05. - Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.16.2.16.2.24.2.23.05.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>431.612.791,00</b>	<b>31.612.791,00</b>	<b>107,90</b>	
<b>2.16.2.16.2.24.2.23.05.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>431.612.791,00</b>	<b>31.612.791,00</b>	<b>107,90</b>	
2.16.2.16.2.24.2.23.05.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	400.000.000,00	431.612.791,00	31.612.791,00	107,90	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>431.612.791,00</b>	<b>31.612.791,00</b>	<b>107,90</b>	
<b>2.16.2.16.2.24.2.23.05.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>18.980.171.637,00</b>	<b>17.242.558.261,00</b>	<b>1.737.613.376,00</b>	<b>90,84</b>	
<b>2.16.2.16.2.24.2.23.05.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13.690.183.217,00</b>	<b>12.706.074.602,00</b>	<b>984.108.615,00</b>	<b>92,81</b>	
2.16.2.16.2.24.2.23.05.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.735.966.617,00	7.590.421.984,00	145.544.633,00	98,11	
2.16.2.16.2.24.2.23.05.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.954.216.600,00	5.115.652.618,00	838.563.982,00	85,91	
<b>2.16.2.16.2.24.2.23.05.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.289.988.420,00</b>	<b>4.536.483.659,00</b>	<b>753.504.761,00</b>	<b>85,75</b>	
2.16.2.16.2.24.2.23.05.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.865.639.820,00	3.601.446.943,00	264.192.877,00	93,16	
2.16.2.16.2.24.2.23.05.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.330.000.000,00	843.482.041,00	486.517.959,00	63,41	
2.16.2.16.2.24.2.23.05.00.00.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	94.348.600,00	91.554.675,00	2.793.925,00	97,03	
<b>2.16.2.16.2.2.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.357.436.237,00</b>	<b>8.191.653.117,00</b>	<b>165.783.120,00</b>	<b>98,01</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.16.2.16.2.2.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>15.020.000,00</b>	<b>15.010.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>99,93</b>	
2.16.2.16.2.2.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.020.000,00	5.020.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.2.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.020.000,00	5.020.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.2.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
2.16.2.16.2.2.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
<b>2.16.2.16.2.2.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7.787.016.617,00</b>	<b>7.637.218.954,00</b>	<b>149.797.663,00</b>	<b>98,07</b>	
2.16.2.16.2.2.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.735.966.617,00	7.590.421.984,00	145.544.633,00	98,11	
2.16.2.16.2.2.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.735.966.617,00	7.590.421.984,00	145.544.633,00	98,11	
2.16.2.16.2.2.01.2.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	51.050.000,00	46.796.970,00	4.253.030,00	91,66	
2.16.2.16.2.2.01.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.050.000,00	46.796.970,00	4.253.030,00	91,66	
<b>2.16.2.16.2.2.01.2.03.</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>23.012.000,00</b>	<b>21.336.290,00</b>	<b>1.675.710,00</b>	<b>92,71</b>	
2.16.2.16.2.2.01.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	23.012.000,00	21.336.290,00	1.675.710,00	92,71	
2.16.2.16.2.2.01.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.012.000,00	21.336.290,00	1.675.710,00	92,71	
<b>2.16.2.16.2.2.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
2.16.2.16.2.2.01.2.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.2.01.2.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
<b>2.16.2.16.2.2.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>294.680.420,00</b>	<b>292.410.376,00</b>	<b>2.270.044,00</b>	<b>99,22</b>	
2.16.2.16.2.2.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	91.503.720,00	89.588.523,00	1.915.197,00	97,90	
2.16.2.16.2.2.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.137.000,00	32.032.000,00	105.000,00	99,67	
2.16.2.16.2.2.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.366.720,00	57.556.523,00	1.810.197,00	96,95	
2.16.2.16.2.2.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	29.298.200,00	29.284.600,00	13.600,00	99,95	
2.16.2.16.2.2.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.298.200,00	29.284.600,00	13.600,00	99,95	
2.16.2.16.2.2.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.638.500,00	12.632.700,00	5.800,00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.2.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.638.500,00	12.632.700,00	5.800,00	99,95	
2.16.2.16.2.2.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	161.240.000,00	160.904.553,00	335.447,00	99,79	
2.16.2.16.2.2.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	161.240.000,00	160.904.553,00	335.447,00	99,79	
<b>2.16.2.16.2.2.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>90.038.100,00</b>	<b>82.536.997,00</b>	<b>7.501.103,00</b>	<b>91,66</b>	
2.16.2.16.2.2.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	39.430.000,00	35.536.447,00	3.893.553,00	90,12	
2.16.2.16.2.2.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.430.000,00	35.536.447,00	3.893.553,00	90,12	
2.16.2.16.2.2.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.600.000,00	2.938.380,00	661.620,00	81,62	
2.16.2.16.2.2.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	2.938.380,00	661.620,00	81,62	
2.16.2.16.2.2.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	47.008.100,00	44.062.170,00	2.945.930,00	93,73	
2.16.2.16.2.2.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.008.100,00	44.062.170,00	2.945.930,00	93,73	
<b>2.16.2.16.2.2.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>144.869.100,00</b>	<b>140.340.500,00</b>	<b>4.528.600,00</b>	<b>96,87</b>	
2.16.2.16.2.2.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	65.739.100,00	61.435.000,00	4.304.100,00	93,45	
2.16.2.16.2.2.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.739.100,00	61.435.000,00	4.304.100,00	93,45	
2.16.2.16.2.2.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	45.630.000,00	45.405.500,00	224.500,00	99,50	
2.16.2.16.2.2.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.630.000,00	45.405.500,00	224.500,00	99,50	
2.16.2.16.2.2.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	33.500.000,00	33.500.000,00	-	100,00	
2.16.2.16.2.2.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	33.500.000,00	-	100,00	
<b>2.16.2.16.2.2.02.</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>2.512.031.800,00</b>	<b>2.148.646.459,00</b>	<b>363.385.341,00</b>	<b>85,53</b>	
<b>2.16.2.16.2.2.02.2.01.</b>	<b>PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.512.031.800,00</b>	<b>2.148.646.459,00</b>	<b>363.385.341,00</b>	<b>85,53</b>	
2.16.2.16.2.2.02.2.01.05.	PENGLOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	209.486.600,00	186.468.347,00	23.018.253,00	89,01	
2.16.2.16.2.2.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	209.486.600,00	186.468.347,00	23.018.253,00	89,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.2.2.02.2.01.06.	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	140.700.000,00	128.729.341,00	11.970.659,00	91,49	
2.16.2.16.2.2.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.700.000,00	128.729.341,00	11.970.659,00	91,49	
2.16.2.16.2.2.02.2.01.07.	LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	2.161.845.200,00	1.833.448.771,00	328.396.429,00	84,80	
2.16.2.16.2.2.02.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.133.962.000,00	1.805.587.371,00	328.374.629,00	84,61	
2.16.2.16.2.2.02.2.01.07.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.883.200,00	27.861.400,00	21.800,00	99,92	
<b>2.16.2.16.2.2.03.</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>7.036.766.600,00</b>	<b>6.070.058.257,00</b>	<b>966.708.343,00</b>	<b>86,26</b>	
<b>2.16.2.16.2.2.03.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.433.895.500,00</b>	<b>1.422.705.661,00</b>	<b>11.189.839,00</b>	<b>99,21</b>	
2.16.2.16.2.2.03.2.01.03.	PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	1.433.895.500,00	1.422.705.661,00	11.189.839,00	99,21	
2.16.2.16.2.2.03.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.204.123.000,00	1.197.928.361,00	6.194.639,00	99,48	
2.16.2.16.2.2.03.2.01.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.772.500,00	224.777.300,00	4.995.200,00	97,82	
<b>2.16.2.16.2.2.03.2.02.</b>	<b>PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.602.871.100,00</b>	<b>4.647.352.596,00</b>	<b>955.518.504,00</b>	<b>82,94</b>	
2.16.2.16.2.2.03.2.02.03.	PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH	5.166.048.000,00	4.406.224.211,00	759.823.789,00	85,29	
2.16.2.16.2.2.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	346.745.800,00	331.580.450,00	15.165.350,00	95,62	
2.16.2.16.2.2.03.2.02.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.469.702.200,00	3.213.671.720,00	256.030.480,00	92,62	
2.16.2.16.2.2.03.2.02.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.330.000.000,00	843.482.041,00	486.517.959,00	63,41	
2.16.2.16.2.2.03.2.02.03.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.600.000,00	17.490.000,00	2.110.000,00	89,23	
2.16.2.16.2.2.03.2.02.08.	PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	214.543.000,00	208.403.485,00	6.139.515,00	97,13	
2.16.2.16.2.2.03.2.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	190.187.000,00	184.903.485,00	5.283.515,00	97,22	
2.16.2.16.2.2.03.2.02.08.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.356.000,00	23.500.000,00	856.000,00	96,48	
2.16.2.16.2.2.03.2.02.09.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS	222.280.100,00	32.724.900,00	189.555.200,00	14,72	
2.16.2.16.2.2.03.2.02.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	222.280.100,00	32.724.900,00	189.555.200,00	14,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.20.2.16.2.2.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>258.061.400,00</b>	<b>230.043.194,00</b>	<b>28.018.206,00</b>	<b>89,14</b>	
<b>2.20.2.16.2.2.02.2.01.</b>	<b>PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>258.061.400,00</b>	<b>230.043.194,00</b>	<b>28.018.206,00</b>	<b>89,14</b>	
2.20.2.16.2.2.02.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	258.061.400,00	230.043.194,00	28.018.206,00	89,14	
2.20.2.16.2.2.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	237.766.400,00	210.113.194,00	27.653.206,00	88,36	
2.20.2.16.2.2.02.2.01.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.295.000,00	19.930.000,00	365.000,00	98,20	
<b>2.21.2.16.2.2.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>100.438.200,00</b>	<b>89.159.550,00</b>	<b>11.278.650,00</b>	<b>88,77</b>	
<b>2.21.2.16.2.2.02.2.01.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>58.300.000,00</b>	<b>55.526.300,00</b>	<b>2.773.700,00</b>	<b>95,24</b>	
2.21.2.16.2.2.02.2.01.02.	PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.800.000,00	28.207.250,00	2.592.750,00	91,58	
2.21.2.16.2.2.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	28.207.250,00	2.592.750,00	91,58	
2.21.2.16.2.2.02.2.01.04.	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.500.000,00	27.319.050,00	180.950,00	99,34	
2.21.2.16.2.2.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	27.319.050,00	180.950,00	99,34	
<b>2.21.2.16.2.2.02.2.02.</b>	<b>PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>42.138.200,00</b>	<b>33.633.250,00</b>	<b>8.504.950,00</b>	<b>79,81</b>	
2.21.2.16.2.2.02.2.02.01.	OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.138.200,00	33.633.250,00	8.504.950,00	79,81	
2.21.2.16.2.2.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.138.200,00	33.633.250,00	8.504.950,00	79,81	
<b>2.23.2.16.2.2.02.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>373.467.800,00</b>	<b>359.925.860,00</b>	<b>13.541.940,00</b>	<b>96,37</b>	
<b>2.23.2.16.2.2.02.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>323.836.800,00</b>	<b>311.744.860,00</b>	<b>12.091.940,00</b>	<b>96,26</b>	
2.23.2.16.2.2.02.2.01.02.	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	312.736.800,00	302.544.860,00	10.191.940,00	96,74	
2.23.2.16.2.2.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	206.800.000,00	197.380.185,00	9.419.815,00	95,44	
2.23.2.16.2.2.02.2.01.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.188.200,00	31.100.000,00	88.200,00	99,71	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.16.2.2.02.2.01.02.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	74.748.600,00	74.064.675,00	683.925,00	99,08	
2.23.2.16.2.2.02.2.01.04.	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	10.600.000,00	9.200.000,00	1.400.000,00	86,79	
2.23.2.16.2.2.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	9.200.000,00	1.400.000,00	86,79	
2.23.2.16.2.2.02.2.01.06.	PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	500.000,00	-	500.000,00	-	
2.23.2.16.2.2.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	-	500.000,00	-	
<b>2.23.2.16.2.2.02.2.02.</b>	<b>PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>49.631.000,00</b>	<b>48.181.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>97,07</b>	
2.23.2.16.2.2.02.2.02.01.	SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	18.200.000,00	16.750.000,00	1.450.000,00	92,03	
2.23.2.16.2.2.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	16.750.000,00	1.450.000,00	92,03	
2.23.2.16.2.2.02.2.02.04.	PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	31.431.000,00	31.431.000,00	-	100,00	
2.23.2.16.2.2.02.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.431.000,00	31.431.000,00	-	100,00	
<b>2.24.2.16.2.2.02.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>312.869.600,00</b>	<b>142.731.824,00</b>	<b>170.137.776,00</b>	<b>45,62</b>	
<b>2.24.2.16.2.2.02.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.946.400,00</b>	<b>5.696.000,00</b>	<b>6.250.400,00</b>	<b>47,67</b>	
2.24.2.16.2.2.02.2.01.02.	PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS	11.946.400,00	5.696.000,00	6.250.400,00	47,67	
2.24.2.16.2.2.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.946.400,00	5.696.000,00	6.250.400,00	47,67	
<b>2.24.2.16.2.2.02.2.02.</b>	<b>PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>291.625.000,00</b>	<b>127.901.124,00</b>	<b>163.723.876,00</b>	<b>43,85</b>	
2.24.2.16.2.2.02.2.02.02.	AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	291.625.000,00	127.901.124,00	163.723.876,00	43,85	
2.24.2.16.2.2.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	291.625.000,00	127.901.124,00	163.723.876,00	43,85	
<b>2.24.2.16.2.2.02.2.03.</b>	<b>PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.298.200,00</b>	<b>9.134.700,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>98,24</b>	
2.24.2.16.2.2.02.2.03.02.	PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.298.200,00	9.134.700,00	163.500,00	98,24	
2.24.2.16.2.2.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.222.200,00	6.084.700,00	137.500,00	97,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.24.2.16.2.2.02.2.03.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.076.000,00	3.050.000,00	26.000,00	99,15	
<b>2.24.2.16.2.2.03.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>6.840.000,00</b>	<b>12.560.000,00</b>	<b>35,25</b>	
<b>2.24.2.16.2.2.03.2.01.</b>	<b>PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN</b>	<b>19.400.000,00</b>	<b>6.840.000,00</b>	<b>12.560.000,00</b>	<b>35,25</b>	
2.24.2.16.2.2.03.2.01.01.	PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	19.400.000,00	6.840.000,00	12.560.000,00	35,25	
2.24.2.16.2.2.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	6.840.000,00	12.560.000,00	35,25	
<b>2.24.2.16.2.2.04.</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>36,08</b>	
<b>2.24.2.16.2.2.04.2.01.</b>	<b>PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>36,08</b>	
2.24.2.16.2.2.04.2.01.02.	PENYEDIAAN DAFTAR DAN PENETAPAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP	9.700.000,00	3.500.000,00	6.200.000,00	36,08	
2.24.2.16.2.2.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	3.500.000,00	6.200.000,00	36,08	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>18.980.171.637,00</b>	<b>17.242.558.261,00</b>	<b>1.737.613.376,00</b>	<b>90,84</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(18.580.171.637,00)</b>	<b>(16.810.945.470,00)</b>	<b>(1.706.000.585,00)</b>	<b>90,47</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(18.580.171.637,00)</b>	<b>(16.810.945.470,00)</b>	<b>-</b>	<b>90,47</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.23. - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.18.2.18.0.00.0.00.23.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.552.574.234,00</b>	<b>152.574.234,00</b>	<b>110,89</b>	
<b>2.18.2.18.0.00.0.00.23.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.552.574.234,00</b>	<b>152.574.234,00</b>	<b>110,89</b>	
2.18.2.18.0.00.0.00.23.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	152.574.234,00	110,89	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.552.574.234,00</b>	<b>152.574.234,00</b>	<b>110,89</b>	
<b>2.18.2.18.0.00.0.00.23.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>37.579.264.634,00</b>	<b>28.275.037.195,00</b>	<b>9.304.227.439,00</b>	<b>75,24</b>	
<b>2.18.2.18.0.00.0.00.23.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>15.179.265.634,00</b>	<b>11.437.795.926,00</b>	<b>3.741.469.708,00</b>	<b>75,35</b>	
2.18.2.18.0.00.0.00.23.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.966.491.000,00	6.076.232.910,00	890.258.090,00	87,22	
2.18.2.18.0.00.0.00.23.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.212.774.634,00	5.361.563.016,00	2.851.211.618,00	65,28	
<b>2.18.2.18.0.00.0.00.23.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>22.399.999.000,00</b>	<b>16.837.241.269,00</b>	<b>5.562.757.731,00</b>	<b>75,16</b>	
2.18.2.18.0.00.0.00.23.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.987.935.000,00	3.216.612.532,00	1.771.322.468,00	64,48	
2.18.2.18.0.00.0.00.23.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.300.000.000,00	13.560.482.737,00	3.739.517.263,00	78,38	
2.18.2.18.0.00.0.00.23.00.00.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	112.064.000,00	60.146.000,00	51.918.000,00	53,67	
<b>2.18.2.18.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>34.940.890.634,00</b>	<b>26.015.531.437,00</b>	<b>8.925.359.197,00</b>	<b>74,45</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.18.2.18.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>203.227.100,00</b>	<b>181.289.424,00</b>	<b>21.937.676,00</b>	<b>89,20</b>	
2.18.2.18.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	43.533.400,00	33.652.600,00	9.880.800,00	77,30	
2.18.2.18.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.533.400,00	33.652.600,00	9.880.800,00	77,30	
2.18.2.18.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	159.693.700,00	147.636.824,00	12.056.876,00	92,44	
2.18.2.18.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	159.693.700,00	147.636.824,00	12.056.876,00	92,44	
<b>2.18.2.18.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>6.978.552.400,00</b>	<b>6.088.254.310,00</b>	<b>890.298.090,00</b>	<b>87,24</b>	
2.18.2.18.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.966.491.000,00	6.076.232.910,00	890.258.090,00	87,22	
2.18.2.18.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.966.491.000,00	6.076.232.910,00	890.258.090,00	87,22	
2.18.2.18.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.013.800,00	5.973.800,00	40.000,00	99,33	
2.18.2.18.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.013.800,00	5.973.800,00	40.000,00	99,33	
2.18.2.18.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	6.047.600,00	6.047.600,00	-	100,00	
2.18.2.18.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.047.600,00	6.047.600,00	-	100,00	
<b>2.18.2.18.0.0.01.2.03.</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>50.400.000,00</b>	<b>10.007.275,00</b>	<b>40.392.725,00</b>	<b>19,85</b>	
2.18.2.18.0.0.01.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	50.400.000,00	10.007.275,00	40.392.725,00	19,85	
2.18.2.18.0.0.01.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	10.007.275,00	40.392.725,00	19,85	
<b>2.18.2.18.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>65.600.000,00</b>	<b>64.287.500,00</b>	<b>1.312.500,00</b>	<b>97,99</b>	
2.18.2.18.0.0.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	65.600.000,00	64.287.500,00	1.312.500,00	97,99	
2.18.2.18.0.0.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.600.000,00	64.287.500,00	1.312.500,00	97,99	
<b>2.18.2.18.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>6.239.941.350,00</b>	<b>4.131.285.553,00</b>	<b>2.108.655.797,00</b>	<b>66,20</b>	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.639.217.800,00	3.593.496.432,00	2.045.721.368,00	63,72	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	539.218.800,00	316.737.900,00	222.480.900,00	58,74	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.987.935.000,00	3.216.612.532,00	1.771.322.468,00	64,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.0.01.2.06.02.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	112.064.000,00	60.146.000,00	51.918.000,00	53,67	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	127.357.900,00	122.570.024,00	4.787.876,00	96,24	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	127.357.900,00	122.570.024,00	4.787.876,00	96,24	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	140.728.000,00	134.438.200,00	6.289.800,00	95,53	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.728.000,00	134.438.200,00	6.289.800,00	95,53	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	109.575.650,00	109.575.000,00	650,00	99,99	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	109.575.650,00	109.575.000,00	650,00	99,99	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	69.150.000,00	17.350.000,00	51.800.000,00	25,09	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.150.000,00	17.350.000,00	51.800.000,00	25,09	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	153.912.000,00	153.855.897,00	56.103,00	99,96	
2.18.2.18.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	153.912.000,00	153.855.897,00	56.103,00	99,96	
<b>2.18.2.18.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>19.120.393.484,00</b>	<b>15.053.092.737,00</b>	<b>4.067.300.747,00</b>	<b>78,72</b>	
2.18.2.18.0.0.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	19.120.393.484,00	15.053.092.737,00	4.067.300.747,00	78,72	
2.18.2.18.0.0.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.393.484,00	1.492.610.000,00	327.783.484,00	81,99	
2.18.2.18.0.0.01.2.07.10.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.300.000.000,00	13.560.482.737,00	3.739.517.263,00	78,38	
<b>2.18.2.18.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.776.675.700,00</b>	<b>376.189.539,00</b>	<b>1.400.486.161,00</b>	<b>21,17</b>	
2.18.2.18.0.0.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	6.890.000,00	3.110.000,00	68,90	
2.18.2.18.0.0.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.890.000,00	3.110.000,00	68,90	
2.18.2.18.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.254.000.000,00	247.825.975,00	1.006.174.025,00	19,76	
2.18.2.18.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.254.000.000,00	247.825.975,00	1.006.174.025,00	19,76	
2.18.2.18.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	512.675.700,00	121.473.564,00	391.202.136,00	23,69	
2.18.2.18.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	512.675.700,00	121.473.564,00	391.202.136,00	23,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.18.2.18.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>506.100.600,00</b>	<b>111.125.099,00</b>	<b>394.975.501,00</b>	<b>21,95</b>	
2.18.2.18.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	127.360.000,00	84.625.099,00	42.734.901,00	66,44	
2.18.2.18.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	127.360.000,00	84.625.099,00	42.734.901,00	66,44	
2.18.2.18.0.0.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	378.740.600,00	26.500.000,00	352.240.600,00	6,99	
2.18.2.18.0.0.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	378.740.600,00	26.500.000,00	352.240.600,00	6,99	
<b>2.18.2.18.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>445.291.600,00</b>	<b>432.541.600,00</b>	<b>12.750.000,00</b>	<b>97,13</b>	
<b>2.18.2.18.0.0.02.2.01.</b>	<b>PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>285.291.600,00</b>	<b>274.281.600,00</b>	<b>11.010.000,00</b>	<b>96,14</b>	
2.18.2.18.0.0.02.2.01.01.	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	138.602.600,00	128.092.600,00	10.510.000,00	92,41	
2.18.2.18.0.0.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.602.600,00	128.092.600,00	10.510.000,00	92,41	
2.18.2.18.0.0.02.2.01.02.	EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	146.689.000,00	146.189.000,00	500.000,00	99,65	
2.18.2.18.0.0.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	146.689.000,00	146.189.000,00	500.000,00	99,65	
<b>2.18.2.18.0.0.02.2.02.</b>	<b>PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>158.260.000,00</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>98,91</b>	
2.18.2.18.0.0.02.2.02.02.	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA KABUPATEN/KOTA	160.000.000,00	158.260.000,00	1.740.000,00	98,91	
2.18.2.18.0.0.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	158.260.000,00	1.740.000,00	98,91	
<b>2.18.2.18.0.0.04.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>857.939.400,00</b>	<b>645.518.340,00</b>	<b>212.421.060,00</b>	<b>75,24</b>	
<b>2.18.2.18.0.0.04.2.01.</b>	<b>PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>857.939.400,00</b>	<b>645.518.340,00</b>	<b>212.421.060,00</b>	<b>75,24</b>	
2.18.2.18.0.0.04.2.01.01.	PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	406.949.000,00	220.649.124,00	186.299.876,00	54,22	
2.18.2.18.0.0.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	406.949.000,00	220.649.124,00	186.299.876,00	54,22	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.0.04.2.01.02.	PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	102.048.300,00	98.320.074,00	3.728.226,00	96,34	
2.18.2.18.0.0.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	102.048.300,00	98.320.074,00	3.728.226,00	96,34	
2.18.2.18.0.0.04.2.01.03.	PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	122.434.700,00	116.593.348,00	5.841.352,00	95,22	
2.18.2.18.0.0.04.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.434.700,00	116.593.348,00	5.841.352,00	95,22	
2.18.2.18.0.0.04.2.01.04.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH	226.507.400,00	209.955.794,00	16.551.606,00	92,69	
2.18.2.18.0.0.04.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	226.507.400,00	209.955.794,00	16.551.606,00	92,69	
<b>2.18.2.18.0.0.05.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>532.562.000,00</b>	<b>427.457.900,00</b>	<b>105.104.100,00</b>	<b>80,26</b>	
<b>2.18.2.18.0.0.05.2.01.</b>	<b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>532.562.000,00</b>	<b>427.457.900,00</b>	<b>105.104.100,00</b>	<b>80,26</b>	
2.18.2.18.0.0.05.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	48.050.400,00	31.458.400,00	16.592.000,00	65,46	
2.18.2.18.0.0.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.050.400,00	31.458.400,00	16.592.000,00	65,46	
2.18.2.18.0.0.05.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	365.957.500,00	339.541.400,00	26.416.100,00	92,78	
2.18.2.18.0.0.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	365.957.500,00	339.541.400,00	26.416.100,00	92,78	
2.18.2.18.0.0.05.2.01.03.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	118.554.100,00	56.458.100,00	62.096.000,00	47,62	
2.18.2.18.0.0.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.554.100,00	56.458.100,00	62.096.000,00	47,62	
<b>2.18.2.18.0.0.06.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>802.581.000,00</b>	<b>753.987.918,00</b>	<b>48.593.082,00</b>	<b>93,94</b>	
<b>2.18.2.18.0.0.06.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>802.581.000,00</b>	<b>753.987.918,00</b>	<b>48.593.082,00</b>	<b>93,94</b>	
2.18.2.18.0.0.06.2.01.01.	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	802.581.000,00	753.987.918,00	48.593.082,00	93,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.18.0.0.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	802.581.000,00	753.987.918,00	48.593.082,00	93,94	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>37.579.264.634,00</b>	<b>28.275.037.195,00</b>	<b>9.304.227.439,00</b>	<b>75,24</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(36.179.264.634,00)</b>	<b>(26.722.462.961,00)</b>	<b>(9.151.653.205,00)</b>	<b>73,86</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(36.179.264.634,00)</b>	<b>(26.722.462.961,00)</b>	<b>-</b>	<b>73,86</b>	



LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.22. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

ORGANISASI : 2.22.3.26.2.19.04. - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.22.2.22.3.26.2.19.04.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>144.327.999.680,00</b>	<b>21.021.345.709,00</b>	<b>123.306.653.971,00</b>	<b>14,56</b>	
<b>2.22.2.22.3.26.2.19.04.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>19.804.440.626,00</b>	<b>17.605.943.684,00</b>	<b>2.198.496.942,00</b>	<b>88,89</b>	
2.22.2.22.3.26.2.19.04.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.404.845.072,00	4.151.918.547,00	252.926.525,00	94,25	
2.22.2.22.3.26.2.19.04.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.099.595.554,00	5.404.396.387,00	1.695.199.167,00	76,12	
2.22.2.22.3.26.2.19.04.00.00.5.1.05.	Belanja Hibah	8.300.000.000,00	8.049.628.750,00	250.371.250,00	96,98	
<b>2.22.2.22.3.26.2.19.04.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>124.523.559.054,00</b>	<b>3.415.402.025,00</b>	<b>121.108.157.029,00</b>	<b>2,74</b>	
2.22.2.22.3.26.2.19.04.00.00.5.2.01.	Belanja Modal Tanah	5.688.460.000,00	379.076.400,00	5.309.383.600,00	6,66	
2.22.2.22.3.26.2.19.04.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	298.643.460,00	282.670.000,00	15.973.460,00	94,65	
2.22.2.22.3.26.2.19.04.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.536.455.594,00	2.753.655.625,00	115.782.799.969,00	2,32	
<b>2.22.2.22.3.2.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.073.940.011,00</b>	<b>5.654.790.013,00</b>	<b>419.149.998,00</b>	<b>93,09</b>	
<b>2.22.2.22.3.2.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>118.052.000,00</b>	<b>111.603.547,00</b>	<b>6.448.453,00</b>	<b>94,53</b>	
2.22.2.22.3.2.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	93.301.900,00	90.292.947,00	3.008.953,00	96,77	
2.22.2.22.3.2.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.301.900,00	90.292.947,00	3.008.953,00	96,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.22.2.22.3.2.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.750.100,00	21.310.600,00	3.439.500,00	86,10	
2.22.2.22.3.2.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.750.100,00	21.310.600,00	3.439.500,00	86,10	
<b>2.22.2.22.3.2.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>4.499.746.372,00</b>	<b>4.240.247.894,00</b>	<b>259.498.478,00</b>	<b>94,23</b>	
2.22.2.22.3.2.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.404.845.072,00	4.151.918.547,00	252.926.525,00	94,25	
2.22.2.22.3.2.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.404.845.072,00	4.151.918.547,00	252.926.525,00	94,25	
2.22.2.22.3.2.01.2.02.02.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	55.028.900,00	52.306.947,00	2.721.953,00	95,05	
2.22.2.22.3.2.01.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.028.900,00	52.306.947,00	2.721.953,00	95,05	
2.22.2.22.3.2.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.847.400,00	1.847.400,00	-	100,00	
2.22.2.22.3.2.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.847.400,00	1.847.400,00	-	100,00	
2.22.2.22.3.2.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	38.025.000,00	34.175.000,00	3.850.000,00	89,87	
2.22.2.22.3.2.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.025.000,00	34.175.000,00	3.850.000,00	89,87	
<b>2.22.2.22.3.2.01.2.03.</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>124.000.000,00</b>	<b>48.834.250,00</b>	<b>75.165.750,00</b>	<b>39,38</b>	
2.22.2.22.3.2.01.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	124.000.000,00	48.834.250,00	75.165.750,00	39,38	
2.22.2.22.3.2.01.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	124.000.000,00	48.834.250,00	75.165.750,00	39,38	
<b>2.22.2.22.3.2.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>826.806.560,00</b>	<b>804.406.641,00</b>	<b>22.399.919,00</b>	<b>97,29</b>	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.433.300,00	4.433.300,00	-	100,00	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.433.300,00	4.433.300,00	-	100,00	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	191.560.060,00	189.745.800,00	1.814.260,00	99,05	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	106.248.600,00	104.845.800,00	1.402.800,00	98,67	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.311.460,00	84.900.000,00	411.460,00	99,51	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.224.400,00	5.224.400,00	-	100,00	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.224.400,00	5.224.400,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.22.2.22.3.2.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	25.383.600,00	25.383.600,00	-	100,00	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.383.600,00	25.383.600,00	-	100,00	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	65.145.200,00	63.112.600,00	2.032.600,00	96,87	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.145.200,00	63.112.600,00	2.032.600,00	96,87	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	35.750.000,00	18.450.000,00	17.300.000,00	51,60	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.750.000,00	18.450.000,00	17.300.000,00	51,60	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	499.310.000,00	498.056.941,00	1.253.059,00	99,74	
2.22.2.22.3.2.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	499.310.000,00	498.056.941,00	1.253.059,00	99,74	
<b>2.22.2.22.3.2.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>93.165.200,00</b>	<b>66.941.250,00</b>	<b>26.223.950,00</b>	<b>71,85</b>	
2.22.2.22.3.2.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	44.002.000,00	19.201.603,00	24.800.397,00	43,63	
2.22.2.22.3.2.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.002.000,00	19.201.603,00	24.800.397,00	43,63	
2.22.2.22.3.2.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	49.163.200,00	47.739.647,00	1.423.553,00	97,10	
2.22.2.22.3.2.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.163.200,00	47.739.647,00	1.423.553,00	97,10	
<b>2.22.2.22.3.2.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>412.169.879,00</b>	<b>382.756.431,00</b>	<b>29.413.448,00</b>	<b>92,86</b>	
2.22.2.22.3.2.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	77.585.000,00	74.827.500,00	2.757.500,00	96,44	
2.22.2.22.3.2.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.585.000,00	74.827.500,00	2.757.500,00	96,44	
2.22.2.22.3.2.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	193.289.079,00	174.314.100,00	18.974.979,00	90,18	
2.22.2.22.3.2.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	193.289.079,00	174.314.100,00	18.974.979,00	90,18	
2.22.2.22.3.2.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	118.415.800,00	110.859.831,00	7.555.969,00	93,61	
2.22.2.22.3.2.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.415.800,00	110.859.831,00	7.555.969,00	93,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.22.2.22.3.2.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	22.880.000,00	22.755.000,00	125.000,00	99,45	
2.22.2.22.3.2.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.880.000,00	22.755.000,00	125.000,00	99,45	
<b>2.22.2.22.3.2.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>699.819.000,00</b>	<b>696.019.897,00</b>	<b>3.799.103,00</b>	<b>99,45</b>	
<b>2.22.2.22.3.2.02.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>335.361.700,00</b>	<b>333.340.450,00</b>	<b>2.021.250,00</b>	<b>99,39</b>	
2.22.2.22.3.2.02.2.01.01.	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	85.554.700,00	85.554.700,00	-	100,00	
2.22.2.22.3.2.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	85.554.700,00	85.554.700,00	-	100,00	
2.22.2.22.3.2.02.2.01.02.	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	249.807.000,00	247.785.750,00	2.021.250,00	99,19	
2.22.2.22.3.2.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.807.000,00	49.807.000,00	-	100,00	
2.22.2.22.3.2.02.2.01.02.5.1.05.	Belanja Hibah	200.000.000,00	197.978.750,00	2.021.250,00	98,98	
<b>2.22.2.22.3.2.02.2.02.</b>	<b>PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>364.457.300,00</b>	<b>362.679.447,00</b>	<b>1.777.853,00</b>	<b>99,51</b>	
2.22.2.22.3.2.02.2.02.01.	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	364.457.300,00	362.679.447,00	1.777.853,00	99,51	
2.22.2.22.3.2.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	364.457.300,00	362.679.447,00	1.777.853,00	99,51	
<b>2.19.2.22.3.2.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>887.616.100,00</b>	<b>854.786.577,00</b>	<b>32.829.523,00</b>	<b>96,30</b>	
<b>2.19.2.22.3.2.02.2.01.</b>	<b>PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>296.519.800,00</b>	<b>3.480.200,00</b>	<b>98,83</b>	
2.19.2.22.3.2.02.2.01.09.	PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA	300.000.000,00	296.519.800,00	3.480.200,00	98,83	
2.19.2.22.3.2.02.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	296.519.800,00	3.480.200,00	98,83	
<b>2.19.2.22.3.2.02.2.02.</b>	<b>PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>587.616.100,00</b>	<b>558.266.777,00</b>	<b>29.349.323,00</b>	<b>95,00</b>	
2.19.2.22.3.2.02.2.02.02.	PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA	587.616.100,00	558.266.777,00	29.349.323,00	95,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.22.3.2.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	237.616.100,00	208.266.777,00	29.349.323,00	87,64	
2.19.2.22.3.2.02.2.02.02.5.1.05.	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	-	100,00	
<b>2.19.2.22.3.2.03.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>129.672.137.264,00</b>	<b>9.562.994.697,00</b>	<b>120.109.142.567,00</b>	<b>7,37</b>	
<b>2.19.2.22.3.2.03.2.01.</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>120.925.627.864,00</b>	<b>1.276.332.469,00</b>	<b>119.649.295.395,00</b>	<b>1,05</b>	
2.19.2.22.3.2.03.2.01.03.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	120.925.627.864,00	1.276.332.469,00	119.649.295.395,00	1,05	
2.19.2.22.3.2.03.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.836.000,00	537.128.669,00	828.707.331,00	39,32	
2.19.2.22.3.2.03.2.01.03.5.2.01.	Belanja Modal Tanah	5.278.460.000,00	4.396.200,00	5.274.063.800,00	0,08	
2.19.2.22.3.2.03.2.01.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.332.000,00	197.770.000,00	15.562.000,00	92,70	
2.19.2.22.3.2.03.2.01.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.067.999.864,00	537.037.600,00	113.530.962.264,00	0,47	
<b>2.19.2.22.3.2.03.2.02.</b>	<b>PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.137.395.100,00</b>	<b>7.792.990.158,00</b>	<b>344.404.942,00</b>	<b>95,76</b>	
2.19.2.22.3.2.03.2.02.03.	PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN	8.137.395.100,00	7.792.990.158,00	344.404.942,00	95,76	
2.19.2.22.3.2.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	787.395.100,00	691.340.158,00	96.054.942,00	87,80	
2.19.2.22.3.2.03.2.02.03.5.1.05.	Belanja Hibah	7.350.000.000,00	7.101.650.000,00	248.350.000,00	96,62	
<b>2.19.2.22.3.2.03.2.04.</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>93.370.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>93,37</b>	
2.19.2.22.3.2.03.2.04.02.	PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN	100.000.000,00	93.370.000,00	6.630.000,00	93,37	
2.19.2.22.3.2.03.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	93.370.000,00	6.630.000,00	93,37	
<b>2.19.2.22.3.2.03.2.05.</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI</b>	<b>509.114.300,00</b>	<b>400.302.070,00</b>	<b>108.812.230,00</b>	<b>78,62</b>	
2.19.2.22.3.2.03.2.05.01.	PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI	309.114.300,00	204.452.070,00	104.662.230,00	66,14	
2.19.2.22.3.2.03.2.05.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	309.114.300,00	204.452.070,00	104.662.230,00	66,14	
2.19.2.22.3.2.03.2.05.02.	PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI	200.000.000,00	195.850.000,00	4.150.000,00	97,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.19.2.22.3.2.03.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	195.850.000,00	4.150.000,00	97,92	
<b>2.19.2.22.3.2.04.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	-	<b>100,00</b>	
<b>2.19.2.22.3.2.04.2.01.</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	-	<b>100,00</b>	
2.19.2.22.3.2.04.2.01.05.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
2.19.2.22.3.2.04.2.01.05.5.1.05.	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
<b>3.26.2.22.3.2.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>5.903.732.105,00</b>	<b>3.189.720.525,00</b>	<b>2.714.011.580,00</b>	<b>54,02</b>	
<b>3.26.2.22.3.2.02.2.03.</b>	<b>PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.903.732.105,00</b>	<b>3.189.720.525,00</b>	<b>2.714.011.580,00</b>	<b>54,02</b>	
3.26.2.22.3.2.02.2.03.02.	PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	586.000.000,00	525.730.200,00	60.269.800,00	89,71	
3.26.2.22.3.2.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	176.000.000,00	151.050.000,00	24.950.000,00	85,82	
3.26.2.22.3.2.02.2.03.02.5.2.01.	Belanja Modal Tanah	410.000.000,00	374.680.200,00	35.319.800,00	91,38	
3.26.2.22.3.2.02.2.03.06.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	139.000.000,00	129.971.000,00	9.029.000,00	93,50	
3.26.2.22.3.2.02.2.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	139.000.000,00	129.971.000,00	9.029.000,00	93,50	
3.26.2.22.3.2.02.2.03.07.	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	5.178.732.105,00	2.534.019.325,00	2.644.712.780,00	48,93	
3.26.2.22.3.2.02.2.03.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	710.276.375,00	317.401.300,00	392.875.075,00	44,68	
3.26.2.22.3.2.02.2.03.07.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.468.455.730,00	2.216.618.025,00	2.251.837.705,00	49,60	
<b>3.26.2.22.3.2.03.</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>36.238.000,00</b>	<b>13.762.000,00</b>	<b>72,47</b>	
<b>3.26.2.22.3.2.03.2.01.</b>	<b>PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>36.238.000,00</b>	<b>13.762.000,00</b>	<b>72,47</b>	
3.26.2.22.3.2.03.2.01.01.	PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	25.000.000,00	14.750.000,00	10.250.000,00	59,00	
3.26.2.22.3.2.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	14.750.000,00	10.250.000,00	59,00	
3.26.2.22.3.2.03.2.01.04.	PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI	25.000.000,00	21.488.000,00	3.512.000,00	85,95	
3.26.2.22.3.2.03.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.488.000,00	3.512.000,00	85,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.26.2.22.3.2.05.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>640.755.200,00</b>	<b>626.796.000,00</b>	<b>13.959.200,00</b>	<b>97,82</b>	
<b>3.26.2.22.3.2.05.2.01.</b>	<b>PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR</b>	<b>640.755.200,00</b>	<b>626.796.000,00</b>	<b>13.959.200,00</b>	<b>97,82</b>	
3.26.2.22.3.2.05.2.01.01.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	369.675.900,00	363.195.900,00	6.480.000,00	98,24	
3.26.2.22.3.2.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	369.675.900,00	363.195.900,00	6.480.000,00	98,24	
3.26.2.22.3.2.05.2.01.02.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	271.079.300,00	263.600.100,00	7.479.200,00	97,24	
3.26.2.22.3.2.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	271.079.300,00	263.600.100,00	7.479.200,00	97,24	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>144.327.999.680,00</b>	<b>21.021.345.709,00</b>	<b>123.306.653.971,00</b>	<b>14,56</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(144.327.999.680,00)</b>	<b>(21.021.345.709,00)</b>	<b>(123.306.653.971,00)</b>	<b>14,56</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(144.327.999.680,00)</b>	<b>(21.021.345.709,00)</b>	<b>-</b>	<b>14,56</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.30. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

ORGANISASI : 3.30.2.17.3.31.07. - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.572.095.500,00</b>	<b>1.717.326.502,00</b>	<b>145.231.002,00</b>	<b>109,23</b>	
<b>3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.572.095.500,00</b>	<b>1.717.326.502,00</b>	<b>145.231.002,00</b>	<b>109,23</b>	
3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.572.095.500,00	1.710.256.225,00	138.160.725,00	108,78	
3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	7.070.277,00	7.070.277,00	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.572.095.500,00</b>	<b>1.717.326.502,00</b>	<b>145.231.002,00</b>	<b>109,23</b>	
<b>3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>26.814.989.452,00</b>	<b>24.591.022.552,00</b>	<b>2.223.966.900,00</b>	<b>91,70</b>	
<b>3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>25.308.137.777,00</b>	<b>23.237.717.913,00</b>	<b>2.070.419.864,00</b>	<b>91,81</b>	
3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.739.783.000,00	8.388.826.728,00	350.956.272,00	95,98	
3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.061.210.777,00	14.438.317.185,00	1.622.893.592,00	89,89	
3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.5.1.04.	Belanja Subsidi	507.144.000,00	410.574.000,00	96.570.000,00	80,95	
<b>3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.506.851.675,00</b>	<b>1.353.304.639,00</b>	<b>153.547.036,00</b>	<b>89,81</b>	
3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.119.958.082,00	976.220.150,00	143.737.932,00	87,16	
3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	379.205.805,00	377.084.489,00	2.121.316,00	99,44	
3.30.3.30.2.17.3.31.07.00.00.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.687.788,00	-	7.687.788,00	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.30.3.30.2.1.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.014.875.100,00</b>	<b>9.610.652.475,00</b>	<b>404.222.625,00</b>	<b>95,96</b>	
<b>3.30.3.30.2.1.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>126.860.100,00</b>	<b>121.262.900,00</b>	<b>5.597.200,00</b>	<b>95,58</b>	
3.30.3.30.2.1.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	126.860.100,00	121.262.900,00	5.597.200,00	95,58	
3.30.3.30.2.1.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.860.100,00	121.262.900,00	5.597.200,00	95,58	
<b>3.30.3.30.2.1.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>8.798.063.600,00</b>	<b>8.446.462.928,00</b>	<b>351.600.672,00</b>	<b>96,00</b>	
3.30.3.30.2.1.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.739.783.000,00	8.388.826.728,00	350.956.272,00	95,98	
3.30.3.30.2.1.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.739.783.000,00	8.388.826.728,00	350.956.272,00	95,98	
3.30.3.30.2.1.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	47.180.600,00	46.536.200,00	644.400,00	98,63	
3.30.3.30.2.1.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.180.600,00	46.536.200,00	644.400,00	98,63	
<b>3.30.3.30.2.1.01.2.03.</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>34.905.000,00</b>	<b>21.350.125,00</b>	<b>13.554.875,00</b>	<b>61,16</b>	
3.30.3.30.2.1.01.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	34.905.000,00	21.350.125,00	13.554.875,00	61,16	
3.30.3.30.2.1.01.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.905.000,00	21.350.125,00	13.554.875,00	61,16	
<b>3.30.3.30.2.1.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>79.200.000,00</b>	<b>79.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
3.30.3.30.2.1.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	79.200.000,00	79.200.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000,00	79.200.000,00	-	100,00	
<b>3.30.3.30.2.1.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>552.414.400,00</b>	<b>552.379.400,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>99,99</b>	
3.30.3.30.2.1.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	29.524.800,00	29.524.800,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.524.800,00	29.524.800,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	49.997.800,00	49.997.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.2.1.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.997.800,00	49.997.800,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.582.700,00	3.582.700,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.582.700,00	3.582.700,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	126.742.500,00	126.707.500,00	35.000,00	99,97	
3.30.3.30.2.1.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.742.500,00	126.707.500,00	35.000,00	99,97	
3.30.3.30.2.1.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	197.566.600,00	197.566.600,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	197.566.600,00	197.566.600,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	145.000.000,00	145.000.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	145.000.000,00	-	100,00	
<b>3.30.3.30.2.1.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>98.322.000,00</b>	<b>86.054.797,00</b>	<b>12.267.203,00</b>	<b>87,52</b>	
3.30.3.30.2.1.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.000.000,00	832.897,00	11.167.103,00	6,94	
3.30.3.30.2.1.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	832.897,00	11.167.103,00	6,94	
3.30.3.30.2.1.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	86.322.000,00	85.221.900,00	1.100.100,00	98,72	
3.30.3.30.2.1.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.322.000,00	85.221.900,00	1.100.100,00	98,72	
<b>3.30.3.30.2.1.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>325.110.000,00</b>	<b>303.942.325,00</b>	<b>21.167.675,00</b>	<b>93,48</b>	
3.30.3.30.2.1.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	253.610.000,00	232.592.325,00	21.017.675,00	91,71	
3.30.3.30.2.1.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	253.610.000,00	232.592.325,00	21.017.675,00	91,71	
3.30.3.30.2.1.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	71.500.000,00	71.350.000,00	150.000,00	99,79	
3.30.3.30.2.1.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000,00	71.350.000,00	150.000,00	99,79	
<b>3.30.3.30.2.1.02.</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>112.650.000,00</b>	<b>93.900.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>83,35</b>	
<b>3.30.3.30.2.1.02.2.01.</b>	<b>PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN</b>	<b>98.025.000,00</b>	<b>87.175.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>88,93</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.2.1.02.2.01.01.	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	98.025.000,00	87.175.000,00	10.850.000,00	88,93	
3.30.3.30.2.1.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.025.000,00	87.175.000,00	10.850.000,00	88,93	
<b>3.30.3.30.2.1.02.2.02.</b>	<b>PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG</b>	<b>14.625.000,00</b>	<b>6.725.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>45,98</b>	
3.30.3.30.2.1.02.2.02.01.	FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	14.625.000,00	6.725.000,00	7.900.000,00	45,98	
3.30.3.30.2.1.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.625.000,00	6.725.000,00	7.900.000,00	45,98	
<b>3.30.3.30.2.1.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>4.398.382.900,00</b>	<b>4.098.463.621,00</b>	<b>299.919.279,00</b>	<b>93,18</b>	
<b>3.30.3.30.2.1.03.2.01.</b>	<b>PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>3.951.932.900,00</b>	<b>3.704.526.146,00</b>	<b>247.406.754,00</b>	<b>93,73</b>	
3.30.3.30.2.1.03.2.01.01.	PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	43.341.600,00	41.241.510,00	2.100.090,00	95,15	
3.30.3.30.2.1.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.341.600,00	41.241.510,00	2.100.090,00	95,15	
3.30.3.30.2.1.03.2.01.02.	FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.908.591.300,00	3.663.284.636,00	245.306.664,00	93,72	
3.30.3.30.2.1.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.886.100.300,00	3.645.884.636,00	240.215.664,00	93,81	
3.30.3.30.2.1.03.2.01.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.491.000,00	17.400.000,00	5.091.000,00	77,36	
<b>3.30.3.30.2.1.03.2.02.</b>	<b>PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA</b>	<b>446.450.000,00</b>	<b>393.937.475,00</b>	<b>52.512.525,00</b>	<b>88,23</b>	
3.30.3.30.2.1.03.2.02.01.	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	411.225.000,00	367.712.475,00	43.512.525,00	89,41	
3.30.3.30.2.1.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	411.225.000,00	367.712.475,00	43.512.525,00	89,41	
3.30.3.30.2.1.03.2.02.02.	PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	35.225.000,00	26.225.000,00	9.000.000,00	74,44	
3.30.3.30.2.1.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.225.000,00	26.225.000,00	9.000.000,00	74,44	
<b>3.30.3.30.2.1.04.</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>786.273.000,00</b>	<b>685.003.500,00</b>	<b>101.269.500,00</b>	<b>87,12</b>	
<b>3.30.3.30.2.1.04.2.01.</b>	<b>Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/ kota</b>	<b>21.450.000,00</b>	<b>21.450.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.30.3.30.2.1.04.2.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT	7.725.000,00	7.725.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.725.000,00	7.725.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.04.2.01.03.	PENGENDALIAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT	13.725.000,00	13.725.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.04.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.725.000,00	13.725.000,00	-	100,00	
<b>3.30.3.30.2.1.04.2.02.</b>	<b>PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA</b>	<b>764.823.000,00</b>	<b>663.553.500,00</b>	<b>101.269.500,00</b>	<b>86,75</b>	
3.30.3.30.2.1.04.2.02.01.	PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	32.025.000,00	32.025.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.04.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.025.000,00	32.025.000,00	-	100,00	
3.30.3.30.2.1.04.2.02.03.	PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERPANGKAP DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	732.798.000,00	631.528.500,00	101.269.500,00	86,18	
3.30.3.30.2.1.04.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	225.654.000,00	220.954.500,00	4.699.500,00	97,91	
3.30.3.30.2.1.04.2.02.03.5.1.04.	Belanja Subsidi	507.144.000,00	410.574.000,00	96.570.000,00	80,95	
<b>3.30.3.30.2.1.05.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>327.497.000,00</b>	<b>317.252.000,00</b>	<b>10.245.000,00</b>	<b>96,87</b>	
<b>3.30.3.30.2.1.05.2.01.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>327.497.000,00</b>	<b>317.252.000,00</b>	<b>10.245.000,00</b>	<b>96,87</b>	
3.30.3.30.2.1.05.2.01.01.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PRODUK EKSPOR UNGGULAN KABUPATEN/KOTA	168.047.000,00	163.267.000,00	4.780.000,00	97,15	
3.30.3.30.2.1.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	168.047.000,00	163.267.000,00	4.780.000,00	97,15	
3.30.3.30.2.1.05.2.01.02.	PAMERAN DAGANG NASIONAL	104.725.000,00	101.660.000,00	3.065.000,00	97,07	
3.30.3.30.2.1.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	104.725.000,00	101.660.000,00	3.065.000,00	97,07	
3.30.3.30.2.1.05.2.01.03.	PAMERAN DAGANG LOKAL	54.725.000,00	52.325.000,00	2.400.000,00	95,61	
3.30.3.30.2.1.05.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.725.000,00	52.325.000,00	2.400.000,00	95,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.30.3.30.2.1.06.</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>455.000.000,00</b>	<b>427.124.024,00</b>	<b>27.875.976,00</b>	<b>93,87</b>	
<b>3.30.3.30.2.1.06.2.01.</b>	<b>PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN</b>	<b>455.000.000,00</b>	<b>427.124.024,00</b>	<b>27.875.976,00</b>	<b>93,87</b>	
3.30.3.30.2.1.06.2.01.01.	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	369.974.000,00	347.414.024,00	22.559.976,00	93,90	
3.30.3.30.2.1.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	362.087.000,00	339.539.024,00	22.547.976,00	93,77	
3.30.3.30.2.1.06.2.01.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.887.000,00	7.875.000,00	12.000,00	99,84	
3.30.3.30.2.1.06.2.01.02.	PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	85.026.000,00	79.710.000,00	5.316.000,00	93,74	
3.30.3.30.2.1.06.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	85.026.000,00	79.710.000,00	5.316.000,00	93,74	
<b>3.30.3.30.2.1.07.</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>371.315.000,00</b>	<b>364.876.500,00</b>	<b>6.438.500,00</b>	<b>98,26</b>	
<b>3.30.3.30.2.1.07.2.01.</b>	<b>PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>371.315.000,00</b>	<b>364.876.500,00</b>	<b>6.438.500,00</b>	<b>98,26</b>	
3.30.3.30.2.1.07.2.01.01.	PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	319.095.000,00	312.846.500,00	6.248.500,00	98,04	
3.30.3.30.2.1.07.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	319.095.000,00	312.846.500,00	6.248.500,00	98,04	
3.30.3.30.2.1.07.2.01.03.	PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN	52.220.000,00	52.030.000,00	190.000,00	99,63	
3.30.3.30.2.1.07.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.220.000,00	52.030.000,00	190.000,00	99,63	
<b>2.17.3.30.2.1.03.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>105.579.800,00</b>	<b>95.009.800,00</b>	<b>10.570.000,00</b>	<b>89,98</b>	
<b>2.17.3.30.2.1.03.2.01.</b>	<b>PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>105.579.800,00</b>	<b>95.009.800,00</b>	<b>10.570.000,00</b>	<b>89,98</b>	
2.17.3.30.2.1.03.2.01.01.	PENGAWASAN KEKUATAN, KESEHATAN, KEMANDIRIAN, KETANGGUHAN, SERTA AKUNTABILITAS KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	66.049.600,00	62.379.600,00	3.670.000,00	94,44	
2.17.3.30.2.1.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.049.600,00	62.379.600,00	3.670.000,00	94,44	
2.17.3.30.2.1.03.2.01.02.	PEMERIKSAAN KEPATUHAN KOPERASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	39.530.200,00	32.630.200,00	6.900.000,00	82,54	
2.17.3.30.2.1.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.530.200,00	32.630.200,00	6.900.000,00	82,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.17.3.30.2.1.04.</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>446.450.800,00</b>	<b>383.666.100,00</b>	<b>62.784.700,00</b>	<b>85,93</b>	
<b>2.17.3.30.2.1.04.2.01.</b>	<b>PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>446.450.800,00</b>	<b>383.666.100,00</b>	<b>62.784.700,00</b>	<b>85,93</b>	
2.17.3.30.2.1.04.2.01.01.	PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	11.044.800,00	8.544.800,00	2.500.000,00	77,36	
2.17.3.30.2.1.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.044.800,00	8.544.800,00	2.500.000,00	77,36	
2.17.3.30.2.1.04.2.01.02.	PENGHARGAAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	435.406.000,00	375.121.300,00	60.284.700,00	86,15	
2.17.3.30.2.1.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	435.406.000,00	375.121.300,00	60.284.700,00	86,15	
<b>2.17.3.30.2.1.05.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>610.049.800,00</b>	<b>336.727.100,00</b>	<b>273.322.700,00</b>	<b>55,19</b>	
<b>2.17.3.30.2.1.05.2.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>610.049.800,00</b>	<b>336.727.100,00</b>	<b>273.322.700,00</b>	<b>55,19</b>	
2.17.3.30.2.1.05.2.01.01.	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	610.049.800,00	336.727.100,00	273.322.700,00	55,19	
2.17.3.30.2.1.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	610.049.800,00	336.727.100,00	273.322.700,00	55,19	
<b>2.17.3.30.2.1.06.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>76.950.000,00</b>	<b>-</b>	<b>76.950.000,00</b>	<b>-</b>	
<b>2.17.3.30.2.1.06.2.01.</b>	<b>PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>76.950.000,00</b>	<b>-</b>	<b>76.950.000,00</b>	<b>-</b>	
2.17.3.30.2.1.06.2.01.01.	PEMBERDAYAAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	76.950.000,00	-	76.950.000,00	-	
2.17.3.30.2.1.06.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.950.000,00	-	76.950.000,00	-	
<b>2.17.3.30.2.1.07.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>515.387.000,00</b>	<b>410.589.600,00</b>	<b>104.797.400,00</b>	<b>79,66</b>	
<b>2.17.3.30.2.1.07.2.01.</b>	<b>PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN</b>	<b>515.387.000,00</b>	<b>410.589.600,00</b>	<b>104.797.400,00</b>	<b>79,66</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.17.3.30.2.1.07.2.01.01.	PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	452.816.600,00	359.219.200,00	93.597.400,00	79,32	
2.17.3.30.2.1.07.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	452.816.600,00	359.219.200,00	93.597.400,00	79,32	
2.17.3.30.2.1.07.2.01.05.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	62.570.400,00	51.370.400,00	11.200.000,00	82,10	
2.17.3.30.2.1.07.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.570.400,00	51.370.400,00	11.200.000,00	82,10	
<b>2.17.3.30.2.1.08.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>1.452.909.800,00</b>	<b>994.950.000,00</b>	<b>457.959.800,00</b>	<b>68,47</b>	
<b>2.17.3.30.2.1.08.2.01.</b>	<b>PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL</b>	<b>1.452.909.800,00</b>	<b>994.950.000,00</b>	<b>457.959.800,00</b>	<b>68,47</b>	
2.17.3.30.2.1.08.2.01.01.	FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	1.452.909.800,00	994.950.000,00	457.959.800,00	68,47	
2.17.3.30.2.1.08.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.452.909.800,00	994.950.000,00	457.959.800,00	68,47	
<b>3.31.3.30.2.1.02.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>6.968.247.752,00</b>	<b>6.611.538.332,00</b>	<b>356.709.420,00</b>	<b>94,88</b>	
<b>3.31.3.30.2.1.02.2.01.</b>	<b>PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.968.247.752,00</b>	<b>6.611.538.332,00</b>	<b>356.709.420,00</b>	<b>94,88</b>	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	74.192.400,00	72.192.400,00	2.000.000,00	97,30	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.192.400,00	72.192.400,00	2.000.000,00	97,30	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	199.848.000,00	186.511.306,00	13.336.694,00	93,32	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	199.848.000,00	186.511.306,00	13.336.694,00	93,32	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.03.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	5.635.459.252,00	5.408.961.926,00	226.497.326,00	95,98	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.158.985.577,00	4.080.932.287,00	78.053.290,00	98,12	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.089.580.082,00	950.945.150,00	138.634.932,00	87,27	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.03.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	379.205.805,00	377.084.489,00	2.121.316,00	99,44	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.03.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.687.788,00	-	7.687.788,00	-	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.04.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	98.057.300,00	74.057.300,00	24.000.000,00	75,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.2.1.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.057.300,00	74.057.300,00	24.000.000,00	75,52	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.05.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	851.146.500,00	774.706.100,00	76.440.400,00	91,01	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	851.146.500,00	774.706.100,00	76.440.400,00	91,01	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.06.	EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI	109.544.300,00	95.109.300,00	14.435.000,00	86,82	
3.31.3.30.2.1.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	109.544.300,00	95.109.300,00	14.435.000,00	86,82	
<b>3.31.3.30.2.1.03.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>48.768.300,00</b>	<b>40.668.300,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>83,39</b>	
<b>3.31.3.30.2.1.03.2.01.</b>	<b>PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>48.768.300,00</b>	<b>40.668.300,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>83,39</b>	
3.31.3.30.2.1.03.2.01.01.	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	28.181.500,00	20.081.500,00	8.100.000,00	71,25	
3.31.3.30.2.1.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.181.500,00	20.081.500,00	8.100.000,00	71,25	
3.31.3.30.2.1.03.2.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI DALAM LINGKUP IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	20.586.800,00	20.586.800,00	-	100,00	
3.31.3.30.2.1.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.586.800,00	20.586.800,00	-	100,00	
<b>3.31.3.30.2.1.04.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>124.653.200,00</b>	<b>120.601.200,00</b>	<b>4.052.000,00</b>	<b>96,74</b>	
<b>3.31.3.30.2.1.04.2.01.</b>	<b>PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>124.653.200,00</b>	<b>120.601.200,00</b>	<b>4.052.000,00</b>	<b>96,74</b>	
3.31.3.30.2.1.04.2.01.01.	FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	124.653.200,00	120.601.200,00	4.052.000,00	96,74	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.2.1.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	124.653.200,00	120.601.200,00	4.052.000,00	96,74	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>26.814.989.452,00</b>	<b>24.591.022.552,00</b>	<b>2.223.966.900,00</b>	<b>91,70</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(25.242.893.952,00)</b>	<b>(22.873.696.050,00)</b>	<b>(2.078.735.898,00)</b>	<b>90,61</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(25.242.893.952,00)</b>	<b>(22.873.696.050,00)</b>	<b>-</b>	<b>90,61</b>	

LAMPIRAN 1.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01. - Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>62.065.289.876,00</b>	<b>52.250.467.470,00</b>	<b>9.814.822.406,00</b>	<b>84,18</b>	
<b>4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.815.924.176,00</b>	<b>50.472.113.305,00</b>	<b>9.343.810.871,00</b>	<b>84,37</b>	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	29.630.733.300,00	28.013.446.114,00	1.617.287.186,00	94,54	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.185.190.876,00	22.458.667.191,00	7.726.523.685,00	74,40	
<b>4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.249.365.700,00</b>	<b>1.778.354.165,00</b>	<b>471.011.535,00</b>	<b>79,06</b>	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.958.800.700,00	1.489.021.670,00	469.779.030,00	76,01	
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	290.565.000,00	289.332.495,00	1.232.505,00	99,57	
<b>4.01.4.01.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>55.697.367.376,00</b>	<b>46.953.160.921,00</b>	<b>8.744.206.455,00</b>	<b>84,30</b>	
<b>4.01.4.01.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>37.754.200,00</b>	<b>36.949.600,00</b>	<b>804.600,00</b>	<b>97,86</b>	
4.01.4.01.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	37.754.200,00	36.949.600,00	804.600,00	97,86	
4.01.4.01.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.754.200,00	36.949.600,00	804.600,00	97,86	
<b>4.01.4.01.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>28.995.136.200,00</b>	<b>27.693.635.356,00</b>	<b>1.301.500.844,00</b>	<b>95,51</b>	
4.01.4.01.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	28.843.753.300,00	27.548.429.432,00	1.295.323.868,00	95,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	28.843.753.300,00	27.548.429.432,00	1.295.323.868,00	95,50	
4.01.4.01.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.039.400,00	7.966.100,00	73.300,00	99,08	
4.01.4.01.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.039.400,00	7.966.100,00	73.300,00	99,08	
4.01.4.01.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	143.343.500,00	137.239.824,00	6.103.676,00	95,74	
4.01.4.01.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	143.343.500,00	137.239.824,00	6.103.676,00	95,74	
<b>4.01.4.01.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>402.503.750,00</b>	<b>-</b>	<b>402.503.750,00</b>	<b>-</b>	
4.01.4.01.0.0.01.2.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	402.503.750,00	-	402.503.750,00	-	
4.01.4.01.0.0.01.2.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	402.503.750,00	-	402.503.750,00	-	
<b>4.01.4.01.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7.204.184.300,00</b>	<b>6.348.810.919,00</b>	<b>855.373.381,00</b>	<b>88,12</b>	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	190.831.500,00	173.285.836,00	17.545.664,00	90,80	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	190.831.500,00	173.285.836,00	17.545.664,00	90,80	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.075.922.800,00	1.392.983.512,00	682.939.288,00	67,10	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	685.113.400,00	413.839.162,00	271.274.238,00	60,40	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.390.809.400,00	979.144.350,00	411.665.050,00	70,40	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	143.230.600,00	138.897.000,00	4.333.600,00	96,97	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	143.230.600,00	138.897.000,00	4.333.600,00	96,97	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	978.650.800,00	914.894.604,00	63.756.196,00	93,48	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	978.650.800,00	914.894.604,00	63.756.196,00	93,48	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	368.748.800,00	351.606.750,00	17.142.050,00	95,35	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	368.748.800,00	351.606.750,00	17.142.050,00	95,35	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	48.999.800,00	39.582.500,00	9.417.300,00	80,78	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.999.800,00	39.582.500,00	9.417.300,00	80,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.0.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	3.156.942.000,00	3.118.019.850,00	38.922.150,00	98,76	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.156.942.000,00	3.118.019.850,00	38.922.150,00	98,76	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	240.858.000,00	219.540.867,00	21.317.133,00	91,14	
4.01.4.01.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	240.858.000,00	219.540.867,00	21.317.133,00	91,14	
<b>4.01.4.01.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>1.037.321.700,00</b>	<b>810.630.000,00</b>	<b>226.691.700,00</b>	<b>78,14</b>	
4.01.4.01.0.0.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	47.794.600,00	26.430.000,00	21.364.600,00	55,29	
4.01.4.01.0.0.01.2.07.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.794.600,00	26.430.000,00	21.364.600,00	55,29	
4.01.4.01.0.0.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.044.600,00	17.930.000,00	20.114.600,00	47,12	
4.01.4.01.0.0.01.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	918.817.000,00	734.700.000,00	184.117.000,00	79,96	
4.01.4.01.0.0.01.2.07.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	918.817.000,00	734.700.000,00	184.117.000,00	79,96	
4.01.4.01.0.0.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	70.710.100,00	49.500.000,00	21.210.100,00	70,00	
4.01.4.01.0.0.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.381.000,00	-	9.381.000,00	-	
4.01.4.01.0.0.01.2.07.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.329.100,00	49.500.000,00	11.829.100,00	80,71	
<b>4.01.4.01.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>5.628.280.300,00</b>	<b>4.118.281.325,00</b>	<b>1.509.998.975,00</b>	<b>73,17</b>	
4.01.4.01.0.0.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	800.558.700,00	702.281.013,00	98.277.687,00	87,72	
4.01.4.01.0.0.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	800.558.700,00	702.281.013,00	98.277.687,00	87,72	
4.01.4.01.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.326.350.000,00	959.273.026,00	367.076.974,00	72,32	
4.01.4.01.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.326.350.000,00	959.273.026,00	367.076.974,00	72,32	
4.01.4.01.0.0.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.320.386.000,00	1.471.406.092,00	848.979.908,00	63,41	
4.01.4.01.0.0.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.320.386.000,00	1.471.406.092,00	848.979.908,00	63,41	
4.01.4.01.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.180.985.600,00	985.321.194,00	195.664.406,00	83,43	
4.01.4.01.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.180.985.600,00	985.321.194,00	195.664.406,00	83,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.01.4.01.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>6.528.700.926,00</b>	<b>4.719.133.190,00</b>	<b>1.809.567.736,00</b>	<b>72,28</b>	
4.01.4.01.0.0.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	464.113.800,00	150.383.072,00	313.730.728,00	32,40	
4.01.4.01.0.0.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	464.113.800,00	150.383.072,00	313.730.728,00	32,40	
4.01.4.01.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.223.040.000,00	390.070.831,00	832.969.169,00	31,89	
4.01.4.01.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.223.040.000,00	390.070.831,00	832.969.169,00	31,89	
4.01.4.01.0.0.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.312.309.326,00	3.883.733.062,00	428.576.264,00	90,06	
4.01.4.01.0.0.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.021.744.326,00	3.594.400.567,00	427.343.759,00	89,37	
4.01.4.01.0.0.01.2.09.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	290.565.000,00	289.332.495,00	1.232.505,00	99,57	
4.01.4.01.0.0.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	529.237.800,00	294.946.225,00	234.291.575,00	55,73	
4.01.4.01.0.0.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	529.237.800,00	294.946.225,00	234.291.575,00	55,73	
<b>4.01.4.01.0.0.01.2.11.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>1.077.429.000,00</b>	<b>587.336.682,00</b>	<b>490.092.318,00</b>	<b>54,51</b>	
4.01.4.01.0.0.01.2.11.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	786.980.000,00	465.016.682,00	321.963.318,00	59,08	
4.01.4.01.0.0.01.2.11.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	786.980.000,00	465.016.682,00	321.963.318,00	59,08	
4.01.4.01.0.0.01.2.11.02.	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	290.449.000,00	122.320.000,00	168.129.000,00	42,11	
4.01.4.01.0.0.01.2.11.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	290.449.000,00	122.320.000,00	168.129.000,00	42,11	
<b>4.01.4.01.0.0.01.2.12.</b>	<b>FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>1.768.401.200,00</b>	<b>997.337.884,00</b>	<b>771.063.316,00</b>	<b>56,39</b>	
4.01.4.01.0.0.01.2.12.01.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	668.033.900,00	-	668.033.900,00	-	
4.01.4.01.0.0.01.2.12.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	668.033.900,00	-	668.033.900,00	-	
4.01.4.01.0.0.01.2.12.02.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	614.417.700,00	571.293.950,00	43.123.750,00	92,98	
4.01.4.01.0.0.01.2.12.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	614.417.700,00	571.293.950,00	43.123.750,00	92,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.0.01.2.12.03.	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	485.949.600,00	426.043.934,00	59.905.666,00	87,67	
4.01.4.01.0.0.01.2.12.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	485.949.600,00	426.043.934,00	59.905.666,00	87,67	
<b>4.01.4.01.0.0.01.2.13.</b>	<b>PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>273.867.700,00</b>	<b>254.009.097,00</b>	<b>19.858.603,00</b>	<b>92,74</b>	
4.01.4.01.0.0.01.2.13.01.	PENGLOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	126.734.300,00	117.796.933,00	8.937.367,00	92,94	
4.01.4.01.0.0.01.2.13.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.734.300,00	117.796.933,00	8.937.367,00	92,94	
4.01.4.01.0.0.01.2.13.02.	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	75.133.600,00	71.772.264,00	3.361.336,00	95,52	
4.01.4.01.0.0.01.2.13.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.133.600,00	71.772.264,00	3.361.336,00	95,52	
4.01.4.01.0.0.01.2.13.03.	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	71.999.800,00	64.439.900,00	7.559.900,00	89,50	
4.01.4.01.0.0.01.2.13.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.999.800,00	64.439.900,00	7.559.900,00	89,50	
<b>4.01.4.01.0.0.01.2.14.</b>	<b>PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>	<b>2.743.788.100,00</b>	<b>1.387.036.868,00</b>	<b>1.356.751.232,00</b>	<b>50,55</b>	
4.01.4.01.0.0.01.2.14.01.	FASILITASI KEPROTOKOLAN	2.253.068.600,00	1.004.817.553,00	1.248.251.047,00	44,59	
4.01.4.01.0.0.01.2.14.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.253.068.600,00	1.004.817.553,00	1.248.251.047,00	44,59	
4.01.4.01.0.0.01.2.14.02.	FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	69.955.500,00	69.885.650,00	69.850,00	99,90	
4.01.4.01.0.0.01.2.14.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.955.500,00	69.885.650,00	69.850,00	99,90	
4.01.4.01.0.0.01.2.14.03.	PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	420.764.000,00	312.333.665,00	108.430.335,00	74,23	
4.01.4.01.0.0.01.2.14.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	420.764.000,00	312.333.665,00	108.430.335,00	74,23	
<b>4.01.4.01.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>3.623.825.200,00</b>	<b>3.203.850.844,00</b>	<b>419.974.356,00</b>	<b>88,41</b>	
<b>4.01.4.01.0.0.02.2.01.</b>	<b>ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>655.968.600,00</b>	<b>607.089.293,00</b>	<b>48.879.307,00</b>	<b>92,54</b>	
4.01.4.01.0.0.02.2.01.01.	PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	137.199.000,00	129.605.447,00	7.593.553,00	94,46	
4.01.4.01.0.0.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	137.199.000,00	129.605.447,00	7.593.553,00	94,46	
4.01.4.01.0.0.02.2.01.02.	PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	348.769.600,00	331.264.247,00	17.505.353,00	94,98	
4.01.4.01.0.0.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	348.769.600,00	331.264.247,00	17.505.353,00	94,98	
4.01.4.01.0.0.02.2.01.03.	FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	170.000.000,00	146.219.599,00	23.780.401,00	86,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.0.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	146.219.599,00	23.780.401,00	86,01	
<b>4.01.4.01.0.0.02.2.02.</b>	<b>PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>2.347.392.500,00</b>	<b>2.030.842.880,00</b>	<b>316.549.620,00</b>	<b>86,51</b>	
4.01.4.01.0.0.02.2.02.01.	FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	2.027.999.800,00	1.847.615.190,00	180.384.610,00	91,10	
4.01.4.01.0.0.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.027.999.800,00	1.847.615.190,00	180.384.610,00	91,10	
4.01.4.01.0.0.02.2.02.02.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	173.518.700,00	91.118.995,00	82.399.705,00	52,51	
4.01.4.01.0.0.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	173.518.700,00	91.118.995,00	82.399.705,00	52,51	
4.01.4.01.0.0.02.2.02.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	145.874.000,00	92.108.695,00	53.765.305,00	63,14	
4.01.4.01.0.0.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	145.874.000,00	92.108.695,00	53.765.305,00	63,14	
<b>4.01.4.01.0.0.02.2.03.</b>	<b>FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>462.574.600,00</b>	<b>414.786.634,00</b>	<b>47.787.966,00</b>	<b>89,66</b>	
4.01.4.01.0.0.02.2.03.01.	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	56.259.500,00	54.945.500,00	1.314.000,00	97,66	
4.01.4.01.0.0.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.259.500,00	54.945.500,00	1.314.000,00	97,66	
4.01.4.01.0.0.02.2.03.02.	FASILITASI BANTUAN HUKUM	293.377.900,00	268.100.720,00	25.277.180,00	91,38	
4.01.4.01.0.0.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	293.377.900,00	268.100.720,00	25.277.180,00	91,38	
4.01.4.01.0.0.02.2.03.03.	PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	112.937.200,00	91.740.414,00	21.196.786,00	81,23	
4.01.4.01.0.0.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.937.200,00	91.740.414,00	21.196.786,00	81,23	
<b>4.01.4.01.0.0.02.2.04.</b>	<b>FASILITASI KERJASAMA DAERAH</b>	<b>157.889.500,00</b>	<b>151.132.037,00</b>	<b>6.757.463,00</b>	<b>95,72</b>	
4.01.4.01.0.0.02.2.04.01.	FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	120.639.500,00	114.370.437,00	6.269.063,00	94,80	
4.01.4.01.0.0.02.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.639.500,00	114.370.437,00	6.269.063,00	94,80	
4.01.4.01.0.0.02.2.04.03.	EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	37.250.000,00	36.761.600,00	488.400,00	98,68	
4.01.4.01.0.0.02.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.250.000,00	36.761.600,00	488.400,00	98,68	
<b>4.01.4.01.0.0.03.</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2.744.097.300,00</b>	<b>2.093.455.705,00</b>	<b>650.641.595,00</b>	<b>76,28</b>	
<b>4.01.4.01.0.0.03.2.01.</b>	<b>PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN</b>	<b>1.239.940.000,00</b>	<b>674.094.978,00</b>	<b>565.845.022,00</b>	<b>54,36</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.0.0.03.2.01.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	303.589.800,00	168.948.400,00	134.641.400,00	55,65	
4.01.4.01.0.0.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	303.589.800,00	168.948.400,00	134.641.400,00	55,65	
4.01.4.01.0.0.03.2.01.02.	PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	891.323.200,00	482.003.578,00	409.319.622,00	54,07	
4.01.4.01.0.0.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	891.323.200,00	482.003.578,00	409.319.622,00	54,07	
4.01.4.01.0.0.03.2.01.03.	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	45.027.000,00	23.143.000,00	21.884.000,00	51,39	
4.01.4.01.0.0.03.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.027.000,00	23.143.000,00	21.884.000,00	51,39	
<b>4.01.4.01.0.0.03.2.02.</b>	<b>PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>637.681.900,00</b>	<b>611.648.062,00</b>	<b>26.033.838,00</b>	<b>95,91</b>	
4.01.4.01.0.0.03.2.02.01.	FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	374.412.000,00	353.573.488,00	20.838.512,00	94,43	
4.01.4.01.0.0.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	374.412.000,00	353.573.488,00	20.838.512,00	94,43	
4.01.4.01.0.0.03.2.02.03.	PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	263.269.900,00	258.074.574,00	5.195.326,00	98,02	
4.01.4.01.0.0.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	263.269.900,00	258.074.574,00	5.195.326,00	98,02	
<b>4.01.4.01.0.0.03.2.03.</b>	<b>PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>866.475.400,00</b>	<b>807.712.665,00</b>	<b>58.762.735,00</b>	<b>93,21</b>	
4.01.4.01.0.0.03.2.03.01.	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	173.410.400,00	169.374.324,00	4.036.076,00	97,67	
4.01.4.01.0.0.03.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	173.410.400,00	169.374.324,00	4.036.076,00	97,67	
4.01.4.01.0.0.03.2.03.02.	PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	626.333.400,00	585.271.920,00	41.061.480,00	93,44	
4.01.4.01.0.0.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.715.800,00	142.824.600,00	14.891.200,00	90,55	
4.01.4.01.0.0.03.2.03.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	468.617.600,00	442.447.320,00	26.170.280,00	94,41	
4.01.4.01.0.0.03.2.03.03.	PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	66.731.600,00	53.066.421,00	13.665.179,00	79,52	
4.01.4.01.0.0.03.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.731.600,00	53.066.421,00	13.665.179,00	79,52	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>62.065.289.876,00</b>	<b>52.250.467.470,00</b>	<b>9.814.822.406,00</b>	<b>84,18</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(62.065.289.876,00)</b>	<b>(52.250.467.470,00)</b>	<b>(9.814.822.406,00)</b>	<b>84,18</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(62.065.289.876,00)</b>	<b>(52.250.467.470,00)</b>	<b>-</b>	<b>84,18</b>	



LAMPIRAN 1.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 4.02. - SEKRETARIAT DPRD  
**ORGANISASI** : 4.02.0.00.0.00.01. - Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>80.572.146.251,00</b>	<b>67.015.984.014,00</b>	<b>13.556.162.237,00</b>	<b>83,17</b>	
<b>4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>78.789.873.819,00</b>	<b>65.773.310.721,00</b>	<b>13.016.563.098,00</b>	<b>83,47</b>	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	44.473.133.347,00	40.198.975.031,00	4.274.158.316,00	90,38	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.316.740.472,00	25.574.335.690,00	8.742.404.782,00	74,52	
<b>4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.782.272.432,00</b>	<b>1.242.673.293,00</b>	<b>539.599.139,00</b>	<b>69,72</b>	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.496.755.632,00	1.101.947.600,00	394.808.032,00	73,62	
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.516.800,00	140.725.693,00	144.791.107,00	49,28	
<b>4.02.4.02.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>54.143.167.451,00</b>	<b>47.620.373.452,00</b>	<b>6.522.793.999,00</b>	<b>87,95</b>	
<b>4.02.4.02.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>495.433.250,00</b>	<b>382.579.000,00</b>	<b>112.854.250,00</b>	<b>77,22</b>	
4.02.4.02.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	168.504.400,00	115.307.500,00	53.196.900,00	68,42	
4.02.4.02.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	168.504.400,00	115.307.500,00	53.196.900,00	68,42	
4.02.4.02.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	326.928.850,00	267.271.500,00	59.657.350,00	81,75	
4.02.4.02.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	326.928.850,00	267.271.500,00	59.657.350,00	81,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.02.4.02.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>6.763.098.524,00</b>	<b>6.338.854.687,00</b>	<b>424.243.837,00</b>	<b>93,72</b>	
4.02.4.02.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.609.051.224,00	6.261.471.987,00	347.579.237,00	94,74	
4.02.4.02.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.609.051.224,00	6.261.471.987,00	347.579.237,00	94,74	
4.02.4.02.0.0.01.2.02.08.	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	154.047.300,00	77.382.700,00	76.664.600,00	50,23	
4.02.4.02.0.0.01.2.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	154.047.300,00	77.382.700,00	76.664.600,00	50,23	
<b>4.02.4.02.0.0.01.2.03.</b>	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>639.094.000,00</b>	<b>592.574.731,00</b>	<b>46.519.269,00</b>	<b>92,72</b>	
4.02.4.02.0.0.01.2.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	600.000.000,00	556.635.431,00	43.364.569,00	92,77	
4.02.4.02.0.0.01.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	556.635.431,00	43.364.569,00	92,77	
4.02.4.02.0.0.01.2.03.05.	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	39.094.000,00	35.939.300,00	3.154.700,00	91,93	
4.02.4.02.0.0.01.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.094.000,00	35.939.300,00	3.154.700,00	91,93	
<b>4.02.4.02.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>709.620.000,00</b>	<b>590.155.277,00</b>	<b>119.464.723,00</b>	<b>83,16</b>	
4.02.4.02.0.0.01.2.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	666.900.000,00	565.875.277,00	101.024.723,00	84,85	
4.02.4.02.0.0.01.2.05.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	666.900.000,00	565.875.277,00	101.024.723,00	84,85	
4.02.4.02.0.0.01.2.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	42.720.000,00	24.280.000,00	18.440.000,00	56,83	
4.02.4.02.0.0.01.2.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.720.000,00	24.280.000,00	18.440.000,00	56,83	
<b>4.02.4.02.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>962.545.900,00</b>	<b>873.652.500,00</b>	<b>88.893.400,00</b>	<b>90,76</b>	
4.02.4.02.0.0.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	64.649.000,00	34.725.000,00	29.924.000,00	53,71	
4.02.4.02.0.0.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.649.000,00	34.725.000,00	29.924.000,00	53,71	
4.02.4.02.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	98.608.000,00	97.388.900,00	1.219.100,00	98,76	
4.02.4.02.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.608.000,00	97.388.900,00	1.219.100,00	98,76	
4.02.4.02.0.0.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	30.199.600,00	18.351.750,00	11.847.850,00	60,76	
4.02.4.02.0.0.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.199.600,00	18.351.750,00	11.847.850,00	60,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	126.351.800,00	114.265.800,00	12.086.000,00	90,43	
4.02.4.02.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.351.800,00	114.265.800,00	12.086.000,00	90,43	
4.02.4.02.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	303.587.500,00	275.471.050,00	28.116.450,00	90,73	
4.02.4.02.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	303.587.500,00	275.471.050,00	28.116.450,00	90,73	
4.02.4.02.0.0.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	339.150.000,00	333.450.000,00	5.700.000,00	98,31	
4.02.4.02.0.0.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	339.150.000,00	333.450.000,00	5.700.000,00	98,31	
<b>4.02.4.02.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>1.559.523.280,00</b>	<b>1.148.474.600,00</b>	<b>411.048.680,00</b>	<b>73,64</b>	
4.02.4.02.0.0.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	340.710.200,00	157.657.500,00	183.052.700,00	46,27	
4.02.4.02.0.0.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.710.200,00	157.657.500,00	183.052.700,00	46,27	
4.02.4.02.0.0.01.2.07.11.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.218.813.080,00	990.817.100,00	227.995.980,00	81,29	
4.02.4.02.0.0.01.2.07.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.879.900,00	137.491.000,00	20.388.900,00	87,08	
4.02.4.02.0.0.01.2.07.11.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.060.933.180,00	853.326.100,00	207.607.080,00	80,43	
<b>4.02.4.02.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.460.191.200,00</b>	<b>1.035.917.968,00</b>	<b>424.273.232,00</b>	<b>70,94</b>	
4.02.4.02.0.0.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	502.640.000,00	348.802.391,00	153.837.609,00	69,39	
4.02.4.02.0.0.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	502.640.000,00	348.802.391,00	153.837.609,00	69,39	
4.02.4.02.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	507.000.000,00	307.629.378,00	199.370.622,00	60,67	
4.02.4.02.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	507.000.000,00	307.629.378,00	199.370.622,00	60,67	
4.02.4.02.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	450.551.200,00	379.486.199,00	71.065.001,00	84,22	
4.02.4.02.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	450.551.200,00	379.486.199,00	71.065.001,00	84,22	
<b>4.02.4.02.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.839.944.374,00</b>	<b>1.340.883.314,00</b>	<b>499.061.060,00</b>	<b>72,87</b>	
4.02.4.02.0.0.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	535.650.000,00	370.244.187,00	165.405.813,00	69,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.0.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	535.650.000,00	370.244.187,00	165.405.813,00	69,12	
4.02.4.02.0.0.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN MEBEL	151.000.000,00	130.498.800,00	20.501.200,00	86,42	
4.02.4.02.0.0.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	151.000.000,00	130.498.800,00	20.501.200,00	86,42	
4.02.4.02.0.0.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	757.392.122,00	500.034.827,00	257.357.295,00	66,02	
4.02.4.02.0.0.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	471.875.322,00	359.309.134,00	112.566.188,00	76,14	
4.02.4.02.0.0.01.2.09.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.516.800,00	140.725.693,00	144.791.107,00	49,28	
4.02.4.02.0.0.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	395.902.252,00	340.105.500,00	55.796.752,00	85,90	
4.02.4.02.0.0.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.790.000,00	249.141.500,00	51.648.500,00	82,82	
4.02.4.02.0.0.01.2.09.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.112.252,00	90.964.000,00	4.148.252,00	95,63	
<b>4.02.4.02.0.0.01.2.15.</b>	<b>LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD</b>	<b>38.413.308.223,00</b>	<b>34.363.140.344,00</b>	<b>4.050.167.879,00</b>	<b>89,45</b>	
4.02.4.02.0.0.01.2.15.01.	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	37.887.533.223,00	33.979.157.344,00	3.908.375.879,00	89,68	
4.02.4.02.0.0.01.2.15.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	37.774.082.123,00	33.904.880.044,00	3.869.202.079,00	89,75	
4.02.4.02.0.0.01.2.15.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	113.451.100,00	74.277.300,00	39.173.800,00	65,47	
4.02.4.02.0.0.01.2.15.02.	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	433.675.000,00	349.360.000,00	84.315.000,00	80,55	
4.02.4.02.0.0.01.2.15.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	433.675.000,00	349.360.000,00	84.315.000,00	80,55	
4.02.4.02.0.0.01.2.15.03.	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	92.100.000,00	34.623.000,00	57.477.000,00	37,59	
4.02.4.02.0.0.01.2.15.03.5.1.01.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	32.623.000,00	57.377.000,00	36,24	
4.02.4.02.0.0.01.2.15.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	95,23	
<b>4.02.4.02.0.0.01.2.16.</b>	<b>LAYANAN ADMINISTRASI DPRD</b>	<b>1.300.408.700,00</b>	<b>954.141.031,00</b>	<b>346.267.669,00</b>	<b>73,37</b>	
4.02.4.02.0.0.01.2.16.03.	FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	1.300.408.700,00	954.141.031,00	346.267.669,00	73,37	
4.02.4.02.0.0.01.2.16.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.408.700,00	954.141.031,00	346.267.669,00	73,37	
<b>4.02.4.02.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>26.428.978.800,00</b>	<b>19.395.610.562,00</b>	<b>7.033.368.238,00</b>	<b>73,38</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.02.4.02.0.0.02.2.01.</b>	<b>PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD</b>	<b>7.760.440.500,00</b>	<b>4.662.578.683,00</b>	<b>3.097.861.817,00</b>	<b>60,08</b>	
4.02.4.02.0.0.02.2.01.01.	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	385.907.000,00	200.073.266,00	185.833.734,00	51,84	
4.02.4.02.0.0.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	385.907.000,00	200.073.266,00	185.833.734,00	51,84	
4.02.4.02.0.0.02.2.01.02.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	4.487.489.500,00	2.582.781.788,00	1.904.707.712,00	57,55	
4.02.4.02.0.0.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.487.489.500,00	2.582.781.788,00	1.904.707.712,00	57,55	
4.02.4.02.0.0.02.2.01.03.	PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.139.050.000,00	669.474.280,00	469.575.720,00	58,77	
4.02.4.02.0.0.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.139.050.000,00	669.474.280,00	469.575.720,00	58,77	
4.02.4.02.0.0.02.2.01.04.	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK	1.178.870.000,00	863.634.849,00	315.235.151,00	73,25	
4.02.4.02.0.0.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.178.870.000,00	863.634.849,00	315.235.151,00	73,25	
4.02.4.02.0.0.02.2.01.05.	PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD	569.124.000,00	346.614.500,00	222.509.500,00	60,90	
4.02.4.02.0.0.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	569.124.000,00	346.614.500,00	222.509.500,00	60,90	
<b>4.02.4.02.0.0.02.2.02.</b>	<b>PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN</b>	<b>3.463.547.700,00</b>	<b>2.507.817.581,00</b>	<b>955.730.119,00</b>	<b>72,40</b>	
4.02.4.02.0.0.02.2.02.01.	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	475.635.000,00	471.536.435,00	4.098.565,00	99,13	
4.02.4.02.0.0.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	475.635.000,00	471.536.435,00	4.098.565,00	99,13	
4.02.4.02.0.0.02.2.02.02.	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	242.854.000,00	241.154.200,00	1.699.800,00	99,30	
4.02.4.02.0.0.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	242.854.000,00	241.154.200,00	1.699.800,00	99,30	
4.02.4.02.0.0.02.2.02.03.	PEMBAHASAN APBD	1.517.191.700,00	835.807.032,00	681.384.668,00	55,08	
4.02.4.02.0.0.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.517.191.700,00	835.807.032,00	681.384.668,00	55,08	
4.02.4.02.0.0.02.2.02.04.	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	672.640.000,00	432.626.276,00	240.013.724,00	64,31	
4.02.4.02.0.0.02.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	672.640.000,00	432.626.276,00	240.013.724,00	64,31	
4.02.4.02.0.0.02.2.02.05.	PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	122.467.000,00	118.709.166,00	3.757.834,00	96,93	
4.02.4.02.0.0.02.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.467.000,00	118.709.166,00	3.757.834,00	96,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.0.02.2.02.06.	PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	432.760.000,00	407.984.472,00	24.775.528,00	94,27	
4.02.4.02.0.0.02.2.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	432.760.000,00	407.984.472,00	24.775.528,00	94,27	
<b>4.02.4.02.0.0.02.2.03.</b>	<b>PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>7.230.245.200,00</b>	<b>5.895.826.160,00</b>	<b>1.334.419.040,00</b>	<b>81,54</b>	
4.02.4.02.0.0.02.2.03.01.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	1.150.926.000,00	927.294.597,00	223.631.403,00	80,56	
4.02.4.02.0.0.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.926.000,00	927.294.597,00	223.631.403,00	80,56	
4.02.4.02.0.0.02.2.03.02.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	1.230.698.000,00	974.923.567,00	255.774.433,00	79,21	
4.02.4.02.0.0.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.230.698.000,00	974.923.567,00	255.774.433,00	79,21	
4.02.4.02.0.0.02.2.03.03.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.470.014.000,00	1.277.061.577,00	192.952.423,00	86,87	
4.02.4.02.0.0.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.470.014.000,00	1.277.061.577,00	192.952.423,00	86,87	
4.02.4.02.0.0.02.2.03.04.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	1.150.926.000,00	880.647.179,00	270.278.821,00	76,51	
4.02.4.02.0.0.02.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.926.000,00	880.647.179,00	270.278.821,00	76,51	
4.02.4.02.0.0.02.2.03.05.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	1.695.354.000,00	1.312.618.190,00	382.735.810,00	77,42	
4.02.4.02.0.0.02.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.695.354.000,00	1.312.618.190,00	382.735.810,00	77,42	
4.02.4.02.0.0.02.2.03.07.	PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	532.327.200,00	523.281.050,00	9.046.150,00	98,30	
4.02.4.02.0.0.02.2.03.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	532.327.200,00	523.281.050,00	9.046.150,00	98,30	
<b>4.02.4.02.0.0.02.2.04.</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS DPRD</b>	<b>6.212.667.600,00</b>	<b>5.109.185.510,00</b>	<b>1.103.482.090,00</b>	<b>82,23</b>	
4.02.4.02.0.0.02.2.04.02.	BIMBINGAN TEKNIS DPRD	2.189.840.000,00	2.062.974.297,00	126.865.703,00	94,20	
4.02.4.02.0.0.02.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.189.840.000,00	2.062.974.297,00	126.865.703,00	94,20	
4.02.4.02.0.0.02.2.04.03.	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	1.258.656.700,00	904.735.600,00	353.921.100,00	71,88	
4.02.4.02.0.0.02.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.258.656.700,00	904.735.600,00	353.921.100,00	71,88	
4.02.4.02.0.0.02.2.04.04.	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
4.02.4.02.0.0.02.2.04.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.0.0.02.2.04.05.	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	756.099.400,00	739.003.200,00	17.096.200,00	97,73	
4.02.4.02.0.0.02.2.04.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	756.099.400,00	739.003.200,00	17.096.200,00	97,73	
4.02.4.02.0.0.02.2.04.06.	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	205.000.000,00	204.880.000,00	120.000,00	99,94	
4.02.4.02.0.0.02.2.04.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000,00	204.880.000,00	120.000,00	99,94	
4.02.4.02.0.0.02.2.04.07.	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	1.793.071.500,00	1.197.592.413,00	595.479.087,00	66,78	
4.02.4.02.0.0.02.2.04.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.793.071.500,00	1.197.592.413,00	595.479.087,00	66,78	
<b>4.02.4.02.0.0.02.2.05.</b>	<b>PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT</b>	<b>827.780.700,00</b>	<b>627.783.200,00</b>	<b>199.997.500,00</b>	<b>75,83</b>	
4.02.4.02.0.0.02.2.05.03.	PELAKSANAAN RESES	827.780.700,00	627.783.200,00	199.997.500,00	75,83	
4.02.4.02.0.0.02.2.05.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	827.780.700,00	627.783.200,00	199.997.500,00	75,83	
<b>4.02.4.02.0.0.02.2.07.</b>	<b>PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH</b>	<b>389.797.100,00</b>	<b>223.502.100,00</b>	<b>166.295.000,00</b>	<b>57,33</b>	
4.02.4.02.0.0.02.2.07.01.	FASILITASI, VERIFIKASI, DAN KOORDINASI PERSETUJUAN KERJASAMA DAERAH	389.797.100,00	223.502.100,00	166.295.000,00	57,33	
4.02.4.02.0.0.02.2.07.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	389.797.100,00	223.502.100,00	166.295.000,00	57,33	
<b>4.02.4.02.0.0.02.2.08.</b>	<b>FASILITASI TUGAS DPRD</b>	<b>544.500.000,00</b>	<b>368.917.328,00</b>	<b>175.582.672,00</b>	<b>67,75</b>	
4.02.4.02.0.0.02.2.08.04.	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	544.500.000,00	368.917.328,00	175.582.672,00	67,75	
4.02.4.02.0.0.02.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	544.500.000,00	368.917.328,00	175.582.672,00	67,75	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>80.572.146.251,00</b>	<b>67.015.984.014,00</b>	<b>13.556.162.237,00</b>	<b>83,17</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(80.572.146.251,00)</b>	<b>(67.015.984.014,00)</b>	<b>(13.556.162.237,00)</b>	<b>83,17</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(80.572.146.251,00)</b>	<b>(67.015.984.014,00)</b>	<b>-</b>	<b>83,17</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.01.5.01.5.05.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.635.862.633,00</b>	<b>12.463.500.589,00</b>	<b>1.172.362.044,00</b>	<b>91,40</b>	
<b>5.01.5.01.5.05.0.00.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13.410.027.833,00</b>	<b>12.242.303.349,00</b>	<b>1.167.724.484,00</b>	<b>91,29</b>	
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.238.285.733,00	9.444.636.182,00	793.649.551,00	92,24	
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.171.742.100,00	2.797.667.167,00	374.074.933,00	88,20	
<b>5.01.5.01.5.05.0.00.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>225.834.800,00</b>	<b>221.197.240,00</b>	<b>4.637.560,00</b>	<b>97,94</b>	
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.834.800,00	221.197.240,00	4.637.560,00	97,94	
<b>5.01.5.01.5.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.391.543.533,00</b>	<b>10.463.525.163,00</b>	<b>928.018.370,00</b>	<b>91,85</b>	
<b>5.01.5.01.5.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>126.789.800,00</b>	<b>125.564.212,00</b>	<b>1.225.588,00</b>	<b>99,03</b>	
5.01.5.01.5.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	108.769.200,00	107.604.612,00	1.164.588,00	98,92	
5.01.5.01.5.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	108.769.200,00	107.604.612,00	1.164.588,00	98,92	
5.01.5.01.5.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.020.600,00	17.959.600,00	61.000,00	99,66	
5.01.5.01.5.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.020.600,00	17.959.600,00	61.000,00	99,66	
<b>5.01.5.01.5.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>10.255.078.933,00</b>	<b>9.461.171.882,00</b>	<b>793.907.051,00</b>	<b>92,25</b>	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.5.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.238.285.733,00	9.444.636.182,00	793.649.551,00	92,24	
5.01.5.01.5.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.238.285.733,00	9.444.636.182,00	793.649.551,00	92,24	
5.01.5.01.5.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.257.600,00	2.137.200,00	120.400,00	94,66	
5.01.5.01.5.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.257.600,00	2.137.200,00	120.400,00	94,66	
5.01.5.01.5.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	14.535.600,00	14.398.500,00	137.100,00	99,05	
5.01.5.01.5.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.535.600,00	14.398.500,00	137.100,00	99,05	
<b>5.01.5.01.5.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>48.924.000,00</b>	<b>45.255.000,00</b>	<b>3.669.000,00</b>	<b>92,50</b>	
5.01.5.01.5.0.01.2.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	48.924.000,00	45.255.000,00	3.669.000,00	92,50	
5.01.5.01.5.0.01.2.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.924.000,00	45.255.000,00	3.669.000,00	92,50	
<b>5.01.5.01.5.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>388.800.000,00</b>	<b>372.056.391,00</b>	<b>16.743.609,00</b>	<b>95,69</b>	
5.01.5.01.5.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	101.400.600,00	95.463.550,00	5.937.050,00	94,14	
5.01.5.01.5.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.205.400,00	78.463.550,00	4.741.850,00	94,30	
5.01.5.01.5.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.195.200,00	17.000.000,00	1.195.200,00	93,43	
5.01.5.01.5.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	71.017.000,00	70.800.000,00	217.000,00	99,69	
5.01.5.01.5.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.017.000,00	70.800.000,00	217.000,00	99,69	
5.01.5.01.5.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.758.400,00	20.554.925,00	203.475,00	99,01	
5.01.5.01.5.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.758.400,00	20.554.925,00	203.475,00	99,01	
5.01.5.01.5.0.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	20.500.000,00	12.000.000,00	8.500.000,00	58,53	
5.01.5.01.5.0.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	12.000.000,00	8.500.000,00	58,53	
5.01.5.01.5.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	175.124.000,00	173.237.916,00	1.886.084,00	98,92	
5.01.5.01.5.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.124.000,00	173.237.916,00	1.886.084,00	98,92	
<b>5.01.5.01.5.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>77.675.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>27.675.000,00</b>	<b>64,37</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.5.0.01.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	77.675.000,00	50.000.000,00	27.675.000,00	64,37	
5.01.5.01.5.0.01.2.07.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.675.000,00	50.000.000,00	27.675.000,00	64,37	
<b>5.01.5.01.5.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>380.995.800,00</b>	<b>337.066.820,00</b>	<b>43.928.980,00</b>	<b>88,46</b>	
5.01.5.01.5.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.000.000,00	2.435.540,00	11.564.460,00	17,39	
5.01.5.01.5.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	2.435.540,00	11.564.460,00	17,39	
5.01.5.01.5.0.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	261.807.600,00	235.759.740,00	26.047.860,00	90,05	
5.01.5.01.5.0.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.680.000,00	95.310.500,00	25.369.500,00	78,97	
5.01.5.01.5.0.01.2.08.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.127.600,00	140.449.240,00	678.360,00	99,51	
5.01.5.01.5.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	105.188.200,00	98.871.540,00	6.316.660,00	93,99	
5.01.5.01.5.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	102.888.200,00	96.671.540,00	6.216.660,00	93,95	
5.01.5.01.5.0.01.2.08.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.300.000,00	2.200.000,00	100.000,00	95,65	
<b>5.01.5.01.5.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>113.280.000,00</b>	<b>72.410.858,00</b>	<b>40.869.142,00</b>	<b>63,92</b>	
5.01.5.01.5.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	113.280.000,00	72.410.858,00	40.869.142,00	63,92	
5.01.5.01.5.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	113.280.000,00	72.410.858,00	40.869.142,00	63,92	
<b>5.01.5.01.5.0.02.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.062.937.300,00</b>	<b>911.257.200,00</b>	<b>151.680.100,00</b>	<b>85,73</b>	
<b>5.01.5.01.5.0.02.2.01.</b>	<b>PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</b>	<b>617.581.300,00</b>	<b>495.483.200,00</b>	<b>122.098.100,00</b>	<b>80,22</b>	
5.01.5.01.5.0.02.2.01.01.	ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	369.770.000,00	300.937.400,00	68.832.600,00	81,38	
5.01.5.01.5.0.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	369.770.000,00	300.937.400,00	68.832.600,00	81,38	
5.01.5.01.5.0.02.2.01.03.	PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	237.211.300,00	194.545.800,00	42.665.500,00	82,01	
5.01.5.01.5.0.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	237.211.300,00	194.545.800,00	42.665.500,00	82,01	
5.01.5.01.5.0.02.2.01.04.	KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM SKPD/LINTAS SKPD	10.600.000,00	-	10.600.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.5.0.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	-	10.600.000,00	-	
<b>5.01.5.01.5.0.02.2.02.</b>	<b>ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>319.355.000,00</b>	<b>295.100.000,00</b>	<b>24.255.000,00</b>	<b>92,40</b>	
5.01.5.01.5.0.02.2.02.02.	PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD	305.000.000,00	281.050.000,00	23.950.000,00	92,14	
5.01.5.01.5.0.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000,00	281.050.000,00	23.950.000,00	92,14	
5.01.5.01.5.0.02.2.02.03.	PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.355.000,00	14.050.000,00	305.000,00	97,87	
5.01.5.01.5.0.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.355.000,00	14.050.000,00	305.000,00	97,87	
<b>5.01.5.01.5.0.02.2.03.</b>	<b>PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>126.001.000,00</b>	<b>120.674.000,00</b>	<b>5.327.000,00</b>	<b>95,77</b>	
5.01.5.01.5.0.02.2.03.02.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH	28.800.000,00	23.550.000,00	5.250.000,00	81,77	
5.01.5.01.5.0.02.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	23.550.000,00	5.250.000,00	81,77	
5.01.5.01.5.0.02.2.03.03.	MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	97.201.000,00	97.124.000,00	77.000,00	99,92	
5.01.5.01.5.0.02.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	97.201.000,00	97.124.000,00	77.000,00	99,92	
<b>5.01.5.01.5.0.03.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>659.243.800,00</b>	<b>578.629.102,00</b>	<b>80.614.698,00</b>	<b>87,77</b>	
<b>5.01.5.01.5.0.03.2.01.</b>	<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	<b>186.580.000,00</b>	<b>151.566.762,00</b>	<b>35.013.238,00</b>	<b>81,23</b>	
5.01.5.01.5.0.03.2.01.01.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	89.527.500,00	69.865.862,00	19.661.638,00	78,03	
5.01.5.01.5.0.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.527.500,00	69.865.862,00	19.661.638,00	78,03	
5.01.5.01.5.0.03.2.01.02.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	10.489.500,00	5.578.300,00	4.911.200,00	53,17	
5.01.5.01.5.0.03.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.489.500,00	5.578.300,00	4.911.200,00	53,17	
5.01.5.01.5.0.03.2.01.03.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	12.563.200,00	9.633.100,00	2.930.100,00	76,67	
5.01.5.01.5.0.03.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.563.200,00	9.633.100,00	2.930.100,00	76,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.5.0.03.2.01.05.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	53.865.800,00	46.592.500,00	7.273.300,00	86,49	
5.01.5.01.5.0.03.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.865.800,00	46.592.500,00	7.273.300,00	86,49	
5.01.5.01.5.0.03.2.01.06.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	11.500.000,00	11.308.000,00	192.000,00	98,33	
5.01.5.01.5.0.03.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.308.000,00	192.000,00	98,33	
5.01.5.01.5.0.03.2.01.07.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	8.634.000,00	8.589.000,00	45.000,00	99,47	
5.01.5.01.5.0.03.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.634.000,00	8.589.000,00	45.000,00	99,47	
<b>5.01.5.01.5.0.03.2.02.</b>	<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>	<b>181.199.800,00</b>	<b>147.565.447,00</b>	<b>33.634.353,00</b>	<b>81,43</b>	
5.01.5.01.5.0.03.2.02.01.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	77.187.000,00	56.125.485,00	21.061.515,00	72,71	
5.01.5.01.5.0.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.187.000,00	56.125.485,00	21.061.515,00	72,71	
5.01.5.01.5.0.03.2.02.02.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	3.306.500,00	3.233.400,00	73.100,00	97,78	
5.01.5.01.5.0.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.306.500,00	3.233.400,00	73.100,00	97,78	
5.01.5.01.5.0.03.2.02.03.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	5.106.500,00	5.034.300,00	72.200,00	98,58	
5.01.5.01.5.0.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.106.500,00	5.034.300,00	72.200,00	98,58	
5.01.5.01.5.0.03.2.02.05.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	77.468.800,00	65.742.962,00	11.725.838,00	84,86	
5.01.5.01.5.0.03.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.468.800,00	65.742.962,00	11.725.838,00	84,86	
5.01.5.01.5.0.03.2.02.06.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	6.695.000,00	6.370.000,00	325.000,00	95,14	
5.01.5.01.5.0.03.2.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.695.000,00	6.370.000,00	325.000,00	95,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.01.5.0.03.2.02.07.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	11.436.000,00	11.059.300,00	376.700,00	96,70	
5.01.5.01.5.0.03.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.436.000,00	11.059.300,00	376.700,00	96,70	
<b>5.01.5.01.5.0.03.2.03.</b>	<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>	<b>291.464.000,00</b>	<b>279.496.893,00</b>	<b>11.967.107,00</b>	<b>95,89</b>	
5.01.5.01.5.0.03.2.03.01.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	152.862.100,00	151.262.800,00	1.599.300,00	98,95	
5.01.5.01.5.0.03.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	152.862.100,00	151.262.800,00	1.599.300,00	98,95	
5.01.5.01.5.0.03.2.03.02.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	7.069.000,00	3.050.000,00	4.019.000,00	43,14	
5.01.5.01.5.0.03.2.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.069.000,00	3.050.000,00	4.019.000,00	43,14	
5.01.5.01.5.0.03.2.03.03.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	44.808.400,00	41.760.293,00	3.048.107,00	93,19	
5.01.5.01.5.0.03.2.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.808.400,00	41.760.293,00	3.048.107,00	93,19	
5.01.5.01.5.0.03.2.03.05.	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	12.850.000,00	12.849.500,00	500,00	99,99	
5.01.5.01.5.0.03.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	12.849.500,00	500,00	99,99	
5.01.5.01.5.0.03.2.03.06.	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	9.300.000,00	6.250.000,00	3.050.000,00	67,20	
5.01.5.01.5.0.03.2.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	6.250.000,00	3.050.000,00	67,20	
5.01.5.01.5.0.03.2.03.07.	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	64.574.500,00	64.324.300,00	250.200,00	99,61	
5.01.5.01.5.0.03.2.03.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.574.500,00	64.324.300,00	250.200,00	99,61	
<b>5.05.5.01.5.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>522.138.000,00</b>	<b>510.089.124,00</b>	<b>12.048.876,00</b>	<b>97,69</b>	
<b>5.05.5.01.5.0.02.2.01.</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>	<b>81.257.100,00</b>	<b>80.652.100,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>99,25</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.05.5.01.5.0.02.2.01.12.	PENGLOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN	81.257.100,00	80.652.100,00	605.000,00	99,25	
5.05.5.01.5.0.02.2.01.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.257.100,00	80.652.100,00	605.000,00	99,25	
<b>5.05.5.01.5.0.02.2.03.</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>153.878.100,00</b>	<b>147.213.016,00</b>	<b>6.665.084,00</b>	<b>95,66</b>	
5.05.5.01.5.0.02.2.03.04.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PANGAN	67.540.000,00	64.326.016,00	3.213.984,00	95,24	
5.05.5.01.5.0.02.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.540.000,00	64.326.016,00	3.213.984,00	95,24	
5.05.5.01.5.0.02.2.03.07.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP	86.338.100,00	82.887.000,00	3.451.100,00	96,00	
5.05.5.01.5.0.02.2.03.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.338.100,00	82.887.000,00	3.451.100,00	96,00	
<b>5.05.5.01.5.0.02.2.04.</b>	<b>PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>	<b>287.002.800,00</b>	<b>282.224.008,00</b>	<b>4.778.792,00</b>	<b>98,33</b>	
5.05.5.01.5.0.02.2.04.01.	PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	48.585.700,00	48.385.700,00	200.000,00	99,58	
5.05.5.01.5.0.02.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.585.700,00	48.385.700,00	200.000,00	99,58	
5.05.5.01.5.0.02.2.04.04.	SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN	228.531.400,00	224.271.608,00	4.259.792,00	98,13	
5.05.5.01.5.0.02.2.04.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	164.319.400,00	162.723.608,00	1.595.792,00	99,02	
5.05.5.01.5.0.02.2.04.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.212.000,00	61.548.000,00	2.664.000,00	95,85	
5.05.5.01.5.0.02.2.04.05.	FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	9.885.700,00	9.566.700,00	319.000,00	96,77	
5.05.5.01.5.0.02.2.04.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.885.700,00	9.566.700,00	319.000,00	96,77	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.635.862.633,00</b>	<b>12.463.500.589,00</b>	<b>1.172.362.044,00</b>	<b>91,40</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(13.635.862.633,00)</b>	<b>(12.463.500.589,00)</b>	<b>(1.172.362.044,00)</b>	<b>91,40</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(13.635.862.633,00)</b>	<b>(12.463.500.589,00)</b>	<b>-</b>	<b>91,40</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02. - Badan Pengelola Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>677.903.245.268,00</b>	<b>603.120.255.312,11</b>	<b>(74.782.989.955,89)</b>	<b>88,96</b>	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>168.513.221.054,00</b>	<b>205.437.257.303,11</b>	<b>36.924.036.249,11</b>	<b>121,91</b>	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.4.1.01.	Pajak Daerah	152.786.878.291,00	179.891.802.692,00	27.104.924.401,00	117,74	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	9.956.960.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	5.769.382.763,00	15.588.494.611,11	9.819.111.848,11	270,19	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>509.390.024.214,00</b>	<b>390.910.720.778,00</b>	<b>(118.479.303.436,00)</b>	<b>76,74</b>	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	144.547.187.266,00	161.338.096.080,00	16.790.908.814,00	111,61	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	364.842.836.948,00	229.572.624.698,00	(135.270.212.250,00)	62,92	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>6.772.277.231,00</b>	<b>6.772.277.231,00</b>	<b>-</b>	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	6.700.327.000,00	6.700.327.000,00	-	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	71.950.231,00	71.950.231,00	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>677.903.245.268,00</b>	<b>603.120.255.312,11</b>	<b>(74.782.989.955,89)</b>	<b>88,96</b>	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.809.725.276,00</b>	<b>12.733.524.456,00</b>	<b>1.076.200.820,00</b>	<b>92,20</b>	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13.717.947.676,00</b>	<b>12.642.504.956,00</b>	<b>1.075.442.720,00</b>	<b>92,16</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.757.606.376,00	8.927.229.801,00	830.376.575,00	91,48	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.341.300,00	3.715.275.155,00	245.066.145,00	93,81	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>91.777.600,00</b>	<b>91.019.500,00</b>	<b>758.100,00</b>	<b>99,17</b>	
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.777.600,00	91.019.500,00	758.100,00	99,17	
<b>5.02.5.02.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.004.930.676,00</b>	<b>10.019.309.600,00</b>	<b>985.621.076,00</b>	<b>91,04</b>	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>147.867.300,00</b>	<b>143.906.572,00</b>	<b>3.960.728,00</b>	<b>97,32</b>	
5.02.5.02.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	77.011.800,00	75.309.536,00	1.702.264,00	97,78	
5.02.5.02.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.011.800,00	75.309.536,00	1.702.264,00	97,78	
5.02.5.02.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	70.855.500,00	68.597.036,00	2.258.464,00	96,81	
5.02.5.02.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	70.855.500,00	68.597.036,00	2.258.464,00	96,81	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>9.805.253.176,00</b>	<b>8.973.169.337,00</b>	<b>832.083.839,00</b>	<b>91,51</b>	
5.02.5.02.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.757.606.376,00	8.927.229.801,00	830.376.575,00	91,48	
5.02.5.02.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.757.606.376,00	8.927.229.801,00	830.376.575,00	91,48	
5.02.5.02.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	47.646.800,00	45.939.536,00	1.707.264,00	96,41	
5.02.5.02.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.646.800,00	45.939.536,00	1.707.264,00	96,41	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>25.250.000,00</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>72,87</b>	
5.02.5.02.0.0.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.250.000,00	18.400.000,00	6.850.000,00	72,87	
5.02.5.02.0.0.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	18.400.000,00	6.850.000,00	72,87	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>460.311.000,00</b>	<b>421.108.538,00</b>	<b>39.202.462,00</b>	<b>91,48</b>	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.399.800,00	2.399.800,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.399.800,00	2.399.800,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	174.434.700,00	164.686.458,00	9.748.242,00	94,41	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	82.657.100,00	73.666.958,00	8.990.142,00	89,12	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.777.600,00	91.019.500,00	758.100,00	99,17	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.892.400,00	7.892.400,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.892.400,00	7.892.400,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	81.390.000,00	78.756.136,00	2.633.864,00	96,76	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.390.000,00	78.756.136,00	2.633.864,00	96,76	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	85.669.100,00	63.174.002,00	22.495.098,00	73,74	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	85.669.100,00	63.174.002,00	22.495.098,00	73,74	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	15.000.000,00	10.750.000,00	4.250.000,00	71,66	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.750.000,00	4.250.000,00	71,66	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	93.525.000,00	93.449.742,00	75.258,00	99,91	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.525.000,00	93.449.742,00	75.258,00	99,91	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>77.675.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>17.675.000,00</b>	<b>77,24</b>	
5.02.5.02.0.0.01.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	77.675.000,00	60.000.000,00	17.675.000,00	77,24	
5.02.5.02.0.0.01.2.07.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.675.000,00	60.000.000,00	17.675.000,00	77,24	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>124.104.200,00</b>	<b>107.384.747,00</b>	<b>16.719.453,00</b>	<b>86,52</b>	
5.02.5.02.0.0.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	95.904.200,00	89.134.272,00	6.769.928,00	92,94	
5.02.5.02.0.0.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.904.200,00	89.134.272,00	6.769.928,00	92,94	
5.02.5.02.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.200.000,00	18.250.475,00	9.949.525,00	64,71	
5.02.5.02.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	18.250.475,00	9.949.525,00	64,71	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>364.470.000,00</b>	<b>295.340.406,00</b>	<b>69.129.594,00</b>	<b>81,03</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	298.970.000,00	231.360.406,00	67.609.594,00	77,38	
5.02.5.02.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	298.970.000,00	231.360.406,00	67.609.594,00	77,38	
5.02.5.02.0.0.01.2.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	65.500.000,00	63.980.000,00	1.520.000,00	97,67	
5.02.5.02.0.0.01.2.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.500.000,00	63.980.000,00	1.520.000,00	97,67	
<b>5.02.5.02.0.0.04.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.804.794.600,00</b>	<b>2.714.214.856,00</b>	<b>90.579.744,00</b>	<b>96,77</b>	
<b>5.02.5.02.0.0.04.2.01.</b>	<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.804.794.600,00</b>	<b>2.714.214.856,00</b>	<b>90.579.744,00</b>	<b>96,77</b>	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.01.	PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	64.829.400,00	60.201.136,00	4.628.264,00	92,86	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.829.400,00	60.201.136,00	4.628.264,00	92,86	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.02.	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH.	94.104.200,00	93.243.936,00	860.264,00	99,08	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	94.104.200,00	93.243.936,00	860.264,00	99,08	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.03.	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	276.715.400,00	273.859.836,00	2.855.564,00	98,96	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	276.715.400,00	273.859.836,00	2.855.564,00	98,96	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.04.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	462.821.400,00	424.334.072,00	38.487.328,00	91,68	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	462.821.400,00	424.334.072,00	38.487.328,00	91,68	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.05.	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	290.419.800,00	281.156.272,00	9.263.528,00	96,81	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	290.419.800,00	281.156.272,00	9.263.528,00	96,81	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.06.	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	51.921.000,00	50.037.136,00	1.883.864,00	96,37	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.921.000,00	50.037.136,00	1.883.864,00	96,37	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.07.	PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	95.756.700,00	91.422.872,00	4.333.828,00	95,47	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.756.700,00	91.422.872,00	4.333.828,00	95,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.0.04.2.01.08.	PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	682.426.100,00	675.407.700,00	7.018.400,00	98,97	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	682.426.100,00	675.407.700,00	7.018.400,00	98,97	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.09.	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	10.240.000,00	10.235.000,00	5.000,00	99,95	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.240.000,00	10.235.000,00	5.000,00	99,95	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.10.	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	169.960.300,00	161.724.844,00	8.235.456,00	95,15	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	169.960.300,00	161.724.844,00	8.235.456,00	95,15	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.11.	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	256.567.000,00	248.626.408,00	7.940.592,00	96,90	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	256.567.000,00	248.626.408,00	7.940.592,00	96,90	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.12.	PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	146.143.100,00	143.322.308,00	2.820.792,00	98,06	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	146.143.100,00	143.322.308,00	2.820.792,00	98,06	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.13.	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	153.677.400,00	151.564.136,00	2.113.264,00	98,62	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	153.677.400,00	151.564.136,00	2.113.264,00	98,62	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.14.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH	49.212.800,00	49.079.200,00	133.600,00	99,72	
5.02.5.02.0.0.04.2.01.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.212.800,00	49.079.200,00	133.600,00	99,72	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.809.725.276,00</b>	<b>12.733.524.456,00</b>	<b>1.076.200.820,00</b>	<b>92,20</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>664.093.519.992,00</b>	<b>590.386.730.856,11</b>	<b>(75.859.190.775,89)</b>	<b>88,90</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>664.093.519.992,00</b>	<b>590.386.730.856,11</b>	<b>-</b>	<b>88,90</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 5.02.00.0.00.05. - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>731.823.569.654,00</b>	<b>717.347.579.985,00</b>	<b>(14.475.989.669,00)</b>	<b>98,02</b>	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>-</b>	<b>9.044,00</b>	<b>9.044,00</b>	<b>-</b>	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	9.044,00	9.044,00	-	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>674.170.850.000,00</b>	<b>662.185.746.941,00</b>	<b>(11.985.103.059,00)</b>	<b>98,22</b>	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	674.170.850.000,00	662.185.746.941,00	(11.985.103.059,00)	98,22	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>57.652.719.654,00</b>	<b>55.161.824.000,00</b>	<b>(2.490.895.654,00)</b>	<b>95,67</b>	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	(2.490.895.654,00)	95,67	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>731.823.569.654,00</b>	<b>717.347.579.985,00</b>	<b>(14.475.989.669,00)</b>	<b>98,02</b>	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>57.145.834.859,00</b>	<b>39.154.473.064,00</b>	<b>17.991.361.795,00</b>	<b>68,51</b>	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>32.970.676.169,00</b>	<b>26.092.128.371,00</b>	<b>6.878.547.798,00</b>	<b>79,13</b>	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	29.232.248.369,00	22.894.407.047,00	6.337.841.322,00	78,31	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.138.427.800,00	2.888.847.210,00	249.580.590,00	92,04	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.5.1.03.	Belanja Bunga	600.000.000,00	308.874.114,00	291.125.886,00	51,47	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>295.072.800,00</b>	<b>268.918.250,00</b>	<b>26.154.550,00</b>	<b>91,13</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.064.800,00	266.918.250,00	26.146.550,00	91,07	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.008.000,00	2.000.000,00	8.000,00	99,60	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>23.880.085.890,00</b>	<b>12.793.426.443,00</b>	<b>11.086.659.447,00</b>	<b>53,57</b>	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.5.3.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	11.086.659.447,00	53,57	
<b>5.02.5.02.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>30.380.673.269,00</b>	<b>23.966.190.416,00</b>	<b>6.414.482.853,00</b>	<b>78,88</b>	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>34.095.800,00</b>	<b>26.429.000,00</b>	<b>7.666.800,00</b>	<b>77,51</b>	
5.02.5.02.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	30.230.800,00	24.102.000,00	6.128.800,00	79,72	
5.02.5.02.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.230.800,00	24.102.000,00	6.128.800,00	79,72	
5.02.5.02.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.865.000,00	2.327.000,00	1.538.000,00	60,20	
5.02.5.02.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.865.000,00	2.327.000,00	1.538.000,00	60,20	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>29.237.243.969,00</b>	<b>22.898.337.047,00</b>	<b>6.338.906.922,00</b>	<b>78,31</b>	
5.02.5.02.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	29.232.248.369,00	22.894.407.047,00	6.337.841.322,00	78,31	
5.02.5.02.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	29.232.248.369,00	22.894.407.047,00	6.337.841.322,00	78,31	
5.02.5.02.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.829.000,00	3.690.000,00	139.000,00	96,36	
5.02.5.02.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.829.000,00	3.690.000,00	139.000,00	96,36	
5.02.5.02.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	1.166.600,00	240.000,00	926.600,00	20,57	
5.02.5.02.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.166.600,00	240.000,00	926.600,00	20,57	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>658.255.000,00</b>	<b>625.451.204,00</b>	<b>32.803.796,00</b>	<b>95,01</b>	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	410.136.000,00	377.424.650,00	32.711.350,00	92,02	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.071.200,00	110.506.400,00	6.564.800,00	94,39	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.064.800,00	266.918.250,00	26.146.550,00	91,07	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	37.482.500,00	37.422.500,00	60.000,00	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.482.500,00	37.422.500,00	60.000,00	99,83	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.996.500,00	14.996.000,00	500,00	99,99	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.996.500,00	14.996.000,00	500,00	99,99	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	195.640.000,00	195.608.054,00	31.946,00	99,98	
5.02.5.02.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	195.640.000,00	195.608.054,00	31.946,00	99,98	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>327.675.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>27.675.000,00</b>	<b>91,55</b>	
5.02.5.02.0.0.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	327.675.000,00	300.000.000,00	27.675.000,00	91,55	
5.02.5.02.0.0.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	327.675.000,00	300.000.000,00	27.675.000,00	91,55	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>47.778.500,00</b>	<b>42.909.924,00</b>	<b>4.868.576,00</b>	<b>89,81</b>	
5.02.5.02.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	700.000,00	230.300,00	469.700,00	32,90	
5.02.5.02.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	230.300,00	469.700,00	32,90	
5.02.5.02.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	47.078.500,00	42.679.624,00	4.398.876,00	90,65	
5.02.5.02.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.078.500,00	42.679.624,00	4.398.876,00	90,65	
<b>5.02.5.02.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>75.625.000,00</b>	<b>73.063.241,00</b>	<b>2.561.759,00</b>	<b>96,61</b>	
5.02.5.02.0.0.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	75.625.000,00	73.063.241,00	2.561.759,00	96,61	
5.02.5.02.0.0.01.2.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.625.000,00	73.063.241,00	2.561.759,00	96,61	
<b>5.02.5.02.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>26.007.753.990,00</b>	<b>14.547.306.914,00</b>	<b>11.460.447.076,00</b>	<b>55,93</b>	
<b>5.02.5.02.0.0.02.2.01.</b>	<b>KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH</b>	<b>363.793.900,00</b>	<b>344.961.300,00</b>	<b>18.832.600,00</b>	<b>94,82</b>	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.01.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	15.016.100,00	14.827.500,00	188.600,00	98,74	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.016.100,00	14.827.500,00	188.600,00	98,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.0.02.2.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	13.890.100,00	13.811.500,00	78.600,00	99,43	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.890.100,00	13.811.500,00	78.600,00	99,43	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.03.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	123.138.400,00	115.195.000,00	7.943.400,00	93,54	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	123.138.400,00	115.195.000,00	7.943.400,00	93,54	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.04.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	14.920.800,00	14.665.000,00	255.800,00	98,28	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.920.800,00	14.665.000,00	255.800,00	98,28	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.05.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	1.989.100,00	1.862.000,00	127.100,00	93,61	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.989.100,00	1.862.000,00	127.100,00	93,61	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.06.	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	5.006.000,00	4.998.000,00	8.000,00	99,84	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.006.000,00	4.998.000,00	8.000,00	99,84	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	57.779.600,00	48.492.600,00	9.287.000,00	83,92	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.779.600,00	48.492.600,00	9.287.000,00	83,92	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.08.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	80.000.000,00	79.637.100,00	362.900,00	99,54	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.637.100,00	362.900,00	99,54	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.09.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	24.016.000,00	23.468.500,00	547.500,00	97,72	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.016.000,00	23.468.500,00	547.500,00	97,72	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.11.	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	28.037.800,00	28.004.100,00	33.700,00	99,87	
5.02.5.02.0.0.02.2.01.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.037.800,00	28.004.100,00	33.700,00	99,87	
<b>5.02.5.02.0.0.02.2.02.</b>	<b>KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH</b>	<b>124.670.300,00</b>	<b>117.913.124,00</b>	<b>6.757.176,00</b>	<b>94,57</b>	
5.02.5.02.0.0.02.2.02.01.	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	41.176.600,00	38.110.874,00	3.065.726,00	92,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.0.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.176.600,00	38.110.874,00	3.065.726,00	92,55	
5.02.5.02.0.0.02.2.02.03.	PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	11.787.400,00	11.066.775,00	720.625,00	93,88	
5.02.5.02.0.0.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.787.400,00	11.066.775,00	720.625,00	93,88	
5.02.5.02.0.0.02.2.02.05.	KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	22.386.400,00	21.591.975,00	794.425,00	96,45	
5.02.5.02.0.0.02.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.386.400,00	21.591.975,00	794.425,00	96,45	
5.02.5.02.0.0.02.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	35.640.900,00	34.384.500,00	1.256.400,00	96,47	
5.02.5.02.0.0.02.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.640.900,00	34.384.500,00	1.256.400,00	96,47	
5.02.5.02.0.0.02.2.02.09.	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	13.679.000,00	12.759.000,00	920.000,00	93,27	
5.02.5.02.0.0.02.2.02.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.679.000,00	12.759.000,00	920.000,00	93,27	
<b>5.02.5.02.0.0.02.2.03.</b>	<b>KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>653.582.400,00</b>	<b>618.848.433,00</b>	<b>34.733.967,00</b>	<b>94,68</b>	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.01.	KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	279.677.800,00	265.623.800,00	14.054.000,00	94,97	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	277.669.800,00	263.623.800,00	14.046.000,00	94,94	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.008.000,00	2.000.000,00	8.000,00	99,60	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.04.	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	162.147.900,00	153.884.671,00	8.263.229,00	94,90	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	162.147.900,00	153.884.671,00	8.263.229,00	94,90	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	84.657.000,00	83.338.762,00	1.318.238,00	98,44	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.657.000,00	83.338.762,00	1.318.238,00	98,44	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.0.02.2.03.07.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	8.417.900,00	3.723.400,00	4.694.500,00	44,23	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.417.900,00	3.723.400,00	4.694.500,00	44,23	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.09.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	91.099.700,00	87.876.400,00	3.223.300,00	96,46	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.099.700,00	87.876.400,00	3.223.300,00	96,46	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.12.	PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN/KOTA	15.175.700,00	13.057.200,00	2.118.500,00	86,04	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.175.700,00	13.057.200,00	2.118.500,00	86,04	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.13.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.406.400,00	11.344.200,00	1.062.200,00	91,43	
5.02.5.02.0.0.02.2.03.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.406.400,00	11.344.200,00	1.062.200,00	91,43	
<b>5.02.5.02.0.0.02.2.04.</b>	<b>PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>24.480.085.890,00</b>	<b>13.102.300.557,00</b>	<b>11.377.785.333,00</b>	<b>53,52</b>	
5.02.5.02.0.0.02.2.04.04.	ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN CICILAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	600.000.000,00	308.874.114,00	291.125.886,00	51,47	
5.02.5.02.0.0.02.2.04.04.5.1.03.	Belanja Bunga	600.000.000,00	308.874.114,00	291.125.886,00	51,47	
5.02.5.02.0.0.02.2.04.09.	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	11.086.659.447,00	53,57	
5.02.5.02.0.0.02.2.04.09.5.3.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	11.086.659.447,00	53,57	
<b>5.02.5.02.0.0.02.2.05.</b>	<b>PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH</b>	<b>385.621.500,00</b>	<b>363.283.500,00</b>	<b>22.338.000,00</b>	<b>94,20</b>	
5.02.5.02.0.0.02.2.05.02.	IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	385.621.500,00	363.283.500,00	22.338.000,00	94,20	
5.02.5.02.0.0.02.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	385.621.500,00	363.283.500,00	22.338.000,00	94,20	
<b>5.02.5.02.0.0.03.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>757.407.600,00</b>	<b>640.975.734,00</b>	<b>116.431.866,00</b>	<b>84,62</b>	
<b>5.02.5.02.0.0.03.2.01.</b>	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>757.407.600,00</b>	<b>640.975.734,00</b>	<b>116.431.866,00</b>	<b>84,62</b>	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.01.	PENYUSUNAN STANDAR HARGA	227.891.100,00	222.153.600,00	5.737.500,00	97,48	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	227.891.100,00	222.153.600,00	5.737.500,00	97,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.0.03.2.01.03.	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	29.963.400,00	28.302.000,00	1.661.400,00	94,45	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.963.400,00	28.302.000,00	1.661.400,00	94,45	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.05.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	73.600.000,00	73.548.000,00	52.000,00	99,92	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.600.000,00	73.548.000,00	52.000,00	99,92	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.06.	INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	110.003.600,00	94.019.494,00	15.984.106,00	85,46	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.003.600,00	94.019.494,00	15.984.106,00	85,46	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.07.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	110.610.300,00	68.220.140,00	42.390.160,00	61,67	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.610.300,00	68.220.140,00	42.390.160,00	61,67	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.08.	PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	102.750.000,00	86.000.100,00	16.749.900,00	83,69	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	102.750.000,00	86.000.100,00	16.749.900,00	83,69	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.09.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.10.	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	80.900.000,00	47.061.200,00	33.838.800,00	58,17	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.900.000,00	47.061.200,00	33.838.800,00	58,17	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.11.	REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	11.689.200,00	11.671.200,00	18.000,00	99,84	
5.02.5.02.0.0.03.2.01.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.689.200,00	11.671.200,00	18.000,00	99,84	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>57.145.834.859,00</b>	<b>39.154.473.064,00</b>	<b>17.991.361.795,00</b>	<b>68,51</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>674.677.734.795,00</b>	<b>678.193.106.921,00</b>	<b>(32.467.351.464,00)</b>	<b>100,52</b>	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>271.172.220.678,00</b>	<b>270.898.017.186,53</b>	<b>(274.203.491,47)</b>	<b>99,89</b>	
5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	271.172.220.678,00	270.898.017.186,53	(274.203.491,47)	99,89	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>271.172.220.678,00</b>	<b>270.898.017.186,53</b>	<b>(274.203.491,47)</b>	<b>99,89</b>	
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.429.808.337,00</b>	<b>855.508.220,00</b>	<b>(1.574.300.117,00)</b>	<b>35,20</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.05.00.00.6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.808.337,00	855.508.220,00	(1.574.300.117,00)	35,20	
	<b>JUMLAH PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>2.429.808.337,00</b>	<b>855.508.220,00</b>	<b>(1.574.300.117,00)</b>	<b>35,20</b>	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>268.742.412.341,00</b>	<b>270.042.508.966,53</b>	<b>1.300.096.625,53</b>	<b>100,48</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>943.420.147.136,00</b>	<b>948.235.615.887,53</b>	<b>(1.300.096.625,53)</b>	<b>100,51</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.02. - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.03.5.03.0.00.0.00.02.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>17.601.728.318,00</b>	<b>14.184.866.609,00</b>	<b>3.416.861.709,00</b>	<b>80,58</b>	
<b>5.03.5.03.0.00.0.00.02.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17.429.737.418,00</b>	<b>14.038.892.609,00</b>	<b>3.390.844.809,00</b>	<b>80,54</b>	
5.03.5.03.0.00.0.00.02.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	13.880.130.118,00	11.039.594.900,00	2.840.535.218,00	79,53	
5.03.5.03.0.00.0.00.02.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.549.607.300,00	2.999.297.709,00	550.309.591,00	84,49	
<b>5.03.5.03.0.00.0.00.02.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>171.990.900,00</b>	<b>145.974.000,00</b>	<b>26.016.900,00</b>	<b>84,87</b>	
5.03.5.03.0.00.0.00.02.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.990.900,00	145.974.000,00	26.016.900,00	84,87	
<b>5.03.5.03.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.610.327.318,00</b>	<b>11.743.276.983,00</b>	<b>2.867.050.335,00</b>	<b>80,37</b>	
<b>5.03.5.03.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>42.563.000,00</b>	<b>40.509.100,00</b>	<b>2.053.900,00</b>	<b>95,17</b>	
5.03.5.03.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	30.063.000,00	28.354.000,00	1.709.000,00	94,31	
5.03.5.03.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.063.000,00	28.354.000,00	1.709.000,00	94,31	
5.03.5.03.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12.500.000,00	12.155.100,00	344.900,00	97,24	
5.03.5.03.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.155.100,00	344.900,00	97,24	
<b>5.03.5.03.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>13.852.180.118,00</b>	<b>11.043.003.000,00</b>	<b>2.809.177.118,00</b>	<b>79,72</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	13.846.630.118,00	11.037.479.900,00	2.809.150.218,00	79,71	
5.03.5.03.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	13.846.630.118,00	11.037.479.900,00	2.809.150.218,00	79,71	
5.03.5.03.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.750.000,00	2.730.000,00	20.000,00	99,27	
5.03.5.03.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.730.000,00	20.000,00	99,27	
5.03.5.03.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	2.800.000,00	2.793.100,00	6.900,00	99,75	
5.03.5.03.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.793.100,00	6.900,00	99,75	
<b>5.03.5.03.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>569.097.300,00</b>	<b>532.111.964,00</b>	<b>36.985.336,00</b>	<b>93,50</b>	
5.03.5.03.0.0.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.556.200,00	4.554.500,00	1.700,00	99,96	
5.03.5.03.0.0.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.556.200,00	4.554.500,00	1.700,00	99,96	
5.03.5.03.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	282.240.700,00	251.249.350,00	30.991.350,00	89,01	
5.03.5.03.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.249.800,00	105.275.350,00	4.974.450,00	95,48	
5.03.5.03.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.990.900,00	145.974.000,00	26.016.900,00	84,87	
5.03.5.03.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	45.365.500,00	43.567.500,00	1.798.000,00	96,03	
5.03.5.03.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.365.500,00	43.567.500,00	1.798.000,00	96,03	
5.03.5.03.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	61.946.900,00	61.040.900,00	906.000,00	98,53	
5.03.5.03.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.946.900,00	61.040.900,00	906.000,00	98,53	
5.03.5.03.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	174.988.000,00	171.699.714,00	3.288.286,00	98,12	
5.03.5.03.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	174.988.000,00	171.699.714,00	3.288.286,00	98,12	
<b>5.03.5.03.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
5.03.5.03.0.0.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.0.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.03.5.03.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>15.796.900,00</b>	<b>11.822.069,00</b>	<b>3.974.831,00</b>	<b>74,83</b>	
5.03.5.03.0.0.01.2.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.0.01.2.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
5.03.5.03.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.000.000,00	1.091.569,00	3.908.431,00	21,83	
5.03.5.03.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.091.569,00	3.908.431,00	21,83	
5.03.5.03.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.596.900,00	6.530.500,00	66.400,00	98,99	
5.03.5.03.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.596.900,00	6.530.500,00	66.400,00	98,99	
<b>5.03.5.03.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>88.690.000,00</b>	<b>73.830.850,00</b>	<b>14.859.150,00</b>	<b>83,24</b>	
5.03.5.03.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	88.690.000,00	73.830.850,00	14.859.150,00	83,24	
5.03.5.03.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.690.000,00	73.830.850,00	14.859.150,00	83,24	
<b>5.03.5.03.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.009.299.000,00</b>	<b>1.525.748.026,00</b>	<b>483.550.974,00</b>	<b>75,93</b>	
<b>5.03.5.03.0.0.02.2.01.</b>	<b>PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN</b>	<b>1.109.013.000,00</b>	<b>1.070.766.526,00</b>	<b>38.246.474,00</b>	<b>96,55</b>	
5.03.5.03.0.0.02.2.01.02.	PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	3.400.000,00	3.200.000,00	200.000,00	94,11	
5.03.5.03.0.0.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.200.000,00	200.000,00	94,11	
5.03.5.03.0.0.02.2.01.04.	EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN	719.500.000,00	706.226.303,00	13.273.697,00	98,15	
5.03.5.03.0.0.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	719.500.000,00	706.226.303,00	13.273.697,00	98,15	
5.03.5.03.0.0.02.2.01.06.	KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	65.600.000,00	48.098.000,00	17.502.000,00	73,32	
5.03.5.03.0.0.02.2.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.600.000,00	48.098.000,00	17.502.000,00	73,32	
5.03.5.03.0.0.02.2.01.10.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	168.513.000,00	167.826.800,00	686.200,00	99,59	
5.03.5.03.0.0.02.2.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	168.513.000,00	167.826.800,00	686.200,00	99,59	
5.03.5.03.0.0.02.2.01.11.	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	152.000.000,00	145.415.423,00	6.584.577,00	95,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.0.02.2.01.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	145.415.423,00	6.584.577,00	95,66	
<b>5.03.5.03.0.0.02.2.02.</b>	<b>MUTASI DAN PROMOSI ASN</b>	<b>656.495.000,00</b>	<b>239.639.000,00</b>	<b>416.856.000,00</b>	<b>36,50</b>	
5.03.5.03.0.0.02.2.02.01.	PENGLOLAAN MUTASI ASN	20.000.000,00	8.813.500,00	11.186.500,00	44,06	
5.03.5.03.0.0.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	8.813.500,00	11.186.500,00	44,06	
5.03.5.03.0.0.02.2.02.02.	PENGLOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	50.000.000,00	38.659.000,00	11.341.000,00	77,31	
5.03.5.03.0.0.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	38.659.000,00	11.341.000,00	77,31	
5.03.5.03.0.0.02.2.02.03.	PENGLOLAAN PROMOSI ASN	586.495.000,00	192.166.500,00	394.328.500,00	32,76	
5.03.5.03.0.0.02.2.02.03.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
5.03.5.03.0.0.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	556.495.000,00	192.166.500,00	364.328.500,00	34,53	
<b>5.03.5.03.0.0.02.2.03.</b>	<b>PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN</b>	<b>140.050.000,00</b>	<b>132.766.000,00</b>	<b>7.284.000,00</b>	<b>94,79</b>	
5.03.5.03.0.0.02.2.03.01.	PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	75.550.000,00	72.372.000,00	3.178.000,00	95,79	
5.03.5.03.0.0.02.2.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.550.000,00	72.372.000,00	3.178.000,00	95,79	
5.03.5.03.0.0.02.2.03.04.	PENGLOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	64.500.000,00	60.394.000,00	4.106.000,00	93,63	
5.03.5.03.0.0.02.2.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	60.394.000,00	4.106.000,00	93,63	
<b>5.03.5.03.0.0.02.2.04.</b>	<b>PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR</b>	<b>103.741.000,00</b>	<b>82.576.500,00</b>	<b>21.164.500,00</b>	<b>79,59</b>	
5.03.5.03.0.0.02.2.04.03.	EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	4.057.000,00	3.031.400,00	1.025.600,00	74,72	
5.03.5.03.0.0.02.2.04.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.057.000,00	3.031.400,00	1.025.600,00	74,72	
5.03.5.03.0.0.02.2.04.05.	PENGLOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI	43.400.000,00	32.318.000,00	11.082.000,00	74,46	
5.03.5.03.0.0.02.2.04.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.400.000,00	32.318.000,00	11.082.000,00	74,46	
5.03.5.03.0.0.02.2.04.07.	PEMBINAAN DISIPLIN ASN	37.284.000,00	28.952.100,00	8.331.900,00	77,65	
5.03.5.03.0.0.02.2.04.07.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	2.115.000,00	1.385.000,00	60,42	
5.03.5.03.0.0.02.2.04.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.784.000,00	26.837.100,00	6.946.900,00	79,43	
5.03.5.03.0.0.02.2.04.08.	PENGLOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	6.000.000,00	5.975.000,00	25.000,00	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.5.03.0.0.02.2.04.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.975.000,00	25.000,00	99,58	
5.03.5.03.0.0.02.2.04.09.	PELAYANAN PROSES IZIN PERCERAIAN PEGAWAI	13.000.000,00	12.300.000,00	700.000,00	94,61	
5.03.5.03.0.0.02.2.04.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.300.000,00	700.000,00	94,61	
<b>5.04.5.03.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>982.102.000,00</b>	<b>915.841.600,00</b>	<b>66.260.400,00</b>	<b>93,25</b>	
<b>5.04.5.03.0.0.02.2.01.</b>	<b>PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS</b>	<b>125.250.000,00</b>	<b>80.903.000,00</b>	<b>44.347.000,00</b>	<b>64,59</b>	
5.04.5.03.0.0.02.2.01.03.	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.600.000,00	55.980.000,00	19.620.000,00	74,04	
5.04.5.03.0.0.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	55.980.000,00	19.620.000,00	74,04	
5.04.5.03.0.0.02.2.01.04.	PEMBINAAN, PENGOORDINASIAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN	49.650.000,00	24.923.000,00	24.727.000,00	50,19	
5.04.5.03.0.0.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.650.000,00	24.923.000,00	24.727.000,00	50,19	
<b>5.04.5.03.0.0.02.2.02.</b>	<b>SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL</b>	<b>856.852.000,00</b>	<b>834.938.600,00</b>	<b>21.913.400,00</b>	<b>97,44</b>	
5.04.5.03.0.0.02.2.02.07.	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	536.000.000,00	515.080.000,00	20.920.000,00	96,09	
5.04.5.03.0.0.02.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	536.000.000,00	515.080.000,00	20.920.000,00	96,09	
5.04.5.03.0.0.02.2.02.08.	PEMBINAAN, PENGOORDINASIAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI, PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI, PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR, DAN KERJASAMA, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINA	320.852.000,00	319.858.600,00	993.400,00	99,69	
5.04.5.03.0.0.02.2.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	320.852.000,00	319.858.600,00	993.400,00	99,69	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>17.601.728.318,00</b>	<b>14.184.866.609,00</b>	<b>3.416.861.709,00</b>	<b>80,58</b>	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(17.601.728.318,00)</b>	<b>(14.184.866.609,00)</b>	<b>(3.416.861.709,00)</b>	<b>80,58</b>	



	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(17.601.728.318,00)</b>	<b>(14.184.866.609,00)</b>	-	<b>80,58</b>	
--	---	----------------------------	----------------------------	---	--------------	--

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 6.01. - INSPEKTORAT DAERAH  
**ORGANISASI** : 6.01.0.00.0.00.01. - Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.272.016.907,00</b>	<b>8.507.722.551,00</b>	<b>764.294.356,00</b>	<b>91,75</b>	
<b>6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.026.424.107,00</b>	<b>8.274.631.474,00</b>	<b>751.792.633,00</b>	<b>91,67</b>	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.450.001.907,00	6.869.038.159,00	580.963.748,00	92,20	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.576.422.200,00	1.405.593.315,00	170.828.885,00	89,16	
<b>6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>245.592.800,00</b>	<b>233.091.077,00</b>	<b>12.501.723,00</b>	<b>94,90</b>	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.517.800,00	40.785.000,00	6.732.800,00	85,83	
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.075.000,00	192.306.077,00	5.768.923,00	97,08	
<b>6.01.6.01.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.724.220.907,00</b>	<b>8.049.809.303,00</b>	<b>674.411.604,00</b>	<b>92,26</b>	
<b>6.01.6.01.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>45.675.000,00</b>	<b>34.796.000,00</b>	<b>10.879.000,00</b>	<b>76,18</b>	
6.01.6.01.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	23.000.000,00	15.573.000,00	7.427.000,00	67,70	
6.01.6.01.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	15.573.000,00	7.427.000,00	67,70	
6.01.6.01.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.675.000,00	19.223.000,00	3.452.000,00	84,77	
6.01.6.01.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.675.000,00	19.223.000,00	3.452.000,00	84,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.01.6.01.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7.460.126.907,00</b>	<b>6.876.816.159,00</b>	<b>583.310.748,00</b>	<b>92,18</b>	
6.01.6.01.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.450.001.907,00	6.869.038.159,00	580.963.748,00	92,20	
6.01.6.01.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.450.001.907,00	6.869.038.159,00	580.963.748,00	92,20	
6.01.6.01.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.600.000,00	6.125.000,00	475.000,00	92,80	
6.01.6.01.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.125.000,00	475.000,00	92,80	
6.01.6.01.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	3.525.000,00	1.653.000,00	1.872.000,00	46,89	
6.01.6.01.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.525.000,00	1.653.000,00	1.872.000,00	46,89	
<b>6.01.6.01.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>229.719.000,00</b>	<b>219.246.000,00</b>	<b>10.473.000,00</b>	<b>95,44</b>	
6.01.6.01.0.0.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	33.750.000,00	33.660.000,00	90.000,00	99,73	
6.01.6.01.0.0.01.2.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.750.000,00	33.660.000,00	90.000,00	99,73	
6.01.6.01.0.0.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	195.969.000,00	185.586.000,00	10.383.000,00	94,70	
6.01.6.01.0.0.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	195.969.000,00	185.586.000,00	10.383.000,00	94,70	
<b>6.01.6.01.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>238.281.100,00</b>	<b>220.003.735,00</b>	<b>18.277.365,00</b>	<b>92,32</b>	
6.01.6.01.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	101.603.300,00	94.307.500,00	7.295.800,00	92,81	
6.01.6.01.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.543.500,00	54.822.500,00	721.000,00	98,70	
6.01.6.01.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.059.800,00	39.485.000,00	6.574.800,00	85,72	
6.01.6.01.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	64.665.400,00	63.176.235,00	1.489.165,00	97,69	
6.01.6.01.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.665.400,00	63.176.235,00	1.489.165,00	97,69	
6.01.6.01.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	25.762.400,00	19.290.000,00	6.472.400,00	74,87	
6.01.6.01.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.762.400,00	19.290.000,00	6.472.400,00	74,87	
6.01.6.01.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	46.250.000,00	43.230.000,00	3.020.000,00	93,47	
6.01.6.01.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.250.000,00	43.230.000,00	3.020.000,00	93,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.01.6.01.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>54.162.000,00</b>	<b>53.950.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>99,60</b>	
6.01.6.01.0.0.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	5.162.000,00	4.950.000,00	212.000,00	95,89	
6.01.6.01.0.0.01.2.07.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.162.000,00	4.950.000,00	212.000,00	95,89	
6.01.6.01.0.0.01.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00	
6.01.6.01.0.0.01.2.07.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	49.000.000,00	-	100,00	
<b>6.01.6.01.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>257.516.900,00</b>	<b>237.683.222,00</b>	<b>19.833.678,00</b>	<b>92,29</b>	
6.01.6.01.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	40.800.000,00	25.954.939,00	14.845.061,00	63,61	
6.01.6.01.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	25.954.939,00	14.845.061,00	63,61	
6.01.6.01.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	216.716.900,00	211.728.283,00	4.988.617,00	97,69	
6.01.6.01.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	215.258.900,00	210.428.283,00	4.830.617,00	97,75	
6.01.6.01.0.0.01.2.08.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.458.000,00	1.300.000,00	158.000,00	89,16	
<b>6.01.6.01.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>438.740.000,00</b>	<b>407.314.187,00</b>	<b>31.425.813,00</b>	<b>92,83</b>	
6.01.6.01.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	124.720.000,00	102.476.862,00	22.243.138,00	82,16	
6.01.6.01.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	124.720.000,00	102.476.862,00	22.243.138,00	82,16	
6.01.6.01.0.0.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN MEBEL	5.875.000,00	4.950.000,00	925.000,00	84,25	
6.01.6.01.0.0.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.875.000,00	4.950.000,00	925.000,00	84,25	
6.01.6.01.0.0.01.2.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	94.320.000,00	91.997.248,00	2.322.752,00	97,53	
6.01.6.01.0.0.01.2.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	94.320.000,00	91.997.248,00	2.322.752,00	97,53	
6.01.6.01.0.0.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	213.825.000,00	207.890.077,00	5.934.923,00	97,22	
6.01.6.01.0.0.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.584.000,00	166.000,00	98,94	
6.01.6.01.0.0.01.2.09.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.075.000,00	192.306.077,00	5.768.923,00	97,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.01.6.01.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>254.465.000,00</b>	<b>195.221.248,00</b>	<b>59.243.752,00</b>	<b>76,71</b>	
<b>6.01.6.01.0.0.02.2.01.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL</b>	<b>182.020.000,00</b>	<b>132.060.124,00</b>	<b>49.959.876,00</b>	<b>72,55</b>	
6.01.6.01.0.0.02.2.01.01.	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	19.750.000,00	11.650.000,00	8.100.000,00	58,98	
6.01.6.01.0.0.02.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	11.650.000,00	8.100.000,00	58,98	
6.01.6.01.0.0.02.2.01.02.	PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	8.000.000,00	2.820.000,00	5.180.000,00	35,25	
6.01.6.01.0.0.02.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	2.820.000,00	5.180.000,00	35,25	
6.01.6.01.0.0.02.2.01.03.	REVIU LAPORAN KINERJA	26.800.000,00	21.949.000,00	4.851.000,00	81,89	
6.01.6.01.0.0.02.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	21.949.000,00	4.851.000,00	81,89	
6.01.6.01.0.0.02.2.01.04.	REVIU LAPORAN KEUANGAN	38.220.000,00	21.534.000,00	16.686.000,00	56,34	
6.01.6.01.0.0.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.220.000,00	21.534.000,00	16.686.000,00	56,34	
6.01.6.01.0.0.02.2.01.07.	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	89.250.000,00	74.107.124,00	15.142.876,00	83,03	
6.01.6.01.0.0.02.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.250.000,00	74.107.124,00	15.142.876,00	83,03	
<b>6.01.6.01.0.0.02.2.02.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>	<b>72.445.000,00</b>	<b>63.161.124,00</b>	<b>9.283.876,00</b>	<b>87,18</b>	
6.01.6.01.0.0.02.2.02.01.	PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	43.095.000,00	41.061.124,00	2.033.876,00	95,28	
6.01.6.01.0.0.02.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.095.000,00	41.061.124,00	2.033.876,00	95,28	
6.01.6.01.0.0.02.2.02.02.	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	29.350.000,00	22.100.000,00	7.250.000,00	75,29	
6.01.6.01.0.0.02.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.350.000,00	22.100.000,00	7.250.000,00	75,29	
<b>6.01.6.01.0.0.03.</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>293.331.000,00</b>	<b>262.692.000,00</b>	<b>30.639.000,00</b>	<b>89,55</b>	
<b>6.01.6.01.0.0.03.2.01.</b>	<b>PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN</b>	<b>125.263.000,00</b>	<b>115.629.000,00</b>	<b>9.634.000,00</b>	<b>92,30</b>	
6.01.6.01.0.0.03.2.01.01.	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	125.263.000,00	115.629.000,00	9.634.000,00	92,30	
6.01.6.01.0.0.03.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.263.000,00	115.629.000,00	9.634.000,00	92,30	
<b>6.01.6.01.0.0.03.2.02.</b>	<b>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>168.068.000,00</b>	<b>147.063.000,00</b>	<b>21.005.000,00</b>	<b>87,50</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
6.01.6.01.0.0.03.2.02.03.	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	133.360.000,00	114.305.000,00	19.055.000,00	85,71	
6.01.6.01.0.0.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	133.360.000,00	114.305.000,00	19.055.000,00	85,71	
6.01.6.01.0.0.03.2.02.04.	PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	34.708.000,00	32.758.000,00	1.950.000,00	94,38	
6.01.6.01.0.0.03.2.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.708.000,00	32.758.000,00	1.950.000,00	94,38	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(9.272.016.907,00)</b>	<b>(8.507.722.551,00)</b>	<b>(764.294.356,00)</b>	<b>91,75</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>9.272.016.907,00</b>	<b>8.507.722.551,00</b>	<b>764.294.356,00</b>	<b>91,75</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(9.272.016.907,00)</b>	<b>(8.507.722.551,00)</b>	<b>-</b>	<b>91,75</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.01. - Kecamatan Cimahi Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>33.686.045.900,00</b>	<b>31.196.144.974,00</b>	<b>2.489.900.926,00</b>	<b>92,60</b>	
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>33.538.190.900,00</b>	<b>31.053.382.774,00</b>	<b>2.484.808.126,00</b>	<b>92,59</b>	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.550.938.000,00	9.781.000.666,00	769.937.334,00	92,70	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.987.252.900,00	21.272.382.108,00	1.714.870.792,00	92,53	
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>147.855.000,00</b>	<b>142.762.200,00</b>	<b>5.092.800,00</b>	<b>96,55</b>	
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.855.000,00	142.762.200,00	5.092.800,00	96,55	
<b>7.01.7.01.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.988.564.100,00</b>	<b>11.974.715.529,00</b>	<b>1.013.848.571,00</b>	<b>92,19</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>74.998.700,00</b>	<b>61.239.700,00</b>	<b>13.759.000,00</b>	<b>81,65</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	53.944.200,00	49.944.400,00	3.999.800,00	92,58	
7.01.7.01.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.944.200,00	49.944.400,00	3.999.800,00	92,58	
7.01.7.01.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.054.500,00	11.295.300,00	9.759.200,00	53,64	
7.01.7.01.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.054.500,00	11.295.300,00	9.759.200,00	53,64	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>10.609.580.400,00</b>	<b>9.836.701.866,00</b>	<b>772.878.534,00</b>	<b>92,71</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.550.938.000,00	9.781.000.666,00	769.937.334,00	92,70	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.550.938.000,00	9.781.000.666,00	769.937.334,00	92,70	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.110.000,00	3.520.000,00	2.590.000,00	57,61	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.110.000,00	3.520.000,00	2.590.000,00	57,61	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	52.532.400,00	52.181.200,00	351.200,00	99,33	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.532.400,00	52.181.200,00	351.200,00	99,33	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>40.958.500,00</b>	<b>40.958.500,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40.958.500,00	40.958.500,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.0.01.2.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.958.500,00	40.958.500,00	-	100,00	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>724.181.200,00</b>	<b>672.228.575,00</b>	<b>51.952.625,00</b>	<b>92,82</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	283.951.300,00	274.757.300,00	9.194.000,00	96,76	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	162.489.800,00	158.374.600,00	4.115.200,00	97,46	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.461.500,00	116.382.700,00	5.078.800,00	95,81	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.051.100,00	2.671.900,00	379.200,00	87,57	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.051.100,00	2.671.900,00	379.200,00	87,57	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	218.105.300,00	194.000.600,00	24.104.700,00	88,94	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	218.105.300,00	194.000.600,00	24.104.700,00	88,94	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	75.033.500,00	75.024.775,00	8.725,00	99,98	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.033.500,00	75.024.775,00	8.725,00	99,98	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	63.000.000,00	50.084.000,00	12.916.000,00	79,49	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	50.084.000,00	12.916.000,00	79,49	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	81.040.000,00	75.690.000,00	5.350.000,00	93,39	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.040.000,00	75.690.000,00	5.350.000,00	93,39	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>53.112.500,00</b>	<b>51.078.500,00</b>	<b>2.034.000,00</b>	<b>96,17</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	53.112.500,00	51.078.500,00	2.034.000,00	96,17	
7.01.7.01.0.0.01.2.07.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.719.000,00	24.699.000,00	2.020.000,00	92,43	
7.01.7.01.0.0.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.393.500,00	26.379.500,00	14.000,00	99,94	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>597.582.800,00</b>	<b>531.505.753,00</b>	<b>66.077.047,00</b>	<b>88,94</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	157.947.600,00	110.018.131,00	47.929.469,00	69,65	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.947.600,00	110.018.131,00	47.929.469,00	69,65	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	439.635.200,00	421.487.622,00	18.147.578,00	95,87	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	439.635.200,00	421.487.622,00	18.147.578,00	95,87	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>888.150.000,00</b>	<b>781.002.635,00</b>	<b>107.147.365,00</b>	<b>87,93</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	374.460.000,00	274.409.003,00	100.050.997,00	73,28	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	374.460.000,00	274.409.003,00	100.050.997,00	73,28	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	513.690.000,00	506.593.632,00	7.096.368,00	98,61	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	513.690.000,00	506.593.632,00	7.096.368,00	98,61	
<b>7.01.7.01.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1.262.270.400,00</b>	<b>1.217.645.768,00</b>	<b>44.624.632,00</b>	<b>96,46</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.02.2.02.</b>	<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN</b>	<b>1.143.124.200,00</b>	<b>1.119.389.368,00</b>	<b>23.734.832,00</b>	<b>97,92</b>	
7.01.7.01.0.0.02.2.02.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	1.143.124.200,00	1.119.389.368,00	23.734.832,00	97,92	
7.01.7.01.0.0.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.143.124.200,00	1.119.389.368,00	23.734.832,00	97,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>7.01.7.01.0.0.02.2.04.</b>	<b>PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT</b>	<b>119.146.200,00</b>	<b>98.256.400,00</b>	<b>20.889.800,00</b>	<b>82,46</b>	
7.01.7.01.0.0.02.2.04.01.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	98.998.100,00	78.108.600,00	20.889.500,00	78,89	
7.01.7.01.0.0.02.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.998.100,00	78.108.600,00	20.889.500,00	78,89	
7.01.7.01.0.0.02.2.04.02.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	20.148.100,00	20.147.800,00	300,00	99,99	
7.01.7.01.0.0.02.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.148.100,00	20.147.800,00	300,00	99,99	
<b>7.01.7.01.0.0.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>13.675.329.400,00</b>	<b>12.869.900.231,00</b>	<b>805.429.169,00</b>	<b>94,11</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.03.2.02.</b>	<b>KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN</b>	<b>13.675.329.400,00</b>	<b>12.869.900.231,00</b>	<b>805.429.169,00</b>	<b>94,11</b>	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	215.804.150,00	122.177.650,00	93.626.500,00	56,61	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	215.804.150,00	122.177.650,00	93.626.500,00	56,61	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	7.947.142.800,00	7.668.836.499,00	278.306.301,00	96,49	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.947.142.800,00	7.668.836.499,00	278.306.301,00	96,49	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	5.512.382.450,00	5.078.886.082,00	433.496.368,00	92,13	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.512.382.450,00	5.078.886.082,00	433.496.368,00	92,13	
<b>7.01.7.01.0.0.04.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3.641.879.200,00</b>	<b>3.106.346.319,00</b>	<b>535.532.881,00</b>	<b>85,29</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.04.2.01.</b>	<b>KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>3.641.879.200,00</b>	<b>3.106.346.319,00</b>	<b>535.532.881,00</b>	<b>85,29</b>	
7.01.7.01.0.0.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL	3.641.879.200,00	3.106.346.319,00	535.532.881,00	85,29	
7.01.7.01.0.0.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.641.879.200,00	3.106.346.319,00	535.532.881,00	85,29	
<b>7.01.7.01.0.0.05.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>2.118.002.800,00</b>	<b>2.027.537.127,00</b>	<b>90.465.673,00</b>	<b>95,72</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.05.2.01.</b>	<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH</b>	<b>2.118.002.800,00</b>	<b>2.027.537.127,00</b>	<b>90.465.673,00</b>	<b>95,72</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.0.05.2.01.01.	PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN K	203.722.600,00	156.761.499,00	46.961.101,00	76,94	
7.01.7.01.0.0.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	203.722.600,00	156.761.499,00	46.961.101,00	76,94	
7.01.7.01.0.0.05.2.01.02.	FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	1.914.280.200,00	1.870.775.628,00	43.504.572,00	97,72	
7.01.7.01.0.0.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.914.280.200,00	1.870.775.628,00	43.504.572,00	97,72	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(33.686.045.900,00)</b>	<b>(31.196.144.974,00)</b>	<b>(2.489.900.926,00)</b>	<b>92,60</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>33.686.045.900,00</b>	<b>31.196.144.974,00</b>	<b>2.489.900.926,00</b>	<b>92,60</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(33.686.045.900,00)</b>	<b>(31.196.144.974,00)</b>	<b>-</b>	<b>92,60</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.02. - Kecamatan Cimahi Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>45.749.110.969,00</b>	<b>42.134.370.069,00</b>	<b>3.614.740.900,00</b>	<b>92,09</b>	
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>44.942.447.219,00</b>	<b>41.347.169.488,00</b>	<b>3.595.277.731,00</b>	<b>92,00</b>	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.816.723.019,00	12.513.798.847,00	302.924.172,00	97,63	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.125.724.200,00	28.833.370.641,00	3.292.353.559,00	89,75	
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>806.663.750,00</b>	<b>787.200.581,00</b>	<b>19.463.169,00</b>	<b>97,58</b>	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	426.659.000,00	413.680.700,00	12.978.300,00	96,95	
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.004.750,00	373.519.881,00	6.484.869,00	98,29	
<b>7.01.7.01.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17.131.935.569,00</b>	<b>16.305.076.168,00</b>	<b>826.859.401,00</b>	<b>95,17</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>134.549.400,00</b>	<b>132.901.600,00</b>	<b>1.647.800,00</b>	<b>98,77</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	44.037.800,00	42.437.400,00	1.600.400,00	96,36	
7.01.7.01.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.037.800,00	42.437.400,00	1.600.400,00	96,36	
7.01.7.01.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	90.511.600,00	90.464.200,00	47.400,00	99,94	
7.01.7.01.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.511.600,00	90.464.200,00	47.400,00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>12.940.726.019,00</b>	<b>12.634.010.147,00</b>	<b>306.715.872,00</b>	<b>97,62</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.816.723.019,00	12.513.798.847,00	302.924.172,00	97,63	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.816.723.019,00	12.513.798.847,00	302.924.172,00	97,63	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	17.849.000,00	15.775.500,00	2.073.500,00	88,38	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.849.000,00	15.775.500,00	2.073.500,00	88,38	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	106.154.000,00	104.435.800,00	1.718.200,00	98,38	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	106.154.000,00	104.435.800,00	1.718.200,00	98,38	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>52.992.400,00</b>	<b>51.266.200,00</b>	<b>1.726.200,00</b>	<b>96,74</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	52.992.400,00	51.266.200,00	1.726.200,00	96,74	
7.01.7.01.0.0.01.2.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.992.400,00	51.266.200,00	1.726.200,00	96,74	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.429.104.300,00</b>	<b>1.245.853.400,00</b>	<b>183.250.900,00</b>	<b>87,17</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	550.688.200,00	490.439.400,00	60.248.800,00	89,05	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	124.029.200,00	76.758.700,00	47.270.500,00	61,88	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	426.659.000,00	413.680.700,00	12.978.300,00	96,95	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	463.195.000,00	377.548.300,00	85.646.700,00	81,50	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	463.195.000,00	377.548.300,00	85.646.700,00	81,50	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	153.221.100,00	150.663.700,00	2.557.400,00	98,33	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	153.221.100,00	150.663.700,00	2.557.400,00	98,33	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	87.000.000,00	70.882.000,00	16.118.000,00	81,47	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	70.882.000,00	16.118.000,00	81,47	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	175.000.000,00	156.320.000,00	18.680.000,00	89,32	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	156.320.000,00	18.680.000,00	89,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>1.067.483.750,00</b>	<b>1.007.061.821,00</b>	<b>60.421.929,00</b>	<b>94,33</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.07.10.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.067.483.750,00	1.007.061.821,00	60.421.929,00	94,33	
7.01.7.01.0.0.01.2.07.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	687.479.000,00	633.541.940,00	53.937.060,00	92,15	
7.01.7.01.0.0.01.2.07.10.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.004.750,00	373.519.881,00	6.484.869,00	98,29	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>902.789.700,00</b>	<b>730.856.255,00</b>	<b>171.933.445,00</b>	<b>80,95</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	320.435.300,00	191.370.115,00	129.065.185,00	59,72	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	320.435.300,00	191.370.115,00	129.065.185,00	59,72	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	582.354.400,00	539.486.140,00	42.868.260,00	92,63	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	582.354.400,00	539.486.140,00	42.868.260,00	92,63	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>604.290.000,00</b>	<b>503.126.745,00</b>	<b>101.163.255,00</b>	<b>83,25</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	527.290.000,00	427.276.745,00	100.013.255,00	81,03	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	527.290.000,00	427.276.745,00	100.013.255,00	81,03	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.05.	PEMELIHARAAN MEBEL	77.000.000,00	75.850.000,00	1.150.000,00	98,50	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	75.850.000,00	1.150.000,00	98,50	
<b>7.01.7.01.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1.530.262.400,00</b>	<b>1.207.874.480,00</b>	<b>322.387.920,00</b>	<b>78,93</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.02.2.02.</b>	<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN</b>	<b>1.164.732.500,00</b>	<b>1.052.298.480,00</b>	<b>112.434.020,00</b>	<b>90,34</b>	
7.01.7.01.0.0.02.2.02.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	1.164.732.500,00	1.052.298.480,00	112.434.020,00	90,34	
7.01.7.01.0.0.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.164.732.500,00	1.052.298.480,00	112.434.020,00	90,34	
<b>7.01.7.01.0.0.02.2.04.</b>	<b>PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT</b>	<b>365.529.900,00</b>	<b>155.576.000,00</b>	<b>209.953.900,00</b>	<b>42,56</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.0.02.2.04.01.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	298.146.800,00	111.805.600,00	186.341.200,00	37,50	
7.01.7.01.0.0.02.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	298.146.800,00	111.805.600,00	186.341.200,00	37,50	
7.01.7.01.0.0.02.2.04.02.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	67.383.100,00	43.770.400,00	23.612.700,00	64,95	
7.01.7.01.0.0.02.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.383.100,00	43.770.400,00	23.612.700,00	64,95	
<b>7.01.7.01.0.0.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>19.199.700.800,00</b>	<b>17.453.938.396,00</b>	<b>1.745.762.404,00</b>	<b>90,90</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.03.2.02.</b>	<b>KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN</b>	<b>19.199.700.800,00</b>	<b>17.453.938.396,00</b>	<b>1.745.762.404,00</b>	<b>90,90</b>	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	533.763.200,00	405.612.500,00	128.150.700,00	75,99	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	533.763.200,00	405.612.500,00	128.150.700,00	75,99	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	10.691.819.200,00	10.050.981.446,00	640.837.754,00	94,00	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.691.819.200,00	10.050.981.446,00	640.837.754,00	94,00	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	7.974.118.400,00	6.997.344.450,00	976.773.950,00	87,75	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.974.118.400,00	6.997.344.450,00	976.773.950,00	87,75	
<b>7.01.7.01.0.0.04.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4.835.364.600,00</b>	<b>4.431.036.325,00</b>	<b>404.328.275,00</b>	<b>91,63</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.04.2.01.</b>	<b>KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>4.835.364.600,00</b>	<b>4.431.036.325,00</b>	<b>404.328.275,00</b>	<b>91,63</b>	
7.01.7.01.0.0.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL	4.835.364.600,00	4.431.036.325,00	404.328.275,00	91,63	
7.01.7.01.0.0.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.835.364.600,00	4.431.036.325,00	404.328.275,00	91,63	
<b>7.01.7.01.0.0.05.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>3.051.847.600,00</b>	<b>2.736.444.700,00</b>	<b>315.402.900,00</b>	<b>89,66</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.05.2.01.</b>	<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH</b>	<b>3.051.847.600,00</b>	<b>2.736.444.700,00</b>	<b>315.402.900,00</b>	<b>89,66</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.0.05.2.01.01.	PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN K	21.300.000,00	5.000.000,00	16.300.000,00	23,47	
7.01.7.01.0.0.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	5.000.000,00	16.300.000,00	23,47	
7.01.7.01.0.0.05.2.01.02.	FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	3.030.547.600,00	2.731.444.700,00	299.102.900,00	90,13	
7.01.7.01.0.0.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.547.600,00	2.731.444.700,00	299.102.900,00	90,13	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(45.749.110.969,00)</b>	<b>(42.134.370.069,00)</b>	<b>(3.614.740.900,00)</b>	<b>92,09</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>45.749.110.969,00</b>	<b>42.134.370.069,00</b>	<b>3.614.740.900,00</b>	<b>92,09</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(45.749.110.969,00)</b>	<b>(42.134.370.069,00)</b>	<b>-</b>	<b>92,09</b>	



LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 7.01. - KECAMATAN  
**ORGANISASI** : 7.01.0.00.0.00.03. - Kecamatan Cimahi Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>40.625.236.915,00</b>	<b>38.098.331.447,00</b>	<b>2.526.905.468,00</b>	<b>93,77</b>	
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>40.056.107.515,00</b>	<b>37.542.037.912,00</b>	<b>2.514.069.603,00</b>	<b>93,72</b>	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.450.933.315,00	11.924.488.688,00	526.444.627,00	95,77	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.605.174.200,00	25.617.549.224,00	1.987.624.976,00	92,79	
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>569.129.400,00</b>	<b>556.293.535,00</b>	<b>12.835.865,00</b>	<b>97,74</b>	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	366.646.400,00	355.364.174,00	11.282.226,00	96,92	
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00.00.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202.483.000,00	200.929.361,00	1.553.639,00	99,23	
<b>7.01.7.01.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.807.218.615,00</b>	<b>15.060.685.146,00</b>	<b>746.533.469,00</b>	<b>95,27</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>71.410.000,00</b>	<b>70.962.400,00</b>	<b>447.600,00</b>	<b>99,37</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	33.967.900,00	33.800.200,00	167.700,00	99,50	
7.01.7.01.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.967.900,00	33.800.200,00	167.700,00	99,50	
7.01.7.01.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	37.442.100,00	37.162.200,00	279.900,00	99,25	
7.01.7.01.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.442.100,00	37.162.200,00	279.900,00	99,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>12.465.409.115,00</b>	<b>11.938.963.988,00</b>	<b>526.445.127,00</b>	<b>95,77</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.450.933.315,00	11.924.488.688,00	526.444.627,00	95,77	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.450.933.315,00	11.924.488.688,00	526.444.627,00	95,77	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.528.300,00	7.528.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.528.300,00	7.528.300,00	-	100,00	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	6.947.500,00	6.947.000,00	500,00	99,99	
7.01.7.01.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.947.500,00	6.947.000,00	500,00	99,99	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.05.</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>112.788.000,00</b>	<b>105.328.000,00</b>	<b>7.460.000,00</b>	<b>93,38</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	112.788.000,00	105.328.000,00	7.460.000,00	93,38	
7.01.7.01.0.0.01.2.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.788.000,00	105.328.000,00	7.460.000,00	93,38	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>1.110.908.900,00</b>	<b>1.095.831.374,00</b>	<b>15.077.526,00</b>	<b>98,64</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	26.447.700,00	26.377.800,00	69.900,00	99,73	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.447.700,00	26.377.800,00	69.900,00	99,73	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	479.451.200,00	469.546.074,00	9.905.126,00	97,93	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180.115.200,00	179.539.900,00	575.300,00	99,68	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.336.000,00	290.006.174,00	9.329.826,00	96,88	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	338.618.000,00	338.464.200,00	153.800,00	99,95	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	338.618.000,00	338.464.200,00	153.800,00	99,95	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	55.694.000,00	55.558.300,00	135.700,00	99,75	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.694.000,00	55.558.300,00	135.700,00	99,75	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	75.000.000,00	70.575.000,00	4.425.000,00	94,10	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	70.575.000,00	4.425.000,00	94,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	135.698.000,00	135.310.000,00	388.000,00	99,71	
7.01.7.01.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	135.698.000,00	135.310.000,00	388.000,00	99,71	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>90.025.400,00</b>	<b>87.963.000,00</b>	<b>2.062.400,00</b>	<b>97,70</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	90.025.400,00	87.963.000,00	2.062.400,00	97,70	
7.01.7.01.0.0.01.2.07.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.810.000,00	25.700.000,00	110.000,00	99,57	
7.01.7.01.0.0.01.2.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.215.400,00	62.263.000,00	1.952.400,00	96,95	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>806.483.200,00</b>	<b>646.248.122,00</b>	<b>160.235.078,00</b>	<b>80,13</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	215.387.000,00	91.579.182,00	123.807.818,00	42,51	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	215.387.000,00	91.579.182,00	123.807.818,00	42,51	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	591.096.200,00	554.668.940,00	36.427.260,00	93,83	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	588.001.200,00	551.573.940,00	36.427.260,00	93,80	
7.01.7.01.0.0.01.2.08.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.095.000,00	3.095.000,00	-	100,00	
<b>7.01.7.01.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>1.150.194.000,00</b>	<b>1.115.388.262,00</b>	<b>34.805.738,00</b>	<b>96,97</b>	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	478.915.200,00	459.623.021,00	19.292.179,00	95,97	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	478.915.200,00	459.623.021,00	19.292.179,00	95,97	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	671.278.800,00	655.765.241,00	15.513.559,00	97,68	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	468.795.800,00	454.835.880,00	13.959.920,00	97,02	
7.01.7.01.0.0.01.2.09.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202.483.000,00	200.929.361,00	1.553.639,00	99,23	
<b>7.01.7.01.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>959.399.100,00</b>	<b>901.235.420,00</b>	<b>58.163.680,00</b>	<b>93,93</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.02.2.02.</b>	<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN</b>	<b>853.161.900,00</b>	<b>797.062.120,00</b>	<b>56.099.780,00</b>	<b>93,42</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7.01.7.01.0.0.02.2.02.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	853.161.900,00	797.062.120,00	56.099.780,00	93,42	
7.01.7.01.0.0.02.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	853.161.900,00	797.062.120,00	56.099.780,00	93,42	
<b>7.01.7.01.0.0.02.2.04.</b>	<b>PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT</b>	<b>106.237.200,00</b>	<b>104.173.300,00</b>	<b>2.063.900,00</b>	<b>98,05</b>	
7.01.7.01.0.0.02.2.04.01.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	48.442.400,00	46.820.500,00	1.621.900,00	96,65	
7.01.7.01.0.0.02.2.04.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.442.400,00	46.820.500,00	1.621.900,00	96,65	
7.01.7.01.0.0.02.2.04.02.	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN	57.794.800,00	57.352.800,00	442.000,00	99,23	
7.01.7.01.0.0.02.2.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.794.800,00	57.352.800,00	442.000,00	99,23	
<b>7.01.7.01.0.0.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>17.041.582.800,00</b>	<b>16.149.856.435,00</b>	<b>891.726.365,00</b>	<b>94,76</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.03.2.02.</b>	<b>KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN</b>	<b>17.041.582.800,00</b>	<b>16.149.856.435,00</b>	<b>891.726.365,00</b>	<b>94,76</b>	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	298.138.500,00	277.740.100,00	20.398.400,00	93,15	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	298.138.500,00	277.740.100,00	20.398.400,00	93,15	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	10.343.034.200,00	9.887.740.641,00	455.293.559,00	95,59	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.343.034.200,00	9.887.740.641,00	455.293.559,00	95,59	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	6.400.410.100,00	5.984.375.694,00	416.034.406,00	93,49	
7.01.7.01.0.0.03.2.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.410.100,00	5.984.375.694,00	416.034.406,00	93,49	
<b>7.01.7.01.0.0.04.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4.412.148.000,00</b>	<b>3.716.149.450,00</b>	<b>695.998.550,00</b>	<b>84,22</b>	
<b>7.01.7.01.0.0.04.2.01.</b>	<b>KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>4.412.148.000,00</b>	<b>3.716.149.450,00</b>	<b>695.998.550,00</b>	<b>84,22</b>	
7.01.7.01.0.0.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL	4.412.148.000,00	3.716.149.450,00	695.998.550,00	84,22	
7.01.7.01.0.0.04.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.412.148.000,00	3.716.149.450,00	695.998.550,00	84,22	
<b>7.01.7.01.0.0.05.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>2.404.888.400,00</b>	<b>2.270.404.996,00</b>	<b>134.483.404,00</b>	<b>94,40</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>7.01.7.01.0.0.05.2.01.</b>	<b>PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH</b>	<b>2.404.888.400,00</b>	<b>2.270.404.996,00</b>	<b>134.483.404,00</b>	<b>94,40</b>	
7.01.7.01.0.0.05.2.01.01.	PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN K	178.029.000,00	133.833.500,00	44.195.500,00	75,17	
7.01.7.01.0.0.05.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	178.029.000,00	133.833.500,00	44.195.500,00	75,17	
7.01.7.01.0.0.05.2.01.02.	FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	2.226.859.400,00	2.136.571.496,00	90.287.904,00	95,94	
7.01.7.01.0.0.05.2.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.226.859.400,00	2.136.571.496,00	90.287.904,00	95,94	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(40.625.236.915,00)</b>	<b>(38.098.331.447,00)</b>	<b>(2.526.905.468,00)</b>	<b>93,77</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>40.625.236.915,00</b>	<b>38.098.331.447,00</b>	<b>2.526.905.468,00</b>	<b>93,77</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(40.625.236.915,00)</b>	<b>(38.098.331.447,00)</b>	<b>-</b>	<b>93,77</b>	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : **8.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**ORGANISASI** : **8.01.0.00.0.00.01. - Kantor Kesatuan Bangsa**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>8.445.049.414,00</b>	<b>7.135.791.753,00</b>	<b>1.309.257.661,00</b>	<b>84,49</b>	
<b>8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.404.415.394,00</b>	<b>7.117.626.490,00</b>	<b>1.286.788.904,00</b>	<b>84,68</b>	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.815.114.744,00	2.208.900.584,00	606.214.160,00	78,46	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.792.974.200,00	3.112.399.456,00	680.574.744,00	82,05	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.00.5.1.05.	Belanja Hibah	1.796.326.450,00	1.796.326.450,00	-	100,00	
<b>8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>40.634.020,00</b>	<b>18.165.263,00</b>	<b>22.468.757,00</b>	<b>44,70</b>	
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.00.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.634.020,00	18.165.263,00	22.468.757,00	44,70	
<b>8.01.8.01.0.0.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.320.570.164,00</b>	<b>2.632.244.403,00</b>	<b>688.325.761,00</b>	<b>79,27</b>	
<b>8.01.8.01.0.0.01.2.01.</b>	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>15.607.100,00</b>	<b>9.462.000,00</b>	<b>6.145.100,00</b>	<b>60,62</b>	
8.01.8.01.0.0.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.268.600,00	5.809.000,00	459.600,00	92,66	
8.01.8.01.0.0.01.2.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.268.600,00	5.809.000,00	459.600,00	92,66	
8.01.8.01.0.0.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.338.500,00	3.653.000,00	5.685.500,00	39,11	
8.01.8.01.0.0.01.2.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.338.500,00	3.653.000,00	5.685.500,00	39,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
<b>8.01.8.01.0.0.01.2.02.</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>2.889.201.944,00</b>	<b>2.272.166.221,00</b>	<b>617.035.723,00</b>	<b>78,64</b>	
8.01.8.01.0.0.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.815.114.744,00	2.208.900.584,00	606.214.160,00	78,46	
8.01.8.01.0.0.01.2.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.815.114.744,00	2.208.900.584,00	606.214.160,00	78,46	
8.01.8.01.0.0.01.2.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	74.087.200,00	63.265.637,00	10.821.563,00	85,39	
8.01.8.01.0.0.01.2.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.087.200,00	63.265.637,00	10.821.563,00	85,39	
<b>8.01.8.01.0.0.01.2.06.</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>249.118.500,00</b>	<b>236.870.068,00</b>	<b>12.248.432,00</b>	<b>95,08</b>	
8.01.8.01.0.0.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	47.750.500,00	43.595.063,00	4.155.437,00	91,29	
8.01.8.01.0.0.01.2.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.701.600,00	36.660.800,00	2.040.800,00	94,72	
8.01.8.01.0.0.01.2.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.048.900,00	6.934.263,00	2.114.637,00	76,63	
8.01.8.01.0.0.01.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	28.927.800,00	23.167.250,00	5.760.550,00	80,08	
8.01.8.01.0.0.01.2.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.927.800,00	23.167.250,00	5.760.550,00	80,08	
8.01.8.01.0.0.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.028.200,00	11.242.700,00	785.500,00	93,46	
8.01.8.01.0.0.01.2.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.028.200,00	11.242.700,00	785.500,00	93,46	
8.01.8.01.0.0.01.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.500.000,00	1.705.000,00	795.000,00	68,20	
8.01.8.01.0.0.01.2.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.705.000,00	795.000,00	68,20	
8.01.8.01.0.0.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	157.912.000,00	157.160.055,00	751.945,00	99,52	
8.01.8.01.0.0.01.2.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.912.000,00	157.160.055,00	751.945,00	99,52	
<b>8.01.8.01.0.0.01.2.07.</b>	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>95,00</b>	
8.01.8.01.0.0.01.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	30.000.000,00	28.500.000,00	1.500.000,00	95,00	
8.01.8.01.0.0.01.2.07.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.500.000,00	1.500.000,00	95,00	
<b>8.01.8.01.0.0.01.2.08.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>89.752.620,00</b>	<b>50.622.314,00</b>	<b>39.130.306,00</b>	<b>56,40</b>	
8.01.8.01.0.0.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.000.000,00	645.979,00	11.354.021,00	5,38	

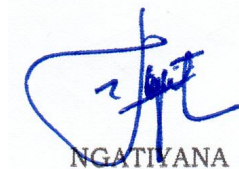
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
8.01.8.01.0.0.01.2.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	645.979,00	11.354.021,00	5,38	
8.01.8.01.0.0.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45.085.120,00	23.106.500,00	21.978.620,00	51,25	
8.01.8.01.0.0.01.2.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	11.875.500,00	1.624.500,00	87,96	
8.01.8.01.0.0.01.2.08.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.585.120,00	11.231.000,00	20.354.120,00	35,55	
8.01.8.01.0.0.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	32.667.500,00	26.869.835,00	5.797.665,00	82,25	
8.01.8.01.0.0.01.2.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.667.500,00	26.869.835,00	5.797.665,00	82,25	
<b>8.01.8.01.0.0.01.2.09.</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>46.890.000,00</b>	<b>34.623.800,00</b>	<b>12.266.200,00</b>	<b>73,84</b>	
8.01.8.01.0.0.01.2.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	46.890.000,00	34.623.800,00	12.266.200,00	73,84	
8.01.8.01.0.0.01.2.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.890.000,00	34.623.800,00	12.266.200,00	73,84	
<b>8.01.8.01.0.0.02.</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>246.331.300,00</b>	<b>212.866.600,00</b>	<b>33.464.700,00</b>	<b>86,41</b>	
<b>8.01.8.01.0.0.02.2.01.</b>	<b>PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>246.331.300,00</b>	<b>212.866.600,00</b>	<b>33.464.700,00</b>	<b>86,41</b>	
8.01.8.01.0.0.02.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	246.331.300,00	212.866.600,00	33.464.700,00	86,41	
8.01.8.01.0.0.02.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	246.331.300,00	212.866.600,00	33.464.700,00	86,41	
<b>8.01.8.01.0.0.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGE</b>	<b>2.236.501.950,00</b>	<b>2.030.730.950,00</b>	<b>205.771.000,00</b>	<b>90,79</b>	
<b>8.01.8.01.0.0.03.2.01.</b>	<b>PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SER</b>	<b>2.236.501.950,00</b>	<b>2.030.730.950,00</b>	<b>205.771.000,00</b>	<b>90,79</b>	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
8.01.8.01.0.0.03.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLI	2.236.501.950,00	2.030.730.950,00	205.771.000,00	90,79	
8.01.8.01.0.0.03.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	690.175.500,00	484.404.500,00	205.771.000,00	70,18	
8.01.8.01.0.0.03.2.01.03.5.1.05.	Belanja Hibah	1.546.326.450,00	1.546.326.450,00	-	100,00	
<b>8.01.8.01.0.0.04.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>600.652.200,00</b>	<b>496.605.800,00</b>	<b>104.046.400,00</b>	<b>82,67</b>	
<b>8.01.8.01.0.0.04.2.01.</b>	<b>PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>600.652.200,00</b>	<b>496.605.800,00</b>	<b>104.046.400,00</b>	<b>82,67</b>	
8.01.8.01.0.0.04.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	600.652.200,00	496.605.800,00	104.046.400,00	82,67	
8.01.8.01.0.0.04.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	600.652.200,00	496.605.800,00	104.046.400,00	82,67	
<b>8.01.8.01.0.0.05.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>371.206.000,00</b>	<b>357.295.000,00</b>	<b>13.911.000,00</b>	<b>96,25</b>	
<b>8.01.8.01.0.0.05.2.01.</b>	<b>PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>371.206.000,00</b>	<b>357.295.000,00</b>	<b>13.911.000,00</b>	<b>96,25</b>	
8.01.8.01.0.0.05.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	371.206.000,00	357.295.000,00	13.911.000,00	96,25	
8.01.8.01.0.0.05.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.206.000,00	107.295.000,00	13.911.000,00	88,52	
8.01.8.01.0.0.05.2.01.04.5.1.05.	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
<b>8.01.8.01.0.0.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK</b>	<b>1.669.787.800,00</b>	<b>1.406.049.000,00</b>	<b>263.738.800,00</b>	<b>84,20</b>	
<b>8.01.8.01.0.0.06.2.01.</b>	<b>PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>1.669.787.800,00</b>	<b>1.406.049.000,00</b>	<b>263.738.800,00</b>	<b>84,20</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
8.01.8.01.0.0.06.2.01.03.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK D	140.283.800,00	84.199.000,00	56.084.800,00	60,02	
8.01.8.01.0.0.06.2.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.283.800,00	84.199.000,00	56.084.800,00	60,02	
8.01.8.01.0.0.06.2.01.04.	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK	1.529.504.000,00	1.321.850.000,00	207.654.000,00	86,42	
8.01.8.01.0.0.06.2.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.529.504.000,00	1.321.850.000,00	207.654.000,00	86,42	
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(8.445.049.414,00)</b>	<b>(7.135.791.753,00)</b>	<b>(1.309.257.661,00)</b>	<b>84,49</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.445.049.414,00</b>	<b>7.135.791.753,00</b>	<b>1.309.257.661,00</b>	<b>84,49</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>(8.445.049.414,00)</b>	<b>(7.135.791.753,00)</b>	<b>-</b>	<b>84,49</b>	


WALI KOTA CIMAHI,



NGATIVANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN 1.4 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

# **REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

LAMPIRAN I.4 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 2021**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>865,971,702,155.01</b>	<b>865,971,702,155.01</b>	<b>251,202,046,301.00</b>	<b>204,695,175,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>354,193,112,119.00</b>	<b>354,193,112,119.00</b>	<b>24,443,396,907.00</b>	<b>20,383,162,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.	Dinas Pendidikan	271,646,499,576.00	271,646,499,576.00	140,811,200.00	124,554,000.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>271,646,499,576.00</b>	<b>271,646,499,576.00</b>	<b>140,811,200.00</b>	<b>124,554,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>228,793,300.00</b>	<b>228,793,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,741,300.00	21,741,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,981,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5,981,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195,090,000.00	195,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>268,806,117,876.00</b>	<b>268,806,117,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	268,729,197,976.00	268,729,197,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16,767,500.00	16,767,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60,152,400.00	60,152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>310,411,300.00</b>	<b>310,411,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	310,411,300.00	310,411,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,144,248,200.00</b>	<b>1,144,248,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,999,500.00	5,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189,798,700.00	189,798,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,995,700.00	5,995,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164,234,500.00	164,234,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,999,800.00	41,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	730,220,000.00	730,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>77,675,000.00</b>	<b>77,675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77,675,000.00	77,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>812,934,200.00</b>	<b>812,934,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	751,046,000.00	751,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61,888,200.00	61,888,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.01.0.01.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>266,319,700.00</b>	<b>266,319,700.00</b>	<b>140,811,200.00</b>	<b>124,554,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132,770,000.00	132,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63,940,000.00	63,940,000.00	140,811,200.00	124,554,000.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.0.01.01.0.00.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37,815,000.00	37,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.0.01.01.0.00.00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31,794,700.00	31,794,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.01.1.01.0.00.0.00.01.</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>82,546,612,543.00</b>	<b>82,546,612,543.00</b>	<b>24,302,585,707.00</b>	<b>20,258,608,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>82,546,612,543.00</b>	<b>82,546,612,543.00</b>	<b>24,302,585,707.00</b>	<b>20,258,608,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>42,048,337,188.00</b>	<b>42,048,337,188.00</b>	<b>20,383,415,507.00</b>	<b>17,809,953,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	527,718,000.00	527,718,000.00	7,697,066,896.00	6,543,499,600.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	769,581,000.00	769,581,000.00	5,412,000,000.00	4,067,743,220.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.09.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0.00	0.00	130,000,000.00	126,123,079.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0.00	0.00	496,000,000.00	490,221,996.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10,170,000.00	10,170,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.17.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	540,516,500.00	540,516,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	244,977,000.00	244,977,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.23.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	114,109,900.00	114,109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	10,090,000.00	10,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	161,035,500.00	161,035,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.01.26.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5,097,480,000.00	5,097,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	205,561,200.00	205,561,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	264,869,500.00	264,869,500.00	20,832,400.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	34,102,228,588.00	34,102,228,588.00	6,547,516,211.00	6,582,365,387.00	0.00	0.00		
<b>1.01.1.01.0.00.0.0 00.01.02.2.02.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>18,628,883,855.00</b>	<b>18,628,883,855.00</b>	<b>3,627,955,200.00</b>	<b>2,199,496,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	98,000,000.00	98,000,000.00	425,970,600.00	309,277,472.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	40,000,000.00	40,000,000.00	194,123,100.00	191,221,272.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.06.	Pembangunan Laboratorium	0.00	0.00	483,033,700.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	77,766,700.00	77,766,700.00	142,233,300.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah	0.00	0.00	74,791,600.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.28.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	193,462,500.00	193,462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1,170,000,000.00	1,170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.35.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	32,400.00	32,400.00	577,809,300.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.36.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	140,342,200.00	140,342,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.37.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10,088,100.00	10,088,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	175,014,000.00	175,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.39.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,299,525,000.00	1,299,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	71,920,700.00	71,920,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	79,751,000.00	79,751,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15,272,981,255.00	15,272,981,255.00	1,729,993,600.00	1,698,997,700.00	0.00	0.00		
<b>1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.03.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>10,902,385,200.00</b>	<b>10,902,385,200.00</b>	<b>253,102,600.00</b>	<b>249,158,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2,792,300.00	2,792,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	55,518,300.00	55,518,300.00	242,162,000.00	238,218,100.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.03.11.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	198,000,000.00	198,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	54,136,300.00	54,136,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.03.15.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3,979,738,100.00	3,979,738,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	186,940,800.00	186,940,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0 0.01.02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	6,371,259,400.00	6,371,259,400.00	10,940,600.00	10,940,600.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.2.04.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>10,967,006,300.00</b>	<b>10,967,006,300.00</b>	<b>38,112,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.01.1.01.0.00.0.0.01.02.2.04.09.	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	138,758,400.00	138,758,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0.01.02.2.04.10.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1,658,560,000.00	1,658,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0.01.02.2.04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	5,519,677,000.00	5,519,677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0.01.02.2.04.14.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	125,463,300.00	125,463,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0.01.02.2.04.15.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	306,960,000.00	306,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0.01.02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.0.00.0.0.01.02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3,163,587,600.00	3,163,587,600.00	38,112,400.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>369,517,072,774.00</b>	<b>369,517,072,774.00</b>	<b>35,492,095,432.00</b>	<b>26,896,450,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.02.0.01.02.0.0.0.00.01.</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>72,525,986,453.00</b>	<b>72,525,986,453.00</b>	<b>2,230,606,939.00</b>	<b>1,924,059,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.02.0.01.02.0.0.0.00.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>72,525,986,453.00</b>	<b>72,525,986,453.00</b>	<b>2,230,606,939.00</b>	<b>1,924,059,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.02.0.01.02.0.0.0.00.01.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>51,501,800.00</b>	<b>51,501,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.0.01.02.0.00.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,001,900.00	27,001,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.01.06 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,499,900.00	24,499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.0.01.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>49,906,203,240.00</b>	<b>49,906,203,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.02.01 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49,809,503,240.00	49,809,503,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.02.07 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	96,700,000.00	96,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.0.01.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>212,315,000.00</b>	<b>212,315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.05.02 .	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24,905,000.00	24,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.05.11 .	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	187,410,000.00	187,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.0.01.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>611,899,100.00</b>	<b>611,899,100.00</b>	<b>51,244,800.00</b>	<b>46,365,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.06.01 .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,002,600.00	10,002,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,895,800.00	110,895,800.00	4,993,100.00	4,850,000.00	0.00	0.00		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.06.03 .	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23,572,800.00	23,572,800.00	46,251,700.00	41,515,000.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133,131,200.00	133,131,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	159,304,700.00	159,304,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174,992,000.00	174,992,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.0.01.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>196,538,481.00</b>	<b>175,421,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	7,500,000.00	7,500,000.00	196,538,481.00	175,421,400.00	0.00	0.00		
<b>1.02.0.01.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>925,618,800.00</b>	<b>925,618,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89,884,200.00	89,884,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	835,734,600.00	835,734,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.0.01.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,969,125,000.00</b>	<b>1,969,125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	945,550,000.00	945,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.0.01.02.0.00. 0.00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,023,575,000.00	1,023,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.02.0.01.02.0.0</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>18,841,823,513.00</b>	<b>18,841,823,513.00</b>	<b>1,982,823,658.00</b>	<b>1,702,272,914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>0.0.00.01.01.2.1</b>									
<b>0.</b>									
1.02.0.01.02.0.00.	Pelayanan dan Penunjang	18,841,823,513.00	18,841,823,513.00	1,982,823,658.00	1,702,272,914.00	0.00	0.00		
0.00.01.01.2.10.01	Pelayanan BLUD								
<b>1.02.0.01.02.0.0</b>	<b>RSUD CIBABAT</b>	<b>44,513,530,268.00</b>	<b>44,513,530,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>0.0.00.02.</b>									
<b>1.02.0.01.02.0.0</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	<b>44,513,530,268.00</b>	<b>44,513,530,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>0.0.00.02.01.</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH</b>								
	<b>KABUPATEN/KOTA</b>								
<b>1.02.0.01.02.0.0</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>44,513,530,268.00</b>	<b>44,513,530,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>0.0.00.02.01.2.0</b>	<b>Perangkat Daerah</b>								
<b>2.</b>									
1.02.0.01.02.0.00.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	44,513,530,268.00	44,513,530,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00.02.01.2.02.01	ASN								
<b>1.02.1.02.0.00.0.</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>75,300,228,982.00</b>	<b>75,300,228,982.00</b>	<b>17,975,706,445.00</b>	<b>13,334,182,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00.01.</b>									
<b>1.02.1.02.0.00.0.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA</b>	<b>66,792,375,376.00</b>	<b>66,792,375,376.00</b>	<b>17,975,706,445.00</b>	<b>13,334,182,341.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00.01.02.</b>	<b>KESEHATAN PERORANGAN DAN</b>								
	<b>UPAYA KESEHATAN</b>								
	<b>MASYARAKAT</b>								
<b>1.02.1.02.0.00.0.</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan</b>	<b>5,965,020,109.00</b>	<b>5,965,020,109.00</b>	<b>17,807,018,675.00</b>	<b>13,211,867,641.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00.01.02.2.01.</b>	<b>Kesehatan untuk UKM dan UKP</b>								
	<b>Kewenangan Daerah</b>								
	<b>Kabupaten/Kota</b>								
1.02.1.02.0.00.0.0	Pembangunan Puskesmas	1,746,183,000.00	1,746,183,000.00	13,777,906,000.00	11,858,801,000.00	0.00	0.00		
0.01.02.2.01.02.									
1.02.1.02.0.00.0.0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	84,492,210.00	84,492,210.00	2,096,332,675.00	52,095,846.00	0.00	0.00		
0.01.02.2.01.09.	Puskesmas								
1.02.1.02.0.00.0.0	Pengadaan Prasarana dan	0.00	0.00	832,000,000.00	712,821,800.00	0.00	0.00		
0.01.02.2.01.13.	Pendukung Fasilitas Pelayanan								
	Kesehatan								

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.01.14.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	25,396,000.00	25,396,000.00	1,100,780,000.00	588,148,995.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.01.16.	Pengadaan Obat, Vaksin	4,108,948,899.00	4,108,948,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.1.02.0.00.0.0 00.01.02.2.02.</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60,330,754,367.00</b>	<b>60,330,754,367.00</b>	<b>47,569,000.00</b>	<b>12,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	537,882,700.00	537,882,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1,771,143,700.00	1,771,143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	111,321,200.00	111,321,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	601,773,600.00	601,773,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	355,204,000.00	355,204,000.00	13,000,000.00	12,700,000.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	238,991,400.00	238,991,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	206,432,500.00	206,432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.08.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	203,149,200.00	203,149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	172,995,000.00	172,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	231,062,900.00	231,062,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	284,794,300.00	284,794,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	284,605,000.00	284,605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5,762,375,100.00	5,762,375,100.00	34,569,000.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,583,568,400.00	1,583,568,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	126,101,000.00	126,101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	712,215,500.00	712,215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.18.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	744,055,100.00	744,055,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	119,888,000.00	119,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.23.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	59,500,000.00	59,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	787,012,200.00	787,012,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35,438,279,567.00	35,438,279,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.29.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	45,190,000.00	45,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas	477,000,000.00	477,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.34.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8,946,550,000.00	8,946,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.35.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	370,839,000.00	370,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	158,825,000.00	158,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.1.02.0.00.0.0 00.01.02.2.03.</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>92,881,700.00</b>	<b>92,881,700.00</b>	<b>121,118,770.00</b>	<b>109,614,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.03.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	19,579,000.00	19,579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.03.02.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	72,452,700.00	72,452,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.03.03.	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	850,000.00	850,000.00	121,118,770.00	109,614,700.00	0.00	0.00		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.04.</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>403,719,200.00</b>	<b>403,719,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.02.2.04.03.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	403,719,200.00	403,719,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>8,310,980,606.00</b>	<b>8,310,980,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>8,310,980,606.00</b>	<b>8,310,980,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.03.2.02.02.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2,922,000,000.00	2,922,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.03.2.02.03.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,388,980,606.00	5,388,980,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>48,139,000.00</b>	<b>48,139,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.04.2.01.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.03.</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>37,914,000.00</b>	<b>37,914,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.04.2.03.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	37,914,000.00	37,914,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.04.</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>7,925,000.00</b>	<b>7,925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.01.04.2.04.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	7,925,000.00	7,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>148,734,000.00</b>	<b>148,734,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.01.</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>23,775,000.00</b>	<b>23,775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.1.02.0.00.0.0.01.05.2.01.01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	23,775,000.00	23,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.02.</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>95,015,000.00</b>	<b>95,015,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.1.02.0.00.0.0.01.05.2.02.01.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	95,015,000.00	95,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29,944,000.00</b>	<b>29,944,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.1.02.0.00.0.0.01.05.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	29,944,000.00	29,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.02.</b>	<b>RSUD CIBABAT</b>	<b>177,177,327,071.00</b>	<b>177,177,327,071.00</b>	<b>15,285,782,048.00</b>	<b>11,638,208,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>177,177,327,071.00</b>	<b>177,177,327,071.00</b>	<b>15,285,782,048.00</b>	<b>11,638,208,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.01.</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,188,367,440.00</b>	<b>1,188,367,440.00</b>	<b>10,600,380,048.00</b>	<b>9,319,932,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.0 0.02.02.2.01.01.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1,188,367,440.00	1,188,367,440.00	1,196,412,160.00	1,196,412,160.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.02.02.2.01.14.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0.00	0.00	9,403,967,888.00	8,123,520,213.00	0.00	0.00		
<b>1.02.1.02.0.00.0.0 00.02.02.2.02.</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>175,988,959,631.00</b>	<b>175,988,959,631.00</b>	<b>4,685,402,000.00</b>	<b>2,318,276,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.02.02.2.02.13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	23,049,970,000.00	23,049,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.0.00.0.0 0.02.02.2.02.32.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	152,938,989,631.00	152,938,989,631.00	4,685,402,000.00	2,318,276,130.00	0.00	0.00		
<b>1.03.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>69,135,068,260.00</b>	<b>69,135,068,260.00</b>	<b>188,691,229,462.00</b>	<b>154,926,325,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.0.01.03.0.0 0.0.00.01.</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>9,531,393,200.00</b>	<b>9,531,393,200.00</b>	<b>202,731,680.00</b>	<b>184,947,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.0.01.03.0.0 0.0.00.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9,531,393,200.00</b>	<b>9,531,393,200.00</b>	<b>202,731,680.00</b>	<b>184,947,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.0.01.03.0.0 0.0.00.01.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>78,229,800.00</b>	<b>78,229,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73,729,800.00	73,729,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.03.0.01.03.0.0 0.0.00.01.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7,968,763,700.00</b>	<b>7,968,763,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.02.01 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,920,044,000.00	7,920,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.02.05 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999,900.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.02.07 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47,719,800.00	47,719,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.03.0.01.03.0.0 0.0.00.01.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>152,057,000.00</b>	<b>152,057,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.05.10 .	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	152,057,000.00	152,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.03.0.01.03.0.0 0.0.00.01.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>449,037,100.00</b>	<b>449,037,100.00</b>	<b>202,731,680.00</b>	<b>184,947,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117,823,600.00	117,823,600.00	202,731,680.00	184,947,400.00	0.00	0.00		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.06.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175,816,300.00	175,816,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.06.05 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,351,200.00	28,351,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.06.06 .	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.06.09 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103,046,000.00	103,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.03.0.01.03.0.0</b> <b>0.0.00.01.01.2.0</b> <b>8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>233,590,600.00</b>	<b>233,590,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85,440,000.00	85,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112,150,600.00	112,150,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.03.0.01.03.0.0</b> <b>0.0.00.01.01.2.0</b> <b>9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>649,715,000.00</b>	<b>649,715,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	560,090,000.00	560,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.0.01.03.0.00. 0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89,625,000.00	89,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.03.1.03.0.00.0.</b> <b>00.01.</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>41,104,029,426.00</b>	<b>41,104,029,426.00</b>	<b>175,401,877,962.00</b>	<b>145,491,580,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.1.03.0.00.0.</b> <b>00.01.08.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>5,242,074,120.00</b>	<b>5,242,074,120.00</b>	<b>55,627,272,000.00</b>	<b>46,563,565,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.1.03.0.00.0.</b> <b>00.01.08.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>5,242,074,120.00</b>	<b>5,242,074,120.00</b>	<b>55,627,272,000.00</b>	<b>46,563,565,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.08.2.01.01.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	656,930,000.00	656,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.08.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4,376,517,420.00	4,376,517,420.00	55,627,272,000.00	46,563,565,838.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.08.2.01.05.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	208,626,700.00	208,626,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>34,566,097,886.00</b>	<b>34,566,097,886.00</b>	<b>119,774,605,962.00</b>	<b>98,928,014,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.1.03.0.00.0.00.01.10.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>34,566,097,886.00</b>	<b>34,566,097,886.00</b>	<b>119,774,605,962.00</b>	<b>98,928,014,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.10.2.01.03.	Pengelolaan Leger Jalan	309,998,600.00	309,998,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.10.2.01.04.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	164,959,800.00	164,959,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.10.2.01.06.	Pelebaran Jalan Menuju Standar	62,000,000.00	62,000,000.00	450,000,000.00	341,919,000.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.10.2.01.10.	Pemeliharaan Berkala Jalan	27,361,962,695.00	27,361,962,695.00	13,792,613,000.00	12,940,885,409.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.10.2.01.11.	Pemeliharaan Rutin Jalan	3,523,432,553.00	3,523,432,553.00	300,000,000.00	297,013,750.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.10.2.01.14.	Pembangunan Underpass	2,110,406,538.00	2,110,406,538.00	105,231,992,962.00	85,348,196,797.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.10.2.01.16.	Penggantian Jembatan	96,600,200.00	96,600,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.10.2.01.20.	Pemeliharaan Berkala Jembatan	936,737,500.00	936,737,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>109,400,000.00</b>	<b>109,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>109,400,000.00</b>	<b>109,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.1.03.0.00.0.0.0.01.11.2.01.02.	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0.0.0.01.11.2.01.04.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	87,400,000.00	87,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1,186,457,420.00</b>	<b>1,186,457,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.01.</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>423,999,820.00</b>	<b>423,999,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.1.03.0.00.0.0.0.0.01.12.2.01.01.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0.0.0.0.01.12.2.01.02.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0.0.0.0.0.01.12.2.01.03.	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	138,097,420.00	138,097,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0.0.0.0.0.0.01.12.2.01.04.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	48,902,400.00	48,902,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.02.</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.1.03.0.00.0.0.0.0.0.0.0.01.12.2.02.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0.01.12.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.03.</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>98,000,000.00</b>	<b>98,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.1.03.0.00.0.0.01.12.2.03.02.	Sistem Informasi Penataan Ruang	98,000,000.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.04.</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>564,457,600.00</b>	<b>564,457,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.1.03.0.00.0.0.01.12.2.04.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	312,300,000.00	312,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0.01.12.2.04.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	57,100,000.00	57,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.0.00.0.0.01.12.2.04.04.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	195,057,600.00	195,057,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.03.1.04.1.03.0.00.01.</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>18,499,645,634.00</b>	<b>18,499,645,634.00</b>	<b>13,086,619,820.00</b>	<b>9,249,797,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.1.04.1.03.0.00.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>4,446,933,100.00</b>	<b>4,446,933,100.00</b>	<b>5,031,250,743.00</b>	<b>3,153,943,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.1.04.1.03.0.00.01.02.2.01.</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4,124,108,100.00</b>	<b>4,124,108,100.00</b>	<b>4,310,099,740.00</b>	<b>2,489,180,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.02.2.01.24.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	617,603,000.00	617,603,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.02.2.01.29.	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	96,900,000.00	96,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.02.2.01.46.	Normalisasi/Restorasi Sungai	3,164,605,100.00	3,164,605,100.00	4,310,099,740.00	2,489,180,282.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.02.2.01.56.	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	245,000,000.00	245,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.03.1.04.1.03.0.00.01.02.2.02.</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>322,825,000.00</b>	<b>322,825,000.00</b>	<b>721,151,003.00</b>	<b>664,763,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.02.2.02.14.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	172,825,000.00	172,825,000.00	671,151,003.00	616,392,916.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.02.2.02.15.	Rehabilitasi Bendung Irigasi	0.00	0.00	50,000,000.00	48,370,300.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.02.2.02.21.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.03.1.04.1.03.0.00.01.03.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>5,801,602,971.00</b>	<b>5,801,602,971.00</b>	<b>4,250,765,348.00</b>	<b>3,471,969,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.1.04.1.03.0.00.01.03.2.01.</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5,801,602,971.00</b>	<b>5,801,602,971.00</b>	<b>4,250,765,348.00</b>	<b>3,471,969,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.03.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1,370,476,971.00	1,370,476,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.03.2.01.02.	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.03.2.01.05.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	0.00	0.00	760,000,000.00	749,209,707.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.03.2.01.07.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	297,535,000.00	297,535,000.00	3,249,265,348.00	2,558,043,429.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.03.2.01.14.	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	139,900,000.00	139,900,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0.01.03.2.01.15.	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	3,723,691,000.00	3,723,691,000.00	241,500,000.00	163,018,268.00	0.00	0.00		
<b>1.03.1.04.1.03.0.00.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>5,641,525,538.00</b>	<b>5,641,525,538.00</b>	<b>3,228,990,254.00</b>	<b>2,623,884,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.03.1.04.1.03.0.00.01.05.2.01.</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5,641,525,538.00</b>	<b>5,641,525,538.00</b>	<b>3,228,990,254.00</b>	<b>2,623,884,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.1.04.1.03.0.00.01.05.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,592,235,300.00	1,592,235,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.00.01.05.2.01.05.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	538,120,500.00	538,120,500.00	226,484,254.00	221,378,873.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.00.01.05.2.01.08.	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.00.01.05.2.01.10.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1,789,855,400.00	1,789,855,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.00.01.05.2.01.11.	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	157,880,000.00	157,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.00.01.05.2.01.12.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1,528,434,338.00	1,528,434,338.00	3,002,506,000.00	2,402,506,000.00	0.00	0.00		
<b>1.03.1.04.1.03.0.00.01.06.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>2,084,584,025.00</b>	<b>2,084,584,025.00</b>	<b>575,613,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.1.04.1.03.0.00.01.06.2.01.</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,084,584,025.00</b>	<b>2,084,584,025.00</b>	<b>575,613,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.04.1.03.0.0 0.01.06.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	227,274,250.00	227,274,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0 0.01.06.2.01.03.	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	99,863,000.00	99,863,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0 0.01.06.2.01.05.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	33,908,275.00	33,908,275.00	575,613,475.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0 0.01.06.2.01.06.	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	111,438,500.00	111,438,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0 0.01.06.2.01.07.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1,317,246,000.00	1,317,246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0 0.01.06.2.01.08.	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	100,503,000.00	100,503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.03.1.04.1.03.0.0 0.01.06.2.01.09.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	194,351,000.00	194,351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.03.1.04.1.03.0.00.01.07.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>525,000,000.00</b>	<b>525,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.03.1.04.1.03.0.00.01.07.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>525,000,000.00</b>	<b>525,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.03.1.04.1.03.0.0 0.01.07.2.01.02.	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	525,000,000.00	525,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>29,668,732,061.00</b>	<b>29,668,732,061.00</b>	<b>1,024,383,400.00</b>	<b>992,150,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.04.1.01.04.1.03.0.00.01.</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>12,418,195,500.00</b>	<b>12,418,195,500.00</b>	<b>310,283,700.00</b>	<b>295,330,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.04.1.01.04.1.03.0.00.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12,418,195,500.00</b>	<b>12,418,195,500.00</b>	<b>310,283,700.00</b>	<b>295,330,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.04.1.01.04.1.0</b> <b>3.0.00.01.01.2.0</b> <b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>139,133,000.00</b>	<b>139,133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54,240,000.00	54,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84,893,000.00	84,893,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.01.04.1.0</b> <b>3.0.00.01.01.2.0</b> <b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9,102,886,400.00</b>	<b>9,102,886,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,095,822,200.00	9,095,822,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,064,200.00	7,064,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.01.04.1.0</b> <b>3.0.00.01.01.2.0</b> <b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>126,550,000.00</b>	<b>126,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	126,550,000.00	126,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.01.04.1.0</b> <b>3.0.00.01.01.2.0</b> <b>5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>141,116,300.00</b>	<b>141,116,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	141,116,300.00	141,116,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.01.04.1.0</b> <b>3.0.00.01.01.2.0</b> <b>6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>466,623,800.00</b>	<b>466,623,800.00</b>	<b>310,283,700.00</b>	<b>295,330,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120,314,700.00	120,314,700.00	310,283,700.00	295,330,530.00	0.00	0.00		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,731,500.00	45,731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,724,600.00	59,724,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215,305,000.00	215,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.01.04.1.0 3.0.00.01.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>400,325,000.00</b>	<b>400,325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400,325,000.00	400,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.01.04.1.0 3.0.00.01.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,134,201,000.00</b>	<b>1,134,201,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117,660,000.00	117,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	973,800,000.00	973,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42,741,000.00	42,741,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.01.04.1.03.0.00.01.01.2.09.9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>907,360,000.00</b>	<b>907,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.04.1.01.04.1.03. 0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	907,360,000.00	907,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>17,250,536,561.00</b>	<b>17,250,536,561.00</b>	<b>714,099,700.00</b>	<b>696,820,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>3,301,846,171.00</b>	<b>3,301,846,171.00</b>	<b>413,240,000.00</b>	<b>397,603,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.02.2.03.</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>598,508,500.00</b>	<b>598,508,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.02.2.03.01.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	547,802,500.00	547,802,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.02.2.03.02.	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50,706,000.00	50,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.02.2.05.</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>2,703,337,671.00</b>	<b>2,703,337,671.00</b>	<b>413,240,000.00</b>	<b>397,603,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.02.2.05.01.	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2,703,337,671.00	2,703,337,671.00	413,240,000.00	397,603,416.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.03.</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>5,121,075,200.00</b>	<b>5,121,075,200.00</b>	<b>15,852,900.00</b>	<b>15,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.03.2.02.</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>252,271,500.00</b>	<b>252,271,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.03.2.02.01.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	88,886,500.00	88,886,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.03.2.02.02.	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	163,385,000.00	163,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.03.2.03.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>4,868,803,700.00</b>	<b>4,868,803,700.00</b>	<b>15,852,900.00</b>	<b>15,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.03.2.03.01.	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	459,650,500.00	459,650,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.03.2.03.02.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3,738,184,600.00	3,738,184,600.00	15,852,900.00	15,800,000.00	0.00	0.00		
1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.03.2.03.03.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	670,968,600.00	670,968,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.04.</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>1,023,345,000.00</b>	<b>1,023,345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.04.2.01.</b>	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,023,345,000.00</b>	<b>1,023,345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.04.2.01.01.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1,023,345,000.00	1,023,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>7,804,270,190.00</b>	<b>7,804,270,190.00</b>	<b>285,006,800.00</b>	<b>283,416,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.04.1.04.1.03.0.00.01.05.2.01.</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>7,804,270,190.00</b>	<b>7,804,270,190.00</b>	<b>285,006,800.00</b>	<b>283,416,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.05.2.01.01.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	326,900,550.00	326,900,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.05.2.01.02.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2,898,033,290.00	2,898,033,290.00	285,006,800.00	283,416,682.00	0.00	0.00		
<b>1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.05.2.01.02</b>	<b>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</b>	<b>2,898,033,290.00</b>	<b>2,898,033,290.00</b>	<b>285,006,800.00</b>	<b>283,416,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.04.1.04.1.03.0.0 0.01.05.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4,579,336,350.00	4,579,336,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>28,565,859,505.01</b>	<b>28,565,859,505.01</b>	<b>1,239,370,900.00</b>	<b>1,207,168,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.05.0.01.05.0.0 0.0.00.03.</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>	<b>17,683,719,845.01</b>	<b>17,683,719,845.01</b>	<b>242,366,200.00</b>	<b>237,307,793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.05.0.01.05.0.0 0.0.00.03.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17,683,719,845.01</b>	<b>17,683,719,845.01</b>	<b>242,366,200.00</b>	<b>237,307,793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.05.0.01.05.0.0 0.0.00.03.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>425,604,600.00</b>	<b>425,604,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.0. 0.00.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.0. 0.00.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.0. 0.00.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	407,604,600.00	407,604,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.05.0.01.05.0.0</b> <b>0.0.00.03.01.2.0</b> <b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan</b> <b>Perangkat Daerah</b>	<b>15,155,402,845.01</b>	<b>15,155,402,845.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,111,737,845.01	15,111,737,845.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38,615,000.00	38,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.0.01.05.0.0</b> <b>0.0.00.03.01.2.0</b> <b>5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian</b> <b>Perangkat Daerah</b>	<b>164,522,000.00</b>	<b>164,522,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	113,022,000.00	113,022,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	51,500,000.00	51,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.0.01.05.0.0</b> <b>0.0.00.03.01.2.0</b> <b>6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>359,955,000.00</b>	<b>359,955,000.00</b>	<b>62,366,200.00</b>	<b>58,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,692,300.00	89,692,300.00	62,366,200.00	58,850,000.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,999,900.00	4,999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44,420,900.00	44,420,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44,793,900.00	44,793,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165,548,000.00	165,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.0.01.05.0.0 0.0.00.03.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>159,795,400.00</b>	<b>159,795,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4,445,400.00	4,445,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155,350,000.00	155,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.0.01.05.0.0 0.0.00.03.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>328,665,000.00</b>	<b>328,665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38,615,000.00	38,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239,050,000.00	239,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.05.0.01.05.0.0</b> <b>0.0.00.03.01.2.0</b> <b>9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,089,775,000.00</b>	<b>1,089,775,000.00</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>178,457,793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,056,975,000.00	1,056,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32,800,000.00	32,800,000.00	180,000,000.00	178,457,793.00	0.00	0.00		
<b>1.05.0.01.05.0.0</b> <b>0.0.00.04.</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>4,479,222,760.00</b>	<b>4,479,222,760.00</b>	<b>229,540,900.00</b>	<b>220,887,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.05.0.01.05.0.0</b> <b>0.0.00.04.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,479,222,760.00</b>	<b>4,479,222,760.00</b>	<b>229,540,900.00</b>	<b>220,887,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.05.0.01.05.0.0</b> <b>0.0.00.04.01.2.0</b> <b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>41,856,800.00</b>	<b>41,856,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,666,400.00	17,666,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,190,400.00	24,190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.0.01.05.0.0</b> <b>0.0.00.04.01.2.0</b> <b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3,020,811,860.00</b>	<b>3,020,811,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,943,542,060.00	2,943,542,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	77,269,800.00	77,269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.05.0.01.05.0.0 0.0.00.04.01.2.0 3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>44,300,000.00</b>	<b>44,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	44,300,000.00	44,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.0.01.05.0.0 0.0.00.04.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>255,634,600.00</b>	<b>255,634,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84,193,200.00	84,193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	171,441,400.00	171,441,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.0.01.05.0.0 0.0.00.04.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>366,383,800.00</b>	<b>366,383,800.00</b>	<b>31,379,900.00</b>	<b>30,621,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87,757,600.00	87,757,600.00	31,379,900.00	30,621,750.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,833,200.00	57,833,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46,069,000.00	46,069,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174,724,000.00	174,724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.0.01.05.0.0 0.0.00.04.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>272,016,000.00</b>	<b>272,016,000.00</b>	<b>159,161,000.00</b>	<b>151,266,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	272,016,000.00	272,016,000.00	159,161,000.00	151,266,000.00	0.00	0.00		
<b>1.05.0.01.05.0.0 0.0.00.04.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>159,692,400.00</b>	<b>159,692,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111,692,400.00	111,692,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.0.01.05.0.0 0.0.00.04.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>318,527,300.00</b>	<b>318,527,300.00</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215,370,000.00	215,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.0.01.05.0.00. 0.00.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103,157,300.00	103,157,300.00	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00	0.00		
<b>1.05.1.05.0.00.0. 00.03.</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>	<b>4,011,964,500.00</b>	<b>4,011,964,500.00</b>	<b>398,622,000.00</b>	<b>383,343,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.05.1.05.0.00.0. 00.03.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2,446,528,900.00</b>	<b>2,446,528,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.05.1.05.0.00.0. 00.03.02.2.01.</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,686,926,800.00</b>	<b>1,686,926,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0.0 0.03.02.2.01.02.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1,112,695,000.00	1,112,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.0 0.03.02.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	61,888,000.00	61,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.0 0.03.02.2.01.07.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	354,920,000.00	354,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.0 0.03.02.2.01.08.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	57,423,800.00	57,423,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.0 0.03.02.2.01.10.	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.03.02.2.02.</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>748,832,100.00</b>	<b>748,832,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.1.05.0.00.0.0 0.03.02.2.02.01.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	134,774,100.00	134,774,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.0 0.03.02.2.02.02.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	28,998,000.00	28,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.0 0.03.02.2.02.03.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	585,060,000.00	585,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.03.02.2.03.</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>10,770,000.00</b>	<b>10,770,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.1.05.0.00.0.00.03.02.2.03.01.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10,770,000.00	10,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.03.04.</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>1,565,435,600.00</b>	<b>1,565,435,600.00</b>	<b>398,622,000.00</b>	<b>383,343,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.03.04.2.01.</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,201,385,600.00</b>	<b>1,201,385,600.00</b>	<b>384,865,000.00</b>	<b>369,653,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.1.05.0.00.0.00.03.04.2.01.01.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	980,580,000.00	980,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.00.03.04.2.01.02.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	220,805,600.00	220,805,600.00	375,343,000.00	360,653,000.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.00.03.04.2.01.03.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0.00	0.00	9,522,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.03.04.2.02.</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>331,605,000.00</b>	<b>331,605,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.1.05.0.00.0.00.03.04.2.02.01.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	310,005,000.00	310,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.00.03.04.2.02.02.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.03.04.2.04.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>32,445,000.00</b>	<b>32,445,000.00</b>	<b>13,757,000.00</b>	<b>13,690,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.1.05.0.00.0.00.03.04.2.04.01.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	32,445,000.00	32,445,000.00	13,757,000.00	13,690,000.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.04.</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>2,390,952,400.00</b>	<b>2,390,952,400.00</b>	<b>368,841,800.00</b>	<b>365,629,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>2,390,952,400.00</b>	<b>2,390,952,400.00</b>	<b>368,841,800.00</b>	<b>365,629,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.01.</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>755,126,800.00</b>	<b>755,126,800.00</b>	<b>20,992,200.00</b>	<b>19,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.1.05.0.00.0.0.04.03.2.01.02.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	755,126,800.00	755,126,800.00	20,992,200.00	19,500,000.00	0.00	0.00		
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.02.</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>658,906,700.00</b>	<b>658,906,700.00</b>	<b>347,849,600.00</b>	<b>346,129,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.1.05.0.00.0.0.04.03.2.02.04.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	89,723,900.00	89,723,900.00	331,717,100.00	330,379,700.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.0.04.03.2.02.05.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	192,176,800.00	192,176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.0.04.03.2.02.06.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	233,576,000.00	233,576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.0.04.03.2.02.07.	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	102,400,000.00	102,400,000.00	16,132,500.00	15,750,000.00	0.00	0.00		
1.05.1.05.0.00.0.0.04.03.2.02.08.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	41,030,000.00	41,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.2.03.</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>976,918,900.00</b>	<b>976,918,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.05.1.05.0.00.0.0.04.03.2.03.04.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	976,918,900.00	976,918,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.06.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>14,891,857,436.00</b>	<b>14,891,857,436.00</b>	<b>311,570,200.00</b>	<b>289,917,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.2.14.2.08.06.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	6,538,969,000.00	6,538,969,000.00	134,037,000.00	131,579,500.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.08.06.02.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	1,532,838,800.00	1,532,838,800.00	37,092,000.00	36,300,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.08.06.02.2.03.	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	1,532,838,800.00	1,532,838,800.00	37,092,000.00	36,300,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.08.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	792,938,400.00	792,938,400.00	37,092,000.00	36,300,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.08.06.02.2.03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	151,560,000.00	151,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.08.06.02.2.03.04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	435,190,400.00	435,190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.08.06.02.2.03.05.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	153,150,000.00	153,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.08.06.04.	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	1,269,081,900.00	1,269,081,900.00	51,945,000.00	51,802,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.08.06.04.2.01.	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	1,269,081,900.00	1,269,081,900.00	51,945,000.00	51,802,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.08.06.04.2.01.01.	Penyediaan Perumahan	46,150,000.00	46,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.04.2.01.02.	Penyediaan Sandang	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu	208,545,000.00	208,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.04.2.01.04.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7,750,000.00	7,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	445,217,000.00	445,217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.04.2.01.07.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9,625,000.00	9,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.04.2.01.09.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	15,402,900.00	15,402,900.00	51,945,000.00	51,802,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.04.2.01.10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	220,192,000.00	220,192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.04.2.01.11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.04.2.01.12.	Pemberian Layanan Rujukan	31,200,000.00	31,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.06.1.06.2.14.2.08.06.05.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>3,011,922,000.00</b>	<b>3,011,922,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.06.1.06.2.14.2.08.06.05.2.02.</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3,011,922,000.00</b>	<b>3,011,922,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.05.2.02.01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	278,320,000.00	278,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.05.2.02.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	433,782,200.00	433,782,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2,299,819,800.00	2,299,819,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.06.1.06.2.14.2.08.06.06.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>725,126,300.00</b>	<b>725,126,300.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>43,477,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.06.1.06.2.14.2.08.06.06.2.01.</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>256,686,300.00</b>	<b>256,686,300.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>43,477,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.06.2.01.01.	Penyediaan Makanan	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.06.2.01.02.	Penyediaan Sandang	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.06.2.01.03.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4,946,300.00	4,946,300.00	45,000,000.00	43,477,500.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.06.2.01.05.	Pelayanan Dukungan Psikososial	54,740,000.00	54,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.06.1.06.2.14.2.08.06.06.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>468,440,000.00</b>	<b>468,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.06.1.06.2.14.2.0 8.06.06.2.02.02.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	468,440,000.00	468,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.06.2.11.06.2.14.2.08.06.</b>	<b>Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung</b>	<b>8,352,888,436.00</b>	<b>8,352,888,436.00</b>	<b>177,533,200.00</b>	<b>158,338,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.06.2.11.06.2.14.2.08.06.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8,352,888,436.00</b>	<b>8,352,888,436.00</b>	<b>177,533,200.00</b>	<b>158,338,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1.06.2.11.06.2.14.2.08.06.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>111,975,000.00</b>	<b>111,975,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.06.2.11.06.2.14.2.08.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.01.07 .	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101,975,000.00	101,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.06.2.11.06.2.1 4.2.08.06.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7,198,480,536.00</b>	<b>7,198,480,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.02.01 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,144,080,536.00	7,144,080,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.02.05 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54,400,000.00	54,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.06.2.11.06.2.1 4.2.08.06.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>40,950,100.00</b>	<b>40,950,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.05.11 .	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40,950,100.00	40,950,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.06.2.11.06.2.1 4.2.08.06.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>347,928,500.00</b>	<b>347,928,500.00</b>	<b>177,533,200.00</b>	<b>158,338,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.06.01 .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,707,400.00	5,707,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63,560,000.00	63,560,000.00	177,533,200.00	158,338,150.00	0.00	0.00		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.06.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53,695,200.00	53,695,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.06.05 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,533,900.00	27,533,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.06.08 .	Fasilitas Kunjungan Tamu	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.06.09 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192,932,000.00	192,932,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.06.2.11.06.2.1 4.2.08.06.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>169,675,000.00</b>	<b>169,675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.07.09 .	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	169,675,000.00	169,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.06.2.11.06.2.1 4.2.08.06.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>197,903,500.00</b>	<b>197,903,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.08.02 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,065,000.00	18,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.08.03 .	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,840,000.00	38,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.08.04 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140,998,500.00	140,998,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1.06.2.11.06.2.1 4.2.08.06.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>285,975,800.00</b>	<b>285,975,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.06.2.11.06.2.14. 2.08.06.01.2.09.02 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285,975,800.00	285,975,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>163,292,890,208.00</b>	<b>163,292,890,208.00</b>	<b>161,340,809,602.00</b>	<b>32,737,591,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.07.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>9,226,637,953.00</b>	<b>9,226,637,953.00</b>	<b>211,123,098.00</b>	<b>207,426,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>BIDANG TENAGA KERJA</b>								
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>3,546,155,800.00</b>	<b>3,546,155,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1,259,910,400.00</b>	<b>1,259,910,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>933,224,800.00</b>	<b>933,224,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.2.07.3.32.0.0.01.03.2.01.01.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	933,224,800.00	933,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.2.02.</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>23,231,800.00</b>	<b>23,231,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.2.07.3.32.0.0.01.03.2.02.01.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	23,231,800.00	23,231,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.2.05.</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>303,453,800.00</b>	<b>303,453,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.2.07.3.32.0.0.01.03.2.05.01.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	303,453,800.00	303,453,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.04.</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>782,298,400.00</b>	<b>782,298,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.04.2.01.</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>204,849,200.00</b>	<b>204,849,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.2.07.3.32.0.0.01.04.2.01.02.	Pelayanan antar Kerja	204,849,200.00	204,849,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.04.2.03.</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>549,706,500.00</b>	<b>549,706,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.2.07.3.32.0.0.01.04.2.03.01.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	109,350,000.00	109,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.2.07.3.32.0.0.01.04.2.03.02.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	440,356,500.00	440,356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.04.2.05.</b>	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27,742,700.00</b>	<b>27,742,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.2.07.3.32.0.01.04.2.05.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,742,700.00	27,742,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>1,503,947,000.00</b>	<b>1,503,947,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.01.</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>558,513,200.00</b>	<b>558,513,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.2.07.3.32.0.01.05.2.01.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	98,193,800.00	98,193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.2.07.3.32.0.01.05.2.01.02.	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	98,193,800.00	98,193,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.2.07.3.32.0.01.05.2.01.03.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	362,125,600.00	362,125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.02.</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>945,433,800.00</b>	<b>945,433,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.2.07.3.32.0.01.05.2.02.01.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	476,175,300.00	476,175,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.2.07.3.32.0.0 0.01.05.2.02.02.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	122,033,500.00	122,033,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.2.07.3.32.0.0 0.01.05.2.02.03.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	177,208,500.00	177,208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.2.07.3.32.0.0 0.01.05.2.02.04.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	170,016,500.00	170,016,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.3.32.07.3.3 2.0.00.01.</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>5,680,482,153.00</b>	<b>5,680,482,153.00</b>	<b>211,123,098.00</b>	<b>207,426,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.07.3.32.07.3.3 2.0.00.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,680,482,153.00</b>	<b>5,680,482,153.00</b>	<b>211,123,098.00</b>	<b>207,426,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.07.3.32.07.3.3 2.0.00.01.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>131,848,100.00</b>	<b>131,848,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,714,700.00	30,714,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,043,700.00	6,043,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,462,000.00	6,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,394,900.00	3,394,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,404,000.00	3,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81,828,800.00	81,828,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.3.32.07.3.3 2.0.00.01.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,545,016,253.00</b>	<b>4,545,016,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,490,628,583.00	4,490,628,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,768,400.00	4,768,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	49,619,270.00	49,619,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.3.32.07.3.3 2.0.00.01.01.2.0 3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8,350,000.00</b>	<b>8,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8,350,000.00	8,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.3.32.07.3.3 2.0.00.01.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>36,539,900.00</b>	<b>36,539,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36,539,900.00	36,539,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.3.32.07.3.3 2.0.00.01.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>302,802,800.00</b>	<b>302,802,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,772,500.00	8,772,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71,800,500.00	71,800,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,448,800.00	15,448,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12,350,000.00	12,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170,431,000.00	170,431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.3.32.07.3.3 2.0.00.01.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>300,095,000.00</b>	<b>300,095,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>18,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0.00	0.00	20,000,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300,095,000.00	300,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.3.32.07.3.3 2.0.00.01.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151,130,100.00</b>	<b>151,130,100.00</b>	<b>149,121,900.00</b>	<b>146,925,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.3.32.07.3.32. 0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.3.32.07.3.32.0.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93,791,400.00	93,791,400.00	149,121,900.00	146,925,000.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48,938,700.00	48,938,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.07.3.32.07.3.32.0.00.01.01.2.08.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>204,700,000.00</b>	<b>204,700,000.00</b>	<b>42,001,198.00</b>	<b>42,001,198.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.07.3.32.07.3.32.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121,700,000.00	121,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.07.3.32.07.3.32.0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83,000,000.00	83,000,000.00	42,001,198.00	42,001,198.00	0.00	0.00		
<b>2.08.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>1,228,545,600.00</b>	<b>1,228,545,600.00</b>	<b>52,467,500.00</b>	<b>52,146,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.</b>	<b>Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung</b>	<b>1,228,545,600.00</b>	<b>1,228,545,600.00</b>	<b>52,467,500.00</b>	<b>52,146,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.02.</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>662,841,200.00</b>	<b>662,841,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.02.2.01.</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>114,683,700.00</b>	<b>114,683,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.08.1.06.2.14.2.08.06.02.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	114,683,700.00	114,683,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.02.2.02.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>444,258,200.00</b>	<b>444,258,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.08.1.06.2.14.2.08.06.02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	444,258,200.00	444,258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.02.2.03.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>103,899,300.00</b>	<b>103,899,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.08.1.06.2.14.2.08.06.02.2.03.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	103,899,300.00	103,899,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.03.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>112,793,900.00</b>	<b>112,793,900.00</b>	<b>22,071,000.00</b>	<b>21,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.03.2.02.</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>112,793,900.00</b>	<b>112,793,900.00</b>	<b>22,071,000.00</b>	<b>21,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.08.1.06.2.14.2.08.06.03.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	112,793,900.00	112,793,900.00	22,071,000.00	21,750,000.00	0.00	0.00		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.04.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>202,075,900.00</b>	<b>202,075,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.04.2.01.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>152,800,700.00</b>	<b>152,800,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.1.06.2.14.2.0 8.06.04.2.01.03.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	152,800,700.00	152,800,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.04.2.02.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>49,275,200.00</b>	<b>49,275,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.08.1.06.2.14.2.0 8.06.04.2.02.03.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49,275,200.00	49,275,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.05.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>58,475,000.00</b>	<b>58,475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.05.2.01.</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>58,475,000.00</b>	<b>58,475,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.08.1.06.2.14.2.0 8.06.05.2.01.01.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	58,475,000.00	58,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.06.</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>192,359,600.00</b>	<b>192,359,600.00</b>	<b>30,396,500.00</b>	<b>30,396,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.08.1.06.2.14.2.08.06.06.2.01.</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>192,359,600.00</b>	<b>192,359,600.00</b>	<b>30,396,500.00</b>	<b>30,396,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.1.06.2.14.2.0 8.06.06.2.01.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100,719,500.00	100,719,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.08.1.06.2.14.2.0 8.06.06.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	91,640,100.00	91,640,100.00	30,396,500.00	30,396,500.00	0.00	0.00		
<b>2.09.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>10,205,820,821.00</b>	<b>10,205,820,821.00</b>	<b>180,001,250.00</b>	<b>179,661,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.</b>	<b>Dinas Pangan dan Pertanian</b>	<b>955,350,400.00</b>	<b>955,350,400.00</b>	<b>148,031,250.00</b>	<b>147,730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>890,358,000.00</b>	<b>890,358,000.00</b>	<b>148,031,250.00</b>	<b>147,730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.03.2.01.</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>70,622,800.00</b>	<b>70,622,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.09.2.09.3.27.3.2 5.02.03.2.01.01.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	45,174,000.00	45,174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.2.09.3.27.3.2 5.02.03.2.01.04.	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	22,173,800.00	22,173,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.2.09.3.27.3.2 5.02.03.2.01.05.	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	3,275,000.00	3,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.03.2.02.</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>249,999,900.00</b>	<b>249,999,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.09.2.09.3.27.3.2 5.02.03.2.02.03.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	249,999,900.00	249,999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.03.2.04.</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>569,735,300.00</b>	<b>569,735,300.00</b>	<b>148,031,250.00</b>	<b>147,730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.09.2.09.3.27.3.25.02.03.2.04.01.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.2.09.3.27.3.25.02.03.2.04.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	564,735,300.00	564,735,300.00	148,031,250.00	147,730,000.00	0.00	0.00		
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.04.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>39,832,400.00</b>	<b>39,832,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.04.2.02.</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>39,832,400.00</b>	<b>39,832,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.09.2.09.3.27.3.25.02.04.2.02.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	8,165,500.00	8,165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.2.09.3.27.3.25.02.04.2.02.02.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31,666,900.00	31,666,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.05.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>25,160,000.00</b>	<b>25,160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.09.2.09.3.27.3.25.02.05.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25,160,000.00</b>	<b>25,160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.09.2.09.3.27.3.25.02.05.2.01.05.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25,160,000.00	25,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.09.3.22.09.3.27.3.25.02.</b>	<b>Dinas Pangan dan Pertanian</b>	<b>9,250,470,421.00</b>	<b>9,250,470,421.00</b>	<b>31,970,000.00</b>	<b>31,931,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.09.3.22.09.3.2 7.3.25.02.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9,250,470,421.00</b>	<b>9,250,470,421.00</b>	<b>31,970,000.00</b>	<b>31,931,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.09.3.22.09.3.2 7.3.25.02.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>49,658,200.00</b>	<b>49,658,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,965,000.00	18,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,769,000.00	1,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,769,000.00	1,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,454,600.00	3,454,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,093,600.00	19,093,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,519,000.00	2,519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.09.3.22.09.3.2 7.3.25.02.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8,467,707,581.00</b>	<b>8,467,707,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,464,993,581.00	8,464,993,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.02.07 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,714,000.00	2,714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.09.3.22.09.3.2 7.3.25.02.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>18,600,000.00</b>	<b>18,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.05.11 .	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18,600,000.00	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.09.3.22.09.3.2 7.3.25.02.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>111,491,700.00</b>	<b>111,491,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.06.01 .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,886,900.00	4,886,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,689,000.00	11,689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.06.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44,768,800.00	44,768,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.06.05 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.06.09 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38,147,000.00	38,147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.09.3.22.09.3.2 7.3.25.02.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.07.10 .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.07.11 .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
<b>2.09.3.22.09.3.2 7.3.25.02.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>293,612,940.00</b>	<b>293,612,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.08.01 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84,460,000.00	84,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.08.02 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91,199,540.00	91,199,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.08.04 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117,953,400.00	117,953,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.09.3.22.09.3.2 7.3.25.02.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>264,400,000.00</b>	<b>264,400,000.00</b>	<b>11,970,000.00</b>	<b>11,931,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.09.02 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134,780,000.00	134,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.09.09 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114,120,000.00	114,120,000.00	11,970,000.00	11,931,430.00	0.00	0.00		
2.09.3.22.09.3.27. 3.25.02.01.2.09.10 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.11.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>47,094,827,500.00</b>	<b>47,094,827,500.00</b>	<b>8,554,700,950.00</b>	<b>5,677,444,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.11.0.02.11.0.0 0.0.00.02.</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>20,702,088,150.00</b>	<b>20,702,088,150.00</b>	<b>410,344,300.00</b>	<b>372,303,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.11.0.02.11.0.0 0.0.00.02.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20,702,088,150.00</b>	<b>20,702,088,150.00</b>	<b>410,344,300.00</b>	<b>372,303,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.11.0.02.11.0.0 0.0.00.02.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>60,224,000.00</b>	<b>60,224,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,628,000.00	34,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,596,000.00	25,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.11.0.02.11.0.0 0.0.00.02.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11,429,867,170.00</b>	<b>11,429,867,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,420,010,370.00	11,420,010,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,503,600.00	6,503,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,353,200.00	3,353,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.11.0.02.11.0.0 0.0.00.02.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>484,217,500.00</b>	<b>484,217,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	484,217,500.00	484,217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.11.0.02.11.0.0 0.0.00.02.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>420,810,200.00</b>	<b>420,810,200.00</b>	<b>410,344,300.00</b>	<b>372,303,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,017,600.00	2,017,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,912,700.00	32,912,700.00	410,344,300.00	372,303,275.00	0.00	0.00		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,675,200.00	39,675,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106,598,700.00	106,598,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234,606,000.00	234,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.11.0.02.11.0.0 0.0.00.02.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>77,675,000.00</b>	<b>77,675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77,675,000.00	77,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.11.0.02.11.0.0 0.0.00.02.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,046,989,180.00</b>	<b>1,046,989,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	874,768,300.00	874,768,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125,037,880.00	125,037,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.0.02.11.0.00. 0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47,183,000.00	47,183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.11.0.02.11.0.0.0.0.00.02.01.2.0.09.02</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7,182,305,100.00</b>	<b>7,182,305,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.0.02.11.0.00.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7,182,305,100.00	7,182,305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>26,392,739,350.00</b>	<b>26,392,739,350.00</b>	<b>8,144,356,650.00</b>	<b>5,305,141,513.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>137,675,100.00</b>	<b>137,675,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.2.01.</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>137,675,100.00</b>	<b>137,675,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.2.11.0.00.0.00.02.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	137,675,100.00	137,675,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1,809,011,550.00</b>	<b>1,809,011,550.00</b>	<b>1,914,576,100.00</b>	<b>1,019,274,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>1,701,774,750.00</b>	<b>1,701,774,750.00</b>	<b>1,914,576,100.00</b>	<b>1,019,274,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	571,924,650.00	571,924,650.00	76,556,100.00	58,643,121.00	0.00	0.00		
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	53,545,800.00	53,545,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,076,304,300.00	1,076,304,300.00	1,838,020,000.00	960,631,100.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.03.2.02.</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>107,236,800.00</b>	<b>107,236,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.03.2.02.03.	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	107,236,800.00	107,236,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>1,627,067,000.00</b>	<b>1,627,067,000.00</b>	<b>996,909,000.00</b>	<b>970,469,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.04.2.01.</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>1,627,067,000.00</b>	<b>1,627,067,000.00</b>	<b>996,909,000.00</b>	<b>970,469,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.04.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	98,957,000.00	98,957,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.04.2.01.02.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	225,146,000.00	225,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.04.2.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,297,864,000.00	1,297,864,000.00	101,909,000.00	97,257,554.00	0.00	0.00		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.04.2.01.07.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	5,100,000.00	5,100,000.00	895,000,000.00	873,212,000.00	0.00	0.00		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.05.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH</b>	<b>111,567,500.00</b>	<b>111,567,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.05.2.01.</b>	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>111,567,500.00</b>	<b>111,567,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.05.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	111,567,500.00	111,567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LING</b>	<b>876,727,400.00</b>	<b>876,727,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.06.2.01.</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>876,727,400.00</b>	<b>876,727,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.06.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	268,973,800.00	268,973,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.06.2.01.03.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	607,753,600.00	607,753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.09.</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>108,597,600.00</b>	<b>108,597,600.00</b>	<b>21,145,400.00</b>	<b>21,075,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.09.2.01.</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>108,597,600.00</b>	<b>108,597,600.00</b>	<b>21,145,400.00</b>	<b>21,075,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.09.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	108,597,600.00	108,597,600.00	21,145,400.00	21,075,000.00	0.00	0.00		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.10.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>178,222,200.00</b>	<b>178,222,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.10.2.01.</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>178,222,200.00</b>	<b>178,222,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.10.2.01.01.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	68,787,500.00	68,787,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.10.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	109,434,700.00	109,434,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>21,543,871,000.00</b>	<b>21,543,871,000.00</b>	<b>5,211,726,150.00</b>	<b>3,294,322,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.11.2.11.0.00.0.00.02.11.2.01.</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>21,543,871,000.00</b>	<b>21,543,871,000.00</b>	<b>5,211,726,150.00</b>	<b>3,294,322,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.11.2.01.01.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.11.2.01.02.	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3,035,181,300.00	3,035,181,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.11.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10,486,563,100.00	10,486,563,100.00	78,906,900.00	77,176,600.00	0.00	0.00		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.11.2.01.04.	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	839,094,000.00	839,094,000.00	27,900,000.00	26,775,000.00	0.00	0.00		
2.11.2.11.0.00.0.0.02.11.2.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1,746,322,100.00	1,746,322,100.00	5,104,919,250.00	3,190,371,138.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0.0 0.02.11.2.01.06.	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	5,381,710,500.00	5,381,710,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.12.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>10,337,290,800.00</b>	<b>10,337,290,800.00</b>	<b>476,925,760.00</b>	<b>459,758,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.12.0.02.12.0.0 0.0.00.02.</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>9,010,977,600.00</b>	<b>9,010,977,600.00</b>	<b>327,348,260.00</b>	<b>310,813,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.12.0.02.12.0.0 0.0.00.02.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9,010,977,600.00</b>	<b>9,010,977,600.00</b>	<b>327,348,260.00</b>	<b>310,813,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.12.0.02.12.0.0 0.0.00.02.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>38,944,600.00</b>	<b>38,944,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.12.0.02.12.0.00. 0.00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,823,400.00	20,823,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.0.02.12.0.00. 0.00.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,412,000.00	8,412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.0.02.12.0.00. 0.00.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,709,200.00	9,709,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.12.0.02.12.0.0 0.0.00.02.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,603,633,000.00</b>	<b>6,603,633,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.12.0.02.12.0.00. 0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,600,134,000.00	6,600,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.0.02.12.0.00. 0.00.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,499,000.00	1,499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.05.5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>323,594,000.00</b>	<b>323,594,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75,596,000.00	75,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	247,998,000.00	247,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.06.6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,536,087,600.00</b>	<b>1,536,087,600.00</b>	<b>327,348,260.00</b>	<b>310,813,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,030,310,700.00	1,030,310,700.00	327,348,260.00	310,813,400.00	0.00	0.00		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,820,100.00	8,820,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47,226,000.00	47,226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	198,665,800.00	198,665,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185,765,000.00	185,765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60,300,000.00	60,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>77,675,000.00</b>	<b>77,675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77,675,000.00	77,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>247,793,400.00</b>	<b>247,793,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,900,000.00	18,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138,893,400.00	138,893,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>183,250,000.00</b>	<b>183,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.12.0.02.12.0.00.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183,250,000.00	183,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.12.2.12.0.00.00.00.02.</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>1,326,313,200.00</b>	<b>1,326,313,200.00</b>	<b>149,577,500.00</b>	<b>148,945,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.12.2.12.0.00.00.00.02.02.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>359,368,000.00</b>	<b>359,368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.12.2.12.0.00.00.00.02.02.01.</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>359,368,000.00</b>	<b>359,368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.0.00.0.0 0.02.02.2.01.01.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	35,100,000.00	35,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.2.12.0.00.0.0 0.02.02.2.01.04.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	315,160,000.00	315,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.2.12.0.00.0.0 0.02.02.2.01.08.	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	9,108,000.00	9,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.12.2.12.0.00.0. 00.02.03.</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>372,000,000.00</b>	<b>372,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.12.2.12.0.00.0. 00.02.03.2.01.</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>372,000,000.00</b>	<b>372,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.12.2.12.0.00.0.0 0.02.03.2.01.02.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	372,000,000.00	372,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.12.2.12.0.00.0. 00.02.04.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>578,145,300.00</b>	<b>578,145,300.00</b>	<b>149,577,500.00</b>	<b>148,945,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.12.2.12.0.00.0. 00.02.04.2.01.</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>31,941,000.00</b>	<b>31,941,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.12.2.12.0.00.0.0 0.02.04.2.01.01.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	22,050,000.00	22,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.12.2.12.0.00.0.0 0.02.04.2.01.02.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	9,891,000.00	9,891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.12.2.12.0.00.0. 00.02.04.2.03.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>546,204,300.00</b>	<b>546,204,300.00</b>	<b>149,577,500.00</b>	<b>148,945,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.12.2.12.0.00.0.0 0.02.04.2.03.03.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	206,855,000.00	206,855,000.00	83,750,000.00	83,695,000.00	0.00	0.00		
2.12.2.12.0.00.0.0 0.02.04.2.03.05.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	92,302,500.00	92,302,500.00	14,686,100.00	14,430,000.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.0.00.0.0 0.02.04.2.03.07.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	247,046,800.00	247,046,800.00	51,141,400.00	50,820,000.00	0.00	0.00		
<b>2.12.2.12.0.00.0.00.02.05.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>16,799,900.00</b>	<b>16,799,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.12.2.12.0.00.0.00.02.05.2.01.</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>16,799,900.00</b>	<b>16,799,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.12.2.12.0.00.0.0 0.02.05.2.01.02.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	16,799,900.00	16,799,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.14.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>3,949,848,400.00</b>	<b>3,949,848,400.00</b>	<b>18,642,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.14.1.06.2.14.2.08.06.</b>	<b>Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan</b>	<b>3,949,848,400.00</b>	<b>3,949,848,400.00</b>	<b>18,642,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.14.1.06.2.14.2.08.06.02.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>220,805,400.00</b>	<b>220,805,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.14.1.06.2.14.2.08.06.02.2.01.</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>72,403,900.00</b>	<b>72,403,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.14.1.06.2.14.2.0 8.06.02.2.01.09.	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	72,403,900.00	72,403,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.14.1.06.2.14.2.08.06.02.2.02.</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>148,401,500.00</b>	<b>148,401,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.14.1.06.2.14.2.08.06.02.2.02.11.	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	148,401,500.00	148,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.14.1.06.2.14.2.08.06.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>3,314,617,700.00</b>	<b>3,314,617,700.00</b>	<b>18,642,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.14.1.06.2.14.2.08.06.03.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>327,751,400.00</b>	<b>327,751,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.14.1.06.2.14.2.08.06.03.2.01.02.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	72,991,400.00	72,991,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.14.1.06.2.14.2.08.06.03.2.01.04.	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	254,760,000.00	254,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.14.1.06.2.14.2.08.06.03.2.02.</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>816,832,000.00</b>	<b>816,832,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.14.1.06.2.14.2.08.06.03.2.02.04.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	816,832,000.00	816,832,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.14.1.06.2.14.2.08.06.03.2.03.</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,170,034,300.00</b>	<b>2,170,034,300.00</b>	<b>18,642,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.14.1.06.2.14.2.08.06.03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2,070,018,800.00	2,070,018,800.00	18,642,000.00	0.00	0.00	0.00		
2.14.1.06.2.14.2.08.06.03.2.03.11.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100,015,500.00	100,015,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.14.1.06.2.14.2.08.06.04.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>414,425,300.00</b>	<b>414,425,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.14.1.06.2.14.2.08.06.04.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>157,928,900.00</b>	<b>157,928,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.14.1.06.2.14.2.08.06.04.2.01.07.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	112,812,200.00	112,812,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.14.1.06.2.14.2.08.06.04.2.01.08.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	45,116,700.00	45,116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.14.1.06.2.14.2.08.06.04.2.02.</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>256,496,400.00</b>	<b>256,496,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.14.1.06.2.14.2.08.06.04.2.02.04.	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	256,496,400.00	256,496,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.15.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>31,084,734,032.00</b>	<b>31,084,734,032.00</b>	<b>4,511,858,300.00</b>	<b>3,963,325,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.15.0.02.15.0.0.0.00.01.</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>21,337,606,562.00</b>	<b>21,337,606,562.00</b>	<b>212,373,500.00</b>	<b>195,694,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.15.0.02.15.0.0 0.0.00.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21,337,606,562.00</b>	<b>21,337,606,562.00</b>	<b>212,373,500.00</b>	<b>195,694,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.15.0.02.15.0.0 0.0.00.01.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>162,415,800.00</b>	<b>162,415,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.0.02.15.0.0. 0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101,961,700.00	101,961,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.0. 0.00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,454,100.00	60,454,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.15.0.02.15.0.0 0.0.00.01.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9,461,018,412.00</b>	<b>9,461,018,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.0.02.15.0.0. 0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,430,673,412.00	9,430,673,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.0. 0.00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16,602,000.00	16,602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.0. 0.00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13,743,000.00	13,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.15.0.02.15.0.0 0.0.00.01.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>543,995,400.00</b>	<b>543,995,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.0.02.15.0.0. 0.00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	477,239,400.00	477,239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.0. 0.00.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	66,756,000.00	66,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.15.0.02.15.0.0</b> <b>0.0.00.01.01.2.0</b> <b>6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>780,805,200.00</b>	<b>780,805,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,635,300.00	10,635,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93,737,400.00	93,737,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85,150,200.00	85,150,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	291,593,300.00	291,593,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269,689,000.00	269,689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.15.0.02.15.0.0</b> <b>0.0.00.01.01.2.0</b> <b>7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>182,721,000.00</b>	<b>182,721,000.00</b>	<b>135,895,500.00</b>	<b>120,103,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167,150,000.00	167,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,571,000.00	15,571,000.00	135,895,500.00	120,103,800.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.15.0.02.15.0.0</b> <b>0.0.00.01.01.2.0</b> <b>8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9,261,986,710.00</b>	<b>9,261,986,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,044,466,560.00	9,044,466,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217,520,150.00	217,520,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.15.0.02.15.0.0</b> <b>0.0.00.01.01.2.0</b> <b>9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>944,664,040.00</b>	<b>944,664,040.00</b>	<b>76,478,000.00</b>	<b>75,591,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	893,794,500.00	893,794,500.00	33,040,000.00	32,850,000.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11,399,540.00	11,399,540.00	43,438,000.00	42,741,000.00	0.00	0.00		
2.15.0.02.15.0.00. 0.00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39,470,000.00	39,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.15.2.15.0.00.0.</b> <b>00.01.</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>9,747,127,470.00</b>	<b>9,747,127,470.00</b>	<b>4,299,484,800.00</b>	<b>3,767,630,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.15.2.15.0.00.0.</b> <b>00.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>9,747,127,470.00</b>	<b>9,747,127,470.00</b>	<b>4,299,484,800.00</b>	<b>3,767,630,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.15.2.15.0.00.0.</b> <b>00.01.02.2.02.</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>5,171,307,370.00</b>	<b>5,171,307,370.00</b>	<b>4,257,186,000.00</b>	<b>3,727,535,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.02.01.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	759,579,220.00	759,579,220.00	3,508,718,800.00	3,476,603,600.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.02.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	535,143,800.00	535,143,800.00	552,915,200.00	65,600,000.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.02.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3,434,264,750.00	3,434,264,750.00	16,764,000.00	16,764,000.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.02.04.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	442,319,600.00	442,319,600.00	178,788,000.00	168,568,000.00	0.00	0.00		
<b>2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.03.</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>1,098,579,500.00</b>	<b>1,098,579,500.00</b>	<b>42,298,800.00</b>	<b>40,095,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.03.03.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	986,844,200.00	986,844,200.00	36,115,800.00	34,743,300.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.03.04.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	111,735,300.00	111,735,300.00	6,183,000.00	5,352,000.00	0.00	0.00		
<b>2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.04.</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>312,050,000.00</b>	<b>312,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.04.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	312,050,000.00	312,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>1,354,541,000.00</b>	<b>1,354,541,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.05.02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.05.03.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	49,750,000.00	49,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.05.04.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	162,000,000.00	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.05.05.	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33,516,000.00	33,516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.05.06.	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.05.07.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,059,875,000.00	1,059,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.05.10.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	32,400,000.00	32,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.15.2.15.0.00.0.0 00.01.02.2.06.</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>842,892,700.00</b>	<b>842,892,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.06.01.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	359,173,500.00	359,173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.06.03.	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	460,040,000.00	460,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.06.05.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	23,679,200.00	23,679,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.15.2.15.0.00.0.0 00.01.02.2.07.</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>48,175,400.00</b>	<b>48,175,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.07.01.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	48,175,400.00	48,175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.15.2.15.0.00.0.0 00.01.02.2.08.</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>303,580,400.00</b>	<b>303,580,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.08.02.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	23,815,600.00	23,815,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.08.03.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	23,167,100.00	23,167,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.08.04.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	233,373,700.00	233,373,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.08.05.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	23,224,000.00	23,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.09.</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>115,893,300.00</b>	<b>115,893,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.09.01.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12,133,100.00	12,133,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.09.02.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	103,760,200.00	103,760,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.11.</b>	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>500,107,800.00</b>	<b>500,107,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.15.2.15.0.00.0.0 0.01.02.2.11.03.	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	500,107,800.00	500,107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.16.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>12,745,554,017.00</b>	<b>12,745,554,017.00</b>	<b>5,160,680,620.00</b>	<b>4,408,338,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.16.2.16.2.24.2.23.05.</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan</b>	<b>4,447,484,500.00</b>	<b>4,447,484,500.00</b>	<b>5,101,313,900.00</b>	<b>4,350,782,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.16.2.16.2.24.2.23.05.02.</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>2,484,148,600.00</b>	<b>2,484,148,600.00</b>	<b>27,883,200.00</b>	<b>27,861,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.16.2.16.2.24.2.23.05.02.2.01.</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,484,148,600.00</b>	<b>2,484,148,600.00</b>	<b>27,883,200.00</b>	<b>27,861,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.16.2.16.2.24.2.23.05.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	209,486,600.00	209,486,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.16.2.16.2.24.2.23.05.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	140,700,000.00	140,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.16.2.16.2.24.2.23.05.02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	2,133,962,000.00	2,133,962,000.00	27,883,200.00	27,861,400.00	0.00	0.00		
<b>2.16.2.16.2.24.2.23.05.03.</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>1,963,335,900.00</b>	<b>1,963,335,900.00</b>	<b>5,073,430,700.00</b>	<b>4,322,921,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.16.2.16.2.24.2.23.05.03.2.01.</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,204,123,000.00</b>	<b>1,204,123,000.00</b>	<b>229,772,500.00</b>	<b>224,777,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.16.2.16.2.24.2.23.05.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,204,123,000.00	1,204,123,000.00	229,772,500.00	224,777,300.00	0.00	0.00		
<b>2.16.2.16.2.24.2.23.05.03.2.02.</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>759,212,900.00</b>	<b>759,212,900.00</b>	<b>4,843,658,200.00</b>	<b>4,098,143,761.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.16.2.16.2.24.2.23.05.03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	346,745,800.00	346,745,800.00	4,819,302,200.00	4,074,643,761.00	0.00	0.00		
2.16.2.16.2.24.2.23.05.03.2.02.08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	190,187,000.00	190,187,000.00	24,356,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00		
2.16.2.16.2.24.2.23.05.03.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	222,280,100.00	222,280,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.16.2.22.16.2.24.2.23.05.</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan</b>	<b>8,298,069,517.00</b>	<b>8,298,069,517.00</b>	<b>59,366,720.00</b>	<b>57,556,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.16.2.22.16.2.24.2.23.05.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8,298,069,517.00</b>	<b>8,298,069,517.00</b>	<b>59,366,720.00</b>	<b>57,556,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.16.2.22.16.2.2 4.2.23.05.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15,020,000.00</b>	<b>15,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,020,000.00	5,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.16.2.22.16.2.2 4.2.23.05.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7,787,016,617.00</b>	<b>7,787,016,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,735,966,617.00	7,735,966,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51,050,000.00	51,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.16.2.22.16.2.2 4.2.23.05.01.2.0 3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>23,012,000.00</b>	<b>23,012,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23,012,000.00	23,012,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.16.2.22.16.2.2 4.2.23.05.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.16.2.22.16.2.2 4.2.23.05.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>235,313,700.00</b>	<b>235,313,700.00</b>	<b>59,366,720.00</b>	<b>57,556,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,137,000.00	32,137,000.00	59,366,720.00	57,556,523.00	0.00	0.00		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.06.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,298,200.00	29,298,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.06.05 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,638,500.00	12,638,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.06.09 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161,240,000.00	161,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.16.2.22.16.2.2 4.2.23.05.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90,038,100.00</b>	<b>90,038,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.08.01 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39,430,000.00	39,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.08.02 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.08.04 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47,008,100.00	47,008,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.16.2.22.16.2.2 4.2.23.05.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>144,869,100.00</b>	<b>144,869,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.09.02 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,739,100.00	65,739,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.09.09 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45,630,000.00	45,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.22.16.2.24. 2.23.05.01.2.09.10 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33,500,000.00	33,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.17.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>3,207,327,200.00</b>	<b>3,207,327,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.</b>	<b>Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian</b>	<b>3,207,327,200.00</b>	<b>3,207,327,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.03.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>105,579,800.00</b>	<b>105,579,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.03.2.01.</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>105,579,800.00</b>	<b>105,579,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.17.3.30.2.17.3.31.07.03.2.01.01.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	66,049,600.00	66,049,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.17.3.30.2.17.3.31.07.03.2.01.02.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	39,530,200.00	39,530,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.04.</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>446,450,800.00</b>	<b>446,450,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.04.2.01.</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>446,450,800.00</b>	<b>446,450,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.3.30.2.17.3.3 1.07.04.2.01.01.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	11,044,800.00	11,044,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.17.3.30.2.17.3.3 1.07.04.2.01.02.	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	435,406,000.00	435,406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.05.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>610,049,800.00</b>	<b>610,049,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.05.2.01.</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>610,049,800.00</b>	<b>610,049,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.17.3.30.2.17.3.3 1.07.05.2.01.01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	610,049,800.00	610,049,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.06.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>76,950,000.00</b>	<b>76,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.06.2.01.</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>76,950,000.00</b>	<b>76,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.17.3.30.2.17.3.3 1.07.06.2.01.01.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	76,950,000.00	76,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.07.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>515,387,000.00</b>	<b>515,387,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.07.2.01.</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>515,387,000.00</b>	<b>515,387,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.17.3.30.2.17.3.31.07.07.2.01.01.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	452,816,600.00	452,816,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.17.3.30.2.17.3.31.07.07.2.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	62,570,400.00	62,570,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.08.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>1,452,909,800.00</b>	<b>1,452,909,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.17.3.30.2.17.3.31.07.08.2.01.</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>1,452,909,800.00</b>	<b>1,452,909,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.17.3.30.2.17.3.31.07.08.2.01.01.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1,452,909,800.00	1,452,909,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.18.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>15,179,265,634.00</b>	<b>15,179,265,634.00</b>	<b>22,399,999,000.00</b>	<b>16,837,241,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.18.0.02.18.0.0.0.00.23.</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>12,540,891,634.00</b>	<b>12,540,891,634.00</b>	<b>22,399,999,000.00</b>	<b>16,837,241,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.18.0.02.18.0.0.0.00.23.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12,540,891,634.00</b>	<b>12,540,891,634.00</b>	<b>22,399,999,000.00</b>	<b>16,837,241,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.18.0.02.18.0.0.0.00.23.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>203,227,100.00</b>	<b>203,227,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.0.02.18.0.0.0.00.23.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43,533,400.00	43,533,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.0.02.18.0.00.0.00.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159,693,700.00	159,693,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.18.0.02.18.0.00.0.00.23.01.2.02.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,978,552,400.00</b>	<b>6,978,552,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.0.02.18.0.00.0.00.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,966,491,000.00	6,966,491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.0.02.18.0.00.0.00.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,013,800.00	6,013,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.0.02.18.0.00.0.00.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6,047,600.00	6,047,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.18.0.02.18.0.00.0.00.23.01.2.03.3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>50,400,000.00</b>	<b>50,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.0.02.18.0.00.0.00.23.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.18.0.02.18.0.00.0.00.23.01.2.04.5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>65,600,000.00</b>	<b>65,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.0.02.18.0.00.0.00.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65,600,000.00	65,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.18.0.02.18.0.00.0.00.23.01.2.06.6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,139,942,350.00</b>	<b>1,139,942,350.00</b>	<b>5,099,999,000.00</b>	<b>3,276,758,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.0.02.18.0.00.0.00.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	539,218,800.00	539,218,800.00	5,099,999,000.00	3,276,758,532.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.0.02.18.0.00. 0.00.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	127,357,900.00	127,357,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.0.02.18.0.00. 0.00.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140,728,000.00	140,728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.0.02.18.0.00. 0.00.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109,575,650.00	109,575,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.0.02.18.0.00. 0.00.23.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	69,150,000.00	69,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.0.02.18.0.00. 0.00.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,912,000.00	153,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.18.0.02.18.0.0 0.0.00.23.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,820,393,484.00</b>	<b>1,820,393,484.00</b>	<b>17,300,000,000.00</b>	<b>13,560,482,737.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.0.02.18.0.00. 0.00.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,820,393,484.00	1,820,393,484.00	17,300,000,000.00	13,560,482,737.00	0.00	0.00		
<b>2.18.0.02.18.0.0 0.0.00.23.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,776,675,700.00</b>	<b>1,776,675,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.0.02.18.0.00. 0.00.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.0.02.18.0.00. 0.00.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,254,000,000.00	1,254,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.0.02.18.0.00. 0.00.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	512,675,700.00	512,675,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.18.0.02.18.0.0</b> <b>0.0.00.23.01.2.0</b> <b>9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>506,100,600.00</b>	<b>506,100,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.0.02.18.0.00. 0.00.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127,360,000.00	127,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.0.02.18.0.00. 0.00.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	378,740,600.00	378,740,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.18.2.18.0.00.0.</b> <b>00.23.</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>2,638,374,000.00</b>	<b>2,638,374,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.18.2.18.0.00.0.</b> <b>00.23.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>445,291,600.00</b>	<b>445,291,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.18.2.18.0.00.0.</b> <b>00.23.02.2.01.</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>285,291,600.00</b>	<b>285,291,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.2.18.0.00.0.0 0.23.02.2.01.01.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	138,602,600.00	138,602,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.2.18.0.00.0.0 0.23.02.2.01.02.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	146,689,000.00	146,689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.18.2.18.0.00.0.</b> <b>00.23.02.2.02.</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.2.18.0.00.0.0 0.23.02.2.02.02.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.18.2.18.0.00.0.</b> <b>00.23.04.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>857,939,400.00</b>	<b>857,939,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.18.2.18.0.00.0.00.23.04.2.01.</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>857,939,400.00</b>	<b>857,939,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.2.18.0.00.0.00.23.04.2.01.01.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	406,949,000.00	406,949,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.2.18.0.00.0.00.23.04.2.01.02.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	102,048,300.00	102,048,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.2.18.0.00.0.00.23.04.2.01.03.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	122,434,700.00	122,434,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.2.18.0.00.0.00.23.04.2.01.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	226,507,400.00	226,507,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.18.2.18.0.00.0.00.23.05.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>532,562,000.00</b>	<b>532,562,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.18.2.18.0.00.0.00.23.05.2.01.</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>532,562,000.00</b>	<b>532,562,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.2.18.0.00.0.00.23.05.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	48,050,400.00	48,050,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.18.2.18.0.00.0.00.23.05.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	365,957,500.00	365,957,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.0.00.0.0 0.23.05.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	118,554,100.00	118,554,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.18.2.18.0.00.0. 00.23.06.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>802,581,000.00</b>	<b>802,581,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.18.2.18.0.00.0. 00.23.06.2.01.</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>802,581,000.00</b>	<b>802,581,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.18.2.18.0.00.0.0 0.23.06.2.01.01.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	802,581,000.00	802,581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.19.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>11,399,961,500.00</b>	<b>11,399,961,500.00</b>	<b>119,559,791,864.00</b>	<b>739,203,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.19.2.22.3.26.2. 19.04.</b>	<b>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>11,399,961,500.00</b>	<b>11,399,961,500.00</b>	<b>119,559,791,864.00</b>	<b>739,203,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.19.2.22.3.26.2. 19.04.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>887,616,100.00</b>	<b>887,616,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.19.2.22.3.26.2. 19.04.02.2.01.</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.19.2.22.3.26.2.1 9.04.02.2.01.09.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.19.2.22.3.26.2.19.04.02.2.02.</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>587,616,100.00</b>	<b>587,616,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.19.2.22.3.26.2.1 9.04.02.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	587,616,100.00	587,616,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.19.2.22.3.26.2.19.04.03.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>10,112,345,400.00</b>	<b>10,112,345,400.00</b>	<b>119,559,791,864.00</b>	<b>739,203,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.19.2.22.3.26.2.19.04.03.2.01.</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,365,836,000.00</b>	<b>1,365,836,000.00</b>	<b>119,559,791,864.00</b>	<b>739,203,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.19.2.22.3.26.2.1 9.04.03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1,365,836,000.00	1,365,836,000.00	119,559,791,864.00	739,203,800.00	0.00	0.00		
<b>2.19.2.22.3.26.2.19.04.03.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8,137,395,100.00</b>	<b>8,137,395,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.19.2.22.3.26.2.1 9.04.03.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	8,137,395,100.00	8,137,395,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.19.2.22.3.26.2.19.04.03.2.04.</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.19.2.22.3.26.2.1 9.04.03.2.04.02.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.19.2.22.3.26.2.19.04.03.2.05.</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>509,114,300.00</b>	<b>509,114,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.19.2.22.3.26.2.1 9.04.03.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	309,114,300.00	309,114,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.19.2.22.3.26.2.1 9.04.03.2.05.02.	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.2.22.3.26.2.1 9.04.04.2.01.05.	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.20.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>237,766,400.00</b>	<b>237,766,400.00</b>	<b>20,295,000.00</b>	<b>19,930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.20.2.16.2.24.2.23.05.</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan</b>	<b>237,766,400.00</b>	<b>237,766,400.00</b>	<b>20,295,000.00</b>	<b>19,930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.20.2.16.2.24.2.23.05.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>237,766,400.00</b>	<b>237,766,400.00</b>	<b>20,295,000.00</b>	<b>19,930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.20.2.16.2.24.2.23.05.02.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>237,766,400.00</b>	<b>237,766,400.00</b>	<b>20,295,000.00</b>	<b>19,930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.20.2.16.2.24.2.23.05.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	237,766,400.00	237,766,400.00	20,295,000.00	19,930,000.00	0.00	0.00		
<b>2.21.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>100,438,200.00</b>	<b>100,438,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.21.2.16.2.24.2.23.05.</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan</b>	<b>100,438,200.00</b>	<b>100,438,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.21.2.16.2.24.2.23.05.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>100,438,200.00</b>	<b>100,438,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.21.2.16.2.24.2.23.05.02.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>58,300,000.00</b>	<b>58,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.21.2.16.2.24.2.23.05.02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30,800,000.00	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.21.2.16.2.24.2.23.05.02.2.01.04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.21.2.16.2.24.2.23.05.02.2.02.</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>42,138,200.00</b>	<b>42,138,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.21.2.16.2.24.2.23.05.02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	42,138,200.00	42,138,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.22.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>6,688,447,551.00</b>	<b>6,688,447,551.00</b>	<b>85,311,460.00</b>	<b>84,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.22.2.22.3.26.2.19.04.</b>	<b>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>699,819,000.00</b>	<b>699,819,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.22.2.22.3.26.2.19.04.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>699,819,000.00</b>	<b>699,819,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.22.2.22.3.26.2.19.04.02.2.01.</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>335,361,700.00</b>	<b>335,361,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.22.2.22.3.26.2.19.04.02.2.01.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	85,554,700.00	85,554,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.22.2.22.3.26.2.19.04.02.2.01.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	249,807,000.00	249,807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.22.2.22.3.26.2.19.04.02.2.02.</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>364,457,300.00</b>	<b>364,457,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.22.2.22.3.26.2.19.04.02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	364,457,300.00	364,457,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.22.3.22.22.3.26.2.19.04.</b>	<b>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5,988,628,551.00</b>	<b>5,988,628,551.00</b>	<b>85,311,460.00</b>	<b>84,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.22.3.22.22.3.26.2.19.04.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5,988,628,551.00</b>	<b>5,988,628,551.00</b>	<b>85,311,460.00</b>	<b>84,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.22.3.22.22.3.26.2.19.04.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>118,052,000.00</b>	<b>118,052,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.01.01 .	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93,301,900.00	93,301,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.01.07 .	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,750,100.00	24,750,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.22.3.22.22.3.2 6.2.19.04.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4,499,746,372.00</b>	<b>4,499,746,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.02.01 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,404,845,072.00	4,404,845,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.02.02 .	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55,028,900.00	55,028,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.02.05 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,847,400.00	1,847,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.02.07 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38,025,000.00	38,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.22.3.22.22.3.2 6.2.19.04.01.2.0 3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>124,000,000.00</b>	<b>124,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.03.02 .	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	124,000,000.00	124,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.22.3.22.22.3.2 6.2.19.04.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>741,495,100.00</b>	<b>741,495,100.00</b>	<b>85,311,460.00</b>	<b>84,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.06.01 .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,433,300.00	4,433,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106,248,600.00	106,248,600.00	85,311,460.00	84,900,000.00	0.00	0.00		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,224,400.00	5,224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,383,600.00	25,383,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,145,200.00	65,145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	35,750,000.00	35,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499,310,000.00	499,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.22.3.22.22.3.2 6.2.19.04.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>93,165,200.00</b>	<b>93,165,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,002,000.00	44,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49,163,200.00	49,163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.22.3.22.22.3.2 6.2.19.04.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>412,169,879.00</b>	<b>412,169,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77,585,000.00	77,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193,289,079.00	193,289,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118,415,800.00	118,415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.22.3.22.22.3.26. 2.19.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,880,000.00	22,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.23.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>267,531,000.00</b>	<b>267,531,000.00</b>	<b>105,936,800.00</b>	<b>105,164,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>								
<b>2.23.2.16.2.24.2.</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika,</b>	<b>267,531,000.00</b>	<b>267,531,000.00</b>	<b>105,936,800.00</b>	<b>105,164,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>23.05.</b>	<b>Kearsipan dan Perpustakaan</b>								
<b>2.23.2.16.2.24.2.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN</b>	<b>267,531,000.00</b>	<b>267,531,000.00</b>	<b>105,936,800.00</b>	<b>105,164,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>23.05.02.</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>								
<b>2.23.2.16.2.24.2.</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan</b>	<b>217,900,000.00</b>	<b>217,900,000.00</b>	<b>105,936,800.00</b>	<b>105,164,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>23.05.02.2.01.</b>	<b>Tingkat Daerah</b>								
	<b>Kabupaten/Kota</b>								
2.23.2.16.2.24.2.2 3.05.02.2.01.02.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	206,800,000.00	206,800,000.00	105,936,800.00	105,164,675.00	0.00	0.00		
2.23.2.16.2.24.2.2 3.05.02.2.01.04.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.23.2.16.2.24.2.2 3.05.02.2.01.06.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.23.2.16.2.24.2.</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca</b>	<b>49,631,000.00</b>	<b>49,631,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>23.05.02.2.02.</b>	<b>Tingkat Daerah</b>								
	<b>Kabupaten/Kota</b>								
2.23.2.16.2.24.2.2 3.05.02.2.02.01.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	18,200,000.00	18,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.2.16.2.24.2.2 3.05.02.2.02.04.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	31,431,000.00	31,431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.24.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>338,893,600.00</b>	<b>338,893,600.00</b>	<b>3,076,000.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.24.2.16.2.24.2. 23.05.</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan</b>	<b>338,893,600.00</b>	<b>338,893,600.00</b>	<b>3,076,000.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.24.2.16.2.24.2. 23.05.02.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>309,793,600.00</b>	<b>309,793,600.00</b>	<b>3,076,000.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.24.2.16.2.24.2. 23.05.02.2.01.</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11,946,400.00</b>	<b>11,946,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.24.2.16.2.24.2.2 3.05.02.2.01.02.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	11,946,400.00	11,946,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.24.2.16.2.24.2. 23.05.02.2.02.</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>291,625,000.00</b>	<b>291,625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.24.2.16.2.24.2.2 3.05.02.2.02.02.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	291,625,000.00	291,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>2.24.2.16.2.24.2. 23.05.02.2.03.</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>6,222,200.00</b>	<b>6,222,200.00</b>	<b>3,076,000.00</b>	<b>3,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.24.2.16.2.24.2.2 3.05.02.2.03.02.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	6,222,200.00	6,222,200.00	3,076,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00		
<b>2.24.2.16.2.24.2. 23.05.03.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>19,400,000.00</b>	<b>19,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.24.2.16.2.24.2. 23.05.03.2.01.</b>	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b>	<b>19,400,000.00</b>	<b>19,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2.24.2.16.2.24.2.2 3.05.03.2.01.01.	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24.2.16.2.24.2.23.05.04.	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.24.2.16.2.24.2.23.05.04.2.01.	<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.24.2.16.2.24.2.23.05.04.2.01.02.	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	25,072,278,354.00	25,579,422,354.00	6,583,231,405.00	4,142,148,864.00	0.00	0.00		
3.25.	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	738,682,100.00	738,682,100.00	47,924,000.00	47,920,000.00	0.00	0.00		
3.25.2.09.3.27.3.25.02.	<b>Dinas Pangan dan Pertanian</b>	738,682,100.00	738,682,100.00	47,924,000.00	47,920,000.00	0.00	0.00		
3.25.2.09.3.27.3.25.02.04.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	638,122,100.00	638,122,100.00	47,924,000.00	47,920,000.00	0.00	0.00		
3.25.2.09.3.27.3.25.02.04.2.02.	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	54,983,700.00	54,983,700.00	14,444,000.00	14,440,000.00	0.00	0.00		
3.25.2.09.3.27.3.25.02.04.2.02.04.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	54,983,700.00	54,983,700.00	14,444,000.00	14,440,000.00	0.00	0.00		
3.25.2.09.3.27.3.25.02.04.2.04.	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	583,138,400.00	583,138,400.00	33,480,000.00	33,480,000.00	0.00	0.00		
3.25.2.09.3.27.3.25.02.04.2.04.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	583,138,400.00	583,138,400.00	33,480,000.00	33,480,000.00	0.00	0.00		
3.25.2.09.3.27.3.25.02.06.	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	100,560,000.00	100,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.25.2.09.3.27.3.25.02.06.2.02.</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>64,724,400.00</b>	<b>64,724,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.25.2.09.3.27.3.25.02.06.2.02.01.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	64,724,400.00	64,724,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.25.2.09.3.27.3.25.02.06.2.03.</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>35,835,600.00</b>	<b>35,835,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.25.2.09.3.27.3.25.02.06.2.03.01.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35,835,600.00	35,835,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.26.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>1,716,031,575.00</b>	<b>1,716,031,575.00</b>	<b>4,878,455,730.00</b>	<b>2,591,298,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.26.2.22.3.26.2.19.04.</b>	<b>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1,716,031,575.00</b>	<b>1,716,031,575.00</b>	<b>4,878,455,730.00</b>	<b>2,591,298,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.26.2.22.3.26.2.19.04.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>1,025,276,375.00</b>	<b>1,025,276,375.00</b>	<b>4,878,455,730.00</b>	<b>2,591,298,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.26.2.22.3.26.2.19.04.02.2.03.</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>1,025,276,375.00</b>	<b>1,025,276,375.00</b>	<b>4,878,455,730.00</b>	<b>2,591,298,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.26.2.22.3.26.2.19.04.02.2.03.02.	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	176,000,000.00	176,000,000.00	410,000,000.00	374,680,200.00	0.00	0.00		
3.26.2.22.3.26.2.19.04.02.2.03.06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	139,000,000.00	139,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.26.2.22.3.26.2.19.04.02.2.03.07.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	710,276,375.00	710,276,375.00	4,468,455,730.00	2,216,618,025.00	0.00	0.00		
<b>3.26.2.22.3.26.2.19.04.03.</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.26.2.22.3.26.2.19.04.03.2.01.</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.26.2.22.3.26.2.1 9.04.03.2.01.01.	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.26.2.22.3.26.2.1 9.04.03.2.01.04.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.26.2.22.3.26.2.19.04.05.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>640,755,200.00</b>	<b>640,755,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.26.2.22.3.26.2.19.04.05.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>640,755,200.00</b>	<b>640,755,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.26.2.22.3.26.2.1 9.04.05.2.01.01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	369,675,900.00	369,675,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.26.2.22.3.26.2.1 9.04.05.2.01.02.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	271,079,300.00	271,079,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.27.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>1,023,898,102.00</b>	<b>1,023,898,102.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>149,626,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.27.2.09.3.27.3.25.02.</b>	<b>Dinas Pangan dan Pertanian</b>	<b>1,023,898,102.00</b>	<b>1,023,898,102.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>149,626,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.27.2.09.3.27.3.25.02.03.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.27.2.09.3.27.3.25.02.03.2.01.</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>55,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.2.09.3.27.3.2 5.02.03.2.01.01.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.27.2.09.3.27.3.25.02.04.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>657,856,600.00</b>	<b>657,856,600.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>149,626,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.27.2.09.3.27.3.25.02.04.2.01.</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>103,854,400.00</b>	<b>103,854,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.27.2.09.3.27.3.2 5.02.04.2.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	103,854,400.00	103,854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.27.2.09.3.27.3.25.02.04.2.02.</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>59,863,200.00</b>	<b>59,863,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.27.2.09.3.27.3.2 5.02.04.2.02.03.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	59,863,200.00	59,863,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.27.2.09.3.27.3.25.02.04.2.03.</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>494,139,000.00</b>	<b>494,139,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>149,626,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.27.2.09.3.27.3.2 5.02.04.2.03.02.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	494,139,000.00	494,139,000.00	150,000,000.00	149,626,000.00	0.00	0.00		
<b>3.27.2.09.3.27.3.25.02.07.</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>311,041,502.00</b>	<b>311,041,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.27.2.09.3.27.3.25.02.07.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>311,041,502.00</b>	<b>311,041,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.2.09.3.27.3.2 5.02.07.2.01.02.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	58,268,800.00	58,268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.27.2.09.3.27.3.2 5.02.07.2.01.03.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	252,772,702.00	252,772,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.30.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>15,928,471,000.00</b>	<b>16,435,615,000.00</b>	<b>30,378,000.00</b>	<b>25,275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.30.2.13.30.2.1 7.3.31.07.</b>	<b>Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian</b>	<b>10,014,875,100.00</b>	<b>10,014,875,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.30.2.13.30.2.1 7.3.31.07.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10,014,875,100.00</b>	<b>10,014,875,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.30.2.13.30.2.1 7.3.31.07.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>126,860,100.00</b>	<b>126,860,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126,860,100.00	126,860,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.30.2.13.30.2.1 7.3.31.07.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8,798,063,600.00</b>	<b>8,798,063,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,739,783,000.00	8,739,783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,100,000.00	11,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47,180,600.00	47,180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.30.2.13.30.2.1</b> <b>7.3.31.07.01.2.0</b> <b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>34,905,000.00</b>	<b>34,905,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.03.02 .	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	34,905,000.00	34,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.30.2.13.30.2.1</b> <b>7.3.31.07.01.2.0</b> <b>5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>79,200,000.00</b>	<b>79,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.05.11 .	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.30.2.13.30.2.1</b> <b>7.3.31.07.01.2.0</b> <b>6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>552,414,400.00</b>	<b>552,414,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.06.01 .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,524,800.00	29,524,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49,997,800.00	49,997,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.06.03 .	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,582,700.00	3,582,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.06.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126,742,500.00	126,742,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.06.05 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	197,566,600.00	197,566,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.06.09 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.30.2.13.30.2.1</b> <b>7.3.31.07.01.2.0</b> <b>8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>98,322,000.00</b>	<b>98,322,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86,322,000.00	86,322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.30.2.13.30.2.1</b> <b>7.3.31.07.01.2.0</b> <b>9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>325,110,000.00</b>	<b>325,110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253,610,000.00	253,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.2.13.30.2.17. 3.31.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71,500,000.00	71,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.30.3.30.2.17.3.</b> <b>31.07.</b>	<b>Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian</b>	<b>5,913,595,900.00</b>	<b>6,420,739,900.00</b>	<b>30,378,000.00</b>	<b>25,275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.30.3.30.2.17.3.</b> <b>31.07.02.</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>112,650,000.00</b>	<b>112,650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.30.3.30.2.17.3.</b> <b>31.07.02.2.01.</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>98,025,000.00</b>	<b>98,025,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.02.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	98,025,000.00	98,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.30.3.30.2.17.3.</b> <b>31.07.02.2.02.</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>14,625,000.00</b>	<b>14,625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.02.2.02.01.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	14,625,000.00	14,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.30.3.30.2.17.3.</b> <b>31.07.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>4,375,891,900.00</b>	<b>4,375,891,900.00</b>	<b>22,491,000.00</b>	<b>17,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.30.3.30.2.17.3.</b> <b>31.07.03.2.01.</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>3,929,441,900.00</b>	<b>3,929,441,900.00</b>	<b>22,491,000.00</b>	<b>17,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.03.2.01.01.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	43,341,600.00	43,341,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.03.2.01.02.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3,886,100,300.00	3,886,100,300.00	22,491,000.00	17,400,000.00	0.00	0.00		
<b>3.30.3.30.2.17.3.</b> <b>31.07.03.2.02.</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>446,450,000.00</b>	<b>446,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.03.2.02.01.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	411,225,000.00	411,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.03.2.02.02.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35,225,000.00	35,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.30.3.30.2.17.3.</b> <b>31.07.04.</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>279,129,000.00</b>	<b>786,273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.30.3.30.2.17.3.</b> <b>31.07.04.2.01.</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>21,450,000.00</b>	<b>21,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.04.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	7,725,000.00	7,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.04.2.01.03.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	13,725,000.00	13,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.30.3.30.2.17.3. 31.07.04.2.02.</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>257,679,000.00</b>	<b>764,823,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.04.2.02.01.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	32,025,000.00	32,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.04.2.02.03.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	225,654,000.00	732,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.30.3.30.2.17.3. 31.07.05.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>327,497,000.00</b>	<b>327,497,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.30.3.30.2.17.3. 31.07.05.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>327,497,000.00</b>	<b>327,497,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.05.2.01.01.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	168,047,000.00	168,047,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.05.2.01.02.	Pameran Dagang Nasional	104,725,000.00	104,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.3.30.2.17.3.3 1.07.05.2.01.03.	Pameran Dagang Lokal	54,725,000.00	54,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.30.3.30.2.17.3. 31.07.06.</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>447,113,000.00</b>	<b>447,113,000.00</b>	<b>7,887,000.00</b>	<b>7,875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.30.3.30.2.17.3.31.07.06.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>447,113,000.00</b>	<b>447,113,000.00</b>	<b>7,887,000.00</b>	<b>7,875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.3.30.2.17.3.31.07.06.2.01.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	362,087,000.00	362,087,000.00	7,887,000.00	7,875,000.00	0.00	0.00		
3.30.3.30.2.17.3.31.07.06.2.01.02.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	85,026,000.00	85,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.30.3.30.2.17.3.31.07.07.</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>371,315,000.00</b>	<b>371,315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.30.3.30.2.17.3.31.07.07.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>371,315,000.00</b>	<b>371,315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.30.3.30.2.17.3.31.07.07.2.01.01.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	319,095,000.00	319,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.30.3.30.2.17.3.31.07.07.2.01.03.	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	52,220,000.00	52,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.31.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>5,665,195,577.00</b>	<b>5,665,195,577.00</b>	<b>1,476,473,675.00</b>	<b>1,328,029,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.31.3.30.2.17.3.31.07.</b>	<b>Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian</b>	<b>5,665,195,577.00</b>	<b>5,665,195,577.00</b>	<b>1,476,473,675.00</b>	<b>1,328,029,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.31.3.30.2.17.3.31.07.02.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>5,491,774,077.00</b>	<b>5,491,774,077.00</b>	<b>1,476,473,675.00</b>	<b>1,328,029,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.31.3.30.2.17.3.31.07.02.2.01.</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>5,491,774,077.00</b>	<b>5,491,774,077.00</b>	<b>1,476,473,675.00</b>	<b>1,328,029,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.31.3.30.2.17.3.31.07.02.2.01.01.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	74,192,400.00	74,192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.3.30.2.17.3.3 1.07.02.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	199,848,000.00	199,848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.31.3.30.2.17.3.3 1.07.02.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4,158,985,577.00	4,158,985,577.00	1,476,473,675.00	1,328,029,639.00	0.00	0.00		
3.31.3.30.2.17.3.3 1.07.02.2.01.04.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	98,057,300.00	98,057,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.31.3.30.2.17.3.3 1.07.02.2.01.05.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	851,146,500.00	851,146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.31.3.30.2.17.3.3 1.07.02.2.01.06.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	109,544,300.00	109,544,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.31.3.30.2.17.3.31.07.03.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>48,768,300.00</b>	<b>48,768,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.31.3.30.2.17.3.31.07.03.2.01.</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>48,768,300.00</b>	<b>48,768,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.31.3.30.2.17.3.3 1.07.03.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	28,181,500.00	28,181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.3.30.2.17.3.3 1.07.03.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	20,586,800.00	20,586,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>3.31.3.30.2.17.3.31.07.04.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>124,653,200.00</b>	<b>124,653,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>3.31.3.30.2.17.3.31.07.04.2.01.</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>124,653,200.00</b>	<b>124,653,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3.31.3.30.2.17.3.3 1.07.04.2.01.01.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	124,653,200.00	124,653,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>138,605,797,995.00</b>	<b>138,605,797,995.00</b>	<b>4,031,638,132.00</b>	<b>3,021,027,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4.01.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>59,815,924,176.00</b>	<b>59,815,924,176.00</b>	<b>2,249,365,700.00</b>	<b>1,778,354,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4.01.0.04.01.0.0.0.00.01.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>53,916,619,276.00</b>	<b>53,916,619,276.00</b>	<b>1,780,748,100.00</b>	<b>1,335,906,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4.01.0.04.01.0.0.0.00.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>53,916,619,276.00</b>	<b>53,916,619,276.00</b>	<b>1,780,748,100.00</b>	<b>1,335,906,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4.01.0.04.01.0.0.0.00.01.01.2.0.1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>37,754,200.00</b>	<b>37,754,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.0.04.01.0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,754,200.00	37,754,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.0.04.01.0.0.0.00.01.01.2.0.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>28,995,136,200.00</b>	<b>28,995,136,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.01 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28,843,753,300.00	28,843,753,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.05 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,039,400.00	8,039,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.07 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	143,343,500.00	143,343,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.0.04.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>402,503,750.00</b>	<b>402,503,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.05.10 .	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	402,503,750.00	402,503,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.0.04.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5,813,374,900.00</b>	<b>5,813,374,900.00</b>	<b>1,390,809,400.00</b>	<b>979,144,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.01 .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	190,831,500.00	190,831,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	685,113,400.00	685,113,400.00	1,390,809,400.00	979,144,350.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.03 .	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	143,230,600.00	143,230,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	978,650,800.00	978,650,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.05 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	368,748,800.00	368,748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48,999,800.00	48,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,156,942,000.00	3,156,942,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240,858,000.00	240,858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.0.04.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>937,948,000.00</b>	<b>937,948,000.00</b>	<b>99,373,700.00</b>	<b>67,430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	9,750,000.00	9,750,000.00	38,044,600.00	17,930,000.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	918,817,000.00	918,817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,381,000.00	9,381,000.00	61,329,100.00	49,500,000.00	0.00	0.00		
<b>4.01.0.04.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5,628,280,300.00</b>	<b>5,628,280,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800,558,700.00	800,558,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,326,350,000.00	1,326,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,320,386,000.00	2,320,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.04 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,180,985,600.00	1,180,985,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.0.04.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6,238,135,926.00</b>	<b>6,238,135,926.00</b>	<b>290,565,000.00</b>	<b>289,332,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.01 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	464,113,800.00	464,113,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.02 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,223,040,000.00	1,223,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.09 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,021,744,326.00	4,021,744,326.00	290,565,000.00	289,332,495.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.10 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	529,237,800.00	529,237,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.0.04.01.0.0 0.0.00.01.01.2.1 1.</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1,077,429,000.00</b>	<b>1,077,429,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.11.01 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	786,980,000.00	786,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.11.02 .	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	290,449,000.00	290,449,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.0.04.01.0.0 0.0.00.01.01.2.1 2.</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1,768,401,200.00</b>	<b>1,768,401,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.12.01 .	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	668,033,900.00	668,033,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	614,417,700.00	614,417,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	485,949,600.00	485,949,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.0.04.01.0.0 0.0.00.01.01.2.1 3.</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>273,867,700.00</b>	<b>273,867,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	126,734,300.00	126,734,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	75,133,600.00	75,133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	71,999,800.00	71,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.0.04.01.0.0 0.0.00.01.01.2.1 4.</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>2,743,788,100.00</b>	<b>2,743,788,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	2,253,068,600.00	2,253,068,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	69,955,500.00	69,955,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.0.04.01.0.00. 0.00.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	420,764,000.00	420,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.4.01.0.00.0. 00.01.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>5,899,304,900.00</b>	<b>5,899,304,900.00</b>	<b>468,617,600.00</b>	<b>442,447,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4.01.4.01.0.00.0. 00.01.02.</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>3,623,825,200.00</b>	<b>3,623,825,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.01.</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>655,968,600.00</b>	<b>655,968,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.02.2.01.01.	Penataan Administrasi Pemerintahan	137,199,000.00	137,199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.02.2.01.02.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	348,769,600.00	348,769,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.02.2.01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>2,347,392,500.00</b>	<b>2,347,392,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2,027,999,800.00	2,027,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.02.2.02.02.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	173,518,700.00	173,518,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.02.2.02.03.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	145,874,000.00	145,874,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>462,574,600.00</b>	<b>462,574,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	56,259,500.00	56,259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	293,377,900.00	293,377,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.02.2.03.03.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	112,937,200.00	112,937,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>157,889,500.00</b>	<b>157,889,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.02.2.04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	120,639,500.00	120,639,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	37,250,000.00	37,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2,275,479,700.00</b>	<b>2,275,479,700.00</b>	<b>468,617,600.00</b>	<b>442,447,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>1,239,940,000.00</b>	<b>1,239,940,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	303,589,800.00	303,589,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.03.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	891,323,200.00	891,323,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.03.2.01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	45,027,000.00	45,027,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>637,681,900.00</b>	<b>637,681,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.03.2.02.01.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	374,412,000.00	374,412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.03.2.02.03.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	263,269,900.00	263,269,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>397,857,800.00</b>	<b>397,857,800.00</b>	<b>468,617,600.00</b>	<b>442,447,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.03.2.03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	173,410,400.00	173,410,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.03.2.03.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	157,715,800.00	157,715,800.00	468,617,600.00	442,447,320.00	0.00	0.00		
4.01.4.01.0.00.0.0.01.03.2.03.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	66,731,600.00	66,731,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>78,789,873,819.00</b>	<b>78,789,873,819.00</b>	<b>1,782,272,432.00</b>	<b>1,242,673,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4.02.0.04.02.0.0.0.00.01.</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>52,360,895,019.00</b>	<b>52,360,895,019.00</b>	<b>1,782,272,432.00</b>	<b>1,242,673,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4.02.0.04.02.0.0.0.00.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>52,360,895,019.00</b>	<b>52,360,895,019.00</b>	<b>1,782,272,432.00</b>	<b>1,242,673,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4.02.0.04.02.0.0.0.00.01.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>495,433,250.00</b>	<b>495,433,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168,504,400.00	168,504,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	326,928,850.00	326,928,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.0.04.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,763,098,524.00</b>	<b>6,763,098,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,609,051,224.00	6,609,051,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	154,047,300.00	154,047,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.0.04.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>639,094,000.00</b>	<b>639,094,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	39,094,000.00	39,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.0.04.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>709,620,000.00</b>	<b>709,620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	666,900,000.00	666,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42,720,000.00	42,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.02.04.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>962,545,900.00</b>	<b>962,545,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64,649,000.00	64,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,608,000.00	98,608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,199,600.00	30,199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126,351,800.00	126,351,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	303,587,500.00	303,587,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	339,150,000.00	339,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.04.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>157,879,900.00</b>	<b>157,879,900.00</b>	<b>1,401,643,380.00</b>	<b>1,010,983,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0.00	0.00	340,710,200.00	157,657,500.00	0.00	0.00		
4.02.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	157,879,900.00	157,879,900.00	1,060,933,180.00	853,326,100.00	0.00	0.00		
<b>4.02.04.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,460,191,200.00</b>	<b>1,460,191,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	502,640,000.00	502,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	507,000,000.00	507,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450,551,200.00	450,551,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.0.04.02.0.0 0.0.00.01.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,459,315,322.00</b>	<b>1,459,315,322.00</b>	<b>380,629,052.00</b>	<b>231,689,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	535,650,000.00	535,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	151,000,000.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	471,875,322.00	471,875,322.00	285,516,800.00	140,725,693.00	0.00	0.00		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300,790,000.00	300,790,000.00	95,112,252.00	90,964,000.00	0.00	0.00		
<b>4.02.0.04.02.0.0 0.0.00.01.01.2.1 5.</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>38,413,308,223.00</b>	<b>38,413,308,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	37,887,533,223.00	37,887,533,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.0.04.02.0.00. 0.00.01.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	433,675,000.00	433,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.0.04.02.0.00.0.00.01.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	92,100,000.00	92,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.0.04.02.0.0.0.00.01.01.2.16.03</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>1,300,408,700.00</b>	<b>1,300,408,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.0.04.02.0.00.0.00.01.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1,300,408,700.00	1,300,408,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.4.02.0.00.0.00.01.</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>26,428,978,800.00</b>	<b>26,428,978,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>26,428,978,800.00</b>	<b>26,428,978,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>7,760,440,500.00</b>	<b>7,760,440,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.4.02.0.00.0.0.01.02.2.01.01.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	385,907,000.00	385,907,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0.01.02.2.01.02.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4,487,489,500.00	4,487,489,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0.01.02.2.01.03.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1,139,050,000.00	1,139,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0.01.02.2.01.04.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1,178,870,000.00	1,178,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0.01.02.2.01.05.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	569,124,000.00	569,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>3,463,547,700.00</b>	<b>3,463,547,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.4.02.0.00.0.0.01.02.2.02.01.	Pembahasan KUA dan PPAS	475,635,000.00	475,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0.01.02.2.02.02.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	242,854,000.00	242,854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.03.	Pembahasan APBD	1,517,191,700.00	1,517,191,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.04.	Pembahasan APBD Perubahan	672,640,000.00	672,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.05.	Pembahasan Laporan Semester	122,467,000.00	122,467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.02.06.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	432,760,000.00	432,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.4.02.0.00.0. 00.01.02.2.03.</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>7,230,245,200.00</b>	<b>7,230,245,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.03.01.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1,150,926,000.00	1,150,926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.03.02.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1,230,698,000.00	1,230,698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.03.03.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1,470,014,000.00	1,470,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.03.04.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1,150,926,000.00	1,150,926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.03.05.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1,695,354,000.00	1,695,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.03.07.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	532,327,200.00	532,327,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.4.02.0.00.0. 00.01.02.2.04.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>6,212,667,600.00</b>	<b>6,212,667,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.04.02.	Bimbingan Teknis DPRD	2,189,840,000.00	2,189,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.04.03.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1,258,656,700.00	1,258,656,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.04.05.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	756,099,400.00	756,099,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.04.06.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	205,000,000.00	205,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.04.07.	Penyusunan Program Kerja DPRD	1,793,071,500.00	1,793,071,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>827,780,700.00</b>	<b>827,780,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.05.03.	Pelaksanaan Reses	827,780,700.00	827,780,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.07.</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>389,797,100.00</b>	<b>389,797,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.07.01.	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	389,797,100.00	389,797,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>544,500,000.00</b>	<b>544,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4.02.4.02.0.00.0.0 0.01.02.2.08.04.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	544,500,000.00	544,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>77,528,389,096.00</b>	<b>77,528,389,096.00</b>	<b>784,676,100.00</b>	<b>727,108,990.00</b>	<b>23,880,085,890.00</b>	<b>12,793,426,443.00</b>		
<b>5.01.</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>12,952,101,833.00</b>	<b>12,952,101,833.00</b>	<b>161,622,800.00</b>	<b>159,649,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.01.5.01.5.05.0.00.01.</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1,722,181,100.00</b>	<b>1,722,181,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1,062,937,300.00</b>	<b>1,062,937,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>617,581,300.00</b>	<b>617,581,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.02.2.01.01.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	369,770,000.00	369,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	237,211,300.00	237,211,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.02.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02.</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>319,355,000.00</b>	<b>319,355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02.02.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	305,000,000.00	305,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02.03.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	14,355,000.00	14,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>126,001,000.00</b>	<b>126,001,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.02.	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	28,800,000.00	28,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	97,201,000.00	97,201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>659,243,800.00</b>	<b>659,243,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>186,580,000.00</b>	<b>186,580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	89,527,500.00	89,527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10,489,500.00	10,489,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12,563,200.00	12,563,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.01.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	53,865,800.00	53,865,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8,634,000.00	8,634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.01.5.01.5.05.0.0 00.01.03.2.02.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>181,199,800.00</b>	<b>181,199,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77,187,000.00	77,187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3,306,500.00	3,306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5,106,500.00	5,106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.02.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77,468,800.00	77,468,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.02.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6,695,000.00	6,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.02.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11,436,000.00	11,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.01.5.01.5.05.0. 00.01.03.2.03.</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>291,464,000.00</b>	<b>291,464,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	152,862,100.00	152,862,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7,069,000.00	7,069,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	44,808,400.00	44,808,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,850,000.00	12,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.03.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.5.05.0.0 0.01.03.2.03.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	64,574,500.00	64,574,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.01.5.05.01.5.0 5.0.00.01.</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>11,229,920,733.00</b>	<b>11,229,920,733.00</b>	<b>161,622,800.00</b>	<b>159,649,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.01.5.05.01.5.0 5.0.00.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11,229,920,733.00</b>	<b>11,229,920,733.00</b>	<b>161,622,800.00</b>	<b>159,649,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.01.5.05.01.5.0 5.0.00.01.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>126,789,800.00</b>	<b>126,789,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.01.5.05.01.5.05. 0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108,769,200.00	108,769,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.05.01.5.05. 0.00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,020,600.00	18,020,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.01.5.05.01.5.0 5.0.00.01.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10,255,078,933.00</b>	<b>10,255,078,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.01.5.05.01.5.05. 0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,238,285,733.00	10,238,285,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.05.01.5.05. 0.00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,257,600.00	2,257,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.05.01.5.05. 0.00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14,535,600.00	14,535,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.01.5.05.01.5.0 5.0.00.01.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>48,924,000.00</b>	<b>48,924,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48,924,000.00	48,924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.06.6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>370,604,800.00</b>	<b>370,604,800.00</b>	<b>18,195,200.00</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,205,400.00	83,205,400.00	18,195,200.00	17,000,000.00	0.00	0.00		
5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71,017,000.00	71,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,758,400.00	20,758,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175,124,000.00	175,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.07.7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>77,675,000.00</b>	<b>77,675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77,675,000.00	77,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.08.8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>237,568,200.00</b>	<b>237,568,200.00</b>	<b>143,427,600.00</b>	<b>142,649,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120,680,000.00	120,680,000.00	141,127,600.00	140,449,240.00	0.00	0.00		
5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102,888,200.00	102,888,200.00	2,300,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
<b>5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.09.9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>113,280,000.00</b>	<b>113,280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.01.5.05.01.5.05.0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113,280,000.00	113,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>46,688,623,845.00</b>	<b>46,688,623,845.00</b>	<b>386,850,400.00</b>	<b>359,937,750.00</b>	<b>23,880,085,890.00</b>	<b>12,793,426,443.00</b>		
<b>5.02.0.05.02.0.0.0.00.02.</b>	<b>Badan Pengelola Pendapatan Daerah</b>	<b>10,913,153,076.00</b>	<b>10,913,153,076.00</b>	<b>91,777,600.00</b>	<b>91,019,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.02.0.05.02.0.0.0.00.02.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10,913,153,076.00</b>	<b>10,913,153,076.00</b>	<b>91,777,600.00</b>	<b>91,019,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.02.0.05.02.0.0.0.00.02.01.2.01.1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>147,867,300.00</b>	<b>147,867,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.0.05.02.0.00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77,011,800.00	77,011,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,855,500.00	70,855,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.0.05.02.0.0.0.00.02.01.2.02.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9,805,253,176.00</b>	<b>9,805,253,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.0.05.02.0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,757,606,376.00	9,757,606,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.02.07 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47,646,800.00	47,646,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.0.05.02.0.0 0.0.00.02.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>25,250,000.00</b>	<b>25,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.05.11 .	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25,250,000.00	25,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.0.05.02.0.0 0.0.00.02.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>368,533,400.00</b>	<b>368,533,400.00</b>	<b>91,777,600.00</b>	<b>91,019,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.06.01 .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,399,800.00	2,399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82,657,100.00	82,657,100.00	91,777,600.00	91,019,500.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.06.03 .	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,892,400.00	7,892,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.06.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81,390,000.00	81,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.06.05 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85,669,100.00	85,669,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.06.08 .	Fasilitas Kunjungan Tamu	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.06.09 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93,525,000.00	93,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5.02.0.05.02.0.0</b> <b>0.0.00.02.01.2.0</b> <b>7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>77,675,000.00</b>	<b>77,675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77,675,000.00	77,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.0.05.02.0.0</b> <b>0.0.00.02.01.2.0</b> <b>8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>124,104,200.00</b>	<b>124,104,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95,904,200.00	95,904,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,200,000.00	28,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.0.05.02.0.0</b> <b>0.0.00.02.01.2.0</b> <b>9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>364,470,000.00</b>	<b>364,470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	298,970,000.00	298,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65,500,000.00	65,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.0.05.02.0.0</b> <b>0.0.00.05.</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>30,087,608,469.00</b>	<b>30,087,608,469.00</b>	<b>293,064,800.00</b>	<b>266,918,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.02.0.05.02.0.0</b> <b>0.0.00.05.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>30,087,608,469.00</b>	<b>30,087,608,469.00</b>	<b>293,064,800.00</b>	<b>266,918,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.02.0.05.02.0.0</b> <b>0.0.00.05.01.2.0</b> <b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34,095,800.00</b>	<b>34,095,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.01.01 .	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,230,800.00	30,230,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.01.07 .	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,865,000.00	3,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.0.05.02.0.0 0.0.00.05.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>29,237,243,969.00</b>	<b>29,237,243,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.02.01 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29,232,248,369.00	29,232,248,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.02.05 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,829,000.00	3,829,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.02.07 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,166,600.00	1,166,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.0.05.02.0.0 0.0.00.05.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>365,190,200.00</b>	<b>365,190,200.00</b>	<b>293,064,800.00</b>	<b>266,918,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117,071,200.00	117,071,200.00	293,064,800.00	266,918,250.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.06.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37,482,500.00	37,482,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.06.05 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,996,500.00	14,996,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.06.09 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195,640,000.00	195,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5.02.0.05.02.0.0</b> <b>0.0.00.05.01.2.0</b> <b>7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>327,675,000.00</b>	<b>327,675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.07.10 .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327,675,000.00	327,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.0.05.02.0.0</b> <b>0.0.00.05.01.2.0</b> <b>8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>47,778,500.00</b>	<b>47,778,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.08.02 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.08.04 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47,078,500.00	47,078,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.0.05.02.0.0</b> <b>0.0.00.05.01.2.0</b> <b>9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>75,625,000.00</b>	<b>75,625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.0.05.02.0.00. 0.00.05.01.2.09.01 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75,625,000.00	75,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.5.02.0.00.0.</b> <b>00.02.</b>	<b>Badan Pengelola Pendapatan Daerah</b>	<b>2,804,794,600.00</b>	<b>2,804,794,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.02.5.02.0.00.0.</b> <b>00.02.04.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,804,794,600.00</b>	<b>2,804,794,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.02.5.02.0.00.0.</b> <b>00.02.04.2.01.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>2,804,794,600.00</b>	<b>2,804,794,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.01.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	64,829,400.00	64,829,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	94,104,200.00	94,104,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	276,715,400.00	276,715,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	462,821,400.00	462,821,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	290,419,800.00	290,419,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	51,921,000.00	51,921,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	95,756,700.00	95,756,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	682,426,100.00	682,426,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10,240,000.00	10,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	169,960,300.00	169,960,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	256,567,000.00	256,567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	146,143,100.00	146,143,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	153,677,400.00	153,677,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	49,212,800.00	49,212,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.5.02.0.00.0. 00.05.</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>2,883,067,700.00</b>	<b>2,883,067,700.00</b>	<b>2,008,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>23,880,085,890.00</b>	<b>12,793,426,443.00</b>		
<b>5.02.5.02.0.00.0. 00.05.02.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>2,125,660,100.00</b>	<b>2,125,660,100.00</b>	<b>2,008,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>23,880,085,890.00</b>	<b>12,793,426,443.00</b>		
<b>5.02.5.02.0.00.0. 00.05.02.2.01.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>363,793,900.00</b>	<b>363,793,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	15,016,100.00	15,016,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	13,890,100.00	13,890,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.01.03.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	123,138,400.00	123,138,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.01.04.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	14,920,800.00	14,920,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.01.05.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	1,989,100.00	1,989,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.01.06.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5,006,000.00	5,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	57,779,600.00	57,779,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	24,016,000.00	24,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	28,037,800.00	28,037,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.02.2.02.</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>124,670,300.00</b>	<b>124,670,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	41,176,600.00	41,176,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	11,787,400.00	11,787,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	22,386,400.00	22,386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	35,640,900.00	35,640,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	13,679,000.00	13,679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.5.02.0.00.0.0 00.05.02.2.03.</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>651,574,400.00</b>	<b>651,574,400.00</b>	<b>2,008,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	277,669,800.00	277,669,800.00	2,008,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	162,147,900.00	162,147,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	84,657,000.00	84,657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.03.07.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	8,417,900.00	8,417,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.03.09.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	91,099,700.00	91,099,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.03.12.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	15,175,700.00	15,175,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.03.13.	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	12,406,400.00	12,406,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.04.04.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.04.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0.00	0.00	0.00	0.00	23,880,085,890.00	12,793,426,443.00		
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.02.2.05.</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>385,621,500.00</b>	<b>385,621,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.02.2.05.02.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	385,621,500.00	385,621,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.03.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>757,407,600.00</b>	<b>757,407,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.02.5.02.0.00.0.00.05.03.2.01.</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>757,407,600.00</b>	<b>757,407,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	227,891,100.00	227,891,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	29,963,400.00	29,963,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	73,600,000.00	73,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	110,003,600.00	110,003,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	110,610,300.00	110,610,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	102,750,000.00	102,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	80,900,000.00	80,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.02.5.02.0.00.0.0 0.05.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	11,689,200.00	11,689,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.03.</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>16,447,635,418.00</b>	<b>16,447,635,418.00</b>	<b>171,990,900.00</b>	<b>145,974,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.03.0.05.03.0.0 0.0.00.02.</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>	<b>14,438,336,418.00</b>	<b>14,438,336,418.00</b>	<b>171,990,900.00</b>	<b>145,974,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.03.0.05.03.0.0 0.0.00.02.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14,438,336,418.00</b>	<b>14,438,336,418.00</b>	<b>171,990,900.00</b>	<b>145,974,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.03.0.05.03.0.0 0.0.00.02.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>42,563,000.00</b>	<b>42,563,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.03.0.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,063,000.00	30,063,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.0.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.03.0.05.03.0.0 0.0.00.02.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13,852,180,118.00</b>	<b>13,852,180,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.0.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.02.01 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,846,630,118.00	13,846,630,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.0.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.02.05 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.0.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.02.07 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.03.0.05.03.0.0 0.0.00.02.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>397,106,400.00</b>	<b>397,106,400.00</b>	<b>171,990,900.00</b>	<b>145,974,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.03.0.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.06.01 .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,556,200.00	4,556,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.0.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,249,800.00	110,249,800.00	171,990,900.00	145,974,000.00	0.00	0.00		
5.03.0.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.06.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,365,500.00	45,365,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.0.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.06.05 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61,946,900.00	61,946,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.0.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.06.09 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174,988,000.00	174,988,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.03.0.05.03.0.0 0.0.00.02.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.03.0.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.07.10 .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5.03.05.03.0.0</b> <b>0.0.00.02.01.2.0</b> <b>8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15,796,900.00</b>	<b>15,796,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.03.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,596,900.00	6,596,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.03.05.03.0.0</b> <b>0.0.00.02.01.2.0</b> <b>9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88,690,000.00</b>	<b>88,690,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.03.05.03.0.00. 0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88,690,000.00	88,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.03.5.03.0.00.0.</b> <b>00.02.</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>	<b>2,009,299,000.00</b>	<b>2,009,299,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.03.5.03.0.00.0.</b> <b>00.02.02.</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2,009,299,000.00</b>	<b>2,009,299,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.03.5.03.0.00.0.</b> <b>00.02.02.2.01.</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1,109,013,000.00</b>	<b>1,109,013,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.01.02.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.01.04.	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	719,500,000.00	719,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.01.06.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	65,600,000.00	65,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.01.10.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	168,513,000.00	168,513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.01.11.	Pengelolaan Data Kepegawaian	152,000,000.00	152,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.03.5.03.0.00.0.00.02.02.2.02.</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>656,495,000.00</b>	<b>656,495,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.02.01.	Pengelolaan Mutasi ASN	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.02.02.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.02.03.	Pengelolaan Promosi ASN	586,495,000.00	586,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.03.5.03.0.00.0.00.02.02.2.03.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>140,050,000.00</b>	<b>140,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	75,550,000.00	75,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.03.04.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	64,500,000.00	64,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.03.5.03.0.00.0.00.02.02.2.04.</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>103,741,000.00</b>	<b>103,741,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.04.03.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4,057,000.00	4,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.04.05.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	43,400,000.00	43,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.04.07.	Pembinaan Disiplin ASN	37,284,000.00	37,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.04.08.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.03.5.03.0.00.0.0 0.02.02.2.04.09.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.04.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>982,102,000.00</b>	<b>982,102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.04.5.03.0.00.0.00.02.</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>	<b>982,102,000.00</b>	<b>982,102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5.04.5.03.0.00.0.00.02.02.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>982,102,000.00</b>	<b>982,102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.04.5.03.0.00.0.00.02.02.2.01.</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>125,250,000.00</b>	<b>125,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.04.5.03.0.00.0.00.02.02.2.01.03.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	75,600,000.00	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.04.5.03.0.00.0.00.02.02.2.01.04.	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	49,650,000.00	49,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.04.5.03.0.00.0.00.02.02.2.02.</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>856,852,000.00</b>	<b>856,852,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.04.5.03.0.00.0.00.02.02.2.02.07.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	536,000,000.00	536,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.04.5.03.0.00.0.00.02.02.2.02.08.	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpina	320,852,000.00	320,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5.05.</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>457,926,000.00</b>	<b>457,926,000.00</b>	<b>64,212,000.00</b>	<b>61,548,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.05.5.01.5.05.0.00.01.</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>457,926,000.00</b>	<b>457,926,000.00</b>	<b>64,212,000.00</b>	<b>61,548,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>457,926,000.00</b>	<b>457,926,000.00</b>	<b>64,212,000.00</b>	<b>61,548,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>81,257,100.00</b>	<b>81,257,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.05.5.01.5.05.0.0.01.02.2.01.12.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	81,257,100.00	81,257,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>153,878,100.00</b>	<b>153,878,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.05.5.01.5.05.0.0.01.02.2.03.04.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	67,540,000.00	67,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.05.5.01.5.05.0.0.01.02.2.03.07.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	86,338,100.00	86,338,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04.</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>222,790,800.00</b>	<b>222,790,800.00</b>	<b>64,212,000.00</b>	<b>61,548,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
5.05.5.01.5.05.0.0.01.02.2.04.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	48,585,700.00	48,585,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.05.5.01.5.05.0.0.01.02.2.04.04.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	164,319,400.00	164,319,400.00	64,212,000.00	61,548,000.00	0.00	0.00		
5.05.5.01.5.05.0.0.01.02.2.04.05.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	9,885,700.00	9,885,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>6.</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>9,026,424,107.00</b>	<b>9,026,424,107.00</b>	<b>245,592,800.00</b>	<b>233,091,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>6.01.</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>9,026,424,107.00</b>	<b>9,026,424,107.00</b>	<b>245,592,800.00</b>	<b>233,091,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>6.01.0.06.01.0.0.0.00.01.</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>8,478,628,107.00</b>	<b>8,478,628,107.00</b>	<b>245,592,800.00</b>	<b>233,091,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6.01.0.06.01.0.0 0.0.00.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8,478,628,107.00</b>	<b>8,478,628,107.00</b>	<b>245,592,800.00</b>	<b>233,091,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>6.01.0.06.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>45,675,000.00</b>	<b>45,675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,675,000.00	22,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>6.01.0.06.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7,460,126,907.00</b>	<b>7,460,126,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,450,001,907.00	7,450,001,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,525,000.00	3,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>6.01.0.06.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>229,719,000.00</b>	<b>229,719,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33,750,000.00	33,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	195,969,000.00	195,969,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6.01.0.06.01.0.0</b> <b>0.0.00.01.01.2.0</b> <b>6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>192,221,300.00</b>	<b>192,221,300.00</b>	<b>46,059,800.00</b>	<b>39,485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,543,500.00	55,543,500.00	46,059,800.00	39,485,000.00	0.00	0.00		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64,665,400.00	64,665,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,762,400.00	25,762,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46,250,000.00	46,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>6.01.0.06.01.0.0</b> <b>0.0.00.01.01.2.0</b> <b>7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>54,162,000.00</b>	<b>54,162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	5,162,000.00	5,162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>6.01.0.06.01.0.0</b> <b>0.0.00.01.01.2.0</b> <b>8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>256,058,900.00</b>	<b>256,058,900.00</b>	<b>1,458,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,800,000.00	40,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215,258,900.00	215,258,900.00	1,458,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6.01.0.06.01.0.0</b> <b>0.0.00.01.01.2.0</b> <b>9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>240,665,000.00</b>	<b>240,665,000.00</b>	<b>198,075,000.00</b>	<b>192,306,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124,720,000.00	124,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5,875,000.00	5,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94,320,000.00	94,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.0.06.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,750,000.00	15,750,000.00	198,075,000.00	192,306,077.00	0.00	0.00		
<b>6.01.6.01.0.00.0.</b> <b>00.01.</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>547,796,000.00</b>	<b>547,796,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>6.01.6.01.0.00.0.</b> <b>00.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>254,465,000.00</b>	<b>254,465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>6.01.6.01.0.00.0.</b> <b>00.01.02.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>182,020,000.00</b>	<b>182,020,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
6.01.6.01.0.00.0.0 0.01.02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	19,750,000.00	19,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.6.01.0.00.0.0 0.01.02.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.6.01.0.00.0.0 0.01.02.2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja	26,800,000.00	26,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.6.01.0.00.0.0 0.01.02.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	38,220,000.00	38,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.6.01.0.00.0.0 0.01.02.2.01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	89,250,000.00	89,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>72,445,000.00</b>	<b>72,445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
6.01.6.01.0.00.0.0.01.02.2.02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	43,095,000.00	43,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.6.01.0.00.0.0.01.02.2.02.02.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	29,350,000.00	29,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>293,331,000.00</b>	<b>293,331,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>125,263,000.00</b>	<b>125,263,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
6.01.6.01.0.00.0.0.01.03.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	125,263,000.00	125,263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.2.02.</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>168,068,000.00</b>	<b>168,068,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
6.01.6.01.0.00.0.0.01.03.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	133,360,000.00	133,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.01.6.01.0.00.0.0.01.03.2.02.04.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34,708,000.00	34,708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>118,536,745,634.00</b>	<b>118,536,745,634.00</b>	<b>1,523,648,150.00</b>	<b>1,486,256,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>118,536,745,634.00</b>	<b>118,536,745,634.00</b>	<b>1,523,648,150.00</b>	<b>1,486,256,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.0.07.01.0.0.0.00.01.</b>	<b>Kecamatan Cimahi Utara</b>	<b>12,840,709,100.00</b>	<b>12,840,709,100.00</b>	<b>147,855,000.00</b>	<b>142,762,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.0.07.01.0.0.0.00.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12,840,709,100.00</b>	<b>12,840,709,100.00</b>	<b>147,855,000.00</b>	<b>142,762,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.0.07.01.0.0.0.00.01.01.2.0.1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>74,998,700.00</b>	<b>74,998,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53,944,200.00	53,944,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.01.07 .	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,054,500.00	21,054,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10,609,580,400.00</b>	<b>10,609,580,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.01 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,550,938,000.00	10,550,938,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.05 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,110,000.00	6,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.07 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52,532,400.00	52,532,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>40,958,500.00</b>	<b>40,958,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.05.10 .	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40,958,500.00	40,958,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>602,719,700.00</b>	<b>602,719,700.00</b>	<b>121,461,500.00</b>	<b>116,382,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162,489,800.00	162,489,800.00	121,461,500.00	116,382,700.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.03 .	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,051,100.00	3,051,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	218,105,300.00	218,105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75,033,500.00	75,033,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81,040,000.00	81,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>26,719,000.00</b>	<b>26,719,000.00</b>	<b>26,393,500.00</b>	<b>26,379,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	26,719,000.00	26,719,000.00	26,393,500.00	26,379,500.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>597,582,800.00</b>	<b>597,582,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157,947,600.00	157,947,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439,635,200.00	439,635,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>888,150,000.00</b>	<b>888,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	374,460,000.00	374,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	513,690,000.00	513,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.02.	Kecamatan Cimahi Tengah	16,325,271,819.00	16,325,271,819.00	806,663,750.00	787,200,581.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.02.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	16,325,271,819.00	16,325,271,819.00	806,663,750.00	787,200,581.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.02.01.2.0 1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	134,549,400.00	134,549,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44,037,800.00	44,037,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90,511,600.00	90,511,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.02.01.2.0 2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	12,940,726,019.00	12,940,726,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,816,723,019.00	12,816,723,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17,849,000.00	17,849,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	106,154,000.00	106,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.02.01.2.0 5.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	52,992,400.00	52,992,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52,992,400.00	52,992,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.01.0.07.01.0.0.0.0.00.02.01.2.0.6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,002,445,300.00</b>	<b>1,002,445,300.00</b>	<b>426,659,000.00</b>	<b>413,680,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00.0.00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124,029,200.00	124,029,200.00	426,659,000.00	413,680,700.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00.0.00.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	463,195,000.00	463,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00.0.00.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	153,221,100.00	153,221,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00.0.00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87,000,000.00	87,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00.0.00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0.0.0.00.02.01.2.0.7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>687,479,000.00</b>	<b>687,479,000.00</b>	<b>380,004,750.00</b>	<b>373,519,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00.0.00.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	687,479,000.00	687,479,000.00	380,004,750.00	373,519,881.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0.0.0.00.02.01.2.0.8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>902,789,700.00</b>	<b>902,789,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00.0.00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320,435,300.00	320,435,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00.0.00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582,354,400.00	582,354,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.02.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>604,290,000.00</b>	<b>604,290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	527,290,000.00	527,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.03.</b>	<b>Kecamatan Cimahi Selatan</b>	<b>15,238,089,215.00</b>	<b>15,238,089,215.00</b>	<b>569,129,400.00</b>	<b>556,293,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.03.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15,238,089,215.00</b>	<b>15,238,089,215.00</b>	<b>569,129,400.00</b>	<b>556,293,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.03.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>71,410,000.00</b>	<b>71,410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,967,900.00	33,967,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,442,100.00	37,442,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.03.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12,465,409,115.00</b>	<b>12,465,409,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,450,933,315.00	12,450,933,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,528,300.00	7,528,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.02.07 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6,947,500.00	6,947,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.03.01.2.0 5.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>112,788,000.00</b>	<b>112,788,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.05.11 .	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	112,788,000.00	112,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.03.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>811,572,900.00</b>	<b>811,572,900.00</b>	<b>299,336,000.00</b>	<b>290,006,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.06.01 .	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26,447,700.00	26,447,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180,115,200.00	180,115,200.00	299,336,000.00	290,006,174.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.06.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	338,618,000.00	338,618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.06.05 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,694,000.00	55,694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.06.06 .	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.06.09 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135,698,000.00	135,698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.03.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>25,810,000.00</b>	<b>25,810,000.00</b>	<b>64,215,400.00</b>	<b>62,263,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA						TRANSFER	
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		Anggaran	Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25,810,000.00	25,810,000.00	64,215,400.00	62,263,000.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.03.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>803,388,200.00</b>	<b>803,388,200.00</b>	<b>3,095,000.00</b>	<b>3,095,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215,387,000.00	215,387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	588,001,200.00	588,001,200.00	3,095,000.00	3,095,000.00	0.00	0.00		
<b>7.01.0.07.01.0.0 0.0.00.03.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>947,711,000.00</b>	<b>947,711,000.00</b>	<b>202,483,000.00</b>	<b>200,929,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	478,915,200.00	478,915,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.0.07.01.0.00. 0.00.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	468,795,800.00	468,795,800.00	202,483,000.00	200,929,361.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0. 00.01.</b>	<b>Kecamatan Cimahi Utara</b>	<b>20,697,481,800.00</b>	<b>20,697,481,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0. 00.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1,262,270,400.00</b>	<b>1,262,270,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0. 00.01.02.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>1,143,124,200.00</b>	<b>1,143,124,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.0 0.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,143,124,200.00	1,143,124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.04.</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>119,146,200.00</b>	<b>119,146,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.01.02.2.04.01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	98,998,100.00	98,998,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.7.01.0.00.0.01.02.2.04.02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20,148,100.00	20,148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>13,675,329,400.00</b>	<b>13,675,329,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.02.</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>13,675,329,400.00</b>	<b>13,675,329,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.01.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	215,804,150.00	215,804,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.7.01.0.00.0.01.03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7,947,142,800.00	7,947,142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.7.01.0.00.0.01.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5,512,382,450.00	5,512,382,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>3,641,879,200.00</b>	<b>3,641,879,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.04.2.01.</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>3,641,879,200.00</b>	<b>3,641,879,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	3,641,879,200.00	3,641,879,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>2,118,002,800.00</b>	<b>2,118,002,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>2,118,002,800.00</b>	<b>2,118,002,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.0.01.05.2.01.01.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan K	203,722,600.00	203,722,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.7.01.0.00.0.0.01.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1,914,280,200.00	1,914,280,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.</b>	<b>Kecamatan Cimahi Tengah</b>	<b>28,617,175,400.00</b>	<b>28,617,175,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1,530,262,400.00</b>	<b>1,530,262,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>1,164,732,500.00</b>	<b>1,164,732,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.0.02.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,164,732,500.00	1,164,732,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.02.2.04.</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>365,529,900.00</b>	<b>365,529,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.0.02.02.2.04.01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	298,146,800.00	298,146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.0 0.02.02.2.04.02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	67,383,100.00	67,383,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>19,199,700,800.00</b>	<b>19,199,700,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.02.</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>19,199,700,800.00</b>	<b>19,199,700,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.0 0.02.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	533,763,200.00	533,763,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.7.01.0.00.0.0 0.02.03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10,691,819,200.00	10,691,819,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.7.01.0.00.0.0 0.02.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7,974,118,400.00	7,974,118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4,835,364,600.00</b>	<b>4,835,364,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>4,835,364,600.00</b>	<b>4,835,364,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.0 0.02.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	4,835,364,600.00	4,835,364,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>3,051,847,600.00</b>	<b>3,051,847,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>3,051,847,600.00</b>	<b>3,051,847,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.0 0.02.05.2.01.01.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan K	21,300,000.00	21,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.7.01.0.00.0.0 0.02.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3,030,547,600.00	3,030,547,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.</b>	<b>Kecamatan Cimahi Selatan</b>	<b>24,818,018,300.00</b>	<b>24,818,018,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>959,399,100.00</b>	<b>959,399,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>853,161,900.00</b>	<b>853,161,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.0 0.03.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	853,161,900.00	853,161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.04.</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>106,237,200.00</b>	<b>106,237,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.0 0.03.02.2.04.01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	48,442,400.00	48,442,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.7.01.0.00.0.0 0.03.02.2.04.02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	57,794,800.00	57,794,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>17,041,582,800.00</b>	<b>17,041,582,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.02.</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>17,041,582,800.00</b>	<b>17,041,582,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.0.03.03.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	298,138,500.00	298,138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.7.01.0.00.0.0.03.03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10,343,034,200.00	10,343,034,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.7.01.0.00.0.0.03.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6,400,410,100.00	6,400,410,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>4,412,148,000.00</b>	<b>4,412,148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>4,412,148,000.00</b>	<b>4,412,148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
7.01.7.01.0.00.0.0.03.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	4,412,148,000.00	4,412,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>2,404,888,400.00</b>	<b>2,404,888,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>2,404,888,400.00</b>	<b>2,404,888,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.0 0.03.05.2.01.01.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan K	178,029,000.00	178,029,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.01.7.01.0.00.0.0 0.03.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2,226,859,400.00	2,226,859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>8.</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>8,404,415,394.00</b>	<b>8,404,415,394.00</b>	<b>40,634,020.00</b>	<b>18,165,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8.01.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>8,404,415,394.00</b>	<b>8,404,415,394.00</b>	<b>40,634,020.00</b>	<b>18,165,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8.01.0.08.01.0.0 0.0.00.01.</b>	<b>Kantor Kesatuan Bangsa</b>	<b>3,279,936,144.00</b>	<b>3,279,936,144.00</b>	<b>40,634,020.00</b>	<b>18,165,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8.01.0.08.01.0.0 0.0.00.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,279,936,144.00</b>	<b>3,279,936,144.00</b>	<b>40,634,020.00</b>	<b>18,165,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8.01.0.08.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15,607,100.00</b>	<b>15,607,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,268,600.00	6,268,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,338,500.00	9,338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>8.01.0.08.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,889,201,944.00</b>	<b>2,889,201,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.01 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,815,114,744.00	2,815,114,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.02.07 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	74,087,200.00	74,087,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>8.01.0.08.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 6.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>240,069,600.00</b>	<b>240,069,600.00</b>	<b>9,048,900.00</b>	<b>6,934,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.02 .	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,701,600.00	38,701,600.00	9,048,900.00	6,934,263.00	0.00	0.00		
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.04 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,927,800.00	28,927,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.05 .	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,028,200.00	12,028,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.06 .	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.06.09 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157,912,000.00	157,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>8.01.0.08.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 7.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.07.09 .	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>8.01.0.08.01.0.0 0.0.00.01.01.2.0 8.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>58,167,500.00</b>	<b>58,167,500.00</b>	<b>31,585,120.00</b>	<b>11,231,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,500,000.00	13,500,000.00	31,585,120.00	11,231,000.00	0.00	0.00		
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32,667,500.00	32,667,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>8.01.0.08.01.0.00 0.0.00.01.01.2.0 9.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>46,890,000.00</b>	<b>46,890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8.01.0.08.01.0.00. 0.00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,890,000.00	46,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>8.01.8.01.0.00.0. 00.01.</b>	<b>Kantor Kesatuan Bangsa</b>	<b>5,124,479,250.00</b>	<b>5,124,479,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8.01.8.01.0.00.0. 00.01.02.</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>246,331,300.00</b>	<b>246,331,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8.01.8.01.0.00.0. 00.01.02.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>246,331,300.00</b>	<b>246,331,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8.01.8.01.0.00.0.0 0.01.02.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	246,331,300.00	246,331,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGE</b>	2,236,501,950.00	2,236,501,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.2.01.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser</b>	2,236,501,950.00	2,236,501,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.01.8.01.0.00.0.0.01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Poli	2,236,501,950.00	2,236,501,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	600,652,200.00	600,652,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.2.01.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	600,652,200.00	600,652,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.8.01.0.00.0.0 0.01.04.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600,652,200.00	600,652,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>371,206,000.00</b>	<b>371,206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>371,206,000.00</b>	<b>371,206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8.01.8.01.0.00.0.0 0.01.05.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	371,206,000.00	371,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK</b>	<b>1,669,787,800.00</b>	<b>1,669,787,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>1,669,787,800.00</b>	<b>1,669,787,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
8.01.8.01.0.00.0.0 0.01.06.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	140,283,800.00	140,283,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.8.01.0.00.0.0 0.01.06.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	1,529,504,000.00	1,529,504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>Jumlah</b>	1,406,945,786,943.00	1,221,658,713,620.00	425,752,276,510.00	247,060,564,786.00	23,880,085,890.00	12,793,426,443.00		

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

# **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 3 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

NO	URAIAN	2021	2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	271.172.220.677,53	121.693.751.477,73
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	270.898.017.186,53	121.693.751.477,73
3	Subtotal (1-2)	274.203.491,00	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLpa/SiKPA)	308.665.364.620,64	271.172.220.677,53
5	Subtotal (3+4)	308.939.568.111,64	271.172.220.677,53
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahunan Sebelumnya	(274.203.491,00)	
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	308.665.364.620,64	271.172.220.677,53

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN  
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291 NOREG  
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **LAPORAN OPERASIONAL**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
<b>1</b>	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 203.700.704.578,00	Rp 179.325.342.134,00	Rp 24.375.362.444,00	13,59
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 12.171.916.379,00	Rp 17.838.995.698,00	Rp (5.667.079.319,00)	-31,77
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 9.956.960.000,00	Rp 9.778.080.000,00	Rp 178.880.000,00	1,83
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 207.335.232.391,49	Rp 161.672.800.908,91	Rp 45.662.431.482,58	28,24
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 433.164.813.348,49</b>	<b>Rp 368.615.218.740,91</b>	<b>Rp 64.549.594.607,58</b>	<b>17,51</b>
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 51.986.941.479,00	Rp 48.571.558.676,00	Rp 3.415.382.803,00	7,03
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp 29.733.151.567,00	Rp 39.583.428.911,00	Rp (9.850.277.344,00)	-24,88
	Dana Alokasi Umum	Rp 530.425.978.000,00	Rp 539.717.972.000,00	Rp (9.291.994.000,00)	-1,72
	Dana Alokasi Khusus	Rp 131.759.768.941,00	Rp 160.457.085.903,00	Rp (28.697.316.962,00)	-17,88
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>Rp 743.905.839.987,00</b>	<b>Rp 788.330.045.490,00</b>	<b>Rp (44.424.205.503,00)</b>	<b>-5,64</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	DID	Rp 52.247.274.000,00	Rp 97.730.028.000,00	Rp (45.482.754.000,00)	-46,54
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>Rp 52.247.274.000,00</b>	<b>Rp 97.730.028.000,00</b>	<b>Rp (45.482.754.000,00)</b>	<b>-46,54</b>
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 126.781.787.043,00	Rp 119.792.475.687,00	Rp 6.989.311.356,00	5,83
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 105.707.342.961,00	Rp -	Rp 105.707.342.961,00	-
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>Rp 232.489.130.004,00</b>	<b>Rp 119.792.475.687,00</b>	<b>Rp 112.696.654.317,00</b>	<b>94,08</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 1.028.642.243.991,00</b>	<b>Rp 1.005.852.549.177,00</b>	<b>Rp 22.789.694.814,00</b>	<b>2,27</b>
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
	Pendapatan Hibah	Rp 83.494.375.949,80	Rp 59.439.221.689,98	Rp 24.055.154.259,82	40,47
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp 71.950.231,00	Rp 23.922.151.027,00	Rp (23.850.200.796,00)	-99,70
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>Rp 83.566.326.180,80</b>	<b>Rp 83.361.372.716,98</b>	<b>Rp 204.953.463,82</b>	<b>0,25</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 1.545.373.383.520,29</b>	<b>Rp 1.457.829.140.634,89</b>	<b>Rp 87.544.242.885,40</b>	<b>6,01</b>
<b>2</b>	<b>BEBAN</b>				
	Beban Pegawai	Rp 626.341.641.494,00	Rp 654.522.752.844,00	Rp (28.181.111.350,00)	-4,31
	Beban Persediaan	Rp 147.997.945.138,29	Rp 174.752.300.288,94	Rp (26.754.355.150,65)	-15,31
	Beban Jasa	Rp 336.911.501.029,62	Rp 263.219.286.073,75	Rp 73.692.214.955,87	28,00
	Beban Pemeliharaan	Rp 46.128.442.345,00	Rp 14.290.438.232,00	Rp 31.838.004.113,00	222,79
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 25.225.731.969,00	Rp 36.159.340.024,00	Rp (10.933.608.055,00)	-30,24
	Beban Bunga	Rp 276.614.324,47	Rp 458.243.473,20	Rp (181.629.148,73)	-39,64
	Beban Subsidi	Rp 410.574.000,00	Rp -	Rp 410.574.000,00	-
	Beban Hibah	Rp 18.250.155.200,00	Rp 13.856.011.450,00	Rp 4.394.143.750,00	31,71
	Beban Bantuan Sosial	Rp 2.571.530.000,00	Rp 2.864.475.000,00	Rp (292.945.000,00)	-10,23
	Beban Penyusutan	Rp 122.398.887.198,70	Rp 182.254.741.087,95	Rp (59.855.853.889,25)	-32,84
	Beban Amortisasi	Rp 1.329.017.633,25	Rp 1.498.437.358,25	Rp (169.419.725,00)	-11,31
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 2.666.559.266,06	Rp 12.404.995.594,40	Rp (9.738.436.328,33)	-78,50
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp 334.507.323,99	Rp 728.625.259,50	Rp (394.117.935,51)	-54,09
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>Rp 1.330.843.106.922,38</b>	<b>Rp 1.357.009.646.685,98</b>	<b>Rp (26.166.539.763,61)</b>	<b>-1,93</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>Rp 214.530.276.597,91</b>	<b>Rp 100.819.493.948,91</b>		
<b>3</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (5.130.797.753,00)	Rp (11.341.280.894,45)	Rp 6.210.483.141,45	-54,76
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>Rp (5.130.797.753,00)</b>	<b>Rp (11.341.280.894,45)</b>	<b>Rp 6.210.483.141,45</b>	<b>-54,76</b>
	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>Rp 209.399.478.844,91</b>	<b>Rp 89.478.213.054,46</b>	<b>Rp 119.921.265.790,45</b>	<b>134,02</b>
<b>4</b>	<b>POS LUAR BIASA</b>				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Luar Biasa	Rp 9.736.649.668,00	Rp 10.612.007.886,38	Rp (875.358.218,38)	-8,25
	<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>Rp (9.736.649.668,00)</b>	<b>Rp (10.612.007.886,38)</b>	<b>Rp 875.358.218,38</b>	<b>-8,25</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>Rp 199.662.829.176,91</b>	<b>Rp 78.866.205.168,08</b>	<b>Rp 120.796.624.008,83</b>	<b>153,17</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALI KOTA CIMAHI,

  
NGATYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

# **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

## **(LPE)**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
 TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	2.711.528.785.611,89	2.633.055.798.669,41
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	199.662.829.176,91	78.866.205.168,08
3	RK PPKD	-	(0,00)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(0,52)	0,91
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(4.175.918.915,75)	(8.328.101.111,35)
6	KOREKSI NILAI UTANG	(21.905.000,00)	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(4.683.461,90)	(27.912.082,00)
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(1.265.202.393,86)	(2.300.574.403,87)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	7.147.191.431,60
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	- Penyisihan Piutang	84.553.855,62	725.109.015,27
	- Akumulasi Penyusutan	10.184.503.367,13	2.315.992.928,42
	- Akumulasi Amortisasi	0,01	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	29.572.880,52	74.039.638,42
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	1.682.474,00	1.036.357,00
14	EKUITAS AKHIR	2.916.024.217.594,05	2.711.528.785.611,89

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
 pada tanggal 6 September 2022  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291  
 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 3 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **NERACA**



**KOTA CIMAHI**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
<b>I</b>	<b>ASET</b>		
<b>1</b>	<b>ASET LANCAR</b>		
	Kas di Kas Daerah	261.726.825.185,51	252.983.054.384,92
	Kas di RSUD	40.989.619.473,61	12.624.391.630,61
	Kas di Bendahara Pengeluaran	148.923.030,52	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	659.044,00	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	861.472.095,00	195.990.640,00
	Kas Di Kas BLUD Puskesmas	3.174.447.354,00	2.573.771.153,00
	Kas Dana Bos	1.763.418.438,00	2.490.895.654,00
	Kas Lainnya	590.793.711,00	560.144.677,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	128.892.710.993,00	198.458.610.887,00
	Penyisihan Piutang Pajak	(46.745.285.110,18)	(135.641.054.045,82)
	<b>Piutang Pajak Netto</b>	<b>82.147.425.882,83</b>	<b>62.817.556.841,19</b>
	Piutang Retribusi	2.271.651.667,00	3.264.415.784,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.510.951.900,38)	(1.691.808.387,35)
	<b>Piutang Retribusi Netto</b>	<b>760.699.766,62</b>	<b>1.572.607.396,66</b>
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	27.370.729.034,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	9.794.305.571,00	6.877.800.265,00
	Belanja Dibayar Dimuka	4.576.692.589,29	10.378.639.377,91
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	217.551.668,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(217.551.668,00)	(217.551.668,00)
	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Piutang Lainnya	9.567.340.661,47	5.426.999.986,32
	Penyisihan Piutang Lainnya	(2.298.845.270,88)	(942.440.653,32)
	<b>Piutang Lainnya Netto</b>	<b>7.268.495.390,59</b>	<b>4.484.559.333,00</b>
	Persediaan	32.019.657.874,93	38.927.924.338,32
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>445.823.435.406,89</b>	<b>423.858.064.725,60</b>
<b>2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
	<b>Investasi Nonpermanen</b>		
	Pinjaman Jangka Panjang	50.591.536,00	48.909.062,00
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>	<b>50.591.536,00</b>	<b>48.909.062,00</b>
	<b>Investasi Permanen</b>		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	68.493.992.363,50	68.660.344.186,50
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>68.493.992.363,50</b>	<b>68.660.344.186,50</b>
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>68.544.583.899,50</b>	<b>68.709.253.248,50</b>
<b>3</b>	<b>ASET TETAP</b>		
	Tanah	1.056.705.806.799,00	1.054.785.789.081,00
	Peralatan dan Mesin	694.191.726.346,98	653.697.490.905,54
	Gedung dan Bangunan	772.624.864.228,52	745.821.693.568,20
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	826.964.855.561,52	788.273.686.779,63
	Aset Tetap Lainnya	70.405.620.977,47	67.891.291.041,47
	Konstruksi dalam Pengerjaan	211.996.377.038,36	51.926.798.918,36
	Akumulasi Penyusutan	(1.231.876.277.638,95)	(1.119.661.893.807,38)
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>2.401.012.973.312,90</b>	<b>2.242.734.856.486,82</b>
<b>4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>		
	Dana Cadangan	-	-
	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-

No.	Uraian	2021	2020
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
	Aset Tak Berwujud	9.932.562.034,90	8.733.693.634,90
	Akumulasi Amortisasi	(8.229.263.872,40)	(6.900.246.239,16)
	Aset Tak Berwujud Netto	<b>1.703.298.162,51</b>	<b>1.833.447.395,75</b>
	Aset Lain-Lain	16.955.466.977,42	19.709.611.280,92
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>22.007.110.139,93</b>	<b>24.891.403.676,67</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.937.388.102.759,22</b>	<b>2.760.193.578.137,59</b>
<b>II</b>	<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	48.276.595,00	40.349.191,00
	Utang Bunga	129.039.156,47	161.298.946,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	855.508.220,00	855.508.220,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	4.141.620.812,00	19.004.747.924,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.622.915.723,00	25.180.855.366,00
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>18.797.360.506,47</b>	<b>45.242.759.647,00</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
	Utang Dalam Negeri	2.566.524.658,70	3.422.032.878,70
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>2.566.524.658,70</b>	<b>3.422.032.878,70</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>21.363.885.165,17</b>	<b>48.664.792.525,70</b>
<b>III</b>	<b>EKUITAS</b>		
	<b>EKUITAS</b>	2.916.024.217.594,05	2.711.528.785.611,89
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.937.388.102.759,22</b>	<b>2.760.193.578.137,59</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALI KOTA CIMAH, I,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH, I,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAH I TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAH I, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **LAPORAN ARUS KAS**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	179.891.802.692,00	158.937.237.899,00
4	Penerimaan Retribusi daerah	11.548.482.640,00	15.243.650.522,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	9.778.080.000,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	202.654.762.893,11	190.008.897.075,91
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	61.309.116.578,00	50.460.873.698,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	47.781.705.502,00	38.645.976.130,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	530.425.978.000,00	539.717.972.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	131.759.768.941,00	160.457.085.903,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	52.247.274.000,00	97.730.028.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	123.865.281.737,00	118.963.390.897,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	105.707.342.961,00	23.922.151.027,00
16	Penerimaan Hibah	6.700.327.000,00	140.839.566,00
17	Penerimaan Dana Darurat	-	-
18	Dana BOS	55.161.824.000,00	52.270.900.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	71.950.231,00	-
20	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.519.082.577.175,11</b>	<b>1.456.277.082.717,91</b>
21	<b>Arus Keluar Kas</b>		
22	Pembayaran Pegawai	643.977.236.028,00	636.883.229.738,00
23	Pembayaran Barang	555.391.457.278,00	456.337.905.380,02
24	Pembayaran Bunga	308.874.114,00	781.441.813,09
25	Pembayaran Subsidi	410.574.000,00	-
26	Pembayaran Hibah	18.999.042.200,00	13.856.011.450,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	2.571.530.000,00	2.864.475.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
29	Pembayaran Tak Terduga	12.793.426.443,00	74.352.158.320,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
34	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>1.234.452.140.063,00</b>	<b>1.185.075.221.701,11</b>
35	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>284.630.437.112,11</b>	<b>271.201.861.016,80</b>
36	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
37	<b>Arus Masuk Kas</b>		
38	Pencairan Dana Cadangan	-	-
39	Penjualan atas Tanah	-	-
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	1.662.403.182,00
41	Penjualan atas Gedung dan bangunan	10.511.600,00	56.974.000,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
43	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	1.042.471.728,00	-
44	Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
47	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.052.983.328,00</b>	<b>1.719.377.182,00</b>
48	<b>Arus Keluar Kas</b>		
49	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
50	Perolehan Tanah	1.924.413.918,00	24.237.283.327,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin	40.367.666.054,00	36.574.433.534,00
52	Perolehan Gedung dan bangunan	92.323.402.639,00	19.768.621.392,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.597.606.795,00	13.598.490.000,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.847.475.380,00	3.065.785.548,00
55	Perolehan Aset Lainnya	-	-

No.	Uraian	2021	2020
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-
58	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>247.060.564.786,00</b>	<b>97.244.613.801,00</b>
59	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(246.007.581.458,00)</b>	<b>(95.525.236.619,00)</b>
60	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
61	<b>Arus Masuk Kas</b>		
62	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-
63	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-
64	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		8.548.192.400,00
65	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		-
66	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		-
67	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-
70	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-
71	Penarikan Kembali Investasi Daerah - Dana Bergulir		-
72	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>-</b>	<b>8.548.192.400,00</b>
73	<b>Arus Keluar Kas</b>		
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		33.705.190.978,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		-
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		185.648.400,00
80	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-
81	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-
82	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-
83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-
84	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>855.508.220,00</b>	<b>34.746.347.598,00</b>
85	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(855.508.220,00)</b>	<b>(26.198.155.198,00)</b>
86	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
87	<b>Arus Masuk Kas</b>		
88	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	94.401.906.222,00	85.776.323.087,00
89	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>94.401.906.222,00</b>	<b>85.776.323.087,00</b>
90	<b>Arus Keluar kas</b>		
91	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	94.364.065.094,00	86.040.091.111,00
92	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>94.364.065.094,00</b>	<b>86.040.091.111,00</b>
93	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris</b>	<b>37.841.128,00</b>	<b>(263.768.024,00)</b>
94	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>37.805.188.562,11</b>	<b>149.214.701.175,80</b>
95	<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>270.908.452.653,53</b>	<b>121.693.751.477,73</b>
96	<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>308.713.641.215,64</b>	<b>270.908.452.653,53</b>
97	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>308.713.641.215,64</b>	<b>270.908.452.653,53</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAH  
NOMOR : 3 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAH TAHUN ANGGARAN 2021

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi selama 1 (satu) periode pelaporan dan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan. Menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik itu keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrua dengan terlebih dahulu melakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi dilakukan dengan mengacu kepada Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan struktur APBD. Klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara lengkap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

- Bab I Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi
  - 2.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah
  - 2.2. Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi
  - 2.3. Refocusing Dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19 Di Kota Cimahi
- Bab III Kebijakan Akuntansi
  - 3.1. Kebijakan Akuntansi
- Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - 4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
  - 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
  - 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
  - 4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
  - 4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab V Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
  - 5.1 Profile Entitas
  - 5.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - 5.3 Hubungan dengan DPRD, BPK, dan Forkopimda
  - 5.4 Pengaruh Stakeholder : DPRD
  - 5.5 Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Resiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan
  - 5.6 Alamat Kantor
- Bab VI Penutup

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

#### 2.1 VISI DAN MISI KOTA CIMAHI.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005 - 2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi adalah :

#### “MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni : Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

**Pertama, Maju.** Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan. Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

**Kedua, Agamis.** Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan

yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD.

**Ketiga, Berbudaya.** Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.**

Misi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam segala bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

**1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.**

Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi pertama, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; Ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean government*), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

**2. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.**

Misi ketiga ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya Usaha kecil menengah.

**3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.**

Maksud misi keempat ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan guidelines kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumber daya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

**4. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.**

Misi kelima ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika perubahan pemerintahan dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kompetensi dan tingkat kesejahteraan yang baik yang outputnya adalah kinerja pemerintahan yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## **2.2 TUJUAN DAN SASARAN KOTA CIMAH**

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi Periode 2017-2022 adalah :

**MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul**

Tujuan dari Misi kesatu adalah:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Sasaran dari Misi kesatu adalah:

- 1) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan;
- 2) Meningkatnya kualitas pendidikan;
- 3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 4) Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang;

**MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik**

Tujuan dari Misi kedua adalah:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah;

Sasaran dari Misi kedua adalah:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Daerah;
- 3) Meningkatnya Efisiensi dan Tranparansi Pemerintah Daerah;
- 4) Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;
- 5) Meningkatnya profesionalitas aparatur;
- 6) Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik;
- 7) Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 8) Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah;
- 9) Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD.

**MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan**

Tujuan dari Misi Ketiga adalah:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatkan pemerataan pendapatan;
- 3) Mengentaskan kemiskinan.

Sasaran dari Misi Ketiga adalah:

- 1) Meningkatnya Pertumbuhan Investasi;
- 2) Meningkatnya Daya saing industri;
- 3) Meningkatnya Daya saing Perdagangan;
- 4) Meningkatnya Ekspor;
- 5) Meningkatnya Daya Beli dan Kesejahteraan Masyarakat Berpendapatan rendah;
- 6) Meningkatnya Kapabilitas sektor pertanian;
- 7) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 8) Berkurangnya Ketimpangan antar wilayah;
- 9) Menurunnya angka pengangguran;
- 10) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan penduduk;
- 11) Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

**MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan**

Tujuan dari Misi Keempat adalah:

- 1) Meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi;
- 2) Meningkatkan kualitas permukiman;
- 3) Meningkatkan ketahanan bencana;
- 4) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan;

Sasaran dari Misi Keempat adalah:

- 1) Meningkatnya kelancaran pengguna jalan;
- 2) Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan;
- 3) Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan;
- 4) Meningkatnya pelayanan air limbah domestik;
- 5) Meningkatnya pelayanan drainase permukiman;
- 6) Meningkatnya pelayanan air bersih;
- 7) Mengurangi luas kawasan kumuh;
- 8) Meningkatnya Kesiapsiagaan tanggap bencana;
- 9) Mengurangi resiko banjir;
- 10) Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara;
- 11) Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
- 12) Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau;
- 13) Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

**MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan**

Tujuan dari Misi Kelima adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 2) Meningkatkan pengarusutamaan gender.

Sasaran dari Misi Kelima adalah:

- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat;
- 2) Meningkatnya pelestarian warisan budaya;
- 3) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- 4) Optimalnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

**2.3 REFOCUSING DAN REALOKASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID 19 DI KOTA CIMAHI**

Pada tahun 2020, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Direktur WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bahwa dalam kondisi saat ini pandemi Covid-19 membuat kita harus melakukan upaya proteksi atau melindungi diri sebagai tindakan pencegahan dari penularan Covid-19. Lebih lengkapnya beliau menyatakan: *“We must do all we can to protect health workers, and the best way to do that is for all of us to take every precaution we can to reduce the risk of transmission,*

*for ourselves and others. No one wants more so-called lockdowns. But if we want to avoid them, we all have to play our part.*” Berdasarkan pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa terhadap upaya penanggulangan pandemic Covid-19 sampai saat masih diperlukan beberapa tindakan khusus dalam menghadapinya.

Menurut Juan Pablo Bohoslavsky, ahli PBB dalam urusan hutang dan hak asasi manusia (*United Nations Independent Expert on Debt and Human Rights*), menyatakan krisis kesehatan akibat Covid-19 membawa dunia ke dalam resesi ekonomi. Kondisi tersebut sejatinya akan menyebabkan ekonomi dunia menanggung beban dalam bentuk perlambatan ekonomi sebagai dampak Covid19.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi ataupun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020, terutama sisi Pembiayaan.

Kota Cimahi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang juga sangat terdampak oleh pandemi COVID-19, sepanjang Tahun 2020 sebanyak 2636 Warga Cimahi Positif COVID-19 dengan rincian Konfirmasi Aktif 446 Sembuh 2126 dan meninggal 64. Selain itu menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi akibat pandemi COVID-19 tercatat ada 488 orang dari 12 perusahaan yang terkena PHK hingga menjadi pengangguran baru. Lalu ada 4.083 orang yang dirumahkan dari 17 perusahaan. Sehingga secara persentase pengangguran di Kota Cimahi naik 12 %. Untuk menanggulangi kondisi tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu melakukan tindakan yang cepat dan tepat untuk penyelamatan kesehatan, perekonomian kota, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak, namun diperlukan dana yang cukup besar untuk membiayai hal tersebut, sedangkan APBD Kota Cimahi Tahun 2020 sudah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019 sehingga perlu dilakukan kebijakan *Refocusing* dan Realokasi APBD Kota Cimahi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perlu di pahami bahwa penanganan pandemi (Covid-19) sebagai keadaan darurat

sejatinya dapat didasarkan kepada 3 (tiga) pendekatan yaitu:

1. pelayanan kesehatan (*health services*),
2. pemenuhan kebutuhan fiskal (*fulfillment of fiscal needs*), dan
3. percepatan penanganan dalam kegiatan sosial (*acceleration of handling in social activities*).

Ketiga pendekatan tersebut sejatinya tercermin dalam beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Seperti kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan. Kemudian dalam bidang ekonomi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Kedua peraturan tersebut memang dapat ditujukan dalam menjalankan proses penanganan bencana kedaruratan seperti saat Covid-19 ini. Dan Indonesia sendiri menggunakan model yang kedua yaitu menggunakan undang - undang yang ada dengan memperhatikan kesehatan masyarakat (model legislatif). Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang kehadiran undang –undang tersebut dibentuk dalam menghadapi kondisi kedaruratan akibat Covid-19 yang dialami oleh Indonesia.

Untuk tingkat Kota Cimahi Wali Kota Cimahi menetapkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 443/Kep.884-BPBD/2020 tentang Status Keadaan Darurat tertentu *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) di Kota Cimahi. Dalam Peraturan Wali Kota tersebut ditetapkan :

1. Menetapkan Status Keadaan Darurat Tertentu *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) di Kota Cimahi.
2. Melakukan upaya penanggulangan Keadaan Darurat yang ditujukan untuk mencegah, mendeteksi, merespons serta menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID19).
3. Pembiayaan Keadaan Darurat Tertentu bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.
4. Jangka waktu penanggulangan Status Keadaan darurat tertentu *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) di Kota Cimahi diberlakukan sampai dengan Wali Kota Cimahi mencabut penetapan Status Keadaan Darurat.

Dalam melakukan perubahan struktur anggaran APBD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kemudian mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa perubahan terhadap struktur anggaran dalam APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan, yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Dasar untuk melakukan perubahan struktur anggaran APBD ini pada dasarnya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun dikecualikan dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Syarat tersebut menghendaki bahwa harus adanya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD yang mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 50% (lima puluh) persen. Di samping itu, perubahan tersebut juga dilakukan secara teknis dengan wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian, Gubernur, Bupati/Wali Kota memiliki



tanggung jawab serta otoritas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah terhadap perubahan anggaran APBD.

Untuk Tahun 2021 Pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD Kota Cimahi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kemudian memberikan ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu untuk selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, mengingat dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini dapat dinilai sebagai keadaan darurat dan luar biasa, sehingga memerlukan penanganan yang cepat.

Sejatinya proses pencegahan dan pengendalian Covid-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Kehadiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah dan keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan RI Nomor 119/2814/SJ Nomor 177/KMK/07/2020 memberikan beberapa ketentuan penting terhadap upaya melakukan percepatan penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan penggunaan APBD, antara lain sebagai berikut:

1. Mewajibkan kepada kepala daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui 2 (dua) cara, yaitu: *Pertama*, penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). *Kedua*, penyesuaian pendapatan asli daerah.
2. Kepala daerah harus melakukan penyesuaian belanja daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 terdiri dari 3 (tiga) cara, yaitu: (1) Belanja bidang kesehatan seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis serta penyediaan sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat dan penanganan pasien. (2) Penyediaan jaringan pengamanan sosial (*social safety net*) seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. (3) Penanganan dampak ekonomi.
3. Kepala daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran melalui realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial dan hibah untuk kemudian dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19.

Sehingga dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi beberapa kali melakukan perubahan APBD. Adapun rincian beberapa kali perubahan tersebut adalah :

Tabel 1  
Rincian Perubahan Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Refocusing dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
1	Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang APBD TA 2021	9 Tahun 2020	30 Desember 2021	
2	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran APBD TA 2021	66 Tahun 2020	30 Desember 2021	

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
3	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021	31 Tahun 2021	22 Februari 2021	Penyesuaian alokasi penerimaan dan belanja DBH Pajak Daerah dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp15.950.838.895,00 dan penerimaan Bantuan Keuangan sebesar Rp411.210.331.864,00 berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71/KU.01.06.08/BPKAD Tgl. 7 Januari 2020 Hal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2021
				Realokasi belanja yang bersumber dari DBH CHT sebesar Rp4.750.226.000,00.
				Penyesuaian/penambahan alokasi penerimaan Dana Transfer Tenaga Kesehatan sebesar Rp.7.200.000.167,00.
4	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021	47 Tahun 2021		Tindaklanjut surat Dirjen Bina Keuda Kemendagri No. 906/1351/KEUDA Tgl. 16 Februari 2021 terkait penyesuaian kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi dan Lingkungan Hidup dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
				Melaksanakan amanat PMK No. 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan TA. 2021.
				Tindaklanjut surat Dirjen Bina Keuda Kemendagri No. 440/2757/Keuda Tgl. 19 April 2021 Hal Hasil Pemetaan ( <i>Mapping</i> ) dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERDA/ PERWAL</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>Keterangan</b>
				Tindaklanjut surat Dirjen Bina Keuda Kemendagri No. 906/2805/Keuda Tgl. 20 April 2021 terkait penyesuaian kegiatan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata TA 2021.
				Melaksanakan amanat Permendikbud No. 9 Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan.
				Koreksi alokasi anggaran pada DPA-SKPD
5	Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan APBD TA 2021	13 Tahun 2021	28 Oktober 2021	
6	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2021	52 Tahun 2021	28 Oktober 2021	

Tabel 2  
Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Refocusing dan Realokasi APBD  
Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19

KODE	URAIAN	APBD	Perwal 31 Tahun 2021	Perwal 47 Tahun 2021	PERUBAHAN APBD
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.293.373.842.498</b>	<b>1.702.944.891.257</b>	<b>1.702.944.891.257</b>	<b>1.587.835.737.002</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>344.133.306.653</b>	<b>344.133.306.653</b>	<b>344.133.306.653</b>	<b>346.622.143.134</b>
4.1.01	Pajak daerah	145.285.001.230	145.285.001.230	145.285.001.230	152.786.878.291
4.1.02	Retribusi daerah	13.441.644.012	13.441.644.012	13.441.644.012	11.404.826.000
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000	9.391.200.000	9.391.200.000	9.956.960.000
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	176.015.461.411	176.015.461.411	176.015.461.411	172.473.478.843
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>949.240.535.845</b>	<b>1.358.811.584.604</b>	<b>1.358.811.584.604</b>	<b>1.183.560.874.214</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	820.769.545.501	803.179.423.501	803.179.423.501	818.718.037.266
4.2.02	Transfer Antar Daerah	128.470.990.344	555.632.161.103	555.632.161.103	364.842.836.948
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57.652.719.654</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				57.652.719.654
	Bantuan Provinsi				
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.293.373.842.498</b>	<b>1.702.944.891.257</b>	<b>1.702.944.891.257</b>	<b>1.587.835.737.002</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.524.593.549.263</b>	<b>1.944.351.613.857</b>	<b>1.944.351.613.857</b>	<b>1.856.578.149.343</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja operasi</b>	<b>1.326.436.826.675</b>	<b>1.345.011.268.405</b>	<b>1.345.903.098.805</b>	<b>1.406.966.779.143</b>
5.1.01	Belanja pegawai	774.916.162.307	743.862.499.922	738.266.108.122	723.583.114.458
5.1.02	Belanja barang dan jasa	524.921.603.780	574.549.707.895	581.539.430.095	657.692.769.897
5.1.03	Belanja bunga	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	600.000.000
5.1.04	Belanja subsidi				507.144.000
5.1.05	Belanja hibah	11.116.326.450	11.116.326.450	20.198.726.450	20.953.726.450
5.1.06	Belanja bantuan sosial	14.482.734.138	14.482.734.138	4.898.834.138	3.630.024.338
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>174.276.636.698</b>	<b>575.460.259.562</b>	<b>574.568.429.162</b>	<b>425.731.284.310</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.307.976.980	5.307.976.980	5.307.976.980	8.724.964.740
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.698.584.491	125.894.743.673	125.963.913.273	52.251.769.444
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.986.316.922	312.957.879.816	312.957.879.816	228.846.712.178
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.193.373.105	131.181.986.105	130.220.986.105	132.999.455.842
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.385.200	117.672.988	117.672.988	2.908.382.106
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>23.880.085.890</b>	<b>23.880.085.890</b>	<b>23.880.085.890</b>	<b>23.880.085.890</b>
5.3.1	Belanja tidak terduga	23.880.085.890	23.880.085.890	23.880.085.890	23.880.085.890
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.524.593.549.263</b>	<b>1.944.351.613.857</b>	<b>1.944.351.613.857</b>	<b>1.856.578.149.343</b>
	<b>Total Surplus (Defisit)</b>	<b>(231.219.706.765)</b>	<b>(241.406.722.600)</b>	<b>(241.406.722.600)</b>	<b>(268.742.412.341)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>231.219.706.765</b>	<b>241.406.722.600</b>	<b>241.406.722.600</b>	<b>268.742.412.341</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>233.649.515.102</b>	<b>243.836.530.937</b>	<b>243.836.530.937</b>	<b>271.172.220.678</b>
6.1.01	SiLPA	233.649.515.102	243.836.530.937	243.836.530.937	271.172.220.678
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.429.808.337</b>	<b>2.429.808.337</b>	<b>2.429.808.337</b>	<b>2.429.808.337</b>
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337	2.429.808.337	2.429.808.337	2.429.808.337
	<b>SURPLUS/ DEFISIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 2.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### 2.3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mulai digulirkan pemerintah sejak tahun 1983 lalu merupakan satu tonggak sejarah monumental perpajakan guna menciptakan sistem yang lebih efektif dari sistem perpajakan sebelumnya. Sistem *self assessment*, sebagai sistem yang dianut dalam undang-undang perpajakan saat ini didesain berlandaskan pada kepercayaan dan kesadaran setiap Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Sistem yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa ini selalu menarik untuk terus dikaji demi suksesnya pelaksanaan sistem perpajakan dalam mengamankan penerimaan daerah pada khususnya dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada masa kini merupakan pilar utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan bangsa serta negara sebagaimana telah disepakati bersama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan perpajakan selalu menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Dari sisi psikologis, misalnya diketahui bahwa pada umumnya tidak mudah mendapatkan seseorang yang dengan sukarela membayar pajak. Hal ini dapat dimengerti karena pajak akan mengurangi jumlah penghasilan yang dapat dibelanjakannya. Namun demikian, harus disadari pula bahwa untuk keberlangsungan pembangunan daerah, pajak rela tidak rela harus dibayar oleh mereka yang sudah mempunyai penghasilan melampaui batasan tertentu yang ditetapkan undang-undang. Semua itu dimaksudkan agar pundi-pundi APBD tetap terisi untuk kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan demi kepentingan bersama. Di negara kita ini kegiatan pembangunan akan berjalan lancar apabila pemerintah dapat mendukung tujuan tersebut.

#### 2.3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.587.835.737.002,00 dengan realisasi sebesar Rp1.520.135.560.503,11 atau 95,74% dari target, sebagai berikut:

No	Dinas/Instansi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	677.903.245.268,00	603.120.255.312,11	88,97
2	Dinas Kesehatan	17.738.905.080,00	18.034.132.900,00	101,66
3	Rsu Daerah Cibabat	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114,21
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	7.754.071.000,00	7.686.799.080,00	99,13
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46
6	Dinas Tenaga Kerja	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84
7	Dinas Pangan Dan Pertanian	240.800.000,00	263.827.000,00	109,56
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.900.000.000,00	2.154.402.900,00	113,39

No	Dinas/Instansi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	Dinas Perhubungan	1.288.475.000,00	1.529.391.040,00	118,70
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan	400.000.000,00	431.612.791,00	107,90
11	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	1.572.095.500,00	1.717.326.502,00	109,24
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90
13	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	731.823.569.654,00	717.347.579.985,00	98,02
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.587.835.737.002,00</b>	<b>1.520.135.560.503,11</b>	<b>95,74</b>

Secara khusus realisasi pendapatan dari masing-masing dinas/instansi penghasil sebagai berikut :

#### 1. Badan Pengelolan Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp677.903.245.268,00 dengan realisasi sebesar Rp603.120.255.312,11 atau 88,97% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di bawah *cash budget* sebesar 11,03%.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan</b>	<b>677.903.245.268,00</b>	<b>603.120.255.312,11</b>	<b>88,97</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>168.513.221.054,00</b>	<b>205.437.257.303,11</b>	<b>121,91</b>
<b>Hasil Pajak Daerah</b>	<b>152.786.878.291,00</b>	<b>179.891.802.692,00</b>	<b>117,74</b>
<b>Pajak Hotel</b>	<b>149.382.500,00</b>	<b>179.180.631,00</b>	<b>119,95</b>
Pajak Hotel	149.382.500,00	175.215.317,00	117,29
Pajak Gubuk Pariwisata	-	3.965.314,00	-
<b>Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)</b>	<b>70.321.000,00</b>	<b>104.237.335,00</b>	<b>148,23</b>
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	70.321.000,00	104.237.335,00	148,23
<b>Pajak Restoran</b>	<b>14.278.402.073,00</b>	<b>17.018.807.906,00</b>	<b>119,19</b>
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	14.253.402.073,00	17.018.807.906,00	119,40
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	25.000.000,00	-	-
<b>Pajak Hiburan</b>	<b>88.096.000,00</b>	<b>123.330.330,00</b>	<b>140,00</b>
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.864.520,00	-	-

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	85.231.480,00	123.330.330,00	144,70
<b>Pajak Reklame</b>	<b>1.748.195.268,00</b>	<b>2.326.007.100,00</b>	<b>133,05</b>
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	942.290.918,00	1.302.620.500,00	138,24
Reklame Kain	161.900.100,00	204.129.100,00	126,08
Reklame Melekat/Stiker	587.748.000,00	775.085.700,00	131,87
Reklame Berjalan	56.256.250,00	44.171.800,00	78,52
<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>34.709.763.147,00</b>	<b>37.701.852.705,00</b>	<b>108,62</b>
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	34.705.220.910,00	37.688.296.591,00	108,60
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.542.237,00	13.556.114,00	298,45
<b>Pajak Parkir</b>	<b>620.000.000,00</b>	<b>937.097.932,00</b>	<b>151,14</b>
Pajak Parkir	620.000.000,00	937.097.932,00	151,14
<b>Pajak Air tanah</b>	<b>6.360.000.000,00</b>	<b>8.237.134.116,00</b>	<b>129,51</b>
Pajak Air tanah	6.360.000.000,00	8.237.134.116,00	129,51
<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>	<b>52.500.391.242,00</b>	<b>57.303.314.555,00</b>	<b>109,15</b>
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	52.500.391.242,00	57.303.314.555,00	109,15
<b>BPHTB-Pemindahan Hak</b>	<b>42.262.327.061,00</b>	<b>55.960.840.082,00</b>	<b>132,41</b>
BPHTB-Pemindahan Hak	42.262.327.061,00	55.960.840.082,00	132,41
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>9.956.960.000,00</b>	<b>9.956.960.000,00</b>	<b>100,00</b>
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.956.960.000,00	9.956.960.000,00	100,00
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>5.769.382.763,00</b>	<b>15.588.494.611,11</b>	<b>270,20</b>
<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>1.052.983.328,00</b>	<b>1.504,26</b>
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	-	-
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.511.600,00	105,12

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penjualan Aset Lainnya	30.000.000,00	1.042.471.728,00	3.474,91
<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>353.243.450,00</b>	<b>337.911.429,00</b>	<b>95,66</b>
Hasil Sewa BMD	-	28.750.000,00	-
Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	353.243.450,00	309.161.429,00	87,52
<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>9.376.691.914,10</b>	<b>187,54</b>
Jasa Giro Kas Daerah	5.000.000.000,00	8.940.488.321,10	178,82
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	304.410.155,00	-
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	131.793.438,00	-
<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>-</b>	<b>307.719.834,01</b>	<b>-</b>
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	307.719.834,01	-
<b>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>	<b>110.459.167,00</b>	<b>2.507.325.531,00</b>	<b>2.269,91</b>
Kerugian Terhadap Bendahara	110.459.167,00	-	-
Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	-	2.507.325.531,00	-
<b>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain</b>	<b>-</b>	<b>561.000,00</b>	<b>-</b>
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	561.000,00	-
<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>184.126.021,00</b>	<b>92,06</b>
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	184.126.021,00	92,06
<b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	<b>21.159.546,00</b>	<b>1.426.540.148,00</b>	<b>6.741,83</b>
Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	1.852.586,00	-
Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	27.083.744,00	-
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	3.272.650,00	-
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	25.875.282,00	-
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	10.628,00	-



Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	6.815.882,00	-
Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	-	7.769.388,00	-
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	21.159.546,00	1.332.289.704,00	6.296,40
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	21.570.284,00	-
Pendapatan Denda atas penandatanganan Akta sebelum melihat Bukti Pembayaran Pajak BPHTB			-
<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>	<b>14.520.600,00</b>	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	500.000,00	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	14.020.600,00	-	-
<b>Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan</b>	-	<b>49.593.947,00</b>	-
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	49.593.947,00	-
<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	-	<b>315.613.979,00</b>	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	308.733.979,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja	-	1.687.500,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Jaminan Kematian	-	5.062.500,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	130.000,00	-
<b>Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan</b>	-	<b>1.177.480,00</b>	-
Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	1.177.480,00	-
<b>Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah</b>	-	<b>28.250.000,00</b>	-

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	28.250.000,00	-
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>509.390.024.214,00</b>	<b>390.910.720.778,00</b>	<b>76,74</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>144.547.187.266,00</b>	<b>161.338.096.080,00</b>	
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>92.299.913.266,00</b>	<b>109.090.822.080,00</b>	
<b>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>92.299.913.266,00</b>	<b>109.090.822.080,00</b>	<b>118,19</b>
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	6.171.640.448,00	7.497.770.028,00	121,49
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	49.292.878.142,00	48.386.046.177,00	98,16
Dana Alokasi Cukai	5.256.491.773,00	5.425.300.373,00	103,21
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	3.358.469.000,00	3.490.313.900,00	103,93
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	179.344.000,00	192.486.100,00	107,33
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	801.488.018,00	801.488.018,00	100,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	103.708.525,00	151.713.993,00	146,29
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.287.505.980,00	1.674.500.150,00	130,06
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	25.848.387.380,00	41.471.203.341,00	160,44
<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>52.247.274.000,00</b>	<b>52.247.274.000,00</b>	<b>100,00</b>
DID	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>364.842.836.948,00</b>	<b>229.572.624.698,00</b>	<b>62,92</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	128.032.319.484,00	123.865.281.737,00	96,75
Bantuan Keuangan	236.810.517.464,00	105.707.342.961,00	44,64
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>-</b>	<b>6.772.277.231,00</b>	<b>-</b>
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>-</b>	<b>6.772.277.231,00</b>	<b>-</b>
<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>	<b>-</b>	<b>6.700.327.000,00</b>	<b>-</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	6.700.327.000,00	-
<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan</b>	<b>-</b>	<b>71.950.231,00</b>	<b>-</b>

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>			
Lain-lain Pendapatan		71.950.231,00	-

## 2. Dinas Kesehatan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Kesehatan sebesar Rp17.738.905.080,00 dengan realisasi sebesar Rp18.034.132.900,00 atau 101,66% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 1,66%.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b><u>Pendapatan</u></b>	<b>17.738.905.080,00</b>	<b>18.034.132.900,00</b>	<b>101,66</b>
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.738.905.080,00	18.034.132.900,00	101,66
Pendapatan BLUD	17.738.905.080,00	18.034.132.900,00	101,66

## 3. RSUD Cibabat

Target pendapatan daerah dari Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Cibabat) sebesar Rp145.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp165.608.981.259,00 atau 114,21% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 14,21 %.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b><u>Pendapatan</u></b>	<b>145.000.000.000,00</b>	<b>165.608.981.259,00</b>	<b>114.21</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>145.000.000.000,00</b>	<b>165.608.981.259,00</b>	<b>114.21</b>
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114,21
Pendapatan Dari BLUD	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114,21
Pendapatan dari BLUD	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114,21

## 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp7.754.071.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.686.799.080,00 atau 99,13% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di bawah *cash budget* sebesar 0,87 %.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan</b>	<b>7.754.071.000,00</b>	<b>7.686.799.080,00</b>	<b>99,13</b>

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>7.754.071.000,00</b>	<b>7.686.799.080,00</b>	<b>99,13</b>
Retribusi Daerah	3.788.880.000,00	3.217.805.900,00	84,93
Retribusi Jasa Umum	210.600.000,00	378.211.000,00	179,59
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	115.500.000,00	181.345.000,00	157,01
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	53.000.000,00	157.970.000,00	298,06
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	42.100.000,00	38.896.000,00	92,39
Retribusi Jasa Usaha	3.578.280.000,00	2.839.594.900,00	79,36
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.578.280.000,00	2.839.594.900,00	79,36
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.965.191.000,00	4.468.993.180,00	112,71
Pendapatan Denda Retribusi.	-	16.335.580,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	16.335.580,00	-
Pendapatan Dari BLUD	3.965.191.000,00	4.452.657.600,00	112,29
Pendapatan dari BLUD	3.965.191.000,00	4.452.657.600,00	112,29

## 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Target pendapatan daerah yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp64.575.500,00 dengan realisasi sebesar Rp104.907.500,00 atau 162,46% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 62,46%

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan</b>	<b>64.575.500,00</b>	<b>104.907.500,00</b>	<b>162,46</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>64.575.500,00</b>	<b>104.907.500,00</b>	<b>162,46</b>
Retribusi Daerah	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46
Retribusi Jasa Umum	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46

## 6. Dinas Tenaga Kerja

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp583.770.000,00 atau 77,84% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di bawah *cash budget* sebesar 22,16%

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>583.770.000,00</b>	<b>77,84</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>583.770.000,00</b>	<b>77,84</b>
Retribusi Daerah	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84
Retribusi Perizinan Tertentu	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84

## 7. Dinas Pangan dan Pertanian

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp240.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp263.827.000,00 atau 109,56% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 9,56%

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan</b>	<b>240.800.000,00</b>	<b>263.827.000,00</b>	<b>109,56</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>240.800.000,00</b>	<b>263.827.000,00</b>	<b>109,56</b>
Retribusi Daerah	240.800.000,00	263.827.000,00	109,56
Retribusi Jasa Usaha	240.800.000,00	263.827.000,00	109,56
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	208.800.000,00	233.635.000,00	111,89
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	32.000.000,00	30.192.000,00	94,35

## 8. Dinas Lingkungan Hidup

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.154.402.900,00 atau 113,39% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 13,39%

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan</b>	<b>1.900.000.000,00</b>	<b>2.154.402.900,00</b>	<b>113,39</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.900.000.000,00</b>	<b>2.154.402.900,00</b>	<b>113,39</b>
Retribusi Daerah	1.900.000.000,00	2.154.402.900,00	113,39
Retribusi Jasa Umum	1.500.000.000,00	1.562.133.900,00	104,14
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000.000,00	1.562.133.900,00	104,14

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Jasa Usaha	400.000.000,00	592.269.000,00	148,07
<b>Pendapatan</b>	<b>1.900.000.000,00</b>	<b>2.154.402.900,00</b>	<b>113,39</b>

### 9. Dinas Perhubungan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp1.288.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.529.391.040,00 atau 118,70% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 di atas *cash budget* sebesar 18,70%.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan</b>	<b>1.288.475.000,00</b>	<b>1.529.391.040,00</b>	<b>118,70</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.288.475.000,00</b>	<b>1.529.391.040,00</b>	<b>118,70</b>
Retribusi Daerah	1.288.475.000,00	1.529.391.040,00	118,70
Retribusi Jasa Umum	1.070.000.000,00	1.271.953.040,00	118,87
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	550.000.000,00	683.644.000,00	124,30
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	520.000.000,00	588.309.040,00	113,14
Retribusi Jasa Usaha	216.975.000,00	253.838.000,00	116,99
Retribusi Terminal	216.975.000,00	253.838.000,00	116,99
Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000,00	3.600.000,00	240,00
Retribusi Izin Trayek / Izin Usaha Angkutan Umum	1.500.000,00	3.600.000,00	240,00

### 10. Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp431.612.791,00. atau 107,90% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 di atas *cash budget* sebesar 7,90%.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>431.612.791,00</b>	<b>107,90</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>431.612.791,00</b>	<b>107,90</b>
Retribusi Daerah	400.000.000,00	431.612.791,00	107,90

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Jasa Umum	400.000.000,00	431.612.791,00	107,90
Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi	400.000.000,00	431.612.791,00	107,90

#### 11. Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian.

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Koperasi UKM Perindustrian. Perdagangan dan Pertanian sebesar Rp1.572.095.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.717.326.502,00 atau 109,24% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2020 berada di atas *cash budget* sebesar 9,24%.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan</b>	<b>1.572.095.500,00</b>	<b>1.717.326.502,00</b>	<b>109,24</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.572.095.500,00</b>	<b>1.717.326.502,00</b>	<b>109,24</b>
Retribusi Daerah	1.572.095.500,00	1.710.256.225,00	108,79
Retribusi Jasa Umum	125.000.000,00	1.068.244.000,00	854,60
Retribusi Pelayanan Pasar	-	895.585.000,00	-
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	125.000.000,00	172.659.000,00	138,13
Retribusi Jasa Usaha	1.447.095.500,00	642.012.225,00	44,37
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	560.000.000,00	642.012.225,00	114,65
Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan	887.095.500,00	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	7.070.277,00	-
Pendapatan Denda Retribusi.	-	7.070.277,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	7.070.277,00	-

#### 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Target pendapatan daerah yang dikelola Kantor Pelayanan Perizinan Tertentu sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.552.574.234,00 atau 110,90% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 10,90%.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.552.574.234,00</b>	<b>110,90</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.552.574.234,00</b>	<b>110,90</b>
Retribusi Daerah	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Perizinan Tertentu	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90

### 13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Target pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp731.823.569.654,00 dengan realisasi sebesar Rp717.347.579.985,00 atau 98,02% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2021 berada di bawah *cash budget* sebesar 1,98%

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pendapatan</b>	<b>731.823.569.654,00</b>	<b>717.347.579.985,00</b>	<b>98,02</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	-	<b>9.044,00</b>	-
Jasa Giro pd Rekening Dana BOS	-	9.044,00	-
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>674.170.850.000,00</b>	<b>662.185.746.941,00</b>	<b>98,22</b>
Dana Alokasi Umum	530.425.978.000,00	530.425.978.000,00	100,00
Dana Alokasi Umum.	530.425.978.000,00	530.425.978.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	143.744.872.000,00	131.759.768.941,00	91,66
Dana Alokasi Khusus	143.744.872.000,00	131.759.768.941,00	91,66
Dana Alokasi Khusus Fisik	37.033.421.000,00	31.966.257.254,00	86,32
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	106.711.451.000,00	99.793.511.687,00	93,52
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>57.652.719.654,00</b>	<b>55.161.824.000,00</b>	<b>95,68</b>
Pendapatan Hibah	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68
Pendapatan Hibah Dana BOS	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68
Dana BOS	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68

Mekanisme Pendapatan Dana BOS dilakukan dengan cara pemindah bukuan (transfer) dari Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Bendahara BOS di sekolah sehingga tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Cimahi. Pengakuan Pendapatan Dana BOS dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 adalah berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.



## **2.3.2 Pengelolaan Belanja Daerah**

### **2.3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 273), sedangkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 286).

### **2.3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah**

Dalam Tahun Anggaran 2021 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.856.578.149.343,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.481.512.704.849,00 atau 79,80%. Belanja daerah dimaksud dipergunakan untuk:

#### **1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.406.945.786.943,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.221.658.713.620,00 atau 86,83% terdiri dari:

##### **a. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp723.673.114.458,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp643.977.236.028,00 atau 88,99%;

##### **b. Belanja Barang**

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp657.581.777.697,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp555.391.457.278,00 atau 84,46%;

##### **c. Belanja Bunga**

Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp308.874.114,00 atau 51,48%;

##### **d. Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp507.144.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp410.574.000,00 atau 80,96%

##### **e. Belanja Hibah**

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp20.953.726.450,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.999.042.200,00 atau 90,67%

##### **f. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp3.630.024.338,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.571.530.000,00 atau 70,84%;

2. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp425.752.276.510,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp247.060.564.786,00 atau 58,03%;

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp23.880.085.890,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.793.426.443,00 atau 53,57%.

### 2.3.3 Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari pada anggaran belanja, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari pada anggaran belanja.

Apabila terjadi surplus anggaran dapat dimanfaatkan melalui pengeluaran anggaran pembiayaan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran cicilan utang, penyertaan modal (investasi) dan/atau menjadi sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran ditutup/dibiayai dari sisa lebih anggaran tahun lalu. Pinjaman daerah dan/atau transfer/penarikan dana cadangan daerah yang dianggarkan pada penerimaan anggaran pembiayaan.

Dalam Tahun Anggaran 2021 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp268.742.412.341,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp270.042.508.966,53 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp271.172.220.678,00 dan telah direalisasikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp270.898.017.186,53 atau 99,90%;

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp2.429.808.337,00 dan telah direalisasikan untuk Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21%.

### 2.3.4 Analisis Efisiensi

Dalam melaksanakan kinerja kegiatan suatu organisasi perlu diukur dalam suatu ukuran analisis antara pendapatan dan belanja anggaran. Pencapaian realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1)	Pendapatan	1.587.835.737.002,00	1.520.135.560.503,11	95,74

1	Pendapatan Asli Daerah	346.622.143.134,00	405.104.991.553,11	116,87
2	Pendapatan Transfer	1.183.560.874.214,00	1.053.096.467.719,00	88,98
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	57.652.719.654,00	61.934.101.231,00	107,43
	<b>Jumlah</b>	<b>1.587.835.737.002,00</b>	<b>1.520.135.560.503,11</b>	<b>95,74</b>
2)	Belanja	1.856.578.149.343,00	1.481.512.704.849,00	79,80
1	Belanja Operasi	1.406.945.786.943,00	1.221.658.713.620,00	86,83
2	Belanja Modal	425.752.276.510,00	247.060.564.786,00	58,03
3	Belanja Tak Terduga	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	53,57
	<b>Jumlah</b>	<b>1.856.578.149.343,00</b>	<b>1.481.512.704.849,00</b>	<b>79,80</b>
	<b>Surplus/defisit</b>	<b>- (268.742.412.341,00)</b>	<b>38.622.855.654,11</b>	<b>- (14,37)</b>

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

##### **3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut :

Basis akuntansi yang digunakan dalam Pelaporan Keuangan Kota Cimahi adalah Basis AkruaI untuk Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Arus Kas dan Laporan Saldo Anggaran Lebih sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

##### **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cimahi, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas pelaporan yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus tahun anggaran.
5. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

##### **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Berlebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **Neraca**

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

## **Laporan Operasional**

1. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu pelaporan.
2. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, Transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
3. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
4. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
6. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

## **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.

2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

### **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menindaklanjuti Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah beberapa kali menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Kebijakan Akuntansi terakhir dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ruang lingkupnya meliputi terdiri dari :

#### **1. Kerangka Konseptual;**

Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan bagi :

- a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

#### **2. Penyajian Laporan Keuangan;**

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
- b. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.
- c. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

#### **3. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;**

- 1) Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya.
- 3) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - a) Pendapatan-LRA;
  - b) Belanja;
  - c) Transfer;
  - d) Surplus atau defisit-LRA;
  - e) Penerimaan pembiayaan;

- f) Pengeluaran pembiayaan;
- g) Pembiayaan neto; dan
- h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

#### 4. Neraca;

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. Biaya dibayar di muka;
- f. investasi jangka panjang;
- g. aset tetap;
- h. Aset lainnya;
- i. kewajiban jangka pendek;
- j. kewajiban jangka panjang;
- k. ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

#### 5. Laporan Arus Kas;

- a. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- b. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- c. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

## **6. Laporan Operasional;**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit entitas pemerintah dan seluruh entitas akuntansi.

Laporan Operasional menyediakan informasi :

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional). dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional disusun untuk *melengkapi* pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **7. Catatan Atas Laporan Keuangan;**

- a. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman. Laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
- b. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah daerah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

## **8. Akuntansi Pendapatan Perpajakan;**

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,



dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pemerintah daerah dalam hal ini otoritas perpajakan di daerah dalam menjaga terlaksananya pemungutan pajak daerah secara tertib administrasi berhak juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan.
3. Pada pemerintah daerah sanksi perpajakan merupakan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.
4. Pendapatan Pajak Daerah-LRA, diakui pada saat:
  - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
  - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
  - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.
5. Pendapatan Pajak Daerah-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
  - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
6. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan self assessment system diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.
8. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan self assessment system antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah.
9. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan official assessment system diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.
10. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan official assessment system antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah.
11. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
12. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:
  - a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self assessment.

- b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk official assessment.
- 14. Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 15. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

**9. Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan;**

- 1. Pendapatan nonperpajakan dapat diartikan sebagai pendapatan daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.
- 2. Pendapatan Non Perpajakan -LRA, diakui pada saat:
  - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
  - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
  - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

**Pendapatan perizinan;**

- 3. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 4. Atas izin yang diberikan pemerintah yang melebihi satu periode akuntansi, pengakuan pendapatannya dilakukan hanya satu kali pada saat izin tersebut dan tidak perlu dibagi secara proporsional sesuai dengan waktu berlakunya izin yang bersangkutan.
- 5. Pengakuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa layanan pemberian izin merupakan layanan yang berkelanjutan serta tidak terdapat sumber daya ekonomi yang dikeluarkan pemerintah selama periode berlakunya izin.

**Pendapatan Pemberian Layanan**

- 6. Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada prinsipnya yaitu Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 7. Mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.
- 8. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:
  - a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; yang terkait akan diperoleh entitas;
  - b. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
  - c. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

### **Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)**

9. Pendapatan nonperpajakan-LO diakui pada saat bagian dari hak pemerintah daerah atas pemanfaatan/pengambilan SDA dimaksud ditetapkan.
10. Tata cara penetapan bagi hasil ini pada umumnya berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga/kontraktor serta sesuai dengan peraturan perundangan.

### **Pendapatan Investasi**

11. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividen) diakui pada saat diperoleh.
12. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah.
13. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

### **Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Keuangan/Pemanfaatan Aset Tetap**

14. Pendapatan nonperpajakan yang berasal dari pemanfaatan aset nonkeuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
15. Pengakuan pendapatan dari kerja sama pemanfaatan dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian antara entitas dengan pihak ketiga. Apabila pendapatan dari kerja sama pemanfaatan tersebut diterima untuk masa yang lebih dari satu periode akuntansi, maka dilakukan penyesuaian pendapatan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) tergantung dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.
16. Bentuk pemanfaatan aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah saat ini terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna serta kerja sama penyediaan infrastruktur.
17. Pengakuan pendapatan sewa dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian. Apabila perjanjian sewa melewati jangka waktu satu tahun, maka dilakukan penyesuaian pengakuan pendapatan sebesar yang telah menjadi hak entitas yang bersangkutan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) sesuai dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.

### **Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya**

18. Pendapatan nonperpajakan lainnya antara lain dapat berasal dari keuntungan penjualan, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum dan penghapusan utang.

19. Pendapatan yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, pendapatan yang berasal dari bunga/jasa perbankan diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat kas diterima oleh entitas.
20. Untuk pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinjaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

#### **Pendapatan perizinan;**

21. Pendapatan yang berasal dari perizinan disajikan sebesar tarif yang dipungut oleh pemerintah atas izin yang diberikannya.
22. Pemerintah selaku pemberi izin dapat memberikan batas waktu kepada penerima izin maupun tidak memberikan batas waktu.

#### **Pendapatan Pemberian Layanan**

23. Jumlah pendapatan operasional yang berasal dari pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah diukur sebesar nilai yang dibebankan atau ditagihkan kepada pengguna.

#### **Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)**

24. Terhadap pendapatan operasional yang berasal dari pemanfaatan/pengambilan SDA berdasar unitnya, jumlah pendapatannya dinilai sebesar jumlah SDA yang diambil/dimanfaatkan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan.
25. Dalam hal tarif dan penetapan dengan mata uang asing, jumlah pendapatan dicatat dengan mengkonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal penetapan.
26. Dalam hal penyetoran baru dilakukan kemudian masih dalam batas waktu yang diperkenankan dan terdapat perubahan kurs, jumlah pendapatan operasional adalah sebesar jumlah setoran sekaligus untuk koreksi atas pencatatan sebelumnya.

#### **Pendapatan Investasi**

27. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek bunga deposito dinilai sebesar bunga deposito yang diterima oleh entitas. Untuk hasil investasi dari bunga obligasi dinilai sebesar bunga obligasi yang menjadi hak entitas berdasarkan sertifikat obligasi yang dimiliki oleh entitas.
28. Hasil investasi jangka pendek yang berasal dari penyertaan jangka pendek berupa dividen tunai (cash dividend) dinilai sebesar jumlah yang akan diterima oleh pemerintah yang diumumkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
29. Pendapatan dari investasi jangka panjang penyertaan modal pemerintah, apabila menggunakan metode biaya, dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS. Sementara itu apabila menggunakan metode ekuitas disamping dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS, pendapatan tersebut juga akan mengurangi ekuitas entitas pada penyertaan tersebut.

### **Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Kuangan/Pemanfaatan Aset Tetap**

30. Pendapatan operasional yang berasal dari pendapatan sewa dinilai sebesar yang menjadi hak entitas pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.
31. Pendapatan operasional yang berasal dari kerja sama pemanfaatan, dinilai sebesar jumlah yang menjadi hak entitas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.

### **Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya**

32. Pendapatan operasional yang berasal dari keuntungan penjualan atau pertukaran aset diukur sebesar selisih positif antara kas dan/atau nilai aset yang diterima dikurangi dengan nilai buku aset yang dijual atau diserahkan.
33. Pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan pemerintah dinilai sebesar nilai penetapan.
34. Untuk pendapatan bunga/jasa perbankan dan pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya diakui sebesar yang telah diterima oleh entitas.
35. Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan/pelanggaran hukum dinilai sebesar penetapan putusan.
36. Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang, dinilai sebesar nilai utang yang dihapuskan oleh pemberi pinjaman. Bisa terjadi penghapusan utang dapat berasal dari usaha yang melebihi satu periode, namun mengingat prinsip keandalan, pendapatan dari penghapusan utang ini diakui sebesar nilai penghapusan pada tahun berkenaan.

## **10. Akuntansi Pendapatan Operasional Transfer;**

1. Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan operasional transfer LRA diakui pada saat :
  - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
  - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
  - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
  - d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. Pendapatan Operasional Transfer - LO diakui, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.
4. Alokasi pendapatan transfer merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
5. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan.
6. Apabila informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur setelah entitas penerima menerbitkan laporan keuangan, maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.
7. Ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Contohnya dana BOS dan dana desa.
8. Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Cimahi diakui sebagai pendapatan. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah Kota Cimahi.
9. Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD.
10. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.
11. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur.
12. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.
13. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.
14. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.
15. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah

melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

#### **11. Akuntansi Hibah;**

1. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
2. Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:
  - a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;
  - b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
  - c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;
  - d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
3. Pendapatan hibah - LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Selanjutnya dalam persepsi yang lebih luas Pengakuan Pendapatan yang diterima pada RKUD, yaitu:
  - a. Pendapatan hibah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
  - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
  - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
  - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
  - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
5. Pendapatan hibah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
6. Pengakuan pendapatan hibah – LO terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.
7. Pendapatan hibah – LO disajikan di Laporan Operasional.
8. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:
  - a. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
  - b. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan

- c. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.
9. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima Perangkat Daerah dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan Hibah-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh Perangkat Daerah penerima.
10. Belanja hibah – LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
11. Belanja hibah – LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.
12. Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
13. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:
14. Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
15. Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.
16. Beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.
14. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
15. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
16. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
17. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.
18. Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah.
19. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan. menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

## **12. Akuntansi Bantuan Sosial;**

1. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini :
  - a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah.



- b. Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.
  - c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan bencana.
  - d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
  - e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
2. Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
  3. Belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
  4. Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.
  5. Jika pengeluarannya berbentuk barang yang telah ada (dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya), maka tidak diklasifikasikan sebagai belanja bansos. Sebaliknya jika terjadi pengeluaran bansos dalam bentuk barang, maka belanja bansos akan diakui pada saat kas untuk pembelian barang tersebut dikeluarkan, walaupun barang tersebut belum diserahkan sebagian atau seluruhnya.
  6. Beban diakui pada saat:
    - a. timbulnya kewajiban;
    - b. terjadinya konsumsi aset;
    - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  7. Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos.
  8. Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.
  9. Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.
  10. Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Entitas harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat.

11. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur.
12. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Entitas Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka entitas juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.
13. Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.
14. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan, disajikan sebesar:
  - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
  - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.
15. Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila entitas pemerintah belum menyalurkan bantuan sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya masa mendatang.

### **13. Akuntansi Piutang;**

- 1) Untuk piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah diakui pada saat:
  - a) Telah diterbitkan surat ketetapan ; dan/atau
  - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak ke instansi terkait. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- 3) Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan penghitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- 4) Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Apabila sampai dengan tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Retribusi Daerah (STRD).

- 5) STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 6) Piutang yang berdasarkan perikatan harus memenuhi kriteria untuk diakui sebagai piutang :
  - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - b. Jumlah piutang dapat diukur;
  - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
  - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 7) Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman dapat diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah, perorangan, BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.
- 8) Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di Rekening Kas Umum daerah. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir tahun harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- 9) Piutang yang timbul dari penjualan pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah.
- 10) Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran misalnya penjualan kendaraan dinas. Pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelepasan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.
- 11) Piutang atas dasar kemitraan timbul apabila terdapat hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya.
- 12) Pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang pada umumnya untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, misalnya penyewaan tanah dan alat-alat milik pemerintah daerah. Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa pada setiap akhir periode akuntansi maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.
- 13) Pengakuan piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut :

a) Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat;

Piutang Dana bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan tahun anggaran maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah.

b) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);

Piutang DAU diakui apabila pada saat akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer ke daerah, yaitu sebesar jumlah perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah apabila Pemerintah Pusat mengakuinya dan menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK);

Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Apabila pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbulnya hak untuk menagih (piutang) kepada Pemerintah Pusat. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d) Piutang Transfer Lainnya;

Selain Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK, pemerintah Pusat dapat mengeluarkan kebijakan transfer lain, misalnya Dana Penyesuaian. Terdapat dua kemungkinan cara penyaluran untuk transfer lainnya, yaitu pertama, pencairannya bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan dan kedua, pencairannya bertahap dengan persyaratan tertentu. Apabila penyaluran tidak memerlukan persyaratan dan sampai dengan akhir tahun anggaran, Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi piutang bagi pemerintah daerah. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, maka timbulnya piutang pada saat persyaratan sudah dipenuhi tetapi pembayarannya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

e) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Jumlah nilai definitif yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitive telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah

yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang bagi pemerintah daerah.

- 14) Pengakuan untuk piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) tergantung dari penyelesaian kasusnya, yaitu sebagai berikut :
  - a) Apabila penyelesaian TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan, maka piutang diakui pada saat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) sudah diterbitkan.
  - b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh pengadilan.

#### **14. Akuntansi Persediaan;**

Persediaan diakui :

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar. apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian. biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Pencatatan Persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out) Perpetual. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

#### **15. Akuntansi Investasi;**

Pengeluaran kas dan/atau aset. penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah

dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas pelaporan perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas pelaporan akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan maka pengakuan menggunakan nilai estimasi yang layak.

#### **16. Akuntansi Aset Tetap;**

Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### **17. Akuntansi Kerugian Daerah;**

- 1) Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 2) Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari:
  - a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di

- neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
- b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan  
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
  - c. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.
- 4) Kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.
- 5) Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:
- a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas  
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
  - b. Pengakuan atas Piutang TGR  
Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang.
  - c. Pengakuan Beban  
Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
- 6) Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:
- a. Entitas yang mengalami kerugian daerah.
    - 1) Pengakuan Beban Non Operasional  
Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
    - 2) Pengakuan atas kekurangan aset  
Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangkan dari neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
  - b. Entitas Yang Berhak Menerima
    - 1) Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah  
Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
    - 2) Pengakuan Pendapatan LRA  
Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian Negara/daerah diakui pada saat diterima di Kas Negara/daerah.
    - 3) Pengakuan Pendapatan LO  
Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

- 7) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena adalah bendahara:
- a. Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
  - b. kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
  - c. kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.
- 8) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :
- a. Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
  - b. Kerugian daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.
- 9) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian karena putusan pengadilan sebagai berikut:
- a. Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
  - b. Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
  - c. Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas daerah.

## **18. Akuntansi Aset Tidak Berwujud**

1. Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
2. Definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

### **a. Dapat Diidentifikasi**

Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat diidentifikasi. Yang dimaksud



dengan kriteria ini adalah:

- 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.
- 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

#### **b. Pengendalian**

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

#### **c. Manfaat Ekonomi Masa Depan**

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services) di masa depan.

#### **Aset tak berwujud diakui pada saat:**

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

#### **Pengeluaran Setelah Perolehan**

3. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah aset tak berwujud adalah tidak adanya penambahan nilai aset tak berwujud dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian aset tak berwujud dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam aset tak berwujud dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tak berwujud. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu aset tak berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas.
4. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tak berwujud dimaksud.
5. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
  - a. Meningkatkan fungsi *software*;
  - b. Meningkatkan efisiensi *software*.

6. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
7. Aset tak berwujud disajikan sebesar:
  - a. Harga beli, termasuk biaya import, pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan untuk aset tak berwujud yang diperoleh dengan pembelian, kerjasama atau pengembangan internal;
  - b. Nilai wajar, apabila diperoleh dari pertukaran atau donasi/hibah.
  - c. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Metode amortisasi yang digunakan oleh pemerintah kota Cimahi adalah metode garis lurus, dilakukan setiap akhir periode dan masa manfaat sebagai berikut :

No	Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
1	Lisensi, franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya	Sesuai masa berlaku/ perjanjian yang ditetapkan pemberi hak seperti Ditjen HAKI dll.
2	Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 (lima) Tahun
3	Software Komputer	4 (empat) Tahun

8. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun perolehannya. Rumus amortisasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$$

- a. Amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- b. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

9. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill) tidak boleh diamortisasi. Nilai aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tak berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

#### **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD**

10. Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.
11. Penghapusan Aset tak berwujud harus diungkapkan dalam CaLK.

#### **19. Akuntansi Kewajiban;**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat laporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

#### **20. Koreksi Kesalahan. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;**

- 1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - (a) kesalahan yang tidak berulang;
  - (b) kesalahan yang berulang dan sistemik.
- 4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
  - (a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

(b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- 5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Restitusi pendapatan akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- 6) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- 7) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
- 9) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset dan akun ekuitas dana.
- 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
- 11) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana.
- 12) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **21. Laporan Keuangan Konsolidasian.**

- 1) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 3) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

## **BAB IV**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 273), sedangkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 273);

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto. Kode Rekening dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

##### **1. Pendapatan**

Pendapatan adalah peningkatan aset dan/atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran.

Pendapatan dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima dan diakui pada saat diterima Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun anggaran, pendapatan pada LRA diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer yaitu Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatanyang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Realisasi pendapatan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.520.135.560.503,11 atau mencapai 95,74% dari target anggaran yang telah ditetapkan tahun 2021 sebesar Rp1.587.835.737.002,00. Pencapaian target tercermin dari terlampauinya realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibandingkan anggarannya. Walaupun realisasi Pendapatan Transfer lebih kecil dibandingkan anggarannya.

## 2. Belanja

Belanja adalah penurunan aset dan/atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui dalam Tahun Anggaran berjalan dan pada akhir Tahun Anggaran.

Pengeluaran belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial;
- b. Belanja Modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya;
- c. Belanja Tak Terduga.

Realisasi belanja periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.481.512.704.849,00 atau mencapai 79,80% dari anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp1.856.578.149.343,00.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan pengembalian belanja) yang terjadi dalam Tahun Anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada Tahun Anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-lain Pendapatan yang Sah.

## 3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan Surplus Anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan kas yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran kas yaitu Pembayaran Pokok Utang. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.;
- c. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.;

Realisasi Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp270.042.508.966,53 atau 100,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp268.742.412.341,00. Penerimaan pembiayaan Rp270.898.017.186,53 atau 99,90% dari anggaran yang ditetapkan Rp271.172.220.678,00 terdiri dari dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp270.898.017.186,53. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.429.808.337,00 terdiri dari pembayaran pokok pinjaman ke Bank Dunia sebesar Rp855.508.220,00.

#### 4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp405.104.991.553,11 atau mencapai 116,87% dari target anggaran sebesar Rp346.622.143.134,00.

##### 4.1.1.1. Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp179.891.802.692,00 atau mencapai 117,74% dari target anggaran sebesar Rp152.786.878.291,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Hotel	219.703.500,00	283.417.966,00	129,00	422.665.698,00
Pajak Restoran	14.278.402.073,00	17.018.807.906,00	119,19	13.838.928.732,00
Pajak Hiburan	88.096.000,00	123.330.330,00	140,00	220.047.083,00
Pajak Reklame	1.748.195.268,00	2.326.007.100,00	133,05	2.502.161.350,00
Pajak Penerangan Jalan	34.709.763.147,00	37.701.852.705,00	108,62	37.334.153.409,00
Pajak Parkir.	620.000.000,00	937.097.932,00	151,14	645.221.004,00
Pajak Air tanah	6.360.000.000,00	8.237.134.116,00	129,51	8.620.538.880,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	52.500.391.242,00	57.303.314.555,00	109,15	53.858.343.870,00
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	42.262.327.061,00	55.960.840.082,00	132,41	41.495.177.873,00
<b>Jumlah</b>	<b>152.786.878.291,00</b>	<b>179.891.802.692,00</b>	<b>117,74</b>	<b>158.937.237.899,00</b>

##### 4.1.1.2. Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.548.482.640,00 atau mencapai 101,26% dari target anggaran sebesar Rp11.404.826.000,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	3.370.175.500,00	4.817.062.231,00	142,93	5.453.450.995,00
Retribusi Jasa Usaha	5.883.150.500,00	4.591.476.175,00	78,04	5.570.310.836,00
Retribusi Perijinan Tertentu	2.151.500.000,00	2.139.944.234,00	99,46	4.219.888.691,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.404.826.000,00</b>	<b>11.548.482.640,00</b>	<b>101,26</b>	<b>15.243.650.522,00</b>

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>11.404.826.000,00</b>	<b>11.548.482.640,00</b>	<b>101,26</b>	<b>15.243.650.522,00</b>
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.370.175.500,00</b>	<b>4.817.062.231,00</b>	<b>142,93</b>	<b>5.453.450.995,00</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	1.793.473.500,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000.000,00	1.562.133.900,00	104,14	1.309.268.700,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	115.500.000,00	181.345.000,00	157,01	119.085.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	550.000.000,00	683.644.000,00	124,30	444.189.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	-	895.585.000,00	-	879.072.450,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	520.000.000,00	588.309.040,00	113,14	543.932.260,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46	74.546.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	53.000.000,00	157.970.000,00	298,06	97.035.000,00
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	42.100.000,00	38.896.000,00	92,39	30.180.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	125.000.000,00	172.659.000,00	138,13	134.160.600,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	431.612.791,00	107,90	28.568.485,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>5.883.150.500,00</b>	<b>4.591.476.175,00</b>	<b>78,04</b>	<b>5.570.310.836,00</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.747.080.000,00	4.307.446.175,00	90,74	2.999.163.536,00
Retribusi Pasar Grosir	887.095.500,00	-	-	-
Retribusi Terminal	216.975.000,00	253.838.000,00	116,99	86.928.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	32.000.000,00	30.192.000,00	94,35	2.484.219.300,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2.151.500.000,00</b>	<b>2.139.944.234,00</b>	<b>99,46</b>	<b>4.219.888.691,00</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90	3.183.687.691,00
Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	1.500.000,00	3.600.000,00	240,00	4.200.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84	1.032.001.000,00

#### 4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.956.960.000,00 atau mencapai 100% dari target anggaran sebesar Rp9.956.960.000,00 terdiri dari :

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	9.956.960.000,00	9.956.960.000,00	100,00	9.778.080.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.956.960.000,00</b>	<b>9.956.960.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.778.080.000,00</b>



Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp9.956.960.000 tersebut merupakan bagian dividen atas laba tahun 2021 Pemerintah Kota Cimahi atas kepemilikan 104.000.000 lembar saham pada PT Bank BJB.

#### 4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp203.707.746.221,11 atau mencapai 118,11% dari target anggaran sebesar Rp172.473.478.843,00 terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	70.000.000,00	1.052.983.328,00	1.504,26	1.719.377.182,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	353.243.450,00	337.911.429,00	95,66	-
Jasa Giro	5.000.000.000,00	9.376.700.958,10	187,54	6.061.508.451,14
Pendapatan Bunga	-	307.719.834,01	-	287.203.040,32
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	110.459.167,00	2.507.325.531,00	2.269,91	23.181.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	-	561.000,00	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	184.126.021,00	92,06	144.273.512,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	21.159.546,00	1.426.540.148,00	6.741,83	2.093.540.349,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	14.520.600,00	23.470.807,00	161,64	43.239.321,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	49.593.947,00	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	315.613.979,00	-	1.941.191.919,00
Pendapatan Dari BLUD	166.704.096.080,00	188.095.771.759,00	112,83	163.071.117.561,45
Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	86.156.937,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	16.041.653.850,00
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	1.177.480,00	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	28.250.000,00	-	-
Pendapatan Denda Lain-lain	-	-	-	13.750.000,00
Dana Non Kapitasi	-	-	-	202.081.135,00
<b>Jumlah</b>	<b>172.473.478.843,00</b>	<b>203.707.746.221,11</b>	<b>118,11</b>	<b>191.728.274.257,91</b>

#### 4.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.053.096.467.719,00 atau 88,98% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp1.183.560.874.214,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
--------	--------------------	---------------------	---	---------------------

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	766.470.763.266,00	771.276.569.021,00	100,63	789.281.907.731,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	97.730.028.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	364.842.836.948,00	229.572.624.698,00	62,92	142.885.541.924,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.183.560.874.214,00</b>	<b>1.053.096.467.719,00</b>	<b>88,98</b>	<b>1.029.897.477.655,00</b>

#### 4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp771.276.569.021,00 atau 100,63% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp766.470.763.266,00.

##### 4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp61.309.116.578,00 atau 100,97% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp60.721.010.363,00 terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.171.640.448,00	7.497.770.028,00	121,49	3.633.582.139,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	6.039.776.294,00	6.039.776.294,00	100,00	42.517.164.195,00
DBH PPh Pasal 21	43.253.101.848,00	42.346.269.883,00	97,90	
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.256.491.773,00	5.425.300.373,00	103,21	4.310.127.364,00
<b>Jumlah</b>	<b>60.721.010.363,00</b>	<b>61.309.116.578,00</b>	<b>100,97</b>	<b>50.460.873.698,00</b>

##### 4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.781.705.502,00 atau 151,31% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp31.578.902.903,00 terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.358.469.000,00	3.490.313.900,00	103,93	5.198.363.984,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	179.344.000,00	192.486.100,00	107,33	4.779.508.956,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	801.488.018,00	801.488.018,00	100,00	600.301.979,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	103.708.525,00	151.713.993,00	146,29	62.729.843,00
DBH Sumber Daya	1.287.505.980,00	1.674.500.150,00	130,06	788.276.289,00

Alam (SDA) Perikanan				
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	25.848.387.380,00	41.471.203.341,00	160,44	27.216.795.079,00
<b>Jumlah</b>	<b>31.578.902.903,00</b>	<b>47.781.705.502,00</b>	<b>151,31</b>	<b>38.645.976.130,00</b>

#### 4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp530.425.978.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp530.425.978.000,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	530.425.978.000,00	530.425.978.000,00	100,00	539.717.972.000,00

#### 4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp131.759.768.941,00 atau 91,66% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp143.744.872.000,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	37.033.421.000,00	31.966.257.254,00	86,32	45.170.237.820,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	106.711.451.000,00	99.793.511.687,00	93,52	115.286.848.083,00
<b>Jumlah</b>	<b>143.744.872.000,00</b>	<b>131.759.768.941,00</b>	<b>91,66</b>	<b>160.457.085.903,00</b>

#### 4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

##### 4.1.2.2.1. Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp52.247.274.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp52.47.274.000,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Insentif daerah (DID)	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	97.730.028.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.247.274.000,00</b>	<b>52.247.274.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97.730.028.000,00</b>

#### 4.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp229.572.624.698,00 atau 62,92% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp364.842.836.948,00 terdiri dari:

##### 4.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp123.865.281.737,00 atau 96,75% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp128.032.319.484,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	48.482.420.940,00	47.304.226.200,00	97,57	45.562.232.850,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.564.409.050,00	22.198.195.050,00	72,63	18.951.688.350,00
Bagi Hasil dr Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.455.483.720,00	29.470.331.948,00	131,24	28.250.472.845,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	376.953.500,00	215.330.600,00	57,12	131.610.400,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	26.153.052.274,00	24.677.197.939,00	94,36	26.067.386.452,00
<b>Jumlah</b>	<b>128.032.319.484,00</b>	<b>123.865.281.737,00</b>	<b>96,75</b>	<b>118.963.390.897,00</b>

#### 4.1.2.3.2. Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp105.707.342.961,00 atau 44,64% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp236.810.517.464,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	-	9.676.657.020,00	-	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	236.810.517.464,00	96.030.685.941,00	40,55	-
Bantuan Dari Provinsi Jawa Barat	-	-	-	23.922.151.027,00
<b>Jumlah</b>	<b>236.810.517.464,00</b>	<b>105.707.342.961,00</b>	<b>44,64</b>	<b>23.922.151.027,00</b>

#### 4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp61.934.101.231,00 atau tercapai 107,43% dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp57.652.719.654,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat :		6.700.327.000,00		140.839.566,00
<i>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</i>		6.700.327.000,00		-
<i>Pendapatan Bunga Dana BOS</i>		-		140.839.566,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68	52.270.900.000,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah		71.950.231,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>57.652.719.654,00</b>	<b>61.934.101.231,00</b>	<b>107,43</b>	<b>52.411.739.566,00</b>

#### 4.1.4. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.221.658.713.620,00 atau mencapai 86,83% dari anggarannya sebesar Rp1.406.945.786.943,00 terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pegawai	723.673.114.458,00	643.977.236.028,00	88,99	636.883.229.738,00
Belanja Barang	657.581.777.697,00	555.391.457.278,00	84,46	456.337.905.380,02
Belanja Bunga	600.000.000,00	308.874.114,00	51,48	781.441.813,09
Belanja Subsidi	507.144.000,00	410.574.000,00	80,96	-
Belanja Hibah	20.953.726.450,00	18.999.042.200,00	90,67	13.856.011.450,00
Belanja Bantuan Sosial	3.630.024.338,00	2.571.530.000,00	70,84	2.864.475.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.406.945.786.943,00</b>	<b>1.221.658.713.620,00</b>	<b>86,83</b>	<b>1.110.723.063.381,11</b>

##### 4.1.4.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp643.977.236.028,00 atau mencapai 88,99% dari anggarannya sebesar Rp723.673.114.458,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 52,71% terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	321.601.606.396,00	287.338.317.514,00	89,35	389.095.253.926,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	195.515.418.721,00	174.975.041.742,00	89,49	137.970.734.500,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	115.281.747.638,00	98.614.718.280,00	85,54	-
Biaya Insentif Pemungutan Pajak	-	-	-	829.207.008,00
Tunjangan Transportasi ASN	-	-	-	8.794.000.000,00
Jasa Pelayanan	-	-	-	23.414.788.318,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Honorarium PNS	-	-	-	57.458.000,00
Jasa Medis	-	-	-	119.054.090,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	37.380.962.123,00	33.629.360.044,00	89,96	9.812.600.000,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.054.245.918,00	536.897.640,00	50,93	
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	605.520.000,00	60,97	
Honorarium Non PNS	-	-	-	2.845.950.000,00
Uang lembur	-	-	-	2.222.107.700,00
Belanja Pegawai BLUD	51.846.013.662,00	48.277.380.808,00	93,12	61.156.411.196,00
Belanja Pegawai BOS	-	-	-	565.665.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>723.673.114.458,00</b>	<b>643.977.236.028,00</b>	<b>88,99</b>	<b>636.883.229.738,00</b>

#### 4.1.4.2. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membeli barang dan jasa serta untuk membayar biaya pemeliharaan aset-aset Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Belanja Barang adalah untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Barang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp555.391.457.278,00 atau 84,46% dari anggarannya sebesar Rp657.581.777.697,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 45,46%, terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
<b>Belanja Barang</b>				
Belanja Bahan Pakai Habis	121.507.353.554,00	101.499.483.027,00	83,53	39.673.852.254,00
Belanja Bahan/Material				9.076.289.994,00
Belanja Cetak dan Penggandaan				7.257.472.876,00
Belanja Makanan dan Minuman				13.035.270.030,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				527.160.000,00
Belanja Pakaian Kerja				467.775.350,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu				500.096.000,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Kantor/Rumah Tangga/Lapangan				1.405.783.356,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	47.160.000,00	47.160.000,00	100,00	-
<b>Belanja Jasa</b>				
Belanja Jasa Kantor	200.913.196.435,00	171.986.735.688,00	85,60	18.256.493.415,00
Belanja Penyedia Jasa/Barang				14.245.136.790,00
Belanja Penyedia Kesehatan				27.552.000,00
Belanja Bantuan Sosial				2.838.585.496,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Penceramah				8.447.458.524,00
Belanja Jasa Tenaga Pendukung				71.466.004.895,00
Belanja Jasa Peserta Kegiatan				16.163.037.300,00
Belanja Premi Asuransi	41.669.911.224,00	30.507.042.985,00	73,21	30.859.569.714,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				4.789.631.628,00
Belanja Sewa Tanah	1.682.721.038,00	1.289.551.963,00	76,63	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.551.051.200,00	2.209.706.263,00	62,23	-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas				175.843.000,00
Belanja Sewa Alat Berat				99.396.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.715.912.847,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.214.754.000,00	4.314.242.000,00	82,73	3.379.130.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	141.920.600,00	33.950.000,00	23,92	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.643.459.904,00	17.552.242.206,00	77,52	3.622.107.640,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.414.307.300,00	4.320.851.128,00	79,80	
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	60.000.000,00	57.000.000,00	95,00	128.250.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.168.152.000,00	1.854.950.764,00	85,55	1.546.130.000,00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>				

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pemeliharaan	39.986.870.874,00	36.408.345.721,00	91,05	6.675.850.679,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				
Belanja Perjalanan Dinas	30.248.007.000,00	21.680.937.291,00	71,68	33.524.690.986,00
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak</b>				
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.299.212.243,00	8.019.579.973,00	86,24	6.845.950.000
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga				6.439.664.750,00
Belanja Aset Tetap untuk Diserahkan				21.974.218.610,00
<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>				
Belanja Barang Dana BOS	49.375.209.843,00	47.607.938.129,00	96,42	44.363.875.087,00
<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	123.658.490.482,00	106.001.740.140,00	85,72	86.809.716.159,02
<b>Jumlah</b>	<b>657.581.777.697,00</b>	<b>555.391.457.278,00</b>	<b>84,46</b>	<b>456.337.905.380,02</b>

#### 4.1.4.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Realisasi Belanja Bunga periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp308.874.114,00 atau 51,48% dari anggarannya sebesar Rp600.000.000,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0,03% terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	600.000.000	308.874.114,00	51,48	781.441.813,09
- JT s.d maret		161.298.946,00	-	217.334.735,00
- JT s.d September		147.575.168,00	-	201.412.775,00
- RSUD		-	-	362.694.303,09
<b>Bunga Utang Pinjaman</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>308.874.114,00</b>	<b>51,48</b>	<b>781.441.813,09</b>

Belanja Bunga adalah pembayaran bunga atas Pembayaran bunga atas pinjaman ke Pemerintah Pusat sebesar Rp308.874.114,00 terdiri dari jatuh tempo bulan Maret 2021 Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007 sebesar Rp161.298.946,00, jatuh tempo bulan September 2021 Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007 sebesar Rp147.575.168,00.



#### 4.1.4.4. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Subsidi	507.144.000,00	410.574.000,00	80,96	-
<b>Jumlah</b>	<b>507.144.000,00</b>	<b>410.574.000,00</b>	<b>80,96</b>	<b>-</b>

#### 4.1.4.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi, dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Belanja Hibah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.999.042.200,00 atau 90,67% dari anggarannya sebesar Rp20.953.726.450,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 1,56% terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	1.005.000.000,00	998.887.000,00	99,39	-
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	18.402.400.000,00	16.453.828.750,00	89,41	13.856.011.450,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.546.326.450,00	1.546.326.450,00	100	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.953.726.450,00</b>	<b>18.999.042.200,00</b>	<b>90,67</b>	<b>13.856.011.450,00</b>

Rincian Penerima Hibah dapat dilihat di **lampiran 1**.

#### 4.1.4.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.571.530.000,00 atau 70,84% dari anggarannya sebesar Rp3.630.024.338,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0,21% terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.378.320.000,00	1.369.990.000,00	57,60	2.864.475.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.251.704.338,00	1.201.540.000,00	95,99	
<b>Jumlah</b>	<b>3.630.024.338,00</b>	<b>2.571.530.000,00</b>	<b>70,84</b>	<b>2.864.475.000,00</b>

Rincian Penerima Bantuan Sosial dapat dilihat di **lampiran 1**.

#### 4.1.5. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp247.060.564.786,00 atau mencapai 58,03% dari anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp425.752.276.510,00 terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tanah	8.724.964.740,00	1.924.413.918,00	22,06	24.237.283.327,00
Belanja Peralatan dan Mesin	52.272.761.644,00	40.367.666.054,00	77,23	36.574.433.534,00
Belanja Gedung dan Bangunan	228.846.712.178,00	92.323.402.639,00	40,34	19.768.621.392,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	132.999.455.842,00	109.597.606.795,00	82,40	13.598.490.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.908.382.106,00	2.847.475.380,00	97,91	3.065.785.548,00
<b>Jumlah</b>	<b>425.752.276.510,00</b>	<b>247.060.564.786,00</b>	<b>58,03</b>	<b>97.244.613.801,00</b>

#### 4.1.6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021 sebesar Rp12.793.426.443,00 atau mencapai 53,57% dari anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp23.880.085.890,00.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tak Terduga	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	53,57	74.352.158.320,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.880.085.890,00</b>	<b>12.793.426.443,00</b>	<b>53,57</b>	<b>74.352.158.320,00</b>

Belanja tidak terduga sebesar Rp12.793.426.443,00 merupakan Belanja yang digunakan untuk percepatan penanganan Covid 19 sebesar Rp12.793.426.443,00 yang terdiri dari Penanganan Kesehatan sebesar Rp4.414.316.671,00 dan Belanja Bantuan dan Distribusinya Rp8.379.109.772,00. Rincian Penggunaan BTT untuk adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Kesehatan (Rp)	Bantuan & Distribusi (Rp)	Total (Rp)
1	Dinas Kesehatan	342.970.546,00		342.970.546,00
2	RSU Daerah Cibabat	4.071.346.125,00		4.071.346.125,00
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		125.522.000,00	125.522.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		959.013.032,00	959.013.032,00

No	SKPD	Kesehatan (Rp)	Bantuan & Distribusi (Rp)	Total (Rp)
5	Dinas Sosial P2KBP3A		5.481.792.000,00	5.481.792.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		589.412.440,00	589.412.440,00
7	Dinas Perhubungan		365.031.000,00	365.031.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan		118.079.500,00	118.079.500,00
9	Kecamatan Cimahi Utara		206.322.800,00	206.322.800,00
10	Kecamatan Cimahi Tengah		286.796.700,00	286.796.700,00
11	Kecamatan Cimahi Selatan		247.140.300,00	247.140.300,00
	<b>Total</b>	<b>4.414.316.671,00</b>	<b>8.379.109.772,00</b>	<b>12.793.426.443,00</b>

#### 4.1.7. Surplus/(Defisit)

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2021, dianggarkan terjadi defisit sebesar Rp268.742.412.341,00 sedangkan realisasinya mengalami Surplus sebesar Rp38.622.855.654,11.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Surplus/(Defisit)	(268.742.412.341,00)	38.622.855.654,11	14,37	175.676.624.397,80

#### 4.1.8. Pembiayaan

##### 4.1.8.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp270.898.017.186,53 yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu Rp270.898.017.186,53 atau 99,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp271.172.220.677,53. Di dalam penerimaan pembiayaan sebesar Rp270.898.017.186,53 terdapat koreksi penggunaan SiLPA Tahun-Tahun sebelumnya sebesar Rp274.203.491,00.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Penggunaan SiLPA	271.172.220.677,53	270.898.017.186,53	99,90	121.693.751.477,73
Penerimaan Dana Talangan RSUD dari Bank Mandiri	-	-	-	8.548.192.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>271.172.220.677,53</b>	<b>270.898.017.186,53</b>	<b>99,90</b>	<b>130.241.943.877,73</b>

##### 4.1.8.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.429.808.337,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Penyertaan Modal Pemda		-	-	-

Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	34.746.347.598,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.429.808.337,00</b>	<b>855.508.220,00</b>	<b>35,21</b>	<b>34.746.347.598,00</b>

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp855.508.220,00 yaitu dari pembayaran tagihan pokok atas pinjaman daerah sebesar Rp855.508.220,00 .

#### 4.1.9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan, belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja (surplus/defisit) dengan penerimaan/pengeluaran pembiayaan (pembiayaan netto) selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA TA 2021 yaitu sebesar Rp308.665.364.620,64 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020(Rp)
<b>Realisasi Pendapatan</b>		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	405.104.991.553,11	375.687.242.678,91
Pendapatan Transfer	1.053.096.467.719,00	1.029.897.477.655,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	61.934.101.231,00	52.411.739.566,00
<b>Jumlah Pendapatan (a)</b>	<b>1.520.135.560.503,11</b>	<b>1.457.996.459.899,91</b>
<b>Realisasi Belanja</b>		
Belanja Operasi	1.221.658.713.620,00	1.110.723.063.381,11
Belanja Modal	247.060.564.786,00	97.244.613.801,00
Belanja Tak Terduga	12.793.426.443,00	74.352.158.320,00
<b>Jumlah Belanja (b)</b>	<b>1.481.512.704.849,00</b>	<b>1.282.319.835.502,11</b>
<b>Surplus / (Defisit) (I)</b>	<b>38.622.855.654,11</b>	<b>175.676.624.397,80</b>
<b>Realisasi Pembiayaan</b>		
Penerimaan Pembiayaan	270.898.017.186,53	130.241.943.877,73
Pengeluaran Pembiayaan	855.508.220,00	34.746.347.598,00
<b>Pembiayaan Netto (II)</b>	<b>270.042.508.966,53</b>	<b>95.495.596.279,73</b>
<b>SiLPA Tahun 2021 (I) + (II)</b>	<b>308.665.364.620,64</b>	<b>271.172.220.677,53</b>

Didalam Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp270,898,017,186,53 terdapat koreksi Penggunaan SiLPA Tahun-Tahun sebelumnya sebesar Rp274.203.491,00 yang terdiri dari lebih bayar PFK BPKAD Rp6.812.150,52 lebih bayar PFK Sekretariat Daerah Rp26.204.303,00 lebih bayar PFK Kelurahan Cibabat Cimahi Utara Rp98.606,00 dan lebih bayar PFK Dinas Pendidikan Rp6.050,00.

#### 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 sebesar Rp308.665.364.620,64 didapat dari perhitungan Saldo anggaran lebih awal tahun 2021 sebesar Rp270,898,017,186,53 ditambah dengan saldo anggaran lebih tahun berjalan sebesar Rp308.665.364.620,64. Surplus tahun berjalan diperoleh dari kenaikan dan penurunan kas hasil perhitungan dari kas bersih aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan aktivitas transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih Awal	270.898.017.186,53
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	284.630.437.112,11

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(246.007.581.458,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(855.508.220,00)
Surplus/kenaikan SAL TA 2020	37.767.347.434,11
Saldo Anggaran Lebih	308.665.364.620,64

### 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

#### 4.3.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah saldo uang tunai dan simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD). Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
Kas di Kas Daerah	261.726.825.185,51	252.983.054.384,92

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 tersebut terdiri dari:

No	No. Rek.	Bank	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	0230270000025	BJB	240.615.550.149,00	232.747.645.321,52
2	00091.01.30.000230.1	BTN	13.194.835.071,97	12.612.394.605,64
3	7233333551	BSM	7.303.169.762,23	6.995.449.928,22
4	7233333446	BSM	613.270.202,31	594.434.012,94
5	1300088005007	MANDIRI	-	33.130.516,60
<b>Jumlah</b>			<b>261.726.825.185,51</b>	<b>252.983.054.384,92</b>

Dari Kas di Kas Daerah tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Kas di Kas Daerah pada Bank BJB merupakan rekening yang dikelola oleh BUD yang digunakan untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Saldo Kas Daerah pada Bank BJB adalah sebesar Rp240.615.550.149,00 . Di dalam Kas di Kas daerah tersebut terdapat koreksi sebesar 0,14 karena pembulatan Transaksi di Bank Jabar Banten;
- b. Kas di Kas Daerah pada Bank BTN sebesar Rp13.194.835,017,97 adalah rekening Giro Nomor : 0009101300002301 digunakan sebagai rekening penerimaan pajak;
- c. Kas di Kas Daerah pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp7.303.169.762,23 adalah saldo rekening Tabungan Mudharabah Nomor : 7233333551. Kas tersebut tidak digunakan untuk operasional namun sebagai rekening penerimaan bunga dan pencairan deposito bulanan Pemerintah Kota Cimahi;
- d. Kas di Kas Daerah pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp613.270.202,31 adalah saldo rekening Giro Wadiah Nomor : 7233333446. Kas tersebut digunakan sebagai rekening penerimaan pajak;
- e. Pemerintah Kota Cimahi tidak mengeluarkan bilyet giro untuk memindahbukukan uang dari rekening Kas Daerah kepada rekening pihak yang menerima, tetapi menggunakan SP2D sebagai alat pembayaran;

f. Di dalam Kas di Kas Daerah pada Bank BJB terdapat juga sisa Dana Transfer (Earmark) Per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.007.688.436,00 yang terdiri dari :

1.	BOP PAUD	1.418.718.470
2.	BOP Kesetaraan	359.259.756
3.	Tunjangan Profesi Guru	5.597.346.180
4.	Tambahan Penghasilan Guru	966.200.000
5.	BO Kesehatan Reguler	6.217.827.117
6.	BO Kesehatan Tambahan	971.978.164
7.	BOKB	986.920.000
8.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	126.075.500
9.	Administrasi Kependudukan	148.698.800
10.	Dana Pelayanan Kepariwisata	13.710.200
11.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	94.130.500
11.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.800.000
12.	DID	8.953.277.528
13.	DAK Fisik Bidang Pendidikan	31.417.355
14.	DAK Fisik Bidang Kesehatan	1.988.133.275
15.	DAK Fisik Bidang Jalan	14.818.591
16.	DAK Fisik Bidang Sanitasi	65.110.000
17.	DAK Fisik Bidang Irigasi	42.267.000

#### 4.3.2. Kas di RSUD Cibabat

Kas di RSUD Cibabat merupakan saldo kas di rekening RSUD Cibabat yang merupakan hasil dari kegiatan operasional RSUD dan dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional RSUD Cibabat, dan Saldo Giro Rupiah IDR-Gov. Saldo Kas di RSUD Cibabat per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Kas di RSUD Cibabat	40.989.619.473,61	12.624.391.630,61

Saldo Kas di RSUD Cibabat yang berada pada rekening nomor 00230030000609 a.n. RSUD Cibabat pada Bank Jabar Banten berasal dari pendapatan operasional rumah sakit sebesar Rp40.989.619.473,61 dengan rincian sebagai berikut:

##### Penerimaan :

Pendapatan Operasional TA 2021	165.608.981.259,00
--------------------------------	--------------------

<b>Jumlah (a)</b>	165.608.981.259,00
-------------------	--------------------

##### Belanja :

TA 2021	137.243.753.416,00
---------	--------------------

Ambang Batas TA 2021	-
----------------------	---

<b>Jumlah (b)</b>	137.243.753.416,00
-------------------	--------------------

<b>Sisa Kas (c=a-b)</b>	<b>28.365.227.843,00</b>
-------------------------	--------------------------

<b>Pembiayaan</b>	-
Saldo Tahun Lalu (d)	12.624.391.630,61
<b>Total Kas di RSUD Cibabat TA 2021 (e=c+d)</b>	<b>40.989.619.473,61</b>

#### 4.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo seluruh kas tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dinas Pendidikan	6.050,00	-
Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan	140.400,00	-
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	115.661.521,00	-
Sekretariat Daerah	26.204.303,00	-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.812.150,52	-
Kecamatan Cimahi Utara	98.606,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>148.923.030,52</b>	-

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga sebesar Rp115.661.521,00 merupakan pengembalian dana hibah KONI yang dikembalikan di Tahun 2022. Sedangkan Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan terdapat saldo sebesar 140.400,00 yang merupakan pengembalian Tahun 2021 yang dikembalikan Tahun 2022. Selain itu, juga terdapat saldo atas lebih bayar PFK yang belum dikembalikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.050,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp26.204.303,00, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.812.150,52 dan Kecamatan Cimahi Utara sebesar Rp98.606,00.

#### 4.3.4. Kas di Bendaharan Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo seluruh kas tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.044,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	650.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>659.044,00</b>	-

Saldo Kas Rp9.044,00 merupakan saldo bunga giro rekening dana bos yang tidak terauto debet oleh Bank BJB.

#### 4.3.5. Kas di BLUD Air Minum

Kas di BLUD Air Minum merupakan saldo kas di rekening BLUD Air Minum yang merupakan hasil dari kegiatan operasional BLUD Air Minum dan dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional BLUD Air Minum. Saldo Kas di BLUD Air Minum per 31 Desember 2021 adalah sebesar:

<b>Penerimaan :</b>		
Pendapatan Operasional TA 2021	4.452.657.600,00	
<b>Jumlah (a)</b>	4.452.657.600,00	
<b>Belanja :</b>		
TA 2021	3.787.176.145,00	
<b>Jumlah (b)</b>		<b>3.787.176.145,00</b>
<b>Sisa Kas (c=a-b)</b>		<b>665.481.455,00</b>
Saldo Tahun Lalu (d)		195.990.640,00
<b>Total Kas di BLUD Air Minum TA 2021 (e=c+d)</b>		<b>861.472.095,00</b>

#### 4.3.6. Kas di Bendahara BLUD Puskesmas

Kas di Bendahara BLUD Puskesmas merupakan saldo kas di rekening FKTP (Puskesmas) Kota Cimahi pada Bank bjb yang berasal dari Badan Penyelenggara Jasa Kesehatan (BPJS) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Saldo kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
<b>Kas di Bendahara BLUD Puskesmas</b>	<b>3.174.447.354,00</b>	<b>2.573.771.153,00</b>

No.	Nomor Rekening	BLUD Puskesmas	2021	2020
1	0059469843001	Bend Dana Kapitasi Cibeureum	328.239.378,00	258.468.761,00
2	0059470388001	Bend Dana Kapitasi Leuwigajah	92.173.325,00	142.618.793,00
3	0059474278001	Bend Dana Kapitasi Cigugur	256.566.295,00	283.181.378,00
4	0059475851001	Bend Dana Kapitasi Pasirkaliki	83.242.045,00	83.135.701,00
5	0059478494001	Bend Dana Kapitasi Cipageran	439.412.244,00	281.093.148,00
6	0059478117001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Tengah	359.767.797,00	196.875.180,00
7	0059478249001	Bend Dana Kapitasi Padasuka	422.289.259,00	216.368.098,00
8	0059479938001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Utara	389.933.703,00	582.414.981,00
9	0059490974001	Bend Dana Kapitasi Cibeber	237.303.220,00	147.571.267,00
10	0059535862001	Bend Dana Kapitasi Melong Tengah	101.143.217,00	34.345.487,00
11	0059547607001	Bend Dana Kapitasi Citeureup	99.553.496,00	76.458.909,00
12	0059547879001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Selatan	177.893.032,00	134.831.986,00
13	0059574868001	Bend Dana Kapitasi Melong Asih	186.930.343,00	136.407.464,00
<b>Jumlah</b>			<b>3.174.447.354,00</b>	<b>2.573.771.153,00</b>

#### 4.3.7. Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

*Pemerintah Daerah Kota Cimahi*



Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan Sisa dari Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBN yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2021.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
<b>Kas Dana BOS</b>	<b>1.763.418.438,00</b>	<b>2.490.895.654,00</b>
<b>Rincian sebagai berikut :</b>		
<b>Pendapatan (a)</b>		
Penerimaan Dana Bos TA 2021	55.161.824.000,00	52.270.900.000,00
<b>Belanja (b)</b>		
Pengeluaran Dana Bos TA 2021	55.889.301.216,00	51.021.575.394,00
Pengembalian Dana BOS		
Sisa Kas (c=a-b)	(727.477.216,00)	1.249.324.606,00
Pajak Yang belum Di setor (d)		
Pajak Yang Sudah Di setor (e)		
Saldo Tahun Lalu(f)	2.490.895.654,00	1.241.571.048,00
<b>Total Kas Dana BOS TA 2021 (g=d+e+f)</b>	<b>1.763.418.438,00</b>	<b>2.490.895.654,00</b>

#### 4.3.8. Kas Lainnya

Kas Lainnya terdiri dari kas pada Rekening UPTD Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kas pada Rekening UPTD Rusunawa penerimaannya berasal dari jaminan dan/atau bunga uang keluar atas pencairan penghuni yang telah keluar. Selain Kas pada Rekening UPTD Rusunawa, juga terdapat keterlambatan pembayaran pajak (PFK) Dana BOS Tahun 2021 dari 8 Sekolah Dasar Negeri.

No.	SOPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	542.857.960,00	519.795.486,00
2	Setoran PFK - Dana Bos	47.935.751,00	40.349.191,00
<b>Jumlah</b>		<b>590.793.711,00</b>	<b>560.144.677,00</b>

#### 4.3.9. Piutang Pajak

Pajak merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas pajak daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan dalam tahun berjalan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak (WP). Saldo piutang pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang Pajak	128.892.710.993,00	198.458.610.887,00

Piutang pajak daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp128.892.710.993,00 tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2021, terdiri dari:

No.	Jenis Pajak	2021	2020
-----	-------------	------	------

No.	Jenis Pajak	2021	2020
1	Pajak Hotel	19.580.880,00	1.150.000,00
2	Pajak Restoran	40.929.897,00	11.260.236,00
3	Pajak Reklame	916.986.235,00	700.293.335,00
4	Pajak Hiburan dan Tontonan	-	90.000,00
2	Pajak Penerangan Jalan PLN	-	3.066.502.695,00
3	Pajak Parkir	433.000,00	856.200,00
3	Pajak Air Tanah	886.660.956,00	650.988.401,00,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan	127.028.120.025,00	194.027.470.020,00
	<b>Jumlah</b>	<b>128.892.710.993,00</b>	<b>198.458.610.887,00</b>

Saldo piutang pajak sebesar Rp128.892.710.993,00 tersebut berasal dari mutasi piutang pajak selama tahun 2020 yang meliputi:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	<b>198.458.610.887,00</b>
2	Koreksi Penghapusan Piutang PBB sesuai SK Wali Kota 973/Kep,456-BAPPENDA/2021 tanggal 12 Maret 2021	<b>(91.036.314.611,00)</b>
3	Ketetapan dan Catatan Tunggal atas Pembayaran Piutang PBB yang dihapuskan atas Piutang sebelum Tahun 2021	<b>865.007.026,00</b>
4	<b>Penambahan:</b>	
3	Penetapan SKPD tahun 2021	200.497.210.383,00
5	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b><u>200.497.210.383,00</u></b>
6	<b>Pengurangan:</b>	
7	Pembayaran tahun 2021	179.891.802.692,00
8	<b>Jumlah Pengurangan ( 6 + 7 )</b>	<b><u>179.891.802.692,00</u></b>
9	<b>Saldo Piutang per 31 Desember 2020 ( 9 = 1 + 4 – 8 )</b>	<b>128.892.710.993,00</b>

Rincian mutasi dapat dilihat pada lampiran 2.

Saldo piutang pajak tersebut belum termasuk potensi denda pajak yang belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yaitu sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Piutang	Potensi Denda Pajak per 31 Desember 2021 (Rp)
Pajak Reklame	251.490.093,00
Pajak Air Tanah	236.106.755,00
Pajak Bumi dan Bangunan	44.367.096.483,00
<b>Jumlah</b>	<b>44.854.693.331,00</b>

#### 4.3.10. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak merupakan taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat tertagih dalam periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 adalah:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak	46.745.285.110,18	135.641.054.045,82

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak dilakukan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 besar (Rp46.745.285.110,18) dengan rincian:

Piutang	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2020 (Rp)
Pajak Hotel	97.904,40	5.750,00
Pajak Restoran	204.649,49	56.301,18
Pajak Reklame	157.981.948,00	155.123.000,00
Pajak Hiburan dan Tontonan	-	450,00
Pajak Penerangan Jalan	-	15.332.513,48
Pajak Parkir	18.866,00	4.281,00
Pajak Air Tanah	206.535.379,83	194.201.253,22
Pajak Bumi dan Bangunan	46.380.446.362,47	135.276.330.496,95
<b>Jumlah</b>	<b>46.745.285.110,18</b>	<b>135.641.054.045,82</b>

Rincian mutasi dapat dilihat pada **lampiran 3**.

#### 4.3.11. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas retribusi daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dalam tahun berjalan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Retribusi (WR). Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang Retribusi	2.271.651.667,00	3.264.415.784,00

Piutang retribusi tersebut terdiri dari:

No.	Jenis Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang retribusi Ijin Gangguan/Keramaian (HO)	51.898.211,00	51.898.211,00
2	Piutang retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	105.001.074,00	593.626.830,00
3	Piutang retribusi Ijin Trayek	2.900.000,00	3.200.000,00
4	Piutang retribusi Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00
5	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	86.411.700,00	36.199.500,00
6	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	1.992.752.682,00	1.247.172.932,00
7	Piutang Retribusi Air Minum	-	1.125.080.600,00
8	Piutang Retribusi UPTD Laboratorium Lingkungan	31.548.000,00	33.889.500,00
9	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	-	172.208.211,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.271.651.667,00</b>	<b>Rp3.264.415.784,00</b>

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 4**.

Saldo piutang retribusi sebesar Rp2.271.651.667,00 tersebut berasal dari mutasi piutang retribusi selama tahun 2021 yang meliputi:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Piutang per 31 Desember 2020	3.264.415.784,00
2	Koreksi : Pemindahan Piutang Retribusi Air Minum	(1.125.080.600,00)

	menjadi Piutang Lainnya	
3	<b>Penambahan:</b>	
4	Penetapan SKRD tahun 2021	5.934.100.109,00
5	Koreksi	-
6	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>5.934.100.109,00</b>
7	<b>Pengurangan:</b>	
8	Pembayaran tahun 2021	5.801.783.626,00
9	Penghapusan (Koreksi)	
10	<b>Jumlah Pengurangan ( 7 + 8 )</b>	<b>5.801.783.626,00</b>
11	<b>Saldo Piutang per 31 Desember 2021 ( 10 = 1 + 5 – 9 )</b>	<b>2.271.651.667,00</b>

Rincian mutasi sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Saldo Awal Per 31 Desember 2020	Koreksi Perpindahan Piutang air Minum	Penambahan Piutang Tahun 2021	Pengurangan Piutang Tahun 2021	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	593.626.830,00		1.063.948.484,00	1.552.574.240,00	105.001.074,00
2	Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	51.898.211,00		-	-	51.898.211,00
3	Izin Trayek (IT)	3.200.000,00		3.300.000,00	3.600.000,00	2.900.000,00
4	Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00		-	-	1.140.000,00
5	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	36.199.500,00		691.814.425,00	641.602.225,00	86.411.700,00
6	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	1.247.172.932,00		3.585.109.700,00	2.839.529.950,00	1.992.752.682,00
7	Piutang Retribusi Air Minum	1.125.080.600,00	(1.125.080.600,00)	-	-	-
8	Laboratorium Lingkungan	33.889.500,00		589.927.500,00	592.269.000,00	31.548.000,00
9	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	172.208.211,00		-	172.208.211,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.264.415.784,00</b>	<b>(1.125.080.600,00)</b>	<b>5.934.100.109,00</b>	<b>5.801.783.626,00</b>	<b>2.271.651.667,00</b>

Pada Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah, terdapat potensi denda atas keterlambatan pembayaran sewa Rusunawa sebesar Rp. 19.803.725,00

#### 4.3.12. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan taksiran nilai Piutang Retribusi yang diperkirakan tidak dapat tertagih dalam periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi dilakukan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi. Penyisihan Piutang Retribusi Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.510.951.900,38 dengan rincian:

<b>Piutang</b>	<b>Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2020 (Rp)</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	102.404.149,00	140.680.640,05
Retribusi Izin Gangguan /Keramaian (IG)	51.898.211,00	51.898.211,00
Retribusi Izin Trayek(IT)	2.900.000,00	2.975.750,00
Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00
Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	35.289.205,88	4.667.580,00
Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	1.303.245.519,50	889.689.164,20
Retribusi Air Minum	-	576.492.253,50
Laboratorium Lingkungan	14.074.815,00	7.043.967,50
Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	-	17.220.821,10
<b>Jumlah</b>	<b>1.510.951.900,38</b>	<b>1.691.808.387,35</b>

Rincian dapat dilihat pada lampiran 4.

#### 4.3.13. Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat

Berdasarkan Saldo Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
Piutang Bagi Hasil	-	27.370.729.034,00

#### 4.3.14. Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas bagi hasil daerah yang dicatat berdasarkan jumlah nilai definitif yang menjadi bagian Kota Cimahi dan telah ditetapkan dengan peraturan atau surat keputusan tetapi masih ada hak yang masih harus diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.115-Bapenda/2022 atas kurang/Lebih Salur Bagi hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2021 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Saldo Piutang Bagi Hasil per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
Piutang Bagi Hasil	9.794.305.571,00	6.877.800.265,00

<b>No.</b>	<b>Jenis Bagi Hasil Pajak</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.624.406.060,00	2.034.635.940,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.467.319.800,00	875.641.020,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.696.305.912,00	2.430.275.470,00

No.	Jenis Bagi Hasil Pajak	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4	Pajak Air Permukaan	24.964.600,00	61.393.500,00
5	Pajak Rokok	2.981.309.199,00	1.475.854.335,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.794.305.571,00</b>	<b>6.877.800.265,00</b>

#### 4.3.15. Belanja Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka timbul karena pembayaran atas sewa/asuransi yang dilakukan pada tahun 2021 tetapi terdapat sisa periode/manfaat pada tahun 2020. Saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Belanja Dibayar di Muka	4.576.692.589,29	10.378.639.377,91

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.576.692.589,29 tersebut merupakan biaya dibayar di muka atas sewa penyimpanan barang, sewa gedung/kantor/tempat, sewa rumah jabatan/rumah dinas, sewa lahan, asuransi gedung, asuransi kerugian, asuransi kendaraan bermotor, dan belanja pemeliharaan server komputer. Rincian Biaya Dibayar di Muka dapat dilihat pada lampiran 5.

#### 4.3.16. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi atas kasus kerugian keuangan daerah karena kelalaian pegawai dan kehilangan aset yang telah jatuh tempo sampai dengan tahun 2021. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	217.551.668,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp217.551.668,00 tersebut berasal dari mutasi selama tahun 2021 yang meliputi:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Kerugian keuangan daerah	159.884.500,00	409.477.500,00
Kerugian kehilangan aset daerah	57.667.168,00	311.461.500,00
Kerugian -Kelebihan Pembayaran Ke Pihak Ketiga	-	1.421.357.111,35
<b>Jumlah</b>	<b>217.551.668,00</b>	<b>2.142.296.111,35</b>
Penerimaan pembayaran	-	1.737.463.456,00
Koreksi	-	187.280.987,35
<b>Saldo Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>217.551.668,00</b>	<b>217.551.668,00</b>
Saldo Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari :		
Bagian lancar	217.551.668,00	217.551.668,00
Bagian jangka panjang		
<b>Jumlah</b>	<b>217.551.668,00</b>	<b>217.551.668,00</b>

Koreksi atas Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan penyesuaian saldo atas kesalahan pencatatan tahun 2018 dan telah disesuaikan dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak.

Jangka waktu Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi yang telah terlewati sehingga nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Disisihkan yaitu sebesar Rp217.551.668,00

	<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	217.551.668,00

Rincian kasus tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada **lampiran 6**.

#### 4.3.17. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan saldo piutang atas hak Pemerintah Kota Cimahi yang bukan berasal dari pemungutan pajak daerah. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
Piutang Lainnya	9.567.340.661,47	5.426.999.986,32

Saldo piutang lainnya tersebut terdiri dari:

No	Jenis Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat	6.662.518.251,00	4.111.485.995,00
2	Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSUD Cibabat	197.129.997,09	325.629.997,09
3	Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru	224.137.525,00	224.137.525,00
4	Piutang Atas Kontribusi Cimahi Mall	391.208.333,20	282.020.374,00
5	Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga PUPR	396.455.379,55	483.726.095,23
6	Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga Disdik	89.463.875,63	-
7	Piutang BLUD Air Minum	1.582.507.300,00	-
8	Piutang BLUD Puskesmas	23.920.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>9.567.340.661,47</b>	<b>5.426.999.986,32</b>

Dari rincian Piutang Lainnya tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Piutang Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.662.518.251,00 merupakan hak penerimaan pembayaran dari perusahaan-perusahaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintah seperti BPJS yang telah melakukan kerjasama dengan RSUD Cibabat terkait dengan penyediaan jasa kesehatan atas pelayanan kesehatan dari RSUD Cibabat (rincian dapat dilihat pada **lampiran 7a**).
- b. Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSUD Cibabat sebesar Rp197.129.997,09 merupakan ganti rugi pihak ketiga atas temuan tahun 2020 pada RSUD Cibabat yang harus dibayarkan ke kas daerah.
- c. Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru per 31 Desember 2021 sebesar Rp224.137.525,00 merupakan kekurangan setor atas kontribusi pengelolaan Pasar Antri Baru yang didasarkan atas perjanjian pengelolaan Pasar Antri Baru beserta fasilitas penunjangnya antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bumi Kencana

Indah Nomor 180/09 Perj-/2004 dan telah mengalami perubahan melalui addendum pertama Nomor 180/18b-perj/2007 antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Cimahi Persada terdiri atas :

Jenis Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang pajak parkir	26.480.000,00	26.480.000,00
Piutang retribusi pelayanan parkir	183.509.525,00	183.509.525,00
Piutang retribusi sub terminal	14.148.000,00	14.148.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>224.137.525,00</b>	<b>224.137.525,00</b>

- d. Piutang atas Kontribusi Cimahi Mall, merupakan kontribusi dari Cimahi Mall selama Januari – Desember 2021 sebesar Rp391.208.333,20 yang terdiri dari Piutang Pokok Rp302.552.832,00 dan Piutang denda Rp88.655.501,20.
- e. Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga DPUPR sebesar Rp396.455.379,55 merupakan ganti rugi pihak ketiga atas temuan tahun 2021 pada DPUPR yang harus dibayarkan ke kas daerah.
- f. Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga DISDIK sebesar Rp89.463.875,63 merupakan ganti rugi pihak ketiga atas temuan tahun 2021 pada DISDIK yang harus dibayarkan ke kas daerah.
- g. Piutang BLUD Air Minum sebesar Rp1.582.507.300,00 merupakan Piutang Dari BLUD Air Minum yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (rincian dapat dilihat pada **lampiran 7b**).
- h. Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp23.920.000,00 merupakan Piutang atas Pendapatan Non Kapitasi pada Puskesmas Cimahi Selatan Rp5.325.000,00 dan Puskesmas Melong Tengah Rp18.595.000,00.

#### 4.3.18. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan taksiran saldo piutang atas hak Pemerintah Kota Cimahi yang bukan berasal dari pemungutan pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Piutang Lainnya	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2020 (Rp)
Piutang Pelayanan Kesehatan RSU Cibabat	671.030.309,52	131.783.689,75
Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSU Cibabat	197.129.997,09	325.629.997,09
Piutang atas pengelolaan Pasar Antri Baru	224.137.525,00	224.137.525,00
Piutang Atas Kontribusi Cimahi Mall	302.552.832,00	258.470.811,00
Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga DPUPR	1.982.276,89	2.418.630,48
Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga DISDIK	447.319,38	
Piutang BLUD Air Minum	901.445.411,00	
Piutang BLUD Puskesmas	119.600,00	



Piutang Lainnya	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2020 (Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>2.298.845.270,88</b>	<b>942.440.653,32</b>

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengatur bahwa penyisihan Piutang Lainnya dihitung berdasarkan progress dari keluarnya surat tagihan.

#### 4.3.19. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Cimahi dan barang-barang, termasuk hewan ternak dan tanaman yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020(Rp)
Persediaan	32.019.657.874,93	38.927.924.338,32

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.019.657.874,93 tersebut terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, alat listrik, bahan makanan, obat-obatan, bahan laboratorium, bahan radiologi, bahan baku bangunan, alat KB, suku cadang dan bahan material. Saldo persediaan tersebut diakui sebesar biaya perolehan yang terakhir, kecuali untuk persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Cibabat telah disajikan dengan metode FIFO. Saldo persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada setiap akhir Tahun Anggaran. Saldo persediaan sebesar per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.019.657.874,93 tersebut berada pada:

No	SOPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	187.389.597,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	9.548.695.953,58	9.185.437.470,61
3	Rsud Cibabat	11.721.606.703,80	15.755.632.819,71
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.475.067.000,00	7.077.491.000,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	236.724.165,00	341.184.384,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.744.260,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	735.731.307,00	630.939.081,00
8	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	271.174.665,56	334.569.731,00
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00
10	Dinas Pangan Dan Pertanian	722.590.459,00	591.687.763,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	493.088.160,00	251.562.590,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.261.693.160,89	2.185.554.570,00
13	Dinas Perhubungan	2.687.119.484,10	1.919.657.180,00

No	SOPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan	847.400,00	172.528.850,00
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	82.752.900,00	13.782.200,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	152.798.890,00	76.965.900,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.759.500,00	0,00
19	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	45.023.000,00	0,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	44.308.000,00
22	Sekretariat Daerah	331.766.639,00	332.691.800,00
23	Sekretariat DPRD	41.034.950,00	5.495.499,00
24	Inspektorat Kota	4.532.480,00	6.752.500,00
25	Kecamatan Cimahi Utara	0,00	0,00
26	Kecamatan Cimahi Tengah	0,00	0,00
27	Kecamatan Cimahi Selatan	0,00	0,00
28	Kantor Kesatuan Bangsa	517.200,00	1.683.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.019.657.874,93</b>	<b>38.927.924.338,32</b>

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 8**.

Rincian Persediaan Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan jenis Persediaannya, sebagai berikut:

No	Persediaan	2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	971.560.304,89	1.061.439.243,00
2	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.345.204.989,90	1.638.791.048,00
3	Persediaan Perangko, Materai dan Benda pos lainnya	5.850.000,00	1.089.000,00
4	Peralatan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.150.994.322,00	395.095.455,71
5	Peralatan Bahan Kebutuhan Medis	-	13.492.934.332,47
6	Persediaan Cinderamata	164.699.200,00	166.927.000,00
7	Persediaan Bahan baku bangunan	184.960.760,00	247.515.438,00
8	Persediaan bahan/bibit tanaman	72.808.794,00	-
9	Persediaan Bibit ternak	96.720.000,00	74.040.000,00
10	Persediaan Bahan obat-obatan	14.370.265.125,60	10.505.345.004,14
11	Persediaan Bahan kimia	5.697.930.807,48	273.505.116,00
12	Persediaan Bahan Makanan Pokok	157.695.444,40	109.966.806,00
13	Persediaan Bahan Pokok	74.545.356,00	76.435.114,50
14	Persediaan Barang Cetakan	4.821.711.600,56	2.330.544.804,50
15	Persediaan Barang Yang diserahkan	1.904.711.170,10	8.554.295.976,00

No	Persediaan	2021	2020
	kepada Pihak Ketiga		
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.019.657.874,93</b>	<b>38.927.924.338,32</b>

Dalam persediaan bibit ternak, terdapat benih pemberian yang dibudidayakan. Hasil dari budidaya benih tersebut dicatat terpisah oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

Dalam Persediaan Bahan Obat-obatan terdapat Barang Kadaluarsa yang ada pada Dinas kesehatan dan seluruh Puskesmas yang belum dikeluarkan dari Persediaan dikarenakan belum adanya Penghapusan sebesar Rp468.082.789,50.

Dalam Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat terdapat Belanja Aset Tetap yang diserahkan dan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Adapun Belanja Aset Tetap yang diserahkan antara lain Bangunan dan Gedung Rehabilitasi Rumah Dinas Kapolres, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kejari, Pembangunan Pujasera Lahan Parkir dan Taman pada Museum TNI, Pembangunan Penataan Interior Instansi Vertikal. Sedangkan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat antara lain Rehabilitasi Bangunan Kodim, Rehabilitasi Bangunan Pusdikpom dan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Kejari. Seluruh Persediaan tersebut belum dikeluarkan dari Persediaan karena belum adanya BAST Penyerahan Gedung dan Bangunan tersebut kepada Pihak Ke Tiga dengan Total nilai sebesar Rp3.475.067.000,00.

#### 4.3.20. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang akan disalurkan kepada kelompok pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Cimahi melalui penyediaan permodalan yang murah dan mudah. Jumlah bantuan yang diberikan bervariasi mulai Rp2.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00 per kelompok dengan jangka waktu maksimal pinjaman sebesar tiga tahun. Dana bergulir dikelola oleh Bagian Administrasi Perekonomian dengan membentuk sebuah Tim Dana Bergulir. Saldo dana bergulir per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dana Bergulir	50.591.536,00	48.909.062,00

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.591.536,00 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah pokok awal dana bergulir ditambah dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dikurangi dengan dana bergulir di masyarakat yang diragukan akan tertagih. Berdasarkan Laporan Tim Pengelolaan Pengawasan dan Monitoring Dana Bergulir dan laporan dari Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Pokok awal dana bergulir seluruhnya adalah sebesar Rp1.125.000.000,00 dan telah disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat sebesar Rp1.087.500.000,00 yang disalurkan berdasarkan dua cara :
  - 1) Penyaluran dengan nilai Rp125.000.000,00 disalurkan kepada kelompok usaha. Pada Tahap I diberikan kepada 9 (sembilan) kelompok usaha dengan dengan nilai penyaluran sebesar Rp100.500.000,00 dengan nilai pengembalian (*revolving*) Tahap I sebesar Rp31.500.000,00. Sisa penyaluran dana Tahap I sebesar

Rp24.500.000,00 dan pengembalian dari kelompok usaha sebesar Rp31.500.000,00 disalurkan kembali pada Tahap II kepada 4 (empat) kelompok usaha.

- 2) Perjanjian Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor: 180/35.Perj/2009.407/CMI.PERJ/2009 dengan nilai Rp1.000.000.000,00. Dana tersebut disalurkan kepada 13 (tiga belas) koperasi/Baitul Mal Watamwil (BMT) sebesar Rp575.000.000,00 dan usaha mikro sebesar Rp387.500.000,00 yang tersebar di 15 (lima belas) kelurahan di Pemerintah Kota Cimahi.

- b. Perkembangan pengelolaan Dana Bergulir sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	2021 (Rp)
Pokok dana bergulir	1.125.000.000,00
Penyaluran dana bergulir	(1.087.500.000,00)
<b>Saldo dana bergulir</b>	<b>37.500.000,00</b>
Pengembalian pokok pinjaman	772.544.112,00
Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(768.908.592,00)
<b>Pokok dana bergulir yang ada dalam Tim Dana Bergulir</b>	<b>41.135.520,00</b>
Pendapatan bunga dan jasa giro	155.219.667,00
Penyetoran pendapatan ke kas daerah	(142.637.019,00)
Biaya administrasi	(3.126.632,00)
<b>Jumlah</b>	<b>50.591.536,00</b>

Terdapat penyetoran pokok sebesar Rp1.566.677,00 yang dicatat sebagai penerimaan kembali investasi yang terdiri dari:

No	Uraian	Tanggal	Nilai
1	Setoran An. Aban Sutisna	4-May-21	400.004,00
2	Setoran An. Eni Rohaeni	4-May-21	300.000,00
3	Setoran An. Sukandar	4-May-21	300.000,00
4	Setoran An. Ate Rahmat	30-Sep-21	200.000,00
5	Setoran An. Widaningsih	7-Oct-21	300.000,00
6	Setoran An. Nanang	7-Oct-21	16.673,00
7	Setoran An. Uwen Suwendi	24-Dec-21	50.000,00
	<b>Jumlah Setoran Pokok Usaha Mikro</b>		<b>1.566.677,00</b>
	<b>Jumlah Setoran Pokok Koperasi</b>		-
	<b>Jumlah Setoran Pokok Usaha Mikro dan Koperasi</b>		<b>1.566.677,00</b>
	Aban Sutisna	4-May-21	199.996,00
	Widaningsih	7-Oct-21	39.996,00
	Nanang	7-Oct-21	66.665,00
	<b>Jumlah Setoran Bunga Pinjaman Usaha Mikro</b>		<b>306.657,00</b>
	<b>Jumlah Setoran Pokok dan Bunga Pinjaman</b>		<b>1.873.334,00</b>

Saldo dana bergulir sebesar Rp50.591.536,00 seluruhnya berada pada rekening BJB nomor 0008291470001 atas nama Tim Pengelola Dana Bergulir.

- c. Sisa dana bergulir yang masih ada di masyarakat adalah sebesar Rp314.955.891,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Dana Bergulir yang disalurkan	1.087.500.000,00
Pengembalian pokok pinjaman s.d 2020	(770.977.433,00)
Sisa Dana bergulir di masyarakat per 31 Desember 2020	316.522.568,00
Pengembalian pokok pinjaman selama tahun 2021	(1.566.677,00)
<b>Sisa dana bergulir di masyarakat per 31 Desember 2021</b>	<b>314.955.891,00</b>

Seluruh sisa dana di masyarakat tersebut termasuk kategori macet sehingga keseluruhan nilai tersebut dilaporkan sebagai dana bergulir yang diragukan tertagih. Kemacetan tersebut dikarenakan:

- 1) Usaha yang dijalankan tidak dapat bersaing, pailit dan usaha tidak dilanjutkan lagi.
- 2) Penerima dana bergulir meninggal dunia atau pindah tempat tinggal dan alamat baru tidak dapat diketahui.

Terhadap dana yang masih berada di masyarakat tersebut, tetap dilakukan upaya penagihan dan sebagian dari penerima manfaat telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pinjaman.

- d. Atas dasar kondisi tersebut, untuk nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah hanya dana yang ada pada rekening Tim Pengelola Dana Bergulir saja yaitu sebesar Rp50.591.536,00.

#### 4.3.21. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi terhadap Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah yang merupakan investasi permanen atau investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	68.493.992.363,50	68.660.344.186,50

Penyertaan modal tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	2021(Rp)	2020 (Rp)
1	PT Bank BJB Tbk	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00
2	PD Jati Mandiri	42.493.992.363,50	42.660.344.186,50
<b>Jumlah</b>		<b>68.493.992.363,50</b>	<b>68.660.344.186,50</b>

Dari tabel penyertaan modal diatas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

---

*Pemerintah Daerah Kota Cimahi*

- a. Pada tanggal 8 Juli 2010 Bank BJB mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kepemilikan saham Pemerintah Kota Cimahi setelah IPO sebesar 1.07% dengan jumlah lembar saham 104.000.000. Penyertaan modal pada PT Bank BJB Tbk per 31 Desember 2017 sebesar Rp26.000.000.000,00 merupakan nilai berdasarkan metode biaya karena kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi kurang dari 20%. Data realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi ke PT Bank BJB Tbk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Penyertaan (Rp)	Saldo (Rp)
2002	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2003	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2004	5.000.000.000,00	11.000.000.000,00
2005	5.000.000.000,00	16.000.000.000,00
2006	2.500.000.000,00	18.500.000.000,00
2007	2.500.000.000,00	21.000.000.000,00
2008	2.500.000.000,00	23.500.000.000,00
2009	2.500.000.000,00	26.000.000.000,00

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank BJB, Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 24 Oktober 2019 menyertakan modal kepada Bank BJB dengan membeli 1.842.105 lembar saham dengan harga perlembar sebesar Rp1.900,00 senilai Rp3.499.999.500,-. Namun harga penutupan harga saham Bank Jabar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 tidak pernah mencapai angka minimal Rp1.900,00, maka sesuai legal opini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dana setoran tersebut tidak akan diefektifkan dan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kota Cimahi pada tanggal 27 Desember 2019.

- b. Penyertaan modal pada PD Jati Mandiri per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.660.344.186,50 merupakan nilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi lebih dari 50%.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi ke PD Jati Mandiri sesuai PERDA No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri adalah sebesar Rp51.351.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	TAHUN	PENYERTAAN MODAL (Rp)
1	2006	27.000.000.000,00
2	2007	15.000.000.000,00
3	2010	2.800.000.000,00
4	2011	4.000.000.000,00
5	2013	1.551.000.000,00
6	2014	1.000.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>51.351.000.000,00</b>

Sedangkan saldo rugi sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp8.857.007.636,50 dengan rincian per tahunnya sebagai berikut :

No	Tahun	Nama	Jumlah Penyertaan Modal s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Saldo Laba (Rugi) s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4+5
1	2006	PD. Jati Mandiri	27.000.000.000,00	.	27.000.000.000,00
2	2007	PD. Jati Mandiri	42.000.000.000,00	(83.543.057,00)	41.916.456.943,00
3	2008	PD. Jati Mandiri	42.000.000.000,00	(303.940.227,75)	41.696.059.772,25
4	2009	PD. Jati Mandiri	42.000.000.000,00	5.848.661.350,15	47.848.661.350,15
5	2010	PD. Jati Mandiri	44.800.000.000,00	4.198.313.359,98	48.998.313.359,98
6	2011	PD. Jati Mandiri	48.800.000.000,00	1.825.475.045,52	50.625.475.045,52
7	2012	PD. Jati Mandiri	48.800.000.000,00	(741.246.025,00)	48.058.753.975,00
8	2013	PD. Jati Mandiri	50.351.000.000,00	(1.334.312.162,00)	49.016.687.838,00
9	2014	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(2.675.227.439,00)	48.675.772.561,00
10	2015	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(5.036.957.720,00)	46.314.042.280,00
11	2016	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(6.305.696.640,00)	45.045.303.360,00
12	2017	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(7.894.853.454,00)	43.456.146.546,00
13	2018	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.479.403.846,00)	42.871.596.154,00
14	2019	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.524.303.990,50)	42.826.696.009,50
15	2020	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.690.655.813,50)	42.660.344.186,50
16	2021	PD. Jati mandiri	51.351.000.000,00	(8.857.007.636,50)	42.493.992.363,50

Saldo Penyertaan Modal pada PD Jati Mandiri tersebut didasarkan laporan keuangan PD Jati Mandiri *audited* dan *unaudited*.

Perlu disampaikan bahwa kondisi PD. Jati Mandiri Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) PD Jati Mandiri secara operasional telah berhenti disebabkan tidak memiliki modal usaha lagi akibat kerugian terus menerus.
- 2) Sesuai Keputusan Walikota Cimahi Nomor 821/Kep.336.Admrek/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Jati Mandiri Periode 2013-2017 disebutkan bahwa Direksi PD. Jati Mandiri selesai per tanggal 16 Agustus 2017.
- 3) Masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jati Mandiri sesuai Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/Kep.276.Admrek/2013 tentang Pengangkatan Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri berakhir pada 22 Juli 2017.

Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemerintah Kota Cimahi melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dan Inspektorat telah berupaya :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung yang telah berpengalaman untuk menemukan solusi penyelesaian masalah perusahaan daerah.

- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Melakukan upaya fasilitasi penyusunan kajian mengenai PD. Jati Mandiri ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi.
- 5) Melakukan Upaya penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penarikan Penyertaan Modal pada PD. Jati Mandiri.
- 6) Mengajukan Permohonan untuk melakukan audit PD. Jati Mandiri ke BPKP Perwakilan Jawa Barat namun ditolak melalui Surat BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor S.4331/PW10/5/2018 tanggal 8 Desember 2017.
- 7) Melakukan permohonan untuk melakukan audit PD. Jati Mandiri ke KAP Koesbandiah. Beddy Samsi dan Setiasih namun ditolak karena sampai dengan Tahun 2017 PD. Jati Mandiri sampai dengan 2016 telah diaudit oleh KAP lain.
- 8) Mengeluarkan Surat Walikota Cimahi Nomor 539/5105/admrek tentang Penghentian Aktivitas dan Permohonan Dokumen Pengelolaan Perusahaan Daerah Jati Mandiri termasuk Laporan Keuangan PD. Jati Mandiri sebagai bahan audit.
- 9) Melakukan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai pengembalian aset PD. Jati Mandiri ke Kota Cimahi.
- 10) Melakukan pembahasan permasalahan hukum terkait PD. Jati Mandiri dengan Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan mengajukan permohonan untuk dibuatkan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sehingga legal opinion tersebut akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PD. Jati Mandiri.
- 11) Melakukan Kajian terhadap Aspek Operasional, Aspek Keuangan dan Aspek Ketaatan terhadap Regulasi PD. Jati Mandiri oleh KAP Jojo Sunarjo dan Rekan.

Ringkasan Laporan Keuangan PD Jati Mandiri Tahun 2021 *unaudited* adalah sebagai berikut: (rincian selengkapnya pada **lampiran 9**)

<b>Laporan Rugi Laba Tahun 2021</b>	
Pendapatan	0,00
Belanja	(166.351.823,00)
Rugi Tahun 2021	(166.351.823,00)
<b>Neraca Tahun 2021</b>	
Aset	47.129.233.676,00
Utang	4.635.241.312,50
Ekuitas	42.493.992.363,50

Dalam Aset senilai Rp47.129.233.676,00 terdapat Tanah senilai Rp38.773.988.854,00 yang masih dalam sengketa perdata, dengan uraian sebagai berikut :

Perkara Tata Usaha Negara Terkait Sertifikat Tanah Cibeureum antara Awong Hidjaja (Direktur Utama PT. Adi Darma Bumi Indonesia) Melawan Kepala Kantor Pertanahan



Kota Cimahi, Perusahaan Daerah Jati Mandiri, Idris Ismail dkk

- 1) Perkara pada Tingkat Pertama No. 93/G/2011/PTUN-BDG, dimenangkan oleh Awong Hidjaja;
- 2) Perkara pada Tingkat Banding No. 134/B/2012/PT.TUN.JKT dimenangkan oleh PD. Jati Mandiri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Idris Ismail dkk;
- 3) Perkara pada Tingkat Kasasi Nomor 120 K/TUN/2013 dimenangkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
- 4) Perkara Pada Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/TUN/2014 dimenangkan oleh Awong Hidjaja;
- 5) namun berdasarkan Penetapan Nomor: 05/Pdt.Eks/G/2009/PN.BB Jo. Nomor : 76/Pdt.G/2004 PN.BB Jo. Nomor: 372 /Pdt/2006/Pt.2006/PT.Bdg Jo. Nomor: 1686 K/ Pdt/2007. Tentang “NON EKSEKUTABEL ATAU TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI”. Maka Tanah tersebut kembali menjadi milik PD. Jati Mandiri di karenakan Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/TUN/2014 yang dimenangkan oleh Awong Hidjaja itu sebatas membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi (sisi administrasi), bukan membatalkan kepemilikan karena hal tersebut bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

#### 4.3.22. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Cimahi dan pelayanan masyarakat. Saldo aset Tetap milik Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Tanah	1.056.705.806.799,00	1.054.785.789.081,00
2	Peralatan dan Mesin	694.191.726.346,98	653.697.490.905,54
3	Gedung dan Bangunan	772.624.864.228,52	745.821.693.568,20
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	826.964.855.561,52	788.273.686.779,63
5	Aset Tetap Lainnya	70.405.620.977,47	67.891.291.041,47
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	211.996.377.038,36	51.926.798.918,36
7	Akumulasi Penyusutan	(1.231.876.277.638,95)	(1.119.661.893.807,38)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.401.012.973.312,90</b>	<b>2.242.734.856.486,82</b>

Rincian aset tetap dapat dilihat pada **lampiran 10**. Atas posisi aset tetap per 31 Desember 2021 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Mutasi aset tetap pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2020 (Rp.)	Penambahan Tahun 2021 (Rp.)	Pengurangan Tahun 2021 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp.)

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2020 (Rp.)	Penambahan Tahun 2021 (Rp.)	Pengurangan Tahun 2021 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp.)
Tanah	1.054.785.789.081,00	3.274.413.918,00	1.354.396.200,00	1.056.705.806.799,00
Peralatan dan Mesin	653.697.490.905,54	47.652.758.676,18	7.158.523.234,74	694.191.726.346,98
Gedung dan Bangunan	745.821.693.568,20	100.302.859.633,10	73.499.688.972,78	772.624.864.228,52
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	788.273.686.779,63	124.229.218.578,89	85.538.049.797,00	826.964.855.561,52
Aset Tetap Lainnya	67.891.291.041,47	2.929.648.936,00	415.319.000,00	70.405.620.977,47
Konstruksi Dalam Pengerjaan	51.926.798.918,36	160.069.578.120,00	-	211.996.377.038,36
<b>JUMLAH</b>	<b>3.362.396.750.294,20</b>	<b>438.458.477.862,17</b>	<b>167.965.977.204,52</b>	<b>3.632.889.250.951,85</b>

Dari tabel mutasi aset tetap di atas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- 1) Penambahan aset tetap selama tahun 2021 sebesar Rp438.458.477.862,17 dapat diuraikan sebagai berikut;
  - a) Pengadaan yang berasal dari belanja modal sebesar Rp247.060.564.786,00 (termasuk Belanja BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.281.363.087,00 (**Lampiran 11a**))
  - b) Reklas antar KIB sebesar Rp153.863.749.722,53
  - c) Reklas dari belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8.003.504.379,00
  - d) Reklas dari belanja pemeliharaan Rp120.000.000,00
  - e) Reklas dari belanja persediaan Rp429.851.187,00
  - f) Mutasi antar SKPD sebesar Rp9.034.372.650,00
  - g) Hibah sebesar Rp14.818.856.612,00
  - h) BTT sebesar Rp1.687.223.172,00
  - i) Koreksi sebesar Rp3.440.355.353,64
- 2) Pengurangan aset tetap selama tahun 2021 sebesar Rp167.965.977.204,52 dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a) Aset yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp1.304.306.910,99
  - b) Reklas Antar KIB sebesar Rp153.863.749.722,53
  - c) Reklas ke Barang dan Jasa sebesar Rp 66.016.000,00
  - d) Reklas ke aset lainnya sebesar Rp865.579.350,00

- e) Reklas ke pemeliharaan sebesar Rp476.153.271,00
- f) Reklas ke persediaan sebesar Rp108.410.750,00
- g) Mutasi antar SKPD sebesar Rp9.034.372.650,00
- h) Mutasi ke Aset Lain-lain Rp273.842.350,00
- i) Rusak berat/Penghapusan sebesar Rp1.727.646.000,00
- j) Koreksi sebesar Rp245.900.000,00

Penambahan TA 2021	Belanja Modal + BOS (a)	Reklas Antar KIB (b)	Reklas dari Barang dan Jasa (c)	Reklas dari Belanja Pemeliharaan (d)	Reklas dari Belanja Persediaan (e)
Tanah	1.924.413.918,00	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	40.367.666.054,00	276.762.000,78	54.468.150,00	6.937.964,90	429.851.187,00
Gedung dan Bangunan	92.323.402.639,00	87.550.000,00	2.700.227.559,00	113.062.035,10	-
Jalan, irigasi & Jaringan	109.597.606.795,00	445.958.568,75	1.087.797.750,00	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.847.475.380,00	82.173.556,00	-	-	-
KDP	-	152.971.305.597,00	4.161.010.920,00	-	-
Total	247.060.564.786,00	153.863.749.722,53	8.003.504.379,00	120.000.000,00	429.851.187

Mutasi Antar SKPD (f)	Hibah (g)	BTT (h)	Koreksi (i)	Penambahan (10=1+2+3+4+5+6+7+8+9)
1.350.000.000,00	-	-	-	3.274.413.918,00
3.490.058.250,00	1.910.854.147,00	613.067.172,00	503.093.750,50	47.652.758.676,18
4.004.461.400,00	-	1.074.156.000,00	-	100.302.859.633,10
189.853.000,00	12.908.002.465,00	-	0,14	124.229.218.578,89
-	-	-	-	2.929.648.936,00
-	-	-	2.937.261.603,00	160.069.578.120,00
9.034.372.650,00	14.818.856.612,00	1.687.223.172,00	3.440.355.353,64	438.458.477.862,17

Pengurangan TA 2021	Tidak Dikapitalisasi (a)	Reklas Antar KIB (b)	Reklas ke Barang dan Jasa (c)	Reklas ke Aset Lainnya (d)	Reklas ke Pemeliharaan (e)
Tanah	-	-	896.200,00	-	-
Peralatan dan Mesin	1.304.306.910,99	342.341.473,75	65.120.000,00	865.579.350,00	-
Gedung dan Bangunan	-	67.942.359.451,78	-	-	474.153.271,00
Jalan, irigasi & Jaringan	-	85.348.196.797,00	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	230.852.000,00	-	-	2.000.000,00
KDP	-	-	-	-	-
Total	1.304.306.910,99	153.863.749.722,53	66.016.200,00	865.579.350,00	476.153.271,00

Pengurangan TA 2021	Reklas ke Persediaan (f)	Mutasi Antar SKPD (g)	Mutasi Ke Aset Lain-lain (h)	Rusak Berat / Penghapusan (i)	Koreksi (j)	Pengurangan (11=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------	--

Pengurangan TA 2021	Reklas ke Persediaan (f)	Mutasi Antar SKPD (g)	Mutasi Ke Aset Lain-lain (h)	Rusak Berat / Penghapusan (i)	Koreksi (j)	Pengurangan (11=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
Tanah	3.500.000,00	1.350.000.000,00		-	-	1.354.396.200,00
Peralatan dan Mesin	66.910.750,00	3.490.058.250,00	137.233.000,00	641.073.500,00	245.900.000,00	7.158.523.234,74
Gedung dan Bangunan	38.000.000,00	4.004.461.400,00	136.609.350,00	904.105.500,00	-	73.499.688.972,78
Jalan, irigasi & Jaringan	-	189.853.000,00		-	-	85.538.049.797,00
Aset Tetap Lainnya	-	-		182.467.000,00	-	415.319.000,00
KDP	-	-		-	-	-
<b>Total</b>	<b>108.410.750,00</b>	<b>9.034.372.650,00</b>	<b>273.842.350,00</b>	<b>1.727.646.000,00</b>	<b>245.900.000,00</b>	<b>167.965.977.204,52</b>

Selain data-data tersebut diatas dalam penyajian aset tetap terdapat beberapa informasi yang perlu disampaikan sebagai berikut:

Dalam Aset Tetap Tanah, terdapat aset jalan yang masih belum jelas kepemilikannya namun masih tercatat di KIB sebesar Rp132.113.225.000,00. Aset Tetap Tanah (Aset jalan) ini sedang dilakukan proses klarifikasi terhadap pihak terkait (TNI, Jasa Marga dan pihak Provinsi Jawa Barat ) untuk memperoleh kejelasan status kepemilikan aset tersebut. Adapun rinciannya disajikan pada **Lampiran 11b**. Selain itu dalam Gedung dan Bangunan terdapat koreksi reklas yang berasal dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.157.214.419,00 Adapun rinciannya disajikan pada **Lampiran 11c**.

#### 4.3.23. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2021 sebesar Rp1.231.876.277.638,95. Rincian akumulasi penyusutan per SOPD disajikan pada **lampiran 12**.

#### 4.3.24. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
Aset Tidak Berwujud	9.932.562.034,90	8.733.693.634,90
Akumulasi Amortisasi	(8.229.263.872,40)	(6.900.246.239,16)
<b>Aset Tak Berwujud Netto</b>	<b>1.703.298.162,51</b>	<b>1.833.447.395,75</b>
Aset Lain Lain	16.955.466.977,42	19.709.611.280,92
<b>Jumlah</b>	<b>22.007.110.139,93</b>	<b>24.891.403.676,67</b>

Atas posisi aset lainnya per 31 Desember 2021 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.348.345.000,00 merupakan nilai estimasi harga perolehan atas tanah seluas +/- 8.575 m<sup>2</sup> yang diinvestasikan dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT.Bumi Kencana Indah untuk pembangunan Pusat Perdagangan Pasar Antri di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah dengan perjanjian Nomor 180/07-Perj/2003 Tanggal 17 Juli 2003.
- b. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.932.562.034,90 merupakan *software* yang terdiri dari :

SOPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dinas Pendidikan	521.580.800,00	437.059.000,00
Dinas Kesehatan	172.730.000,00	172.730.000,00
RSUD Cibabat	392.194.000,00	392.194.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.117.395.100,00	931.469.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	275.132.000,00	275.132.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65.000.000,00	65.000.000,00
Dinas sosial. Pengendalian penduduk. Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.640.000,00	32.640.000,00
Dinas Tenaga Kerja	321.387.000,00	231.837.000,00
Dinas Pangan dan Pertanian	51.975.455,00	51.975.455,00
Dinas Lingkungan Hidup	86.680.000,00	86.680.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	263.974.250,00	263.974.250,00
Dinas Perhubungan	334.344.050,00	334.344.050,00
Dinas Komunikasi. Informatika. Kearsipan dan Kepustakaan	1.006.929.683,00	1.006.929.683,00
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	498.426.500,00	354.266.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	787.192.900,00	333.224.000,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	34.650.000,00	34.650.000,00
BAPPEDA	204.694.646,90	169.989.646,90
BPKAD	473.787.000,00	473.787.000,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.627.768.900,00	1.494.216.800,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	378.260.500,00	378.260.500,00
Sekretariat Daerah	166.952.500,00	166.952.500,00
Sekretariat DPRD	698.221.000,00	698.221.000,00
Inspektorat	49.700.000,00	49.700.000,00
Kecamatan Cimahi Utara	71.193.750,00	71.193.750,00
Kecamatan Cimahi Tengah	173.664.500,00	148.672.500,00
Kecamatan Cimahi Selatan	78.595.000,00	78.595.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa	47.492.500,00	
<b>Jumlah</b>	<b>9.932.562.034,90</b>	<b>8.733.693.634,90</b>

- c. Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.229.263.872,40 merupakan amortisasi aset tetap tak berwujud dari tahun perolehan hingga tahun 2021. Rincian Akumulasi Amortisasi disajikan pada **lampiran 13**.

d. Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.955.466.977,42 terdiri dari :

SOPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Aset Tetap Rusak Berat	5.849.152.318,82	5.849.152.318,82
Piutang Retribusi Kadaluwarsa	212.739.385,00	212.739.385,00
Koreksi Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan	5.422.866.048,00	5.422.866.048,00
Peralatan dan Mesin tidak dalam penguasaan	1.294.404.425,60	4.048.548.729,10
Peralatan dan Mesin Diserahkan Kepada Masyarakat – DLH	4.176.304.800,00	4.176.304.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.955.466.977,42</b>	<b>19.709.611.280,92</b>

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.955.466.977,42 terdiri dari aset tetap rusak berat yang sudah tidak dapat digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Cimahi sebesar Rp5.849.152.318,82 dan piutang retribusi yang telah kadaluwarsa pada tahun 2013 sebesar Rp 212.739.385,00. (rincian pada **lampiran 14**). Selain itu, terdapat koreksi Aset tetap Gedung dan bangunan yang dialihkan ke aset lain-lain dikarenakan terdapat Aset tetap Gedung dan Bangunan yang bukan milik Dinas Pendidikan sebesar Rp 4.984.326.048,00 namun masih tercatat dan terdapat penambahan aset tetap gedung dan Bangunan yang telah di keluarkan dari KIB namun BAST belum ada sebesar Rp438.540.000,00 milik Dinas Pendidikan untuk SD IT Al Maqam dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Aset Lain-lain sebesar Rp3.475.067.000.

Sampai dengan tahun 2013 izin yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) berjumlah 66 jenis. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 141 yang termasuk jenis retribusi perizinan tertentu adalah Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol. Retribusi Izin Gangguan (HO). Retribusi Izin Trayek. dan Retribusi Izin Usaha Perikanan sehingga KPPT Kota Cimahi hanya memungut tiga jenis retribusi yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi Izin Gangguan (HO). dan Retribusi Izin Trayek (IT). Pada Tahun 2005 sampai dengan 2009 sudah terbit beberapa izin retribusi namun belum dibayar oleh wajib retribusi, sehingga berdasarkan peraturan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Pasal 23, hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi. Oleh karena itu, KPPT telah melakukan verifikasi izin-izin retribusi yang masa tagihnya telah kadaluwarsa pada tahun 2013 sebesar Rp212.739.385,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis retribusi	2013 (Rp)
IMB	64.461.601,00
HO	30.926.150,00
IT	150.000,00
KP	405.000,00
IPPT	102.215.234,00
SIUP	2.650.000,00
TDP	1.510.000,00
SIUKP	525.000,00
SITU	426.400,00

Jenis retribusi	2013 (Rp)
TDG	120.000,00
SIUJK	100.000,00
IPKTK.SWSATA	300.000,00
SIPA.ANGK	750.000,00
IUA	750.000,00
IP	7.450.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>212.739.385,00</b>

#### 4.3.25. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2021 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	40.349.191,00	48.276.595,00	40.349.191,00	48.276.595,00
Bagian Lancar Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat	161.298.946,00	129.039.156,47	161.298.946,00	129.039.156,47
Utang Bunga Dana Talangan RSUD Cibabat	-			
Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00	855.508.220,00	855.508.220,00
Pendapatan Diterima Dimuka	-			
Utang Belanja	19.004.747.924,00	4.141.620.812,00	19.004.747.924,00	4.141.620.812,00
Utang Lain-lain	25.180.855.366,00	13.622.915.723,00	25.180.855.366,00	13.622.915.723,00
<b>Jumlah</b>	<b>45.242.759.647,00</b>	<b>18.797.360.506,47</b>	<b>45.242.759.647,00</b>	<b>18.797.360.506,47</b>

Atas saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.48.276.645,00 terdiri dari Utang PFK BOS SD pada Dinas Pendidikan sebesar Rp47.935.751,00 dan Utang PFK yang berasal dari Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kota Cimahi sebesar Rp340.844,00.
- Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi No.02/WPB.13/BD.02/2022 Tanggal 11 Januari 2022 sebesar 129.039.156,47 merupakan proporsi bunga berjalan yang akan jatuh tempo pada 20 Maret 2022.
- Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp855.508.220,00 merupakan kewajiban utang sesuai dengan naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Cimahi dengan Nomor SLA-1208/DP3/2007 tanggal 18 April 2007. Saldo Utang sebesar Rp855.508.220,00 tersebut merupakan bagian lancar utang kepada pemerintah

pusat yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2022 sebesar Rp427.754.110,00 dan tanggal 20 September 2022 sebesar Rp 427.754.110,00.

- d. Utang Belanja Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.141.620.812,00 merupakan utang belanja pegawai dan barang jasa selama tahun 2021. Rincian utang belanja dapat dilihat pada **lampiran 15**.
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.622.915.723,00 merupakan saldo utang kepada pihak ketiga, terdiri dari:

Uraian	2020 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2021 (Rp)
Utang atas biaya pemeliharaan dan pembangunan (retensi)	1.319.924.798,00	-	-	1.319.924.798,00
Utang atas pelayanan rujukan di rumah sakit	101.675.224,00	-	101.675.224,00	-
Utang RSUD Cibabat atas pembelian barang	23.028.546.738,00	11.380.509.815,00	23.028.546.738,00	11.380.509.815,00
Utang Dana Talangan RSUD Cibabat ke Bank Mandiri	-	-	-	-
Utang Kompensasi Jasa Pelayanan	189.828.800,00	70.342.150,00	189.828.800,00	70.342.150,00
Utang Kompensasi Dampak Negatif	42.989.320,00	309.281.000,00	42.989.320,00	309.281.000,00
Jaminan pada UPTD Rusunawa	497.890.486,00	213.615.303,00	168.647.829,00	542.857.960,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.180.855.366,00</b>	<b>11.973.748.268,00</b>	<b>23.531.687.911,00</b>	<b>13.622.915.723,00</b>

Rincian utang atas biaya pemeliharaan dan pembangunan (retensi), utang RSUD Cibabat atas pembelian barang serta utang Kompensasi Jasa Pelayanan dan Kompensasi Dampak negatif dapat dilihat pada **lampiran 16, 17 dan 18**.

#### 4.3.26. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang Pemerintah Kota Cimahi kepada Pemerintah Pusat untuk pembiayaan pembangunan Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2021 (Rp)
Utang Kepada Pemerintah Pusat	3.422.032.878,70	-	855.508.220,00	2.566.524.658,70

Utang Pemerintah Kota Cimahi kepada Pemerintah Pusat tersebut berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1208/DP3/2007 tanggal 18 April 2007 dengan plafon pinjaman sebesar Rp14.086.072.432,00. Pada tanggal 19 April 2010, plafon pinjaman diubah menjadi Rp12.832.623.298,00 dengan Amandemen Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor AMA-369/SLA-1208/DSMI/2010. Sesuai dengan naskah perjanjian, pembayaran angsuran pertama mulai dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2011 dan berakhir tanggal 20 September 2025.

#### 4.3.27. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban, Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



	<u>2021 (Rp)</u>	<u>2020 (Rp)</u>
Ekuitas	2.916.024.217.594,05	2.711.528.785.611,89

Ekuitas dijelaskan lebih rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2021. (Rincian Dapat Dilihat pada **Lampiran 19**)

#### **4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto.

##### **1. Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran.

Pendapatan-LO dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima. Pada akhir tahun anggaran, pendapatan yang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sampai dengan akhir tahun anggaran bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas dicatat di Neraca sebagai penambahan Piutang dan Ekuitas Dana Lancar. Pendapatan diakui setelah ada bukti setor ke Kas Daerah dan apabila sampai akhir tahun belum direalisasi ke Kas Daerah, maka dicatat di Neraca sebagai penambah Kas dan Ekuitas Dana Lancar. Pendapatan yang telah diterima untuk periode tahun anggaran selanjutnya dicatat di Neraca sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya;
- b. Pendapatan Transfer yaitu Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatanyang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Jumlah pendapatan-LO Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.545.373.383.520,29. Jumlah tersebut didapat setelah dilakukan penyesuaian pada beberapa transaksi pendapatan yang berpengaruh terhadap neraca.

##### **2. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Pengeluaran beban daerah terdiri dari:

- a. Beban Pegawai
- b. Beban Barang
- c. Beban Bunga
- d. Beban Subsidi
- e. Beban Hibah
- f. Beban Bantuan Sosial
- g. Beban Penyusutan Aset Tetap
- h. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- i. Beban Penyisihan Piutang
- j. Beban Penyisihan Dana Bergulir
- k. Beban Lain-lain

Jumlah beban daerah Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.330.843.106.922,38 jumlah tersebut didapat setelah dilakukan penyesuaian pada beberapa transaksi beban yang berpengaruh terhadap neraca.

Koreksi atas Pengeluaran Beban (penerimaan pengembalian beban) yang terjadi dalam Tahun Anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan beban. Apabila diterima pada Tahun Anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran beban dicatat dalam lain-lain Pendapatan yang Sah.

#### 4.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp433.164.813.348,49.

##### 4.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp203.700.704.578,00 yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Hotel	301.848.846,00	423.815.698,00
Pajak Restoran	17.048.477.567,00	13.850.188.968,00
Pajak Hiburan	123.330.330,00	220.137.083,00

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Reklame	2.679.178.300,00	2.813.213.850,00
Pajak Penerangan Jalan Umum	37.701.852.705,00	36.900.353.297,00
Pajak Parkir	937.097.932,00	646.077.204,00
Pajak Air Tanah	8.472.806.671,00	8.813.258.403,00
Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	55.960.840.082,00	41.495.177.873,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.475.272.145,00	74.163.119.758,00
<b>Jumlah</b>	<b>203.700.704.578,00</b>	<b>179.325.342.134,00</b>

#### 4.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.171.916.379,00 yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	4.644.854.020,00	5.625.659.206,00
Retribusi Jasa Usaha	5.387.268.125,00	7.935.642.168,00
Retribusi Perijinan Tertentu	2.139.794.234,00	4.277.694.324,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.171.916.379,00</b>	<b>17.838.995.698,00</b>

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>12.171.916.379,00</b>	<b>17.838.995.698,00</b>
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>4.644.854.020,00</b>	<b>5.625.659.206,00</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	1.793.413.500,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.562.133.900,00	1.309.268.700,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	181.345.000,00	119.085.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	683.644.000,00	444.189.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	895.585.000,00	879.072.450,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	588.309.040,00	543.932.260,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	104.907.500,00	74.546.000,00
Retribusi Pengendalian Menara	259.404.580,00	200.776.696,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	157.970.000,00	97.035.000,00

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	38.896.000,00	30.180.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	172.659.000,00	134.160.600,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>5.387.268.125,00</b>	<b>7.935.642.168,00</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.103.238.125,00	4.291.662.968,00
Retribusi Terminal	253.838.000,00	86.928.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.192.000,00	3.557.051.200,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2.139.794.234,00</b>	<b>4.277.694.324,00</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.552.574.234,00	3.241.943.324,00
Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	3.450.000,00	3.750.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	583.770.000,00	1.032.001.000,00

#### 4.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.956.960.000,00 yaitu:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Perusahaan Daerah		,
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	9.956.960.000,00	9.778.080.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.956.960.000,00</b>	<b>9.778.080.000,00</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp9.956.960.000,00 tersebut merupakan bagian deviden atas laba tahun 2021 Pemerintah Kota Cimahi atas kepemilikan 1.07% saham atau sebanyak 104.000.000 lembar saham pada PT Bank BJB.

#### 4.4.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan Asli Daerah Lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp207.335.232.391,49 yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.052.983.328,00	1.719.377.182,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	337.911.430,00	
Penerimaan Jasa Giro	9.376.700.958,10	6.061.508.451,14
Pendapatan Bunga Lain.		
Lain	307.719.834,01	287.203.040,32

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.102.432.744,38	12.281.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	561.000,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	184.126.021,00	144.273.512,00
Pendapatan Denda Pajak	1.426.540.148,00	2.093.540.349,00
Pendapatan Denda Retribusi	23.470.807,00	43.239.321,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	49.593.947,00	
Pendapatan dari Pengembalian	315.613.979,00	678.651.795,00
Pendapatan Dari BLUD	191.128.150.715,00	134.007.063.962,45
Sumbangan Pihak Ketiga	-	344.627.748,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	16.041.653.850,00
Pendapatan Denda Lain-lain-LO		37.299.563,00
Dana Non Kapitasi		202.081.135,00
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO	1.177.480,00	
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	28.250.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>207.335.232.391,49</b>	<b>161.672.800.908,91</b>

#### 4.4.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya. dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.028.642.243.991,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	743.905.839.987,00	788.330.045.490,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	52.247.274.000,00	97.730.028.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	232.489.130.004,00	119.792.475.687,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.028.642.243.991,00</b>	<b>1.005.852.549.177,00</b>

##### 4.4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp743.905.839.987,00 yang terdiri dari :

##### 4.4.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp51.986.941.479,00 yang terdiri dari :

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.740.049.507,00	4.762.204.516,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	6.039.776.294,00	39.066.170.560,00
DBH PPh Pasal 21	35.315.829.783,00	
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.891.285.895,00	4.743.183.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>51.986.941.479,00</b>	<b>48.571.558.676,00</b>

#### 4.4.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.733.151.567,00 yang terdiri dari :

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.358.469.000,00	3.728.732.391,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	179.344.000,00	4.613.010.454,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent	769.322.068,00	470.878.981,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	85.402.700,00	120.502.643,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.330.780.150,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	24.212.294.799,00	29.319.524.292,00
<b>Jumlah</b>	<b>29.733.151.567,00</b>	<b>39.583.428.911,00</b>

#### 4.4.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp530.425.978,000,00 yaitu:

	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	530.425.978.000,00	539.717.972.000,00

#### 4.4.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp131.759.768.941,00 yaitu:

	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2020 (Rp)</b>
Dana Alokasi Khusus Fisik	31.966.257.254,00	45.170.237.820,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	99.793.511.687,00	115.286.848.083,00
<b>Jumlah</b>	<b>131.759.768.941,00</b>	<b>160.457.085.903,00</b>

#### 4.4.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
DID	52.247.274.000,00	97.730.028.000,00

#### 4.4.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp232.489.130.004,00 yang terdiri dari:

##### 4.4.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp126.781.787.043,00 yang terdiri dari:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	47.893.996.320,00	45.491.082.600,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.789.873.830,00	18.447.005.220,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.736.362.390,00	28.134.133.580,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	178.901.700,00	177.013.500,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	26.182.652.803,00	27.543.240.787,00
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>126.781.787.043,00</b>	<b>119.792.475.687,00</b>

##### 4.4.2.3.2. Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp105.707.342.961,00

	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	9.676.657.020,00	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	96.030.685.941,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>105.707.342.961,00</b>	<b>-</b>

#### 4.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp83.566.326.180,80 terdiri dari:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)

Pendapatan Hibah	83.494.375.949,80	59.439.221.689,98
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	71.950.231,00	23.922.151.027,00
<b>Jumlah</b>	<b>83.566.326.180,80</b>	<b>83.361.372.716,98</b>

Adapun rincian pendapatan hibah adalah sebagai berikut :

No	SOPD	2021 (Rp)
<b>Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat-LO</b>		<b>21.632.224.949,80</b>
1	Dinas Kesehatan	6.356.416.321,00
2	RSUD Cibabat	1.913.159.147,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	344.259.500,00
4	Dinas Sosial	110.387.516,80
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12.908.002.465,00
<b>Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat - Bappenda</b>		<b>6.700.327.000,00</b>
<b>Pendapatan Hibah Dana BOS-LO - BPKAD</b>		<b>55.161.824.000,00</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>83.494.375.949,80</b>

Pendapatan Lainnya sebesar Rp71.950.231,00 merupakan pengembalian atas sekolah dasar swasta yaitu SD Semesta Hati yang sudah tidak beroperasi lagi.

#### 4.4.4 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Beban Pegawai pada APBD dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Jumlah Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp626.341.641.494,00 yang terdiri dari:

Beban Pegawai	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Gaji Pokok dan Tunjangan	287.338.317.514,00	389.095.253.926,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	157.339.447.208,00	150.457.757.500,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.614.718.280,00	8.794.000.000,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	33.629.360.044,00	9.812.600.000,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	536.897.640,00	
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	605.520.000,00	
Biaya Insentif Pemungutan Pajak	-	829.207.008,00
Honorarium PNS	-	57.458.000,00
Honorarium Non PNS	-	2.845.950.000,00
Uang lembur	-	2.222.107.700,00
Jasa Medis	-	5.271.554.196,00
Beban Pegawai BLUD	48.277.380.808,00	61.156.411.196,00
Jasa Pelayanan	-	23.414.788.318,00



<b>Beban Pegawai</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
Beban Pegawai Dana BOS	-	565.665.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>626.341.641.494,00</b>	<b>654.522.752.844,00</b>

#### 4.4.5 Beban Barang

Beban Barang merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membeli barang dan jasa serta untuk membayar biaya perjalanan dinas dan pemeliharaan aset-aset Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Beban Barang dikelompokkan ke dalam Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas dimana dalam APBD dianggarkan sebagai Belanja Barang dan Jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Jumlah Beban Barang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp556.263.620.481,91 terdiri dari :

<b>Beban Barang</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
Beban Persediaan	147.997.945.138,29	174.752.300.288,94
Beban Jasa	336.911.501.029,62	263.219.286.073,75
Beban Pemeliharaan	46.128.442.345,00	14.290.438.232,00
Beban Perjalanan Dinas	25.225.731.969,00	36.159.340.024,00
<b>Jumlah</b>	<b>556.263.620.481,91</b>	<b>488.421.364.618,69</b>

##### 4.4.5.1. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membiayai persediaan yang telah digunakan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, beban Persediaan dicatat sesuai dengan pemakaian persediaan yang telah terjadi.

Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp147.997.945.138,29 atau 26,61% dari Beban Barang yang terdiri dari :

<b>Beban Persediaan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
ATK	6.228.766.174,11	4.927.377.541,00
Alat Listrik dan elektronik	1.996.871.348,10	1.878.225.116,00
Perangko, materai dan benda pos lainnya	299.654.500,00	228.622.400,00
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.523.712.691,71	2.003.288.316,91
Bahan Kebutuhan Medis	2.011.635,00	15.795.151.044,98
Cindramata	1.206.546.300,00	589.178.500,00
Bahan baku bangunan	4.954.649.798,00	4.076.150.054,00
Bahan/bibit tanaman	629.225.496,00	508.625.200,00
Bibit ternak	27.320.000,00	46.810.000,00
Bahan obat-obatan	50.512.544.131,54	41.546.020.566,57
Bahan kimia	10.574.335.163,99	1.245.146.390,00

<b>Beban Persediaan</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Bahan Pokok Natura	4.474.992.915,00	5.195.103.449,00
Bahan Makanan Pokok	2.551.079.893,10	2.538.780.294,48
Barang Cetakan	7.059.813.396,50	5.581.260.726,00
Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	33.152.210.895,24	77.297.238.787,00
Beban Persediaan BOS	19.804.210.800,00	11.295.321.903,00
<b>Jumlah</b>	<b>147.997.945.138,29</b>	<b>174.752.300.288,94</b>

#### 4.4.5.2. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa habis pakai diluar persediaan. biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Beban Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp336.911.501.029,62 dengan proporsi terhadap Beban Barang sebesar 60,57% yang terdiri dari :

<b>No</b>	<b>S O P D</b>	<b>Beban Jasa (Rp)</b>
1	Dinas Pendidikan	44.426.279.349,50
2	Dinas Kesehatan	53.627.957.626,83
3	Rsud Cibabat	40.474.807.598,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.409.546.161,80
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.950.190.236,09
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.684.113.133,08
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.441.890.603,67
8	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.941.019.182,00
9	Dinas Tenaga Kerja	3.276.278.796,00
10	Dinas Pangan dan Pertanian	2.111.884.027,50
11	Dinas Lingkungan Hidup	24.978.343.254,16
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.758.600.177,17
13	Dinas Perhubungan	14.397.526.453,09
14	Dinas Komunikasi. Informatika. Kearsipan dan Perpustakaan	4.434.620.193,91
15	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	11.159.280.373,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.610.581.375,50
17	Dinas Kebudayaan. Pariwisata. Kepemudaan dan Olahraga	3.954.446.945,17
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.130.363.855,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.821.427.808,17
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.841.500.224,50
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.143.340.510,33
22	Sekretariat Daerah	16.967.077.165,00

No	S O P D	Beban Jasa (Rp)
23	Sekretariat DPRD	9.977.677.199,16
24	Inspektorat Kota	1.002.165.166,66
25	Kecamatan Cimahi Utara	13.500.224.549,83
26	Kecamatan Cimahi Tengah	17.814.169.290,00
27	Kecamatan Cimahi Selatan	15.555.680.789,33
28	Kantor Kesatuan Bangsa	2.520.508.939,67
	<b>JUMLAH</b>	<b>336.911.501.029,62</b>

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 20**

#### 4.4.5.3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk pemeliharaan terhadap Aset Tetap yang tidak menambah nilai Aset Tetap itu sendiri selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp46.128.442.345,00 dengan proporsi terhadap Beban Barang sebesar 8,29% yang terdiri dari:

Beban Pemeliharaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	2.856.000,00	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.021.785.180,00	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.908.951.041,00
Beban Jasa Service		953.048.802,00
Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan		62.213.871,00
Beban Pemeliharaan Alat Uji		285.033.700,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.183.308.137,00	3.392.886.331,00
Beban Pemeliharaan Penampung Air/Reservoir		51.903.091,00
Beban Pemeliharaan Rumah Dinas		14.846.100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	219.991.000,00	3.389.216.150,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	23.715.152.275,00	
Beban Pemeliharaan Jalan		2.196.618.100,00
Beban Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		513.042.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan WAN/LAN		623.886.486,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.384.000,00	
Beban Pemeliharaan BOS	1.620.862.544,00	746.967.037,00
Beban Pemerliharaan BLUD	7.354.103.209,00	151.825.523,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.128.442.345,00</b>	<b>14.290.438.232,00</b>

#### 4.4.5.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, pelatihan dan pendidikan, bimbingan

teknis, kursus-kursus, seminar dan sosialisasi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.225.731.969,00 dengan proporsi terhadap Beban Barang sebesar 4,53% yang terdiri dari:

<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
Beban Perjalanan dinas dalam daerah	685.347.000,00	620.295.000,00
Beban Perjalanan dinas luar daerah		32.690.267.846,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	20.854.005.291,00	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	141.585.000,00	
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri		214.128.140,00
Beban Kursus.kursus singkat/ Pelatihan	1.048.353.400,00	173.000.000,00
Beban Sosialisasi	367.464.364,00	
Beban Bimbingan Teknis	168.731.000,00	1.056.000.000,00
Beban Pendidikan dan Pelatihan	270.402.000,000	317.130.000,00
Beban Perjalanan Dinas BOS	1.089.346.150,00	1.061.699.038,00
Beban Perjalanan Dinas BLUD	600.497.764,00	26.820.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.225.731.969,00</b>	<b>36.159.340.024,00</b>

#### 4.4.6 Beban Bunga

Beban Bunga adalah pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Beban Bunga periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp276.614.324,47 yang terdiri dari :

	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	276.614.324,47	458.243.473,20
<b>Jumlah</b>	<b>276.614.324,47</b>	<b>458.243.473,20</b>

#### 4.4.7 Beban Subsidi

Beban Subsidi digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Beban Subsidi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp410.574.000,00 yang terdiri dari:

	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
Beban Subsidi kepada BUMN	410.574.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>410.574.000,00</b>	<b>-</b>

#### 4.4.8 Beban Hibah

Beban Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk

uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Beban Hibah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.250.155.200,00 yang terdiri dari:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	18.250.155.200,00	13.856.011.450,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.250.155.200,00</b>	<b>13.856.011.450,00</b>

#### 4.4.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.571.530.000,00 yang terdiri dari:

Beban Bantuan Sosial	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.571.530.000,00	2.864.475.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.571.530.000,00</b>	<b>2.864.475.000,00</b>

#### 4.4.10 Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Beban Penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Perhitungan nilai beban penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Cimahi menggunakan metode garis lurus.

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp122.398.887.198,70 dengan rincian sebagai berikut:

No	S O P D	Beban Penyusutan Aset Tetap (Rp)
1	Dinas Pendidikan	9.131.625.900,66
2	Dinas Kesehatan	4.902.788.768,71
3	RSUD Cibabat	39.270.687.570,62
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.961.709.548,05
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.968.727.732,95
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	914.620.188,08
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	189.417.227,57
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	399.290.334,14
9	Dinas Tenaga Kerja	110.175.821,43
10	Dinas Pangan dan Pertanian	670.339.945,73
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.340.057.073,91
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	679.843.191,15

No	S O P D	Beban Penyusutan Aset Tetap (Rp)
13	Dinas Perhubungan	7.569.397.553,51
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	1.016.248.311,10
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	4.450.033.917,10
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	542.740.641,83
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	231.269.151,83
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	255.122.883,51
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	714.197.787,18
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	220.701.419,99
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	208.806.246,43
22	Sekretariat Daerah	3.092.598.099,32
23	Sekretariat DPRD	1.858.081.343,61
24	Inspektorat Kota	290.736.706,16
25	Kecamatan Cimahi Utara	578.049.541,89
26	Kecamatan Cimahi Tengah	934.210.137,31
27	Kecamatan Cimahi Selatan	883.268.853,62
28	Kantor Kesatuan Bangsa	14.141.301,30
	<b>JUMLAH</b>	<b>122.398.887.198,70</b>

#### 4.4.11 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.329.017.633,25 yang berasal dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya terdiri dari :

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dinas Pendidikan	40.297.950,00	53.787.500,00
Dinas Kesehatan	9.492.500,00	34.132.500,00
RSUD Cibabat	33.061.000,00	36.498.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	246.337.775,00	199.856.250,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	43.874.875,00	45.593.625,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	16.250.000,00
BPBD	-	-
Dinas sosial. Pengendalian penduduk. Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	7.500.000,00
Dinas Tenaga Kerja	80.346.750,00	57.959.250,00
Dinas Pangan dan Pertanian	2.000.000,00	4.668.750,00
Dinas Lingkungan Hidup	21.670.000,00	21.670.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	54.166.987,50	58.354.487,50
Dinas Perhubungan	-	12.349.200,00
Dinas Komunikasi. Informatika. Kearsipan dan Kepustakaan	46.622.420,75	203.049.170,75
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	118.669.125,00	88.566.625,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	187.163.225,00	73.671.000,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	8.662.500,00	8.662.500,00
BAPPEDA	8.676.250,00	12.271.875,00

<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
BPKAD	56.626.750,00	68.864.250,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	235.169.275,00	254.313.125,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.941.500,00	48.409.625,00
Sekretariat Daerah	4.496.250,00	28.985.000,00
Sekretariat DPRD	36.708.250,00	82.958.250,00
Inspektorat Kota	12.425.000,00	12.425.000,00
Kecamatan Cimahi Utara	-	12.449.000,00
Kecamatan Cimahi Tengah	31.904.875,00	35.543.125,00
Kecamatan Cimahi Selatan	9.831.250,00	19.648.750,00
Kesbang	11.873.125,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.329.017.633,25</b>	<b>Rp1.498.437.358,25</b>

#### 4.4.12 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan pengakuan piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Nilai beban penyisihan piutang sebesar Rp2.666.559.266,08 ditentukan dengan penggolongan kualitas pajak. Beban Penyisihan Piutang dibagi menjadi Beban Penyisihan Piutang Pajak, Beban Penyisihan Piutang Retribusi dan Beban Penyisihan Piutang lain-lain.

##### 1. Beban Penyisihan Piutang Pajak

Beban Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 mengalami penambahan beban sebesar Rp1.304.519.442,83 yang terdiri dari:

<b>Piutang</b>	<b>Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>Koreksi Penyisihan Piutang Yang Dihapuskan</b>	<b>Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Pajak 2021 (Rp)</b>
Pajak Hotel	97.904,40	5.750,00		92.154,40
Pajak Restoran	204.649,49	56.301,18		148.348,31
Pajak Reklame	171.629.778,00	155.123.000,00		16.506.778,00
Pajak Parkir	18.866,00	4.281,00		14.585,00
Pajak Air Tanah	206.535.379,83	194.201.253,22		12.334.126,61
PBB	46.380.446.362,47	135.276.330.496,95	(90.171.307.585,01)	1.275.423.450,52
<b>Jumlah</b>	<b>46.758.932.940,19</b>	<b>135.625.721.082,35</b>	<b>(90.171.307.585,01)</b>	<b>1.304.519.442,83</b>

2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Beban Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 mengalami penambahan beban sebesar Rp451.208.828,68 yang terdiri dari :

<b>Piutang</b>	<b>Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2021 (Rp)</b>	<b>Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Retribusi 2021 (Rp)</b>
----------------	---	---	--

Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2020 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Retribusi 2021 (Rp)
Laboratorium UPTD Dinas Lingkungan Hidup	14.074.815,00	7.043.967,50	7.043.967,50
Retribusi Rusunawa	1.303.245.519,50	889.689.164,20	413.556.355,30
Retribusi BITC	35.289.205,88	4.667.580,00	30.621.625,88
<b>Jumlah</b>	<b>1.352.609.540,38</b>	<b>901.400.711,70</b>	<b>451.208.828,68</b>

3. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 mengalami penambahan beban sebesar Rp910.830.944,55 dengan rincian sebagai berikut :

Piutang	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2020 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lainnya 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Lainnya Klaim Rumah Sakit – BLUD RSUD	671.030.309,52	131.783.690,00	539.246.619,77
Penyisihan Piutang Lainnya – BLUD Air Minum	901.445.411,00	576.492.254,00	324.953.157,50
Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga - DPUPR	1.982.276,90	-	1.982.276,90
Sumbangan Pihak Ketiga – Cimahi Mall	302.552.832,00	258.470.811,00	44.082.021,00
Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga – Dinas Pendidikan	447.319,38		447.319,38
Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas	119.600,00		119.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.877.577.748,80</b>	<b>966.746.754,25</b>	<b>910.830.944,55</b>

Adapun rincian atas Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat sebesar Rp1.982.276,90 yaitu kelebihan atas pembayaran Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Penataan Ruang MPP Tahap II, Dinas pendidikan sebesar Rp447.319,38 kelebihan atas pembayaran Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri.

#### 4.4.13 Beban Lain-lain

Beban lain-lain merupakan beban operasional Kota Cimahi yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan beban penyisihan.



Beban Lain-lain periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp334.507.323,99 yang terdiri dari :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Bahan Pembelajaran	-	389.459.650,00
Aset Tetap yang Nilainya dibawah Nilai Kapitalisasi	152.325.016,99	163.813.786,50
Reklas Persediaan	870.000,00	
Beban Lain-lain BLUD Puskesmas Dinkes	14.960.484,00	
Beban Penurunan Nilai Investasi	166.351.823,00	166.351.823,00
<b>Jumlah</b>	<b>334.507.323,99</b>	<b>728.625.259,50</b>

#### 4.4.13. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan non operasional merupakan penghapusan Peralatan dan Mesin Rp5.130.797.753,00 terdiri dari :

No	S O P D	Defisit dari kegiatan non Operasional (Rp)
1	Dinas Pendidikan	276.510.000,00
2	Dinas Kesehatan	926.926.500,00
3	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	68.500.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	724.246.000,0
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	177.000.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	459.021.370,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	180.900.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	199.063.793,00
9	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	112.400.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	274.500.000,00
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	354.660.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	256.175.000,00
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	224.800.000,00
14	Badan Kepegawian dan Pengembangan SDM Daerah	112.400.000,00
15	Sekretariat Daerah	449.020.090,00
16	Inspektorat Kota	334.675.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.130.797.753,00</b>

#### 4.4.14. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Realisasi Beban Luar Biasa pada tahun 2021 sebesar Rp9.736.649.668,00 yang terdiri dari :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	9.736.649.668,00	10.612.007.886,38
<b>Jumlah</b>	<b>9.736.649.668,00</b>	<b>10.612.007.886,38</b>

#### 4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Arus Kas Pemerintah Kota Cimahi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp37.805.188.562,11. Jumlah tersebut diperoleh dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp284.630.437.112,11. Selisih kurang dari aktivitas investasi sebesar Rp246.007.581.458,00. Selisih kurang dari aktivitas pendanaan sebesar Rp855.508.220,00 dan selisih dari aktivitas transitoris sebesar Rp37.841.128,00. Apabila kenaikan arus kas tahun 2021 sebesar Rp37.805.188.562,11 ditambah dengan saldo awal kas 2021 sebesar Rp270.908.452.653,53 maka saldo kas per 31 Desember 2021 berjumlah Rp308.713.641.215,64.

Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp308.713.641.215,64 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp261.726.825.185,51, Saldo di kas di Bendahara pengeluaran Rp148.923.030,52, Saldo di Kas di Bendahara Penerimaan Rp659.044,00, Saldo Kas di RSUD sebesar Rp40.989.619.473,61, Kas di BLUD Air Minum Rp 861.472.095,00, Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp3.174.447.354,00, Kas Lainnya 48.276.595,00 serta Kas Dana BOS sebesar Rp1.763.418.438,00

##### 4.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp284.630.437.112,11 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp1.519.082.577.175,11 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp1.234.452.140.063,00

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi :		
Jumlah Arus Masuk Kas	1.519.082.577.175,11	1.456.277.082.717,91
Jumlah Arus Keluar Kas	1.234.452.140.063,00	1.185.075.221.701,11
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>284.630.437.112,11</b>	<b>271.201.861.016,80</b>

##### 4.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.519.082.577.175,11 terdiri dari :

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	179.891.802.692,00	158.937.237.899,00
Penerimaan Retribusi Daerah	11.548.482.640,00	15.243.650.522,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	9.778.080.000,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	202.654.762.893,11	190.008.897.075,91
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	61.309.116.578,00	50.460.873.698,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	47.781.705.502,00	38.645.976.130,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	530.425.978.000,00	539.717.972.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	131.759.768.941,00	160.457.085.903,00

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Penerimaan Dana Penyesuaian	52.247.274.000,00	97.730.028.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	123.865.281.737,00	118.963.390.897,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	105.707.342.961,00	23.922.151.027,00
Penerimaan Hibah	6.700.327.000,00	140.839.566,00
Dana BOS	55.161.824.000,00	52.270.900.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	71.950.231,00	
<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.519.082.577.175,11</b>	<b>1.456.277.082.717,91</b>

#### 4.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.234.452.140.063,00 terdiri dari:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pembayaran Pegawai	643.977.236.028,00	636.883.229.738,00
Pembayaran Barang	555.391.457.278,00	456.337.905.380,02
Pembayaran Bunga	308.874.114,00	781.441.813,09
Pembayaran Subsidi	410.574.000,00	
Pembayaran Hibah	18.999.042.200,00	13.856.011.450,00
Pembayaran Bantuan Sosial	2.571.530.000,00	2.864.475.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		
Pembayaran Tak Terduga	12.793.426.443,00	74.352.158.320,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
Pembayaran Bagi Hasil Restribusi		
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.234.452.140.063,00</b>	<b>1.185.075.221.701,11</b>

#### 4.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar (246.007.581.458,00) yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp1.052.983.328,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp 247.060.564.786,00

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi:		
Jumlah Arus Masuk Kas	1.052.983.328,00	1.719.377.182,00
Jumlah Arus Keluar Kas	247.060.564.786,00	97.244.613.801,00
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>	<b>(246.007.581.458,00)</b>	<b>(95.525.236.619,00)</b>

#### 4.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.052.983.328,00

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.662.403.182,00
Penjualan atas Gedung dan bangunan	10.511.600,00	56.974.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	1.042.471.728,00	
Penjualan atas Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>1.052.983.328,00</b>	<b>1.719.377.182,00</b>

#### 4.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk belanja modal selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp terdiri dari:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah	1.924.413.918,00	24.237.283.327,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	40.367.666.054,00	36.574.433.534,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	92.323.402.639,00	19.768.621.392,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	109.597.606.795,00	13.598.490.000,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.847.475.380,00	3.065.785.548,00
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>247.060.564.786,00</b>	<b>97.244.613.801,00</b>

#### 4.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp (855.508.220,00 ) yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp0,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp855.508.220,00.

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan :		

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas	-	8.548.192.400,00
Jumlah Arus Keluar Kas	855.508.220,00	34.746.347.598,00
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(855.508.220,00)</b>	<b>26.198.155.198,00</b>

#### 4.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	8.548.192.400,00
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>8.548.192.400,00</b>

#### 4.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp855.508.220,00 terdiri dari:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		185.648.400,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		33.705.190.978,00
<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>855.508.220,00</b>	<b>34.746.347.598,00</b>

Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp855.508.220,00 terdiri dari pembayaran tagihan pokok atas pinjaman daerah sebesar Rp855.508.220,00.

#### 4.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.841.128,00 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp94.401.906.222,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp94.364.065.094,00.

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris :		
Jumlah Arus Masuk Kas	94.401.906.222,00	85.776.323.087,00
Jumlah Arus Keluar Kas	94.364.065.094,00	86.040.091.111,00

<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>37.841.128,00</b>	<b>(263.768.024,00)</b>
---	----------------------	-------------------------

#### 4.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp94.401.906.222,00 terdiri dari :

<b>Uraian</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
Belanja Tidak Langsung		
a. PPh 21	27.273.624.445,00	21.313.374.086,00
b. IWP	19.738.722.168,00	20.202.565.100,00
c. Taperum	-	264.661.000,00
d. Iuran Jaminan Kesehatan		-
e. Koreksi Kelebihan Pembayaran PPh 21		-
Belanja Langsung		
a. PPh 21	3.966.729.488,00	27.190.658.153,00
b. PPh 22	1.316.033.690,00	1.057.612.155,00
c. PPh 23	1.227.729.933,00	852.714.714,00
d. PPh 4	6.471.575.972,00	1.326.914.903,00
e. PPN	34.407.490.526,00	13.567.822.976,00
<b>Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>94.401.906.222,00</b>	<b>85.776.323.087,00</b>

#### 4.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK) periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp94.364.065.094,00 terdiri dari :

<b>Uraian</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
Belanja Tidak Langsung		
a. PPh 21	27.248.119.167,00	21.592.902.566,00
b. IWP	19.733.972.878,00	20.214.272.635,00
c. Taperum	--	264.785.000,00
d. Iuran Jaminan Kesehatan	-	12.757.500,00
Belanja Langsung		
a. PPh 21	3.966.449.388,00	27.190.511.753,00
b. PPh 22	1.316.033.690,00	1.057.612.155,00
c. PPh 23	1.225.492.190,00	847.522.977,00
d. PPh 4	6.471.575.972,00	1.326.914.903,00
e. PPN	34.402.421.809,00	13.532.811.922,00
<b>Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>94.364.065.094,00</b>	<b>86.040.091.111,00</b>

#### 4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit LO
3. RK PPKD
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5. Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi)
6. Pendapatan Yang Ditangguhkan
7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Pemerintah Kota Cimahi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.916.024.217.594,05 atau naik 8% dari Ekuitas tahun sebelumnya, yaitu Rp2.711.528.785.611,89

#### 4.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cimahi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2021. Nilai Ekuitas Awal diperoleh dari Neraca per 31 Desember 2021, yaitu :

	<b>Per 31 Desember 2021 (Rp)</b>
Ekuitas Awal	<u>2.711.528.785.611,89</u>

#### 4.6.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit LO diperoleh dari Laporan Operasional Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, yaitu :

	<b>1 Jan 2019 – 31 Des 2021 (Rp)</b>
Surplus/Defisit LO	<u>199.662.829.176,91</u>

#### 4.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan sebesar Rp0,52 merupakan penyesuaian terhadap kelebihan penerimaan karena penutupan rekening Bank Mandiri sebesar Rp0,40 serta koreksi saldo awal Tahun 2021 di rekening kasda BJB sebesar Rp0,12 dikarenakan transaksi di BJB tidak bias mengakomodir nilai desimal.
- b. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang merupakan penyisihan piutang sampai dengan Tahun 2021 karena perubahan kebijakan akuntansi.

	<b>31 Desember 2021</b>
Koreksi Nilai Piutang	(4.175.918.915,75 )

c. Koreksi Nilai Utang

Koreksi Nilai Utang merupakan koreksi atas nilai utang jangka pendek atas uang jaminan Rusunawa.

	<b>31 Desember 2021</b>
Koreksi Nilai Utang	(21.905.000,00 )

d. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan merupakan penyisihan Persediaan sampai dengan Tahun 2021 karena perubahan kebijakan akuntansi.

	<b>31 Desember 2021</b>
Koreksi Nilai Persediaan	(4.683.461,90)

e. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi terhadap Nilai Aset Tetap dilakukan karena adanya perpindahan aset tetap antar SKPD satu dengan SKPD lainnya, aset tetap dibawah nilai kapitalisasi dibawah tahun 2021 dan hibah aset tetap kepada masyarakat.

	<b>31 Desember 2021</b>
Koreksi Nilai Aset Tetap	(1.265.202.393,86)

f. Koreksi Nilai Aset Lainnya

Tidak ada koreksi terhadap Aset tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2021

	<b>31 Desember 2021</b>
Koreksi Nilai Aset Lain.lain	-

#### 4.6.4. Lain-Lain (Perubahan Basis Akuntansi)

Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi) terdiri dari penyisihan piutang sebesar Rp84.553.855,62 yang terdiri dari :

SOPD	Jenis Penyisihan Atas Piutang	Nilai Penyisihan
Dinas Perhubungan	Retribusi Izin Usaha	Rp75.750,00
Diskominfoarpus	Retribusi Menara Telekomunikas	Rp17.220.821,10
DPMPSTP	Izin Mendirikan bangunan	Rp38.276.491,05
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pajak penerangan Jalan PLN	Rp15.332.513,48
	Pajak Hiburan	Rp450,00
	Pajak Reklame	Rp13.647.830,00



<b>Jumlah</b>	<b>Rp84.553.855,62</b>
---------------	------------------------

Selain Penyisihan Piutang, terdapat juga penyesuaian atas Akumulasi Penyusutan sebesar Rp10.184.503.367,13, dan Akumulasi Amortisasi yaitu koreksi pada BAPPEDA sebesar Rp0,01.

#### **4.6.5. Koreksi Utang PFK**

Koreksi utang PFK sebesar Rp29.572.880,52 merupakan sisa utang PFK tahun 2021 yang mengoreksi Kas Daerah sebesar Rp3.207.435,00 dan kurang bayar PFK Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan yang dipungut Tahun 2021 sebesar Rp340.844,00. Koreksi utang PFK juga terdiri dari koreksi Lebih bayar atas PFK pada Dinas Pendidikan Rp6.050,00, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp6.812.150,52, Sekretariat Daerah Rp26.204.303,00 dan Kecamatan Cimahi Utara Rp98.606,00.

#### **4.6.6. Keuntungan/Kerugian Investasi Pemerintah Daerah**

Keuntungan/kerugian Investasi Pemerintah Daerah berasal dari keniakan investasi Pemerintah Daerah dari dana bergulir Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.682.474,00

#### **4.6.7. Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cimahi yang diperoleh dari Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit LO dan RK PPKD dikurangi/ditambah dengan koreksi-koreksi yang berasal dari dampak kumulatif, perubahan basis akuntansi dan pendapatan yang ditangguhkan. Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Cimahi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2021</b>
Ekuitas Akhir	2.916.024.217.594,05

Rincian disajikan di **Lampiran 19**.

## **BAB V**

### **PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **5.1 Profil Entitas**

Dari hasil perjuangan yang cukup panjang, ditetapkanlah Undang-undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Secara formal Kota Cimahi diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengandung paradigma baru dalam pemerintahan daerah dimana tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan, keadilan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

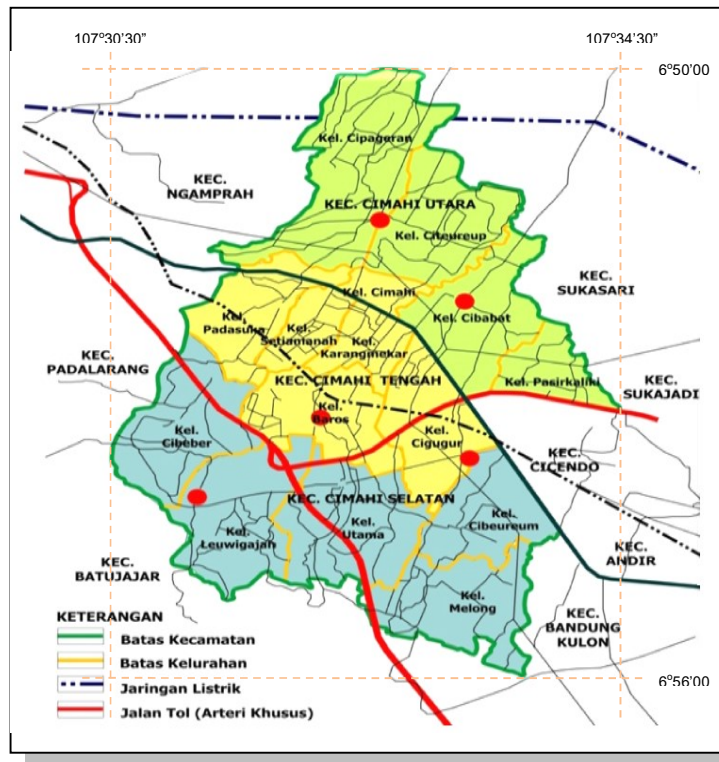
Kondisi geografis suatu wilayah secara langsung akan berpengaruh terhadap pembangunan di wilayah tersebut terutama dalam pengelolaan ruang untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di suatu wilayah. Pengembangan Kota Cimahi pun tidak terlepas dari kondisi geografis yang dimilikinya.

Secara geografis Kota Cimahi terletak pada cekungan Bandung, yang merupakan inti dari wilayah Bandung Raya. Kota Cimahi dilintasi oleh jalan nasional yang menghubungkan Kota Bandung – Kota Jakarta; Jalan Tol Cileunyi–Purwakarta–Padalarang, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta. Dengan melihat kedudukan geografis yang sedemikian strategis dan terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis. Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia, terutama industri, pendidikan, perdagangan dan pariwisata.

Luas Wilayah Kota Cimahi adalah 40,25 km<sup>2</sup> (4.025,73 ha) yang dibagi menjadi 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan, dengan letak wilayah administrasi berbatasan dengan Kota Bandung pada bagian timur dan selatan. Kabupaten Bandung pada bagian selatan, serta dengan Kabupaten Bandung Barat pada bagian utara, barat dan selatan.

Luas wilayah Kecamatan Cimahi Utara 13,31 km<sup>2</sup> dibagi menjadi 4 kelurahan yaitu Kelurahan Pasirkaliki 3,23 km<sup>2</sup>, Kelurahan Cibabat 2,87 km<sup>2</sup>, Kelurahan Citeureup 1,27 km<sup>2</sup>, dan Kelurahan Cipageran 5,94 km<sup>2</sup>. Kemudian untuk Kecamatan Cimahi Tengah memiliki luas wilayah 10,11 dibagi menjadi 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Baros 2,25 km<sup>2</sup>, Kelurahan Cigugur tengah 2,35 km<sup>2</sup>, Kelurahan Karang Mekar 1,31 km<sup>2</sup>, Kelurahan Setiamanah 1,38 km<sup>2</sup>, Kelurahan Padasuka 1,98 km<sup>2</sup>, dan Kelurahan Cimahi 0,84 km<sup>2</sup>. Dan Kecamatan Cimahi Selatan memiliki luas wilayah 16,83 km<sup>2</sup> dibagi menjadi 5 kelurahan yaitu Kelurahan Utama 3,13 km<sup>2</sup>. Kelurahan Leuwigajah 2,64 km<sup>2</sup>. Kelurahan Cibeber 3,33 km<sup>2</sup>. Kelurahan Cibeureum 3,93 km<sup>2</sup> dan Kelurahan Melong 3,8 km<sup>2</sup>.

**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Kota Cimahi**



Meskipun secara geografis letak Kota Cimahi menguntungkan, namun terdapat beberapa kendala dalam pengembangan ruang, sebagai berikut :

1. Sebagian wilayah Kota Cimahi ( $\pm 20\%$  luas wilayah) menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2000, termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pelabuhan Udara Husein Sastranegara. Kawasan Kota terkena bahaya kecelakaan dan pada daerah horisontal dalam dikembangkan maksimal ketinggian bangunan yang terbatas.
2. Peruntukan lahan Wilayah Bandung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa sebagian besar luas Kota Cimahi, yaitu 1.446,59 ha ( $\pm 36\%$  dari luas Kota Cimahi) termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara. Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU ini sangat terbatas dengan tujuan mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna.
3. Fungsi lindung. Garis Sempadan Sungai (GSS), jalan tol dan jalur kereta api. Selain menguntungkan Kota Cimahi juga menjadi hambatan dalam pengembangan kota, yang menjadikan Kota Cimahi menjadi tersegmentasi.

Kendala-kendala tersebut tidak menjadikan Kota Cimahi menjadi stagnan namun

kendala tersebut justru menjadi tantangan bagi pemerintah kota dalam pengembangan dan pembangunan kota sehingga pengembangan dan pembangunan Kota Cimahi menjadi sangat dinamis dan selalu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada.

## 5.2 Perangkat Daerah Penyusun Laporan Keuangan 2021

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan perubahan satuan kerja perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang dijabarkan melalui :

1. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
2. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
3. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Kota Cimahi;
4. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Cimahi;
5. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Cimahi;
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Cimahi;
7. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi;

Sehingga berdasarkan peraturan-paraturan tersebut diatas Satuan Kerja Perangkat Daerah penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah:

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	DINAS KESEHATAN
4	RSUD CIBABAT
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8	DINAS PERHUBUNGAN

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	KANTOR KESATUAN BANGSA
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
18	PPKD
19	SEKRETARIAT DAERAH
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
21	SEKRETARIAT DPRD
22	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
23	INSPEKTORAT
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
25	KECAMATAN CIMAHU UTARA
26	KECAMATAN CIMAHU TENGAH
27	KECAMATAN CIMAHU SELATAN
28	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KERASIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Tipologi dan urusan pemerintahan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe B yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Dinas meliputi :
  - 1) Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
  - 2) Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran;
- 6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian;
- 8) Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 10) Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- 11) Dinas Pangan dan Pertanian dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pangan, pertanian dan perikanan;
- 12) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
- 14) Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan;
- 15) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;

e. Badan meliputi :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 3) Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Cimahi Utara dengan tipe A, meliputi :

- a) Kelurahan Cipageran;
- b) Kelurahan Citeureup;
- c) Kelurahan Cibabat;
- d) Kelurahan Pasirkaliki;

2. Kecamatan Cimahi Tengah dengan tipe A, meliputi:

- a) Kelurahan Padasuka;
- b) Kelurahan Setiamanah;
- c) Kelurahan Karangmekar;
- d) Kelurahan Baros;
- e) Kelurahan Cimahi;
- f) Kelurahan Cigugur Tengah;

3. Kecamatan Cimahi Selatan dengan tipe A, meliputi:

- a) Kelurahan Cibeureum;
- b) Kelurahan Cibeber;
- c) Kelurahan Leuwigajah;
- d) Kelurahan Utama;
- e) Kelurahan Melong;

### **5.3 Hubungan Dengan DPRD dan BPK. serta Forkopimda**

#### **5.3.1 Hubungan dengan DPRD**

Hubungan dengan DPRD merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dan di dalam pelaksanaannya sesuai dengan fungsi Pemerintah serta fungsi DPRD sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan DPRD berjalan secara dinamis sesuai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengajukan rancangan perda, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, serta tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Hubungan ini terlihat diantaranya dalam penyusunan rencana anggaran (KUA. PPAS. RAPBD dan APBD) maupun dalam pansus-pansus menghasilkan perda. Selain itu, secara berkala ada forum kebersamaan eksekutif-legislatif mendengarkan pencerahan dari narasumber yang relevan (sosial/politik/ekonomi/hukum).

### **5.3.2 Hubungan dengan BPK**

Hubungan dengan BPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. sampai saat ini telah berjalan dengan baik.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Cimahi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terkait masih adanya catatan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Kota Cimahi dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkomitmen untuk terus memperbaiki kekurangan yang ada dengan harapan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Cimahi pada tahun mendatang tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

### **5.3.3 Hubungan dengan Forkopimda**

Hubungan dengan Forkopimda terjalin sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing seperti dengan Unsur Pimpinan DPRD, unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan dan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Harmonisasi yang telah terjalin diwujudkan dalam Program Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pengamanan Daerah serta Koordinasi pada setiap event sosial dan kemasyarakatan.

## **5.4 Pengaruh *Stakeholder* (pemegang kepentingan) : DPRD**

Pengaruh *stakeholder* DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan cukup kuat. baik dalam proses penganggaran maupun inisiatif penyusunan produk legislatif/perda. Pengaruh DPRD dalam penyelenggaraan program kegiatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi diwujudkan melalui tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu fungsi legislasi untuk membuat peraturan daerah, fungsi anggaran untuk menetapkan APBD dan fungsi pengawasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

## **5.5 Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan**

Dampak lingkungan entitas terhadap risiko bidang kerja dan laporan keuangan dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor:

1. Lingkungan internal;  
Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi.
2. Lingkungan eksternal :
  - a. Kenyamanan lingkungan kerja yang belum optimal;
  - b. Kesempatan memperoleh pendidikan dan latihan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan khususnya akuntansi dan laporan keuangan;



- c. Pendidikan dan latihan yang diberikan terlalu singkat.

### 5.6 Alamat Kantor

No	Nama	Alamat	Telepon	Faximile	Keterangan
1	Kepala Daerah	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654016	6654274 Psw 125	MelaluiSanditel
2	SekretariatDewan/DPRD	Jl.Hj.Julaeha Kartasasmita	022- 6633315	6633315	Langsung
3	Inspektorat Kota	Jl. TTUC Jl. Pesantren, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513	022- 6630330	6654274 Psw 125	Langsung
4	Sekretariat Daerah	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654274	5554274	Langsung
5	BPKAD	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654274 Psw 117/132	6654274 Psw 125	MelaluiSanditel

## **BAB VI** **PENUTUP**

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca laporan keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tujuan, sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan, pada pelaksanaannya ditentukan oleh penerimaan, semangat, komitmen dan dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif, legislatif serta masyarakat umum.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih optimal apabila sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan dalam rangka mempertahankan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

WALI KOTA CIMAH,

  
NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022  
: SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2022 NOMOR 291  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAH, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH**

**KOTA CIMAHI**  
**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Dinas Pendidikan	Piutang Lain - Lain	-	89.463.875,63	-	89.463.875,63
		1) Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga Disdik		89.463.875,63		89.463.875,63
2	Dinas Kesehatan	Piutang Lain - Lain	-	23.920.000,00	-	23.920.000,00
		1) Piutang BLUD Puskesmas	-	23.920.000,00	-	23.920.000,00
3	RSUD Cibabat	Piutang Lain - Lain	4.437.115.992,09	6.859.648.248,09	4.437.115.992,09	6.859.648.248,09
		1) Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat	4.111.485.995,00	6.662.518.251,00	4.111.485.995,00	6.662.518.251,00
		5) Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSUD Cibabat	325.629.997,09	197.129.997,09	325.629.997,09	197.129.997,09
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Piutang Lain - Lain	483.726.095,23	396.455.379,55	483.726.095,23	396.455.379,55
		1) Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga PUPR	483.726.095,23	396.455.379,55	483.726.095,23	396.455.379,55
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Piutang Retribusi	1.247.172.932,00	3.585.109.700,00	2.839.529.950,00	1.992.752.682,00
		1) Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	1.247.172.932,00	3.585.109.700,00	2.839.529.950,00	1.992.752.682,00
		Piutang Lain - Lain	1.125.080.600,00	4.749.434.100,00	4.292.007.400,00	1.582.507.300,00
		1) Piutang BLUD Air Minum	1.125.080.600,00	4.749.434.100,00	4.292.007.400,00	1.582.507.300,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	Piutang Retribusi	33.889.500,00	589.927.500,00	592.269.000,00	31.548.000,00
		1) Laboratorium Lingkungan	33.889.500,00	589.927.500,00	592.269.000,00	31.548.000,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	Piutang Retribusi	172.208.211,00	-	172.208.211,00	-
		1) Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	172.208.211,00	-	172.208.211,00	-
8	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi	3.200.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00	2.900.000,00
		1) Izin Trayek	3.200.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00	2.900.000,00
		Piutang Lain - Lain	14.148.000,00	-	-	14.148.000,00
		1) Piutang atas Pengelolaan Pasar Atas Baru	14.148.000,00	-	-	14.148.000,00
9	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Menengah dan Perindustrian	Piutang Retribusi	36.199.500,00	691.814.425,00	641.602.225,00	86.411.700,00
		1) Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	36.199.500,00	691.814.425,00	641.602.225,00	86.411.700,00
		Piutang Lain - Lain	183.509.525,00	-	-	183.509.525,00
		1) Piutang atas Pengelolaan Pasar Atas Baru	183.509.525,00	-	-	183.509.525,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Piutang Retribusi	646.665.041,00	1.063.948.484,00	1.552.574.240,00	158.039.285,00
		1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	593.626.830,00	1.063.948.484,00	1.552.574.240,00	105.001.074,00
		2) Izin Gangguan / Keramaian (HO)	51.898.211,00	-	-	51.898.211,00
		3) Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00	-	-	1.140.000,00
11	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Piutang pajak daerah	198.458.610.887,00	200.497.210.383,00	270.063.110.277,00	128.892.710.993,00
		1) Pajak Hotel	1.150.000,00	301.848.846,00	283.417.966,00	19.580.880,00
		2) Pajak Restoran	11.260.236,00	17.048.477.567,00	17.018.807.906,00	40.929.897,00
		3) Pajak Reklame	700.293.335,00	2.542.700.000,00	2.326.007.100,00	916.986.235,00
		4) Pajak Hiburan dan Tontonan	90.000,00	123.240.330,00	123.330.330,00	-
		5) Pajak Penerangan Jalan Umum	3.066.502.695,00	34.621.793.896,00	37.688.296.591,00	-
		6) Pajak Genset Non PLN	-	13.556.114,00	13.556.114,00	-
		7) Pajak Parkir	856.200,00	936.674.732,00	937.097.932,00	433.000,00
		8) Pajak Air Tanah	650.988.401,00	8.472.806.671,00	8.237.134.116,00	886.660.956,00
		9) BPHTB	-	55.960.840.082,00	55.960.840.082,00	-
		10) PBB	194.027.470.020,00	80.475.272.145,00	147.474.622.140,00	127.028.120.025,00
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat	27.370.729.034,00	-	27.370.729.034,00	-
		1) Piutang Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	1.757.720.521,00	-	1.757.720.521,00	-
		2) Piutang Bagi Hasil Pajak Penghasilan 21	7.030.440.100,00	-	7.030.440.100,00	-
		3) Piutang Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau	534.014.478,00	-	534.014.478,00	-
		4) Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Minyak Bumi	131.844.900,00	-	131.844.900,00	-
		5) Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Mineral dan Batu Bara	32.165.950,00	-	32.165.950,00	-
		6) Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Gas Bumi	13.142.100,00	-	13.142.100,00	-
		7) Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Panas Bumi	17.258.908.542,00	-	17.258.908.542,00	-
		8) Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Perikanan	546.181.150,00	-	546.181.150,00	-
		9) Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Kehutanan	66.311.293,00	-	66.311.293,00	-
		Piutang Bagi Hasil	6.877.800.265,00	9.794.305.571,00	6.877.800.265,00	9.794.305.571,00
		1) Pajak Kendaraan Bermotor	2.034.635.940,00	2.624.406.060,00	2.034.635.940,00	2.624.406.060,00
		2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	875.641.020,00	1.467.319.800,00	875.641.020,00	1.467.319.800,00
		3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.430.275.470,00	2.696.305.912,00	2.430.275.470,00	2.696.305.912,00
		4) Pajak Air Permukaan	61.393.500,00	24.964.600,00	61.393.500,00	24.964.600,00
		5) Pajak Rokok	1.475.854.335,00	2.981.309.199,00	1.475.854.335,00	2.981.309.199,00
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	-	-	217.551.668,00
		Piutang Lain - Lain	308.500.374,00	391.208.333,20	282.020.374,00	417.688.333,20
		1) Piutang atas Pengelolaan Pasar Atas Baru	26.480.000,00	-	-	26.480.000,00
		2) Piutang Kontribusi Cimahi Mall	282.020.374,00	391.208.333,20	282.020.374,00	391.208.333,20

WALI KOTA CIMAHI,



NSATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK BURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 3 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 3 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
I	<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>128.892.710.993,00</b>	<b>46.745.285.110,18</b>	<b>82.147.425.882,83</b>
1)	Pajak Hotel	19.580.880,00	97.904,40	19.482.975,60
2)	Pajak Restoran	40.929.897,00	204.649,49	40.725.247,52
3)	Pajak Reklame	916.986.235,00	157.981.948,00	759.004.287,00
4)	Pajak Hiburan dan Tontonan	-	-	-
5)	Pajak Penerangan Jalan Umum	-	-	-
6)	Pajak Genset Non PLN	-	-	-
7)	Pajak Parkir	433.000,00	18.866,00	414.134,00
8)	Pajak Air Tanah	886.660.956,00	206.535.379,83	680.125.576,18
9)	BPHTB	-	-	-
10)	PBB	127.028.120.025,00	46.380.446.362,47	80.647.673.662,54
II	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>2.271.651.667,00</b>	<b>1.510.951.900,38</b>	<b>760.699.766,63</b>
1)	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	105.001.074,00	102.404.149,00	2.596.925,00
2)	Izin Gangguan / Keramaian (HO)	51.898.211,00	51.898.211,00	-
3)	Izin Trayek	2.900.000,00	2.900.000,00	-
4)	Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00	-
5)	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	86.411.700,00	35.289.205,88	51.122.494,13
6)	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	1.992.752.682,00	1.303.245.519,50	689.507.162,50
7)	Laboratorium Lingkungan	31.548.000,00	14.074.815,00	17.473.185,00
8)	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	-	-	-
III	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>217.551.668,00</b>	<b>217.551.668,00</b>	<b>-</b>
IV	<b>Piutang Lain - Lain</b>	<b>9.567.340.661,47</b>	<b>2.298.845.270,88</b>	<b>7.268.495.390,59</b>
1)	Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat	6.662.518.251,00	671.030.309,52	5.991.487.941,48
3)	Piutang atas Pengelolaan Pasar Atas Baru	224.137.525,00	224.137.525,00	-
4)	Piutang Kontribusi Cimahi Mall	391.208.333,20	302.552.832,00	88.655.501,20
5)	Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSU Cibabat	197.129.997,09	197.129.997,09	-
6)	Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga PUPR	396.455.379,55	1.982.276,89	394.473.102,66
7)	Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga Disdik	89.463.875,63	447.319,38	89.016.556,25
8)	Piutang Retribusi Air Minum/BLUD Air Minum	1.582.507.300,00	901.445.411,00	681.061.889,00
9)	Piutang BLUD Puskesmas	23.920.000,00	119.600,00	23.800.400,00

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 3 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR**  
**DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	SEKRETARIAT DAERAH	314.955.891	314.955.891	-

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)



LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 3 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun (Rp)	Penyertaan modal tahun ini (Rp)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)	Sisa modal yang belum disertakan (Rp)	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini (Rp)	Jumlah modal (investasi) yang telah diterima kembali tahun ini (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
<b>PENYERTAAN MODAL PADA BANK JABAR</b>												
1	2002	Bank Jabar	Keputusan Walikota Cimahi No : 620/Kep.58A-Bapeda/2002			0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	0
2	2003	Bank Jabar	Perda No 31 Tahun 2003 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2003			1.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	0	30.636.295,06	0	0
3	2004	Bank Jabar	Perda No 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2004			6.000.000.000	5.000.000.000	11.000.000.000	0	285.352.031,00	0	0
4	2005	Bank Jabar	Perda No 7 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2005			11.000.000.000	5.000.000.000	16.000.000.000	0	1.368.617.094,00	0	0
5	2006	Bank Jabar	Perda No 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2006			16.000.000.000	2.500.000.000	18.500.000.000	0	2.796.520.753,00	0	0
6	2007	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			18.500.000.000	2.500.000.000	21.000.000.000	0	3.111.648.019,00	0	0

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun (Rp)	Penyertaan modal tahun ini (Rp)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)	Sisa modal yang belum disertakan (Rp)	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini (Rp)	Jumlah modal (investasi) yang telah diterima kembali tahun ini (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
7	2008	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar	104.000.000 Lbr Saham No. A: II-29/104000000 (Nilai Nominal Rp. 250,00 / Lembar Saham)		21.000.000.000	2.500.000.000	23.500.000.000	0	4.034.634.714,00	0	0
8	2009	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			23.500.000.000	2.500.000.000	26.000.000.000	0	5.447.918.440,00	0	0
9	2010	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			26.000.000.000	-	26.000.000.000	0	7.162.429.009,00	0	0
10	2011	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			26.000.000.000	-	26.000.000.000	0	6.206.035.964,00	0	0
11	2012	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			26.000.000.000	-	26.000.000.000	0	6.351.501.520,00	0	0
12	2013	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			26.000.000.000	-	26.000.000.000	0	7.120.225.840,00	0	0
13	2014	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			26.000.000.000	-	26.000.000.000	0	8.122.400.000,00	0	0
14	2015	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			26.000.000.000	-	26.000.000.000	0	7.446.600.000,00	0	0

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun (Rp)	Penyertaan modal tahun ini (Rp)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)	Sisa modal yang belum disertakan (Rp)	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini (Rp)	Jumlah modal (investasi) yang telah diterima kembali tahun ini (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
15	2016	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			26.000.000.000	-	26.000.000.000	0	8.819.200.000,00	0	0
16	2017	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			26.000.000.000	-	26.000.000.000	0	9.256.000.000,00	0	0
17	2018	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			26.000.000.000	-	26.000.000.000	0	9.391.200.000,00	0	0
18	2019	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			26.000.000.000	-	26.000.000.000	0	9.297.600.000,00	0	0
19	2020	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			26.000.000.000	-	26.000.000.000	0	9.778.080.000,00	0	0
20	2021	Bank Jabar	Perda No 8 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Kepada PT Bank Jabar			26.000.000.000	-	26.000.000.000	0	9.956.960.000,00	0	0
<b>PENYERTAAN MODAL PADA PD JATI MANDIRI</b>												
21	2006	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	0	27.000.000.000	27.000.000.000	60.000.000.000	-	-	0
22	2007	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	27.000.000.000	15.000.000.000	42.000.000.000	45.000.000.000	(83.543.057,0)	(83.543.057,00)	41.916.456.943,00
23	2008	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	42.000.000.000	0	42.000.000.000	45.000.000.000	(220.397.170,8)	(303.940.227,75)	41.696.059.772,25


No.	Tahun Penyeretaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyeretaan	Bentuk penyeretaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyeretaan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun (Rp)	Penyeretaan modal tahun ini (Rp)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)	Sisa modal yang belum disertakan (Rp)	Hasil penyeretaan modal (investasi) daerah tahun ini (Rp)	Jumlah modal (investasi) yang telah diterima kembali tahun ini (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
24	2009	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyeretaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	42.000.000.000	0	42.000.000.000	45.000.000.000	6.152.601.577,9	5.848.661.350,15	47.848.661.350,15
25	2010	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyeretaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	42.000.000.000	2.800.000.000	44.800.000.000	42.200.000.000	(1.650.347.990,2)	4.198.313.359,98	48.998.313.359,98
26	2011	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyeretaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	44.800.000.000	4.000.000.000	48.800.000.000	38.200.000.000	(2.372.838.314,5)	1.825.475.045,52	50.625.475.045,52
27	2012	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyeretaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	48.800.000.000	-	48.800.000.000	38.200.000.000	(2.566.721.070,5)	(741.246.025,00)	48.058.753.975,00
28	2013	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyeretaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	48.800.000.000	1.551.000.000	50.351.000.000	36.649.000.000	(593.066.137,0)	(1.334.312.162,00)	49.016.687.838,00
29	2014	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyeretaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	50.351.000.000	1.000.000.000	51.351.000.000	35.649.000.000	(1.340.915.277,0)	(2.675.227.439,00)	48.675.772.561,00
30	2015	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyeretaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	51.351.000.000	-	51.351.000.000	35.649.000.000	(2.361.730.281,0)	(5.036.957.720,00)	46.314.042.280,00

No.	Tahun Penyerahan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyerahan	Bentuk penyerahan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyerahan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun (Rp)	Penyerahan modal tahun ini (Rp)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)	Sisa modal yang belum disertakan (Rp)	Hasil penyerahan modal (investasi) daerah tahun ini (Rp)	Jumlah modal (investasi) yang telah diterima kembali tahun ini (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
31	2016	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyerahan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	51.351.000.000	-	51.351.000.000	35.649.000.000	(1.268.738.920,0)	(6.305.696.640,00)	45.045.303.360,00
32	2017	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyerahan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	51.351.000.000	-	51.351.000.000	35.649.000.000	(1.589.156.814,0)	(7.894.853.454,00)	43.456.146.546,00
33	2018	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyerahan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	51.351.000.000	-	51.351.000.000	35.649.000.000	(584.550.392,0)	(8.479.403.846,00)	42.871.596.154,00
34	2019	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyerahan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	51.351.000.000	-	51.351.000.000	35.649.000.000	(44.900.144,5)	(8.524.303.990,50)	42.826.696.009,50
35	2020	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyerahan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	51.351.000.000	-	51.351.000.000	35.649.000.000	(166.351.823,0)	(8.690.655.813,50)	42.660.344.186,50
36	2021	PD. Jati Mandiri	PERDA No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyerahan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.000.000.000	51.351.000.000	-	51.351.000.000	35.649.000.000	(166.351.823,0)	(8.857.007.636,50)	42.493.992.363,50
<b>DANA BERGULIR</b>												
37	2006	Dana Bergulir	Perda No 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2006	Pinjaman Modal Usaha Mikro	625.000.000,00			625.000.000,00	0	0	0	0
38	2007	Dana Bergulir	Perda No 10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2007	Pinjaman Modal Usaha Mikro	500.000.000,00			1.125.000.000,00	0	0	0	0

No.	Tahun Penyerahan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyerahan	Bentuk penyerahan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyerahan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun (Rp)	Penyerahan modal tahun ini (Rp)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)	Sisa modal yang belum disertakan (Rp)	Hasil penyerahan modal (investasi) daerah tahun ini (Rp)	Jumlah modal (investasi) yang telah diterima kembali tahun ini (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
39	2008	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		0	-	1.125.000.000,00	0	0	0	0
40	2009	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	0	0	0
41	2010	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	0	0	0
42	2011	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	0	0	0
43	2012	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	0	0	0
44	2013	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	0	0	0
45	2014	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	0	0	0
46	2015	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	151.479.128,00	768.908.592,00	356.091.408,00

No.	Tahun Penyerahan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyerahan	Bentuk penyerahan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyerahan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun (Rp)	Penyerahan modal tahun ini (Rp)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)	Sisa modal yang belum disertakan (Rp)	Hasil penyerahan modal (investasi) daerah tahun ini (Rp)	Jumlah modal (investasi) yang telah diterima kembali tahun ini (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
47	2016	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	151.845.676,00	768.908.592,00	356.091.408,00
48	2017	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	152.506.602,00	768.908.592,00	356.091.408,00
49	2018	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	153.458.664,00	768.908.592,00	356.091.408,00
50	2019	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	154.407.066,00	768.908.592,00	356.091.408,00
51	2020	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	154.663.422,00	768.908.592,00	356.091.408,00
52	2021	Dana Bergulir	Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro Di Kota Cimahi	Pinjaman Modal Usaha Mikro		1.125.000.000,00	-	1.125.000.000,00	0	155.219.667,00	768.908.592,00	356.091.408,00

WALI KOTA CIMAHI,

  
 NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
 pada tanggal 6 September 2022  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

  
 DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291  
 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)



LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

# **DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN**  
**ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	DINAS PENDIDIKAN	373.856.990.565,52	27.840.865.335,00	8.014.850.844,00	393.683.005.056,52
2	DINAS KESEHATAN	91.494.817.157,59	16.537.223.155,50	826.327.588,99	107.205.712.724,10
3	RSUD CIBABAT	424.134.037.986,52	15.446.411.662,00	3.940.000,00	439.576.509.648,52
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.432.735.814.162,82	281.491.548.419,00	133.362.481.785,00	1.580.864.880.796,82
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	297.802.538.131,12	23.224.394.424,00	569.917.774,00	320.457.014.781,12
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	18.047.500.449,34	620.650.793,00	-	18.668.151.242,34
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.573.782.646,00	656.343.450,00	71.026.000,00	2.159.100.096,00
8	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.486.703.437,10	342.064.150,00	-	5.828.767.587,10
9	DINAS TENAGA KERJA	4.485.257.100,00	207.426.198,00	2.377.166.198,00	2.315.517.100,00
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	36.007.935.025,09	526.215.430,00	248.370.430,00	36.285.780.025,09
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	70.815.332.881,76	5.912.341.883,00	1.132.566.445,00	75.595.108.319,76
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.177.502.448,00	555.518.400,00	33.360.000,00	9.699.660.848,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	113.668.816.708,00	4.228.178.700,00	80.741.000,00	117.816.254.408,00
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.881.044.820,00	4.932.637.109,00	253.801.300,00	15.559.880.629,00
15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	185.810.110.525,98	1.393.526.889,00	5.890.000,00	187.197.747.414,98
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.090.171.844,00	32.291.686.919,00	13.780.124.897,00	23.601.733.866,00
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	30.069.365.346,00	9.680.706.200,00	2.758.051.825,00	36.992.019.721,00
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.394.788.951,26	333.597.240,00	117.293.500,00	4.611.092.691,26
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.382.011.540,00	2.475.930.000,00	388.098.000,00	11.469.843.540,00
20	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	6.191.369.001,66	95.479.500,00	1.892.000,00	6.284.956.501,66
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.797.872.017,00	145.974.000,00	-	2.943.846.017,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	100.367.408.855,00	3.242.725.482,78	1.343.044.000,78	102.267.090.337,00
23	SEKRETARIAT DPRD	35.341.831.335,00	1.242.673.293,00	2.242.407.443,00	34.342.097.185,00
24	INSPEKTORAT KOTA	6.464.810.121,00	280.225.077,00	7.550.000,00	6.737.485.198,00
25	KECAMATAN CIMAHI UTARA	25.169.861.310,41	142.762.200,14	216.583.500,00	25.096.040.010,55
26	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	27.774.507.113,28	3.994.282.981,00	1.582.000,00	31.767.208.094,28
27	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	30.388.902.031,75	598.923.708,75	128.910.673,75	30.858.915.066,75
28	KANTOR KESATUAN BANGSA	2.985.666.783,00	18.165.263,00	-	3.003.832.046,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.362.396.750.297,20</b>	<b>438.458.477.866,17</b>	<b>167.965.977.209,52</b>	<b>3.632.889.250.951,85</b>

WALI KOTA CIMAHI,


  
 NGATIANA

Diundangkan di Cimahi  
 pada tanggal 6 September 2022  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,


  
 DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP**

## KOTA CIMAHI

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2020	Mutasi		Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	
1	DINAS PENDIDIKAN	373.856.990.565,52	27.840.865.335,00	8.014.850.844,00	393.683.005.056,52
2	DINAS KESEHATAN	91.494.817.157,59	16.537.223.155,50	826.327.588,99	107.205.712.724,10
3	RSUD CIBABAT	424.134.037.986,52	15.446.411.662,00	3.940.000,00	439.576.509.648,52
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.432.735.814.162,82	281.491.548.419,00	133.362.481.785,00	1.580.864.880.796,82
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	297.802.538.131,12	23.224.394.424,00	569.917.774,00	320.457.014.781,12
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	18.047.500.449,34	620.650.793,00		18.668.151.242,34
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.573.782.646,00	656.343.450,00	71.026.000,00	2.159.100.096,00
8	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.486.703.437,10	342.064.150,00		5.828.767.587,10
9	DINAS TENAGA KERJA	4.485.257.100,00	207.426.198,00	2.377.166.198,00	2.315.517.100,00
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	36.007.935.025,09	526.215.430,00	248.370.430,00	36.285.780.025,09
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	70.815.332.881,76	5.912.341.883,00	1.132.566.445,00	75.595.108.319,76
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.177.502.448,00	555.518.400,00	33.360.000,00	9.699.660.848,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	113.668.816.708,00	4.228.178.700,00	80.741.000,00	117.816.254.408,00
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	10.881.044.820,00	4.932.637.109,00	253.801.300,00	15.559.880.629,00
15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	185.810.110.525,98	1.393.526.889,00	5.890.000,00	187.197.747.414,98
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.090.171.844,00	32.291.686.919,00	13.780.124.897,00	23.601.733.866,00
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	30.069.365.346,00	9.680.706.200,00	2.758.051.825,00	36.992.019.721,00
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.394.788.951,26	333.597.240,00	117.293.500,00	4.611.092.691,26
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.382.011.540,00	2.475.930.000,00	388.098.000,00	11.469.843.540,00
20	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	6.191.369.001,66	95.479.500,00	1.892.000,00	6.284.956.501,66
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2.797.872.017,00	145.974.000,00	-	2.943.846.017,00
22	SEKRETARIAT DAERAH	100.367.408.855,00	3.242.725.482,78	1.343.044.000,78	102.267.090.337,00
23	SEKRETARIAT DPRD	35.341.831.335,00	1.242.673.293,00	2.242.407.443,00	34.342.097.185,00
24	INSPEKTORAT KOTA	6.464.810.121,00	280.225.077,00	7.550.000,00	6.737.485.198,00
25	KECAMATAN CIMAHI UTARA	25.169.861.310,41	142.762.200,14	216.583.500,00	25.096.040.010,55
26	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	27.774.507.113,28	3.994.282.981,00	1.582.000,00	31.767.208.094,28
27	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	30.388.902.031,75	598.923.708,75	128.910.673,75	30.858.915.066,75
28	KANTOR KESATUAN BANGSA	2.985.666.783,00	18.165.263,00	-	3.003.832.046,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.362.396.750.294,20</b>	<b>438.458.477.862,17</b>	<b>167.965.977.204,52</b>	<b>3.632.889.250.951,85</b>

WALI KOTA CIMAHI,

  
 NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN**

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**  
**PER 31 DESEMBER 2021**

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/P ENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	DINAS PENDIDIKAN	5.802.795.214		6.762.417.420								12.565.212.634
2	DINAS KESEHATAN	243.707.750										243.707.750
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	45.267.117.174		47.779.735.500	86.520.635.975							179.567.488.649
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	258.145.030										258.145.030
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	49.225.000										49.225.000
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	305.808.750		15.158.224.050								15.464.032.800
7	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3.848.565.175								3.848.565.175
	<b>TOTAL</b>	<b>51.926.798.918</b>	<b>-</b>	<b>73.548.942.145</b>	<b>86.520.635.975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211.996.377.038</b>

WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	DINAS PENDIDIKAN	8.162.530.867	221.131.150	265.097.950	8.118.564.067
2	DINAS KESEHATAN	412.152.390	-	279.086.251	133.066.139
3	RSUD CIBABAT	66.122.000	-	33.061.000	33.061.000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.179.274.750	185.926.100	314.837.775	4.050.363.075
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	730.764.750	-	408.674.875	322.089.875
6	SATPOL PP DAMKAR	37.400.000	-	5.000.000	32.400.000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	177.000.000	-	177.000.000	-
8	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
9	DINAS TENAGA KERJA	685.370.620	201.950.000	539.368.120	347.952.500
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	123.350.000	68.500.000	182.900.000	8.950.000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.475.341.120	865.579.350	21.670.000	5.319.250.470
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	380.224.018	-	318.230.781	61.993.238
13	DINAS PERHUBUNGAN	202.020.550	-	75.000.000	127.020.550
14	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	393.913.796	-	46.622.421	347.291.375
15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	485.564.402	144.160.000	231.069.125	398.655.277
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	616.126.050	453.968.900	330.663.225	739.431.725
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	431.822.500	-	431.822.500	-
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	303.575.000	99.705.000	377.251.250	26.028.750
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	138.010.500	-	56.626.750	81.383.750
20	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	1.093.982.080	133.552.100	459.969.275	767.564.905
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	136.341.500	-	136.341.500	-
22	DPRD	-	-	-	-
23	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DAERAH	897.624.340	137.233.000	340.773.340	694.084.000
25	SEKRETARIAT DPRD	92.791.500	-	36.708.250	56.083.250
26	INSPEKTORAT KOTA	347.100.000	-	347.100.000	-
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	89.929.624	-	-	89.929.624
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	111.834.801	24.992.000	31.904.875	104.921.926
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	106.394.518	-	9.831.250	96.563.268
30	KANTOR KESATUAN BANGSA	14.842.000	47.492.500	11.873.125	50.461.375
	<b>Jumlah</b>	<b>24.891.403.677</b>	<b>2.584.190.100</b>	<b>5.468.483.637</b>	<b>22.007.110.140</b>


WALI KOTA CIMAHI,



NGATTYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)



LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH**

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI  
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

(dalam rupiah)

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst								
<b>Jumlah</b>								

**NIHIL**

WALI KOTA CIMAHI,



NGATTIANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

# **DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	40.349.191,00	48.276.595,00	40.349.191,00	48.276.595,00
2	Bagian Lancar Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat	161.298.946,00	129.039.156,47	161.298.946,00	129.039.156,47
3	Utang Bunga Dana Talangan RSUD Cibabat		-	-	-
4	Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00	855.508.220,00	855.508.220,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-
6	Utang Belanja	19.004.747.924,00	4.141.620.812,00	19.004.747.924,00	4.141.620.812,00
7	Utang Lain-lain	25.180.855.366,00	13.622.915.723,00	25.180.855.366,00	13.622.915.723,00
	<b>Jumlah Utang Jangka Pendek</b>	<b>45.242.759.647,00</b>	<b>18.797.360.506,47</b>	<b>45.242.759.647,00</b>	<b>18.797.360.506,47</b>

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

# **DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi	Tanggal Penarikan Pinjaman	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
					Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
<b>Pinjaman Bank Dunia</b>							
1	International Bank For Recronstruction And Development	Perjanjian Penerusan Pinjaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat No. SLA-1208/DP3/2007	18 April 2007	3.422.032.878,70		855.508.220,00	2.566.524.658,70
<b>Jumlah</b>				<b>3.422.032.878,70</b>	<b>-</b>	<b>855.508.220,00</b>	<b>2.566.524.658,70</b>

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

---

**DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN  
SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM  
TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 3 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN DIANGGARKAN KEMBALI**  
**DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Jumlah			%	Jumlah Yang Masih Harus Dianggarkan Kembali Pada APBD Berikutnya	Dasar Hukum
			Anggaran Perubahan 2021	Realisasi	Tambah/Kurang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>NIHIL</b>					
Jumlah								

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN  
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)



LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

---

# **IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH**

LAMPIRAN XX.1 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH**  
**PER 31 DESEMBER 2021**

No	Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban JK Pendek	Kewajiban JK Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Modal Saham	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
				5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17=12+13+14+15+16	18	19=17x18
1	PD. JATI MANDIRI (Perdagangan, Informatika, Telematika, Air Bersih, Perumahan, dan jenis usaha lainnya) PERDA KOTA CIMAHI Nomor : 10 Tahun 2006	Unaudited	Non Aktif	342.765.000,00	46.786.468.676,00		47.129.233.676,00	4.635.241.312,50		4.635.241.313	51.351.000.000,00			-8.857.007.636,50		42.493.992.363,50		
	<b>Total Seluruh Bidang Industri</b>			<b>342.765.000,00</b>	<b>46.786.468.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.129.233.676,00</b>	<b>4.635.241.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635.241.312,50</b>	<b>51.351.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.857.007.636,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.493.992.363,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)

LAMPIRAN XX.2 : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR : 3 TAHUN 2022  
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

**KOTA CIMAHI**  
**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) PERUSAHAAN DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

No	Perusahaan Daerah	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba / (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba / (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PD. JATI MANDIRI ( Perdagangan, Informatika, Telematika, Air Bersih, Perumahan, dan jenis usaha lainnya ) PERDA KOTA CIMAHI Nomor : 10 Tahun 2006	Unaudited		0,00	166.351.823,00	(166.351.823,00)	-	-	(166.351.823,00)
	<b>Total Seluruh Bidang Industri</b>			<b>0,00</b>	<b>166.351.823,00</b>	<b>(166.351.823,00)</b>	-	-	<b>(166.351.823,00)</b>

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN  
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 291  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (4/136/2022)



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN ANGGARAN 2022